



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang. Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025–2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana . . .

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten untuk 20 (dua puluh) tahun.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau Daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

13. Strategi . . .

13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
14. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Sasaran Pokok adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau atau kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

BAB II

RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPN;
 - b. RPJPD Provinsi Banten; dan
 - c. RTRW.
- (2) RPJPD Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB . . .

BAB III SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat permasalahan dan isu-isu strategis;
 - d. bab IV memuat Visi dan Misi Daerah;
 - e. bab V memuat Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. bab VI memuat penutup.
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah;
 - b. konsistensi antara RPJPD dan RPJPN dan RTRW; dan
 - c. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Daerah.

BAB . . .

BAB V PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal RPJPD periode tahun berikutnya belum ditetapkan maka Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2046 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Oktober 2024

BUPATI SERANG,



Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 Oktober 2024

PL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



RUDI SUHARTANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN; (8, 48/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025–2045

I. UMUM

Sejarah Kabupaten Serang tidak terlepas daripada sejarah Banten pada umumnya, karena Serang semula merupakan bagian dari wilayah Kerajaan /Kesultanan Banten yang berdiri pada abad ke XVI dan pusat pemerintahannya terletak di Daerah Serang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Serang No.17 Tahun 1985 tentang Hari Jadi Kabupaten Serang, tanggal 8 Oktober Tahun 1526 M ditetapkan sebagai hari jadi kabupaten ini. Semenjak terbentuknya hingga saat ini, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang beserta segenap komponen masyarakat tentu saja telah melahirkan berbagai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan arah dan kebijakan pembangunan berlangsung sejak era reformasi berupa pengurangan peran pemerintah pusat dan peningkatan peran pemerintah daerah baik dalam hal perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring berlakunya Undang-undang tersebut, setiap pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantages*) wilayahnya sehingga bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantages*). Transformasi Keunggulan komparatif wilayah tersebut selanjutnya harus dapat diarahkan dan dipadukan, serta dikembangkan secara terencana, sehingga tercapai pengembangan wilayah yang optimal, yang tercermin dari luasnya kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya insentif ekonomi yang menguntungkan bagi berbagai pelaku ekonomi yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desain besar yang mengatur perencanaan dari tingkat pusat sampai daerah diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan setiap pemerintah daerah menyusun

rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai dokumen perencanaan yang diamanatkan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan yang substansinya memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Seiring dengan akan berakhirnya masa berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 maka diperlukan serangkaian tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Serang periode berikutnya yaitu Tahun 2025-2045. Salah satu tahapan tersebut adalah penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Serang. Sebagaimana bagian dari satu kesatuan perencanaan pembangunan jangka panjang, RPJPD Kabupaten Serang harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten.

Untuk mencapai sasaran Indonesia Emas 2045, diperlukan kontribusi pembangunan tingkat lokal dan nasional secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah. Untuk itu, dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keselarasan yang harus diwujudkan tidak saja dalam hal periodisasi tahapan pembangunan tapi juga dalam keselarasan perwujudan sasaran visi, misi atau pun arah kebijakan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang

dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Penyusunannya dengan memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis, menyesuaikan dinamika perubahan, dan berorientasi pada tindakan antisipatif melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas bawah (*top-down*), dan bawah atas (*bottom-up*) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. RPJPD disusun melalui proses partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan, maka dari itu perencanaan yang disusun harus merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan melaksanakan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran tujuan pembangunan di Kabupaten Serang dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah dan sasaran pokok untuk masa 20 (dua puluh) tahun kedepan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2025-2045, serta sebagai dokumen komitmen Pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana sinergitas KLHS RPJPD ke dokumen RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 123

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah Kabupaten Serang tidak terlepas daripada sejarah Banten pada umumnya, karena Serang semula merupakan bagian dari wilayah Kerajaan /Kesultanan Banten yang berdiri pada Abad ke XVI dan Pusat Pemerintahannya terletak di Daerah Serang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Serang No.17 Tahun 1985 tentang Hari Jadi Kabupaten Serang, tanggal 8 Oktober Tahun 1526 M ditetapkan sebagai hari jadi kabupaten ini. Semenjak terbentuknya hingga saat ini, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang beserta segenap komponen masyarakat tentu saja telah melahirkan berbagai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari perencanaan pembangunan yang sebelumnya telah disusun. Beberapa rencana pembangunan yang disusun untuk memberikan arah pembangunan daerah berdimensi waktu jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Semua rencana pembangunan tersebut telah disusun dan diaplikasikan hingga memberikan hasil yang cukup signifikan bagi perkembangan dan kemajuan daerah.

Perubahan arah dan kebijakan pembangunan berlangsung sejak era reformasi, yaitu berupa pengurangan peran Pemerintah Pusat dan peningkatan peran Pemerintah Daerah baik dalam hal perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Seiring berlakunya Undang-undang tersebut, setiap Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantages*) wilayahnya sehingga

bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantages*). Transformasi Keunggulan komparatif wilayah tersebut selanjutnya harus dapat diarahkan dan dipadukan, serta dikembangkan secara terencana, sehingga tercapai pengembangan wilayah yang optimal, yang tercermin dari luasnya kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya insentif ekonomi yang menguntungkan bagi berbagai pelaku ekonomi yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desain besar yang mengatur perencanaan dari tingkat Pusat sampai Daerah diatur dalam regulasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai dokumen perencanaan yang diamanatkan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan yang substansinya memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan dalam kurun waktu 20 tahun. Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Serang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026. Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Serang tersebut lebih diarahkan pada pengembangan perekonomian, khususnya pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama 2 (dua) periode RPJMD dari awal periode

perencanaan (2015) hingga tahun 2026 terlihat dari pencapaian indikator makro pembangunan.

Dari 5 (lima) indikator hanya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang pertumbuhannya hanya sebesar 99,02% dari target yang ditetapkan sedangkan 4 (empat) indikator lainnya melebihi target yang ditentukan seperti IPM tumbuh sebesar 104,86%, PDRB ADHB per Kapita tumbuh sebesar 127,80%, Tingkat Kemiskinan turun sebesar 102,55%, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 128,31%. Pencapaian indikator makro pembangunan di Kabupaten Serang keseluruhan mencapai 87,50% dengan kategori “Tinggi. Seiring dengan akan berakhirnya masa berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 maka diperlukan serangkaian tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Serang periode berikutnya yaitu Tahun 2025-2045. Salah satu tahapan tersebut adalah penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Serang.

Sebagaimana bagian dari satu kesatuan perencanaan pembangunan jangka panjang, RPJPD Kabupaten Serang harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 600.1/176/SJ dan No. 1 Tahun 2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 serta Surat Edaran Gubernur Banten No. 000.7.2.1/278/BAPP/2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045. Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Rencana Jangka Pajang Daerah Tahun 2025-2045 menyebutkan bahwa Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan demi terwujudnya tujuan bernegara sebagai tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yakni kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia. Tujuan tersebut dicerminkan dalam kondisi ideal Indonesia Emas 2045 sebagai momentum seratus tahun kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Untuk mencapai sasaran Inonesia Emas 2045, diperlukan kontribusi pembangunan tingkat lokal dan nasional secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah. Untuk itu, dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keselarasan yang harus diwujudkan tidak saja dalam hal periodisasi tahapan pembangunan tapi juga dalam keselarasan perwujudan sasaran visi, misi atau pun arah kebijakan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Penyusunannya dengan memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis, menyesuaikan dinamika perubahan, dan berorientasi pada tindakan antisipatif melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas bawah (*top-down*), dan bawah atas (*bottom-up*) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Selain itu, RPJPD Kabupaten Serang memperhatikan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 600.2.1/3674/SJ dan No. 2 Tahun 2024 Tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dalam penyusunan sasarannya. RPJPD disusun melalui proses partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan, maka dari itu perencanaan yang disusun harus merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan melaksanakan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran tujuan pembangunan di Kabupaten Serang dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah dan sasaran pokok untuk masa 20 tahun kedepan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2025-2045, serta sebagai dokumen komitmen Pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana sinergitas KLHS RPJPD ke dokumen RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur RPJPD Kabupaten Serang di era desentralisasi ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang – Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang

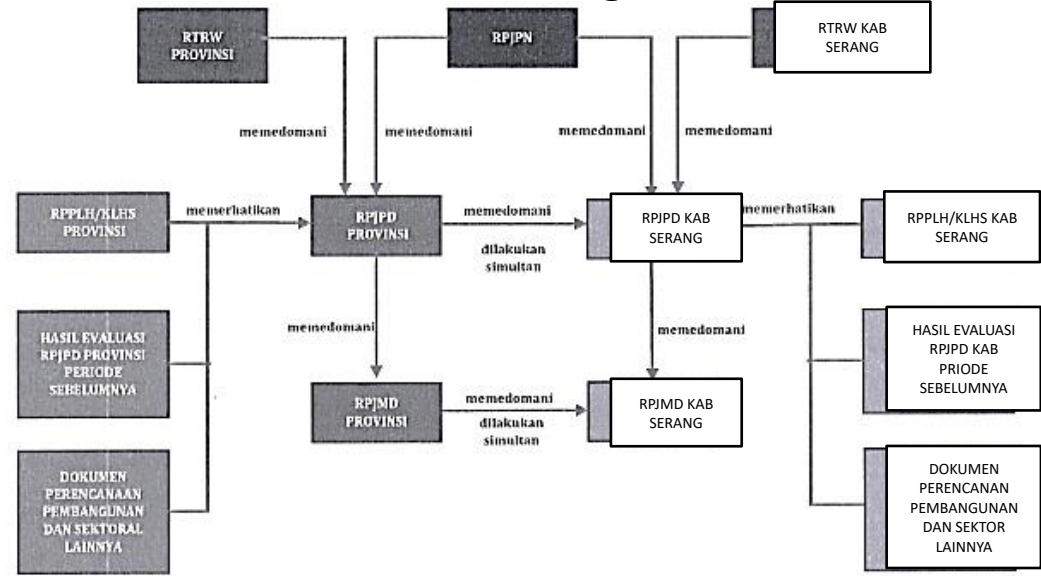
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 penyusunannya memperhatikan keselarasan dengan dan sekaligus mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Banten. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keselarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Serang dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Nasional dan Provinsi Banten. Penyusunan RPJPD Kabupaten Serang juga memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Banten dan RTRW Kabupaten Serang. Dengan demikian diharapkan terdapat keselarasan dalam pemanfaatan struktur dan pola ruang dan dapat dihindari adanya konflik pemanfaatan ruang wilayah. Secara skematik, pola hubungan antara RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 dengan dokumen Rencana Pembangunan lainnya sebagaimana tergambar dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Serang Dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Lain



1.4 Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud (1) memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Serang untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, kebijakan dan sasaran pokok; (2) agar tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk setiap jangka waktu lima tahunan secara berkelanjutan; dan (3) turut mewujudkan cita-cita Indonesia EMAS Tahun 2045.

RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 bertujuan:

1. Merumuskan visi, misi, arah pembangunan, kebijakan dan sasaran pokok Kabupaten Serang dalam jangka panjang 20 tahun ke depan;
2. Merumuskan kebijakan, arah dan sasaran pokok pembangunan;
3. Mewujudkan rencana pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten sekitar yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Serang;
4. Mendorong terciptanya keterpaduan, konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan lima tahunan;
5. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran program kegiatan yang akan dilaksanakan Kepala Daerah Kabupaten Serang.

1.5 Sistematika

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan RPJPD, dasar hukum, hubungan antar dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi Sejarah Kabupaten Serang serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berisi: (1) Aspek Geografi dan Demografi, mencakup: karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, gambaran kualitas lingkungan hidup, wilayah rawan bencana dan ancaman perubahan iklim, serta demografi daerah; (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (3) Aspek Daya Saing Daerah; (4) Aspek Pelayanan Umum; (5) Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025; (6) Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik menjelaskan dan menyajikan proyeksi pertumbuhan penduduk untuk 20 tahun yang akan datang serta memproyeksikan aspek-aspek pertumbuhan penduduk terkait kebutuhan sarana prasarana dasar pendukung keberlangsungan hidup; dan (7) Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang mempengaruhi perkembangan wilayah, hubungan antar dokumen RTRW dan dokumen rencana sektoral lainnya, terkait keselarasan indikasi kinerja pembangunan terhadap sasaran pokok pembangunan daerah, pertumbuhan industri, pariwisata dan kesesuaian antar dokumen rencana induk pengembangan inovasi daerah dan rencana wilayah perbatasan sekitar Kabupaten Serang.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS, analisis yang dilakukan meliputi perumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Serang, identifikasi permasalahan untuk penentuan program pembangunan Kabupaten Serang, identifikasi permasalahan untuk pemenuhan

penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Serang, penelaahan dokumen RTRW, dokumen sektoral dan dokumen perencanaan Pembangunan wilayah perbatasan sekitar Kabupaten Serang, serta penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, RPJPN dan RPJPD Provinsi Banten. Berdasarkan gambaran umum daerah, proyeksi demografi dan dokumen sektoral. Hal-hal tersebut yang akan menentukan kinerja pembangunan di masa mendatang, yang meliputi: (1) Permasalahan pembangunan, (2) Isu strategis dan (3) Potensi Daerah.

BAB IV. VISI, DAN MISI DAERAH, menjelaskan Visi, Misi, Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 berdasarkan permasalahan dan isu strategis sampai akhir masa RPJPD Kabupaten Serang yang dimaktubkan kedalam rangkaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Serang pada setiap priode kurun waktu 2025-2045 sehingga tercapainya Visi Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang 2025-2045.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK, menggambarkan kesesuaian kebijakan dan sasaran pokok dengan visi misi daerah yang di jabarkan dalam pentahapan setiap priode RPJMD 5 tahunan menjadi panduan urusan prioritas yang harus diselesaikan serta menggambarkan sasaran pokok kuantifikasi pada akhir priode tahun ke-20.

BAB VI. PENUTUP, menjelaskan kesimpulan serta ketentuan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari Upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten, yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Lokasi Kabupaten Serang cukup strategis karena dilalui jalan tol Jakarta - Merak yang merupakan akses utama menuju pulau Sumatera melalui Pelabuhan penyeberangan Merak. Selain sebagai transit pelabuhan perhubungan darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Pelabuhan Merak juga merupakan daerah penyangga Ibu Kota Negara. Secara geografis Kabupaten Serang terletak pada koordinat 5°50' - 6°21' Lintang Selatan dan 105° 0' – 106° 22' Bujur Timur. Dengan luas wilayah Kabupaten Serang yaitu seluas 1,467,35 km².

Kabupaten Serang tentunya tidak terlepas dari pada sejarah Banten pada umumnya, merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Sunda yang selanjutnya didirikan Kesultanan Banten Sebagai Cikal bakal Berdirinya Kabupaten Serang, Banten merupakan wilayah Penyebaran Agama Islam dan juga sebagai pusat perdagangan internasional, Bidang Politik, Perekonomian, Pelayaran maupun Kebudayaan berkembang maju dengan pesat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Serang No.17 Tahun 1985 tentang Hari Jadi Kabupaten Serang, Penetapan Hari Jadi Pasal 2 Yaitu Hari Jadi Kabupaten Serang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober Tahun 1526 M.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi menggambarkan aspek kondisi geografis wilayah pemerintah daerah Kabupaten Serang. Aspek geografi dari suatu daerah juga memiliki peran penting dalam membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tersebut. Memahami karakteristik geografis suatu daerah penting dalam perencanaan pembangunan, manajemen sumber daya alam, dan penanganan masalah lingkungan. Aspek demografi dari suatu daerah mengacu pada karakteristik penduduk di wilayah tersebut. mencakup berbagai variabel yang mempengaruhi ukuran, komposisi, dan distribusi populasi. Pemahaman demografi pada suatu daerah penting dalam perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan pengembangan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.

2.1.1 Aspek Geografi Kabupaten Serang

2.1.1.1 Kondisi Geografi Kabupaten Serang

A. Karakteristik dan Potensi Wilayah

Secara astronomis Kabupaten Serang terletak diantara 5°50' dan 6°21' Lintang Selatan, serta 105°0' dan 106°22' Bujur Timur dan memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda dan Laut Jawa. Berdasarkan letak geografis Kabupaten Serang yang berbatasan dengan wilayah perairan Selat Sunda dan Laut Jawa merupakan posisi yang strategis dalam konteks pelayaran dan perdagangan internasional. Kawasan perairan Selat Sunda dan Laut Jawa merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Jalur ALKI I difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia, dan sebaliknya serta dari Selat Singapura melalui Laut Natuna atau sebaliknya.

Sementara itu dalam simpul jaringan transportasi Trans Jawa – Pulau Sumatera, Kabupaten Serang merupakan pintu gerbang atau transit perhubungan darat antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang dilalui Jalan Tol Tangerang-Merak yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa serta dilalui oleh jalur kereta api. Selain itu dengan posisinya yang hanya berjarak ± 70 km dari Kota Jakarta, Kabupaten Serang merupakan salah satu daerah penyangga kawasan metropolitan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), yang berpotensi menjadi daerah pemasok kebutuhan kawasan metropolitan tersebut. Dari sisi kegiatan ekonomi, Kabupaten Serang memiliki beberapa sektor kegiatan yang berkembang dan menjadi pemasok kebutuhan untuk wilayah dalam dan luar negeri. Kegiatan yang berkembang tersebut antara kegiatan industri pengolahan, pertanian dan pariwisata.

B. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Serang merupakan salah satu dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten dengan luas wilayah kurang lebih 1.469,908 km². Luas wilayah administrasi kecamatan terbesar adalah Kecamatan Cinangka dengan luas sebesar 123,09 km² dan luas wilayah administrasi kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bandung yang memiliki luas wilayah sebesar 25,79 km². Untuk lebih jelasnya, luas wilayah administrasi per kecamatan di Kabupaten Serang dapat dilihat pada **Tabel**

2.1.1 Luas Wilayah Kabupaten Serang.

Tabel. 2.1.1
Luas Wilayah Kabupaten Serang

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Desa
1.	Cinangka	Cinangka	123,09	14
2.	Padarincang	Padarincang	97,64	14
3.	Ciomas	Sukadana	56,61	11
4.	Pabuaran	Pasanggrahan	40,08	8
5.	Gunungsari	Gunungsari	53,44	7
6.	Baros	Baros	36,07	14
7.	Petir	Mekarbaru	49,22	15
8.	Tunjung Teja	Tunjung Jaya	42,40	9
9.	Cikeusal	Cikeusal	56,29	17
10.	Pamarayan	Pamarayan	45,02	10
11.	Bandung	Bandung	25,79	8
12.	Jawilan	Jawilan	44,95	9
13.	Kopo	Kopo	36,51	10
14.	Cikande	Cikande	49,05	13
15.	Kibin	Ciagel	30,58	9
16.	Kragilan	Kragilan	38,05	12
17.	Waringinkurung		46,33	11
18.	Mancak	Labuan	97,94	14
19.	Anyar	Anyar	67,90	12
20.	Bojonegara	Bojonegara	36,97	11
21.	Pulo Ampel	Sumuranja	45,99	9
22.	Kramatwatu	Kramatwatu	56,56	15
23.	Ciruas	Citerep	33,62	15
24.	Pontang	Pontang	60,39	11
25.	Lebak Wangi	Teras Bendung	34,74	10
26.	Carenang	Panenjoan	29,07	8
27.	Binuang	Binuang	28,72	7
28.	Tirtayasa	Tirtayasa	59,70	14
29.	Tanara	Cerukcuk	47,21	9
Jumlah			1.469,908	326

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kabupaten Serang

Secara administratif, Kabupaten Serang terdiri atas 29 kecamatan yang melingkupi 326 desa dengan ibukota Kabupaten berada di Ciruas. Wilayah Kabupaten Serang berbatasan dengan beberapa wilayah Kabupaten/Kota lainnya, yaitu:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Serang
- Sebelah Timur : Kabupaten Tangerang
- Sebelah : Kabupaten Lebak dan Kabupaten
Selatan Pandeglang
- Sebelah Barat : Kota Cilegon dan Selat Sunda

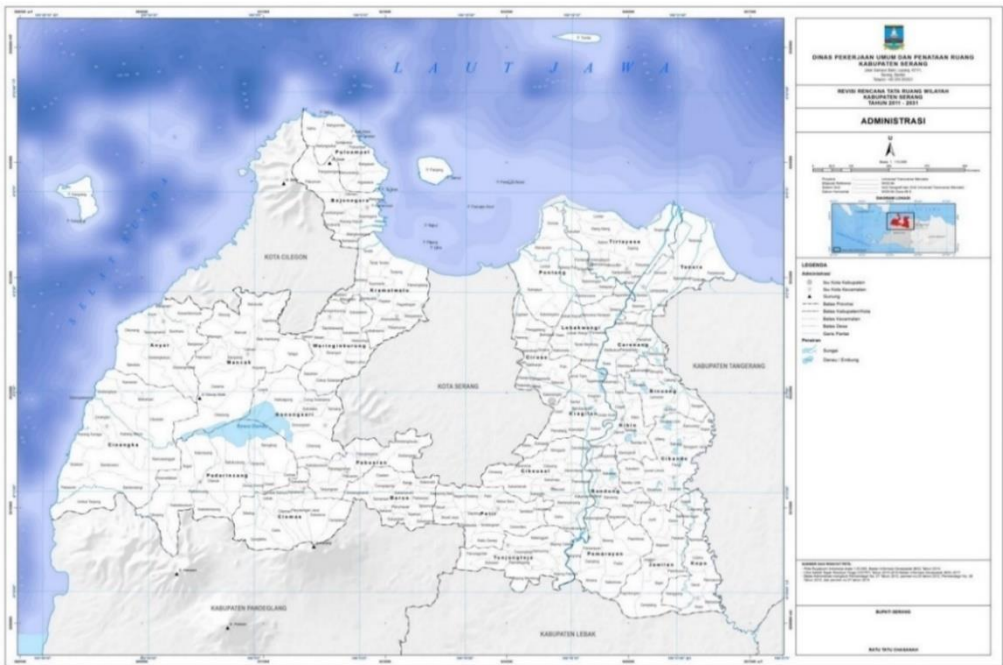
Untuk lebih jelasnya, Peta Orientasi dan Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Serang dapat dilihat pada **Gambar 2.1.1** dan **Gambar 2.1.2**.

Gambar. 2.1.1
Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Serang



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor
10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Serang
Tahun 2011-2031, 2023

Gambar. 2.1. 2
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Serang



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10
Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Serang
Tahun 2011-2031, 2023

C. Kondisi Topografi

Secara topografi wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian antara 0 - 1.778 m dari permukaan laut (mdpl) dan pada umumnya tergolong

pada kelas topografi lahan dataran dan bergelombang, sehingga secara topografi tidak akan sulit untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Ketinggian tertinggi di wilayah Kabupaten Serang terletak di Puncak Gunung Karang yang terletak di sebelah selatan perbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.

Satuan dataran rendah tersebar di seluruh wilayah dengan penyebaran paling besar di pantai utara dan sebaran terbatas di pantai barat serta sepanjang aliran sungai besar seperti Sungai Ciujung dan Cidurian. Secara administrasi penyebaran dataran rendah ini meliputi wilayah kecamatan Tirtayasa, Pontang, Carenang, Ciruas, Kasemen, dan Kramatwatu. Sedangkan Kecamatan Cikeusal, Pamarayan, Kragilan, Anyar, Cinangka, Serang hanya sebagian wilayahnya yang termasuk dalam satuan dataran rendah.

Penyebaran wilayah perbukitan berada di wilayah bagian barat yang menyebar dari utara ke selatan dengan ketinggian sekitar 100 m. Sedangkan satuan pegunungan menempati bagian selatan dan ujung utara sebelah barat. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Serang didominasi oleh ketinggian kurang dari 500 mdpl yang meliputi kurang lebih 97,5% dari luas wilayah dan tersebar pada semua wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Ciomas.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Serang memiliki ketinggian yang bervariasi, namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Serang berada pada area dataran rendah.

Tabel. 2.1.2
Ketinggian Wilayah Kabupaten Serang

No.	Ketinggian	Luasan	
		Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	0-59 mdpl	87.511,44	59,45
2.	59-187 mdpl	34.892,40	23,70
3.	187-393 mdpl	17.025,40	11,57
4.	393-677 mdpl	6.024,16	4,09
5.	677-1040 mdpl	1.210,15	0,82
6.	1040-1722 mdpl	550,45	0,37
Jumlah		147.214,00	100,00

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10
Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang
Tahun 2011-2031, 2023

Kemiringan lereng merupakan tingkat kemiringan yang diperoleh dari beda tinggi permukaan tanah pada jarak antara dua buah titik. Pentingnya kemiringan lereng ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan penggunaan lahan, baik ditinjau dari kendala lingkungan maupun dampaknya.

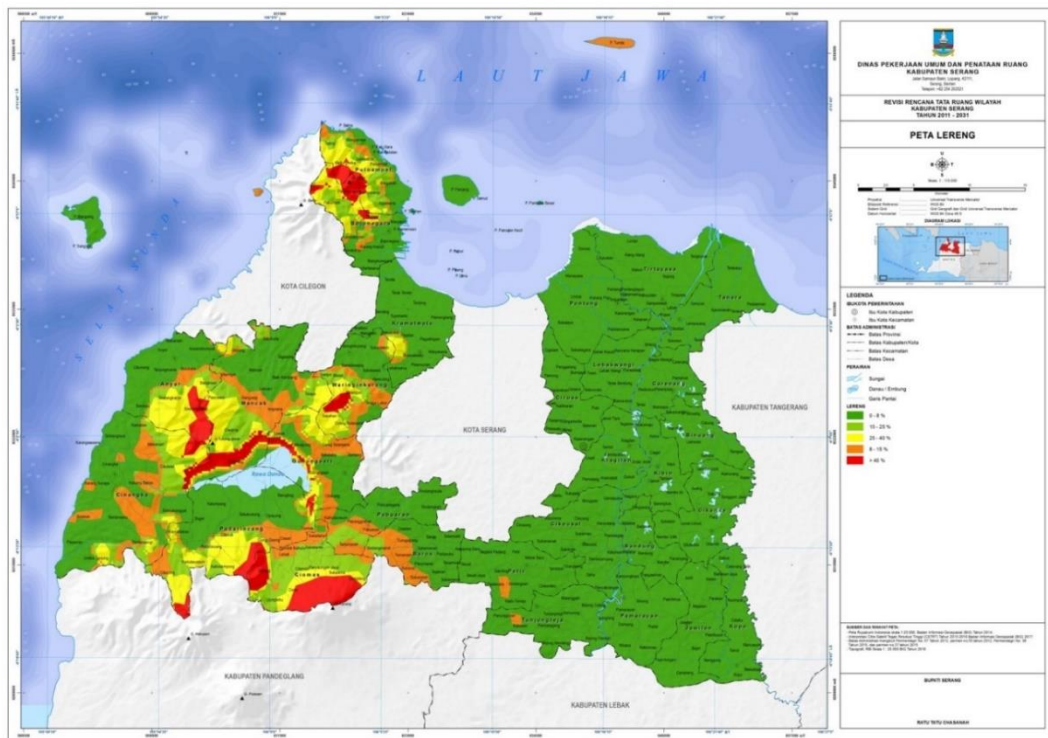
Kemiringan tanah (lereng) selain mempengaruhi bentuk wilayah, juga akan mempengaruhi tinggi perkembangan erosi. Jika dilihat dari kelas lerengnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Serang merupakan wilayah dengan kelas lereng 0-2% dengan luas wilayah sebesar 87.511,14 ha atau lebih dari 59% luas total wilayah Kabupaten Serang. Untuk lebih jelasnya mengenai kelerengan di Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel. 2.1.3
Kemiringan Lahan Kabupaten Serang

No.	Kelas Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	0 - 2%	87.511,14	59,64
2.	2 - 15%	37.939,27	25,86
3.	15 - 25%	10.002,89	6,82
4.	25 - 40%	8.876,42	6,05
5.	>40%	2.405,29	1,64
Jumlah		146.735,00	100,00

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10
Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang
Tahun 2011-2031, 2023

Gambar. 2.1. 3
Peta Kelas Lereng Kabupaten Serang



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10
Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang
Tahun 2011-2031, 2023

D. Kondisi Geologi

Secara umum, diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Serang terdiri dari batuan api dengan endapan permukaan yang sebagian besar berada di pantai utara dan bagian timur Kabupaten Serang. Jenis batuan dan struktur geologi tersebut dibagi dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1) Batuan Gunung Api

Batuan Gunung Api terbagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu:

A. Kelompok Batuan Vulkanik yang Relatif Keras. Kelompok-kelompok batuan ini adalah Breksi dan Lava Danau, Breksi dan Lava Gunung Aseupan, Lava Gunung Parakasak, Breksi dan Lava Gunung Karang. Kelompok Batuan Vulkanik yang Relatif Kurang Keras. Batuan ini merupakan hasil aliran fluvio-vulkanik, jatuhan bom dan abu vulkanik. Kelompok batuan ini adalah Tufa Danau. Tufa Danau sebagian besar merupakan hasil jatuhan abu vulkanik yang jauh dari pusat erupsinya diduga berada di Rawa Danau.

2) Batuan Terobosan

Batuan terobosan memiliki batuan yang sangat keras dibanding dengan batuan sekitarnya. Sebagian besar terdapat di Gunung Pinang.

Jenis batuan terobosan Gunung Pinang berpola hampir membulat, lereng curam hingga miring dengan bagian timurnya lebih curam dan pola alirannya radial. Jenis batuan yang ada adalah bassalt berwarna kelabu kehitaman hingga hitam, halus, tekstur diabasik, bagian luarnya berongga (veskuler).

3) Endapan Permukaan

Endapan permukaan merupakan endapan aluvial sungai yang terdiri dari bongkahan, kerakal, kerikil, pasir, lempung dan lumpur. Endapan ini penyebarannya luas terutama di timur daerah ini, di lembah aliran Sungai Ciujung dan Cidurian. Pada lembah kedua sungai besar ini, endapan ini terdiri dari rombakan batuan sedimen yang berasal dari hulu (di selatan) daerah ini.

Di bagian timur hingga timur laut daerah terdapat endapan rawa pada daerah-daerah cekungan morfologi landai hingga datar yang memiliki air permukaan buruk dan pada daerah akumulasi limpasan banjir. Endapan ini terdiri dari pasir halus, lanau, lempung, lumpur organik dan gambut, sedangkan endapan rawa yang terdapat di Danau Rawa.

4) Struktur Geologi

Struktur geologi ini merupakan struktur sesar yang memiliki ciri penampakan berupa kelurusan lembah dan sungai, kelurusan gawir sesar, ketidak-menerusan batuan vulkanik serta pola paralel dan rectanguler sungai. Kondisi dan struktur geologi memiliki pengaruh tidak langsung pada pemanfaatan lahan. Komposisi jenis tanah tersebut umumnya dapat memberikan gambaran tingkat kepekaan tanah terhadap erosi, stabilitas kelerengan, kondisi drainase dan daya dukung.

Jika dilihat secara litologi, maka jenis batuan yang paling mendominasi di Kabupaten Serang adalah tuf, tuf batu apung dan batu pasir tufaan (endapan vulkanik) yang mencapai 29,58% dari total luas Kabupaten Serang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.1.4 dan Gambar 2.1.4** berikut.

Tabel. 2.1.4
Jenis dan Luas Sebaran Batuan Kabupaten Serang

No	Litologi	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Basal	4.446	3,03
2.	Breksi vulkanik, lahar, lava, dan tufa	13.010	8,87
3.	Lava andesit dan breksi vulkanik	20.323	13,85
4.	Lempung lanauan, lempung pasiran, lempung organik, mengandung pecahan cangkang kerang (endapan rawa)	8.340	5,68

5.	Lempung, lempung pasir (endapan sungai dan limpas banjir)	13.859	9,44
6.	Lempung. pasir dan kerikil (endapan sungai dan limpas banjir)	9.155	6,24
7.	Lumpur, lempung, lanau, pasir dan kerikil (endapan Rawa Danau)	6.651	4,53
8.	Pasir halus-sedang, sedikit lanau dan pecahan cangkang kerang (endapan pantai)	3.392	2,31
9.	Tuf, tuf batu apung dan batu pasir tufaan (endapan vulkanik)	43.411	29,58
10.	Tuf, tuf batu apung, batu pasir tufaan dan breksi tufaan (endapan vulkanik)	24.148	16,46
Jumlah		146.735	100,00

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, 2023

Jenis tanah di Kabupaten Serang sebagian besar berjenis Aluvial, dengan luas sebarannya kurang lebih 107.851,50 ha atau 73,50% dari luas wilayah Kabupaten Serang. Tanah Aluvial merupakan tanah endapan, dibentuk dari lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi tanah. Banyak terdapat di dataran rendah, di sekitar muara sungai, rawa-rawa, lembah-lembah, maupun di kanan kiri aliran sungai besar. Ciri-cirinya berwarna kelabu dengan struktur yang sedikit lepas-lepas dan peka terhadap erosi. Kadar kesuburannya sedang hingga tinggi tergantung bagian induk dan iklim.

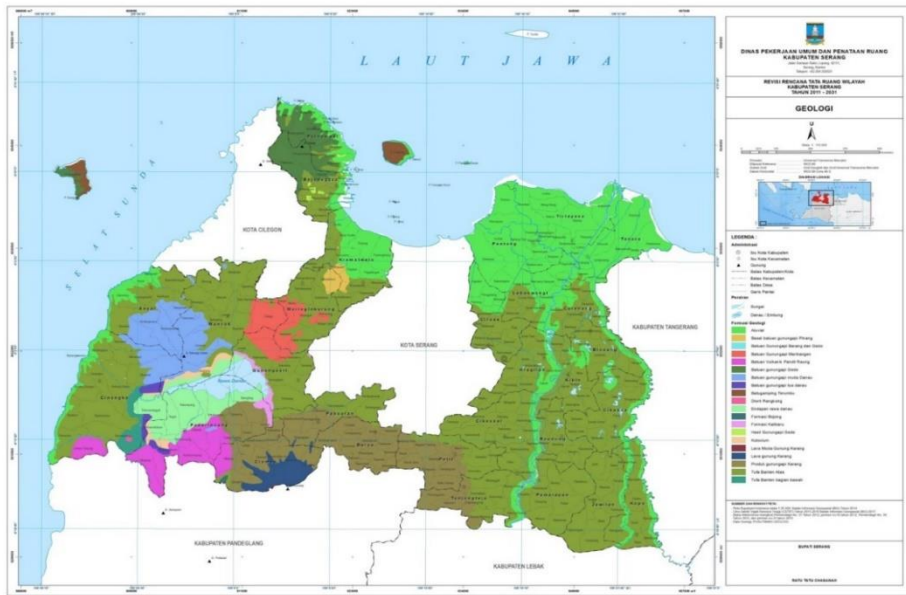
Tanah aluvial ini merupakan tanah yang baik dan dimanfaatkan untuk tanaman pangan (sawah dan palawija) musiman hingga tahunan. Selain tanah alluvial, Kabupaten Serang juga memiliki jenis tanah lain seperti latosol, mediteran dan regosol, untuk lebih jelasnya mengenai luas masing-masing jenis tanah dapat dilihat pada **Tabel 2.1.5** dan **Gambar 2.1.4** berikut.

Tabel. 2.1.5
Jenis Tanah dan Luas Sebarannya di Kabupaten Serang

No.	Jenis Tanah	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Aluvial	107.851,50	73,50
2	Latosol	25.765,67	17,56
3	Mediteran	5,77	0,00
4	Regosol	13.112,07	8,94
Jumlah		146.735,00	100,00

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, 2023

Gambar. 2.1. 4
Peta Jenis Tanah dan Luas Sebarannya di Kabupaten Serang



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10
Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang
Tahun 2011-2031, 2023

E. Kondisi Hidrologi

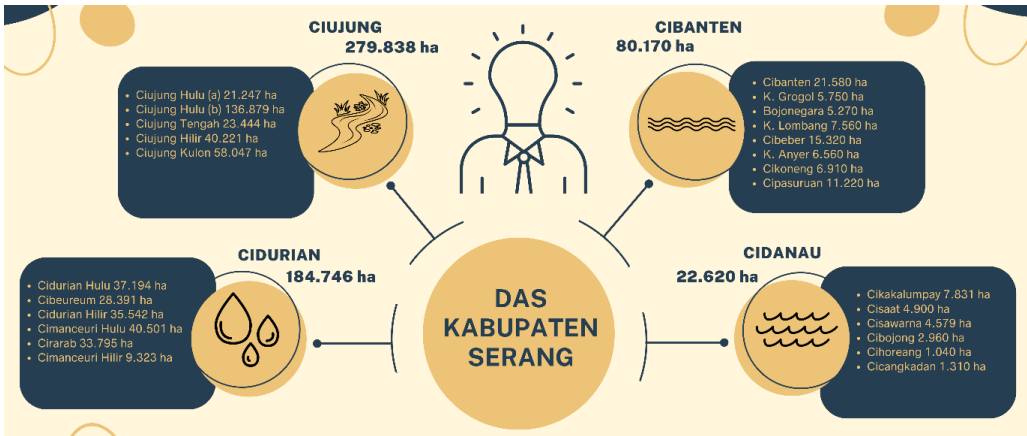
Kondisi Hidrologi di wilayah Kabupaten Serang ditandai dengan terdapatnya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari DAS Cidurian, DAS Ciujung, DAS Cidanau dan DAS Cibanten. Pengelolaan sungai mengatur adanya Satuan Wilayah Sungai (SWS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara umum, baik SWS maupun DAS yang ada di Kabupaten Serang relatif tidak luas. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Serang memiliki lebar yang relatif kecil (lebar kurang dari 50 m) dan pendek (panjang kurang dari 100 km). Selain itu terdapat DPS (Daerah Pengelolaan Sungai), yakni pengelolaan satu atau beberapa DAS secara bersama yang dilakukan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan karena faktor efisiensi dana dan pelaksanaan.

Di Kabupaten Serang hanya ada SWS Ciujung-Ciliman, yang terdiri dari DAS-DAS Cidurian, Ciujung, dan Cibanten. Sungai yang besar adalah Cidurian dan Ciujung. Sungai Cidurian berhulu di Kabupaten Tangerang. Sebagian besar sungai mengalir ke arah utara menuju Laut Jawa. DAS Cidanau mengalir ke barat, Selat Sunda. Di sebelah selatannya terdapat DAS Ciliman dimana terdapat dua arah pengaliran, yakni pada umumnya ke utara menuju Laut Jawa atau Teluk Banten, dan sebagian ke barat menuju Selat Sunda.

Ditinjau dari fisiografi dan morfologi permukaan tanahnya, sebagian besar (sekitar 35%) bagian utara Kabupaten Serang merupakan hilir tata air

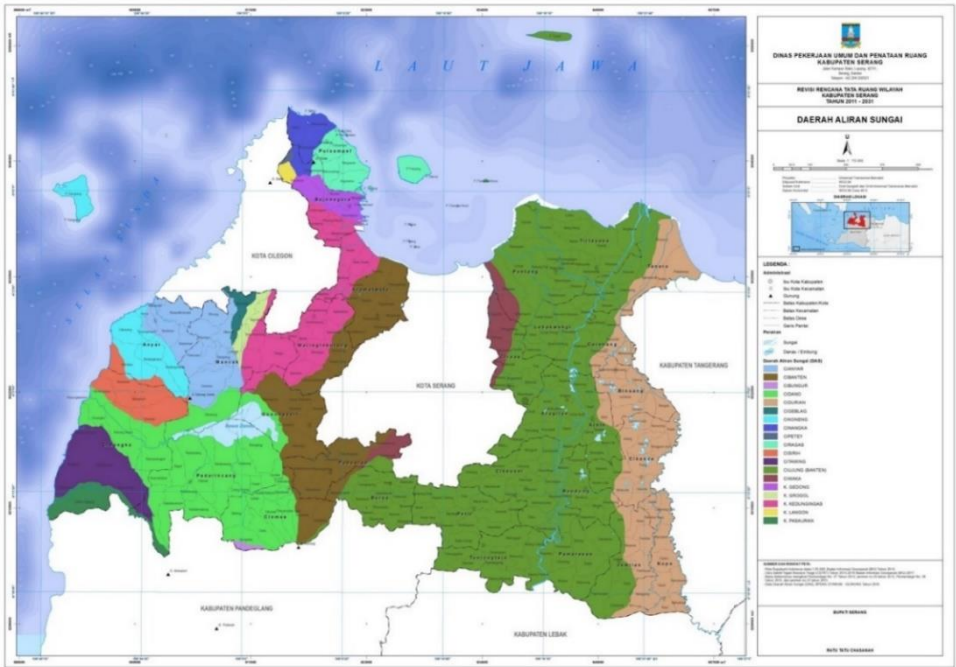
permukaan yang mengarah ke Laut Jawa bagian barat daya, khususnya ke Teluk Banten. Dari 35% tersebut, sekitar 25% merupakan daerah perbukitan sangat rendah atau mengalami pendataran sangat aktif (peneplainisasi) dan 10% berupa dataran pesisir. Aliran air permukaan yang besar terutama berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidurian dan DAS Ciujung. Sekitar 50% merupakan perbukitan daerah hulu terutama di bagian selatan dan sedikit di utara-barat laut, yaitu Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel. Sisanya sekitar 14% merupakan wilayah perbukitan yang mengarahkan aliran air permukaannya ke arah barat di Selat Sunda terutama dari DAS Ciliman dengan dataran pesisir hilirnya di sebelah barat yang sangat sempit (1%).

Gambar. 2.1. 5
Luas Daerah Aliran Sungai Kabupaten Serang



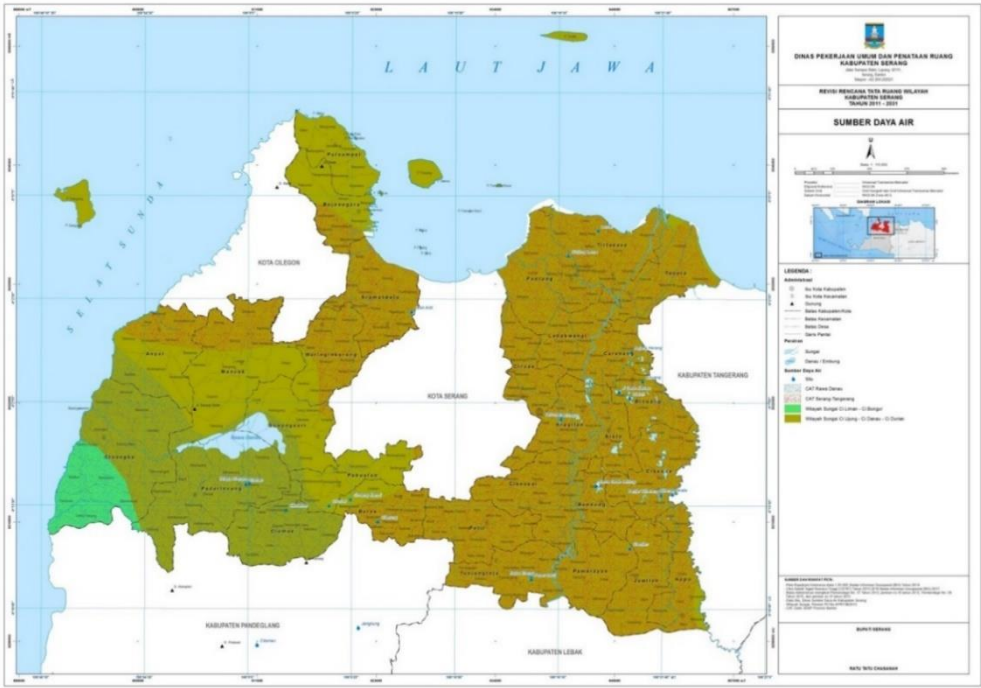
Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011 2031, 2023

Gambar. 2.1. 6
Peta Daerah Aliran Sungai



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10
Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang
Tahun 2011-2031, 2023

Gambar. 2.1. 7



Peta Sumber Daya Air

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10
Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang
Tahun 2011-2031, 2023

1) Air Permukaan dan Penyebarannya

Seperti telah disebutkan, Kabupaten Serang dilalui oleh 2 (dua) sungai besar, yaitu Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian yang keduanya mengalir ke arah utara dan bermuara di Laut Jawa. Selain itu juga terdapat sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Cidanau dan Sungai Anyar serta beberapa sungai kecil lainnya yang bermuara di Selat Sunda.

Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di daerah ini yang sumber mata airnya berasal dari Gunung Halimun. Sungai Ciujung sebagian airnya telah dimanfaatkan untuk keperluan irigasi yang dialirkan melalui bendungan. Sedangkan Sungai Cidurian terletak di bagian timur yang sekaligus membatasi Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang.

Sungai Cidanau mengalir dari lereng Gunung Karang melalui beberapa anak sungai yang masuk ke Rawa Danau dan membentuk pola aliran rectanguler. Sungai ini mengalir ke arah barat dan bermuara di Selat Sunda. Air Sungai Cidanau telah dimanfaatkan oleh PT Krakatau Steel yang dialirkan dan ditampung di Waduk Krenceng dengan mendapat tambahan air dari Sungai Krenceng dan Sungai Cadas Gantung.

Sungai Cibanten yang mengalir melalui Kota Serang sumber airnya berasal dari Gunung Karang, Gunung Payung, dan Gunung Kupak. Sebagian besar berasal dari mata air yang cukup dan membentuk spring belt pada kaki Gunung Karang. Sungai ini mengalir ke arah utara dan bermuara di Teluk Banten. Sungai ini berpola dendritik dan tidak pernah kering.

2) Air Tanah dan Penyebarannya

Air tanah merupakan sumber daya alam yang ketersediaannya, baik kuantitas (jumlah) maupun kualitas (mutu) air tanahnya, sangat tergantung pada kondisi lingkungan dimana proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah tersebut berlangsung pada suatu wadah yang disebut cekungan air tanah (groundwater basin).

Kondisi air tanah di Kabupaten Serang umumnya dangkal, yaitu antara 0,5 m – 7 m dari permukaan tanah dan cenderung mengikuti pola permukaan tanah. Air tanah di Kabupaten Serang tersedia dalam jumlah yang relatif cukup dan terdapat dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

- Akuifer menerus dalam bentuk sarang, termasuk air tanah dalam

kondisi tertekan dan setengah tertekan;

- Akuifer tidak menerus dalam batuan berkekar, misalnya kekar dalam lava;
- Kombinasi akifer menerus dan tidak menerus.

Pada umumnya air tanah bebas di daerah dataran mempunyai kedalaman antara 0,5 m – 3,0 m; sedangkan di daerah perbukitan kedalamannya ± 15 m. Penyebaran sumber air tanah ini terdapat di bagian tenggara dimana air tanah membentuk mata air di lereng Gunung Karang.

Tabel. 2.1.6
Kondisi Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Serang

CAT		LINGKUP WILAYAH		Litologi Akuifer	Jumlah Air Tanah (Juta m ³ /Th)		
No.	Nama	Luas (km ²)	Kab/Kota Provinsi		Bebas (Q1)	Terteka (Q2)	
1.	Rawadanau	375	Kab. Serang & Kab. Pandeglang.	Banten	▪ Endapan Rawadanau, terutama pasir dan kerikil. ▪ Tuf Banten Atas, terdiri atas tuf batu apung, batu pasir tufan, tuf hablur, dan tuf kaca. ▪ Tuf Banten Bawah, terdiri atas tuf breksi, tuf batu apung, tuf lapili, dan tuf pasiran. ▪ Batuan gunung api G. Karang, terdiri atas breksi, lava, tuf, dan lahar. ▪ Batuan gunung api Danau tua, terdiri atas lava andesit-basal, breksi	180	13

				gunung api, dan tuf.			
2.	Serang-Tangerang	2.822	Kota Serang; Kab. Serang; Kota Cilegon; Kab. Lebak; Kab. Pandeglang; Kota Tangerang; Kab. Tangerang; Kab. Bogor.	Banten & Jabar	▪ Endapan pematang pantai, terdiri atas pasir halus-kasar. ▪ Endapan sungai, terdiri atas pasir, kerikil, dan kerakal. ▪ Endapan kipas gunung api, terdiri atas pasir, kerikil, dan kerakal. ▪ Tuf Banten, terdiri atas tuf, tuf batu apung, dan batu pasir tufan. ▪ Batuan gunung api G. Gede dan G. Karang, terdiri atas lava, breksi, dan lahar. ▪ Foramsi (F.) Bojong, terutama disusun oleh batu pasir tufan.	1.075	18

Sumber: Peta Cekungan Air tanah P. Jawa dan P. Madura, Badan Geologi, 2023

F. Kondisi Klimatologi

1) Tipe Iklim

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data yang tersedia selama 10 tahun terakhir (2013-2022) sesuai metoda klasifikasi iklim oleh Schmidth-Fergusson, di wilayah Kabupaten Serang secara umum termasuk dalam klasifikasi beriklim C (agak basah). Namun jika dipilah lebih spesifik secara kewilayahan kemungkinan di Kabupaten Serang mempunyai iklim yang tidak sama/seragam, karena semakin ke arah hulu

(pegunungan/selatan) curah hujan dan jumlah hari hujan agaknya semakin tinggi dan lebih sering dibandingkan dengan wilayah bagian utara dan barat yang berada pada kawasan pesisir karena jumlah curah hujan dan hari hujan cenderung semakin rendah dan jarang.

2) Curah Hujan

Jumlah hari hujan rata-rata dalam setahun di wilayah Kabupaten Serang selama 10 tahun terakhir (2012-2022) cukup tinggi/banyak yaitu sebesar 190 hari pertahun atau rata-rata setiap dua hari turun hujan. Jumlah hari hujan rata-rata tersebut bervariasi mulai dari jumlah hari hujan terpendek yaitu 8 hari pada bulan Agustus sampai dengan 24 hari yang terjadi pada bulan Januari. Secara umum, variasi jumlah rata-rata hari hujan perbulan berbentuk kurva melengkung dengan lembah cekungan berada bulan Agustus dan puncak kurva berada pada awal dan akhir tahun. Berdasarkan data yang tersedia menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir di Kabupaten Serang selalu terjadi hujan sepanjang tahun meskipun dengan jumlah hari hujan dan intensitas yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya data jumlah hari hujan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel. 2.1.7
Jumlah Hari Hujan Di Kabupaten Serang (Hari) Tahun 2013 – 2022

Bulan	Tahun										Jumlah	Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Januari	28	25	27	19	24	27	18	25	24	24	241	24
Februari	19	24	19	26	23	23	17	22	24	23	220	22
Maret	15	19	23	23	18	20	23	25	25	21	212	21
April	19	16	18	19	21	18	18	22	17	20	188	19
Mei	20	18	8	18	14	13	11	15	14	24	155	16
Juni	14	16	7	13	15	11	6	6	21	22	131	13
Juli	25	13	4	16	13	1	4	4	10	11	101	10
Agustus	7	5	7	16	5	7	2	4	13	13	79	8
September	13	4	2	24	10	10	1	0	18	16	98	10
Oktober	9	4	7	24	16	10	2	3	12	19	106	11
November	15	17	8	22	21	20	6	11	26	21	167	17
Desember	12	22	17	22	22	25	17	19	25	21	202	20
Jumlah	196	183	147	242	202	185	125	156	229	235	1.900	190
Rata-Rata	16	15	12	20	17	15	10	13	19	20	158	16

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023 dan
BPS Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

Jika dilihat dari rata-rata curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang pada tahun 2013 – 2022 menunjukkan jumlah curah hujan sebesar 1.627,46 mm pertahun, dengan jumlah curah hujan tertinggi

pada tahun 2023 sebesar 2.245,8 mm dan intensitas curah hujan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 1.257 mm. Sementara itu, jumlah curah hujan rata-rata perbulan juga sangat bervariasi dari yang terendah sebesar 38,20 mm pada bulan Agustus dan yang tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 272,17 mm.

Dalam pengklasifikasian iklim dikenal Bulan Basah, Bulan Lembab dan Bulan Kering. Dalam penilaian/penghitungan tipologi iklim yang digunakan biasanya adalah jumlah Bulan Basah dan Bulan Kering. Sesuai dengan data yang ada, jumlah Bulan Kering terkecil terjadi pada tahun 2016 sebanyak 0 bulan sedangkan jumlah terbanyak terjadi pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak 5 bulan. Untuk jumlah Bulan Basah, paling banyak terjadi pada tahun 2022 sejumlah 10 bulan dan terkecil terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah Bulan Basah sebanyak 5 bulan. Untuk lebih lengkapnya, data rata-rata curah hujan di Kabupaten Serang tahun 2013-2022 dapat dilihat pada **Tabel 2.1.8** berikut.

Tabel. 2.1.8
Rata-Rata Curah Hujan di Kabupaten Serang (mm) Tahun 2013 – 2022

Bulan	Tahun										Jumlah	Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Januari	420,0	377,5	361,8	125,4	321,6	143,1	332,0	332,5	198,7	109,1	2.721,7	272,17
Februari	209,0	211,2	241,3	273,0	351,9	177,1	180,0	180,3	283,2	121,0	2.228,0	222,80
Maret	225,0	102,6	193,2	227,7	113,4	222,0	210,0	204,3	120,4	289,0	1.907,6	190,76
April	95,0	94,5	131,4	87,4	94,5	153,0	151,0	150,7	234,0	184,5	1.376,0	137,60
Mei	260,0	113,4	39,2	144,0	142,8	70,2	94,0	102,5	49,9	191,6	1.207,6	120,76
Juni	56,0	64,0	83,3	93,6	100,5	196,9	10,0	10,2	127,6	114,6	856,7	85,67
Juli	250,0	231,4	4,8	134,4	106,6	3,0	14,0	14,4	45,3	43,1	847,0	84,70
Agustus	121,8	9,5	11,9	86,4	18,0	0	1,0	1,0	31,3	101,1	382,0	38,20
Sept	39,0	22,0	0,2	158,4	48,0	30,0	0,0	0,0	207,9	56,6	562,1	56,21
Oktober	81,0	21,2	32,9	165,6	112,0	88,0	11,0	11,0	90,5	200,4	813,6	81,36
Nov	285,0	154,7	176,0	138,6	153,3	116,0	75,0	75,4	209,2	156,7	1.539,9	153,99
Des	204,0	138,6	154,7	178,2	242,0	167,5	179,0	180,2	235,7	152,5	1.832,4	183,24
Jumlah	2.245,8	1.540,6	1.430,7	1.812,7	1.804,6	1.366,8	1.257	1.262,5	1.833,7	1.720,2	16.274,6	1.627,46
Rata-Rata	187,2	128,4	119,2	151,1	150,4	113,9	104,8	105,2	152,8	143,4	1.356,2	135,62
Bulan Kering	2	3	4	0	2	3	5	5	3	2	29,0	2,90
Bulan Basah	8	7	7	9	9	7	5	6	8	10	76,0	7,60

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023 dan BPS Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

3) Suhu Udara

Selain yang berkaitan dengan hujan, parameter lain penyusun iklim adalah suhu udara. Suhu udara rata-rata di wilayah Kabupaten Serang adalah sebesar 27,4°C dengan kisaran suhu antara 26,1oC – 28,7°C. Data tentang rata-rata suhu udara disajikan dalam **Tabel 2.1.9** berikut.

Tabel. 2.1.9
Rata-Rata Suhu Udara Di Kabupaten Serang (°C) Tahun 2013 – 2022

Bulan	Tahun										Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Januari	26,8	26,1	26,8	28,1	27,2	27,0	27,2	27,6	26,9	27,5	27,1
Februari	27,1	26,3	27,1	27,5	26,9	27,3	27,9	27,6	26,9	27,1	27,2
Maret	27,4	27,0	27,4	27,9	27,3	27,2	27,3	27,5	27,4	27,5	27,4
April	27,3	27,7	27,3	28,1	27,4	27,8	28,0	27,8	27,4	27,9	27,7
Mei	27,3	28,0	27,3	28,1	27,8	28,0	28,2	28,1	28,3	27,7	27,9
Juni	27,0	27,2	27,0	27,3	27,4	27,5	27,9	27,8	26,1	26,7	27,2
Juli	26,2	27,0	26,2	27,2	27,3	26,8	27,5	27,5	27,2	27,5	27,0
Agustus	26,8	27,1	26,8	27,1	27,5	27,2	27,4	27,5	27,3	27,4	27,2
September	27,1	27,3	27,1	27,4	27,7	27,6	27,8	27,8	26,8	27,5	27,4
Oktober	27,3	28,4	27,3	27,2	28,1	28,5	28,7	27,8	28,0	27,5	27,9
November	27,0	27,6	27,0	27,8	27,8	26,9	28,7	27,8	27,4	27,6	27,6
Desember	26,6	27,3	26,6	27,2	27,5	27,3	27,9	27,1	27,5	27,3	27,2
Rata-Rata	27,0	27,3	27,0	27,6	27,5	27,4	27,9	27,6	27,3	27,4	27,4

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023 dan BPS Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

4) Kelembaban Udara

Parameter lain penyusun iklim adalah kelembaban. Tingkat kelembaban udara rata-rata adalah sebesar 89%. Data tentang rata-rata kelembaban udara disajikan dalam **Tabel 2.1.10** berikut.

Tabel. 2.1.10
Rata-Rata Kelembaban Di Kabupaten Serang (%) Tahun 2013 – 2022

Bulan	Tahun										Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Januari	92	98	92	98	98	95	83	84	83	80	90
Februari	89	99	89	98	98	97	83	84	85	82	90
Maret	93	98	93	97	98	97	83	84	82	81	91
April	93	97	93	97	99	97	82	84	82	79	90
Mei	92	98	92	97	99	97	80	83	81	83	90
Juni	95	97	95	97	97	98	78	82	81	83	90
Juli	97	99	97	97	98	97	74	79	79	80	90
Agustus	90	97	90	97	97	94	73	79	79	80	88
September	85	97	85	97	97	95	72	77	76	79	86
Oktober	87	97	87	97	99	94	70	79	78	79	87
November	91	97	91	97	95	95	73	80	79	79	88
Desember	93	97	93	97	97	98	81	80	82	80	90
Rata-Rata	91	98	91	97	98	96	78	81	81	80	89

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023 dan BPS Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

2.1.1.2 Peran Stretegis Daerah

Kabupaten Serang, sebagai bagian dari Provinsi Banten di Indonesia, memiliki peran strategis dalam konteks pembangunan daerah dan nasional. Kabupaten Serang memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. Kabupaten serang dapat berperan dalam pengembangan ekonomi regional dengan mempromosikan investasi, mengembangkan infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja. Kabupaten Serang memiliki wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Peran strategisnya adalah dalam melindungi dan melestarikan lingkungan alam, termasuk hutan, lahan basah, dan ekosistem lainnya, untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Serang memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan di tingkat lokal dan regional. Melalui pengelolaan yang baik dan kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah, Kabupaten Serang dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Guna mendukung semua peranan strategis di Kabupaten Serang berikut penjelasan Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah Kabupaten Serang yang berbasis jasa ekosistem.

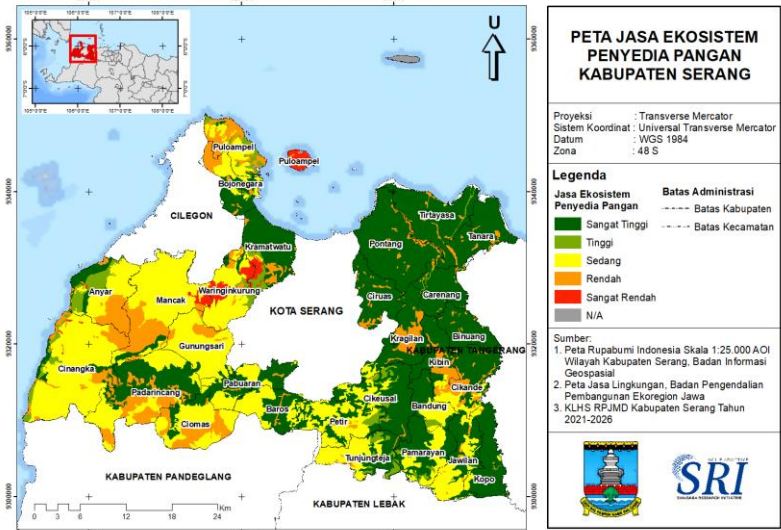
A. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem

Dalam perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) digunakan pendekatan supply dan demand. Perhitungan DDTLH meliputi perhitungan penduduk terhadap tekanan lahan, Daya Dukung Pangan, Daya Dukung Air, analisis kualitas sungai dan daya tampung sampah.

1. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Jasa ekosistem sebagai penyedia pangan didefinisikan sebagai ketersediaan tanaman dan hewan yang dapat dimakan, dengan indikator stok total dan rata-rata (dalam kg/ha). Indikator kinerjanya adalah luasan produktivitas bersih (dalam kkal/ha/tahun). Berdasarkan pada hasil kajian KLHS RPJPD tahun 2025-2045 diketahui bahwa jasa lingkungan sebagai penyedia pangan didominasi kelas sangat tinggi dan selanjutnya diikuti kelas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jasa ekosistem penyedia pangan masih mampu memberikan dukungan terhadap kebutuhan pangan di wilayah Kabupaten Serang. Wilayah yang memiliki penyediaan pangan kelas sangat tinggi didominasi di wilayah Kecamatan Tirtayasa, Tanara, Ciruas, Cikesal dan Cerenang. Meskipun demikian pada bebera wilayah tedapat kecamatan yang memiliki klasifikasi sangat rendah yaitu pada Kecamatan Waringinkurung dan Puloampel, Kramatwatu dan Mancak. Kecamatan Puloampel merupakan wilayah pulau yang tidak memiliki lahan pertanian. Berikut disajikan gambar peta jasa lingkungan penyedia pangan dan tabel luas kelas jasa ekosistem penyedia pangan.

Gambar. 2.1. 8
Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan



Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045

Tabel. 2.1.11
Luas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kabupaten Serang

No	Kecamatan	Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan					
		Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Grand Total
1	Anyar	1528,06	17,77	902,06	2423,53	1245,17	6116,58
2	Bandung	10,24		1300,24	1068,62	167,41	2546,51
3	Baros	117,49		1877,56	1756,75		3751,81
4	Binuang	119,90		2788,94	33,11		2941,95
5	Bojonegara	772,71		1494,79	860,08	118,78	3246,37
6	Carenang	110,00		3104,86		65,61	3280,47
7	Cikande	977,56		2831,06	1004,79		4813,42
8	Cikeusal	47,22		3955,44	1037,80	587,58	5628,04
9	Cinangka	1600,71	76,90	611,80	9267,55	594,56	12151,53
10	Ciomas	1747,51		759,89	2982,23		5489,63
11	Ciruas	332,39		3310,60			3642,98
12	Gunungsari	618,52		207,98	4424,18		5250,68
13	Jawilan	136,89		2157,88	2111,64		4406,42
14	Kibin	666,59		2229,77	42,95	48,04	2987,34
15	Kopo	39,07		3394,44	342,89		3776,40
16	Kragilan	1090,73		3083,26	247,61	26,89	4448,49
17	Kramatwatu	597,21	306,49	3800,51	218,21	560,52	5482,93
18	Mancak	2348,37	305,04	438,68	6546,41		9638,49
19	Pabuaran	95,21		2167,83	1548,79		3811,83
20	Padarincang	2725,02		3947,96	3226,32		9899,30
21	Pamarayan	0,71	0,03	2818,93	1457,51	257,82	4534,99
22	Petir	75,07		1512,75	3009,37	270,00	4867,18
23	Pontang	355,79		7385,95		14,20	7755,94
24	Puloampel	1426,11	592,51	88,29	1399,75	604,97	4111,63
25	Tanara	330,32		4148,24		13,91	4492,46
26	Tirtayasa	280,74		5141,81	17,56	113,29	5553,41
27	Tunjungteja	120,09		1471,07	2141,53	531,99	4264,67
28	Waringinkurung	302,30	898,73	151,92	2905,12	391,52	4649,59
	Grand Total	18572,55	2197,45	67084,51	50074,30	5612,24	143541,06

(Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Serang, 2020 dan Olah Data, 2023)

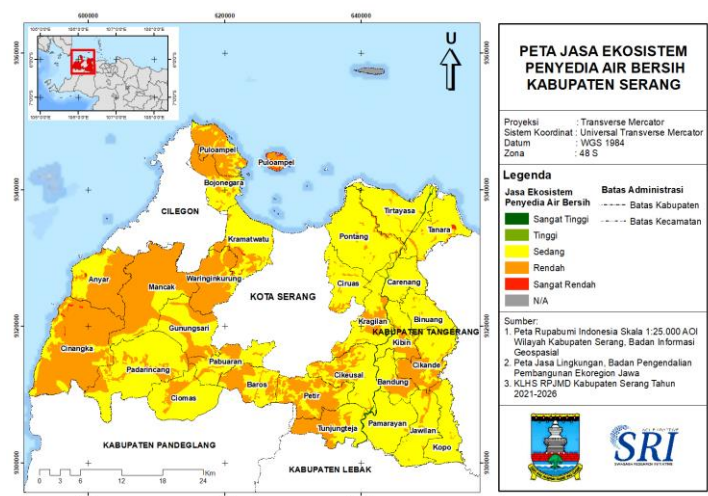
Meskipun kelas jasa ekosistem penyedia pangan didominasi dengan kelas sangat tinggi, namun proyeksi penyediaan pangan tahun 2045 perlu diantisipasi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan bahan pangan. Beberapa wilayah yang memiliki klasifikasi warna merah dan oranye dapat melalui substitusi beras dengan wilayah yang memiliki stok pangan yang sangat tinggi.

2. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur air memiliki definisi peran bentang alam dan penutupan lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala, dengan indikator keadaannya adalah kapasitas infiltrasi (litologi, topografi, curah hujan, vegetasi, tutupan) dan retensi air (vegetasi, topografi, litologi) dalam m3 dan indikator kinerjanya adalah kuantitas infiltrasi dan retensi air serta pengaruhnya terhadap wilayah hidrologis.

Berdasarkan pada KLHS RPJPD Kabupaten Serang tahun 2025-2045, jasa ekosistem penyedia air bersih di Kabupaten Serang didominasi oleh kelas sedang dan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kabupaten Serang rentan terjadi kekeringan pada saat kemarau panjang. Beberapa kecamatan bahkan memiliki wilayah yang masuk dalam kelas sangat rendah yaitu Kecamatan Puloampel, Tanara, Cinangka dan Kramatwatu. Namun terdapat juga kecamatan yang memiliki klasifikasi sangat tinggi yaitu Kecamatan Tirtayasa, Cikeusal, Carenang, Kibin, Kopo dan Tunjungteja. Wilayah-wilayah yang memiliki klasifikasi sangat rendah sangat rawan mengalami kekeringan. Hingga kini sudah terdapat beberapa permasalahan kekeringan di wilayah Kabupaten Serang khususnya saat memasuki musim kemarau. Berikut disajikan gambar peta jasa ekosistem penyedia air bersih dan tabel luas area jasa ekosistem penyedia air bersih.

Gambar. 2.1. 9
Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045

Permasalahan kelangkaan air telah menjadi masalah yang serius beberapa tahun terakhir di Kabupaten Serang. Meskipun ambang batas air menunjukkan nilai yang positif, namun demikian kelangkaan terhadap sumber air terjadi pada beberapa kecamatan di Kabupaten Serang. Beberapa kejadian kelangkaan air terjadi di Kecamatan Pontang tahun 2011

(Antara News, 2011). Selain permasalahan kelangkaan air, ada pula permasalahan sulitnya air bersih akibat limbah yang mencemari sungai. Pada tahun 2017, kecamatan di Kabupaten Serang, yaitu Kecamatan Tirtayasa mengalami kesulitan air bersih akibat tercemarnya sungai besar Ciujung. Limbah yang mencemari sungai menyebabkan air sungai berbau menyengat dan berwarna hitam. Banyak warga, yang merasa dirugikan akibat tercemarnya Sungai Ciujung ini karena Sebagian besar warga mengandalkan sungai untuk kebutuhan mandi dan kebutuhan lainnya seperti mengairi tambak ikan (detiknews, 2017).

Tabel. 2.1.12
Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Serang

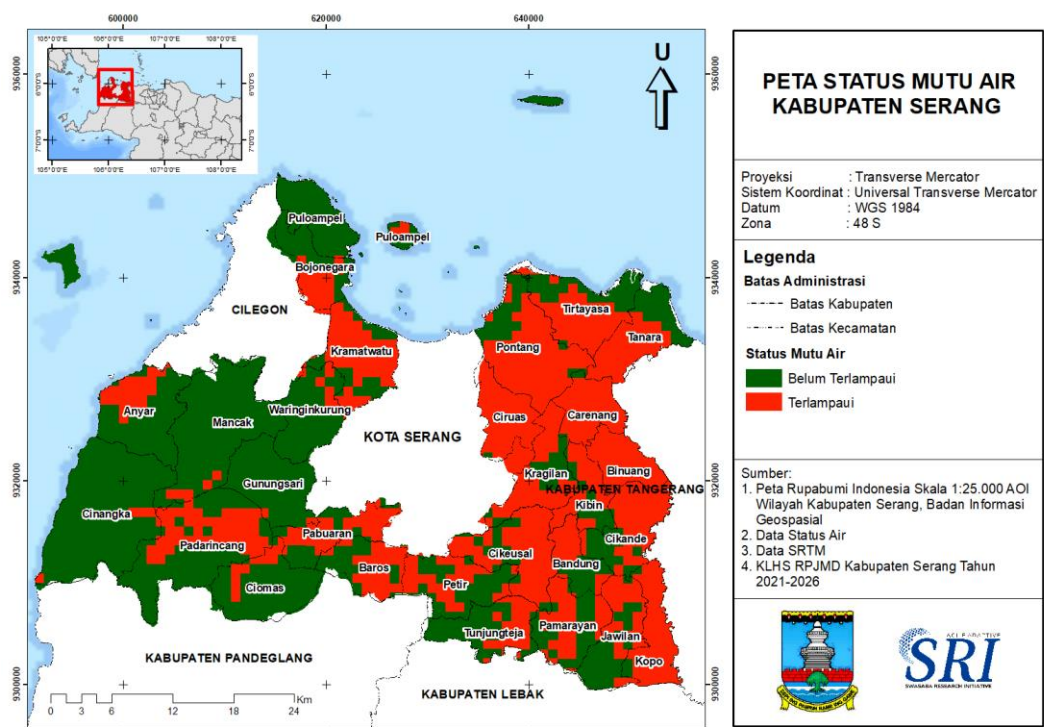
No	Kecamatan	Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih				
		Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Grand Total
1	Anyar	3951,59	17,77		2147,22	6116,58
2	Bandung	981,53		19,95	1545,03	2546,51
3	Baros	1774,40			1977,41	3751,81
4	Binuang	153,01			2788,94	2941,95
5	Bojonegara	1521,60			1724,77	3246,37
6	Carenang	110,00		66,19	3104,28	3280,47
7	Cikande	1982,35			2831,06	4813,42
8	Cikeusal	1528,13		104,56	3995,35	5628,04
9	Cinangka	10589,10	76,90		1485,53	12151,53
10	Ciomas	860,96			4628,67	5489,63
11	Ciruas	332,39			3310,60	3642,98
12	Gunungsari	1860,34			3390,34	5250,68
13	Jawilan	351,94			4054,48	4406,42
14	Kibin	709,54		89,23	2188,57	2987,34
15	Kopo	170,96			3605,44	3776,40
16	Kragilan	1343,77		74,72	3030,00	4448,49
17	Kramatwatu	1066,08	55,82		4361,03	5482,93
18	Mancak	8047,22			1591,27	9638,49
19	Pabuaran	1089,88			2721,95	3811,83
20	Padarincang	1844,60			8054,69	9899,30
21	Pamarayan	31,67	0,03	40,77	4462,51	4534,99
22	Petir	3084,44			1782,75	4867,18
23	Pontang	352,76	3,03	14,20	7385,95	7755,94
24	Puloampel	3254,42	127,09		730,13	4111,63
25	Tanara	290,82	39,49	13,91	4148,24	4492,46
26	Tirtayasa	280,99		113,04	5159,38	5553,41
27	Tunjungteja	2261,62		74,19	1928,87	4264,67
28	Waringinkurung	4081,18	24,97		543,44	4649,59
	Grand Total	53907,30	345,10	610,75	88677,90	143541,06

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Serang, 2020 dan Olah Data, 2023

Status baku mutu air adalah indikator yang dibutuhkan untuk melihat kualitas air. Status baku mutu air dikatakan baik apabila status mutu air belum terlampaui, sebaliknya apabila status mutu air terlampaui maka air dikatakan memiliki kualitas yang kurang baik atau kurang layak. Berdasarkan pada KLHS RPJMD Kabupaten Serang tahun 2020-2026

diketahui bahwa status baku mutu air dominan adalah belum terlampaui. Namun jumlah ini hampir sama dengan ait yang memiliki status baku mutu air terlampaui. Kecamatan Cinangka merupakan salah satu kecamatan yang memiliki status baku mutu air belum terlampaui yang paling banyak. Sedangkan Kecamatan Cikeusial adalah kecamatan yang memiliki status baku mutu air yang paling banyak terlampaui. Berikut disajikan gambar peta status baku mutu air dan tabel luasan status baku mutu air.

Gambar. 2.1. 10
Peta Status Mutu Air



Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045

Tabel. 2.1.13
Luas Status Baku Mutu Air

No	Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Grand Total (Ha)
1	Anyar	4351,82	1749,21	6101,03
2	Bandung	1150,22	1396,29	2546,51
3	Baros	1460,45	2164,29	3624,74
4	Binuang		2941,95	2941,95
5	Bojonegara	1691,54	1550,00	3241,54
6	Carenang	109,20	3171,27	3280,47
7	Cikande	1403,12	3410,30	4813,42
8	Cikeusial	1134,25	4469,80	5604,05
9	Cinangka	11744,89	363,61	12108,50
10	Ciomas	4536,90	853,69	5390,58
11	Ciruas	46,11	3427,78	3473,89
12	Gunungsari	5103,69	146,99	5250,68

13	Jawilan	2193,37	2213,05	4406,42
14	Kibin	904,84	2082,50	2987,34
15	Kopo	258,98	3517,42	3776,40
16	Kragilan	1157,87	3237,15	4395,03
17	Kramatwatu	1438,31	4016,98	5455,29
18	Mancak	9039,78	453,50	9493,28
19	Pabuaran	1420,56	2375,03	3795,59
20	Padarincang	5860,34	4033,35	9893,70
21	Pamarayan	1874,35	2660,64	4534,99
22	Petir	2538,05	2294,33	4832,37
23	Pontang	1610,02	6113,41	7723,44
24	Puloampel	3951,42	244,41	4195,83
25	Tanara	1571,83	2931,38	4503,21
26	Tirtayasa	2283,80	3470,71	5754,50
27	Tunjungteja	2644,83	1619,46	4264,29
28	Waringinkurung	4030,65	618,83	4649,48
	Total	75511,19	67527,33	143038,51

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Serang, 2020 dan Olah Data, 2023

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Sampah

Estimasi timbulan sampah per hari untuk setiap penduduk di Kabupaten Serang mencapai 0,7 kg/hari. Berdasarkan data timbulan sampah diketahui bahwa Kecamatan Cikande menjadi salah satu kecamatan yang menghasilkan timbulan sampah terbesar di Kabupaten Serang yaitu mencapai 80,2 ton/hari. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk yang banyak di kecamatan tersebut. Semakin tinggi jumlah penduduknya maka timbulan sampah yang dihasilkan semakin banyak. Pada tahun 2045, proyeksi sampah di Kabupaten Serang mencapai 1.739 ton per hari. Hingga kini Kabupaten Serang belum memiliki Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). Selama ini pemrosesan sampah yang dihasilkan Kabupaten Serang di proses di TPA Cilowong yang berada di Kota Serang dan ke TPA Bendung di Kota Cilegon. Sebelumnya, TPA Cilowong dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Serang, namun kini pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang.

Hingga kini, Kabupaten Serang belum memiliki TPA. Proyeksi sampah yang mencapai 1.179,6 ton/hari pada tahun 2045, sangat disarankan bagi Pemerintah Kabupaten Serang untuk mencari alternatif pembangunan TPA di wilayah Kabupaten Serang. Hingga kini, TPA sampah dari Kabupaten Serang yang ditangani di TPA Cilowong sebesar 200 m³/hari. Total timbulan sampah yang ditangani di TPA Cilowong hingga kini mencapai 3.229.379 m³(Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2019).

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari meningkatnya volume sampah yang masuk ke TPA yang berada di luar wilayah Kabupaten Serang dan untuk menghindari konflik dikemudian hari. Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Serang telah mengeluarkan Perda Nomor 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan. Di dalam perda tersebut terdapat upaya penanganan dan pengurangan sampah. Penanganan sampah melalui upaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Upaya pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah. Upaya pengelolaan sampah ini harus dipahami oleh setiap penduduk di Kabupaten Serang, sehingga penanganan dan pengurangan sampah dapat diimplementasikan dengan baik. Berikut disajikan Tabel 2.1.14 data timbulan sampah.

Tabel. 2.1.14
Data Timbulan Sampah di Kabupaten Serang

No.	Kecamatan	2020			2021			2022		
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Estimasi Timbulan Per-Kapita (Kg/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Estimasi Timbulan Per-Kapita (Kg/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Estimasi Timbulan Per-Kapita (Kg/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Hari)
1	Cinangka	60.815	1	42,6		0,7	-	61.910	0,7	43,3
2	Padarincang	69.647	1	48,8		0,7	-	72.386	0,7	50,7
3	Ciomas	42.771	1	29,9		0,7	-	44.764	0,7	31,3
4	Pabuaran	43.155	1	30,2		0,7	-	46.182	0,7	32,3
5	Gunungsari	23.517	1	16,5		0,7	-	24.924	0,7	17,4
6	Baros	59.302	1	41,5		0,7	-	62.477	0,7	43,7
7	Petir	61.896	1	43,3		0,7	-	64.489	0,7	45,1
8	Tunjung Teja	47.101	1	33,0		0,7	-	49.035	0,7	34,3
9	Cikeusal	76.980	1	53,9		0,7	-	80.893	0,7	56,6
10	Pamarayan	59.805	1	41,9		0,7	-	62.877	0,7	44
11	Bandung	53.552	1	37,5		0,7	-	39.206	0,7	27,4
12	Jawilan	110.569	1	77,4		0,7	-	63.401	0,7	44,4
13	Kopo	53.552	1	37,5		0,7	-	56.488	0,7	39,5
14	Cikande	110.569	1	77,4		0,7	-	114.503	0,7	80,2
15	Kibin	61.020	1	42,7		0,7	-	60.229	0,7	42,2
16	Kragilan	80.302	1	56,2		0,7	-	83.273	0,7	58,3
17	Waringinkurung	48.859	1	34,2		0,7	-	50.631	0,7	35,4
18	Mancak	48.247	1	33,8		0,7	-	50.994	0,7	35,7
19	Anyar	58.726	1	41,1		0,7	-	59.514	0,7	41,7
20	Bojonegara	50.286	1	35,2		0,7	-	51.213	0,7	35,8
21	Pulo Ampel	39.297	1	27,5		0,7	-	40.654	0,7	28,5
22	Kramatwatu	100.119	1	70,1		0,7	-	102.144	0,7	71,5
23	Ciruas	82.622	1	57,8		0,7	-	85.690	0,7	60
24	Pontang	47.248	1	33,1		0,7	-	48.845	0,7	34,2
25	Lebak Wangi	38.893	1	27,2		0,7	-	40.215	0,7	28,2
26	Carenang	39.362	1	27,6		0,7	-	41.002	0,7	28,7
27	Binuang	31.739	1	22,2		0,7	-	33.350	0,7	23,3
28	Tirtayasa	46.349	1	32,4		0,7	-	49.623	0,7	34,7
29	Tanara	42.294	1	29,6		0,7	-	44.501	0,7	31,2
Kabupaten Serang		1.688.594		1.182,10	0,00			1.685.413,00		1.179,60

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Serang, 2023

2.1.1.3 Potensi Sumber Daya Alam

A. Potensi Lahan Produktif

Wilayah produktif adalah wilayah dengan potensi lahan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai lahan penanaman komoditas pertanian/tanaman yang memiliki nilai ekonomis baik berupa tanaman musiman maupun tahunan. Lahan produktif ini berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat, sumber pangan maupun Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain fungsi tersebut, saat ini di beberapa daerah lahan pertanian juga dimanfaatkan sebagai tempat dan tujuan wisata minat khusus.

Pada tahun 2015, potensi lahan produktif di Kabupaten Serang adalah seluas 120.658,69 ha atau sebesar 82,23% dari luas Kabupaten Serang. Dari keseluruhan jumlah luas lahan produktif tersebut sekitar 90,50% atau seluas 109.195,69 ha adalah lahan produktif yang telah diusahakan/digarap. Lahan produktif yang telah diusahakan tersebut

berupa perkebunan, kebun campuran, lading/tegalan, sawah dan tambak. Komposisi terbesar dari lahan produktif yang telah diusahakan tersebut berupa sawah dengan luas mencapai 60.628,31 ha yang terdiri dari sawah irigasi seluas 59.308,16 ha dan sawah tadah hujan sebesar 1.320,15 ha. Sementara itu potensi lahan produktif lainnya yang belum diusahakan adalah sebesar 11.463 ha yang berupa rawa, padang rumput, semak belukar dan tanah kosong. Untuk lebih lengkapnya data potensi lahan produktif di Kabupaten Serang dapat dilihat pada **Tabel 2.1.15**.

Tabel. 2.1.15
Potensi Lahan Produktif Di Kabupaten Serang Tahun 2015

No	Penggunaan Lahan	Luas Penggunaan Lahan		Rasio Terhadap Luas Kabupaten (%)
		(Ha)	(%)	
	Lahan			74,42
A.	Diusahakan	109.195,69	90,50	
1	Perkebunan Besar	401,41	0,33	0,27
2	Kebun Campuran	33.127,49	27,46	22,58
3	Ladang/Tegalan	7.803,94	6,47	5,32
4	Sawah Irigasi	59.308,16	49,15	40,42
	Sawah Tadah			0,90
5	Hujan	1.320,15	1,09	
6	Tambak	7.234,54	6,00	4,93
	Lahan Belum			7,81
B.	Diusahakan	11.463,00	9,50	
7	Rawa	1.481,16	1,23	1,01
8	Padang Rumput	2.077,15	1,72	1,42
9	Semak Belukar	6.491,89	5,38	4,42
10	Tanah Kosong	1.412,80	1,17	0,96
Luas Keseluruhan (A + B)		120.658,69	100,00	82,23

Sumber: Dokumen Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Serang 2011 – 2031, (diolah)

Berdasarkan pertimbangan terkait fungsi strategis lahan produktif bagi suatu wilayah maka dalam RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011 – 2031 ditetapkan rencana peruntukan untuk mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif yang ada di Kabupaten Serang. Kawasan

tersebut meliputi kawasan peruntukan hutan rakyat sebesar 5.520 ha, kawasan peruntukan tanaman pangan seluas 32.229,26 ha, kawasan peruntukan perikanan budidaya seluas 224 ha dan kawasan perkebunan seluas 24.965 ha.

B. Kondisi dan Potensi Kawasan Pesisir

1) Kawasan Pesisir

Kawasan atau daerah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Dengan kata lain, kawasan pesisir ini mencakup wilayah daratan dan wilayah perairan (laut). Untuk wilayah daratan, batas kawasan pesisir adalah wilayah administrasi kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan (laut). Secara lebih lengkap lingkup wilayah dan luas kecamatan yang termasuk kawasan pesisir di Kabupaten Serang disajikan dalam Tabel Luas Wilayah Administrasi Kawasan Pesisir Kabupaten Serang.

Tabel. 2.1.16
Luas Wilayah Administrasi Kawasan Pesisir Kabupaten Serang

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas	
			km ²	%
1.	Cinangka	Cinangka	111,47	24,69
2.	Anyar	Anyar	56,81	12,58
3.	Pulo Ampel	Sumuranja	32,56	7,21
4.	Bojonegara	Bojonegara	30,30	6,71
5.	Kramatwatu	Kramatwatu	48,59	10,76
6.	Pontang	Pontang	58,09	12,86
7.	Tirtayasa	Tirtayasa	64,46	14,27
8.	Tanara	Cerukcuk	49,30	10,92
Jumlah			451,58	100,00

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023 (diolah)

Potensi sumber daya yang ada dan telah berkembang di kawasan pesisir meliputi sumber daya kelautan dan perikanan, daya tarik/obyek wisata, jasa kepelabuhan dan sektor industri. Kegiatan budidaya perikanan/tambak banyak dikembangkan diwilayah Pontang, Tirtayasa dan Tanara.Pengembangan industry dan jasa kepelabuhan berkembang di kawasan pesisir Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara dan Pulo Ampel, sedangkan kegiatan wisata banyak berkembang dikawasan Pantai Barat Kabupaten Serang yang meliputi kawasan Anyar dan Cinangka.

2) Daerah Kepulauan

Wilayah Kabupaten Serang memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar ke arah barat dan utara yang terdapat pada enam kecamatan di pesisir yaitu Kecamatan Anyer, Cinangka, Pulo Ampel, Bojonegara, Pontang dan Tirtayasa. Pulau-pulau kecil tersebut memiliki karakteristik dan luasan yang berbeda, yang umumnya pembentukannya berasal dari pulau-pulau karang yang kemudian ditumbuhi oleh vegetasi pantai dan perairan. Salah satu potensi yang sudah dimanfaatkan dari perairan sekitar pulau-pulau ini adalah sebagai area penangkapan ikan karena perairan pulau-pulau ini merupakan tempat berkembang biak ikan-ikan. Menurut informasi para nelayan, hampir semua pulau-pulau kecil yang ada memiliki cukup banyak ketersediaan ikan, sehingga pulau-pulau ini merupakan daerah fishing ground para nelayan. Di samping potensi ikan, pulau-pulau ini memiliki vegetasi pantai yang masih alami dimana menjadi tempat tinggal burung-burung.

Berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder bahwa pada saat ini ada tiga pulau sudah dilakukan pemanfaatannya, baik untuk hunian masyarakat maupun untuk pengembangan pariwisata serta untuk kegiatan perikanan tangkap dan budidaya yaitu Pulau Sangiang, Pulau Panjang dan Pulau Tunda. Pulau-pulau kecil ini memiliki potensi sumber daya unggulan, di samping sebagai daerah konservasi, juga memiliki potensi wisata bahari, wisata lingkungan (ecotourism), perikanan pesisir dan perikanan laut.

Tabel. 2.1.17
Sebaran Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Serang

No.	Kecamatan	Desa	Nama Pulau	Estimasi Luas (Ha)	Keterangan
1.	Anyer	Cikoneng	Sangiang	781,45	Berpenghuni
2.	Cinangka	Cinangka	• Karang Cawene	4,38	Tidak Berpenghuni
			• Karang Parejakah	3,50	Tidak Berpenghuni
3.	Pulo Ampel	Salira	• Salira	1,49	Tidak Berpenghuni
			• Kalih Utara	3,5	Tidak Berpenghuni
		Pulo Ampel	Kalih Selatan	2,8	Tidak Berpenghuni
		Pulo Panjang	• Pulau Panjang	745,61	Berpenghuni
			• Semut	0,35	Tidak Berpenghuni

4.	Bojonegara	Margagiri	Tarahan	8,75	Tidak Berpenghuni
		Bojonegara	•Kemanisan	2,29	Tidak Berpenghuni
			•Cikantung	0,38	Tidak Berpenghuni
5.	Pontang	Susukan	Pamujaan Besar	15,46	Tidak Berpenghuni
		Domas	Pamujaan Kecil	1,66	Tidak Berpenghuni
6.	Tirtayasa	Wargasara	•Tunda	222,86	Berpenghuni
			•Kubur	3,10	Tidak Berpenghuni
			•Pisang	3,10	Tidak Berpenghuni
			Lima	3,28	Tidak Berpenghuni

Sumber: RZWP3K Kabupaten Serang, 2023

C. Potensi Geologi

Sumber daya mineral merupakan modal dasar yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan. Namun demikian perlu diingat, bahwa pemanfaatan dan pengembangan sumber daya mineral dengan kapasitas yang besar merupakan usaha padat modal dan berjangka panjang. Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Serang belum banyak diketahui dengan pasti penyebarannya, kualitas dan kuantitas cadangannya. Potensi bahan galian yang ada di Kabupaten Serang termasuk potensi jenis bahan galian yang terdiri dari:

1) Andesit

Andesit merupakan batuan beku luar, termasuk batuan yang bersifat intermediate dan berbutir halus sampai sedang. Bahan galian ini dijumpai di Gunung Karang dan Gunung Pinang. Penyebaran andesit di Gunung Karang, seluas 7.625 ha dengan potensi deposit terindikasi sekitar 110.781.872.000 m³. Di Gunung Pinang seluas 1.625 Ha dengan potensi deposit diperkirakan sebanyak 412.643.614 m³. Dari jumlah cadangan tersebut memperlihatkan bahwa bahan galian tersebut cukup potensial untuk diusahakan.

2) Diorit

Diorit merupakan batuan beku dalam, termasuk batuan yang bersifat intermediate dan berbutir kasar. Kenampakan di lapangan berupa hasil pembekuan magma. Penyebaran diorit di Gunung Karang seluas 125 ha, dengan deposit cadangan diperkirakan 24.920.330 m³. Sedang di

wilayah Baros seluas 251 ha, dengan jumlah deposit diperkirakan 45.677.527 m³.

3) Basalt

Basalt merupakan batuan beku luar yang terbentuk akibat pembekuan magma dan sebagian besar terbentuk sebagai lava. Penyebarannya dapat dijumpai di Gunung Pinang sebelah barat Kramatwatu. Penyebaran basalt di Gunung Pinang meliputi seluas 775 ha, dengan perkiraan deposit sebanyak 412.643.614 m³. Bahan galian ini berada pada kawasan hutan produksi yang akan diubah statusnya menjadi hutan lindung atau hutan wisata, sehingga tidak dapat diusahakan atau ditimbang. Kegunaan basalt dapat digunakan sebagai bahan bangunan seperti untuk bahan konstruksi bangunan maupun untuk ornamen.

4) Pasir Batu (Sirtu)

Batuan ini merupakan endapan aluvial yang berasal dari rombakan batuan yang berada di hulu sungai atau disekitarnya, tersusun dari berbagai jenis batuan, berukuran dari pasir, kerikil, kerakal hingga bongkahan. Penyebaran sirtu di sepanjang Sungai Cidaun, Ciujung dan Anyer dengan luas penyebaran $\pm$ 4.843,75 ha. Jumlah diperkirakan sebanyak 96.875.000 m³. Melihat bahwa daerah sempadan sungai merupakan wilayah lindung, sebaiknya penambangan/pemanfaatan bahan galian ini dilakukan secara tradisional sehingga tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. Kegunaannya bahan ini sebagai bahan urugan dan bahan untuk campuran adukan beton atau bahan bangunan.

5) Batu Apung

Batu apung merupakan hasil letusan gunung berapi yang mengalami pendinginan secara mendadak. Bentuknya menyudut hingga menyudut tanggung. Penyebarannya ditemukan di bagian selatan Rawa Dano, antara Padarincang hingga Baros, sehingga lokasi ini mudah dicapai. Penyebaran batu apung di daerah ini cukup luas dan cadangannya sulit dihitung karena bercampur dengan mineral lain. Lokasi ini terletak di kawasan lindung sekitar Rawa Dano, sehingga sulit diusahakan secara besar-besaran. Kegunaan bahan galian ini untuk bahan abrasi dan bahan beton ringan.

Di sektor energi, potensi panas bumi cukup prospektif untuk dikembangkan di Kabupaten Serang, dimana hal tersebut terindikasi dengan adanya mata air panas (hotspring) di beberapa tempat. Panas bumi ini selain dapat dikembangkan untuk tujuan pariwisata juga dapat

dikembangkan menjadi pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan dan merupakan sumber energi terbarukan sebagaimana yang telah dikembangkan di beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di wilayah Kabupaten Serang mata air panas terinventarisasi di sekitar kawasan Rawa Dano dan Batukuwung, Kecamatan Padarincang. Berdasarkan hasil penyelidikan terdahulu terindikasi potensi panas bumi sebesar kurang lebih 700 Mw, di daerah G. Karang dan kawasan Kaldera Danau Banten (Rawa Dano).

Selain potensi panas bumi seperti yang telah disampaikan di atas, di wilayah Kabupaten Serang juga terdapat indikasi adanya potensi minyak bumi yang diidentifikasi sebagai Blok Banten dengan luas kurang lebih 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) km², meliputi perairan Laut Jawa di wilayah utara Kabupaten Serang dan perairan Selat Sunda di wilayah barat Kabupaten Serang.

D. Potensi Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Serang dikarenakan nilai produksinya setiap tahun mengalami peningkatan dan menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Serang. Potensi sektor pertanian di Kabupaten Serang terdiri dari sub sektor pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Potensi sektor ini pada dasarnya terdapat hampir di seluruh wilayah Kabupaten Serang.

1) Tanaman Bahan Makanan

Tanaman bahan makanan meliputi tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai.

2) Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan meliputi tanaman karet, kelapa, kopi, cengkeh, lada, kakao, kapok, pala, kemiri, jambu mate, panili, aren, jarak pagar, dan kapulaga.

3) Peternakan

Peternakan meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, dan itik.

4) Perikanan

Perikanan meliputi produksi penangkapan ikan pada perairan umum dan laut serta penangkapan selain ikan.

5) Kehutanan

Kehutanan meliputi luas kawasan hutan menurut fungsinya yaitu,

kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan kawasan konservasi. Berikut merupakan tabel luas kawasan hutan menurut fungsi di Kabupaten Serang pada tahun 2015.

Tabel 2.1.18
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi Kabupaten Serang Tahun 2015

No	Kawasan Hutan	Luas Area (Ha)
1	Kawasan Hutan Lindung	726,64
	a. Hutan Lindung	726,64
2	Kawasan Hutan Produksi	4154,14
	a. Hutan Produksi Terbatas	2827,97
	b. Hutan Produksi	1326,17
3	Kawasan Konservasi	6310,35
	a. Hutan Suaka Alam	5062,2
	b. Hutan Taman Wisata	1248,15

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kawasar konservasi dan hutan produksi sangat dominan di Kabupaten Serang. Ha ini mengindikasikan bahwa kedua kawasan tersebut sangat potensial bag Kabupaten Serang dalam perkembangan.

2.1.1.4 Gambaran Kualitas Lingkungan Hidup

A. Kondisi Pemanfaatan Lahan

Sesuai dengan data penggunaan lahan tahun 2015, penggunaan lahan di Kabupaten Serang di dominasi oleh lahan non terbangun seluas 131.512,87 ha atau 89,63% luas kabupaten serang. Kawasan non terbangun ini berupa hutan, lahan pertanian maupun lahan yang tidak digunakan seperti tanah kosong, semak belukar dan padang rumput. Sedangkan luas lahan kawasan terbangun pada tahun 2015 adalah seluas 15.222,12 ha atau 10,37% dari luas wilayah Kabupaten Serang. Kawasan terbangun ini dipergunakan untuk hunian dan industri.

Penggunaan lahan non terbangun sebagian besar penggunaan lahannya berupa sawah irigasi seluas 59.308,16 Ha atau sekitar 40,42% luas Kabupaten Serang. Lahan sawah ini tersebar di hampir semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Dominasi lahan terbesar kedua pada kawasan non terbangun adalah lahan kebun campuran seluas 33.127,49 ha atau sekitar 22,58%. Lahan ini dapat berupa pertanian lahan

kering yang diusahakan oleh masyarakat. Lahan kebun campuran ini juga tersebar hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Serang. Penggunaan lahan lainnya yang cukup besar di kawasan non terbangun adalah berupa hutan belukar seluas 9.311,27 ha atau sekitar 6,35% dari luas wilayah Kabupaten Serang. Lahan hutan ini terletak di bagian selatan yaitu di sekitar Kecamatan Mancak, Gunungsari, Padarindang dan Ciomas.

Pada lahan terbangun teridentifikasi lahan yang mendominasi adalah perkampungan padat yaitu seluas 10.656,94 ha atau sekitar 7,26%. Sedangkan kegiatan industri menempati lahan seluas 2.116,46 ha atau sekitar 1.44% yang tersebar di sekitar koridor Kragilan-Kibin-Cikande dan disekitar Bojonegara. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan di Kabupaten Serang dapat dilihat pada **Tabel 2.1.19** dan **Gambar 2.1.11**.

Tabel. 2.1.19
Penggunaan Lahan Di Kabupaten Serang Tahun 2015

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
A.	Lahan Non Terbangun	131.512,87	89,63
1	Hutan Belukar	9.311,27	6,35
2	Hutan Rawa	346,20	0,24
3	Perkebunan Besar	401,41	0,27
4	Kebun Campuran	33.127,49	22,58
5	Ladang/Tegalan	7.803,94	5,32
6	Sawah Irigasi	59.308,16	40,42
7	Sawah Tadah Hujan	1.320,15	0,90
8	Tambak	7.234,54	4,93
9	Rawa	1.481,16	1,01
10	Padang Rumput	2.077,15	1,42
11	Semak Belukar	6.491,89	4,42
12	Tanah Kosong	1.412,80	0,96
13	Sungai/Danau/Telaga	1.196,70	0,82
B.	Lahan Terbangun	15.222,12	10,37
14	Perkampungan Jarang	1.875,64	1,28
15	Perkampungan Padat	10.656,94	7,26
16	Perumahan Jarang	32,13	0,02
17	Perumahan Padat	502,67	0,34
18	Industri/Pergudangan	2.116,46	1,44
19	Bandar Udara	38,28	0,03
Jumlah Total (A + B)		146.735,00	100,00

Sumber: Dokumen Fakta dan Analisa Revisi RTRW Kabupaten Serang,



Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan dokumen acuan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam dokumen RTRW tersebut telah ditetapkan rencana pola ruang yang merupakan acuan dalam pemanfaatan ruang yang mekanismenya dilakukan melalui proses perijinan pemanfaatan ruang. Selain rencana pola ruang, dalam RTRW juga telah ditetapkan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) yang merupakan instrument pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Dalam konteks perijinan pemanfaatan ruang, RTRW sebagai acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sebenarnya masih kurang detail mengingat skala peta dan kedalaman substansinya masih bersifat umum (skala wilayah kabupaten). Untuk itu, sebagai jalan keluarnya Pemerintah Daerah dapat menyusun rencana rinci tata ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan atau Kawasan tertentu yang diprioritaskan. RDTR merupakan operasionalisasi dari RTRW yang didalamnya memuat rencana pola ruang yang berpedoman pada KUPZ dalam RTRW.

Tingkat ketaatan terhadap dokumen rencana tata ruang dapat dihitung atau diukur dari seberapa besar tingkat capaian pemanfaatan ruang suatu Kawasan peruntukan (rencana pola ruang) pada suatu wilayah dibandingkan dengan luas rencana suatu kawasan peruntukan yang telah

ditetapkan dalam dokumen tata ruang. Melalui perhitungan atau pengukuran perbandingan antara rencana pola ruang dalam RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011 – 2031 dengan data penggunaan lahan pada tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa tingkat realisasi pemanfaatan ruang terhadap RTRW mencapai nilai 45,90% atau baru seluas 67.355 ha. Sedangkan sisanya seluas 79.392,58 ha belum dimanfaatkan. Untuk mengetahui hasil selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.1.20**.

Tabel. 2.1. 20
Tingkat Realisasi Pemanfaatan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Serang

Rencana Pola Ruang	Luas Zona (ha)	Realisasi Luas Pemanfaatan Tahun 2017			
		Dimanfaatkan		Belum Dimanfaatkan	
		(ha)	(%)	(ha)	(%)
A. Kawasan Lindung	11.612,56	11.601,66	99,91	10,90	0,09
1. Hutan Lindung	716,94	716,94	100,00	0,00	0,00
2. Sempadan Pantai	1.163,46	1.163,46	100,00	0,00	0,00
3. Sempadan Sungai	3.064,04	3.064,04	100,00	0,00	0,00
4. Kawasan Suaka Alam	5.063,44	5.063,44	100,00	0,00	0,00
5. Kawasan Pelestarian Alam	558,65	558,65	100,00	0,00	0,00
6. Kawasan Cagar Budaya	747,54	736,64	98,54	10,90	0,09
7. Kawasan Mangrove	298,48	298,48	100,00	0,00	0,00
B. Kawasan Budidaya	135.135.02	55.753,34	41,26	79.381,67	58,74
8. Kawasan Hutan Produksi Terbatas	4.396,36	4.395,45	99,98	0,90	0,02
9. Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.288,19	1.288,19	100,00	0,00	0,00

10.	Kawasan Hutan Rakyat	5.539,64	5.402,33	97,52	137,31	2,48
11.	Kawasan Tanaman Pangan	32.229,27	26.927,74	83,55	5.301,52	16,45
12.	Kawasan Perkebunan	24.946,15	3.254,58	13,04	21.709,57	86,6
13.	Kawasan Perikanan Budidaya	223,99	223,99	100,00	0,00	0,00
14.	Kawasan Industri	26.194,80	3.682,61	14,06	22.512,19	85,94
15.	Kawasan Pariwisata	3.286,96	336,95	10,25	2.950,01	89,75
16.	Kawasan Permukiman Perkotaan	32.126,73	7.026,09	21,87	25.100,64	78,13
17.	Kawasan Permukiman Perdesaan	3.957,25	2.287,72	57,81	1.669,53	42,19
18.	Badan Sungai	927,69	927,69	100,00	0,00	0,00
Luas						
Keseluruhan (A + B)		146,747,58	67.355,00	45,90	79.392,58	54,10

Sumber: DPUPR Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

Sementara itu, untuk tingkat kesesuaian dalam pemanfaatan ruang dapat dilihat pada **Tabel 2.1.21**, dimana kita lihat pada tabel tersebut bahwa sekitar 95,04 % atau seluas 64.013,06 ha merupakan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana polar uang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Serang.

Tabel. 2.1.21
Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Rencana Pola Ruang RTRW
Kabupaten Serang

Rencana Pola Ruang	Luas Realisasi (Ha)	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			
		Sesuai		Tidak Sesuai	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
A. Kawasan Lindung	11.601,66	9.046,77	77,98	2.554,88	22,02
1. Hutan Lindung	716,94	710,87	6,13	6,07	0,05
2. Sempadan Pantai	1.163,46	856,37	7,46	298,09	2,57
3. Sempadan Sungai	3.064,04	2.096,39	18,07	967,66	8,34
4. Kawasan Suaka Alam	5.063,44	3.801,59	32,77	1.261,85	10,88
5. Kawasan Pelestarian Alam	558,65	541,06	4,66	17,59	0,15
6. Kawasan Cagar Budaya	736,64	733,01	6,32	3,63	0,03
7. Kawasan Mangrove	298,48	298,48	2,57	0,00	0,00
B. Kawasan Budidaya	55.753,34	54.966,29	98,59	787,06	1,41
8. Kawasan Hutan Produksi Terbatas	4.395,45	4.322,04	7,86	73,42	9,33
9. Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.288,19	1.272,20	2,31	15,99	2,03
10. Kawasan Hutan Rakyat	5.402,33	5.318,80	9,68	83,53	10,61
11. Kawasan Tanaman Pangan	26.927,74	26.878,70	48,90	49,04	6,23
12. Kawasan Perkebunan	3.254,58	3.211,23	5,86	33,35	4,24
13. Kawasan Perikanan Budidaya	223,99	223,99	0,41	0,00	0,00
14. Kawasan Industri	3.682,61	3.678,64	6,69	3,97	0,50

15.	Kawasan Pariwisata	336,95	306,27	0,56	30,67	3,90
16.	Kawasan Permukiman Perkotaan	7.026,09	6.529,48	11,88	496,61	63,10
17.	Kawasan Permukiman Perdesaan	2.287,72	2.287,24	4,16	0,49	0,06
18.	Badan Sungai	927,69	927,69	1,69	0	0,00
Luas Keseluruhan (A + B)		67.355,00	64.013,06	95,04	3.341,94	4,96

Sumber: DPUPR Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

Berdasarkan **Tabel 2.1.22**, pada tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang meningkat di tiap tahunnya terkait dengan realisasi RTRW di Kabupaten Serang. Pada tahun 2019 realisasi RTRW sebesar 64.176,25 ha dan terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 114.826,82 ha dari rencana peruntukan RTRW sebesar 147.213,87 ha.

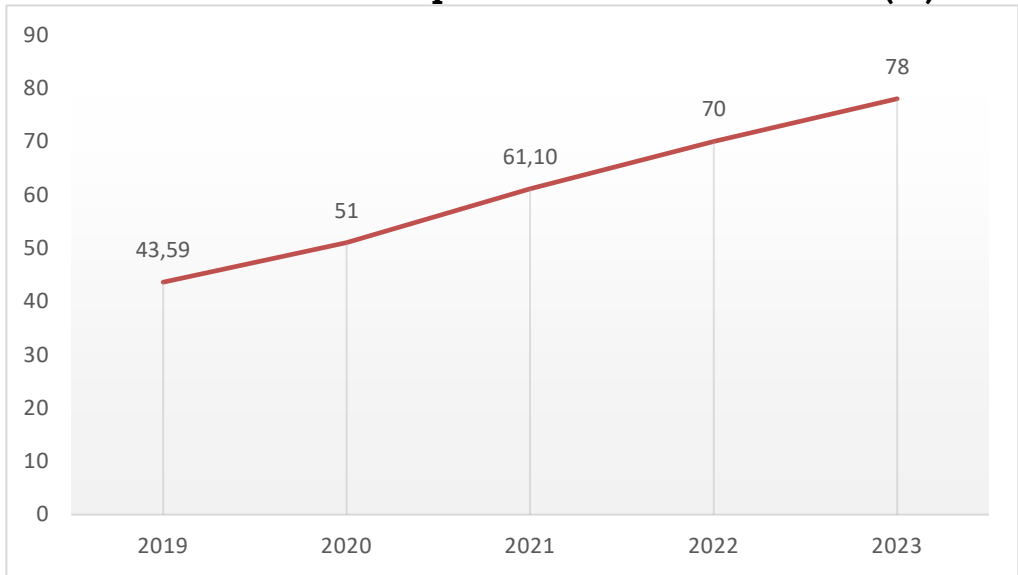
Tabel. 2.1.22
Rencana dan Realisasi RTRW di Kabupaten Serang Tahun 2019-2023

N o.	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Realisasi RTRW (ha)	64.176,25	75.079,07	89.953,71	103.049,71	114.826,82
2	Rencana Peruntukan RTRW (ha)	147.213,87	147.213,87	147.213,87	147.213,87	147.213,87

Sumber: Hasil Analisis Rasio Kesesuaian Tata Ruang (RTRW Kabupaten Serang)

Jika dilihat dari **Grafik 2.1.1**, ketaatan terhadap RTRW menunjukkan realisasi yang positif. Peningkatan pada tiap tahunnya mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya dan berkomitmen untuk melakukan Pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dalam RTRW hingga di tahun 2023 mencapai 78%.

Grafik. 2.1. 1
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2019-2023 (%)



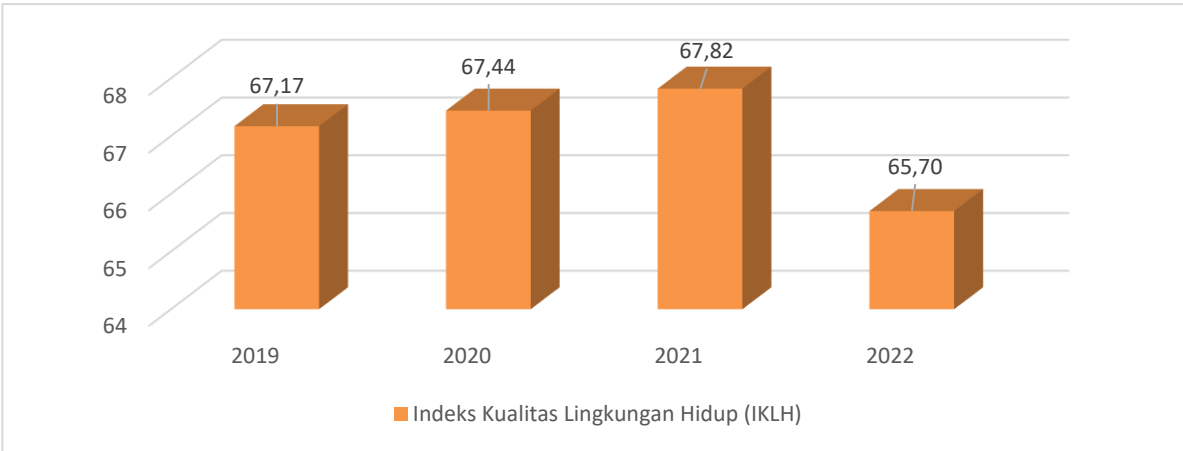
Sumber: Hasil Analisis Rasio Kesesuaian Tata Ruang (RTRW Kabupaten Serang), diolah

C. Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)

Salah satu sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk meningkatkan kualitas lingkungan adalah menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja utama adalah indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) berada pada kisaran 66,5- 68,5 (KLHK RI, 2019).

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional yang digeneralisasi dari nilai IKLH seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Grafik. 2.1. 2
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Serang Tahun 2019-2022



Sumber: LKIP, LPPD DLH Kab.Serang

Berdasarkan **Grafik 2.1.2**, capaian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) pada tahun 2019-2021 menunjukkan peningkatan pada tahun 2020 hingga tahun 2021, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2022. Pada tahun 2019, IKLH mencapai 67,17 meningkat pada tahun 2021 mencapai 67,44 dan terus meningkat hingga pada tahun 2021 mencapai 67,82. Akan tetapi, pada tahun 2022 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan mencapai 65,70.

2.1.1.5 Kebencanaan dan Perubahan Iklim

A. Kawasan Rawan Bencana

Keadaan geofisika Indonesia sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng (plate) yang ada di dalamnya. Indonesia merupakan daerah pertemuan antara lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara, lempeng Pasifik yang bergerak ke barat dan lempeng Asia Tenggara (lempeng Sunda atau lempeng Eurasia) yang bergerak ke selatan. Di samping ketiga lempeng besar tersebut terdapat juga lempeng mikro yang disebut dengan platelet Sumatera, di mana gerakannya berbeda dan bervariasi menurut lokasi. Di bagian utara terdapat lempeng Filipina.

Interaksi antara lempeng Indonesia-Australia dengan Eurasia antara lain tercermin oleh bentuk Palung Sunda yang memanjang sejajar dengan busur Sunda. Bentuk palung ini terjadi akibat dari kegiatan penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Sunda, di mana di selatan Pulau Jawa berarah barat-timur dan pergerakannya ke arah tegak lurus selatan-utara, sedangkan di barat daya Pulau Sumatera berarah barat laut-tenggara mengarah barat daya-timur laut, namun menyerong barat laut-tenggara. Pertemuan lempeng-lempeng bumi ini yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, dan juga kemungkinan tsunami.

Kondisi geologi di Selat Sunda sangat mempengaruhi sifat geologi dan geofisika Provinsi Banten secara umum maupun Kabupaten Serang secara khusus. Pengaruh tersebut tercermin dari:

- 1) Adanya ujung patahan atau sesar Sumatera (sesar Semangko) di Sumatera yang memanjang sampai Selat Sunda, yang merupakan jenis sesar geser aktif dengan panjang 1.650 km, yang memiliki pergerakan lateral antara 20 – 25 km dan percepatan horizontal 6 cm/tahun;
- 2) Bentuk umum daerah sebelah utara wilayah Propinsi Banten yang bermorfologi dataran dengan dominasi batuan sedimen atau alluvium atau perbukitan di Gunung Gede, sedangkan daerah selatan yang

bermorfologi perbukitan/pegunungan dibentuk oleh batuan-batuan beku, metamorf, dan batuan hasil kegiatan gunung api (vulkanik);

- 3) Intensitas struktur patahan (fault) dan lipatan (fold) yang lebih tinggi di daerah selatan dibandingkan dengan daerah bagian utara;
- 4) Arah sungai yang umumnya mengalir dari selatan dan tengah yang berupa perbukitan bergelombang ke arah utara yang umumnya berupa dataran pantai, sedangkan di Kabupaten Serang bagian barat daya dan bagian barat laut Kabupaten Pandeglang pola pengaliran air permukaannya mengarah dari timur ke barat;
- 5) Adanya mata air panas di sekitar Rawa Dano, yang menunjukkan sisa-sisa kegiatan volkanisme, dan Rawa Dano merupakan kawah purba;
- 6) Terdapatnya gunung berapi seperti Gunung Anak Krakatau yang sangat aktif dan merupakan bentukan sejak sekitar tahun 1930an setelah peristiwa letusan Krakatau tahun 1883 yang menghancurkan bagian tengah gunungapi itu sehingga sangat terkenal; serta perbukitan Gunung Karang, Gunung Condong dan Gunung Pulasari di bagian selatan Kabupaten Serang;
- 7) Tingginya tingkat kegempaan di bagian selatan Propinsi Banten, meskipun untuk di Kabupaten Serang lebih banyak terasa di wilayahnya bagian selatan;
- 8) Pernah terjadinya tsunami akibat letusan Gunungapi Krakatau tahun 1883 yang menggemparkan dunia waktu itu karena tenaga dan tinggi gelombang tsunami yang dihasilkannya, dan menyapu dataran pesisir sekeliling dan tepi Selat Sunda, termasuk perairan barat Kabupaten Serang.

Beberapa potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Serang antara lain:

a. Banjir

Kawasan rawan banjir umumnya adalah daerah di sepanjang tepi Sungai Ciujung bagian hulu bahkan hingga bagian hilir di daerah muara Sungai Ciujung dengan anak-anak sungainya. Dalam setiap tahunnya Sungai Ciujung ini menyebabkan banjir di daerah muara sungai di Kecamatan Tirtayasa dan kecamatan Pontang, bahkan di beberapa kecamatan yang masih termasuk dalam DAS Ciujung. Beberapa kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cikande, Kecamatan Carenang, Kecamatan Kragilan,

Kecamatan Petir, dan Kecamatan Padarincang. Penyebab banjir lainnya adalah terjadinya sedimentasi/pendangkalan pada sungai-sungai tersebut, sehingga menyebabkan sumbatan. Hal ini lebih terlihat di wilayah muara Sungai Ciujung.

b. Gunung Api

Potensi bencana gunung meletus yang ada di wilayah Kabupaten Serang berasal dari Gunung Anak Krakatau yang berada di Kawasan Selat Sunda. Wilayah yang potensial terkena dampak letusan gunung ini berada di wilayah pesisir barat Kabupaten Serang yaitu kawasan Anyar dan Cinangka.

Selain itu terdapat pula kawasan rawan bencana disekitar Gunung Karang di wilayah Serang bagian Selatan.

c. Tanah Longsor

Kondisi topografi dan morfologi Kabupaten Serang yang sangat bervariasi dari wilayah pesisir sampai dengan wilayah perbukitan memiliki potensi adanya bencana tanah longsor. Wilayah yang rawan terkena bencana tanah longsor ini biasanya dikawasan perbukitan atau lereng perbukitan. Beberapa kawasan yang rawan terkena bencana tanah longsor antara lain adalah di bagian selatan Kabupaten Serang yang berada di kawasan Gunung Karang yang meliputi Kecamatan Padarincang, Ciomas, Pabuaran, Gunung Sari dan Baros. Selain itu juga di beberapa kawasan lainnya yaitu di Kecamatan Waringin Kurung, Bojonegara dan Pulo Ampel.

d. Gempa Bumi

Potensi bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Serang secara umum dapat diakibatkan karena adanya aktivitas vulkanik (Gunung Anak Krakatau) maupun pergerakan lempeng tektonik. Seluruh wilayah Kabupaten Serang merupakan daerah yang potensial terkena dampak gempa bumi, terutama adalah wilayah pesisir Barat Kabupaten Serang (Kawasan pesisir Selat Sunda).

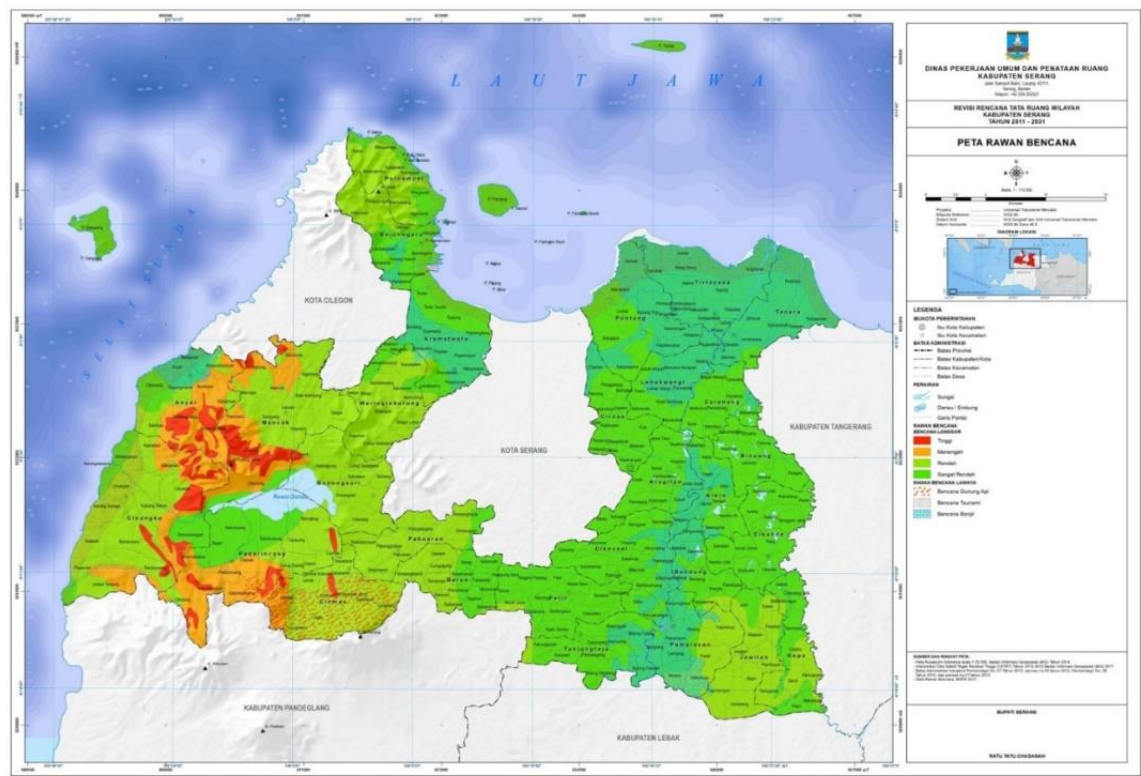
e. Tsunami

Kawasan yang berpotensi terkena dampak bencana Tsunami adalah dikawasan Pesisir Kabupaten Serang yang terletak di Kawasan Pantai Barat yaitu sepanjang Pesisir Pantai Anyar sampai Cinangka, kedua daerah ini merupakan daerah dengan potensi terkena tsunami tertinggi

karena terletak pada Kawasan Selat Sunda yang merupakan daerah patahan serta Gunung Anak Krakatau.

Wilayah pesisir lain yang rawan terkena bencana tsunami adalah kawasan pesisir Utara yang berada di Laut Jawa atau Teluk Banten, walaupun tingkat kerawannya tidak sebesar wilayah pesisir Barat. Wilayah ini meliputi kawasan Pulo Ampel, Bojonegara, Pontang, Tirtayasa dan Tanara.

Gambar. 2.1. 12
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Serang



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, 2023

f. Bencana Industri

Selain potensi atau risiko bencana alam di wilayah Kabupaten Serang juga ada risiko bencana akibat kegagalan teknologi terutama pada kawasan-kawasan yang berada di sekitar lokasi pabrik/industri. Kawasan yang berpotensi terdampak bencana kegagalan industri antara lain adalah di bagian timur dan barat wilayah Kabupaten Serang antara di wilayah Kecamatan Pulo Ampel, Bojonegara, Kramatwatu, Anyar, Ciruas, Kragilan, Kibin, Cikande, Kopo dan Jawilan.

g. Bencana Non Alam dan Bencana Sosial

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

B. Indeks Risiko Bencana

Di sisi lain, kondisi geologi di Selat Sunda sangat mempengaruhi sifat geologi dan geofisika Provinsi Banten secara umum maupun Kabupaten Serang secara khusus, membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, dan kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui tingkat risiko bencana sudah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB mengeluarkan indeks risiko bencana (IRB) sebagai gambaran status kebencanaan di suatu wilayah.

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/ kota dilakukan dengan memerhatikan factor hazard, vulnerability, dan capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian yang ada di Kabuapten Serang berdasarkan risiko bencana yang ada.

Tabel. 2.1.23
Data Indeks Risiko Bencana Per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2016-2023

KABUPATEN/KOT A	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Pandeglang	215,20	215,20	215,20	215,20	177,46	177,46	203,05	169,21
Kab. Lebak	215,20	215,20	215,20	215,20	182,04	182,04	199,57	172,98
Kab. Tangerang	200,80	185,63	185,63	170,15	146,93	146,93	130,45	141,43
Kab. Serang	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	176,14	154,18	136,82
Kota Tangerang	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	132,80	116,80	104,55
Kota Cilegon	182,40	182,40	164,32	147,21	128,15	121,23	115,97	119,49
Kota Serang	184,80	184,80	168,56	168,56	168,56	168,56	156,20	140,12
Kota Tangerang Selatan	102,40	102,40	102,40	102,40	96,61	87,44	79,86	73,06

Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022;
BNBP, 2024

Berdasarkan **Tabel 2.1.23**, risiko bencana di Kabupaten Serang menunjukkan tren positif dengan kecenderungan penurunan Indeks Risiko Bencana pada tahun 2016 hingga tahun 2023. Pada tahun 2016 – 2020 IRB Kabupaten Serang tercatat sebesar 203, 20 dan terus mengalami penurunan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan nilai IRB sebesar 136,82. Meskipun adanya penurunan nilai indeks tersebut, risiko bencana di Kabupaten Serang masih masuk dalam kategori tinggi.

C. Indeks Ketahanan Daerah

Tingginya potensi bencana di Provinsi Banten belum diiringi dengan kemampuan dan kapasitas daerah kabupaten/ kota di Provinsi Banten dalam menghadapi bencana. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) kabupaten/ kota berada dalam rentang Rendah-Sedang. Hal ini berimplikasi pada nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) kabupaten/ kota dan provinsi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa masih perlu adanya upaya peningkatan penanggulangan bencana (pra bencana – tanggap darurat – pascabencana) baik yang dilakukan melalui kewenangan Pemerintah Provinsi maupun kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota (BNPB Provinsi Banten, 2023). Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah. Oleh karenanya, melalui pengukuran IKD Kabupaten/Kota dapat dihasilkan peta kapasitas yang kemudian ditumpang susunkan (overlay) dengan peta bahaya dan peta kerentanan sehingga menghasilkan peta risiko, sesuai dengan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, serta mengacu kepada petunjuk teknis BNPB tahun 2019.

Tabel. 2.1.24
Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Provinsi Banten Tahun 2021-2023

KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKD Tahun 2021	Nilai IKD Tahun 2022	Nilai IKD Tahun 2023
Kab. Pandeglang	0,78	0,84	0,77
Kab. Lebak	0,66	0,32	0,63
Kab. Tangerang	0,70	0,70	0,69
Kab. Serang	0,58	0,81	0,68
Kota Tangerang	0,35	0,52	0,59
Kota Cilegon	0,56	0,75	0,56
Kota Serang	0,46	0,45	0,58
Kota Tangerang Selatan	0,50	0,53	0,58

Sumber: BNPB, 2024

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan ketahanan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam menghadapi potensi bencana memiliki nilai yang berbeda-beda karena struktur geografis yang berbeda juga pada tiap wilayah. Pada tahun 2021, Kabupaten Serang memiliki nilai IKD sebesar 0,58 dengan kategori tinggi secara kapasitas ketahanan daerah dalam menanggulangi bencana, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan nilai IKD menjadi sebesar 0,68 dari tahun sebelumnya (2022). Penurunan nilai IKD ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Serang perlu lebih bekerja keras untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam hal kebencanaan.

D. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas

(keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur (Badan Pangan Nasional, 2023). Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Tabel. 2.1. 25
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Serang Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Ketahanan Pangan	75,58	77,95	77,87	77,07	78,63

Sumber: Survey Pangan Nasional, 2022

Berdasarkan **Tabel 2.1.25**, selama periode tahun 2018-2022 Kabupaten Serang memiliki ketahan pangan yang baik di tiap tahunnya. Pada tahun 2018, nilai IKP sebesar 75,58 dengan kategori baik dan cenderung meningkat hingga tahun 2022 mencapai 78,63 dengan kategori sangat baik atau sangat tahan akan ketahanan pangannya.

E. Indeks Ketahanan Energi (Rasio Ketersediaan Daya Listrik dan Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik)

1) Rasio Ketersediaan Daya Listrik

PT. PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik berdasarkan data BPS dari tahun 2014 – 2020 telah menyalurkan daya pada pelanggan di wilayah Kabupaten Serang sebesar 1.961.285.900 VA, dengan daya terbesar disalurkan sebesar 434.602.000 VA pada tahun 2019. Jumlah daya yang disalurkan pertahun perpelanggan adalah sebesar 1.090,70 VA dengan jumlah daya terbesar disalurkan pada tahun adalah sebesar 1.432,43 VA yaitu pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya jumlah daya listri kterpasang yang disalurkan kepada pelanggan di wilayah Kabupaten Serang dapat dilihat pada Tabel 2.1.26.

Tabel. 2.1. 26
Jumlah Pelanggan dan Jumlah Daya Listrik Terpasang PT. PLN
Di Kabupaten Serang Tahun 2015 – 2022

No.	Tahun	Jumlah Pelanggan (Sambungan)	Jumlah Daya Listrik Terpasang (VA)
1	2014	260.393	311.718.300
2	2015	289.079	243.207.250
3	2016	303.411	261.654.850
4	2017	321.175	284.050.500
5	2018	n.a.	n.a.
6	2019	303.402	261.654.850
7	2020	321.175	284.050.000

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023 dan BPS Kabupaten
Serang, 2023 (diolah)

2) Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Jumlah pelanggan listrik mengalami fluktuasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Menurut data yang diterbitkan oleh BPS pada tahun 2020 tercatat jumlah pelanggan listrik PT. PLN sebanyak 321.175, dengan jumlah pelanggan terbanyak berasal dari pelanggan rumah tangga dengan jumlah sebanyak 305.021 atau sebesar 94,97dari jumlah keseluruhan pelanggan pada tahun yang sama. Jumlah pelanggan rumah tangga pada tahun 2019 tercatat sebanyak 289.530 pelanggan naik sebesar 15.491 menjadi 305.021 pelanggan pada tahun 2020. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.1.27.**

Tabel. 2.1. 27
Jumlah Pelanggan Listrik PT. PLN Berdasarkan Golongan Tarif
di Kabupaten Serang Tahun 2015 – 2022

No.	Golongan Tarif	Jumlah Pelanggan Listrik PT. PLN (Sambungan)							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sosial	6.772	7.452	7.824	8.403	n.a.	7.833	8.403	n.a.
2	Rumah Tangga	249.02	276.24	289.30	305.21	n.a.	289.30	305.21	n.a.
3	Usaha	3.736	4.156	5.162	6.821	n.a.	5.162	6.821	n.a.
4	Industri	263	176	182	191	n.a.	182	191	n.a.

5	Pemerintah	214	229	238	256	n.a.	238	256	n.a.
6	Jalan Umum	406	442	457	483	n.a.	457	483	n.a.
Jumlah		260.393	289.07	303.41	321.17	n.a.	303.40	321.17	
			9	1	5		2	5	

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023 dan
BPS Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

F. Indeks Ketahanan Air (Neraca Air)

Neraca Air atau Imbangan Air mengilustrasikan seberapa besar debit sungai yang didistribusikan dan dimanfaatkan untuk keperluan domestic, industri, PDAM, irigasi dan lain-lain. Sisa debit yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan perencanaan spam terekapitulasi pada tiap daerah aliran sungai (DAS).

1) DAS Cidanau

Rekapitulasi besarnya debit andalan, pemakaian air dan sisa air yang dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

- a) Sungai Cidanau

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 2,13 \text{ m}^3/\text{det}$ sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 3,87 \text{ m}^3/\text{det}$ sebesar

Neraca Air (Sisa air) $Q = -1,74 \text{ m}^3/\text{det}$ (defisit)
- b) Sungai Cidungiang-Cibetung

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 0,62 \text{ m}^3/\text{det}$ sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 0,04 \text{ m}^3/\text{det}$ sebesar

Neraca Air (Sisa air) $Q = 0,58 \text{ m}^3/\text{det}$ (surplus)
- c) Sungai Cikalumpang

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 0,09 \text{ m}^3/\text{det}$ sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 0,01 \text{ m}^3/\text{det}$ sebesar

Neraca Air (Sisa air) $Q = 0,08 \text{ m}^3/\text{det}$
(surplus)

Total DAS Cidanau

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 2,84 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 3,99 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Neraca Air (Sisa air yang bisa $Q = -1,15 \text{ m}^3/\text{det}$
dimanfaatkan) (defisit)

2) DAS Cidurian

Rekapitulasi besarnya debit andalan, pemakaian air dan sisa air yang dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

a) Sungai Cibeurem-Neglasari

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 0,91 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 0,32 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Neraca Air (Sisa air) $Q = 0,59 \text{ m}^3/\text{det}$
(surplus)

b) Sungai Cidurian-Cikande Parigi

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 13,90 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 6,54 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Neraca Air (Sisa air) $Q = 7,36 \text{ m}^3/\text{det}$
(surplus)

c) Sungai Cidurian Hulu

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 1,72 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 0,99 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Neraca Air (Sisa air) $Q = 0,73 \text{ m}^3/\text{det}$
(surplus)

Total DAS Cidurian

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 16,53 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 7,85 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Neraca Air (Sisa air yang bisa $Q = 8,68 \text{ m}^3/\text{det}$
dimanfaatkan) (surplus)

3) DAS Ciujung

Rekapitulasi besarnya debit andalan, pemakaian air dan sisa air yang dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

a) Ciujung-Pamarayan

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 43,95 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 20,23 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Neraca Air (Sisa air) $Q = 23,72 \text{ m}^3/\text{det}$
(surplus)

b) Ciujung Hulu-Bojongmanik

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 8,24 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 2,72 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Neraca Air (Sisa air) $Q = 5,52 \text{ m}^3/\text{det}$
(surplus)

c) Ciberang Jembatan Keong

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 16,55 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 9,31 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Neraca Air (Sisa air) $Q = 7,33 \text{ m}^3/\text{det}$
(surplus)

d) Sungai Ciberang Sabagi

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 9,26 \text{ m}^3/\text{det}$

sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 5,36 \text{ m}^3/\text{det}$

sebesar

Neraca Air (Sisa air) $Q = 3,89 \text{ m}^3/\text{det}$
(surplus)

e) Sungai Cilaki-Jahe

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 6,00 \text{ m}^3/\text{det}$

sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 3,09 \text{ m}^3/\text{det}$

sebesar

Neraca Air (Sisa air) $Q = 2,91 \text{ m}^3/\text{det}$
(surplus)

f) Sungai Cisimeut-Cidamar

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 2,72 \text{ m}^3/\text{det}$

sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 1,18 \text{ m}^3/\text{det}$

sebesar

Neraca Air (Sisa air) $Q = 1,54 \text{ m}^3/\text{det}$
(surplus)

g) Sungai Ciujung Jembatan
Rangkasbitung

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 41,22 \text{ m}^3/\text{det}$

sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 27,96 \text{ m}^3/\text{det}$

sebesar

Neraca Air (Sisa air) $Q = 13,25 \text{ m}^3/\text{det}$
(surplus)

h) Sungai Ciujung-Kebin / Keragilan

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 47,00 \text{ m}^3/\text{det}$

sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 30,18 \text{ m}^3/\text{det}$

sebesar

Neraca Air (Sisa air) $Q = 16,82 \text{ m}^3/\text{det}$
(surplus)

i) Bendung Pamarayan

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 9,27 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 5,81 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Neraca Air (Sisa air) $Q = 3,46 \text{ m}^3/\text{det}$
(surplus)

Total DAS Cidurian

Debit andalan rata-rata tahunan $Q = 184,18 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Air yang terpakai rata-rata tahunan $Q = 105,84 \text{ m}^3/\text{det}$
sebesar

Neraca Air (Sisa air yang bisa dimanfaatkan) $Q = 78,34 \text{ m}^3/\text{det}$
(surplus)

2.1.2 Aspek Demografi

Aspek demografi dari suatu daerah mengacu pada karakteristik penduduk di wilayah tersebut. Ini mencakup berbagai variabel yang mempengaruhi ukuran, komposisi, dan distribusi populasi. Pemahaman demografi suatu daerah penting dalam perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan pengembangan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, beberapa komponen utama dari aspek demografi daerah memberikan wawasan tentang karakteristik, dinamika, dan tren populasi pada suatu wilayah tersebut.

2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Serang

A. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk sebagai sektor utama dalam pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam dalam penentuan kebijakan. Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor terpenting kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. Baik dan buruknya SDM yang dimiliki wilayah tersebut menentukan pola maju dan mundurnya pembangunan wilayah tersebut, tidak terkecuali Kabupaten Serang.

Tabel 2.1.28
Jumlah Penduduk Per-Wilayah Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Serang Tahun 2023

No.	Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	% Penduduk
1.	Cinangka	32.461	30.969	63.430	3.67%
2.	Padarincang	38.566	36.819	75.385	4.36%
3.	Ciomas	24.183	22.688	46.871	2.71%
4.	Pabuaran	24.504	23.171	47.675	2.75%
5.	Gunungsari	13.252	12.475	25.727	1.49%
6.	Baros	32.992	30.700	63.692	3.68%
7.	Petir	34.297	32.441	66.738	3.86%
8.	Tunjung Teja	25.824	24.599	50.423	2.91%
9.	Cikeusal	41.781	41.072	82.853	4.79%
10.	Pamarayan	33.441	31.440	64.881	3.75%
11.	Bandung	20.751	20.159	40.910	2.36%
12.	Jawilan	33.637	31.628	65.265	3.77%
13.	Kopo	29.952	27.903	57.855	3.34%
14.	Cikande	59.501	58.023	117.524	6.79%
15.	Kibin	31.215	30.882	62.097	3.59%
16.	Kragilan	42.854	42.014	84.868	4.90%
17.	Waringinkurung	26.495	25.647	52.142	3.01%
18.	Mancak	26.870	24.856	51.726	2.99%
19.	Anyar	31.039	29.972	61.011	3.53%
20.	Bojonegara	26.799	25.829	52.628	3.04%
21.	Pulo Ampel	20.783	20.380	41.163	2.38%
22.	Kramatwatu	53.041	51.090	104.131	6.02%
23.	Ciruas	43.806	42.804	86.610	5.00%
24.	Pontang	25.164	24.761	49.925	2.88%
25.	Lebak Wangi	20.843	20.593	41.436	2.39%
26.	Carenang	21.205	21.046	42.251	2.44%
27.	Binuang	17.325	16.974	34.299	1.98%
28.	Tirtayasa	25.799	25.138	50.937	2.94%
29.	Tanara	23.238	22.841	46.079	2.66%
Kabupaten		881.618	848.914	1.730.532	100

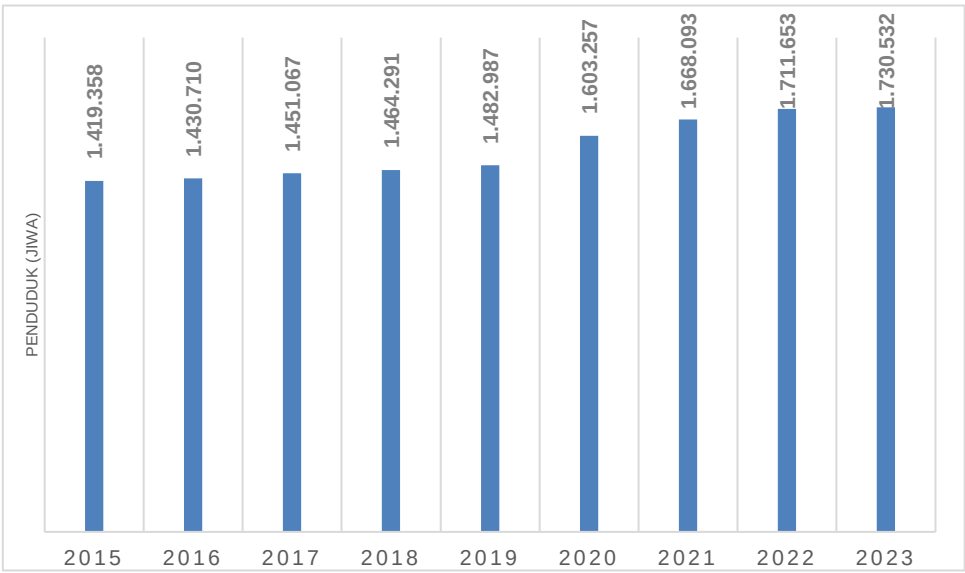
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Serang Semester II Tahun 2023 (diolah)

Dilihat dari tabel 2.1.28 diatas jumlah penduduk Kabupaten Serang pada tahun 2023 semester II sebesar 1.730.532 jiwa , kecamatan Cikande merupakan kecamatan terbanyak penduduknya yaitu mencapai 117.524 jiwa atau sebesar 6,79 % dari total penduduk Kabupaten Serang. Sedangkan kecamatan Gunungsari dengan jumlah penduduk terendah sebanyak 25.727 jiwa atau sebesar 1,49 persen dari total penduduk Kabupaten Serang.

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kependudukan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2023 Semester II (satu), jumlah penduduk Kabupaten Serang adalah sebesar 1.730.532 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,74% per tahun selama kurun waktu 2015 – 2023 Semester II (dua).

Grafik. 2.1.3
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Serang Tahun 2015 – 2023



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Serang, 2015-2023

C. Sex Rasio Penduduk

Sex rasio penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan komposisi penduduknya, jumlah penduduk laki-laki sebesar 881.618 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebesar 848.914 jiwa. Rasio jenis kelamin Kabupaten Serang Tahun 2023 sebesar 103,85. Hal tersebut menggambarkan terdapat kurang lebih 104 penduduk laki-laki dari setiap 100 penduduk perempuan. Secara lengkap sex rasio penduduk pada masing-masing kecamatan di kabupaten Serang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.29
Sex Rasio Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Serang

No.	Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Sex Rasio
1.	Cinangka	32.461	30.969	104.82
2.	Padarincang	38.566	36.819	104.74
3.	Ciomas	24.183	22.688	106.59
4.	Pabuaran	24.504	23.171	105.75
5.	Gunungsari	13.252	12.475	106.23
6.	Baros	32.992	30.700	107.47
7.	Petir	34.297	32.441	105.72
8.	Tunjung Teja	25.824	24.599	104.98
9.	Cikeusal	41.781	41.072	101.73
10.	Pamarayan	33.441	31.440	106.36
11.	Bandung	20.751	20.159	102.94
12.	Jawilan	33.637	31.628	106.35
13.	Kopo	29.952	27.903	107.34
14.	Cikande	59.501	58.023	102.55
15.	Kibin	31.215	30.882	101.08
16.	Kragilan	42.854	42.014	102.00
17.	Waringinkurung	26.495	25.647	103.31
18.	Mancak	26.870	24.856	108.10
19.	Anyar	31.039	29.972	103.56
20.	Bojonegara	26.799	25.829	103.76
21.	Pulo Ampel	20.783	20.380	101.98
22.	Kramatwatu	53.041	51.090	103.82
23.	Ciruas	43.806	42.804	102.34
24.	Pontang	25.164	24.761	101.63
25.	Lebak Wangi	20.843	20.593	101.21
26.	Carenang	21.205	21.046	100.76
27.	Binuang	17.325	16.974	102.07
28.	Tirtayasa	25.799	25.138	102.63
29.	Tanara	23.238	22.841	101.74
Kabupaten		881.618	848.914	103,85

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Serang

2.1.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Umur

Data Disdukcapil Kabupaten Serang sampai dengan semester II Tahun 2023 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Serang di dominasi Kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebanyak 9,70%, diikuti kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 9,08%. Secara lebih lengkap data sebaran penduduk kabupaten Serang berdsarkan kelompok umur disajikan pada tabel berikut.

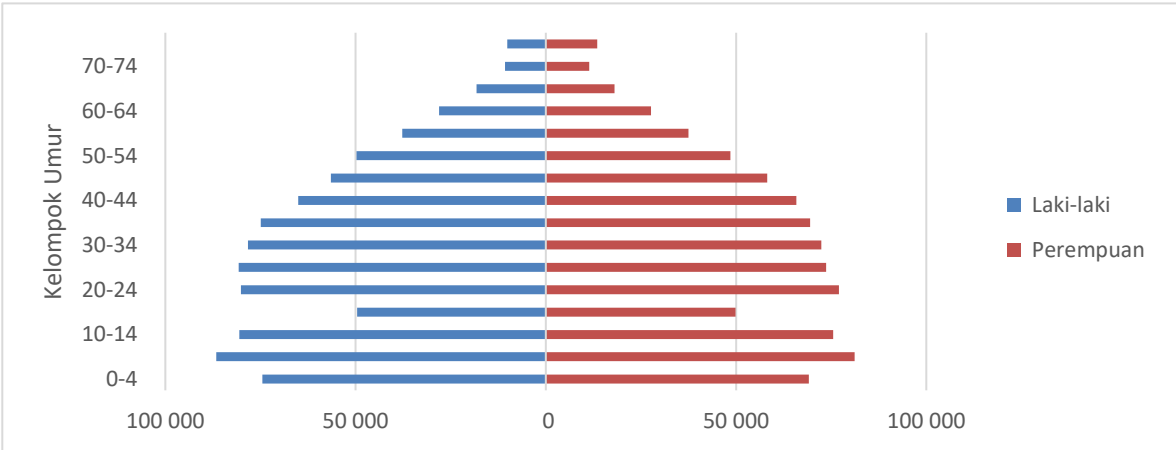
Tabel. 2.1.30
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Serang
Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase (%)
0-4	74.526	69.157	143.683	8.30
5-9	86.634	81.142	167.776	9.70
10-14	80.567	75.550	156.117	9.02
15-19	49.583	49.858	99.441	5.75
20-24	80.162	77.003	157.165	9.08
25-29	80.769	73.630	154.399	8.92
30-34	78.262	72.399	150.661	8.71
35-39	74.890	69.459	144.349	8.34
40-44	65.075	65.860	130.935	7.57
45-49	56.521	58.200	114.721	6.63
50-54	49.723	48.483	98.206	5.67
55-59	37.745	37.524	75.269	4.35
60-64	28.065	27.676	55.741	3.22
65-69	18.247	18.044	36.291	2.10
70-74	10.735	11.381	22.116	1.28
75+	10.114	13.548	23.662	1.37
Jumlah	881.618	848.914	1.730.532	100,00

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Serang Semester II Tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas secara umum penduduk Kabupaten Serang masih didominasi penduduk usia produktif yakni Usia 15-64 tahun. Secara akumulatif kelompok usia produktif di Kabupaten Serang mencapai 68,24%, sedangkan usia non produktif kelompok 0-14 tahun mencapai 27,02% dan kelompok 65 tahun ke atas mencapai 4,74%. Dengan komposisi tersebut, tingkat ketergantungan penduduk kabupaten Serang mencapai 44,59%.

Grafik. 2.1. 4
Piramida Penduduk Kabupaten Serang Tahun 2023 (dalam ribuan jiwa)



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Serang Semester II Tahun 2023 (diolah)

2.1.2.3 Distribusi Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk, kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam satu kilometer persegi wilayah. Kepadatan penduduk menjadi indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Dilihat dari distribusi penduduk perwilayah kepadatan penduduk yang cukup tinggi terjadi pada Kecamatan Ciruas, Kragilan dan Cikande dengan tingkat kepadatan masing-masing 2.511,16 jiwa/km², 2.336,03 jiwa/km² dan 2.325,82 jiwa/km². Padahal ketiga wilayah tersebut memiliki rata-rata persentase luas wilayah yang relatif kecil terhadap luas Kabupaten Serang, dengan proporsi luas masing-masing sebesar 2,35%, 2,48% dan 3,44%.

Sedangkan kepadatan penduduk yang terendah berada di Kecamatan Gunungsari, Cinangka dan Pabuaran dengan kepadatan 529,36 jiwa/km², 569,03 jiwa/km² dan 602,41 jiwa/km² dengan proporsi luas wilayah masing-masing 3,31%, 7,60% dan 5,39%. Kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel 2.1.31.berikut:

Tabel. 2.1.31
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
			km ²	%	
1	Cinangka	63.430	111,47	7,60	569,03
2	Padarincang	75.385	99,12	6,75	760,54
3	Ciomas	46.871	48,53	3,31	965,81
4	Pabuaran	47.675	79,14	5,39	602,41
5	Gunungsari	25.727	48,60	3,31	529,36

6	Baros	63.692	44,07	3,00	1.445,24
7	Petir	66.738	46,96	3,20	1.421,16
8	Tunjung Teja	50.423	39,52	2,69	1.275,88
9	Cikeusal	82.853	88,25	6,01	938,84
10	Pamarayan	64.881	41,92	2,86	1.547,73
11	Bandung	40.910	25,18	1,72	1.624,70
12	Jawilan	65.265	38,95	2,65	1.675,60
13	Kopo	57.855	44,69	3,05	1.294,58
14	Cikande	117.524	50,53	3,44	2.325,82
15	Kibin	62.097	33,51	2,28	1.853,08
16	Kragilan	84.868	36,33	2,48	2.336,03
17	Waringinkurung	52.142	51,29	3,50	1.016,61
18	Mancak	51.726	74,03	5,05	698,71
19	Anyar	61.011	56,81	3,87	1.073,94
20	Bojonegara	52.628	30,30	2,06	1.736,89
21	Pulo Ampel	41.163	32,56	2,22	1.264,21
22	Kramatwatu	104.131	48,59	3,31	2.143,05
23	Ciruas	86.610	34,49	2,35	2.511,16
24	Pontang	49.925	58,09	3,96	859,44
25	Lebak Wangi	41.436	31,71	2,16	1.306,71
26	Carenang	42.251	32,80	2,24	1.288,14
27	Binuang	34.299	26,17	1,78	1.310,62
28	Tirtayasa	50.937	64,46	4,39	790,21
29	Tanara	46.079	49,30	3,36	934,66
Jumlah		1.730.532	1.467,35	100	1.179,36

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Serang Semester II Tahun 2023

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

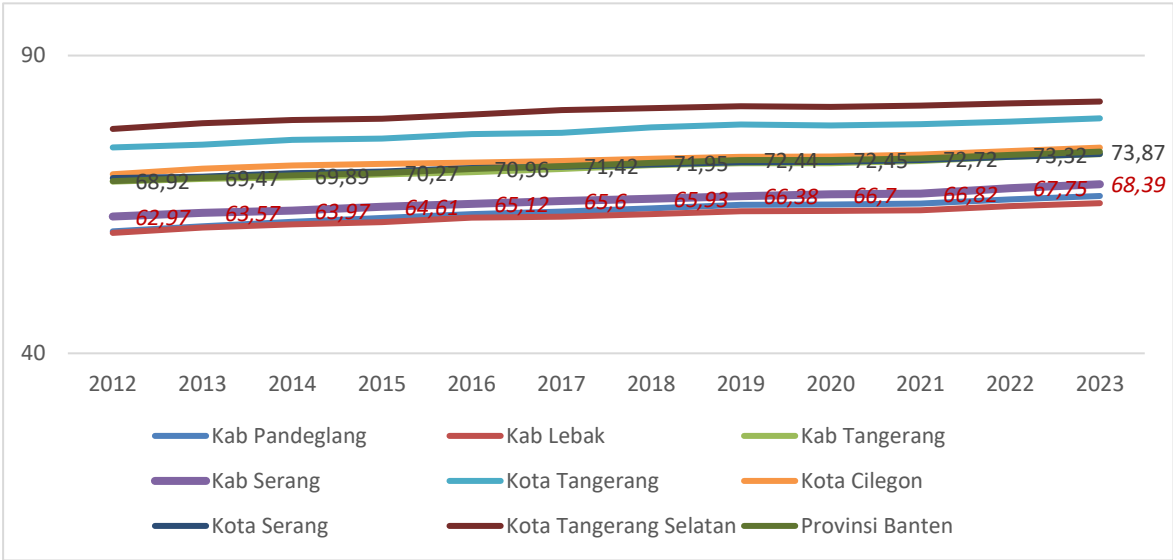
Aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Penjelasan gambaran kesejahteraan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Inflasi

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berperan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Nilai IPM yang semakin tinggi dapat mengindikasikan pembangunan manusia yang semakin baik. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a

long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak, yang direpresentasikan oleh pendapatan per kapita.

Grafik. 2.2.1
Pertumbuhan Nilai IPM Kabupaten Kota di Provinsi Banten



Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

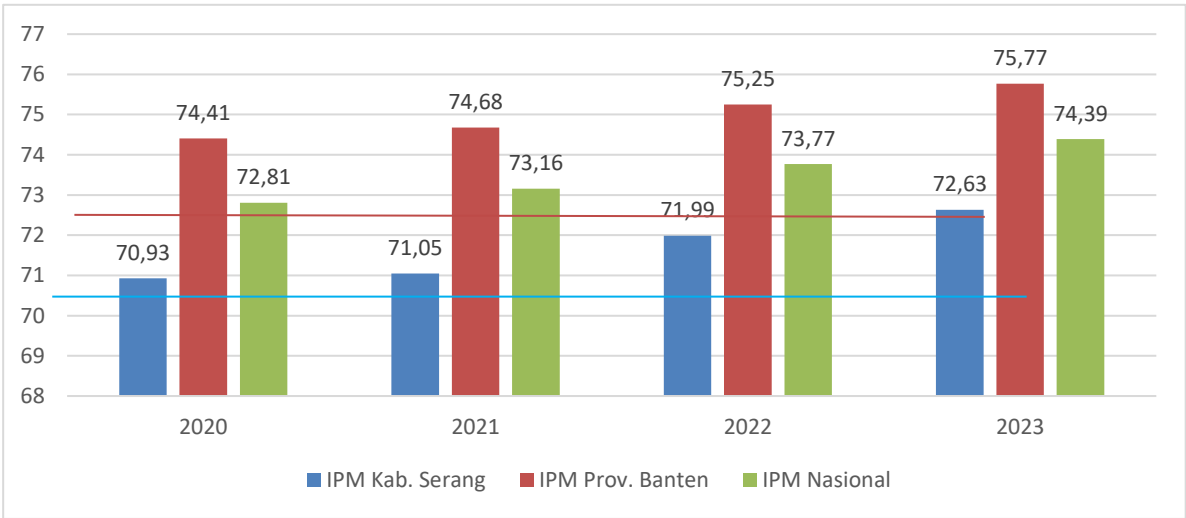
Berdasarkan gambar di atas, realisasi nilai IPM kabupaten Serang selalu berada di bawah realisasi nilai IPM provinsi Banten. Realisasi IPM Kabupaten Serang hanya lebih baik dibandingkan IPM Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Metode pengukuran IPM mengalami perubahan di tahun 2023 yaitu perubahan data dasar penghitungan, untuk mengukur umur harapan hidup saat lahir sumber data yang digunakan adalah data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Sedangkan untuk mengukur Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun keatas, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita per tahun data dasar menggunakan hasil Susenas Maret, sehingga perkembangan IPM hanya bisa dibandingkan dalam 4 (empat) tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Pembangunan Manusia di Kabupaten Serang secara konsisten terus menerus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 sampai dengan 2023, IPM Kabupaten Serang terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan, pendidikan, dan

pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Serang termasuk dalam kelompok IPM tinggi. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Serang mencapai 72,63 atau meningkat 0,64 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 71,99.

Peningkatan IPM terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun standar hidup layak. IPM Kabupaten Serang masih dibawah IPM Provinsi Banten dan Nasional, kalau dilihat indikasi dengan akumulasi pertumbuhan IPM Kabupaten Serang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan IPM Provinsi Banten dan IPM Nasional dari tahun 2020 ke tahun 2023. IPM Kabupaten Serang bertambah 1,7 poin, lebih tinggi dari akumulasi pertumbuhan IPM Provinsi Banten sebesar 1,36 poin dan Nasional 1,58 poin. Perkembangan IPM Kabupaten Serang, IPM Banten dan IPM Nasional dapat dilihat pada grafik 2.2.2 berikut:

Grafik. 2.2.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang dan Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2020 – 2023



Sumber: BPS Provinsi Banten 2023

Pada tahun 2023, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten cukup bervariasi. Dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Serang menempati peringkat 3 (tiga) IPM terendah diatas Kabupaten Lebak (67,68) dan Kabupaten Pandeglang (70,28). IPM Kabupaten Serang dengan pertumbuhan sebesar 1,7 poin dari tahun 2020 ke 2023, pertumbuhan IPM Kabupaten Serang masih lebih tinggi dibandingkan 7 (tujuh) kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Akumulasi pertumbuhan IPM Kabupaten Tangerang (1,47), Kota Cilegon (1,44), Kabupaten Pandeglang (1,42), Kabupaten Lebak (1,29), Kota Serang (1,18), Kota Tangerang (1,15)

dan Kota Tangerang Selatan (0,87). Capaian nilai IPM tentu saja menjadi target bagi setiap daerah dalam mengukuhkan wilayahnya lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya dalam pembangunan sumber daya manusia. Perbandingan perkembangan IPM kabupaten Serang dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 2.2.1 berikut:

Tabel. 2.2.1
IPM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020 - 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				IPM 2023 Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	
Kabupaten Pandeglang	68,86	69,02	69,7	70,28	0,83
Kabupaten Lebak	66,39	66,5	67,19	67,68	0,73
Kabupaten Tangerang	74,09	74,47	75,15	75,56	0,55
Kabupaten Serang	70,93	71,05	71,99	72,63	0,89
Kota Tangerang	79,83	80,08	80,44	80,98	0,67
Kota Cilegon	76,8	77,11	77,68	78,24	0,72
Kota Serang	75,25	75,53	76,01	76,43	0,55
Kota Tangerang Selatan	82,7	82,98	83,28	83,57	0,35
Provinsi Banten	74,41	74,68	75,25	75,77	0,69

Sumber: BPS Provinsi Banten 2023

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian di suatu wilayah, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi maka kondisi perekonomian di wilayah tersebut juga meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari persentase pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik definisi PDRB adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB juga dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonmi di suatu wilayah pada periode tertentu.

Perhitungan PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga

berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan harga tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi dan menjadi gambaran pembangunan suatu wilayah. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

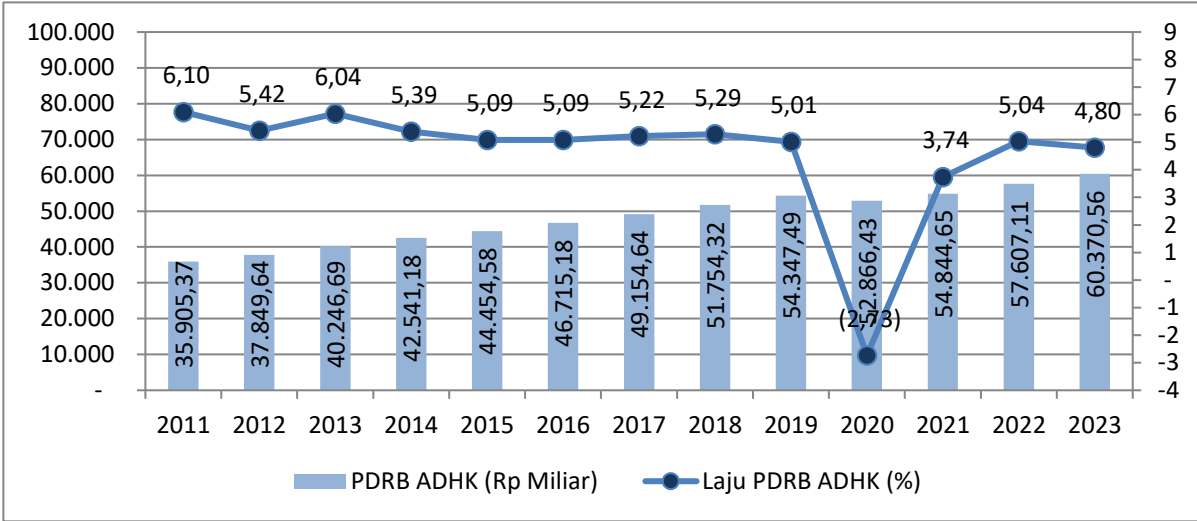
Tabel. 2.2.2
Nilai PDRB ADHK Kabupaten Serang Tahun 2016-2023 (dalam Miliar Rupiah)

PDR B	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDR B Atas Dasa Harg a Kons tan	46.71 5,18	49.15 4,64	51.75 4,32	54.34 7,5	52.86 6,43	54.84 4,65	57.60 7,11	60.37 0,56

Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2024

Berdasarkan data Kabupaten Serang periode 2016-2023, menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) cenderung meningkat. Pada awal periode PDRB ADHK pada tahun 2016 mencapai 46.715,18 miliar rupiah hingga tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 54.347,5 miliar rupiah dan menunjukkan penurunan menjadi sebesar 52.866,43 miliar rupiah di tahun 2020 akibat dari dampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada perekonomian Nasional tetapi juga pada perekonomian di Kabupaten Serang, kendati demikian pada tahun 2023 berhasil pulih kembali dengan capaian 60.370,56 miliar rupiah.

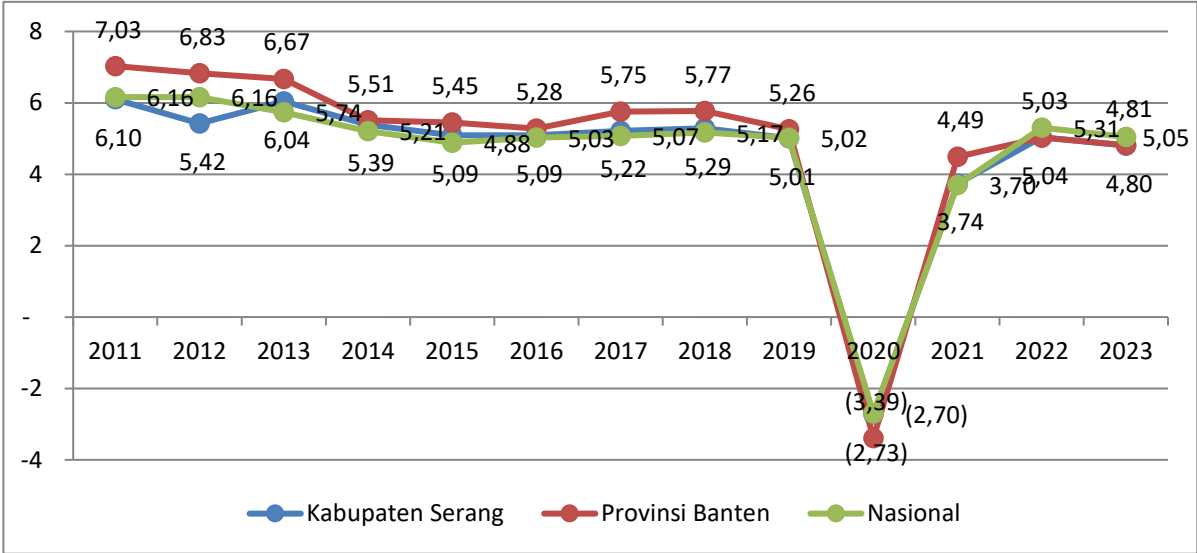
Grafik. 2.2. 3
Perkembangan Nilai PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Serang
Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2024

Jika dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang periode 2010-2019 mencapai 5,36 % per tahun. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,42% yang kemudian meningkat tajam pada tahun 2013 menjadi 6,04%. Pada tahun-tahun berikutnya grafik pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif namun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2016, 2017, dan 2018 masing-masing sebesar 5,09%, 5,22%, dan 5,29%. Namun demikian, dikarenakan penurunan PDRB ADHK pada tahun 2020, maka laju pertumbuhan pada tahun tersebut turun tajam menjadi (-2,73%) akan tetapi mampu pulih kembali di tahun 2021 mencapai 3,74% dan meningkat di tahun 2022 mencapai 5,04 %. Selama periode 2010-2023, pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2013 yakni sebesar 6,04 %, dan pertumbuhan terendah di tahun 2020 yakni sebesar (-2,73%).

Grafik. 2.2. 4
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan Nasional (%), Tahun 2011-2023

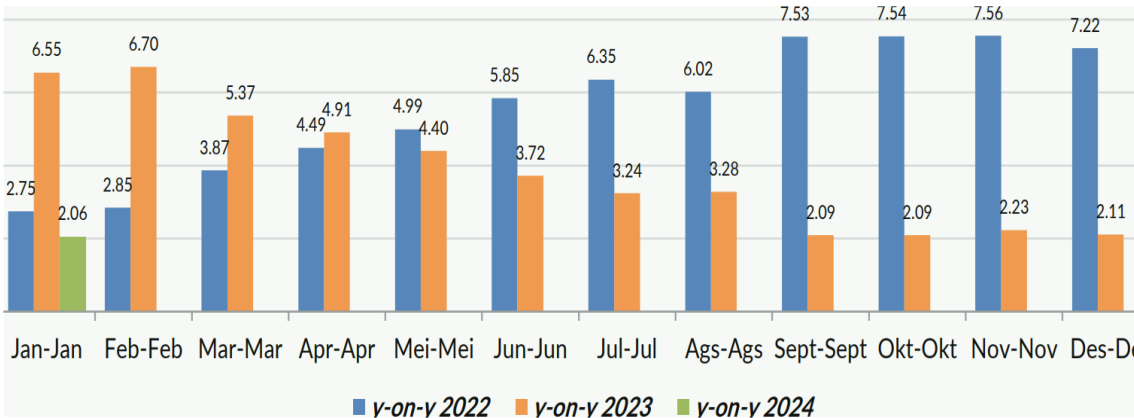


Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2024

C. Laju Inflasi

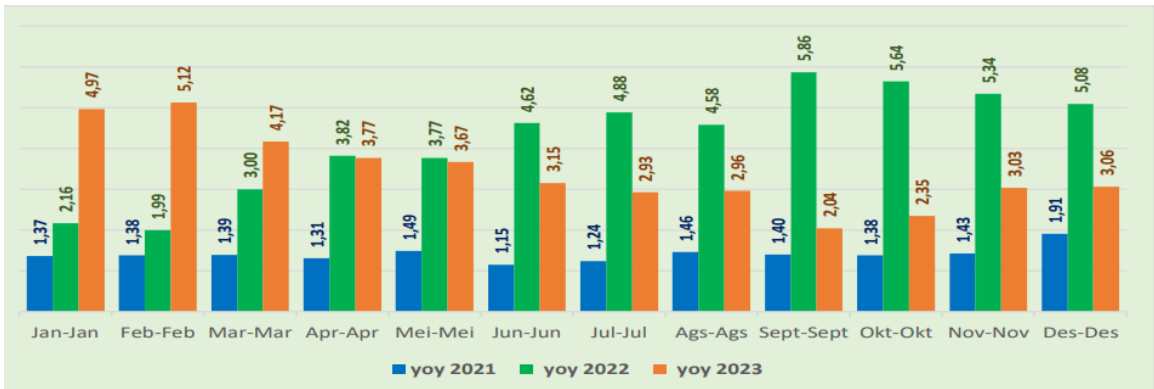
Inflasi Kabupaten Serang direpresentasikan oleh inflasi yang terjadi di Kota Serang. Pada tahun 2022, inflasi IHK Kota Serang menjadi yang tertinggi dibandingkan kota lainnya. Inflasi Kota Serang tercatat sebesar 7,22% (yoy), serta menjadi satu-satunya kota pantauan IHK yang tercatat naik dibandingkan triwulan I 2022 sebesar 2,75% (yoy). Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Provinsi Banten yang tercatat sebesar 1,91% (yoy).

Gambar. 2.2. 1
Realisasi dan Historis Inflasi Kota Serang



Sumber: BPS Kota Serang, 2024

Gambar. 2.2. 2
Realisasi dan Historis Inflasi Provinsi



Sumber: BPS Banten, 2024

Menurut kelompok pengeluaran, hal ini dipengaruhi oleh kenaikan pada 4 (empat) kelompok, terutama didorong andil kelompok transportasi yaitu bensin, angkutan dalam dan luar kota sebesar 1,94%. Komoditas dengan andil inflasi terbesar kedua yaitu komoditas beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, tahu mentah dan rokok putih yaitu sebesar 1,25%. Pada kelompok bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,17%, inflasi terutama disumbang oleh penyesuaian harga LPG non subsidi 5,5 kg dan 12 kg.

Tabel. 2.2.3
Komoditas penyumbang inflasi dan deflasi Kota Serang (yoy)

Penyumbang Inflasi			Penyumbang Deflasi		
No	Komoditas	Andil	No	Komoditas	Andil
1	Bensin	1,14	1	Minyak Goreng	-0,10
2	Bahan Bakar Rumah Tangga	0,77	2	Daging Ayam Ras	-0,04
3	Angkutan Dalam Kota	0,58	3	Telepon Seluler	-0,04
4	Beras	0,53	4	Kangkung	-0,03
5	Rokok Kretek Filter	0,26	5	Bayam	-0,02
6	Angkutan Antar Kota	0,22	6	Cabai Rawit	-0,02
7	Mobil	0,18	7	Sepatu Anak	-0,01
8	Telur Ayam Ras	0,17	8	Anggur	-0,01
9	Tahu Mentah	0,15	9	Santan Jadi	-0,01
10	Rokok Putih	0,14	10	Bahan Katun	-0,01

Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Banten Periode Februari 2023

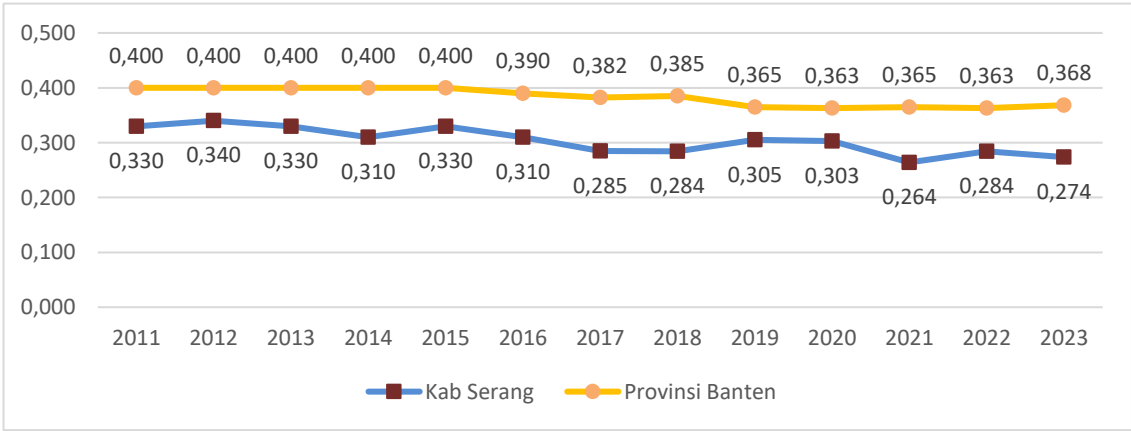
D. Indeks GINI

Ketimpangan antar wilayah dapat diartikan sebagai tidak meratanya distribusi pendapatan atau distribusi sumber daya lainnya ke setiap wilayah. Pergeseran aktifitas ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri salah satu penyebab ketimpangan ini karena semakin banyak masyarakat yang bekerja disektor yang lebih menjanjikan dan berakibat ketimpangan pendapatan yang tinggi.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin mendekati angka 1 berarti semakin timpang. Gini Ratio adalah salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dengan melihat tingkat ketimpangan ekonomi di dalamnya. Semakin besar ketimpangan terjadi memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata sehingga terjadi deviasi dari rata-rata pengeluaran per kapita antar kota/kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi dalam satu negara.

Terdapat keterkaitan antara ketimpangan dengan pembangunan wilayah, dimana cepatnya pertumbuhan ekonomi diiringi dengan peningkatan ketimpangan, oleh sebab itu permasalahan ketimpangan perlu segera ditangan karena dapat menghambat proses pembangunan wilayah. Secara Umum Indeks Gini Kabupaten Serang berada dibawah Provinsi Banten, dan nilainya fluktuatif dari tahun 2011 sebesar 0,330 dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,340. Kemudian pada periode 2013-2023 nilai indeks gini Kabupaten Serang menunjukkan kecenderungan fluktuatif menurun hingga mencapai angka 0,274 pada tahun 2023.

Grafik. 2.2. 5
Indeks Gini Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023

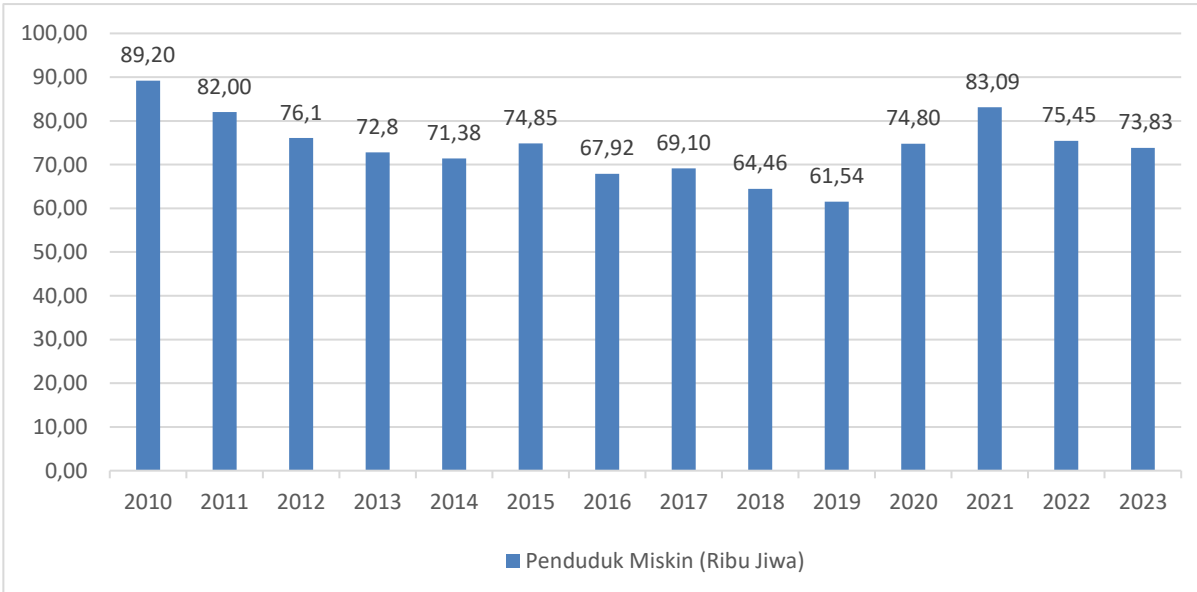
E. Angka Kemiskinan

1. Presentase Penduduk Miskin

Salah satu indikator sosial ekonomi yang juga penting digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan. BPS mengukur tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin dapat definisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum terkait perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Grafik. 2.2. 6
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Serang 2010-2023 (Ribu Jiwa)



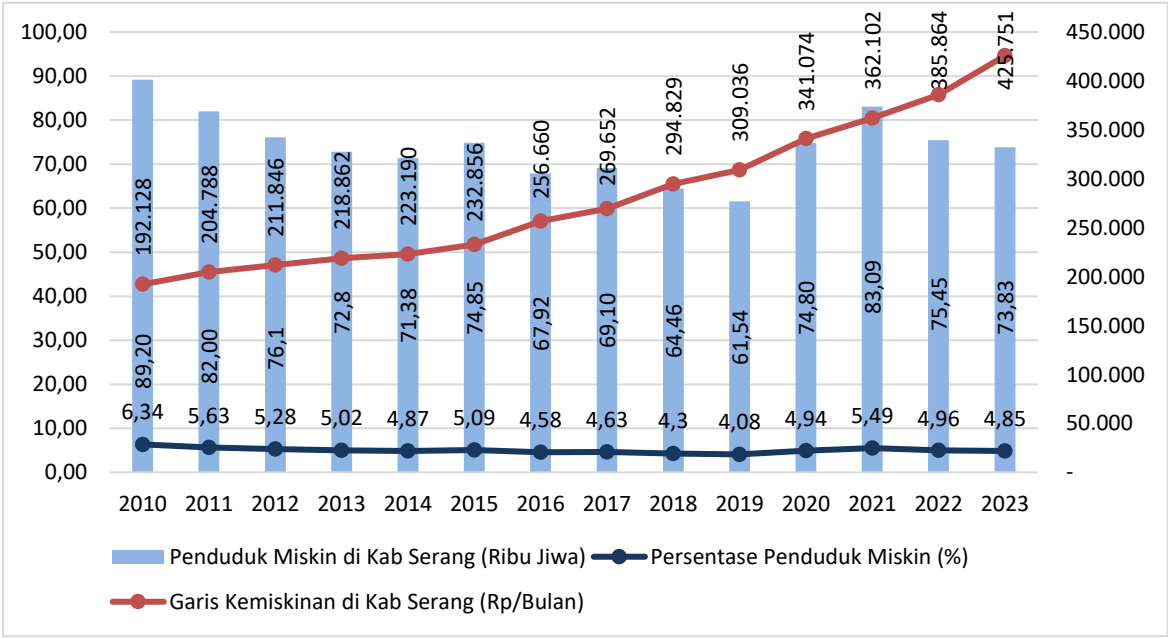
Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023

Pada grafik diatas menunjukkan angka tertinggi jumlah penduduk miskin terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 89,20 ribu jiwa kemudian bergerak turun hingga tahun 2019 sebesar 61,54 ribu jiwa dan bergerak naik lagi pada tahun 2021 mencapai 83,09 ribu jiwa hingga pada tahun

2023 angkanya menjadi 73,83 ribu jiwa. Penduduk dikategorikan ke dalam penduduk miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan di daerah tersebut. Berdasarkan **Grafik 2.2.6** selama periode 2010-2023, garis kemiskinan di Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahun, dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp 16.144 per tahun. Pada tahun 2010 garis kemiskinan Kabupaten Serang mencapai Rp 192.128 per kapita per bulan, dan terus meningkat hingga menjadi sebesar Rp 425.751 per kapita per bulan pada tahun 2023. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serang pada periode tersebut cenderung fluktuatif.

Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin mencapai 89,20 ribu jiwa atau 6,34% dari total penduduk, terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 menjadi 71,38 ribu jiwa atau 4,87% dan mencapai angka terendah pada tahun 2019 yaitu menjadi 61,54 ribu jiwa atau 4,08% dari total penduduk. Kendati demikian, pada tahun-tahun berikutnya jumlah penduduk miskin kembali bergerak naik yaitu pada tahun 2021 mencapai 83,09 ribu jiwa atau 5,49% dan menurun kembali di tahun 2023 menjadi 73,83 ribu jiwa atau 4,85 % dari total penduduk. Perlu adanya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin dengan cara pola pelatihan/keterampilan kewirausahaan dan bantuan modal awal.

Grafik. 2.2. 7
Grafik Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Serang Tahun 2010-2023



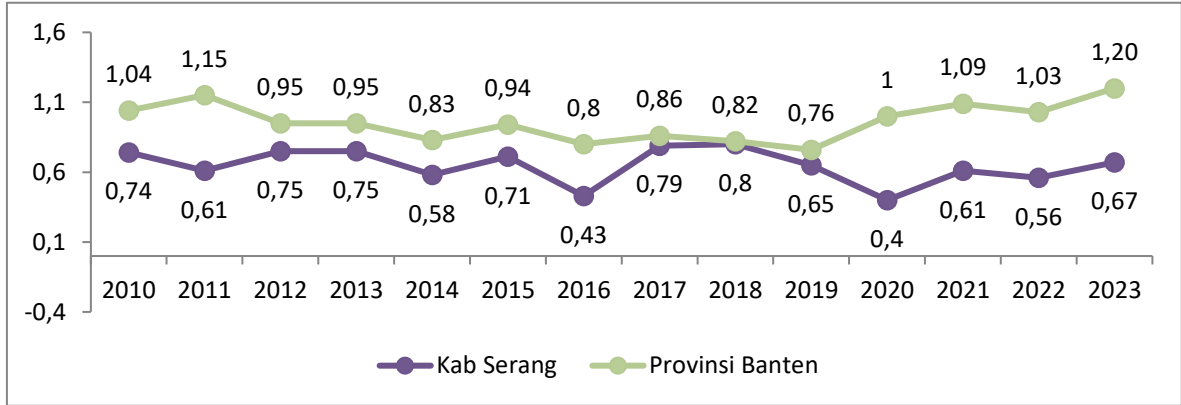
Sumber: BPS Kabupaten Serang dan BPS Provinsi Banten, 2023

Berdasarkan **Grafik 2.2.7** jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Banten terlihat bahwa selama periode 2010-2023 garis kemiskinan Kabupaten Serang berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Banten. Walaupun lebih landai jika dibanding dengan peningkatan garis kemiskinan Provinsi Banten. Pada tahun 2010, garis kemiskinan Kabupaten Serang mencapai Rp. 192.128 dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,34%. Sedangkan garis kemiskinan Provinsi Banten telah mencapai Rp. 233.214 dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,02%. Demikian pula pada tahun 2022, garis kemiskinan Kabupaten Serang masih berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Banten bahkan dengan selisih yang semakin besar yaitu sebesar Rp. 184.504. Bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Banten, persentase penduduk miskin di Kabupaten Serang tidak berbeda jauh, rata-rata perbedaannya 0,85% selama periode 2010-2023 sedangkan bila dilihat dari tren-nya selisih garis kemiskinan antara Kabupaten Serang dengan Provinsi Banten terus meningkat. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang cenderung lebih tinggi dari pada tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.

2. Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)

Untuk mengukur kemiskinan bukan hanya dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Grafik. 2.2. 8
Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Serang dan Provinsi Banten

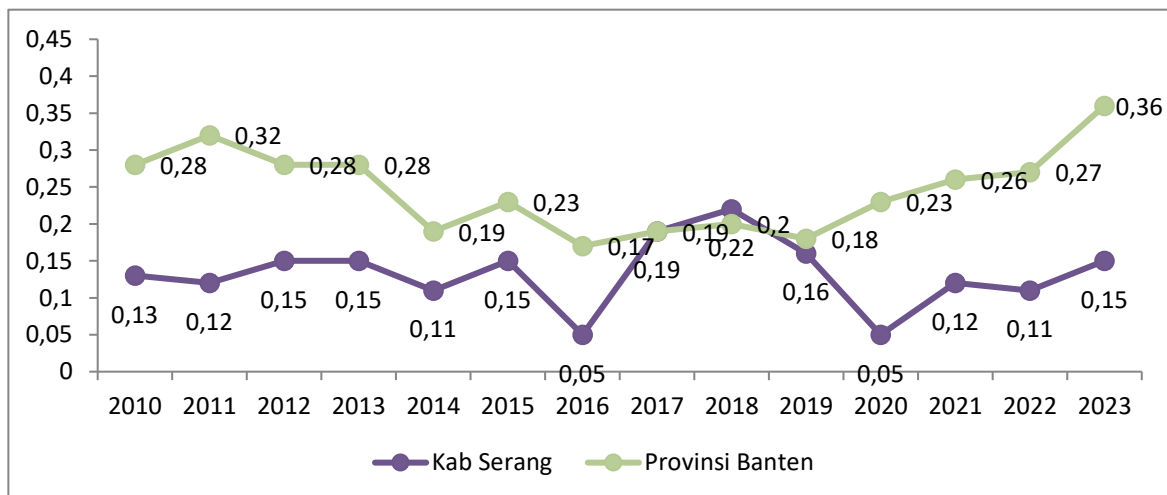


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2023 (diolah)

Berdasarkan Grafik diatas, nilai indeks kedalaman (P1) di Kabupaten Serang tahun 2010-2023 cenderung fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2018 merupakan angka tertinggi selama periode 2010-2022 yaitu mencapai 0,8 hampir sama dengan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Banten yaitu sebesar 0,82. Kendati demikian, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Serang merosot tajam pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,4 berbeda dengan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Banten yang terus meningkat sampai pada tahun 2021 mencapai 1,09 walaupun sempat turun di tahun 2019 yaitu sebesar 0,76.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Serang selalu lebih rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Serang cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan penduduk miskin juga semakin menyempit bila dibandingkan dengan Provinsi Banten. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik. 2.2. 9
Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) Kabupaten Serang dan Provinsi Banten 2010-2023



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2023 (diolah)

Indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Serang tahun 2010-2023 cenderung fluktuatif namun memiliki angka tertinggi pada tahun 2018 mencapai 0,22 lebih tinggi dari Indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Banten yaitu sebesar 0,2. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2018 ketimpangan diantara penduduk miskin di Kabupaten Serang lebih

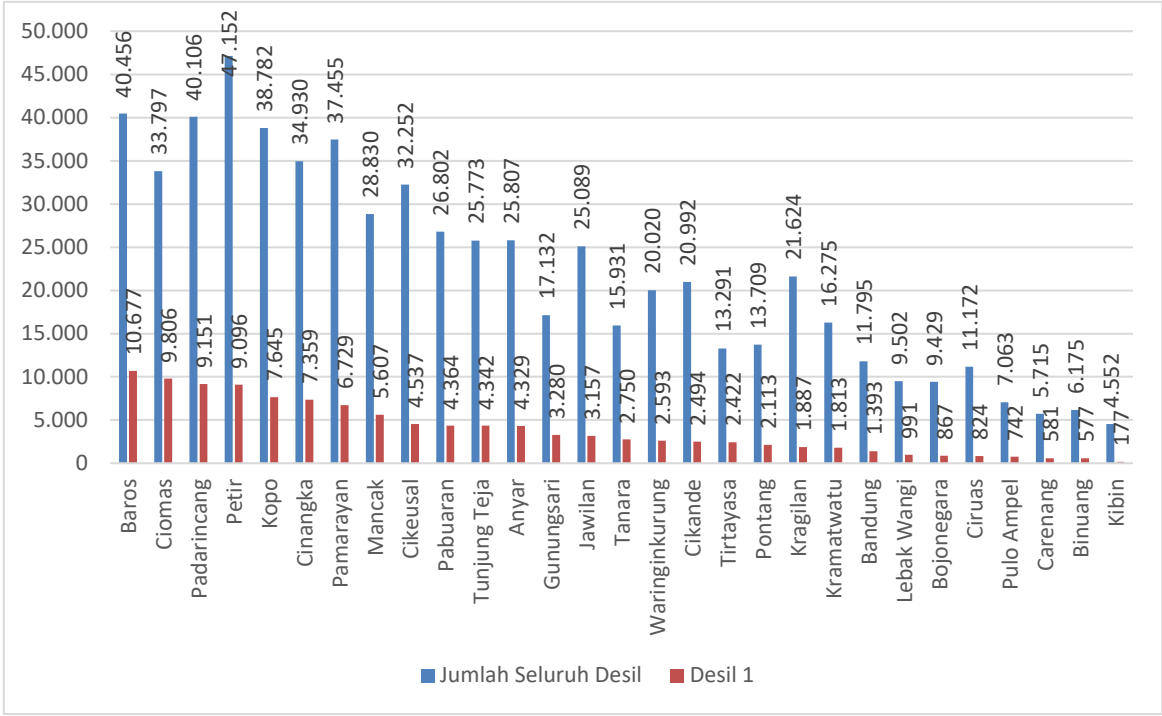
tinggi daripada Provinsi Banten. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) terendah Kabupaten Serang selama periode 2010-2023 terjadi pada tahun 2016 dan 2020 yaitu sebesar 0.05 berbeda dengan Provinsi Banten yang memiliki indeks keparahan kemiskinan (P2) terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,18 dan cenderung naik di tahun berikutnya yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022 yaitu berturut-turut sebesar 0,23 , 0,26 dan 0,27. Bila dilihat dari grafik diatas, indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Serang hampir selalu lebih rendah dari Provinsi Banten.

3. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Kemenko PMK adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi masyarakat yang hidup dibawah USD 1,9 PPP per kapita per hari berdasarkan world bank pada tahun dasar tahun 2011. Atau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS,2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021).

Berdasarkan **Grafik 2.2.10** dibawah bahwa sebaran kemiskinan berdasarkan desil 1 sampai dengan 4 terdapat kecamatan dengan jumlah sebaran tertinggi di wilayah Kabupaten Serang yaitu berada di Kecamatan Petir dengan jumlah 47.152 jiwa. Sedangkan sebaran kemiskinan ekstrem terendah di wilayah Kabupaten Serang terdapat pada kecamatan Kibin dengan jumlah 4.552 jiwa. Sedangkan untuk desil 1 sebaran terbanyak terdapat di kecamatan Baros yaitu dengan jumlah 10.677 jiwa. Sedangkan sebaran kemiskinan ekstrem terendah berada di Kecamatan Kibin yaitu dengan jumlah 177 jiwa.

Grafik. 2.2. 10
Sebaran Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2023



Sumber: Kemenko PMK, 2023

Tabel. 2.2. 4
Presentase Penduduk Miskin Ekstrem (%) di Kabupaten Serang

Tahun	Persentase Penduduk Miskin Esktrem
2021	0,62
2022	0,75
2023	0.34

Sumber: TKPK Provinsi Banten, 2023

Menurut Tabel 2.2. 4 presentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Serang tahun 2023 adalah sebesar 0,34%, turun dari tahun 2022 sebesar 0,75%. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bahwa pada tahun 2024 target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen. Untuk itu dibutuhkan program konvergensi/keterpaduan oleh pemerintah Kabupaten Serang dalam menyasar penerima manfaat. Dan pendekatan pada program yang sifatnya saling melengkapi atau menambah program yang sudah ada untuk intervensi kepada individu sasaran program kemiskinan ekstrem.

F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah penduduk usia kerja yang tidak punya pekerjaan dan sementara tidak bekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lainnya, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Serang setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,45% pada periode 2016-2023 seiring dengan meningkatnya penduduk usia kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk usia kerja maka angkatan kerja pun akan bertambah.

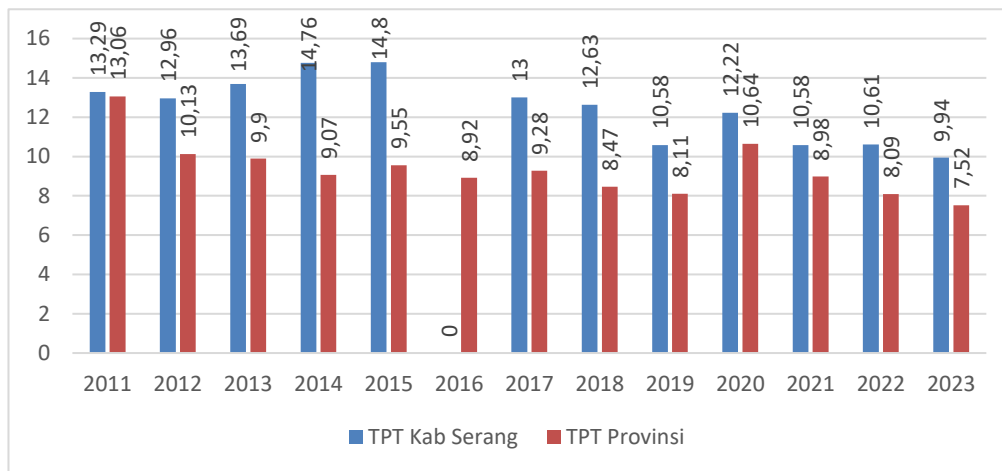
Tabel. 2.2. 5
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja (Ribuan Orang) Kabupaten Serang 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia Kerja	1.027,50	1.047,64	1.083,39	1.093,40	1.102,85	1.111,65	1.119,99	1.260,37
Angkatan Kerja	620,53	628,10	669,21	692,07	699,86	709,94	719,65	796,82
Bekerja	28,68	546,47	584,72	618,82	614,32	634,83	643,28	717,58
Pengangguran	91,84	81,62	84,49	73,256	85,54	75,11	76,37	79,24
Bukan Angkatan Kerja	406,98	419,54	414,18	401,32	402,99	401,72	400,34	463,55

Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT menunjukkan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Selama periode 2016-2020, TPT Kabupaten Serang cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2017, angka TPT di Kabupaten Serang mencapai angka 13,00%. TPT di Kabupaten Serang terus mengalami penurunan 2 (dua) tahun.

Grafik. 2.2. 11
TPT (Persen) Kabupaten Serang 2017-2023



Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023

Grafik 2.2.11 diatas menunjukkan presentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten serang pada 2011-2023. Dari gambar tersebut terlihat bahwa TPT Kabupaten Serang tahun 2011-2023 mengalami fluktuatif dan cenderung menurun. Tenaga kerja merupakan suatu faktor yang berpengaruh pada pergerakan sebuah perekonomian di suatu daerah. Hal tersebut dapat terlihat dengan meningkatnya TPAK dan peningkatan tersebut diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan, maka dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja tersebut dapat berdampak terhadap semakin menurunnya angka pengangguran.

Dengan demikian, semakin sedikitnya angka pengangguran ini berarti orang yang memiliki pekerjaan sudah lebih banyak dan orang tersebut memiliki pendapatan, sehingga dengan pendapatannya tersebut dapat meningkatkan investasi dalam bentuk tabungan yang berdampak pada pendapatan wilayah akan meningkat melalui pajak (pajak penghasilan) dan ini juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya Masyarakat

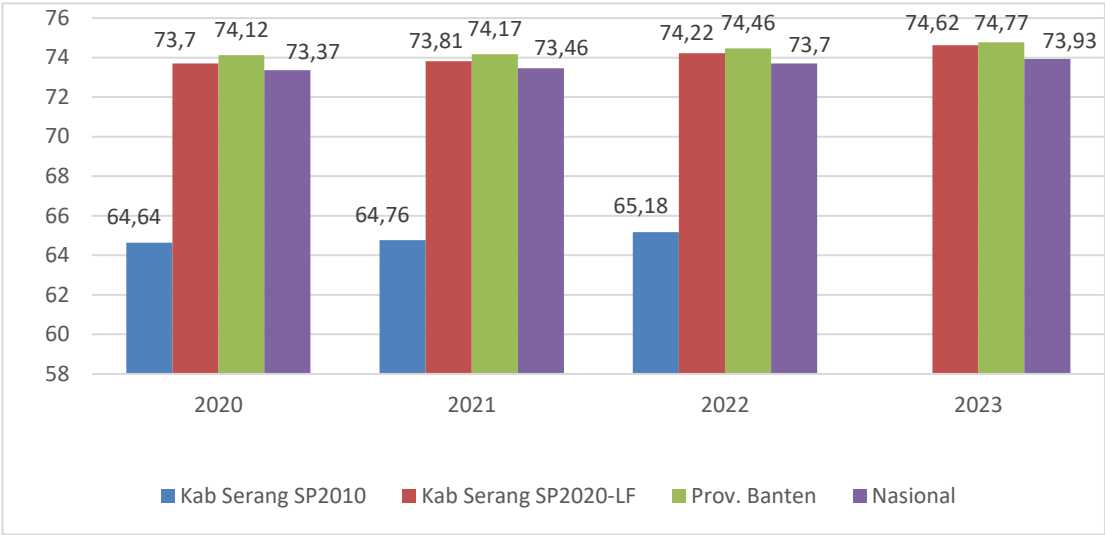
Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya. Penjelasan gambaran kesejahteraan sosial budaya ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator indikator seperti Indeks Keluarga Sehat, Indeks Kualitas Keluarga, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Kebudayaan.

A. Usia Harapan Hidup

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar salah satunya dimensi umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak saat lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Metode pengukuran IPM mengalami perubahan di tahun 2023 yaitu perubahan data dasar penghitungan, untuk mengukur umur harapan hidup saat lahir sumber data yang digunakan adalah data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF), sehingga perkembangan UHH hanya bisa dibandingkan dalam 4 (empat) tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Dengan adanya perubahan data dasar dalam penghitung UHH dari data dasar SP2010 menjadi SP2020-LF perubahan pencapaian UHH sangat signifikan lebih tinggi setelah menggunakan data dasar SP2020-LF, perubahannya dapat dilihat pada **grafik 2.2.12**.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,62 tahun, meningkat 0,40 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2022 yang sebesar 74,22 tahun. Pada tahun 2023, UHH Kabupaten Serang jika dibandingkan dengan UHH Nasional dan UHH Provinsi Banten, UHH Kabupaten Serang (74,62) diatas UHH Nasional (73, 93) dan lebih rendah dibandingkan dengan UHH Provinsi (74,77). Salah satu faktor penyebab rendahnya Usia Harapan Hidup di Kabupaten Serang dibandingkan Usia Harapan Hidup Provinsi Banten adalah masih tingginya angka kematian ibu di Kabupaten Serang. Perkembangan UHH Kabupaten Serang, UHH Provinsi Banten dan UHH Nasional dapat dilihat pada **grafik 2.2.12** berikut :

.Grafik 2.2.12
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)
Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Provinsi Banten 2023

Padan tahun 2023 dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Provinsi Banten, UHH Kabupaten Serang menempati urutan ke 6 (enam) dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang ada di provinsi Banten, diatas Kabupaten Pandeglang (74,01) dan Kabupaten Lebak (73,8). Perkembangan UHH Kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 2.2.6 berikut :

Tabel. 2.2.6
UHH menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Banten
Tahun 2020 – 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Pandeglang	73,1	73,22	73,63	74,01
Kabupaten Lebak	72,93	73,04	73,43	73,8
Kabupaten Tangerang	74,56	74,59	74,91	75,18
Kabupaten Serang	73,7	73,81	74,22	74,62
Kota Tangerang	74,78	74,78	75,02	75,3
Kota Cilegon	74,23	74,25	74,51	74,81
Kota Serang	74,43	74,54	74,84	75,13

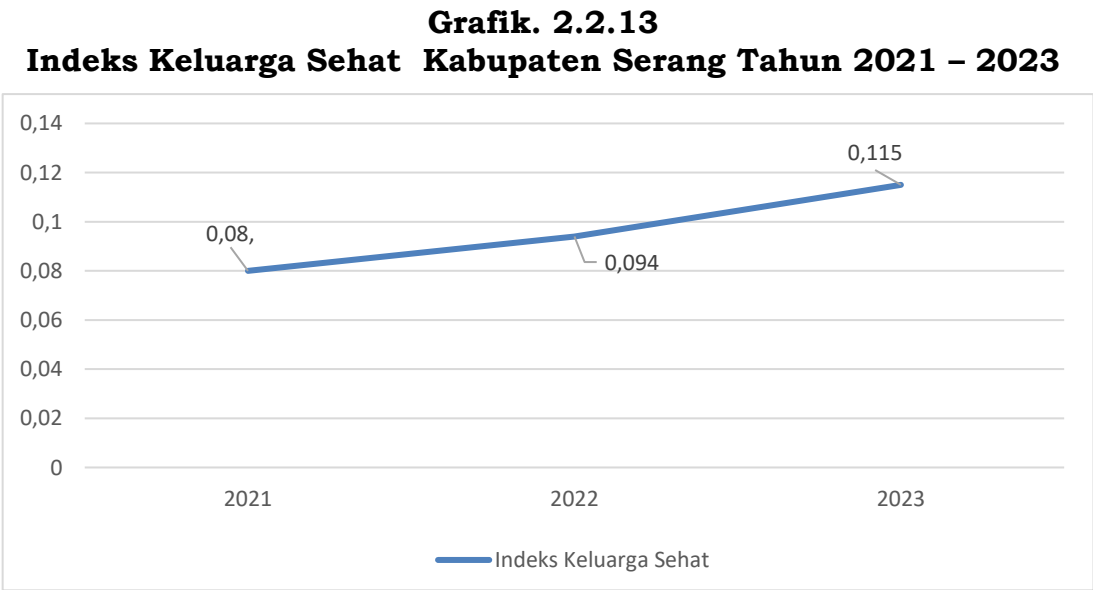
Kota Tangerang Selatan	75,16	75,16	75,4	75,64
Provinsi Banten	74,12	74,17	74,46	74,77

Sumber: BPS Provinsi Banten 2023

B. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. 12 indiktor tersebut diantaranya, keluarga mengikuti program KB, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat ASI eksklusif, bayi mendapat imunisasi, balita mendapat pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar dan penderita hipertensi mendapat pengobatan sesuai prosedur, penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluatga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional, keluarga mempunyai akses air bersih dan menggunakan jamban sehat.

Bila dilihat dari kurun waktu 2021-2023 nilai IKS di Kabupaten mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2023 nilai IKS sebesar 0,115, artinya sebanyak 11,5 persen keluarga di Kabupaten Serang pada tahun 2023 tergolong sehat. Untuk meningkatkan nilai IKS diperlukan meningkatkan intervensi terhadap 12 indikator pembentuk IKS. Perkembangan nilai IKS di Kabupaten Serang dapat dilihat pada Grafik 2.2.13 berikut:

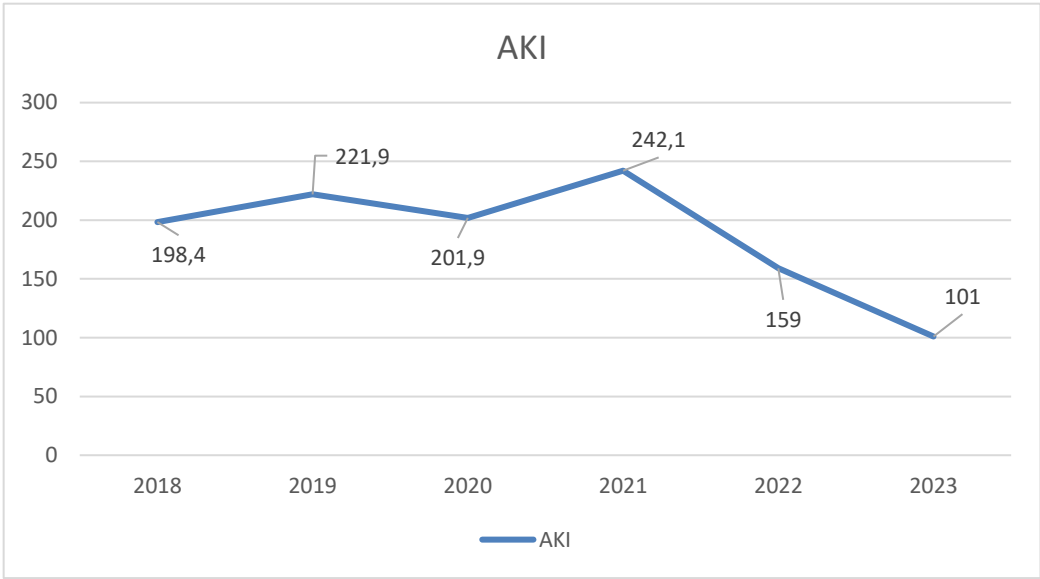


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, 2023

C. Angka Kematian Ibu (AKI)

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Perkembangan kondisi AKI Kabupaten Serang kurun waktu tahun 2018-2023 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

Grafik. 2.2.14
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Serang Tahun 2018 – 2023



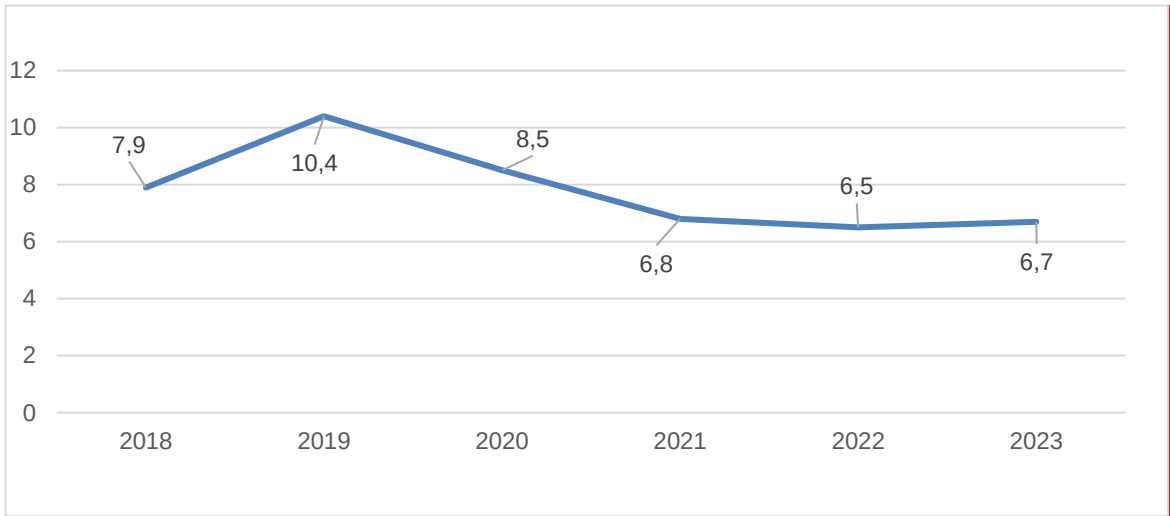
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, 2023

Berdasarkan **Grafik 2.2.14**, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Serang selama tahun 2018-2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif yaitu pada tahun 2018 sebesar 198,4/100.000 KH naik menjadi 221,9/100.000 KH di tahun 2019 dan turun 201,9/100.000 KH pada tahun 2020, kemudian naik menjadi 242,1/100.000 KH pada tahun 2021, dan turun cukup drastis pada tahun 2022 menjadi 159/100.000 KH hingga tahun 2023 AKI turun menjadi 101/100.000 KH. AKI Kabupaten Serang. Beberapa penyebab masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan dan nifas antara lain pendarahan, hipertensi dalam kehamilan dan infeksi. Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari ketepatan waktu dalam mengakses ke pelayanan kesehatan ibu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan.

D. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kematian bayi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan konginetal pada bayi, dan komplikasi kehamilan. Kondisi AKB di Kabupaten Serang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 2.2.15
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Serang
Tahun 2018 – 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, 2023

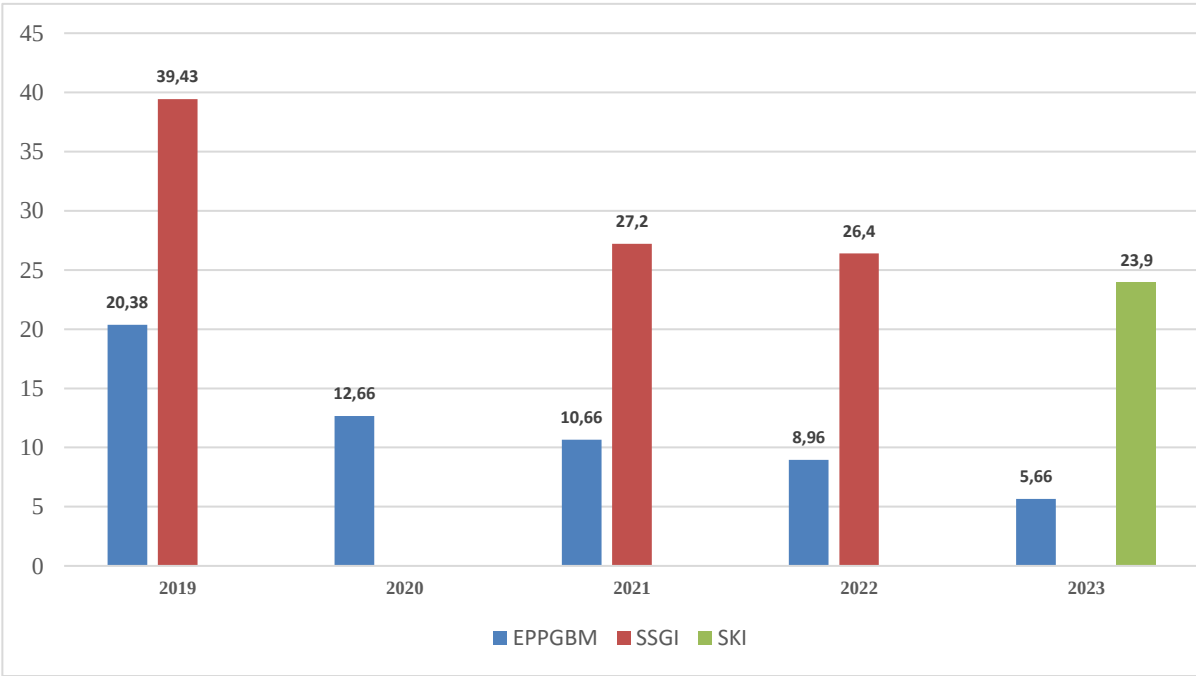
Berdasarkan **Grafik 2.2.15** dapat dilihat bahwa perkembangan AKB di Kabupaten Serang selama kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan AKB cenderung fluktuatif, pada tahun 2018 sebesar 7,9/1.000 KH, naik menjadi 10,4/1.000 KH pada tahun 2019 kemudian turun selama dua tahun berikutnya hingga sebesar 6,5/1.000 KH pada tahun 2022 dan naik menjadi 6,7 ./1.000 KH pada tahun 2023.Diperlukan upaya penanganan untuk menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Serang antara melalui peningkatan pendampingan kelas ibu hamil dan balita, serta optimalisasi peran Posyandu.

E. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi anak di bawah lima tahun yang tidak dapat berkembang karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang.

Stunting diukur menggunakan panjang/tinggibadan menurut umur bila Z-Score TB/U atau PB/U kurang -2 SD. Menurut Ruswati (2021) penyebab dari stunting dapat dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi merupakan faktor yang mempengaruhi stutus gizi anak dan berdampak pada stunting. Sementara itu faktor tidak langsung berupa akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan. Kondisi Prevalensi Stunting di Kabupaten Serang tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

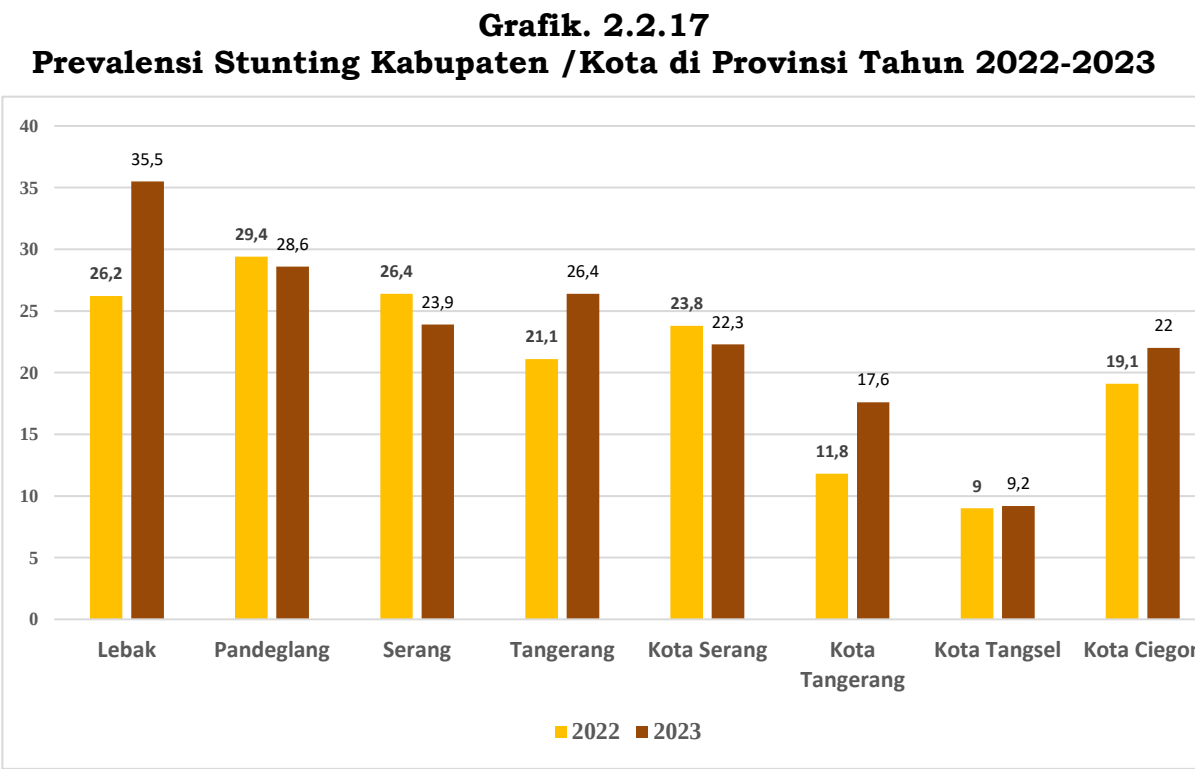
Grafik. 2.2.16
Prevalensi Stunting di Kabupaten Serang Tahun 2019-2023



Sumber: Data EPPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2018-2022, Data SSGI Kemenkes RI Tahun 2019-2022 dan SKI Tahun 2023

Prevalensi Stunting di Kabupaten Serang tahun 2019-2022 mengalami penurunan setiap tahunnya, baik itu hasil dari EPPGBM maupun SSGI. Namun ada kesenjangan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Kemenkes dengan hasil elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Pada tahun 2020 Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tidak dilaksanakan karena terkendala dengan masa covid-19. Pada tahun 2023, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) memiliki kewenangan untuk menghitung prevalensi stunting dalam bentuk Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang berkerjasama dengan badan Pusat Statistik (BPS), untuk Kabupaten Serang di Tahun

2023, prevalensi stunting Kabupaten Serang menurun 2,5 dari 26,4 menjadi 23,9.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2024

Pada tahun 2023, pencapaian prevalensi stunting di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten cukup bervariasi. Dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Serang menempati peringkat 4 (empat) prevalensi tertinggi sebesar 23,9, dimana Kabupaten Lebak menduduki peringkat pertama prevalensi stunting tahun 2023 sebesar 35,5. Masih tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Serang yang akan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, maka upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Serang harus tetap dan segera dilakukan dengan mengupayakan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari para pemangku kepentingan, melakukan pencegahan untuk tidak timbulnya kasus stunting baru, melakukan konvergensi, penyediaan pangan yang baik dan melakukan inovasi terobosan dan data yang baik.

F. Insidensi Tuberkolosis

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium. Kasus TB didefinisikan sebagai pasien yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB. Salah satu indikator penting dalam pengendalian TB di Daerah dengan menggunakan metode Treatment Coverage dimana

merupakan jumlah kasus TB yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TB pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam presentase. Treatment Coverage digunakan untuk melihat kemajuan dan pencapaian strategi nasional pengendalian TB, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Pusat. Selain itu, Kementerian Kesehatan menginstruksinya kepada Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk dapat menghitung angka keberhasilan pengobatan (Treatment Success Rate). Treantment Success Rate adalah jumlah kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan.

Tabel. 2.2.7
Capaian Utama Indikator TB Kabupaten Serang Tahun 2020-2023

Capaian Utama Indiaktor TB	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Treatment Coverage	89%	102%	119%	104%
Treatment Success Rate	96%	94%	93%	87% (on prosses perhitungan)

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Serang, 2024

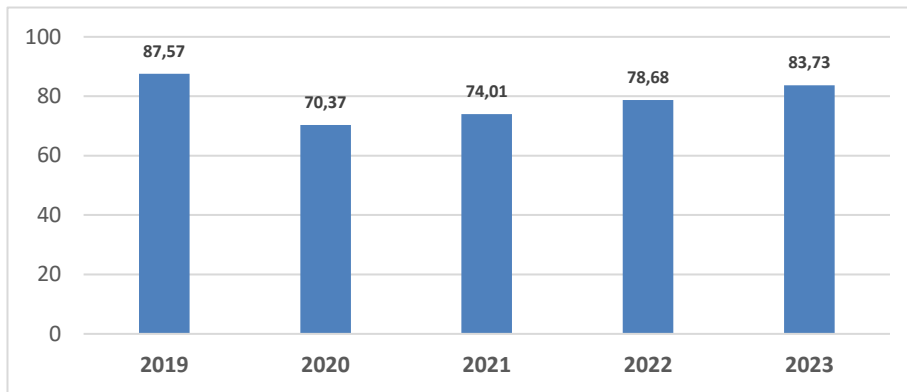
Berdasarkan **Tabel. 2.2.7** capaian Treatment Coverage Kabupaten Serang di tahun 2020 sebesar 89% dimana masih belum mencapai target yang diharapkan sebesar 90%. Namun untuk tahun 2021 hingga 2023, Treatment Coverage Kabupaten Serang telah mencapai target melebihi 90%. Untuk persentase Treatment Success Rate, Kabupaten Serang di setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2023 di atas 90% yang artinya Kabupaten Serang telah mencapai target. Untuk itu upaya penemuan kasus sedini mungkin, pengobatan secara tuntas sampai sembuh merupakan salah satu upaya yang terpenting dalam memutus penularan TBC di masyarakat. Upaya percepatan penanganan kasus Tuberkulosis selain dilakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan perlu juga juga dilakukan upaya promotif berbasis keluarga dan Masyarakat.

G. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberika kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya

dibayar oleh pemerintah. Peserta JKN adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Perkembangan kepesertaan JKN dapat dilihat pada grafik 2.2.19 berikut:

Grafik. 2.2.18
Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Serang Tahun 2019–2023



Sumber: BPJS Provinsi Banten, 2024

Dilihat dari **Grafik 2.2.18**, kepesertaan JKN di Kabupaten Serang tahun 2019-2023 angkanya fluktuatif, pada tahun 2019 persentase kepesertaan JKN sebesar 87,57% dan turun pada tahun 2020 menjadi 70,37% kemudian naik selama tiga tahun berikutnya hingga 83,73% dari 1.730.532 penduduk Kabupaten Serang telah memiliki perlindungan finansial untuk mengakses layanan kesehatan. Baik dari anggaran APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten maupun pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, ataupun bukan pekerja.

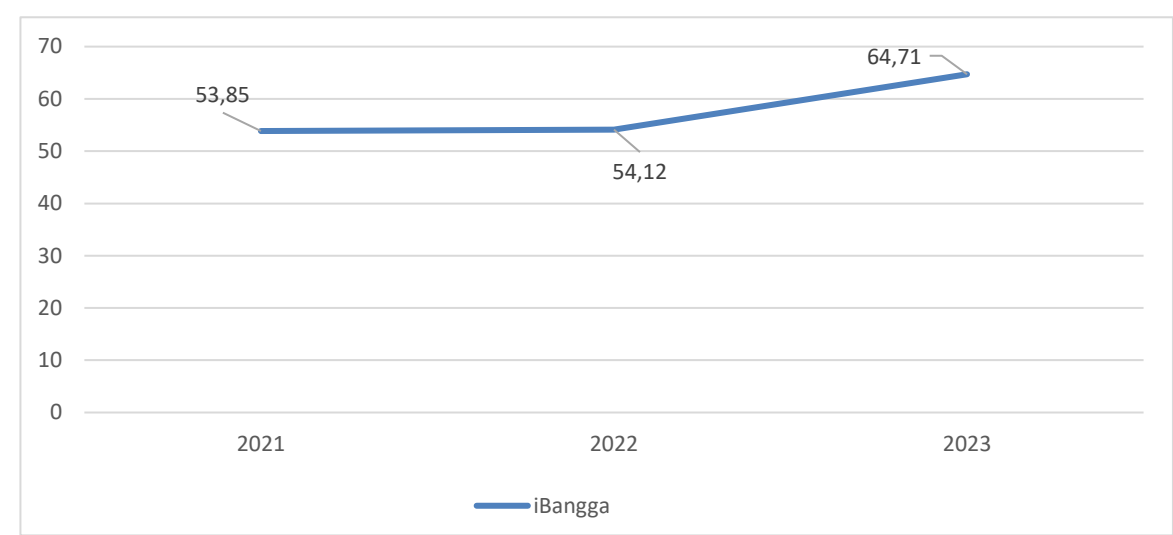
H. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40.
- iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70.
- iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Pencapaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga) di Kabupaten Serang dalam kurun waktu 2021-2023 setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2023 iBangga Kabupaten Serang sebesar 64,71 masuk katagori berkembang. Dimensi yang paling berpengaruh terhadap nilai iBangga pada tahun 2023 dimensi Kebahagiaan sebesar (74,33), Kemandirian (52,24) dan Ketentraman (48,04). Perkembangan iBangga Kabupaten Serang tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik 2.2.19 berikut:

Grafik. 2.2.19
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)
Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2023



Ketentraman	Kemandirian	Kebahagiaan	iBangga 2023
48,04	52,24	74,33	64,71

Sumber: Hasil PK 2023 BKKBN

Dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Provinsi Banten, IPLM Kabupaten Serang menempati urutan ke 7 (ketujuh) dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang ada di provinsi Banten. Untuk meningkatkan iBangga diperlukan upaya meningkatkan 3 (tiga) dimensi pembentuk iBangga yaitu :

- Ketenteraman dengan indikator Kegiatan Ibadah, Legalitas Keluarga, Jaminan Kesehatan, Keharmonisan Keluarga
- Kemandirian dengan indikator Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Jaminan Keuangan, Keberlangsungan Pendidikan, Kesehatan Keluarga, Akses Media Online
- Kebahagiaan dengan indikator Interaksi Keluarga dan Interaksi Sosial

iBangga kabupaten/kota se-Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 2.2.8 berikut:

Tabel 2.2.8
iBangga menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023

Kabupaten/Kota	2023
Kabupaten Pandeglang	56,39
Kabupaten Lebak	59,22
Kabupaten Tangerang	58,31
Kabupaten Serang	64,71
Kota Tangerang	64,25
Kota Cilegon	64,19
Kota Serang	64,69
Kota Tangerang Selatan	64,22
Provinsi Banten	62,22

Sumber: Hasil PK 2023 BKKBN

I. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Anak yang dimaksud adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun, tak terkecuali anak yang masih berada dalam kandungan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan adalah salah satu hak anak yang wajib diberikan terlepas dari latar belakang mereka.

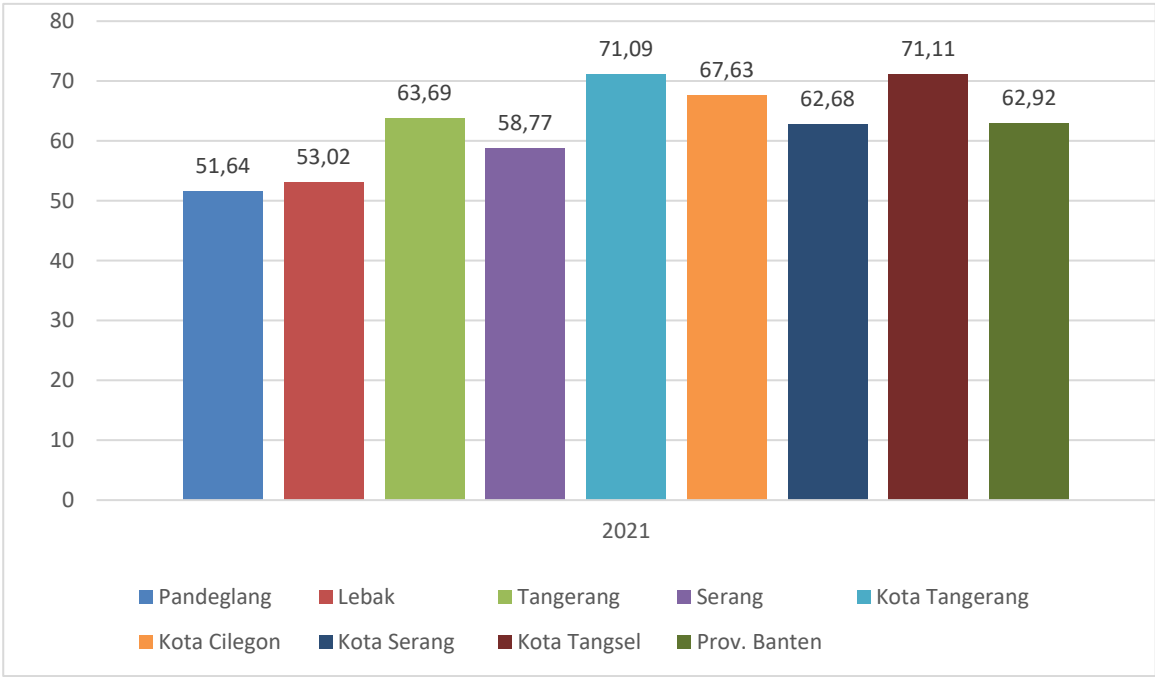
Hak Anak adalah hak minimum dan kebebasan yang harus diberikan kepada semua orang di bawah usia 18 tahun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, pendapat, asal, kekayaan, status kelahiran atau kemampuan dan karena itu berlaku untuk semua orang di mana pun. Perlindungan bukan sekedar hak bagi anak akan tetapi menjadi suatu kerangka kerja atau sistem yang dengannya hak-hak anak dapat terwujud. Kerangka tersebut terdiri dari berbagai pengemban tugas seperti pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, media massa dan Perguruan tinggi yang semuanya memiliki peran untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, dan dalam hal hak-hak anak dilanggar, pelanggar dibawa ke pengadilan dan perawatan diberikan kepada anak.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator yang menggambarkan pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Pencapaian nilai IPA di Kabupaten Serang sebesar 58,77 pada tahun 2021 jika dibanding dibandingkan dengan 8 (delapan)

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Serang menempati urutan ke 6 (enam) diatas nilai IPA Kabupaten Lebak (53,02) dan Kabupaten Pandeglang (51,64) dan berada dibawah nilai IPA Provinsi Banten (62,92).

Masih rendahnya nilai IPA di Kabupaten Serang mengindikasikan bahwa upaya penyediaan hak anak dan perlindungan anak masih perlu untuk ditingkatkan, khususnya pada upaya pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, penyediaan layanan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya maupun upaya perlindungan khusus anak. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui implementasi program maupun kebijakan perlindungan anak dengan melakukan koordinasi secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota. Perkembangan IPA kabupate/kota di provinsi Banten dapat dilihat pada grafik 2..2.20 berikut:

Grafik 2.2.20
Indeks Perlindungan Anak (IPA) menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2021



Sumber: Kemen PPA dan BPS

J. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan adanya ketidaksetaraan gender yang selama ini ada di masyarakat, serta mengetahui kemajuan pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender. Indeks ini juga digunakan untuk mendukung aksi masyarakat dunia akan kesetaraan gender.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Banten, IPG Kabupaten Serang tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 masih berada di bawah IPG Provinsi Banten, namun sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 IPG Kabupaten Serang selalu berada diatas rata-rata IPG Provinsi Banten. Hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kabupaten Serang tergolong baik. Secara rinci perkembangan IPG Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.2.9
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2022

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	75,94	77,66	80,82	83,42	85,84	85,88	-	86,13	86,47	86,68	86,71	86,83	86,93
Kab Lebak	71,13	72,98	75,72	77,17	77,86	77,8	-	78,56	79,26	79,63	79,81	79,87	80,2
Kab Tangerang	90,22	90,24	90,53	90,62	91,11	90,72	-	91,2	90,9	90,97	90,98	91,08	91,24
Kab Serang	88,91	89,25	89,54	90,26	91,78	91,77	-	92,28	92,18	92,4	92,14	91,98	92,32
Kota Tangerang	93,48	93,55	93,64	93,77	93,9	94,03	-	94,07	94,51	94,89	95,06	94,72	94,73
Kota Cilegon	85,08	85,25	85,4	86,14	86,75	86,64	-	86,35	86,75	87,16	87,22	87,25	87,57
Kota Serang	89,66	90,94	91,11	91,28	91,29	91,4	-	91,15	91,16	91,96	92,28	92,47	92,63
Kota Tangerang Selatan	-	92,09	92,9	93,04	93,13	93,14	-	92,83	93,16	93,56	93,58	93,8	93,96
Provinsi Banten	90,22	90,22	90,28	90,31	90,99	91,11	90,97	91,14	91,3	91,67	91,74	91,83	92,18

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2010-2022

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. Dalam menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living). Berikut ini adalah komponen IPG yang berisikan IPM laki-laki dan IPM Perempuan.

Tabel. 2.2.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019- 2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki				Perempuan				Jumlah			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	70,03	70,11	70,25	70,93	60,70	60,79	61,00	61,66	64,91	65,00	65,17	65,84
Kab Lebak	68,64	68,65	68,77	69,45	54,66	54,79	54,93	55,70	63,88	63,91	64,03	64,71
Kab Tangerang	76,18	76,16	76,53	77,16	69,30	69,29	69,70	70,40	71,93	71,92	72,29	72,97
Kab Serang	70,26	70,60	70,84	71,65	64,92	65,05	65,16	66,15	66,38	66,70	66,82	67,75
Kota Tangerang	81,61	81,40	81,79	82,19	77,44	77,38	77,47	77,86	78,43	78,25	78,50	78,90
Kota Cilegon	78,10	78,10	78,41	78,81	68,07	68,12	68,41	69,01	73,01	73,05	73,35	73,95
Kota Serang	76,62	76,65	76,79	77,24	70,46	70,73	71,01	71,55	72,10	72,16	72,44	72,98
Kota Tangerang Selatan	85,28	85,14	85,29	85,62	79,79	79,67	80,00	80,45	81,48	81,36	81,60	81,95
Provinsi Banten	76,61	76,62	76,84	77,28	70,23	70,29	70,56	71,24	72,44	72,45	72,72	73,32

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2019-2022

K. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG ini menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik yang menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.

Tiga komponen pembentuk IDG yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterwakilan perempuan dalam parlemen, dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi, dan teknisi

(Badan Pusat Statistik). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Banten, IDG Kabupaten Serang tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 masih berada di bawah IDG Provinsi Banten. Dalam capaian per tahun sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 IDG Kabupaten Serang meningkat namun tahun 2022 kembali turun. Secara rinci perkembangan IDG Kabupaten Serang dapat dilihat pada **Tabel 2.2.11**. dibawah ini.

Tabel. 2.2.11
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/ Kota di
Provinsi Banten
Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	60,45	61,27	61,58	63,52	63,16	64,07
Kab Lebak	64,38	60,85	60,36	58,68	58,24	57,16
Kab Tangerang	62,43	62,25	61,54	61,53	62,17	63,35
Kab Serang	59,00	64,55	58,87	59,48	59,93	58,79
Kota Tangerang	71,67	71,76	65,19	65,03	64,86	64,09
Kota Cilegon	56,05	59,22	52,86	52,32	52,81	51,30
Kota Serang	63,81	62,65	62,10	61,26	61,66	62,39
Kota Tangerang Selatan	68,46	70,72	74,00	73,85	73,08	72,67
Provinsi Banten	70,00	72,75	68,83	68,76	69,09	68,55

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2017-2022

L. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2021). Idealnya, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut serta dalam pembangunan dan mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh manfaat dari pembangunani (43,18%).

Tabel. 2.2.12
Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	0,624	0,605	0,580	0,583	0,573
Kab Lebak	0,617	0,635	0,605	0,626	0,616
Kab Tangerang	0,477	0,499	0,486	0,457	0,433
Kab Serang	0,553	0,572	0,563	0,554	0,560
Kota Tangerang	0,266	0,342	0,279	0,311	0,324
Kota Cilegon	0,456	0,447	0,338	0,354	0,443
Kota Serang	0,546	0,549	0,508	0,521	0,544
Kota Tangerang Selatan	0,303	0,223	0,171	0,155	0,170
Provinsi Banten	0,491	0,503	0,484	0,475	0,478

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2018-2022

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Banten, IKG Kabupaten Serang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berada di atas IKG Provinsi Banten. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terjadi ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Serang kesetaraan. Pada tahun 2018 IKG Kabupaten Serang mencapai 0,553 dan cenderung meningkat hingga tahun 2022 mencapai 0,560, semakin rendah IKG maka kesetaraan semakin baik.

M. Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan pemuda diarahkan untuk mensukseskan pencapaian target pembangunan prioritas nasional, yaitu pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, optimalisasi bonus demografi dan mencapai Indonesia Emas 2045. Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP merupakan instrumen pengukur keberhasilan pembangunan kepemudaan berbasis hasil (outcome) yang dapat memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda. Investasi pada peningkatan kualitas pemuda merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Untuk memantau kemajuan pembangunan pemuda yang dihasilkan dari investasi ini, perlu ada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tujuannya adalah membangun kerangka analisis situasi, tantangan, dan rumusan kebijakan untuk mendorong perbaikan pembangunan pemuda di tingkat

daerah agar lebih baik. Terdapat 5 domain dalam IPP yaitu; domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi. Dalam domain partisipasi dan kepemimpinan terdapat indikator organisasi pemuda yang aktif, untuk memaksimalkan peranan pemuda, maka diperlukan suatu pembinaan secara kelembagaan/keorganisasian, dimana lembaga tersebut akan dijadikan sebagai suatu wadah mengembangkan kreativitas pemuda untuk mencapai tujuan bersama.

Tabel. 2.2. 13
Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) Kabupaten Serang
2014-2023

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13	27	9	27	25	93	86	100	98	81

Sumber: Disporapar Kab Serang, 2023

Tabel 2.2.13 diatas menunjukkan presentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten serang pada 2014-2023. Dari tabel tersebut terlihat bahwa organisasi pemuda di Kabupaten Serang tahun 2011-2023 semakin meningkat. Sempat menurun pada saat Covid-19, tetapi pada tahun berikutnya kemudian meningkat kembali organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Serang.

Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda diarahkan pada upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup di kalangan pelajar dan pemuda. Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika, produktif serta dapat berperan aktif sebagai motor dalam pembangunan, maka dilakukan berbagai fasilitasi kegiatan kepemudaan. Sementara itu, pelaksanaan pembangunan urusan keolahragaan diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembinaan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah. Berikut ini merupakan **Tabel 2.2.14** cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Serang 2011-2022.

Tabel. 2.2.14
Cakupan pembinaan olahraga Kabupaten Serang 2011-2023 (dalam %)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5,00	5,00	17,65	9,18	29,79	19,40	29,79	8,40	29,41	-	-	92,45	100

Sumber : Disporapar Kabupaten Serang, 2023

Selama 12 tahun terakhir, cakupan pembinaan olahraga cenderung mengalami fluktuasi. Berdasarkan tabel diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Serang tahun 2011-2019 cenderung kurang baik. Pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 0% dikarenakan tidak ada event olahraga akibat pandemic Covid-19. Tetapi semakin membaik dari tahun 2022-2023 bahkan mecapai 100% pada tahun 2023. Pada aspek pembangunan sosial budaya, upaya peningkatan peran serta pemuda melalui penyelenggaraan pembangunan bidang pemuda dan olahraga secara lebih terpadu dan sinergis.

Pemberian fasilitasi terhadap organisasi kepemudaan dan juga peningkatan kapasitas dan kualitas, pembinaan, serta pengembangan ketrampilan dan bakat, seni dan budaya, termasuk pembinaan olahraga selama ini telah terselenggara sesuai dengan jalur tugas pokok dan fungsi dari OPD atau lembaga yang mengampu bidang ini (seperti KONI beserta pengurus cabangnya). Meskipun selama ini sudah berjalan cukup baik, namun dalam proyeksi ke depannya masih perlu dioptimalkan lagi terutama dalam pengembangan dan tindak lanjut terhadap berbagai program penguatan dan pembinaan kepemudaan dan olahraga.

Pembangunan bidang kepemudaan dan keolah-ragaan di Kabupaten Serang adalah dengan memperhatikan asas kemandirian, yaitu pembangunan kepemudaan dan keolahragaan berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa. Asas manfaat menghendaki bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Pengembangan ini berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pemuda sebagai insan pelopor dan penggerak pembangunan, serta sebagai sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan.

Kegiatan olahraga juga merupakan salah satu bentuk dari kependidikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembinaan

pendidikan jasmani, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah, yang harus dilakukan sejak usia muda. Pembangunan olahraga untuk even-even selama ini dicerminkan pula dari pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang mengalami perkembangan yang sangat cepat.

N. Cakupan Warisan Budaya Skala Kabupaten

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Serang ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasny arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Serang sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah Jaseng dalam kurikulum muatan local ditingkat pendidikan namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Serang seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Upaya pelestarian di bidang Kebudayaan di Kabupaten Serang menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Pelestarian budaya dibagi menjadi dua yaitu pelestarian budaya berujud benda dan pelestarian budaya tak benda. Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan daerah bertujuan untuk melindungi, mengamankan dan melestarikan budaya daerah, meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya daerah baik berupa benda maupun tak benda. Salah satu contoh yang harus dijaga dan dilindungi adalah Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Serang. Hal ini harus kita lakukan bersama agar tetap lestari sehingga anak cucu kita bisa mengetahui sejarah yang terjadi dimasa lalu melalui situs Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Serang. Berikut daftar nama situs cagar Budaya yang ada di Kabupaten Serang.

Tabel. 2.2. 15
Daftar Inventarisasi Cagar Budaya Kabupaten Serang

No.	Nama Situs Cagar Budaya	Alamat Situs Cagar Budaya	Jenis Situs Bcb	Nomor Inventaris	Ket
1	Bendungan Lama Pamarayan	Kp. Pamarayan Ds. Pamarayan Kec. Pamarayan	Struktur	022.01.01.04.07	Bangunan Bendungan
2	Makam Kramat Kole	Kp. Kramat Kole Ds. Pamarayan Kec. Pamarayan	Struktur	036.01.01.03.94	
3	Gunung Santri	Kp. Gunung Santri Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara	Struktur	012.0101.03.94	Makam Kramat Syeh Muhamad Sholeh Bin Abdur Rohman
4	Menara Masjid Baitul Mutaqim	Kp. Beji Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara	Bangunan	018.01.01.04.03	Menara Masjid Kuno / Beji
5	Makam Dan Batu Nisan Kampung Kapatén	Kec. Bojonegara	Benda		Batu Nisan Kuno
6	Sdn 1 Bojonegara	Kp. Gedong Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara	Bangunan		Bangunan Sekolah
7	Situs Batu Bergores Cirampones	Kp. Rampones Ds. Sindang Mandi Kec. Baros	Benda	016.01.01.01.01	Tapak Kaki, Batu Bergores, Lumpang Batu/ Batu Berlubang
8	Situs Batu Lingga	Kp. Batu Lingga Ds. Sidamukti Kec. Baros	Benda	001.01.01.01.94	Tujuh Buah Batu (Menhir)
9	Batu Tapak Kaki (Tapak Sutton) Dan Batu Keris Sukacai	Kp. Kadu Cokrom Ds. Sukacai Kec. Baros	Benda	017.01.01.01.01	Lumpang Batu / Batu Berlubang, Batu Bergores
10	Makam Katengahan Pangeran Jayakarta	Kp. Katengahan Ds. Margasana Kec. Kramatwatu	Struktur	011.01.01.03.94	Makam Pangeran Jayakarta
11	Lemah Tamba	Kp. Pancuran Ds. Lebak Wana Kec. Kramatwatu	Struktur	013.01.01.03.01	Sumur Tua
12	Situs Tasik Kardi	Kp. Margasana Ds. Margasana Kec. Kramatwatu	Struktur	007.01.01.03.94	Danau Buatan
13	Pengindelan Abang	Kp. Margasana Ds. Margasana Kec. Kramatwatu	Bangunan	006.01.01.03.94	Bangunan Penyaringan Air
14	Menara Pecinan Tinggi	Kp. Darmayon Ds. Pamekang Kec. Kramatwatu	Bangunan	005.01.01.03.94	Bekas Masjid Kuno

15	Situs Patapan	Kp. Patapan Pasir Ds. Negara Kec. Kibin	Struktur	003.01.01.02.94	Kursi Batu Dan Susunan Batu
16	Situs Tirtayasa	Kp. Tirtayasa Ds. Tirtayasa Kec. Tirtayasa	Struktur	023.01.01.03.07	Bangunan Benteng
17	Makam Sultan Ageng Tirtayasa	Kp. Tirtayasa Ds. Tirtayasa Kec. Tirtayasa	Struktur	024.01.01.03.07	Bangunan Makam
18	Makam Pangeran Singaraja	Kp. Singaraja Ds. Pontang Kec. Pontang	Struktur	010.01.01.03.94	Makam Islam
19	Batu Peta	Kec. Mancak	Benda	027.01.01.03.07	Batu Prasejarah
20	Masjid Cikoneng	Kp. Cikoneng Ds. Cikoneng Kec. Anyar	Bangunan	018.01.01.04.03	Masjid Kuno
21	Stasiun Kereta Api Anyar Lor	Kp. Kapuh Ds. Anyar Kec. Anyar	Bangunan	002.01.01.01.94	Bangunan Stasiun Kereta Api
22	Stasiun Kereta Api Anyar Kidul	Kp. Cikoneng Ds. Cikoneng Kec. Anyar	Bangunan	022.01.01.04.07	Bangunan Stasiun
23	Mercusuar Anyar	Kp. Bojong Ds. Cikoneng Kec. Anyar	Menara Bangunan	009.01.01.04.94	Menara Mercusuar
24	Pulau Sanghyang	Ds. Cikoneng Kec. Anyar	Bangunan	014.01.01.04.01	Bangunan Bunker
25	Batu Lesung	Kp. Parigi Ds. Grogol Indah Kec. Anyar	Struktur	027.01.01.01.07	Peninggalan Megalitik (Lumpang Batu)
26	Sirit Badug	Kp. Badug Ds. Grogol Indah Kec. Anyar	Struktur	028.01.01.01.07	Peninggalan Megalitik (Menhir)
27	Makam Sangaji	Kec. Anyar	Struktur	028.01.01.03.07	Komplek Makam
28	Makam K.H. Syam'un	Kp. Kamasan. Ds. Kamasan Kec. Cinangka	Bangunan	025.01.01.03.07	Makam
29	Patilasan Nyi Mas Gamparan	Kp. Tanjung Sari Ds. Tanjung Sari Kec. Pabuaran	Bangunan	029.01.01.03.07	Bangunan Dan Sumber Mata Air
30	Stasiun Kereta Api Cikeusal	Kp. Pasar Baru Ds. Cikeusal Kec. Cikeusal	Bangunan	020.01.01.04.05	Bangunan Stasiun
31	Polsek Ciruas	Jl. Raya Serang Jkt Ranjeng Ciruas	Bangunan	031.01.01.04.16	Bangunan Kantor
32	Rumah Kuno Kampung Bojong	Kp. Bojong Ds. Kadikaran Ciruas	Struktur		Bangunan

33	Makam Pangeran Sunyalaras	Kp. Tanara Ds. Tanara Kec. Tanara	Bangunan	023.01.01.03.07	Makam
34	Jembatan Irigasi Sultan	Kp. Cikotok Ds. Lempuyang Kec. Tanara	Bangunan		Bangunan Jembatan
35	Makam Cina	Kp. Pesisir Ds. Lantan Kec. Tanara	Struktur		Makam
36	Naskah Kuno Kh. Kholid	Kec. Tanara	Benda	028.01.01.01.07	Naskah Kuno
37	Masjid Jami Nawawi	Kp. Pesisir Ds. Pedaleman Kec. Tanara	Bangunan		Masjid Kuno
38	Rumah Kampung Setu	Ds. Waringin Kurung Kec. Warngin Kkurung	Bangunan		Bangunan Rumah
39	Stasiun Catang	Ds. Bojong Catang Kec. Tunjung Teja	Bangunan		Bangunan Setasiun

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Adanya keberagaman budaya di Kabupaten Serang dapat mendukung terwujudnya pembangunan nasional karena dengan adanya budaya akan menjadi daya tarik bangsa asing, mengembangkan kebudayaan nasional, tertanamnya sikap toleransi, saling melengkapi hasil budaya, dan mendorong inovasi kebudayaan. Keanekaragaman budaya memiliki banyak manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Serang yang dapat membantu membangun masyarakat yang lebih toleran, mempromosikan inovasi dan kreativitas, dan menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif.

Keanekaragaman seni budaya daerah yang ada di wilayah Kabupaten Serang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Serang yang harus dilindungi dalam rangka pemajuan kebudayaan dengan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Keragaman ini telah melahirkan budaya yang sangat kaya dan unik di Kabupaten Serang, seperti kesenian budaya silat kaserangan, debus, tradisi keagamaan rebo wakasan, panjang mulud, senjata tradisional golok ciomas dan berbagai makanan khas bontot, garang asem, pecak bandeng, sate bandeng, ceplis dan lain sebagainya. Berdasarkan SK Bupati No 430/Kep.587-Huk/2018, berikut adalah ragam seni budaya yang telah ditetapkan sebagai asset daerah di Kabupaten Serang.

Tabel. 2.2. 16
Ragam Seni Budaya di Kabupaten Serang

No.	Nama Seni Budaya Daerah	Keterangan
1	SILAT KASERANGAN	Seni bela diri khas Kaserangan yang merupakan gabungan jurus-jurus dari beberapa aliran silat yang hidup di Kabupaten Serang khususnya dan umumnya di Provinsi Banten, seperti Terumbu, Bandrong, TTKDH dan lain-lain. Jurus Kaserangan ini diarahkan dan digagas langsung oleh. Hj. TATU CHASANA S.E. M.Ak
2	RINGKANG JAWARI	Seni tarian kreasi baru yang tercipta dari cerita kesultanan Banten yang mengungkapkan kegigihan Wanita banten
3	DEBUS	Seni tradisional yang berkembang di Kesultanan banten. Debus awalnya diajarkan kepada prajurit di Kesultanan Banten untuk menjaga kesultanan dari serangan musuh, dan selanjutnya debus difungsikan sebagai sarana penyebaran agama islam, karena didalamnya terkandung makna-makna syariat islam
4	TERBANG GEDE	Seni tradisional yang menurut tokohnya, identik dengan peringatan Isro Mi'roj Nabi Besar Muhammad SAW yang menerima wahyu 5 (lima) waktu sholat dari Allah SWT. Terbang gede menurut suku katanya adalah terbang besar yang memiliki 5 (lima) alat music yaitu : koneng, kempul, bibit, kela dan bedug terbang gede.
5	BELUK	Seni suara yang dimainkan dengan nada tinggi dan melengking tanpa syair
6	SYAMAN	Seni dzikir yang mengangungkan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
7	RUDAT	Seni tradisional yang bernuansa Islami yang dimainkan pada hari besar dan ngarak pengantin
8	GACLE	Seni akrobat yang memainkan manusia diikat dan bisa lepas sendiri dan hilang orangnya
9	WEWE	Seni boneka-bonekaan besar seperti ondel-ondel
10	BANDRONG LESUNG	Lahir dari kebiasaan Masyarakat sesaat setelah panen dengan menumbuk padi di lesung untuk menghilangkan lelah dan letih yang dimainkan oleh kaum ibu dari lesung yang diadukan dengan alu
11	BUAYA PUTIH	Lahir dari cerita rakyat di rawa danau terkait dengan kejadian seekor buaya putih yang ditaklukan seorang santri dari pesantren disekitar rawa danau saat santri mau nikah tetiba ada buaya putih untuk dipersembahkan kepada santrinya
12	WAYANG GARING	Tampilan seni wayang kulit yang dimainkan oleh salah satu warga langsung dengan musiknya
13	WAYANG GOLEK	Seni budaya yang menjadi potensi budaya di Kabupaten Serang
14	PATINGTUNG	Seni tradisi yang memiliki alat music yang khas 3 (tiga) goong kecil yang digantung. Kesenian ini hanya dimiliki oleh Kabupaten Serang yang biasa dimainkan untuk mengiringi silat dan debus
15	UBRUG	Seni theater rakyat yang dipentaskan dengan konsep Garapan tanpa naskah
16	LAIS	Seni theater akrobat semacam naik sepeda yang dimainkan di atas tali tambang

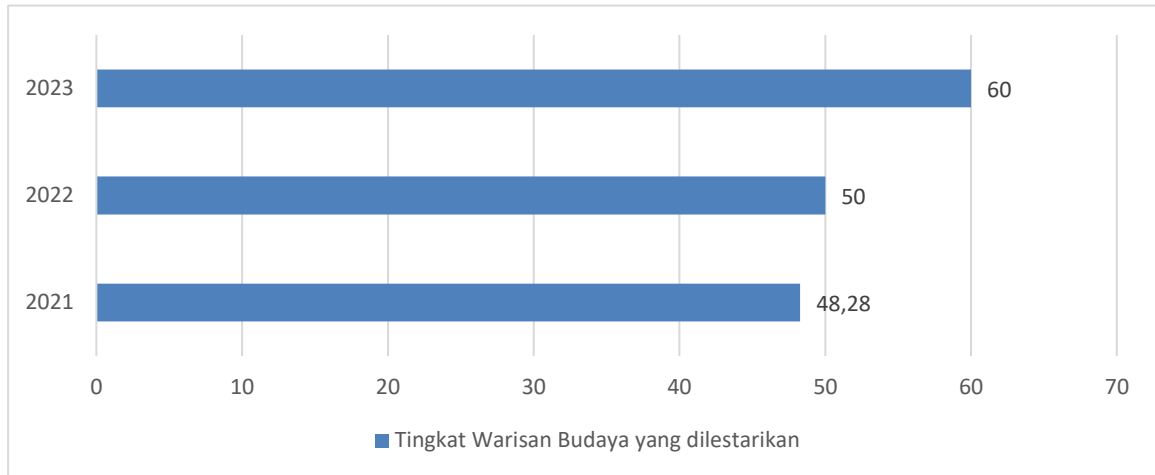
17	JALANGKUNGAN	Seni yang ada di Ciomas dengan menggunakan kayu sebagai penompang
18	KUDA LUMPING	Kesenian khelaran yang ada di Pontang beruda kuda-kudaan yang terbuat dari kulit bambu dan diiringi dengan musik patingtung
19	KENDANG PENCA	Seni bela diri yang tersebar di Kabupaten Serang
20	GAMBUS	Seni music islami yang menyanyikan lagu-lagu arab
21	LIONG	Seni atraksi etnis thionghoa yang memainkan liong
22	PANTUN	Tradisi lisan berupa rangkaian kata dua baris pertanyaan dan dua baris jawaban yang mengandung arti dengan Bahasa kiasan yang disesuaikan dengan Bahasa setempat
23	DONGENG	Tradisi lisan berupa dongeng/cerita yang disampaikan secara temurun dari generasi ke generasi berikutnya
24	GENJRING	Seni musik tradisional dengan alat musik yang menyerupai rebana atau rudat biasa, biasanya dipentaskan pada peringatan hari-hari besar islam dan acara~acara perhelatan
25	YALIL	Seni suara dengan suara tinggi, biasa disebut buka pintu pada acara pengantenan/pernikahan
26	MARHABAN	Tradisi mesyarakat saat mendoakan bayi yang baru lahir
27	QOSIDAH	Seni suara/musik bercorak Islami yang menggunakan rebana sebagai media musiknya dan yang dinyanyikan lagu-lagu Islami
28	KERINDING	Seni musik yang bunyinya dihasilkan dari sebilah bambu dan dimainkan saat menunggu padi mau panen
29	KETIMPLUNGAN	Seni musik yang menggunakan alat musik menyerupai terbang gede yang dimainkan pada hari-hari besar islam
30	WAWACAN SYEH	Seni budaya membaca kitab Syeh Abdul Khodir Djaelani
31	RATIBAN	Seni vocal untuk tolak bala
32	BANDRONG	Seni silat yang berkembang di daerah Bojonegara dan Pulo Ampel dengan gerakan khas di bawah
33	RAMPAK BEDUG YUDHA	Seni bedug yang dimainkan secara bersama-sama atau rampak yang hidup di Kecamatan Bandung
34	TARI KREASI BARU	Seni tari kreasi baru yang diciptakan setelah Provinsi Banten terpisah dari Provinsi Jawa Barat

Sumber: SK Bupati Serang No 430/Kep.587-Huk/2018

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Serang digunakan indikator Tingkat Warisan Budaya yang dilestarikan, Dalam kurun waktu 2021-2023 nilai Tingkat Warisan Budaya yang dilestarikan mengalami kenaikan setiap tahunnya mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen untuk melestarikan pembangunan kebudayaan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin deras nya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Perkembangan nilai Tingkat Warisan Budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada grafik 2.2.21 berikut:

Grafik 2.2.21
Tingkat Warisan Budaya yang dilestarikan
Kabupaten Serang Tahun 2021-2023

Sumber: Dindikbud Kabupaten Serang 2023



2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Sektor Unggulan Ekonomi Daerah

1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Berdasarkan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha periode 2017-2023, dapat disimpulkan bahwa baik PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) seluruh sektor yang ada selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif di setiap tahunnya. Walaupun secara umum seluruh sektor yang ada mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19. Berdasarkan **Tabel 2.3.1**, Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 – 2023 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Serang, PDRB Kabupaten Serang selama periode 2017-2023 sebagian besar disumbang oleh sektor Industri Pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 48,96%, disusul oleh sektor Konstruksi rata-rata sebesar 10%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,26%. Adapun untuk sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berada pada urutan ke 4 (empat) dimana berkontribusi terhadap PDRB ADHK sebesar 8,70%.

Sektor dengan rata-rata kontribusi terendah terhadap PDRB ADHK terlihat pada beberapa sektor dengan kontribusi dibawah 1% terhadap PDRB ADHK pada tahun 2017-2023. Sektor jasa lainnya dengan capaian rata-rata sebesar 0,99% terhadap PDRB ADHK, sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial dengan capaian rata-rata sebesar 0,59% terhadap PDRB ADHK, sektor pengadaan listrik dan gas dengan capaian rata-rata sebesar 0,47%, sektor

jasa Perusahaan dengan capaian rata-rata sebesar 0,21% terhadap PDRB ADHK, sektor pertambangan dan penggalian dengan capaian rata-rata sebesar 0,10% terhadap PDRB ADHK, serta sektor pengadaan air dengan capaian rata-rata sebesar 0,04% terhadap PDRB ADHK.

Sektor pertanian menunjukkan kecenderungan stabil pada setiap tahunnya. Transformasi perekonomian dari primer ke sektor industri dan jasa menunjukan peningkatan yang signifikan berdasarkan angka kontribusi PDRB tertinggi di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang sebagai salah satu lumbung berasnya Provinsi Banten, mencerminkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan yang cukup besar (leading sector) dalam perekonomian Kabupaten Serang sehingga dapat dikatakan struktur ekonomi di Serang merupakan tipe agraris. Karena perekonomian Kabupaten Serang pada umumnya berbasis pada pertanian, maka pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang mutlak dan penting sehingga diharapkan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan berorientasi pada pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Tabel. 2.3. 1
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 – 2023 Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Serang (dalam Miliar Rupiah)

No.	Sektor PDRB	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.383,5	8,92	4.502,66	8,70	4.569,12	8,41	4.766,75	9,02	4.837,85	8,82	5.031,47	8,73	5028,39	8,33
2	Pertambangan dan Penggalian	49,96	0,10	52,74	0,10	55,66	0,10	54,45	0,10	53,32	0,10	53,93	0,09	54,87	0,09
3	Industri Pengolahan	24.786,51	50,43	25.886,38	50,02	26.856,84	49,42	25.291,02	47,84	26.376,57	48,09	27.707,99	48,10	29479,5	48,83
4	Pengadaan Listrik, Gas	242,01	0,49	250,54	0,48	253,23	0,47	233,62	0,44	250,76	0,46	273,38	0,47	265,84	0,44
5	Pengadaan Air	17,67	0,04	18,28	0,04	19,28	0,04	20,93	0,04	21,72	0,04	21,84	0,04	22,95	0,04
6	Konstruksi	4.560,61	9,28	4.930,48	9,53	5.358,93	9,86	5.338,03	10,10	5.734,12	10,46	6.064,97	10,53	6174,77	10,23
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.501,27	9,16	4.726	9,13	5.060,76	9,31	4.981,56	9,42	5.077,93	9,26	5.363,14	9,31	5585,87	9,25
8	Transportasi dan Pergudangan	1.793,41	3,65	1.952,94	3,77	2.081,09	3,83	2.030,97	3,84	2.143,98	3,91	2.318,77	4,03	2433,09	4,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.166,89	2,37	1.255,53	2,43	1.341,76	2,47	1.271,57	2,41	1.319,19	2,41	1.420,36	2,47	1537,26	2,55
10	Informasi dan Komunikasi	569,14	1,16	607,04	1,17	655,55	1,21	714,41	1,35	748,71	1,37	794,38	1,38	856,5	1,42
11	Jasa Keuangan	1.296,14	2,64	1.362,59	2,63	1.369,84	2,52	1.376,98	2,60	1.438,05	2,62	1.528,19	2,65	1519,04	2,52
12	Real Estate	2.476,94	5,04	2.698,13	5,21	2.916,41	5,37	2.972,99	5,62	3.050,88	5,56	3.220,82	5,59	3390,91	5,62
13	Jasa Perusahaan	106,18	0,22	110,66	0,21	119,62	0,22	117,34	0,22	116,84	0,21	119,54	0,21	128,19	0,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	920,36	1,87	968,12	1,87	1.061,55	1,95	1.060,06	2,01	1.061,02	1,93	1.065,9	1,85	1086,64	1,80
15	Jasa Pendidikan	1.548,11	3,15	1.648,74	3,19	1.773,55	3,26	1.785,43	3,38	1.732,63	3,16	1.707,98	2,96	1810,42	3,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	261,73	0,53	276,99	0,54	306,16	0,56	323,21	0,61	347,45	0,63	356,07	0,62	384,29	0,64
17	Jasa lainnya	474,21	0,96	506,51	0,98	548,14	1,01	527,09	1,00	533,63	0,97	558,39	0,97	612,02	1,01
PDRB		49.154,64	100	51.754,32	100	54.347,49	100	52.866,43	100	54.844,65	100	57.607,11	100	60.370,56	100

Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

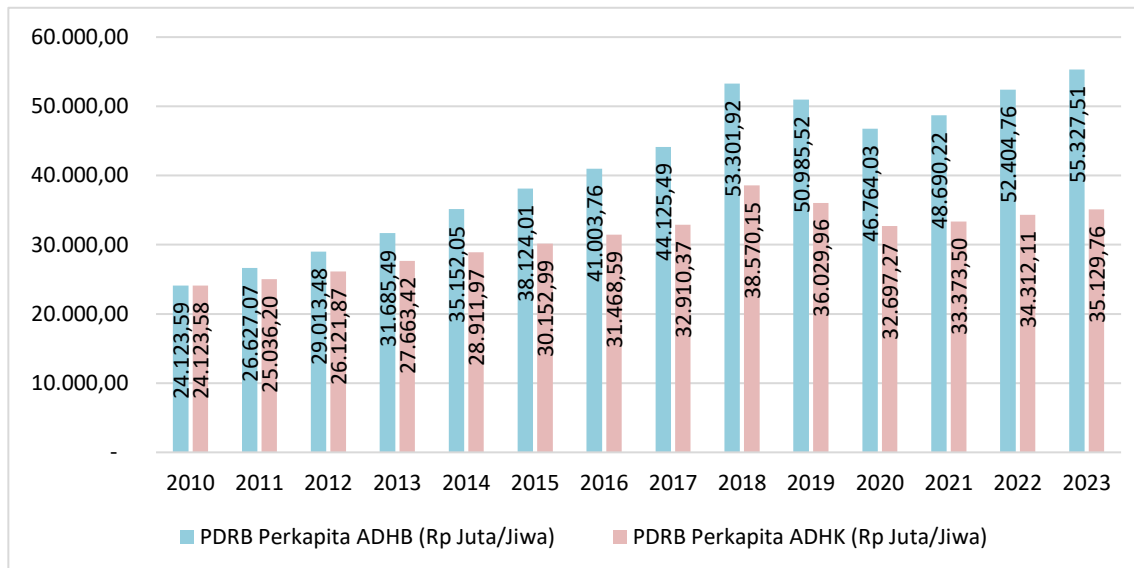
Sektor perdagangan, akomodasi dan makan minum merupakan sektor yang memiliki kontribusi dalam struktur perekonomian setelah sektor industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian. Di wilayah kecamatan pendirian mini market tampak berjamur dengan radius lokasi tidak lebih dari satu kilometer. Nampak bahwa usaha perdagangan saat ini merupakan usaha yang paling menguntungkan bagi pelaku usaha, karena dengan risiko minimal sektor ini mampu memberi keuntungan yang lebih besar dibanding sektor lainnya. Selain itu, untuk berusaha di bidang perdagangan tidak memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dibutuhkan pelaku usaha sektor lainnya.

Pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa perusahaan menjadi salah satu kontributor terkecil PDRB Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2023 akan tetapi dilihat dari tren untuk kontribusi PDRB sektor jasa perusahaan mengalami peningkatan. Secara perlahan, hal ini mengindikasikan adanya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Serang dari tahun ke tahun dari kegiatan yang berbasis primer ke tersier. Pertumbuhan ekonomi pada sektor pengadaan air, pertambangan dan penggalian menjadi 2 (dua) sektor yang memiliki kontribusi capaian rata-rata terendah terhadap PDRB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sektor informasi dan komunikasi, jasa Kesehatan dan kegiatan sosial, pengadaan listrik dan gas berturut-turut menjadi sektor yang memiliki kontribusi dengan capaian rata-rata dibawah 1% pada tahun 2016-2023

2. PDRB Per Kapita

Kesejahteraan masyarakat secara ekonomi juga dapat digambarkan dengan pendapatan per kapita. Ketika pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah semakin tinggi, maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut dapat dikatakan semakin baik. Perhitungan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut.

Grafik. 2.3. 1
PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Serang Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023 (diolah)

Berdasarkan **Grafik 2.3.1**, terlihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Serang mengalami peningkatan di setiap tahunnya baik itu dengan perhitungan nilai PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2010 PDRB per kapita ADHB mencapai 24.123,59 juta rupiah, dan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2018 menjadi sebesar 53.301,92 juta rupiah. Demikian pula dengan PDRB ADHK yang mencapai 24.123,58 juta rupiah pada tahun 2010, terus mengalami peningkatan mencapai 38.570,15 juta rupiah pada tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai 32.696,20 juta rupiah.

Seperti penjelasan sebelumnya, peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Serang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun demikian, indikator PDRB per kapita tidak mampu memberikan gambaran riil pendapatan asli masyarakat karena belum memperhitungkan pendapatan yang keluar (transfer out) dari luar daerah, sehingga masih banyak mengandung kelemahan dalam menganalisis tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Indonesia sedang berupaya mencapai cita-cita menjadi negara maju. Harapannya, setelah 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045, ekonomi akan membaik, termasuk ekonomi digital. Sebagai negara maju, pendapatan per kapita yang dirancang oleh Bappenas di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian, mensyaratkan pendapatan perkapita minimal USD 23.000. Saat ini pendapatan perkapita Kabupaten Serang baru sebesar

55.327,51 upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serang untuk meningkatkan pendapatan perkapita dengan cara melibatkan faktor ekonomi, sosial dan kebijakan antara lain:

a) Pendidikan

Pendapatan perkapita akan meningkat jika kualitas pendidikannya baik, dengan investasi dalam sistem pendidikan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja kedepannya.

b) Infrastruktur

Peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan energi, karena infrastruktur yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.

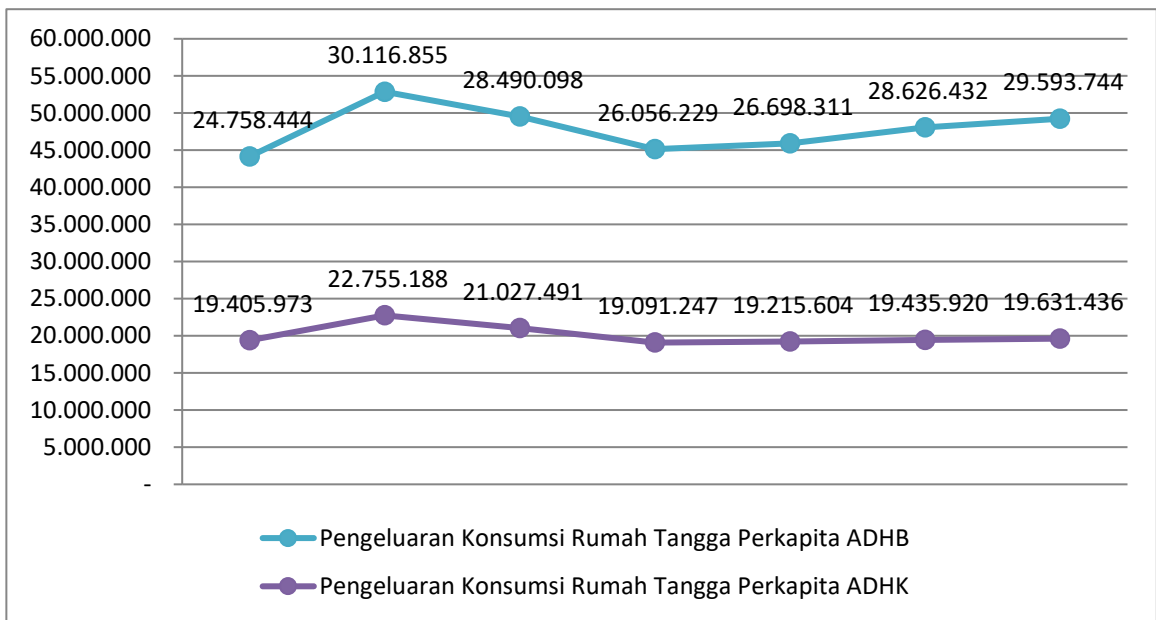
c) Tatakelola pemerintahan yang baik

Peningkatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan lingkungan usaha yang stabil.

3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan perbandingan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi rumah tangga selama sebulan terhadap banyaknya rumah tangga. Grafik di bawah ini menunjukkan rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Serang tahun 2017-2023 ADHK dan ADHB. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa konsumsi rumah tangga ADHK cenderung meningkat selama periode 2017-2023 sejalan dengan konsumsi rumah tangga per kapita ADHB yang juga cenderung meningkat selama periode tersebut yaitu dari sebesar 28.984.586 juta rupiah pada tahun 2017 menjadi 32.631.258 juta rupiah pada tahun 2023.

Grafik. 2.3. 2
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023

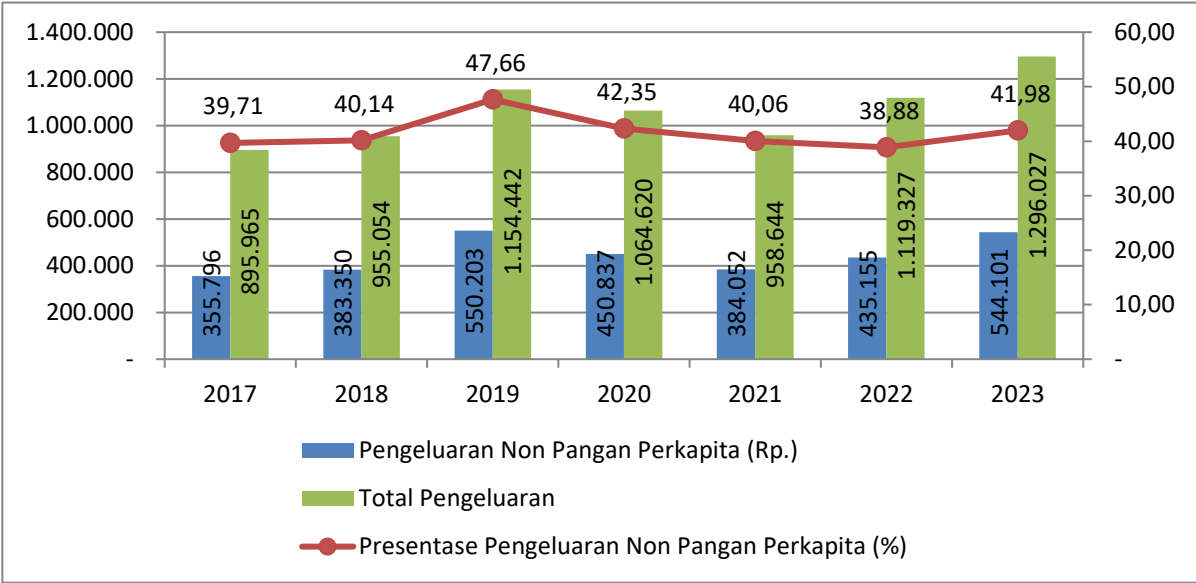
4. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Per Kapita

Pengeluaran/Konsumsi rumah tangga yang dicakup dalam Susenas dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan. Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan pada dasarnya saling berkaitan. Data pengeluaran non makanan ini dapat digunakan untuk melihat pola pengeluaran penduduk yang merupakan salah satu variable yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, sedangkan pergeseran komposisi pengeluaran dapat mengindikasikan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk. Rata-rata pengeluaran perkapita non makanan selama sebulan masyarakat Kabupaten Serang lebih besar pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 550.203 atau 52,33% dari total rata-rata pengeluaran per kapita pada periode 2016-2022. Sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita non makanan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 355.796 atau 39.71% dari total rata-rata pengeluaran per kapita.

Jika dilihat pada **Grafik 2.3.3**, Rata-rata pengeluaran perkapita Non-Makanan Kabupaten Serang pada periode 2017-2023 mengalami fluktuasi, akan tetapi persentase nya terhadap total rata-rata pengeluaran perkapita non makanan menurun pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2019 dari sebesar 47,66% menjadi sebesar 38,88% hal itu disebabkan menurunnya total rata-rata pengeluaran per kapita pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2019 dari Rp. 1.154.442 menjadi

sebesar Rp. 1.119.327 sedangkan rata-rata pengeluaran non makanan nya menurun dari Rp. 550.203 menjadi Rp. 435.155. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2023 menjadi tahun dengan total rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi selama periode 2017-2023 dan didominasi oleh rata-rata pengeluaran perkapita makanan.

Grafik. 2.3. 3
Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Non Pangan Kabupaten Serang 2016-2023



Sumber : BPS Provinsi Banten 2017-2023

5. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan (Bappenas, 2023). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.

Tabel. 2.3. 2
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten Tahun 2011-2021

KABUPATEN/ KOTA	Tahun										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Pandeglang	4,63	5,26	4,70	4,80	4,81	4,95	4,96	4,97	5,07	4,95	5,20
Kab. Lebak	4,48	5,16	4,85	4,86	4,83	4,90	5,06	5,04	5,20	5,01	5,31
Kab. Tangerang	5,02	5,61	5,22	5,27	5,31	5,43	5,50	5,61	5,65	5,55	5,73
Kab. Serang	4,60	5,18	4,88	4,93	4,86	4,96	5,03	5,10	5,23	5,08	5,46
Kota Tangerang	5,34	5,87	5,48	5,51	5,55	5,60	5,60	5,81	5,80	5,71	6,01
Kota Cilegon	5,46	5,80	5,57	5,54	5,79	5,85	5,85	5,90	6,05	5,86	6,03
Kota Serang	4,95	5,60	5,12	5,12	5,15	5,20	5,24	5,26	5,55	5,41	5,52
Kota Tangerang Selatan	5,21	5,84	5,25	5,34	5,34	5,38	5,41	5,48	5,53	5,26	5,52
Provinsi Banten	4,59	4,84	5,16	5,19	5,34	5,57	5,59	5,60	5,95	5,48	6,09

Sumber: Bappenas, 2023

Berdasarkan **Tabel 2.3.3**, kualitas Pembangunan ekonomi di Kabupaten Serang cenderung meningkat pada periode tahun 2011-2021. Secara rata-rata, nilai indeks tumbuh sebesar 1,59% per tahun. Pada tahun 2021, Kabupaten Serang termasuk dalam kategori memuaskan dengan perolehan indeks sebesar 5,46. Namun nilai indeks tersebut masih lebih kecil dibandingkan nilai indeks provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang menyebabkan Kabupaten Serang berada pada peringkat ke-3 terbawah (lebih tinggi dari Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang). Salah satu pilar pendukung inklusifitas ekonomi di Kabupaten Serang yaitu perluasan akses dan kesempatan masyarakat dalam kegiatan perekonomian seperti kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas.

Tabel. 2.3. 3
Jumlah Kantor Bank Umum Kabupaten Serang dan Provinsi Banten
Tahun 2016-2022

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Serang	93	95	96	95	87	109	87
Provinsi Banten	1.260	1.270	1.263	1.231	1.199	1.273	1.064

Sumber : Provinsi Banten Dalam Angka 2017-2022, (diolah)

Perbankan sebagai motor penggerak ekonomi mempunyai beberapa peranan, yakni menumbuhkan sektor usaha kerakyatan, meningkatkan kemampuan ekonomi pengusaha dan UMKM dan sebagai sumber pendanaan. Pada tabel dibawah ini dapat terlihat jumlah kantor bank umum di Kabupaten Serang pada tahun 2016 sebanyak 93 meningkat hingga tahun 2018 menjadi sebanyak 96 dan mencapai 109 kantor pada tahun 2021 akan tetapi menurun lagi di tahun 2022 menjadi sebanyak 87.

6. Indeks Ekonomi Hijau

Transformasi Ekonomi Indonesia menjadikan Ekonomi Hijau sebagai game-changer dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan mendorong Indonesia lepas dari Middle-Income Trap sebelum 2045. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Selain meningkatkan ekonomi dan mata pencaharian dalam jangka pendek, ekonomi hijau juga melindungi kesejahteraan untuk jangka yang lebih panjang. Sasaran ekonomi hijau salah satunya yaitu peningkatan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Indeks ekonomi hijau terdiri dari 15 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar yaitu: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar lingkungan memiliki indeks komposit terendah, sebagian besar disebabkan oleh rendahnya persentase sampah terkelola di Kabupaten Serang, hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan lingkungan yang lebih tepat untuk mewujudkan ekonomi hijau.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. (UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah) penyaluran sampah yang banyak ditemui terdiri dari proses pengumpulan sampah dari permukiman atau sumber sampah lain, pengangkutan sampah

untuk dibuang di tempat penampungan sementara (TPS), dan proses terakhir yaitu pembuangan di tempat pemrosesan akhir. Permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pengelolaan pelayanan masih rendah, TPA yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan masalah biaya.

Tabel. 2.3. 4
Presentase Sampah Terangkut Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Total Sampah Terangkut	54.390,40	155.859,10	58.411,90	86.214,39
Total Timbunan Sampah	414.264,42	414.581,97	414.581,97	430.390,77
Presentase Sampah Terangkut %	13,13	37,59	14,09	20,03

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab Serang, 2023

Pada **Tabel 2.3.4** terlihat bahwa presentase sampah terangkut di Kabupaten Serang sangat kecil dikarenakan kurangnya armada pengangkut sampah, manajemen sampah yang belum memadai, hal itu tercermin dari presentase sampah terangkut yang rata-rata hanya sebesar 21,21%. Tetapi pemerintah Kabupaten Serang dalam hal penanganan sampah telah menerapkan sistem pengelolaan sampah secara mandiri oleh masing-masing kecamatan. Saat ini sudah ada 15 kecamatan yang pengelolaan sampahnya dilakukan secara mandiri. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan presentase pengelolaan sampah di Kabupaten Serang.

7. Presentase PAD Terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Selama periode 2014-2019, persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Serang relatif menurun, walaupun sempat mengalami peningkatan di tahun 2017. Pada tahun 2014, kontribusi PAD mencapai 23,08%. Kemudian, pada tahun 2017 terjadi peningkatan kenaikan kontribusi yang cukup signifikan yakni sebesar 5,57% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019

kontribusi PAD mengalami penurunan berturut-turut masing-masing menjadi sebesar 23,88% dan 23,32% hingga tahun 2023 meningkat sebesar 27,05%.

Tabel. 2.3.5
Presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2014-2023 (Miliar Rp)

Uraian	Persentase PAD Terhadap Pendapatan (Persen)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi PAD	464	580	591	815	697	705	701	791	808	879
Pendapatan	2.012	2.305	2.468	2.811	2.919	3.024	2.859	3.135	3.093	3.249
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	23,08	25,15	23,94	29,01	23,88	23,32	24,53	25,24	26,13	27,05

Sumber : BPKAD Kab Serang, 2024

Berdasarkan Tabel. 2.3.5 mencerminkan kemandirian fiskal/derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Serang. Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Dari tabel diatas presentase PAD terhadap Pendapatan di Kabupaten Serang mencapai 27,05%, terlihat bahwa Kabupaten Serang merupakan daerah dengan kondisi menuju kemandirian.

8. Indikator Desa Membangun (IDM)

Bahwa untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi d status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa ma Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD1 meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun at yang disebut IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Inde Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahan Ekologi/Lingkungan Desa. Dari hasil penilaian IDM tersebut de dikatagorikan berstatus menjadi 1. Desa Sangat Tertinggal, 2. Desa Tertingg 3. Desa Berkembang, 4. Desa Maju, dan 5. Desa Mandiri. Penentuan stat desa diklasifikasikan dengan ambang batas sebagai berikut :

1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), Pemerintah Kabupaten Serang memiliki 12 (dua belas) Desa Mandiri pada tahun 2023, hal ini mengindikasikan kenaikan yang cukup signifikan bila dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya ada 2 (dua) Desa Mandiri. Pada tahun 2023 nilai rata-rata IDM Kabupaten Serang 0,6804 dengan status Berkembang sedangkan persentase Desa Maju dan Desa Mandiri baru mencapai 24,54 %. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Serang dituntut untuk membangun Desa Maju dan Desa Mandiri yang memerlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Upaya peningkatan status IDM menuju Desa Maju dan Mandiri perlu dilakukan peningkatan indeks komposit IDM :

- Indeks Ketahanan Sosial harus didukung diantaranya dengan meningkatkan akses sarana kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, meningkatkan akses terhadap Poskesdes, meningkatkan akses terhadap sekolah, meningkatkan ketersediaan taman bacaan masyarakat/perpustakaan desa dan sinyal akses internet warga
- Indeks Ketahanan Ekonomi harus didukung diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan moda transportasi umum, ketersediaan pasar dan lembaga ekonomi
- Indeks Kualitas Ekologi harus didukung diantaranya menjaga tidak terjadinya pencemaran terhadap air, udara, tanah, limbah di sungai di desa dan tanggap bencana.

Perkembangan kondisi status desa berdasarkan IDM Kabupaten Serang dalam kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.3.6 berikut :

Tabel 2.3.6
Kondisi Status Desa Berdasarkan IDM Kabupaten Serang
Tahun 2019-2023

No.	Status/Katagori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
2	Tertinggal	42	22	19	4	1
3	Berkembang	239	255	254	254	245
4	Maju	43	46	50	64	68
5	Mandiri	2	3	3	4	12
Jumlah Desa		326	326	326	326	326

Sumber : DPMD Kabupaten Serang

B Sektor Penopang dan Perkembangan Potensi Daerah

1. Pertanian

Sebagai salah satu sektor penting, pertanian memiliki hubungan langsung dengan kehidupan manusia karena menyediakan kebutuhan dasar bagi manusia. Pertanian, dalam arti luas, tidak hanya mencakup kegiatan tanaman pangan, seperti jagung dan padi, tetapi juga mencakup perkebunan dan peternakan. Kegiatan pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Penyelenggaraan urusan pertanian juga memuat indikator tentang ketersediaan energi dan protein serta pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Tabel. 2.3. 7
Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Serang 2011-2022

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Komoditas Utama Padi dan Palawija													
-Padi Sawah	Ton	425,604	442,193	468,280	456,858	510,748	513,105	520,077	524,228	496,064	549,318	571,663	550,752
-Jagung	Ton	3,346	3,403	1,978	2,279	965	5,006	6,031	6,395	7,836	6,208	7,350	2,736
-Ubi Kayu	Ton	39,509	3,174	2,927	23,707	15,901	15,020	794	9,416	12,449	-		7,469
-Ubi Jalar	Ton	8,395	14,939	7,326	7,008	3,901	4,934	4,267	2,544	2,298	2,298		2,847
-Kacang Tanah	Ton	4,698	4,417	4,895	4,123	3,413	2,804	834	3,951	947	947	1,632	1,066
-Kacang Kedelai	Ton	375	688	238	2,010	693	610	409	1,206	329	329	-	222
Hortikultura													
-Durian	Ton	142,082	231,351	10,572	102,843	143,217	15,038	20,915	86,335	19,042	19,033	8.322,94	11.308,43
-Sedap Malam	Tangkai	95,085	45,600	240,250		51,348	53,915	70,000	102,650	117,480	312,867	501.000,00	358.500,00
Sayuran													
-Bawang daun	Kuintal	926	120	181	200	-			54	328	503	787	788
-Bawang merah	Kuintal	3,395	10,038	17,666	15,061	6,252			6,729	11,973	11,617	9.888,35	10.550,50
-Bayam	Kuintal	32,126	8,343	9,502	10,158	4,473			5,516	5,421	19,934	19.778,70	8.112,40
-Cabe besar	Kuintal	3,820	8,543	23,790	27,713	20,298			8,461	23,729	-	7,797	4,755
-Cabe rawit	Kuintal	1,953	5,997	16,386	12,541	10,072			4,420	14,348	10,031	9,431	7,648
-Jamur	Kuintal	2,099	3	24,805	4,843	2,513			8	100	1,559	412	160
-Kacang panjang	Kuintal	21,772	22,877	34,183	29,743	28,040			10,683	15,704	21,273	24,880	21,715
-Kangkung	Kuintal	21,312	14,138	16,220	15,881	7,687			8,570	8,340	39,686	37,039	12,118
-Mentimun	Kuintal	24,262	32,384	50,396	40,345	23,406			16,000	22,698	32,966	29,085	22,123
-Melon	Kuintal								87	825	1,330	367	485

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-Sawi	Kuintal	17,208	26,622	32,291	27,007	15,094			14,016	14,654	27,295	24,243	14,901
-Semangka	Kuintal								-	430	10,200	1,550	1,962
-Terong	Kuintal	5,217	13,980	26,564	23,306	13,888			18,572	18,091	10,925	9,961	8,188
-Tomat	Kuintal	2,995	4,796	10,280	7,809	3,738			998	2,103	4,900	2,732	3,584
Daging													
-Daging Itik	Kg	3,757,599			22,423,531		774,987	791,136	809,344	829,495	854,574	853,741	1,904,882
-Daging kerbau	Kg	1,793,760	1,871,494		2,200,729		878,414	898,281	914,695	936,197	906,150	966,381	642,162
Komoditas Utama Padi dan Palawija													
-Padi Sawah	Ton	425,604	442,193	468,280	456,858	510,748	513,105	520,077	524,228	496,064	549,318	571,663	550,752
-Jagung	Ton	3,346	3,403	1,978	2,279	965	5,006	6,031	6,395	7,836	6,208	7,350	2,736
-Ubi Kayu	Ton	39,509	3,174	2,927	23,707	15,901	15,020	794	9,416	12,449	-		7,469
-Ubi Jalar	Ton	8,395	14,939	7,326	7,008	3,901	4,934	4,267	2,544	2,298	2,298		2,847
-Kacang Tanah	Ton	4,698	4,417	4,895	4,123	3,413	2,804	834	3,951	947	947	1,632	1,066
-Kacang Kedelai	Ton	375	688	238	2,010	693	610	409	1,206	329	329	-	222
Hortikultura													
-Durian	Ton	142,082	231,351	10,572	102,843	143,217	15,038	20,915	86,335	19,042	19,033	8.322,94	11.308,43
-Sedap Malam	Tangkai	95,085	45,600	240,250		51,348	53,915	70,000	102,650	117,480	312,867	501.000,00	358.500,00
Sayuran													
-Bawang daun	Kuintal	926	120	181	200	-			54	328	503	787	788
-Bawang merah	Kuintal	3,395	10,038	17,666	15,061	6,252			6,729	11,973	11,617	9.888,35	10.550,50
-Bayam	Kuintal	32,126	8,343	9,502	10,158	4,473			5,516	5,421	19,934	19.778,70	8.112,40
-Cabe besar	Kuintal	3,820	8,543	23,790	27,713	20,298			8,461	23,729	-	7,797	4,755
-Cabe rawit	Kuintal	1,953	5,997	16,386	12,541	10,072			4,420	14,348	10,031	9,431	7,648

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-Jamur	Kuintal	2,099	3	24,805	4,843	2,513			8	100	1,559	412	160
-Kacang panjang	Kuintal	21,772	22,877	34,183	29,743	28,040			10,683	15,704	21,273	24,880	21,715
-Kangkung	Kuintal	21,312	14,138	16,220	15,881	7,687			8,570	8,340	39,686	37,039	12,118
-Mentimun	Kuintal	24,262	32,384	50,396	40,345	23,406			16,000	22,698	32,966	29,085	22,123
-Melon	Kuintal								87	825	1,330	367	485
-Sawi	Kuintal	17,208	26,622	32,291	27,007	15,094			14,016	14,654	27,295	24,243	14,901
-Semangka	Kuintal								-	430	10,200	1,550	1,962
-Terong	Kuintal	5,217	13,980	26,564	23,306	13,888			18,572	18,091	10,925	9,961	8,188
-Tomat	Kuintal	2,995	4,796	10,280	7,809	3,738			998	2,103	4,900	2,732	3,584
Daging													
-Daging Itik	Kg	3,757,599			22,423,531		774,987	791,136	809,344	829,495	854,574	853,741	1,904,882
-Daging kerbau	Kg	1,793,760	1,871,494		2,200,729		878,414	898,281	914,695	936,197	906,150	966,381	642,162

Sumber: DKPP Kabupaten Serang, 2023

Pada **Tabel 2.3.7** terlihat bahwa produksi padi sawah cenderung meningkat hingga pada tahun 2021 mencapai 571.663 ton akan tetapi menurun di tahun 2022 menjadi sebesar 550.752 ton. Hal tersebut seiring dengan luas tanam padi yang juga meningkat di tahun 2021 yaitu mencapai 104.134 hektar kemudian menurun di tahun 2022 menjadi sebesar 100.938 hektar. Meskipun produksi padi serta luas tanam padi di tahun 2021 mencapai angka tertinggi selama periode 2017-2022, hal tersebut berbanding terbalik dengan luas panen padi yang menurun pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan luas panen padi pada tahun 2020 yaitu dari sebesar 101.079 hektar menjadi sebesar 99.137 hektar pada tahun 2021. Sedangkan untuk luas tanam dan luas panen komoditas jagung dan kedelai tren nya cenderung menurun hingga tahun 2022.

Tabel. 2.3. 8
Luas Tanam dan Luas Panen Pertanian (Hektar)
Kabupaten Serang 2017- 2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Tanam Padi	80.544	94.985	86.256	102.651	104.134	100.938
Luas Panen Padi	83.954	92.385	88.657	101.079	99.137	99.534
Luas Tanam Jagung	2.785	2.052	2.489	1.185	1.800	772
Luas Panen Jagung	933	1.582	1.703	1.227	1.647	634
Luas Tanam Kedelai	991	1.429	665	135	-	257
Luas Panen Kedelai	327	965	481	117	-	211

Sumber: DKPP Kabupaen Serang,2023

Tabel 2.3.8 menunjukkan jumlah kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Serang pada tahun 2023. didominasi oleh kebutuhan konsumsi telur yam dan beras. Terlihat bahwa kebutuhan beras pada tahun 2023 sebesar 84,2 kg dan telur ayam 109,6 kg. Pemerintah Kabupaten Serang perlu memperhatikan tingkat percepatan produksi padi dari tingkat konsumsi masyarakat akan beras sebagai pangan utama agar kebutuhan pangan masyarakat dapat tercukupi. Oleh karena itu diperlukan perhatian terhadap daerah mana saja yang memiliki tingkat produksi dan konsumsi beras yang tinggi agar dapat dilakukan pemetaan sehingga menjadi informasi penting untuk kebijakan cadangan pangan Kabupaten Serang.

2. Perikanan

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Serang, terdapat indikator yang menjadi tolak ukur penilaiannya. Di Kabupaten Serang, 4 (empat) indikator yang digunakan adalah: kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB, tingkat konsumsi ikan, jumlah produksi perikanan, dan nilai produksi perikanan. Pertumbuhan PDRB sector perikanan di Kabupaten Serang mencapai angka 1,29% pada tahun 2017. Angka tersebut kemudian turun di tahun 2019 menjadi 1,24% dan cenderung stagnan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 berada pada angka 1,28%.

Tabel. 2.3. 9
Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Serang 2017-2023

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	70.481,04	71.297,19	56.930,35	41.245,76	42.391,35	56.747,91	58.118,45
Konsumsi ikan Kg/Kapita	27,92	28,45	33,02	37,21	37,21	42,03	33,81
Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan (%)	1,29	1,29	1,24	1,28	1,28	1,28	1,28

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Serang, 2023

Potensi perikanan budidaya menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Serang untuk mengembangkan sub sektor perikanannya. Kondisi makro perekonomian yang dapat dilihat dari sub sektor perikanan tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan saja, namun juga perlu melihat tingkat konsumsi ikan dan nilai produksi perikanan yang ada di Kabupaten Serang. Total produksi perikanan budidaya di Kabupaten Serang mengalami penurunan pada kurun waktu tahun 2019-2020. Angka yang dicapai di tahun 2017 adalah 70.481,04 ton dan turun menjadi 41.245,76 ton pada tahun 2020.

Pada tahun 2021-2023 nilai produksi perikanan semakin meningkat, bahkan pada tahun 2023 mencapai 58.118,45 ton. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) menetapkan standar konsumsi ikan sebesar 36 kilogram per kapita per tahun. Meski konsumsi ikan di Kabupaten Serang dalam kurun waktu 2017-2019 lebih rendah dari standar yang ditetapkan oleh WHO, namun tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Serang mengalami peningkatan, dari 27,92 kilogram per kapita (2017) menjadi 37,21 kilogram per kapita (2021).

Tabel. 2.3. 10
Produksi Budidaya Ikan Konsumsi Kabupaten Serang 2017-2023 (Ton)

Jenis Ikan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Air Tawar							
Mas	159,63	162,67	163,18	139,31	139,66	141,38	1.335,74
Nila	291,48	295,57	296,55	228,86	238,87	240,16	152,60
Gurame	33,73	18,72	19,89	9,61	10,07	9,75	269,80
Patin	3,10	3,15	3,85	3,23	3,38	3,41	10,83
Lele	1.212,54	1.254,78	1.284,04	1.089,96	1.122,21	1.235,51	3,87
Lainnya	1,22	-	-	0,40	-	-	-
Total Budidaya Air Tawar	1.701,72	1.734,89	1.767,51	1.471,37	1.514,20	1.630,21	1.772,84
Tambak							
Bandeng	3.513,68	3.553,59	3.450,53	2.679,35	2.866,50	3.324,05	3.671,43
Udang	453,00	458,11	455,52	379,72	410,46	525,78	587,69
Rumput Gracillaria (BB)	43.550,61	44.045,32	33.883,98	22.416,00	23.160,00	36.721,50	38.148,49
Mujair	-	-	-	309,99	325,87	328,82	352,20
Belanak	-	-	-	231,94	243,41	244,35	250,88
Ikan Lainnya	27,00	27,32	35,20	1,05	2,90	5,15	5,43
Total Budidaya Tambak	47.544,29	48.084,33	37.825,24	26.018,05	27.009,14	41.149,65	43.016,12
Laut							
RL Cotoni (BB)	21.221,43	21.464,21	17.320,27	13.740,00	13.802,34	13.950,97	13.314,74
Kerang hijau	-	-	-	6,81	6,62	6,95	4,87
Lainnya	13,60	13,75	17,32	9,53	9,60	9,71	9,89
Total Budidaya Laut	21.235,03	21.477,96	17.337,59	13.756,34	13.818,56	13.967,63	13.329,50
Total Produksi Budidaya Ikan Konsumsi	70.481,04	71.297,18	56.930,35	41.245,76	42.341,90	56.747,49	58.118,46

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Serang, 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi budidaya ikan konsumsi di Kabupaten Serang selama kurun waktu 2017-2023 didominasi oleh jenis budidaya tambak yaitu rumput Gracillaria (BB) dengan rata-rata produksi 59.47% dari total produksi budidaya ikan konsumsi walaupun tren nya sempat mengalami penurunan dalam kurun waktu 2020 hingga 2021 akan tetapi pada tahun 2022 mampu mencapai 36.721,50 ton daripada tahun 2021 yang hanya sebesar 23.160 ton. Budidaya lainnya yang memiliki jumlah yang besar selama kurun waktu 2017-2022 adalah budidaya laut yang didominasi oleh jenis RL Cotoni (BB) yaitu rata-rata sebesar 30,19% dari total produksi. Dari data diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Serang lebih banyak menghasilkan produksi budidaya ikan konsumsi yang berjenis rumput laut.

Sedangkan untuk produksi perikanan tangkap di Kabupaten Serang mengalami naik-turun pada periode 2017-2023 dengan angka tertinggi berada pada tahun 2020 yang jumlahnya mencapai 10.130,48 ton. Selama periode 2017-2023, rata-rata produksi perikanan tangkap di Kabupaten Serang adalah sebesar 8.684,45 ton yang didominasi oleh jenis ikan Kembung, Teri Indian, dan Kakap yaitu masing-masing dengan rata-rata

sebesar 16,91%, 7,46% dan 5,05% dari total produksi. Akan tetapi jika dilihat per tahun, selama kurun waktu 2017 hingga 2019, produksi ikan tangkap didominasi oleh ikan Kembung, Rajungan dan Kakap Jenaha dengan rata-rata sebesar 28,96%, 7,04% dan 6,69% dari total produksi selama 2017-2029. Sedangkan di tahun 2020-2021 lebih banyak menghasilkan Teri Indian dengan rata-rata sebesar 15,21% dari total produksi selama tahun 2020-2021, dan pada tahun 2022 didominasi oleh ika Tomgkol yaitu sebesar 7,42% dari total produksi.

Tabel. 2.3. 11
Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Serang 2017-2023 (Ton)

No .	Jenis Ikan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Alu-alu Besar; Barakuda Besar (Sphyraena barracuda)	106,66	142,40	146,73	85,23	64,37	174,95	142,15
2	Bandeng Laki (Albula forsteri)	49,76	65,83	68,45	-	23,33	41,49	57,56
3	Baronang (Siganus vulpinus)	4,82	6,57	6,63	-	9,40	1,50	2,58
4	Bawal Hitam (Parastromateus niger)	16,78	22,88	23,09	-	8,96	76,81	20,60
5	Belanak (Chelon subviridis)	28,32	38,60	38,95	13,42	408,89	201,64	99,80
6	Belanak (Crenemugil seheli)	72,84	99,30	100,20	0,22	-	-	38,93
7	Beloso (Synodus variegatus)	76,38	104,11	105,07	3,57	474,40	181,24	65,30
8	Cendro (Lestrolepis japonica)	78,22	108,63	107,60	28,46	6,46	88,16	146,70
9	Cucut (Rhizoprionodon acutus)	65,10	88,74	89,55	-	-	-	55,02
10	Cucut Lanjam (Carcharhinus Fitzroyensis)	20,62	28,11	28,36	-	-	51,56	136,32
11	Cumi-cumi (Loligo chinensis)	68,15	92,89	93,74	744,37	340,87	202,09	4,54
12	Ekor Kuning (Paracaesio kusakarii)	58,14	79,25	79,98	148,07	8,80	0,77	85,29
13	Gabus Laut (Rachycentron canadum)	45,41	61,90	62,47	101,61	91,62	39,88	18,37
14	Gebel (Platax boersii)	49,62	67,64	68,26	-	-	0,27	1,27
15	Gurita (Octopus aegina)	6,54	8,91	9,00	-	-	0,24	12,82

16	Japuh (Dussumieria acuta)	6,08	8,29	8,36	-	393,22	38,92	41,15
17	Kaci (Plectorhinchus flavomaculatus)	58,45	79,67	80,40	-	-	-	14,25
18	Kakap (Liopropoma randalli)	468,17	635,20	644,04	-	774,68	67,95	906,35
19	Kakap Jenaha (Lutjanus gibbus)	483,48	655,07	665,10	-	7,57	7,55	47,15
20	Kakap Merah (Etelis coruscans)	34,84	47,50	47,93	-	566,63	58,53	18,93
21	Kakap Merah (Lutjanus bitaeniatus)	25,90	35,31	35,63	153,39	50,45	46,01	38,64
22	Kakap Merah Bakau (Lutjanus argentimaculatu s)	24,79	33,79	34,10	-	-	-	5,20
23	Kakap Putih (Plectorhinchus gibbosus)	27,35	37,28	37,62	15,61	0,33	33,08	31,30
24	Kembung (Rastrelliger faughni)	2.114,4 8	2.782,4 1	2.908,7 9	332,77	375,26	465,62	2.245,8 2
25	Keong Macan (Babylonia spirata)	38,09	51,93	52,40	-	-	-	-
26	Kepiting (Carpilius maculatus)	0,21	0,28	0,28	11,42	17,50	4,26	0,18
27	Kepiting Bakau (Scylla serrata)	0,19	0,26	0,26	-	-	2,14	0,16
28	Kerapu Balong (Epinephelus epistictus)	125,05	170,47	172,03	-	49,34	35,47	66,90
29	Kerapu Balong (Epinephelus merra)	0,20	0,27	0,27	151,69	55,78	24,24	38,45
30	Kerapu Batu (Cephalopholis aitha)	37,64	51,31	51,77	-	-	118,41	38,35
31	Kerapu Karang (Chephalopholis boenack)	148,10	251,89	203,73	135,46	68,85	37,16	151,85
32	Kerapu Macan (Epinephelus fuscoguttatus)	13,66	18,62	18,80	-	-	48,08	13,93
33	Kuniran; Biji Nangka (Parupeneus cyclostomus)	32,23	43,93	44,34	-	-	40,98	17,24
34	Kuniran; Biji Nangka (Upeneus vittatus)	19,39	26,43	26,67	89,45	80,48	87,36	33,78

35	Kurisi (Nemipterus hexodon)	19,16	26,11	26,35	31,53	12,34	58,71	24,08
36	Kurisi (Pentapodus setosus)	44,30	60,38	60,93	-	-	159,17	45,14
37	Kuro; Senangin (Polydactylus microstomus)	28,09	38,29	38,64	426,75	208,02	85,80	46,88
38	Kuwe (Carangoides armatus)	86,55	117,98	119,06	-	-	280,64	117,19
39	Kuwe (Carangoides malabaricus)	153,01	208,58	210,49	-	7,71	0,82	129,95
40	Kuwe (Caranx sexfasciatus)	20,76	28,31	28,56	208,63	8,61	50,58	30,73
41	Kuwe Gerong (Caranx ignobilis)	77,05	145,03	105,99	126,19	1,83	96,27	74,96
42	kuwe mangali (Gnathanodon speciosus)	4,53	6,18	6,23	-	-	-	2,42
43	Layang Lidi; Layar Deles (Decapterus macrosoma)	17,99	24,52	24,74	-	-	89,26	19,37
44	Layur (Trichiurus lepturus)	19,93	27,17	27,41	-	-	45,03	26,51
45	Lemuru (Sardinella lemuru)	7,79	10,62	10,72	-	-	-	10,52
46	Manyung Besar (Arius thalassinus)	120,74	164,59	166,10	779,26	197,26	381,98	123,03
47	Manyung Jahal (Plicofollis argyropleuron)	154,86	211,10	213,03	-	167,66	167,67	200,13
48	Pari Kodok (Neotrygon kuhlii).	29,33	39,98	40,35	4,80	32,67	-	28,54
49	Peperek Topang (Leiognathus equulus)	32,58	44,41	44,82	576,99	359,53	210,79	44,85
50	Petek (Aurigequula fasciata)	14,26	19,44	19,61	390,43	14,16	48,88	13,84
51	Rajungan (Portunus pelagicus)	507,85	692,29	698,62	10,94	57,52	103,88	503,55
52	Rebon (Mysis sp)	114,38	155,91	157,34	-	-	-	-
53	Samgeh (Chrysochir aureus)	2,20	2,99	3,02	54,05	0,42	0,43	2,51
54	Sebelah (Psettodes erumei)	7,79	10,62	10,72	-	-	13,72	7,53
55	Selanget (Anodontostoma chacunda)	15,26	20,80	20,99	-	-	51,73	15,55

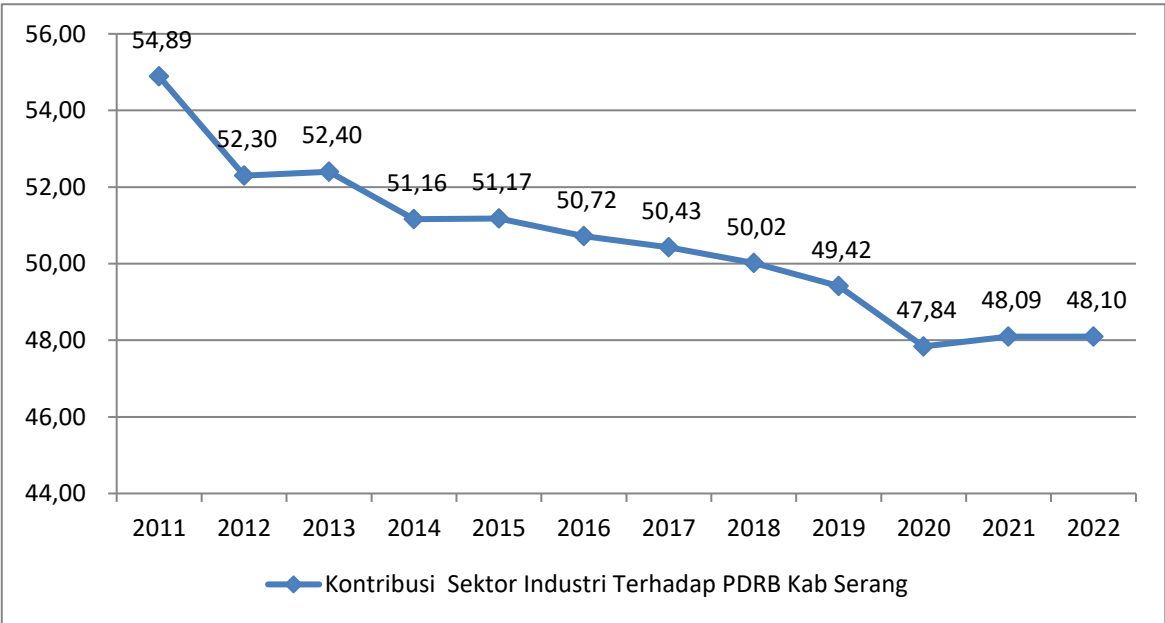
56	Selar Bentong (Selar crumenophthalmus)	188,64	257,15	259,50	322,81	395,66	495,89	250,05
57	Selar Kuning (Selaroides leptolepis)	117,51	160,18	161,65	41,47	315,81	338,16	155,19
58	Sembilang Karang (Plotosus lineatus)	6,69	9,13	9,21	-	-	22,35	7,66
59	Siro (Amblygaster sirm)	81,55	111,17	112,19	-	-	252,25	83,10
60	Talang-talang (Scomberoides lysan)	12,21	16,64	16,79	-	201,19	43,58	12,44
61	Talang-talang (Scomberoides tala)	80,98	110,40	111,41	438,05	-	144,98	127,45
62	Tembang (Sardinella gibbosa)	42,29	57,64	58,17	157,89	95,97	113,38	56,11
63	Tenggiri (Scomberomorus commerson)	132,60	180,76	182,42	453,54	220,75	294,05	172,75
64	Teri Gepeng (Stolephorus waitei)	9,66	13,17	13,29	-	-	34,07	9,84
65	Teri Indian (Stolephorus indicus)	184,99	272,17	254,48	2.011,92	821,68	466,89	224,31
66	Teri Nasi (Encrasicholina devisi)	189,11	257,79	260,15	921,98	232,31	219,27	58,65
67	Teri Nasi (Encrasicholina punctifer)	17,98	24,51	24,74	-	172,80	33,67	223,60
68	Tetengkek (Megalaspis cordyla)	20,70	28,22	28,47	1,10	-	51,35	28,01
69	Todak (Tetrapturus angustirostris)	19,36	26,39	26,64	39,75	34,29	29,21	26,16
70	Tongkol (Auxis thazard)	183,78	250,52	252,81	641,67	345,87	535,44	251,21
71	Tongkol Abu-abu (Thunnus tonggol)	27,92	38,06	38,41	-	-	97,89	28,45
72	Udang Api Api (Metapenaeus monoceros)	16,47	22,45	22,65	165,80	-	11,24	14,46
73	Udang Jambret (Mesopodopsis orientalis)	0,15	0,21	0,21	310,20	-	2,85	0,27
74	Udang Krosok Kuning (Megokris granulatus)	0,11	0,16	0,16	-	-	4,54	0,14
	TOTAL	7.216,76	9.837,71	9.927,73	10.130,48	7.781,24	7.212,77	7.794,03

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Serang, 2017-2023 diolah

3. Industri

Lapangan usaha sektor perindustrian merupakan lapangan usaha yang memiliki kontribusi tertinggi dalam PDRB Kabupaten Serang. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ekonomi wilayah Kabupaten Serang. Terkait dengan sektor industri dapat dilihat dari iklim investasi penanaman modal di kabupaten Serang, baik modal dalam negeri maupun modal asing perlu terus didorong untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah melalui penciptaan iklim usaha yang sehat dan menarik bagi penanam modal. Pembangunan di sektor industri diprioritaskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perijinan, peningkatan pelayanan penanaman modal, dan peningkatan promosi dan kerja sama investasi. Pembangunan dibidang penanaman modal diprioritaskan pada peningkatan penciptaan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing melalui peningkatan pelayanan penanaman modal dengan berbasis sistem teknologi informasi- komunikasi, dan memanfaatkan data base peluang investasi di tingkat lokal dan regional.

Grafik. 2.3. 4
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB 2011-2022 (dalam %)



Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023 diolah

Indikator kinerja pembangunan daerah urusan pelayanan pilihan terkait perindustrian di Kabupaten Serang dilihat dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Berdasarkan grafik diatas, terlihat jika trend kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB di Kabupaten Serang semakin menurun pada rentang waktu 2011-2022, ini sangat

berbanding terbalik dengan wilayah Kabupaten Serang yang mempunyai banyak industri, dimana terdapat industri di wilayah serang timur dan industri serang barat. Kontribusi terbesar pada tahun 2011 yaitu 54,89%, namun sayangnya, angka tersebut mengalami penurunan terus menerus pada tahun 2012-2020 menjadi 47,84%. Kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 48,09, kemudian berhasil pulih kembali pada tahun 2022 dengan kontribusi sektor perindustrian menjadi 48,10%.

4. Pariwisata

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pariwisata di Kabupaten Serang diarahkan untuk mencapai tujuan pengembangan potensi dan ketahanan budaya dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata. Pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Serang sendiri terdiri dari beberapa jenis dapat dilihat pada **Tabel 2.3.12** dibawah ini.

Tabel. 2.3. 12
Jumlah Kunjungan Wisatawaan Kabupaten Serang 2016 – 2023

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.710.967	9.247.799	8.395.768	658.160	1.374.043	1.477.253	2.177.965	2.574.094

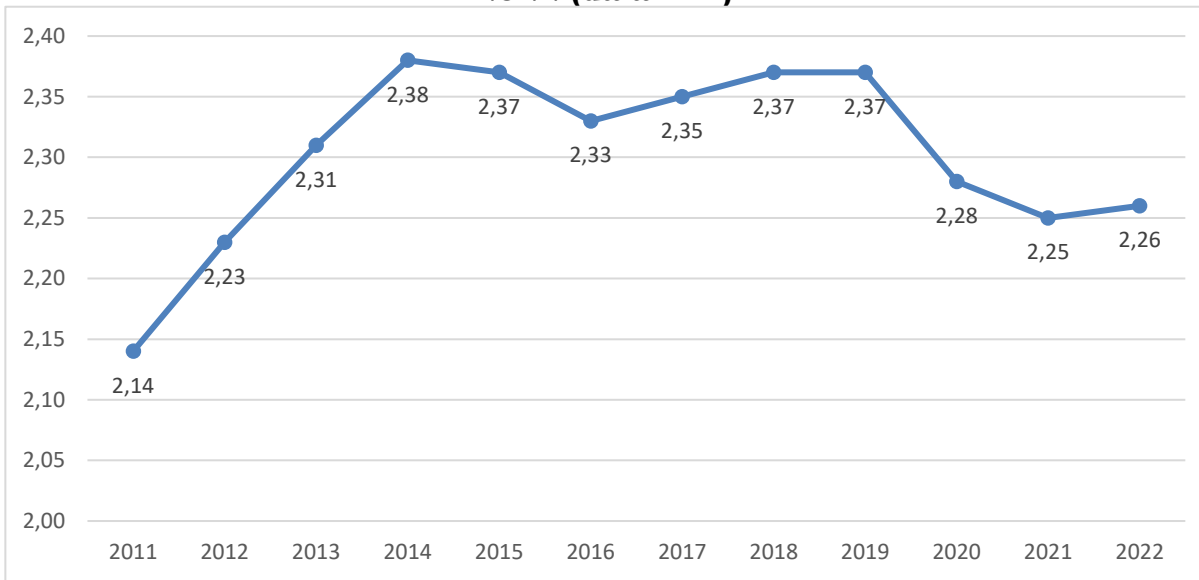
Sumber: Kabupaten Serang dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel terlihat bahwa jumlah wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara di Kabupaten Serang bergerak menurun di tahun 2022 sebesar 75% dari jumlah wisatawan pada tahun 2016. Apabila dilihat potensi wisatanya, Kabupaten Seraang memilki cukup banyak desa wisata yang tersebar di wilayah-wilayah kecamatan Kabupaten Serang dengan yang paling populer adalah Desa Cikolelet yang telah banyak meraih penghargaan salah satunya Anugerah Desa Wisata Inonesia (ADWI) pada tahun 2021.

Peningkatan program-program pengembangan pariwisata kedepan harus mencakup aspek promosi maupun hasil karya obyek wisata setempat. Hal ini didasari pada kurangnya pegembangan pariwisata di kabupaten Serang seperti pembuatan paket-paket wisata yang memudahkan para wisatawan untuk memilih obyek wisata yang akan di

kunjungi di masa yang akan datang. Hal penting lainnya adalah pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sebab pengembangan ekonomi kreatif tidak terlepas dari budaya masyarakat setempat yang merupakan kearifan lokal yang harus dilestarikan. Selain itu dan pengenalan hasil karya penduduk lokal (handycraft) ataupun makanan-makanan khas di sekitar wilayah obyek wisata utama sebagai pendukung dalam upaya peningkatan sektor pariwisata serta fasilitas lainnya seperti rumah makan, restoran, toko cinderamata dan sarana ibadah. Berikut ini merupakan grafik kontribusi pariwisata yang diambil dari sektor makanan dan minuman terhadap PDRB periode 2011-2022.

Grafik. 2.3. 5
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Serang 2011-2022 (dalam %)



Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023

Pariwisata merupakan sektor yang sangat strategis dalam perekonomian dan merupakan sektor yang relatif tahan terhadap krisis ekonomi. Apabila komponen – komponen ekonomi pariwisata dapat tumbuh pesat maka kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian akan sangat dominan. Indikator terbaik untuk menunjukkan performa ekonomi suatu negara yaitu PDRB. PDRB yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi didukung oleh sektor ekonomi lainnya. Pada Grafik 2.3.5 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Serang masih relatif kecil berkisar 2-3 %. Diharapkan kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Serang akan semakin meningkat karena Kabupaten Serang merupakan

daerah dengan banyak destinasi wisata mulai dari wisata alam, wisata buatan, wisata pantai, wista sejarah dan agro wisata.

5. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Di bidang perkoperasian UMKM, animo masyarakat Kabupaten Serang untuk mendirikan koperasi dan UMKM baru dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2015 persentase koperasi aktif mencapai sebanyak 26,99% dan terus meningkat hingga tahun 2022 mencapai 75%. Peningkatan persentase terjadi dimulai pada tahun 2017 dimana persentase koperasi aktif meningkat 45% dari tahun 2016 yaitu sebesar 69,24%. Koperasi apabila dikelola dengan benar merupakan sokoguru perekonomian dan akan memberikan manfaat yang besar bagi anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya sesuai dengan misi “Memberikan kontribusi nyata dalam membangun daerah, regional dan nasional melalui pelayanan, pembinaan, fasilitas dan pendampingan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan produktifitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM.

Tabel. 2.3. 13
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi Kabupaten Serang 2015-2023

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah usaha mikro dan kecil	25.087	25.087	26.091	26.909	37.513	50.420	43.109	48.053	48.537
Persentase koperasi aktif	26,99	31,78	69,24	71,56	73,75	74,73	75,00	75,00	75,79

Sumber : Diskoumperindag Kabupaten Serang, 2023

Sementara itu, jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Serang pun mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 25,087 menjadi 48,537 di tahun 2023. Puncak angka tertinggi jumlah usaha dan mikro kecil di Kabupaten Serang selama periode 2015-2023 berada pada tahun 2020, yaitu mencapai 50,420. Pada tahun 2021 banyak UMKM yang bangkrut karena dampak dari Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya jumlah UMKM di Kabupaten Serang.

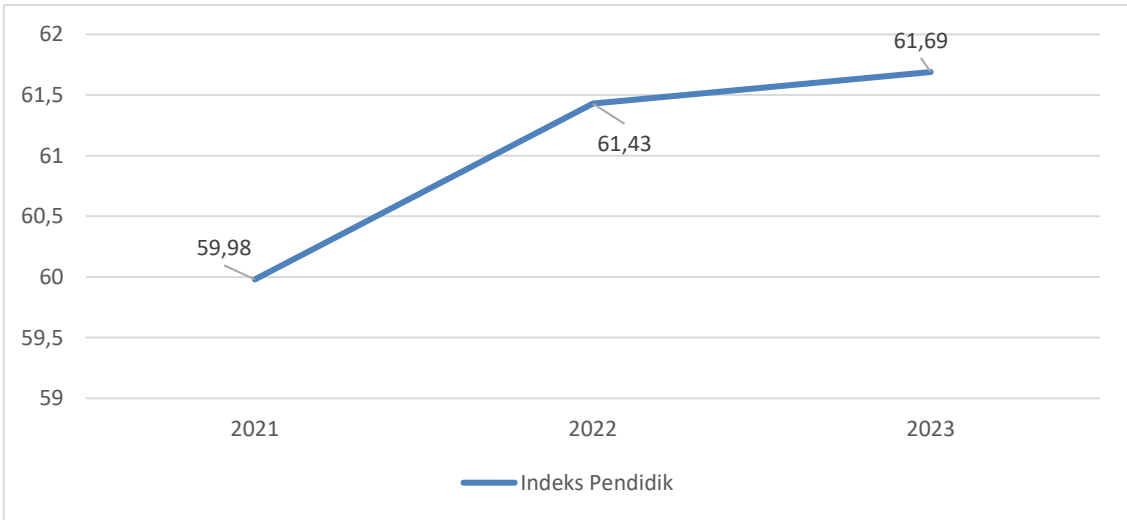
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

A. Kondisi SDM Daerah

1. Indeks Pendidikan

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan, Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung daerah tergantung komponennya. Indikator pembentuk Indeks Pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Nilai Indeks Pendidikan di Kabupaten Serang dalam kurun waktu tahun 2021-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 iindeks Pendidikan mencapai 59,98 poin dan pada tahun 2023 naik menjadi 61,69 poin. Meningkatnya nilai Indeks Pendidikan berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai IPM di Kabupaten Serang. Perkembangan nilai Indeks Pendidikan di Kabupaten Serang dapat dilihat pada grafik 2.3.6 berikut:

Grafik. 2.3.6
Indeks Pendidikan Kabupaten Serang Tahun 2021—2023

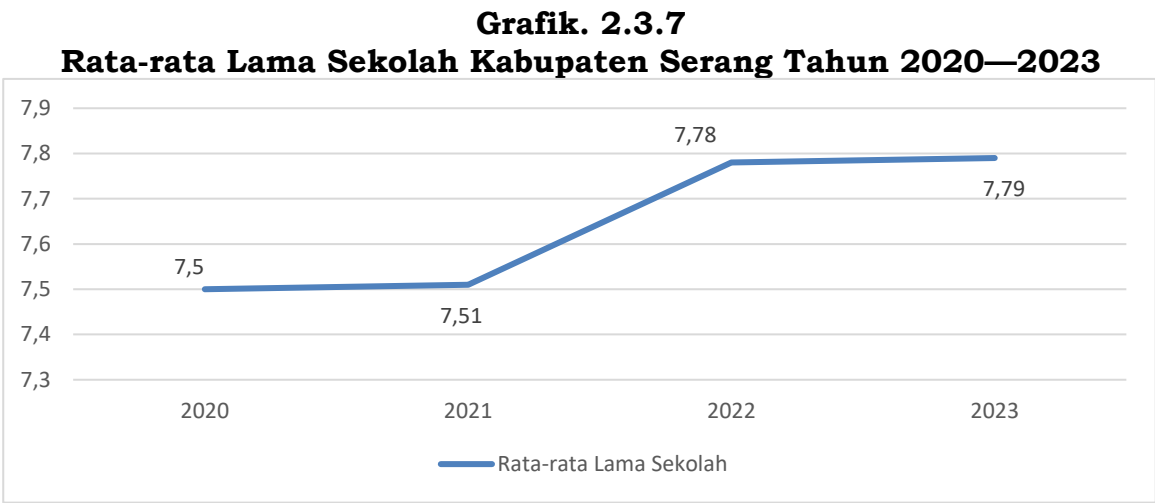


Sumber: Dindikbud Kabupaten Serang 2023

2. Rata-rata Lama Sekolah

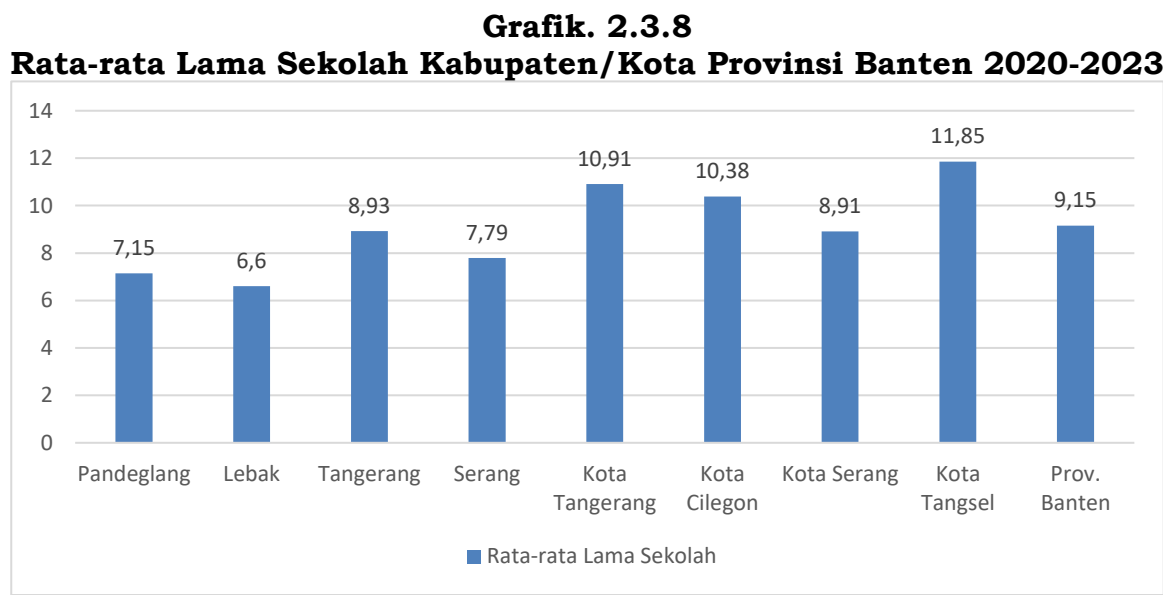
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penudukan yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun keatas. RLS Kabupaten Serang dalam kurun waktu tahun 2020-202 meningkat dari 7,5 tahun menjadi 7,79 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Serang menjalani jenjang pendidikan sampai tingkat

SD atau maksimal SMP (kelas VII). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik 2.3.7. berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Serang 2023

Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, rata-rata lama sekolah Kabupaten Serang (7,79) dibawah Provinsi Banten (9,15), Kabupaten Serang berada pada posisi ke 6 (enam) diatas Kabupaten Pandeglang (7,15) dan Lebak (6,6). Kedepan perlu ada upaya untuyk meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Serang, agar setara dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik 2.3.8 berikut:



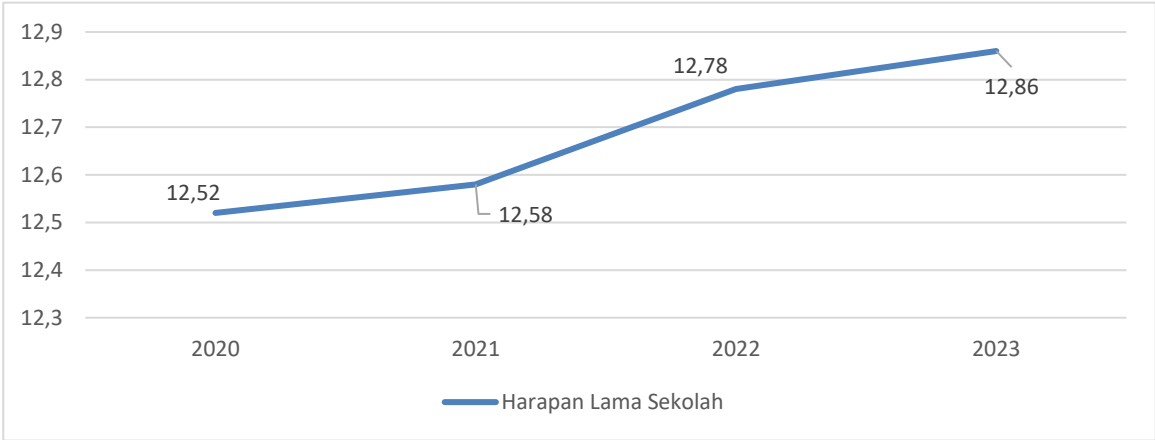
Sumber: BPS Kabupaten Serang 2023

3. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 (tujuh) tahun ke atas, HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat

dicapai oleh setiap anak. Perkembangan HLS di Kabupaten Serang dalam kurun waktu tahun 2020-2023 terus meningkat dari sebesar 12,52 (tahun 2020) menjadi 12,86 (tahun 2023). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik 2.3.9 berikut:

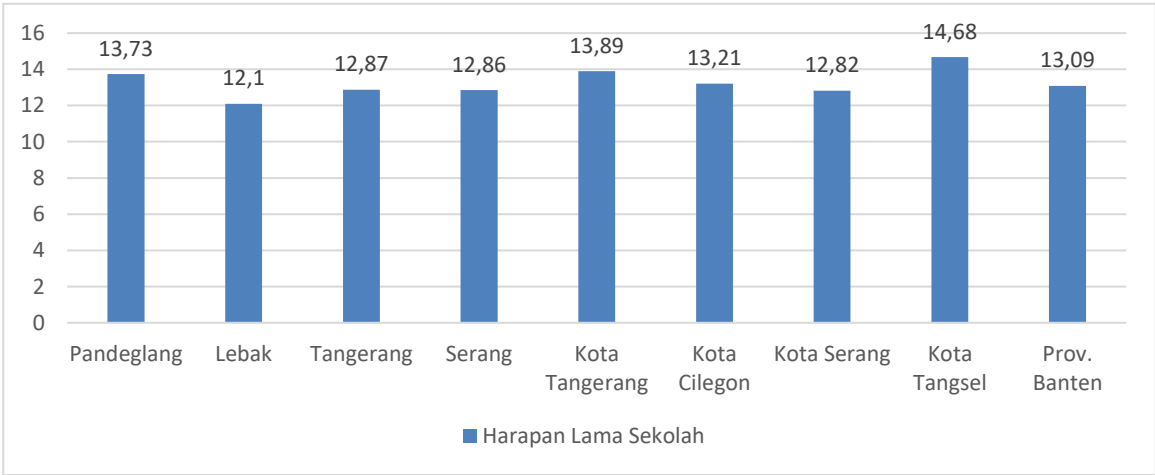
Grafik. 2.3.9
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Serang Tahun 2020--2023



Sumber: BPS Kabupaten Serang 2023

Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, HLS Kabupaten Serang (12,86) dibawah Provinsi Banten (13,09), Kabupaten Serang berada pada posisi ke 6 (enam) diatas Kota Serang (12,82) dan Lebak (12,1). Kedepan perlu ada upaya untuk meningkatkan HLS di Kabupaten Serang, agar setara dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik 2.3.10 berikut:

Grafik. 2.3.10
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020--2023



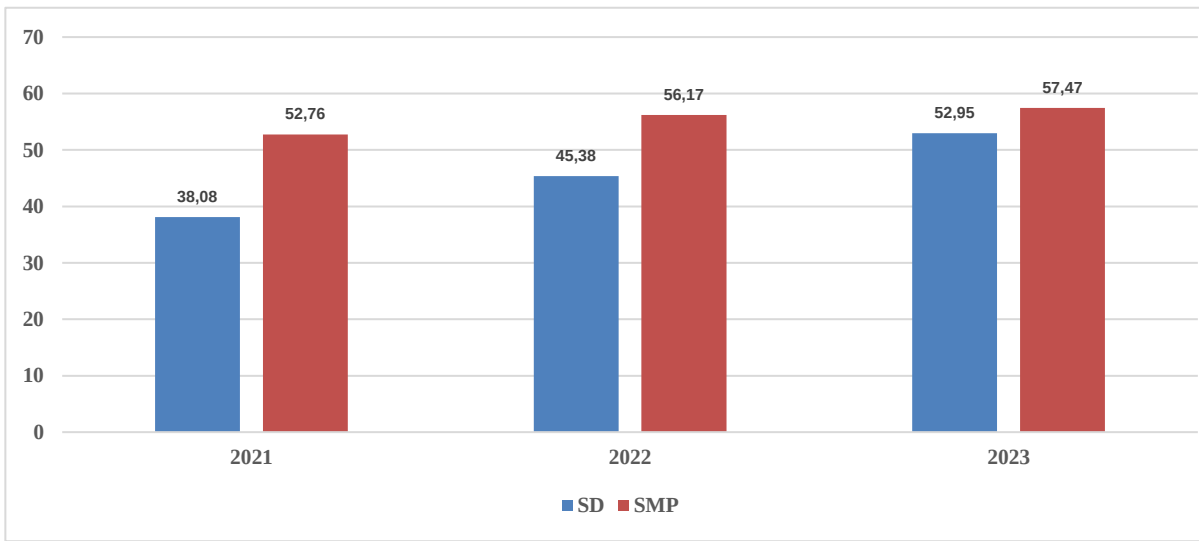
Sumber: BPS Kabupaten Serang 2023

4. Kemampuan Literasi dan Numerasi pada Sekolah Dasar dan Menengah Pertama

Kemampuan literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks

untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional capaian kemampuan literasi pada kurun waktu tahun 2021 sampai tahun 2023 pada jenjang pendidikan SD dan SMP kemampuan literasi di Kabupaten Serang mengalami peningkatan, pada jenjang pendidikan SD kemampuan literasi tahun 2021 mencapai 38,08 naik menjadi 52,95 pada tahun 2023. Begitupun pada jenjang pendidikan SMP kemampuan literasi tahun 2021 mencapai 52,76 naik menjadi 57,47 pada tahun 2023. Tren perkembangan kemampuan literasi pada setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada grafik 2.3.11 berikut :

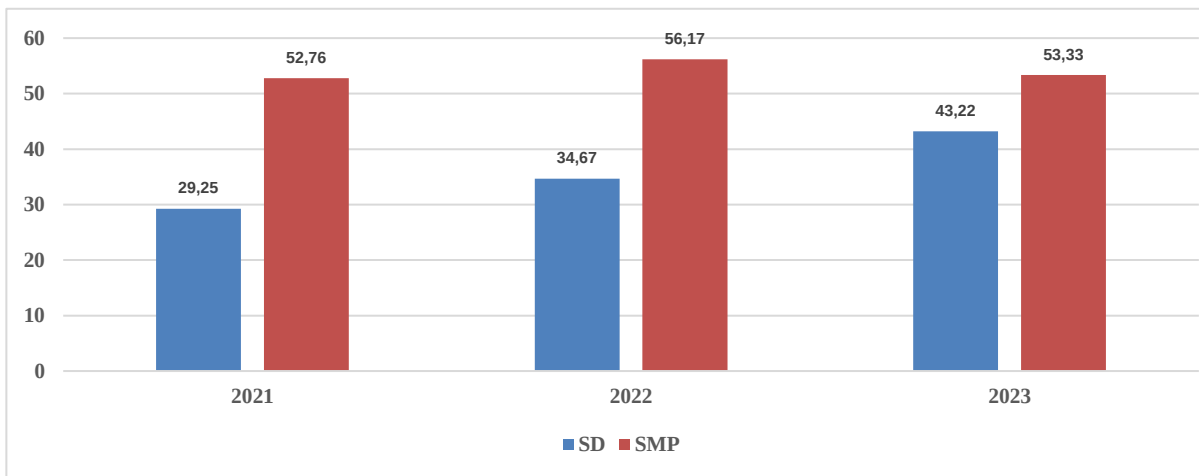
Grafik. 2.3.11
Literasi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
Kabupaten Serang Tahun 2021-2023



Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbudristek, 2024

Kemampuan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional capaian kemampuan numerasi pada kurun waktu tahun 2021 sampai tahun 2023 pada jenjang pendidikan SD mengalami peningkatan dari 29,25 menjadi 43,22. Namun pada jenjang SMP mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan dari 52,76 menjadi 56,17 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 53,33. Tren perkembangan kemampuan literasi pada setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada **grafik 2.3.12** berikut :

Grafik. 2.3.12
Numerasi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
Kabupaten Serang Tahun 2021-2023



Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbudristek, 2024

Berdasarkan hasil Asesmen Nasional pada tahun 2023 capaian kemampuan literasi di Kabupaten Serang untuk jenjang pendidikan SD dan SMP memiliki level kemampuan literasi sedang atau sekitar 53% murid SD dan 57% murid SMP yang telah mencapai kompetensi minimum untuk kemampuan literasi dan masih ada murid sekitar 47% murid SD dan 43% murid SMP yang menghadapi kesulitan dalam memahami, menganalisis dan menggunakan informasi secara efektif, yang bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri. Sedangkan untuk kemampuan numerasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional pada tahun 2023 capaian kemampuan numerasi di Kabupaten Serang untuk jenjang pendidikan SD memiliki level kemampuan numerasi kurang atau sekitar dari 43% murid telah mencapai kompetensi minimum dan untuk jenjang pendidikan SMP memiliki kemampuan numerasi sedang atau sekitar 30% murid telah mencapai kompetensi minimum.

5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

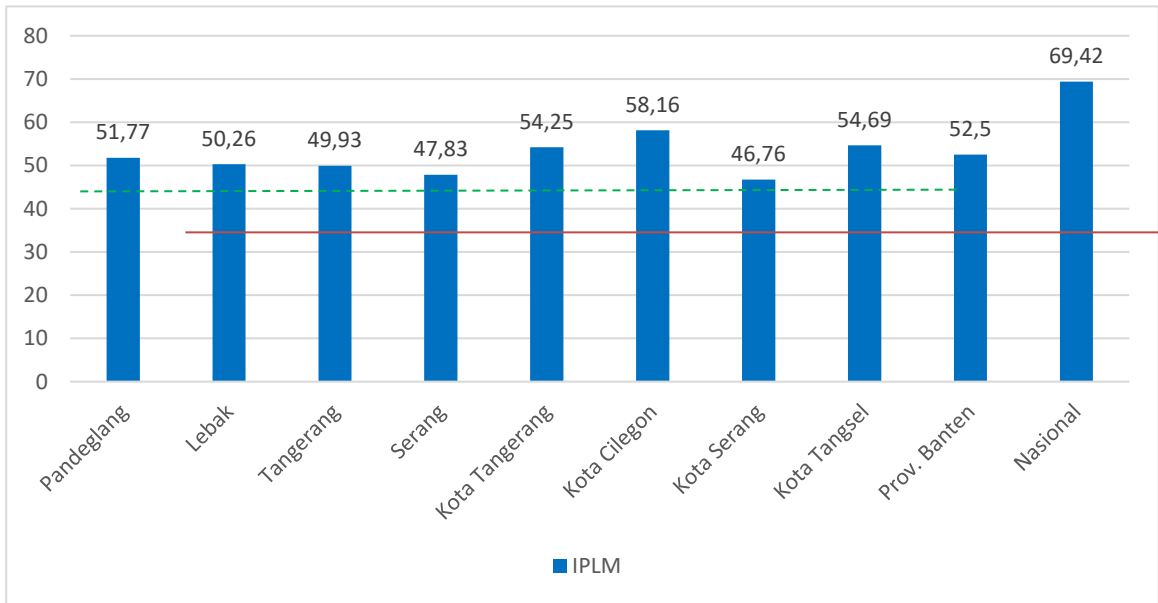
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah untuk mengetahui kondisi setiap Unsur Pembangun Literasi Masyarakat yang meliputi pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per-hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, jumlah anggota perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI, 2022).

Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten cukup bervariasi. Dari 8

(delapan) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Serang menempati peringkat 7 (tujuh) IPLM terendah di Provinsi Banten dengan IPLM sebesar 47,83 dengan katagori kurang dan IPLM Kabupaten Serang dibawah IPLM Nasional (69,42) katagori sedang dan IPLM Provinsi Banten (52,5) kategori sedang.

Upaya peningkatan nilai IPLM harus memperhatikan unsur pembangunan literasi masyarakat melalui peningkatan pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per-hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, jumlah anggota perpustakaan. Perbandingan perkembangan IPM kabupaten Serang dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Banten dapat dilihat pada grafik 2.3.13. berikut:

Grafik. 2.3.13
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Banten 2024

6. Indeks Literasi Digital

Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon.

Telepon/HP pada saat ini bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi namun lebih berkembang lagi menjadi alat untuk berbagi dan menerima informasi seiring adanya jaringan internet. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Banten, tercatat pengguna telepon genggam atau HP di wilayah Kabupaten Serang mengalami fluktuasi dimana persentase pengguna HP terbanyak ada di tahun 2017 dengan jumlah 60,97% penduduk Kabupaten menggunakan telepon genggam.

Tabel 2.3.14
Persentase Penduduk Yang Menggunakan Telepon Genggam/HP
Di Provinsi Banten Tahun 2015 - 2020

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Pandeglang	45,35	47,23	57,37	47,93	53,20	50,23
Kab. Lebak	43,57	43,08	60,18	46,51	49,01	47,01
Kab. Tangerang	59,68	60,59	71,46	64,69	63,98	63,50
Kab. Serang	49,79	50,64	60,97	58,21	59,61	56,71
Kota Tangerang	74,98	74,17	78,20	74,92	74,86	76,26
Kota Cilegon	67,60	68,74	78,66	72,34	71,54	74,63
Kota Serang	57,95	61,40	71,84	59,71	64,70	65,93
Kota Tangerang Selatan	77,60	76,01	82,81	79,76	79,35	76,79
Provinsi Banten	60,49	60,92	70,60	64,25	65,21	64,40

Sumber: BPS Provinsi Banten

Proporsi Pengguna Internet. Jumlah pengguna internet dapat menjadi indikasi banyaknya individu yang memiliki akses terhadap internet dalam berkomunikasi maupun berbagi informasi. Jumlah pengguna internet khususnya pada penduduk yang berumur lebih dari 5 tahun keatas di Kabupaten Serang mengalami tren naik dari tahun 2017-2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Kenaikan tersebut kemungkinan adanya penggunaan metode pengajaran *online* (dalam jaringan/daring) pada masa Pandemi Covid-19 pada periode tahun 2019-2020.

Tabel 2.3.15
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Yang mengakses
Internet
Dalam 3 bulan Terakhir Di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Kab. Pandeglang	17,64	22,71	30,62	34,65
Kab. Lebak	13,78	24,67	28,72	35,29
Kab. Tangerang	35,53	50,33	58,67	58,49
Kab. Serang	25,34	33,79	47,47	45,85
Kota Tangerang	51,49	63,32	71,49	76,03
Kota Cilegon	41,27	53,53	58,75	66,12
Kota Serang	36,15	41,26	51,98	57,91
Kota Tangerang Selatan	66,84	72,03	78,35	79,17
Provinsi Banten	37,46	47,90	56,25	58,63

Sumber: BPS Provinsi Banten

7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur

sepuluh tahun ke atas. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Tabel. 2.3. 16
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2023

Kabupaten/Kota	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	60,68	62,39	60,88	60,28	62,32	61,66	60,33
Kab Lebak	65,26	67,40	64,37	69,97	66,75	66,17	67,90
Kab Tangerang	63,79	63,01	66,07	65,43	63,94	67,05	66,87
Kab Serang	59,95	61,77	63,30	63,46	63,86	64,25	63,22
Kota Tangerang	64,99	63,01	64,95	64,97	64,52	66,08	63,39
Kota Cilegon	60,44	63,02	62,03	61,83	61,37	67,39	62,70
Kota Serang	62,99	62,37	62,74	63,79	62,16	64,80	68,44
Kota Tangerang Selatan	57,02	61,12	60,57	62,49	62,56	58,67	60,50
Provinsi Banten	62,32	62,95	63,83	64,48	63,79	64,72	64,44

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2017-2023

Berdasarkan tabel diatas, TPAK Kabupaten Serang terus mengalami peningkatan pada tahun 2017-2023. Pada Tahun 2023, TPAK Kabupaten Serang mencapai 64,25 masih lebih rendah dibandingkan dengan TPAK Provinsi Banten sebesar 64,72. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain, pada tahun 2022 Kabupaten Serang berada pada peringkat ke-3 terbawah sebelum Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan.

8. Angka Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Pendudukan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu penduduk usia produktif dan tidak produktif. Perbandingan kedua kelompok penduduk ini merupakan indikator rasio ketergantungan yang menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk menanggung penduduk yang belum produktif maupun tidak produktif lagi. Penduduk usia produktif yang dimaksud adalah penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan penduduk tidak produktif yaitu terdiri atas penduduk muda (0-14) tahun dan penduduk tua (65 tahun keatas). Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar besar hambatan atas upaya perkembangan daerah.

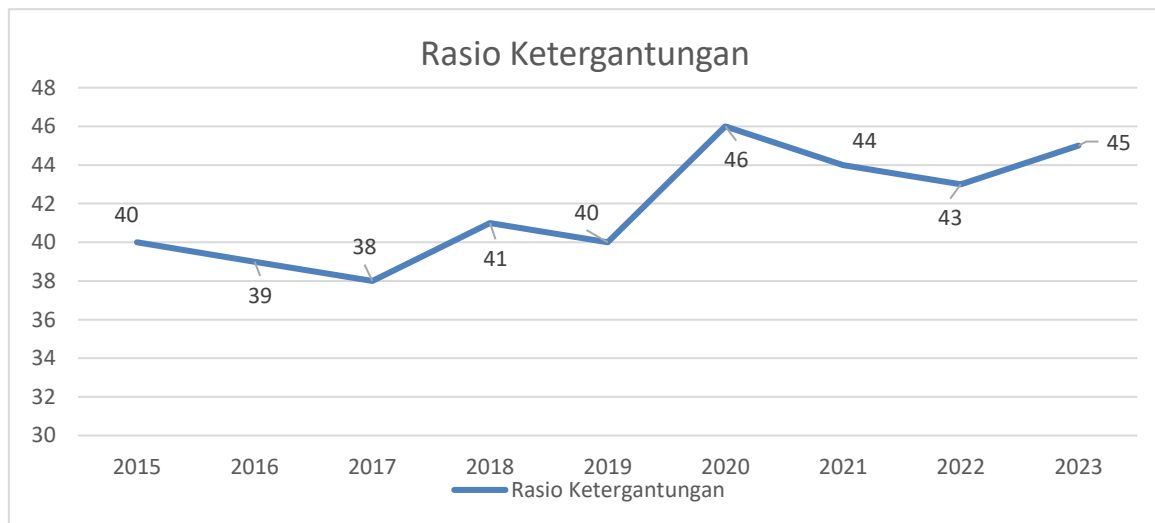
Tabel. 2.3. 17
Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2023 Kabupaten Serang

No.	Uraian	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	351.405	345.500	366.808	354.112	438.133	445.910	432.606	447.604
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	53.473	55.252	59.907	67.442	68.051	67.683	82.516	82.426
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	404.878	400.752	426.715	421.554	506.184	513.593	515.122	530.030
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	1.025.832	1.050.315	1.037.576	1.061.433	1.097.073	1.154.500	1.196.531	1.188.472
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,39	0,38	0,41	0,40	0,46	0,44	0,43	0,45

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Disdukcapil Kab. Serang, 2023

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Grafik. 2.3. 14
Perkembangan Rasio Ketergantungan Kabupaten Serang Tahun 2015-2023



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Serang, 2023

Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Serang pada tahun 2015-2023 nilainya fluktuatif, persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022 akan tetapi pada tahun 2022 ke 2023 pada semesster I mengalami kenaikan dari 43% menjadi 45%. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas / Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur menjadi salah satu indikator penting yang dibutuhkan untuk melihat pencapaian dan peningkatan daya saing suatu daerah. Daerah yang memiliki infrastruktur yang baik tentu akan memiliki tingkat kemudahan akses dan konektivitas yang baik pula. Hal tersebut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika kemajuan ekonomi bergantung pada salah satunya adalah infrastruktur yang baik sebagai faktor penunjangnya.

A. Kondisi Fasilitas / Infrastruktur Daerah

1. Indeks Infrastruktur (Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan)

Ketersediaan jalan sebagai salah satu upaya peningkatan infrastruktur di suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah tersebut. Hal ini dikarenakan jalan dapat mempermudah akses dan konektivitas antarwilayah maupun antardaerah. Tentu saja hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih maju. Selain mendorong kemajuan ekonomi, jalan sebagai salah satu indikator infrastruktur dapat pula mendorong kemajuan sosial suatu daerah.

Tabel 2.3.18 dan Tabel 2.3.19 menunjukkan jumlah kendaraan dan data panjang jalan di Kabupaten Serang. untuk menghitung rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio tersebut dapat digunakan untuk melihat seberapa besar beban suatu jalan yang dilalui oleh kendaraan. Artinya, semakin tinggi nilai rasio, maka akan semakin besar pula beban suatu jalan tersebut.

Tabel. 2.3. 18
Perkembangan Panjang dan Kondisi Jalan Tahun 2015-2022 di
Kabupaten Serang

No.	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Beton	45	85	153,98	253,98	383,98	513,98	584,12	793,34
2	Aspal	67,12	62,66	64,24	55,67	117,78	61,7	11,35	81,96
3	Kerikil	489,01	453,47	382,91	291,48	99,37	34,65	5,66	144,04
4	Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		601,13	601,13	601,13	601,13	601,13	601,13	610,33	1019,34

Sumber: Data Kondisi DD1 Pertahun Bidang Bina Marga DPUPR dan SK Bupati Kabupaten Serang

Tabel 2.3.18 menunjukkan jenis-jenis permukaan jalan yang ada di Kabupaten Serang, terdiri dari: aspal, kerikil, tanah, dan beton. Jenis dan panjang jalan yang dimiliki suatu daerah penting untuk menghitung rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio tersebut dapat digunakan untuk melihat seberapa besar beban suatu jalan yang dilalui oleh kendaraan. Artinya, semakin tinggi nilai rasio, maka akan semakin besar pula beban suatu jalan tersebut. Berbekal logika itulah maka dapat dihitung panjang jalan yang ada di Kabupaten Serang yang mencapai 601,13 km pada tahun 2015. Panjang jalan tersebut tidak mengalami perubahan signifikan sampai pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan panjang jalan menjadi 610,33 km.

Sementara itu, pada tahun 2015-2020 meskipun jumlah panjang jalan tidak berubah namun panjang jalan menurut jenis permukaan mengalami

perubahan. Pada tahun 2015 ke tahun 2020 terjadi perubahan jenis permukaan jalan antara aspal yang turun dan beralih pada jenis perkerasan beton (lihat Tabel 2.5.20). Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis bahwa sebagian besar jalan diubah ke jenis permukaan beton dengan meningkatnya jumlah panjang jalan dengan permukaan beton pada tahun 2020 menjadi 513,98 km dari sebelumnya sebanyak 45 km pada tahun 2015.

Tabel. 2.3. 19
Jumlah Kendaraan Kabupaten Serang Tahun 2016-2023

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan (unit)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mobil Penumpang	97.335	91.509	94.412	94.831	95.261	96.441	96.524	96.856
2	Bus	17.587	17.149	15.830	16.242	18.224	16.231	15.625	15.710
3	Truck	55.449	52.865	46.895	47.721	53.884	50.774	54.821	55.265
4	Sepeda Motor	2.231.243	2.383.419	2.149.541	2.399.624	2.416.614	2.624.758	2.646.924	2.712.875
Jumlah		2.401.614	2.544.942	2.306.678	2.558.418	2.583.983	2.788.204	2.813.894	2.880.706

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, 2023

Selanjutnya, terdapat perubahan jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Serang. Terlihat jika jumlah kendaraan di Kabupaten Serang pada tahun 2016-2023 mengalami kenaikan, dari sejumlah 2.401.614 unit pada tahun 2016 menjadi 2.880.706 unit pada 2023. Dengan demikian, maka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Serang pada kurun waktu 2016-2023 berkisar antara 0,00025 hingga 0,00035. Artinya, setiap kendaraan di Kabupaten Serang akan memakan ruang jalan sebesar 0,00025 - 0,00035 kilometer. Atau dengan kata lain pada tahun 2023, setiap 1 km panjang jalan melayani sebanyak 2.869 kendaraan bermotor yang terdiri dari 97 mobil penumpang, 16 unit bus, 56 truk, dan 2701 motor. Kabupaten Serang melalui dokumen LKPJ Bupati tahun 2016-2022 juga melaporkan hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah fokus infrastruktur yang terkait dengan rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan. Sasaran yang dicapai oleh Kabupaten Serang antara lain adalah peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan dan peningkatan kualitas pelayanan perhubungan. Informasi mengenai pencapaian pemerintah daerah terkait urusan tersebut disajikan dalam **Tabel 2.3.20**.

Tabel. 2.3. 20
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Serang
Tahun 2015 – 2022

No.	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Baik	85,12	96,66	125,83	157,26	472,6	513,31	576,55	773.86
2	Sedang	27	51	92,39	152,39	29,16	28,25	9,00	48.92
3	Rusak	146,7	136,04	114,87	87,44	53,84	48,12	8,72	75.92
4	Rusak Berat	342,31	317,43	268,04	204,04	45,53	20,65	6,86	120.64
Jumlah		601,13	601,13	601,13	601,13	601,13	601,13	610,33	1.019,34

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Serang,2023

Di dalam tabel tersebut, jumlah panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Serang sampai dengan Tahun 2021 sepanjang 610,33 km, kemudian terdapat peningkatan status jalan desa sepanjang 418,01 km yang menjadi jalan Kabupaten Serang sehingga pada Tahun 2022 total jalan Kabupaten sepanjang 1.019,34 km. Ditunjukkan jika persentase tingkat kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang mengalami peningkatan pada kurun waktu 2015-2022. Persentase tersebut berturut-turut mencapai 18,65% (2015), 24,56% (2016), 36,30% (2017), 51,51% (2018), 83,47% (2019), 88,73% (2020), 97,40% (2021), dan 90,72% (2022). Sedangkan kondisi jalan rusak berat pada tahun 2021 sepanjang 6,86 km menjadi sepanjang 120,64 km.

Untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pelayanan perhubungan, terdapat beberapa indikator yang telah ditetapkan pemerintah daerah untuk dicapai. Pada tahun 2012-2017, terdapat tiga unit terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Jumlah angkutan penumpang tersebut bertambah satu unit pada tahun 2018 sehingga total terdapat empat unit. Adapun indikator ketersediaan pelabuhan penyeberangan pada kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dengan jumla empat (4) unit pelabuhan dari tahun 2015-2023.

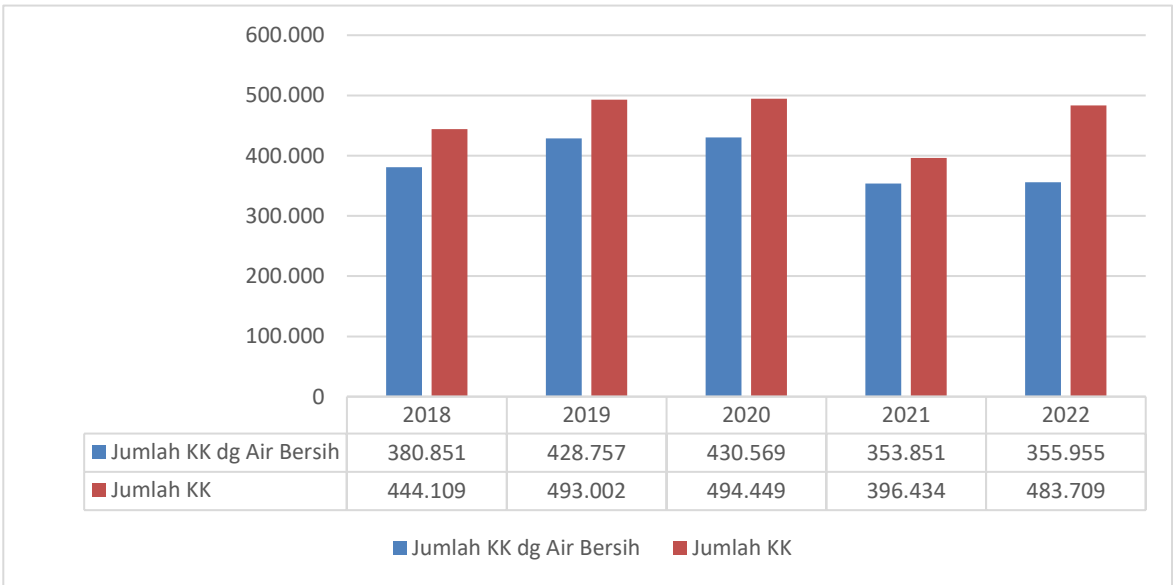
2. Presentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih

Akses terhadap air bersih merupakan hal penting yang menjadi kebutuhan dasar dalam pembangunan berkelanjutan khususnya bagi kesehatan masyarakat. Hal tersebut juga merupakan komitmen bersama baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan tingkat nasional maupun global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang memiliki 17 tujuan dan

169 target yang diharapkan tercapai pada tahun 2023 dimana salah satunya terkait akses terhadap air bersih. Pemerintah Kabupaten Serang bersama pemangku kepentingan lainnya terus memprioritaskan masalah air bersih menjadi agenda utama dengan cara menyiapkan perencanaan, investasi dan kerangka pendanaan dalam pembangunan infrastruktur bidang air bersih.

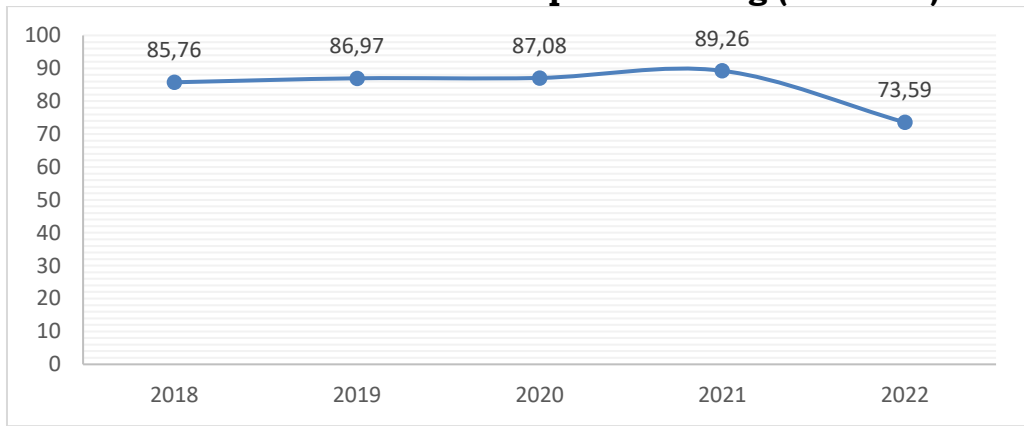
Berdasarkan data **Grafik 2.3.15**, jumlah kk yang memiliki akses terhadap air bersih menunjukkan data trens positif pada tahun 2018-2021 namun menurun pada tahun tahun 2022. Pada tahun 2018, jumlah kk yang memiliki akses terhadap air bersih mencapai 85,76% atau setara 380.851 kk dan terus meningkat hingga tahun 2021 mencapai 89,26% atau setara dengan 353.851 kk. Pada tahun 2022, jumlah kk yang memiliki akses terhadap air bersih mengalami penurunan mencapai 73,59% atau hanya 355.955 kk pada tahun tersebut.

Grafik. 2.3. 15
Perkembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Masyarakat
Tahun 2018 – 2022 di Kabupaten Serang



Sumber: DPUPR Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

Grafik. 2.3. 16
Capaian Perkembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Masyarakat
Tahun 2018 – 2022 di Kabupaten Serang (dalam %)



Sumber: DPUPR Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

Salah satu cara pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat adalah melalui penyediaan air bersih melalui sistem perpipaan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang. Dari data yang disajikan pada **Tabel 2.3.21**, terlihat bahwa jumlah pelanggan PDAM mengalami dinamika jumlah pelanggan. Sementara itu, untuk jumlah air yang disalurkan mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2014 disalurkan sebanyak 5.416.546 m³ air bersih dan pada tahun 2020 jumlah air bersih yang disalurkan hanya berkisar 426.053 m³ artinya terjadi penurunan jumlah air yang disalurkan hampir mencapai 5 juta m³. Jika dilihat dari jumlah air yang disalurkan oleh PDAM pertahun perpelanggan maka terlihat bahwa pada masa tahun 2020 merupakan waktu dimana jumlah air yang disalurkan paling sedikit disbanding tahun-tahun sebelumnya.

Tabel. 2.3. 21
Jumlah Pelanggan dan Jumlah Air Yang Disalurkan Oleh PDAM Tirta
Albantani
Kabupaten Serang Tahun 2014 – 2022

No.	Tahun	Jumlah Pelanggan (Sambungan)	Jumlah Air Disalurkan (m3)
1	2014	25.429	5.416.546
2	2015	26.007	5.332.957
3	2016	25.678	482.217
4	2017	26.859	482.665
5	2018	n.a.	n.a.
6	2019	26.323	434.602
7	2020	25.929	426.053

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023 dan
BPS Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

3. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja layanan infrastruktur adalah Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI). Berdasarkan hasil evaluasi capaian RPJMD diketahui bahwa perolehan IKLI Kabupaten Serang adalah sebesar 86,04 atau termasuk kategori Baik. Nilai indeks sebesar 86,04 ini berada diatas target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 52,50, yang berarti capainnya sebesar 163,89% dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2023, Kabupaten Serang memperoleh nilai IKLI sebesar 78,54 dengan predikat layanan berkategori baik (B). Hasil tersebut menurun jika dibandingkan dengan dengan tahun 2022 meskipun secara nilai kepuasan masyarakat menunjukan kepuasan yang positif dari segi kinerja layanan infrastruktur. Capain tersebut juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan target yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dimana yang ditargetkan sebesar 55% pada tahun 2023 atau meningkat 142,8%.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan merupakan kebutuhan dasar atau pokok bagi masyarakat, untuk itu kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini harus terus didorong dan ditingkatkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada periode RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016 – 2021 dapat kita lihat pada Tabel 2.3.22 Dari tabel tersebut terlihat bahwa indikator kinerja terkait cakupan penanganan Rumah Tidak Layak Huni hanya terealisasi sebesar 98,51% dari target yang ditetapkan sampai dengan akhir periode RPJMD.

Tabel. 2.3. 22
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Satuan	Data Awal Perencanaan (2015)	Target Akhir Tahun Perencanaan (2020)	Realisasi Akhir Periode Perencanaan (2020)	Capaian Kinerja PJM 2016-2021
1	Cakupan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	% 24,10	100,00	98,51	98,51

Sumber : Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006 – 2026, 2023

Pada RPJMD berikutnya (tahun 2021 – 2026) indikator terkait bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan sebanyak 2 (dua)

indikator yaitu persentase kawasan kumuh yang capaiannya adalah sebesar 77,78% dan persentase Rumah Layak Huni dengan capaian kinerja sebesar 110%. Untuk lebih jelasnya target dan capaian dari indikator pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.3.23

Tabel 2.3. 23
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	Satuan	Data Awal Perencanaan (2020)	Target Akhir Tahun Perencanaan (2022)	Realisasi Akhir Periode Perencanaan (2020)	Capaian Kinerja PJM 2016-2021
1	Persentase Kawasan Kumuh	%	0,20	0,18	0,14	77,78
2	Persentase Rumah Layak huni	%	89,26	89,88	98,94	110,00

Sumber : Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006 – 2026, 2023

Faktor utama pemenuhan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di kabupaten Serang dapat dilihat faktor rumah tidak layak huni tertangani dimana keberhasilan pembangunan urusan perumahan tidak layak huni perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai usaha partisipasi dalam rangka menggerakkan budaya swakelola masyarakat dalam bentuk sharing kerja atau sharing dana guna mempercepat pencapaian keseluruhan kebutuhan sarana prasarana lingkungan perumahan melalui pola pemberdayaan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.3. 24
Kondisi Rumah Layak Huni Kab. Serang Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	289.707	288.851	293.335	322.102	330.072
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	9.195	8.884	6.956	4.449	3.547
No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Luas Wilayah Permukiman (km ²)	36,084	36,084	36,084	36,084	36,084

Sumber: DPRKP Kab. Serang, 2023

Berdasarkan tabel diatas, jumlah rumah layak huni di pada tahun 2019 sebanyak 289.707 unit dan jumlah rumah layak huni di kab serang pada tahun 2022 sebanyak 330.072 unit. Hal ini menunjukkan bahwa trend jumlah rumah layak huni di Kabupaten Serang mengalami kenaikan dari tahun 2018-2022 sebesar 13,93%. Di sisi lain, jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2019 sebanyak 9.195 unit dan pada tahun 2022 sebanyak 3.547 unit. Hal ini juha menunjukkan bahwa trend jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Serang tahun mengalami penurunan dari tahun 2018-2022 sebesar 61,42%.

Kawasan kumuh di Kabupaten Serang menggambarkan kesenjangan yang mencolok antara pertumbuhan penduduk dengan pengembangan infrastruktur yang belum merata. Kawasan kumuh ini ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, bangunan yang tidak teratur, akses jalan yang sempit, serta minimnya fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan drainase. Kondisi lingkungan yang buruk, dengan banyaknya tumpukan sampah dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi penduduk setempat. Di beberapa area, masyarakat menghadapi masalah banjir yang berkepanjangan, terutama selama musim hujan, akibat buruknya drainase dan penumpukan sedimen di sungai-sungai sekitar. Ketiadaan 159awasa drainase yang memadai membuat air hujan dan limbah rumah tangga menggenang, menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan berpotensi menjadi sarang penyakit. Di sisi lain, kawasan ini juga sering terisolasi dari akses transportasi umum, membuat mobilitas penduduk menjadi terbatas. Berdasarkan hasil Penetapan Luasan Pemutakhiran Data dan Pembagian Kewenangan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kabupaten Serang, luasan Kawasan kumuh di Kabupaten Serang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.3. 25
Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Serang Tahun 2024

No	Uraian	Luasan (Ha)	Total Luasan (Ha)
I	Pemutakhiran Pendataan Permukiman Kumuh		
1.	Luasan SK 2019-2022 Kab/Kota	-	2.490,45
2.	Luasan Update 2023 & 2024 Kab/Kota	-	1.319,20
3.	Luasan Verifikasi Awal	-	1.113,92
4.	Luasan Akhir Kesepakatan	-	1.113,92
II	Klasifikasi Kategori Kekumuhan		
1.	Kumuh Kategori Ringan (skor 16-37)	1.049,44	1.113,92

2.	Kumuh Kategori Sedang (skor 39-59)	64,48	
3.	Kumuh Kategori Berat (skor 60-80)	-	
III	Pembagian Kewenangan		
1.	Luasan Kewenangan Kabupaten/Kota (< 10 Ha)	626,01	1.113,92
	a. Kumuh Kategori Ringan (skor 16-37)	592,71	
	b. Kumuh Kategori Sedang (skor 38-59)	33,30	
	c. Kumuh Kategori Berat (skor 60-80)	-	
2.	Luasan Kewenangan Kabupaten/Kota (10 s.d <15 Ha)	252,75	
	a. Kumuh Kategori Ringan (skor 16-37)	237,12	
	b. Kumuh Kategori Sedang (skor 38-59)	15,63	
	c. Kumuh Kategori Berat (skor 60-80)	-	
3.		235,16	
	Kumuh Kategori Ringan (skor 16-37)	219,61	
	Kumuh Kategori Sedang (skor 38-59)	15,55	
	Kumuh Kategori Berat (skor 60-80)	-	

Sumber: Data Profil Kawasan Kumuh Kabupaten Serang, 2024

Selain masalah infrastruktur, kawasan kumuh di Kabupaten Serang juga diwarnai oleh tantangan sosial-ekonomi yang kompleks. Penduduk di kawasan ini umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Ketidakpastian ekonomi ini membuat mereka sulit untuk memperbaiki kondisi hidup mereka, sehingga kemiskinan menjadi masalah yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Selain itu, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai menyebabkan tingginya angka penyakit menular dan gizi buruk di kawasan ini. Anak-anak di kawasan kumuh sering kali tidak dapat mengakses pendidikan yang layak karena berbagai keterbatasan, mulai dari jarak ke sekolah hingga kurangnya biaya untuk kebutuhan dasar pendidikan.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

A. Kondisi Iklim Investasi

1. Indeks Rasa Aman (Angka Kriminalitas)

Angka kriminalitas dapat bermanfaat dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Angka kriminalitas juga dapat menjadi acuan untuk melakukan perencanaan dalam upaya dan partisipasi pemerintah daerah, penegak hukum dan masyarakat untuk menjaga keamanan di lingkungan baik tingkat desa hingga tingkat daerah. Berikut **Tabel 2.3.26** dan

Tabel 2.3.27 yang menggambarkan angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Serang yang dimana wilayah hukum dimiliki oleh Polres Kabupaten Serang dan sebagian wilayah lainnya oleh Polres Kota Cilegon.

Tabel. 2.3.26
Angka Kriminalitas Tahun 2019-2023 di Kabupaten Serang Polres Serang

No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kasus narkoba	67	103	109	96	75
2.	Jumlah kasus pembunuhan	1	0	2	1	1
3.	Jumlah kejahatan seksual	27	46	32	45	10
4.	Jumlah kasus penganiayaan	45	80	93	97	64
5.	Jumlah kasus pencurian	365	247	253	265	387
6.	Jumlah kasus penipuan	120	121	165	123	106
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	1	1	3	0
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	787	766	785	779	1.137
9.	Jumlah penduduk	898.376	898.376	900.137	977.889	977.889
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,88	0,85	0,87	0,80	1,16

Sumber: POLRES Kabupaten Serang, 2023

Tabel. 2.3.27
Angka Kriminalitas Tahun 2019-2023 Kabupaten Serang Polres Cilegon

No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kasus narkoba	19	22	20	9	19
2.	Jumlah kasus pembunuhan	0	2	1	1	0
3.	Jumlah kejahatan seksual	0	1	1	4	0
4.	Jumlah kasus penganiayaan	7	14	10	16	3
5.	Jumlah kasus pencurian	29	37	32	47	24
6.	Jumlah kasus penipuan	3	3	19	10	2
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	0	0	0	0
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	84	114	118	137	64
9.	Jumlah penduduk	239.042	234.196	257.371	260.740	265.836
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,35	0,49	0,46	0,53	0,24

Sumber: POLRES Kota Cilegon, 2023

2. Situasi Politik, Kemanan dan Ketertiban Daerah

Demonstrasi atau yang biasa disebut unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh Undang-undang. Ketentuan demonstrasi diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Definisi menurut UU No. 9 Tahun 1998 bahwa Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Demonstrasi dapat dilakukan oleh pereorangan atau kelompok yang merupakan wujud dari hak dan tanggung jawab setiap warga negara sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah dan mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsionalitas serta asas manfaat. Berikut **Tabel 2.3.28** dan **Tabel 2.3.29** Demonstrasi di wilayah Kabupaten Serang.

Tabel. 2.3.28
Jumlah Demo Tahun 2019-2023 di Kabupaten Serang Polres Serang

No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bidang politik	0	0	0	0	0
2.	Ekonomi	1	1	1	1	1
3.	Kasus pemogokan kerja	0	0	0	0	0
4.	Jumlah unjuk rasa	204	217	50	85	35

Tabel. 2.3.29
Jumlah Demo Tahun 2019-2023 di Kabupaten Serang Polres Cilegon

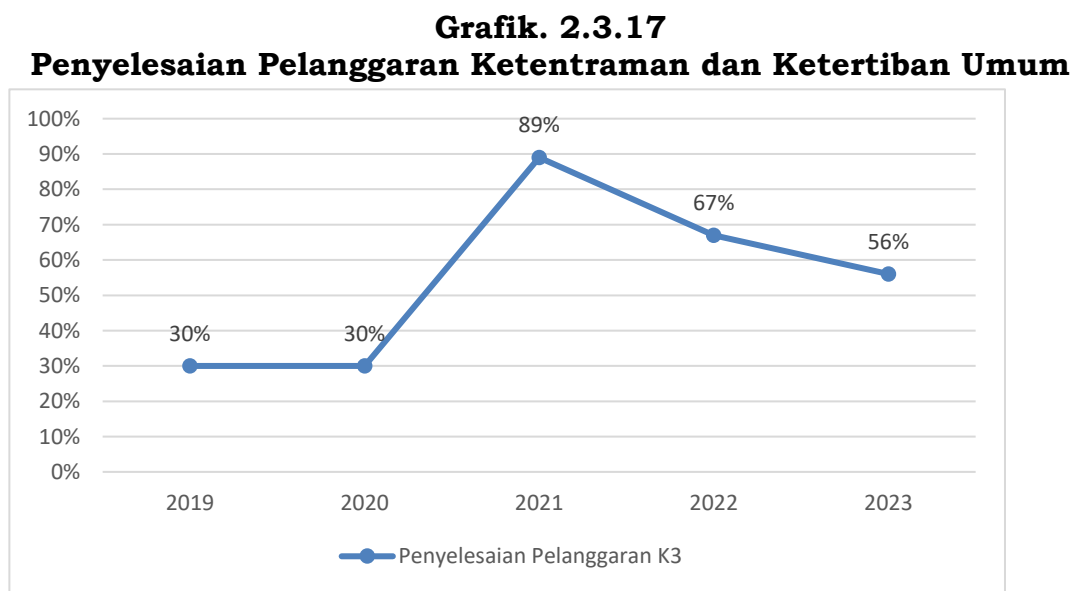
No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bidang politik	0	0	0	0	0
2.	Ekonomi	0	0	0	0	0
3.	Kasus pemogokan kerja	0	0	0	0	0
4.	Jumlah unjuk rasa	1	1	1	1	1

3. Presentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Trantibum dan Perda

Ketentraman dan Ketertiban umum masyarakat merupakan gambaran sebuah kondisi dimana masyarakatnya dapat melaksanakan kegiatan serta aktifitas sehari-hari dengan tenteram, teratur, serta tertib sebagai pendukung

pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Ada berbagai kasus pelanggaran terkait ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Serang seperti pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui Satpol PP melakukan penyelesaian pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari **Grafik 2.3.17** Berikut:

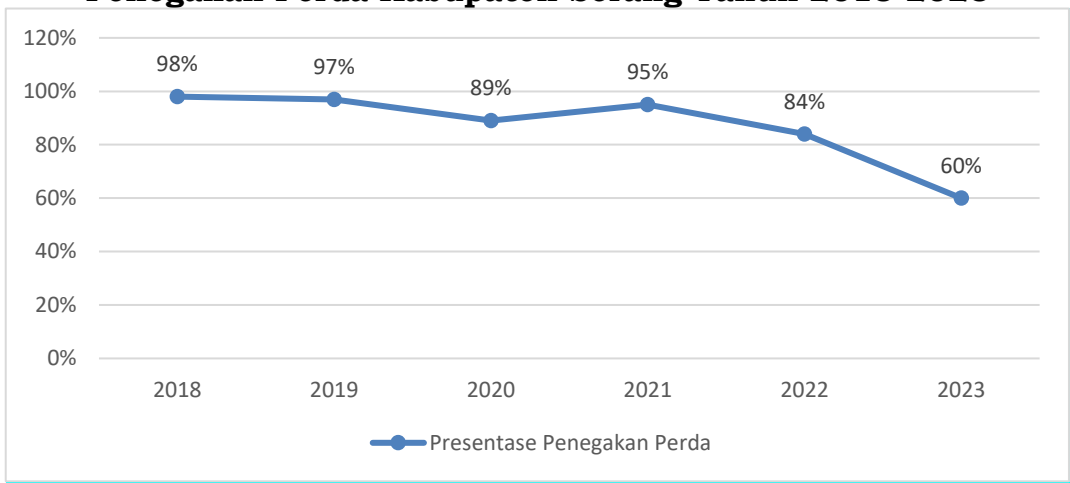


Sumber: Satpol PP Kabupaten Serang, 2023

Berdasarkan grafik di atas persentase penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum cenderung fluktuatif, dengan persentase tertinggi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 89% sedangkan persentase terendah terjadi pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar 30%. Sedangkan bila dibandingkan dengan jumlah kasus pelanggaran K3 maka penyelesaian terbesar terjadi pada Tahun 2021 dengan jumlah kasus terselesaikan sebanyak 8 (delapan) kasus.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, perlu adanya pemantauan mengenai tindak pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terjadi pada wilayah tersebut dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

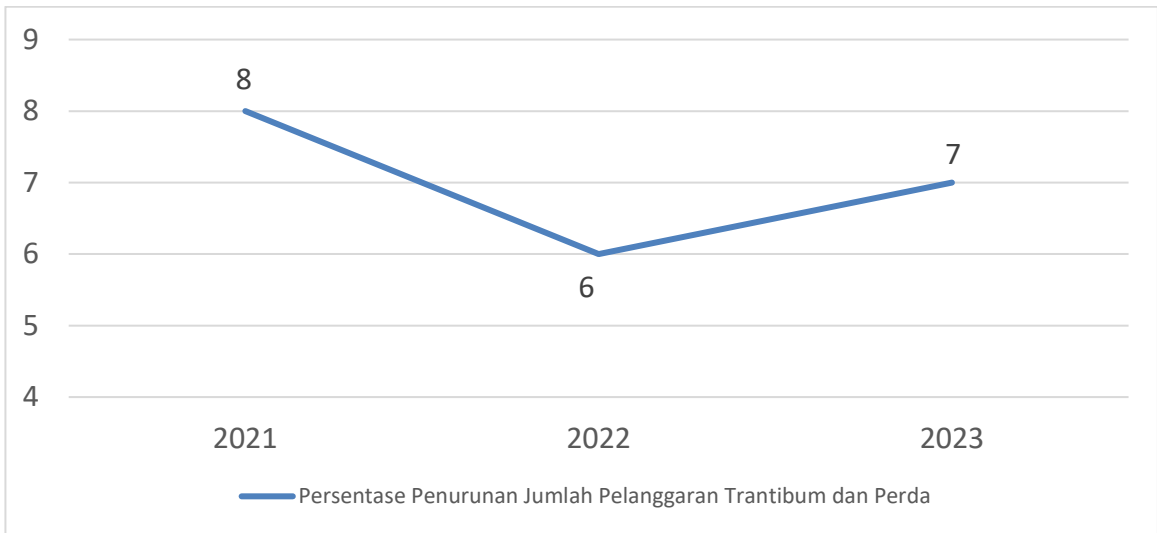
Grafik. 2.3.18
Penegakan Perda Kabupaten Serang Tahun 2018-2023



Sumber: Satpol PP Kabupaten Serang 2023

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Serang melalui Satpol PP menemukan kasus pelanggaran Perda sebanyak 45 (empat puluh lima) kasus dengan capaian penegakan kasus pelanggaran Perda sebesar 98%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2018 presentase penegakan Perda lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Sedangkan persentase terendah terhadap penegakan Perda terjadi pada tahun 2022 sebesar 84% dengan jumlah pelanggaran Perda sebanyak 19 (Sembilan belas) kasus. Masih tingginya angka pelanggaran Perda disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat/perorangan serta badan hukum terhadap penegakan peraturan yang berlaku dalam hal penegakan Peraturan Daerah melalui pemantauan, penindakan, dan pengawasan pada dukungan yang memadai.

Grafik 2.3.19
Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Trantibum dan Perda Kabupaten Serang Tahun 2021-2023



Sumber: Satpol PP Kabupaten Serang 2023

4. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati,

menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah wajib untuk ikut andil dan aktif dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 angka (1) peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Atas mandat tersebut, daerah mengukur kerukunan umat beragama melalui perhitungan indeks kerukunan umat beragama (IKUB).

Tabel. 2.3.30
Indeks Kerukunan Umat Beraga (IKUB) Kabupaten Serang Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
IKUB	89,71	86,45	90,6	81,75	80,68

Bappedalitbang Kab. Serang, Laporan Akhir Kajian IKUB 2019-2023

Berdasarkan **Tabel 2.3.30**, nilai IKUB Kabupaten Serang tahun 2019-2023 menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Pada tahun 2019, IKUB Kabupaten Serang mencapai 89,71. Pada tahun 2020, IKUB Kabupaten Serang mengalami penurunan dengan nilai IKUB 86,45. Pada tahun 2021, IKUB Kabupaten Serang mengalami peningkatan menjadi 90,6 dengan kategori A. Dan mulai tahun 2022, penghitungan IKUB hanya menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu Toleransi, Kerjasama dan Kesetaraan. IKUB Kabupaten Serang pada tahun 2022 sebesar 81,75 mengalami penurunan yang signifikan mencapai 81,75 dan tahun 2023 turun menjadi 80,68. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2023, katagori IKUB tahun 2022 dan 2023 masuk katagori A mengindikasikan bahwa interaksi sosial antarumat beragama di Kabupaten Serang telah berlangsung secara baik dan berada dalam batas-batas jarak sosial yang wajar. Mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan kerukunan antarumat beragama, sebagaimana tercermin juga dalam sikap antarumat beragama yang bersedia menerima secara terbuka keberadaan pemeluk agama yang berbeda dalam ranah pergaulan sosial maupun profesi, meskipun sebatas pada dimensi publik atau formal dari pergaulan sosial.

5. Realisasi Investasi Daerah

a. Penanaman Modal

Penanaman modal dapat dibedakan menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PDMN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Sedangkan PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, artinya bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Tabel. 2.3. 31
Jumlah nilai investasi berskala nasional (Juta Rupiah) Kabupaten Serang 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PMA	4.536.417	17.830.052	3.716.296	4.549.123	4.531.473	3.294.459	4.814.630	7.199.315
PMDN	1.431.094	1.954.175	3.327.833	2.307.431	3.375.259	2.441.250	1.900.985	3.091.479
Pertumbuhan Nilai Investasi daerah PMA PMDN (%)		231,53	-64,39	-2,66	15,32	-27,46	17,08	53,24

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Serang, 2023

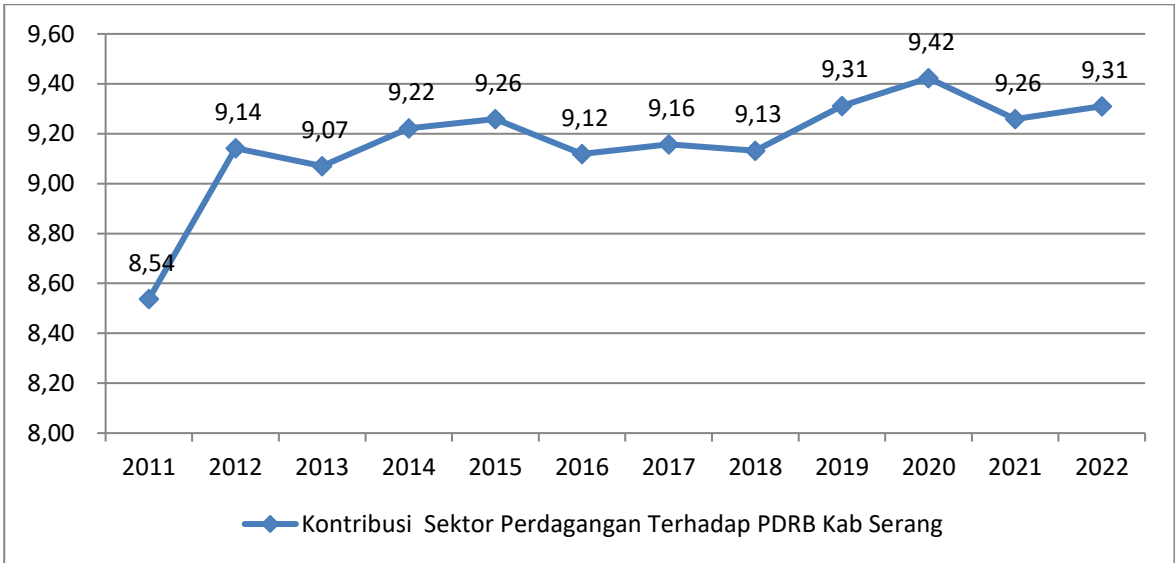
Nilai investasi PMA selama tujuh tahun terakhir di Kabupaten Serang berfluktuasi dengan rata-rata pertahunnya sebesar 6,18 triliun rupiah. Pada tahun 2017, nilai PMA tahunan mencapai angka tertinggi selama periode tersebut dengan nilai sebesar 17,83 triliun rupiah. Disamping itu dapat terlihat pada tabel bahwa nilai investasi PMDN selama tujuh tahun terakhir di Kabupaten Serang berfluktuasi dengan rata-rata pertahunnya sebesar 2,39 triliun rupiah. Pada tahun 2020, nilai PMDN tahunan mencapai angka tertinggi selama periode tersebut dengan nilai sebesar 3,37 triliun rupiah. Sementara itu, pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN berfluktuasi. Pada tahun 2017, 2020, 2022 dan 2023 investasi PMA mengalami laju pertumbuhan positif sedangkan pada tahun 2018, 2019, dan 2021 mengalami pertumbuhan negatif.

b. Perdagangan

Lapangan usaha perdagangan merupakan salah satu lapangan usaha yang menopang perekonomian. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB digunakan untuk melihat performa kinerja dan nilai tambah lapangan usaha perdagangan dalam ekonomi wilayah. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan ha katas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Pengertian

perdagangan tersebut merupakan pengertian yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Adapun sub urusan perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi, serta perlindungan konsumen. Lapangan usaha perdagangan merupakan salah satu lapangan usaha yang menopang perekonomian Kabupaten Serang. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB digunakan untuk melihat performa kinerja dan nilai tambah lapangan usaha perdagangan dalam ekonomi wilayah Kabupaten Serang.

Grafik. 2.3. 20
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Serang 2011-2022 (dalam %)



Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023 diolah

Pada **Grafik 2.3.20** menunjukkan kontribusi perdagangan dalam PDRB Kabupaten Serang tahun 2015-2022. Berdasarkan grafik diatas kontribusi perdagangaan terhadap PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 yang semula 9,07% lalu bergerak naik menjadi 9,26%. Kemudian di tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar 9,12% dan 9,13%, sejalan dengan penurunan LPE di Kabupaten Serang dampak adanya pandemi Covid-19. Walaupun demikian dapat pulih kembali di tahun 2020 dengan kontribusi mencapai 9,42%

Tabel. 2.3. 32
Ekspor dan Import Kabupaten Serang 2017-2023

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Ekspor	Juta USD	723,07	812,95	254,73	285,31	3.320,00	376,18	512,51

Nilai Import	Juta USD	105,39	105,39	319,65	218,34	1.111,23	183,08	95,56
Ekspor Bersih Perdagangan	Juta USD	617,68	707,55	-64,91	66,97	2208,76	193,10	416,94

Sumber : Diskoumperindag Kabupaten Serang, 2024

Kegiatan perdagangan selain terjadi dipasar yang bersifat lokal, terdapat pula kegiatan perdagangan internasional atau antar negara. Ekspor bersih perdagangan merupakan nilai total ekspor dikurangi nilai total impor dari wilayah tertentu. Nilai ekspor bersih positif mengindikasikan surplus perdagangan, jika sebaliknya nilai ekspor bersih negatif mengindikasikan defisit perdagangan. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai ekspor Kabupaten Serang selalu lebih tinggi dibandingkan nilai impor nya selama periode 2017-2022. Kecuali pada tahun 2019 nilai impor Kabupaten Serang lebih tinggi yaitu sebesar 319,65 Juta USD.

Tabel. 2.3. 33
Negara Tujuan Ekspor dan Import Kabupaten Serang

NO	NEGARA TUJUAN	NO	NEGARA TUJUAN	NO	NEGARA TUJUAN	NO	NEGARA TUJUAN	NO	NEGARA TUJUAN	NO	NEGARA TUJUAN
1	CHINA	11	JAPAN	21	SWITZERLAND	31	GREECE	41	SOUTH AFRICA	51	SOUTH AFRICA
2	BELGIUM	12	ITALY	22	TURKEY	32	SWEDEN	42	RUSSIAN FEDERATION	52	RUSSIAN FEDERATION
3	UNITED STATES OF AMERICA	13	DENMARK	23	POLAND	33	BULGARIA	43	AUSTRIA	53	AUSTRIA
4	INDIA	14	FRANCE	24	CAMBODIA	34	ROMANIA	44	EGYPT	54	EGYPT
5	NETHERLANDS	15	PHILIPPINES	25	PAKISTAN	35	IRELAND	45	NORWAY	55	NORWAY
6	GERMANY	16	SPAIN	26	HONDURAS	36	SRI LANKA	46	LATVIA	56	LATVIA
7	VIET NAM	17	BANGLADESH	27	UNITED KINGDOM	37	PERU	47	PORTUGAL	57	PORTUGAL
8	MALAYSIA	18	JORDAN	28	TAIWAN	38	SINGAPORE	48	CHILE	58	CHILE
9	REPUBLIC OF KOREA	19	BRAZIL	29	COSTA RICA	39	CZECH REPUBLIC	49	MYANMAR	59	MYANMAR
10	THAILAND	20	AUSTRALIA	30	UNITED ARAB EMIRATE	40	TANZANIA	50	MEXICO	60	MEXICO

Sumber : Diskoumperindag Kabupaten Serang, 2024

Pada **Tabel 2.3.33** menunjukan negara tujuan ekspor dari setiap industri yang ada di Kabupaten Serang, seperti produk alas kaki, sparepart otomotif, tekstil, furniture, makanan, dll. China merupakan negara tujuan ekspor dengan nilai ekspor terbesar disusul oleh Belgia dan Amerika.

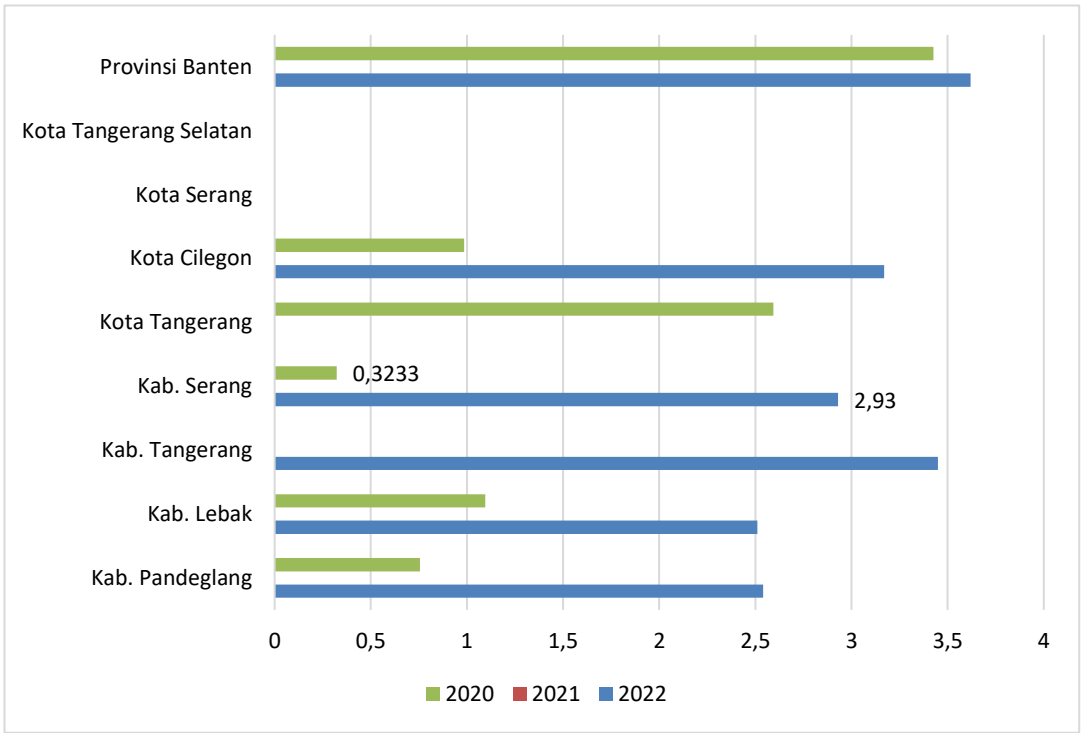
B Aspek Kemudahan Investasi

1. Indeks Daya Saing Daerah

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Pemerintah melalui Kemenristek yang selanjutnya diinisiasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan pengukuran daya saing daerah menggunakan indikator indeks daya saing daerah atau IDSD.

Adanya pengukuran IDSD diharapkan dapat mengukur dan mengetahui kondisi daya saing suatu daerah yang ditinjau dari komponen lingkungan pendukung, SDM, pasar, dan ekosistem inovasi. Hal ini tentunya selaras dengan tujuan untuk kapabilitas dan meluasnya pemanfaatan riset dan inovasi di daerah sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Grafik. 2.3. 21
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2022



Sumber: Kemenristek dan BRIN, 2020-2022

Berdasarkan grafik 2.3.21, pada tahun 2020 nilai IDSD Kabupaten Serang sebesar 0,3233 dengan predikat rendah. Di tahun 2021, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten tidak melakukan penilaian untuk

mengetahui daya saing daerahnya yang disebabkan ketidakikutsertaan dalam penilaian dan adanya gejolak dalam internal BRIN yang merupakan peleburan baru dari instansi atau bidang yang mengurus riset dan inovasi . Kemudian pada tahun 2022, Kabupaten Serang memiliki nilai atau skor IDSD sebesar 2,93 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020 namun masih lebih rendah dari nilai indeks Provinsi Banten.

Untuk meningkatkan iklim investasi, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang adalah dengan menyederhanakan perizinan serta mempersingkat waktu pengurusan untuk menarik para investor menanamkan investasinya di Kabupaten Serang. Dapat terlihat pada tabel dibawah ini lama waktu perizinan di Kabupaten Serang bervariasi tergantung dengan jenis perizinan nya. Terdapat beberapa jenis skala usaha dalam proses perizinan mulai dari skala kecil, menengah dan skala besar. Di Kabupaten Serang paling sedikit waktu perizinan lamanya adalah 3 hari, seperti penangkapan ikan dan pertanian. Adapun perizinan paling lama yaitu memakan waktu 20 hari yang terdiri dari kegiatan bidang kesehatan seperti aktivitas rumah sakit swasta dan perdagangan apotek hewan.

Tabel. 2.3. 34
Lama Proses Perizinan di Kabupaten Serang

No	Jenis Perizinan	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Waktu Perizinan
1	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat	Kecil, Menengah dan Besar	Tinggi	7 Hari
2	Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Apung	Kecil, Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	3 Hari
3	Pertanian Jagung, Kedelai, Kacang dan Buah	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	3 Hari
4	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	Menengah dan Besar	Tinggi	7 Hari
5	Budidaya Ayam Pedaging dan Petelur	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	7 Hari
6	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas dan Bukan Unggas	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	15 Hari
7	Perdagangan Apotik Hewan	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	20 Hari

8	Industri Tepung, Minyak, Pengolahan Susu, Gula, Makanan Ringan	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	7 Hari
9	Industri Air Minum	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	7 Hari
10	Industri Textil	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	7 Hari
11	Industri Bahan Bangunan	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	7 Hari
12	Industri Senjata dan Amunisi	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	7 Hari
13	Industri Mesin Kantor, Rumah Tangga dan Umum	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	7 Hari
14	Jasa Penelitian, Kalibrasi, Jasa Industri	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	7 Hari
15	Jasa Angkutan Darat	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	5 Hari
16	Jasa Angkutan Laut	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	3 Hari
17	Aktifitas Rumah Sakit Swasta	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	20 Hari

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Serang, 2023

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Tatakelola Pemerintahan

A. Indeks Reformasi Birokrasi

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Pembaharuan ini dilaksanakan melalui reformasi birokrasi dengan melibatkan aspek-aspek diantaranya kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dengan melakukan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dalam komitmen untuk memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menjadi dokumen perencanaan reformasi birokrasi untuk dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder. Tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk melihat sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, kita dapat mengukurnya dengan indeks reformasi birokrasi.

Tabel.2.4.1
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Serang

Penilaian	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	50,15	51,43	54,72	71,78
Kategori Nilai	CC	CC	CC	BB

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, 2023

Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Serang mengalami kenaikan dari Tahun 2020 dengan nilai 50,15 menjadi 71, 78 di Tahun 2023 dimana perubahan kategori penilaian dari CC (cukup/memadai) menjadi BB (sangat baik).

2.4.2 Pelayanan Umum Masyarakat

A. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik menjadi suatu tolak untuk melihat kinerja pemerintah. Saat ini, masyarakat dapat langsung melihat kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat dari semua kalangan. Pelayanan Publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Pemerintah

memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal.

Pada implementasi suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi terlihat dari kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat pada layanan pemerintah. Pemerintah melakukan evaluasi pelayanan publik dan menghasilkan indeks pelayanan publik tiap tahunnya untuk melihat keseriusan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indeks Pelayanan Publik digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi pelayanan. Kabupaten Serang dalam pelaksanaan pelayanan publik telah memperoleh nilai indeks pelayanan publik kategori Baik dengan perolehan nilai sebesar 4,09 pada Tahun 2022.

B. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh daerah diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik ke masyarakat dan menjadi salah satu parameter yang menjadikan daerah memiliki kualitas yang baik dalam daya saing daerah. Dalam mendukung hal tersebut, pemerintah pusat melakukan penilaian inovasi daerah sebagai bentuk stimulus kepada daerah agar terus meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui inovasi yang berkelanjutan. Penilai tersebut akan menghasilkan tolak ukur yakni indeks inovasi daerah.

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel. 2.4. 2
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Peringkat Inovasi Daerah	89	217	246	229
Nilai Indeks Inovasi	1,839	35,77	41,14	42,74
Level	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: SK Menteri Dalam Negeri Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel 2.4.2, pada tahun 2020 nilai indeks inovasi daerah Kabupaten Serang sebesar 1,839 dengan predikat sangat inovatif dan berada pada peringkat ke-89 dari seluruh kabupaten secara nasional. Adanya perubahan metode penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri menyebabkan di tahun 2021 Kabupaten Serang berpredikat inovatif dengan perolehan nilai indeks inovasi sebesar 35,77 dan berada pada urutan ke-217 dari seluruh kabupaten secara nasional. Pada tahun 2022, indeks inovasi Kabupaten Serang sebesar 41,14 dengan predikat inovatif dan berada pada urutan ke ke-246 dari seluruh kabupaten secara nasional. Pada tahun 2023, indeks inovasi daerah Kabupaten Serang meningkat 1,60 poin menjadi 42,74 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan Kabupaten serang masih berpredikat inovatif jika dibandingkan tahun 2020 yang berpredikat sangat inovatif.

C. Indeks SPBE

Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan pelayanan publik dan kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Untuk mengukur kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital digunakan Indeks SPBE. Indeks SPBE ini dihitung dan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) sebagai bentuk penilaian terhadap kinerja lembaga/instansi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis digital/elektronik.

Capaian indikator Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) Kabupaten Serang Tahun 2023 adalah sebesar 3,23 poin dengan kategori baik. Perolehan nilai Indeks SPBE tahun 2023 ini naik sekitar 0,59 poin (22,35%) dari capaian tahun 2022 sebesar 2,64. Secara umum dilihat dari data yang tersedia, perolehan nilai Indeks SPBE

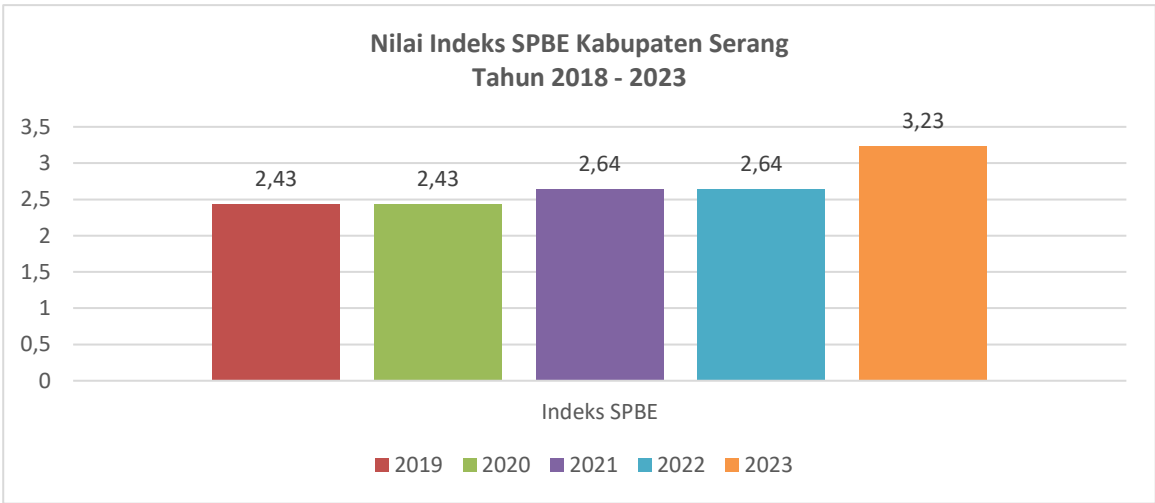
Kabupaten Serang menunjukkan peningkatan (tren positif) dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya nilai Indeks SPBE Kabupaten Serang dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 2.4.3
Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)
Kabupaten Serang Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai	2,33	2,43	2,43	2,64	2,64	3,23
Kategori	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik

Sumber: Kementerian PAN RB, 2024

Grafik 2.4.1
Nilai Indeks SPBE Kabupaten Serang 2018-2023



Sumber: Kemepan RB

D. Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh Perangkat Daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam Pemetaan Urusan Persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari

layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016).

Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan Persandian dan Telekomunikasi di Kabupaten Serang. Capaian urusan persandian sampai dengan tahun 2022 mencapai 153,33% yang artinya melampaui target yang telah ditetapkan. Target Indeks Keamanan Informasi (KAMI) pada tahun 2022 adalah sebesar 120 poin dan ternyata berdasarkan hasil penilaian indeks KAMI pada tahun 2022 adalah sebesar 184 poin.

Tabel. 2.4.4
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026

No.	Indikator	Satuan	Data Awal Perencanaan (2020)	Target Akhir Tahun Perencanaan (2022)	Realisasi Akhir Periode Perencanaan (2022)	Capaian Kinerja PJM 2021- 2026
1	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Poin	100	120	184,00	153,33

Sumber : Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006 – 2026

E. Statistik

Statistik memiliki peran strategis dalam proses pembangunan di suatu daerah atau wilayah. Data statistik dapat menjadi data dasar dalam proses perencanaan pembangunan serta data untuk alat monitoring dan evaluasi pada saat proses pembangunan berlangsung maupun pada tahap paska pelaksanaan pembangunan. Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang statistik pada tahun 2022 adalah sebesar 100 % atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 pada periode tahun 2022.

Tabel. 2.4.5
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026

No.	Indikator	Satuan	Data Awal Perencanaaan (2020)	Target Akhir Tahun Perencanaaan (2022)	Realisasi Akhir Periode Perencanaaan (2022)	Capaian Kinerja RPJMD 2021-2026
1	Cakupan Data Statistik Sektoral Yang Dipublikasikan	%	50,00	60,00	60,00	100,00

Sumber : Dokumen Evaluasi RPJPD Serang Tahun 2006 – 2026

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengurus urusan wajib non pelayanan dasar terkait dengan bidang stastik yang salah satunya mengenai statistik sektoral. Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah berkomitmen terhadap ketersediaan statistik sektoral di lingkup daerah dalam mendukung perencanaan Pembangunan daerahnya. Berdasarkan **Tabel 2.4.6**, tingkat ketersediaan data statistik sektoral di Kabupaten Serang mengalami peningkatan mencapai 18% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Selain itu, data statistik sektoral yang terpublikasikan mencapai tren yang positif dimana mengalami peningkatan mencapai 17% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel. 2.4.6
Statistik Sektoral di Kabupaten Serang Tahun 2021-2022

Uraian	2021	2022
Tingkat Ketersediaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah (%)	14	17
Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan (%)	50	60

Sumber: LKPJ Tahun 2021-2022

2.5 Evaluasi RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2005-2025

Pelaksanaan Pembangunan yang sudah dilakukan selama dua dekade terakhir melalui implementasi pembangunan sesuai dengan RPJPD 2006-2026, Kabupaten Serang telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di saat kondisi global dan domestik penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang sangat dinamis. Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Serang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026. Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Serang lebih diarahkan pada pengembangan perekonomian, khususnya pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama 2 (dua) periode RPJMD dari awal periode perencanaan (2015) hingga tahun 2026 terlihat dari pencapaian indikator makro pembangunan. Dari 5 (lima) indikator hanya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang hanya mencapai 99,02% dari target yang ditetapkan. Untuk 4 (empat) indikator lainnya melebihi target yang ditentukan. Secara umum, pencapaian indikator makro pembangunan di Kabupaten Serang 87,50% dengan kategori TINGGI.

Adapun tantangan yang telah diidentifikasi dalam pelaksanaan Pembangunan jangka panjang telah dilewati dengan hasil capaian pembangunan Kategori Sedang. Capaian sebesar 74,30% pada rata-rata capaian pembangunan di 2 (dua) tahapan pembangunan menengah menggambarkan bahwa permasalahan yang terjadi cukup kompleks. Terlebih capaian yang masih rendah terlihat dari pencapaian pada tahun 2020 saat terjadi Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak negatif pada pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Selain itu, kebijakan yang diambil membuat gejolak perekonomian dan kondisi sosial masyarakat mengalami guncangan sehingga target pembangunan banyak yang tidak tercapai, bahkan mengalami kontraksi. Pencapaian tantangan pembangunan jangka Panjang sebesar 74,30% tersebut memberikan dampak yang relevan pada pencapaian Pembangunan makro. Terlihat tantangan perekonomian yang memiliki capaian belum optimal berpengaruh negatif pula pada pembangunan makro dimana capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi belum mencapai target.

Beberapa hal lainnya yang perlu menjadi perhatian bersama Kabupaten Serang dengan berbagai pihak antara lain: (1) Optimalisasi dalam

pemerataan hasil pembangunan harus ditingkatkan oleh stakeholder mengingat capaian Indeks Gini yang meningkat sehingga perlu diturunkan kembali melalui peningkatan kesejahteraan berkeadilan. Hal ini juga terlihat dari masih belum tercapainya peningkatan kualitas ketenagakerjaan pada capaian akhir pembangunan sehingga untuk mewujudkannya perlu berfokus pada kebijakan ketenagakerjaan melalui perluasan dan peningkatan mutu lapangan usaha; (2) pada akhir pelaksanaan pembangunan jangka panjang, capaian indikator kewirausahaan juga belum optimal. Kondusivitas kewirausahaan serta asistensi pemerintah baik dari sisi teknis maupun permodalan diharapkan; (3) Sebagai wilayah pedesaan, kontribusi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian masih kurang optimal. Bahkan sudah banyak lahan pertanian yang beralih fungsi, sehingga diperlukan kebijakan khusus dalam meningkatkan peran pertanian dalam meningkatkan perekonomian daerah, mengingat sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan daerah; dan (4) Indeks Reformasi Birokrasi pada pelaksanaan pembangunan jangka panjang memiliki capaian yang belum optimal masih dalam level CC yang artinya cukup (memadai). Jika melihat dari kondisi tata kelola pemerintahan, belum terintegrasinya perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi setiap kebijakan pembangunan menjadi poin penting belum terealisasinya reformasi birokrasi secara menyeluruh. Ke depan, perlu adanya sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan sekaligus mengoptimalkan dan mengefektifkan setiap penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk seluruh perangkat daerah.

2.5.1 Hasil Capaian Indikator Pembangunan Daerah

A. Capaian Indikator Makro

Pemerintah Kabupaten Serang didalam mengevaluasi dokumen RPJPD tahun 2006-2026, menggunakan data-data capaian indikator untuk 2 (dua) periode terakhir RPJMD; yaitu RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJMD Tahun 2021-2026.

Capaian indikator makro pembangunan untuk 2 (dua) periode RPJMD tersebut menggunakan data capaian awal pada tahun 2015 dan data capaian akhir pada tahun 2022. Berikut disajikan tabel capaian indikator makro Kabupaten Serang :

Tabel 2.5.1
Capaian Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro		Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2015)	Capaian pada Tahun berjalan (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	64.61	67.75	104.86	BPS
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5.09	5.04	99.02	BPS
3	Nilai PDRB ADHB per Kapita	Rp. Juta per Jiwa	41.00	52.4	127.80	BPS
4	Tingkat Kemiskinan (Persentase Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Total Jumlah Penduduk)	%	5.09	4.96	102.55	BPS
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	14.80	10.61	128.31	BPS

Sumber data : BPS Kabupaten Serang

Terlihat pada tabel diatas, dari 5 (lima) Indikator Makro Pembangunan, hanya indikator **LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE)** yang **BELUM** mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan efek pandemic covid-19 yang melanda kawasan Kabupaten Serang, sehingga dampak yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli yang sangat signifikan pada masyarakat secara luas. Sebagai perbandingan data capaian LPE pada tahun awal (2015) dan capaian LPE pada tahun 2020 s/d 2022 dengan sumber data BPS Kabupaten Serang.

Tabel 2.5.2
Indikator Pertumbuhan Ekonomi

INDIKATOR LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) (%)			
2015 (DATA AWAL)	2020	2021	2022
5.09	-2.73	3.74	5.04

Sumber data : BPS Kabupaten Serang

Capaian LPE tahun 2020 sampai minus 2.73 % akibat imbas covid-19, yang akhirnya capaian LPE mulai naik kembali, hasil pelaksanaan 3 (tiga) program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Serang yaitu

1. Penanganan Kesehatan;
2. Penanganan Dampak Ekonomi; dan
3. Penyediaan Social Safety Net / Jaring Pengaman Sosial.

B. Capaian Indikator Mikro RPJMD Periode Tahun 2016-2021

Misi I : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Berakhlak Mulia Dan Berbudaya;

Didalam misi yang pertama ini, terdapat 30 (tigapuluh) indikator kinerja pembangunan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5.3
Capaian Indikator Mikro RPJMD Priode Tahun 2016-2021 kinerja Pembangunan (pada Misi I)

No	Indikator / Satuan		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2015)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2020)	Realisasi Akhir Periode (2020)	Capaian Kinerja RPJMD
1	2		3	4	5	6
1	Indeks kesehatan (IK)	Poin	63.40	64.68	74.4	115.03
2	Angka harapan hidup (AHH)	Tahun	66.77	68.74	64.64	94.04
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	221.00	215	204	105.12
4	Angka Kematian Bayi (AKB) Yang Dilaporkan	per 1.000 Kelahiran Hidup	8.90	8.4	8.29	101.31
5	Optimalisasi kunjungan rumah sakit (BOR)	%	78.00	80	54.8	68.50
6	Persentase jumlah peserta KB terhadap pasangan usia subur (Prevalensi peserta KB aktif)	%	66.16	69.16	76.17	110.14
7	Indeks pendidikan	point	57.33	66.09	59.92	90.66
8	Rata-rata lama sekolah (RLS)	tahun	6.89	8.36	7.50	89.71
9	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12.36	14.81	12.57	84.86
10	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	%	66.90	100.00	85.28	85.28
11	Angka partisipasi kasar (APK) SD/Sederajat	%	103.43	105.00	116.78	111.22
12	Angka partisipasi murni (APM) SD/Sederajat	%	99.97	100.00	100.00	100.00
13	Angka partisipasi kasar (APK) SLTP/Sederajat	%	104.73	105.00	116.96	111.39

14	Angka partisipasi murni (APM) SLTP/Sederajat	%	90.14	100.00	99.45	99.45
15	Angka kelulusan (AL) SD/Sederajat	%	100.00	100.00	100.00	100.00
16	Angka kelulusan (AL) SLTP/Sederajat	%	99.98	100.00	100.00	100.00
17	Angka putus sekolah (APS) SD/Sederajat	%	0.02	0.00	0.00	100.00
18	Angka putus sekolah (APS) SLTP/Sederajat	%	0.01	0.00	0.00	100.00
19	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	99.55	100.00	100.00	100.00
20	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	89.41	100.00	100.00	100.00
21	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Rasio jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah terhadap jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah)	%	-	68.00	100.00	147.06
22	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan daerah terhadap target jumlah kunjungan perpustakaan daerah	%	-	88.00	83.00	94.32
23	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Orang	55,808.00	155,397.00	93,338.00	139.94
24	Penanganan PMKS (Rasio jumlah PMKS yang tertangani terhadap jumlah PMKS yang ada)	%	70,00	96.00	98.24	102.33
25	Cakupan pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa	%	100.00	100	100	100.00
26	Cakupan pembinaan pemerintahan desa	%	100.00	100	100	100.00
27	Indeks pembangunan gender (IPG)	Poin	91.78	61.94	92.14	148.76
28	Cakupan Atlit berprestasi	%	0.00	23	0	0.00
29	Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat (kecamatan)	%	0.00	10	0	0.00

30	Rata-rata cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitas, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya	%	100.00	100.00	75	75.00

Sumber data : Bappedalitbang Kab Serang & BPS Kabupaten Serang

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator yang mencapai target 100% sebanyak 9 (Sembilan) indikator;
2. Indikator yang melebihi target >100% sebanyak 10 (sepuluh) indikator;
3. Indikator yang tidak mencapai target sebanyak 11 (sebelas) indikator ;

Misi II : Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman Yang Memadai, Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan

Didalam misi yang kedua ini, terdapat 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja pembangunan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5.4
Capaian Indikator Mikro RPJMD Priode Tahun 2016-2021 kinerja Pembangunan (pada Misi II)

No	Indikator / Satuan		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2015)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2020)	Realisasi Akhir Periode (2020)	Capaian Kinerja RPJMD
1	2		3	4	5	6
1	Presentase tingkat kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten)	%	71.57	100.00	92.05	92.05
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	%	51.19	100.00	95.97	95.97
3	Presentase tingkat kondisi drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Proporsi panjang draniase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang drainase kabupaten)	%	50.00	100.00	74.50	74.50
4	Presentase tingkat kondisi jembatan kabupaten dalam kondisi baik (Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik terhadap total jumlah jembatan kabupaten)	%	70.99	100.00	93.30	93.30
5	Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat	%	14.30	11.50	12.73	110.70
6	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	%	41.00	65.00	22.54	34.68

	untuk jaringan jalan kabupaten					
7	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Unit	3.00	6.00	4.00	66.67
8	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	%	75.00	100.00	75.00	75.00
9	Cakupan fungsi pelayanan jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap total areal irigasi	%	66.00	72.00	99.40	138.06
10	Capaian Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat	%	66.83	72.00	71.00	98.61
11	Cakupan pelayanan persampahan (Proporsi volume sampah yang tertangani (Rasio jumlah sampah yang ditangani terhadap jumlah produksi sampah))	%	4.80	10.00	11.53	115.30
12	Proporsi jumlah SD/Sederajat dalam kondisi baik terhadap total jumlah SD/Sederajat	%	81.67	100.00	83.26	83.26
13	Proporsi jumlah SLTP/Sederajat dalam kondisi baik terhadap total jumlah SLTP/Sederajat	%	83.24	100.00	84.82	84.82
14	Rasio jumlah puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik terhadap total jumlah puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya yang ada	%	47.42	100.00	80.00	80.00
15	Tingkat daya tampung RSUD	%	69.00	95.00	88.89	93.57
16	Tingkat kualitas sarana prasarana RSUD dalam kondisi baik	%	92.01	94.00	94.74	100.79
17	Tersedianya Akses Air Minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan bukan perpipaan, memenuhi kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	%	78.00	90.00	87.08	96.76
18	Cakupan pelayanan air limbah rumah tangga	%	61.70	88.70	77.87	87.79
19	Cakupan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH)	%	24.10	100.00	98.51	98.50
20	Tingkat Ketersedian rencana tata ruang (RTRW, RDTR dan rencana rinci tata ruang lainnya)	%	11.63	37.21	23.26	62.51
21	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah 3R	%	6.90	27.59	27.28	98.89

22	Tingkat pengelolaan RTH	%	100.00	100.00	90.00	90.00
23	Cakupan pencegahan bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00
24	Cakupan penanggulangan korban bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00
25	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100.00	100.00	100.00	100.00
26	Cakupan penanganan daerah rawan bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00
27	Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana	%	40.00	50.00	96.12	192.24

Sumber data : Bappedalitbang Kab Serang & BPS Kabupaten Serang

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator yang mencapai target 100% sebanyak 4 (empat) indikator;
2. Indikator yang melebihi target >100% sebanyak 5 (lima) indikator;
3. Indikator yang tidak mencapai target sebanyak 18 (delapan belas) indikator.

Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Dalam Memperkuat Struktur Perekonomian Daerah

Didalam misi yang ketiga ini, terdapat 32 (tigapuluh dua) indikator kinerja pembangunan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5.5
Capaian Indikator Mikro RPJMD Priode Tahun 2016-2021 kinerja
Pembangunan (pada Misi III)

10,2	Indikator / Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2015)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2020)	Realisasi Akhir Periode (2020)	Capaian Kinerja RPJMD
1	2	3	4	5	6
1	Nilai investasi PMA Rp.Triliun	2.07	2.47	4.53	183.09
2	Nilai investasi PMDN Rp.Triliun	2.49	2.97	3.37	113.39
3	Laju pertumbuhan investasi PMA %	3.00	3.00	-0.39	-13.00
4	Laju pertumbuhan investasi PMDN %	3.00	3.00	46.28	1,542.67
5	Indeks Daya Beli Point	69.96	70.97	72.10	101.59
6	Tingkat kesempatan kerja (TKK) %	91.05	94.05	87.81	93.37
7	Rasio Koperasi Aktif (Proporsi jumlah koperasi aktif terhadap total jumlah koperasi yang ada) %	25.29	89.22	74.72	83.75
8	Rasio usaha mikro dan kecil (Rasio jumlah usaha mikro dan kecil terhadap jumlah usaha kecil dan menengah) %	97.55	90.00	99.28	110.31
9	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB %	7.27	7.84	10.01	127.64

10	Tingkat pembangunan kawasan pertanian	%	0.00	100.00	151.00	151.00
11	Tingkat pembangunan kawasan perkebunan	%	0.00	100.00	70.08	70.08
12	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	%	1.70	2.05	10.01	488.29
13	Tingkat pembangunan kawasan peternakan	%	0.00	100.00	77.78	77.78
14	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	%	1.25	1.73	9.50	550.72
15	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	22.93	26.50	37.21	140.42
16	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	79,023.91	526,262.26	49,704.77	9.44
17	Nilai Produksi Perikanan	Rp.Milyar	766.49	5,109.00	373.92	7.32
18	Ketersediaan energi	kcal/kap/hari	2,112.00	2,150.00	2,837.00	131.95
19	Ketersediaan protein	gr/kap/hari	81.20	76.00	205.60	270.53
20	Skor PPH	%	84.30	90.50	88.90	98.23
21	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	47.55	38.79	49.42	127.42
22	Tingkat pembangunan kawasan sentra IKM baru	%	0.00	100.00	45.00	45.00
23	Tingkat pengembangan kawasan sentra IKM lama	%	80.00	100.00	100.00	100.00
24	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8.44	7.50	-1.56	-20.81
25	Rasio jumlah Pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda)	%	58.33	92.00	83.00	90.22
26	Jumlah Pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) yang dibangun	pasar	0.00	2.00	0.00	0.00
27	Tingkat pembangunan resi gudang	%	0.00	100.00	0.00	0.00
28	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	orang	2,107	15,048.00	4,969.00	33.02
29	Laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	%	4.97	5.00	-43.00	-859.55
30	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	orang	5,817	37,428,902.00	1,369,074.00	3.66
31	Laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan nusantara	%	2.00	2.00	111.00	5,550.00

32	Tingkat pengembangan kawasan strategis pariwisata	%	29.00	100.00	66.67	66.67

Sumber data : Bappedalitbang Kab Serang & BPS Kabupaten Serang

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator yang mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) indikator
2. Indikator yang melebihi target >100% sebanyak 14 (empat belas) indikator
3. Indikator yang tidak mencapai target sebanyak 17 (tujuh belas) indikator

Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional

Didalam misi yang keempat ini, terdapat 42 (empatpuluh dua) indikator kinerja pembangunan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5.6
Capaian Indikator Mikro RPJMD Priode Tahun 2016-2021 kinerja Pembangunan (pada Misi IV)

No	Indikator / Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2015)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2020)	Realisasi Akhir Periode (2020)	Capaian Kinerja RPJMD
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran %	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur %	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Tingkat penataan kelembagaan pemerintahan daerah %/th	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Diklat PIM II PNS	2.00	27.00	0.00	0.00
5	Diklat PIM III PNS	5.00	110.00	0.00	0.00
6	Diklat PIM IV PNS	20.00	735.00	0.00	0.00
7	Prajabatan CPNS	687.00	422.00	0.00	0.00
8	Tingkat indisipliner PNS Kasus	8.00	68.00	0.00	0.00

9	Tingkat pemenuhan ketersediaan dokumen rencana lima tahunan dan tahunan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan SKPD	%	100.00	100.00	100.00	100.00
	Tingkat ketersediaan data/informasi pembangunan daerah					
10	Kabupaten Serang Dalam Angka	Dokumen	1.00	6.00	6.00	100.00
11	PDRB Kabupaten Serang	Dokumen	1.00	6.00	6.00	100.00
12	IPM Kabupaten Serang	Dokumen	1.00	6.00	6.00	100.00
13	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00
14	RPJMD	Dokumen	0.00	1.00	1.00	100.00
15	RKPD	Dokumen	1.00	6.00	6.00	100.00
16	RKPD Perubahan	Dokumen	1.00	6.00	6.00	100.00
17	KUA PPAS	Dokumen	1.00	6.00	6.00	100.00
18	KUA PPAS Perubahan	Dokumen	1.00	6.00	6.00	100.00
	Tingkat ketersediaan dokumen evaluasi pembangunan daerah					
19	LKPj	Dokumen	1.00	6.00	6.00	100.00
20	LKPj AMJ	Dokumen	1.00	1.00	1.00	100.00
21	LPPD	Dokumen	1.00	6.00	6.00	100.00
22	LAKIP	Dokumen	1.00	6.00	6.00	100.00
23	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	1.00	3.00	3.00	100.00
24	Tingkat Muturitas SPIP	Level	2.00	4.00	4.00	100.00
25	Tingkat Kuantitas APIP	%	40.00	100.00	85.48	85.48
26	Nilai kinerja pemerintah daerah	Peringkat (A, BB, B, CC, C, D)	CC	B	A	140.00
	Zona Inti (Utama)					
27	Tingkat ketersediaan dokumen rencana	%	80.00	100.00	100.00	100.00

28	Tingkat ketersediaan lahan siap bangun	%	100.00	100.00	50.00	50.00
29	Tingkat Pembangunan Infrastruktur Pendukung	%	0.00	30.00	65.00	216.67
30	Tingkat Pembangunan Gedung Perkantoran	%	0.00	20.00	0.00	0.00
31	Jumlah pendapatan daerah	Rp. Milyar	2,306.04	2,465.83	2,965.62	120.27
32	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Milyar	580.81	682.67	760.92	111.46
33	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	25.19	25.57	25.66	100.35
34	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	WTP	100
35	Rasio jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku terhadap total jumlah SKPD yang ada	%	61.00	65	100	153.85
36	Cakupan pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil	%	100.00	100	100	100.00
37	Terbangun dan teraksesnya media pelayanan informasi daerah	%	100.00	100	100	100.00
38	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan	%	0.00	50	100	200.00
39	Rasio jumlah kasus kanrantibmas dan tindak kriminal yang ditindaklanjuti terhadap total jumlah kasus	%	100.00	100	100	100.00

	kantrantibmas dan tindak kriminal yang terjadi				
40	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah %	100.00	100	100	100.00
41	Cakupan pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan %	100.00	100	100	100.00
42	Raperda yang disetujui DPRD tahun berkenan (Proporsi jumlah Raperda yang disetujui DPRD menjadi Perda terhadap jumlah Raperda yang diusulkan) %	100.00	100	100	100.00

Sumber data : Bappedalitbang Kab Serang & BPS Kabupaten Serang

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator yang mencapai target 100% sebanyak 27 (duapuluh tujuh) indikator
2. Indikator yang melebihi target >100% sebanyak 7 (tujuh) indikator
3. Indikator yang tidak mencapai target sebanyak 8 (delapan) indikator

Misi 5 : Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

Didalam misi yang kelima ini, hanya terdapat 1 (satu) indikator kinerja pembangunan dan capaiannya 100% , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5.7
Capaian Indikator Mikro RPJMD Priode Tahun 2016-2021 kinerja Pembangunan (pada Misi V)

No	Indikator / Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2015)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2020)	Realisasi Akhir Periode (2020)	Capaian Kinerja RPJMD
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat penyelesaian konflik SARA %	100.00	100	100	100.00

Sumber data : Bappedalitbang Kab Serang & BPS Kabupaten Serang

C. CAPAIAN INDIKATOR MIKRO RPJMD TAHUN 2021-2026

Misi I : Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat

Didalam misi yang pertama ini, terdapat 4 (empat) indikator kinerja pembangunan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5.8
Capaian Indikator Mikro RPJMD Priode Tahun 2021-2026 kinerja Pembangunan (pada Misi I)

No	Indikator / Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)	Realisasi Akhir Periode (2022)	Capaian Kinerja RPJMD
1	2	3	4	5	6
1	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun	7.50	7.79	7.78	99.87
2	Harapan Lama Sekolah Tahun	12.57	12.94	12.78	98.76
3	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan Point	47.52	48.72	49.33	101.25
4	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional %	0.00	48.28	50.00	103.56

Sumber data : Bappedalitbang Kab Serang & BPS Kabupaten Serang

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator yang mencapai target 100% tidak ada
2. Indikator yang melebihi target >100% sebanyak 2 (dua) indikator
3. Indikator yang tidak mencapai target sebanyak 2 (dua) indikator
4. Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2022 mencapai 7.78 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Serang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,78 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII
5. Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 mencapai 12.78 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,78 tahun atau setara dengan Diploma I.

Misi II : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional

Didalam misi yang kedua ini, terdapat 6 (enam) indikator kinerja pembangunan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5.9
Capaian Indikator Mikro RPJMD Priode Tahun 2021-2026 kinerja Pembangunan (pada Misi II)

No	Indikator / Satuan		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)	Realisasi Akhir Periode (2022)	Capaian Kinerja RPJMD
1	2		3	4	5	6
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	64.64	65.18	65.18	100.00
2	Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	204.00	200.00	175.00	112.50
3	Angka kematian bayi	per 1000 kelahiran hidup	8.29	8.25	6.80	117.58
4	Angka Prevelensi Stunting	%	18.4 (Eppgbm)	18.40	8.96 (Eppgbm) / 26.4 (ssgi)	151.30
5	Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi	%	25.00	30.00	34.00	113.33
6	Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	%	80.00	80.00	80.00	100.00

Sumber data : Bappedalitbang Kab Serang & BPS Kabupaten Serang

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator yang mencapai target 100% sebanyak 2 (dua) indikator
2. Indikator yang melebihi target >100% sebanyak 4 (empat) indikator
3. Indikator yang tidak mencapai target tidak ada
4. Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2022 mencapai target sebesar 65.18 tahun. Artinya, secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 65 - 66 tahun
5. Angka kematian ibu melebihi target sebesar 175 per 1000 kelahiran hidup dari target yang tidak boleh melebihi 200 per 1000 kelahiran hidup
6. Angka kematian bayi melebihi target sebesar 6.80 per 1000 kelahiran hidup dari target yang tidak boleh melebihi 8.25 per 1000 kelahiran hidup

**Misi III : Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah,
Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan
berkualitas**

Didalam misi yang ketiga ini, terdapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja pembangunan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5.10
Capaian Indikator Mikro RPJMD Priode Tahun 2021-2026 kinerja
Pembangunan (pada Misi III)

No	Indikator / Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)	Realisasi Akhir Periode (2022)	Capaian Kinerja RPJMD
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur %	48.00	52.50	86.04	163.89
2	Cakupan aksesibilitas antar wilayah %	96.10	100.00	100.00	100.00
3	Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum %	85.89	87.73	81.60	93.01
4	Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik %	70.25	72.09	80.06	111.06
5	Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik %	50.00	60.00	58.62	97.70
6	Persentase kawasan kumuh %	0.20	0.18	0.14	77.78
7	Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi %	35.00	41.66	41.66	100.00
8	Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik %	50.00	52.50	52.50	100.00
9	Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik %	84.00	62.50	79.59	127.34
10	Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan %	100.00	100.00	100.00	100.00
11	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Point	5.00	10.00	19.84	198.40
12	Cakupan ketersediaan air baku %	100.00	100.00	100.00	100.00
13	Indeks kualitas Air Point	49.25	50.25	47.28	94.09
14	Indeks Kualitas udara Point	82.25	82.75	80.26	96.99
15	Indeks tutupan Vegetasi Point	69.98	69.99	70.41	100.60
16	Persentase Penanganan Sampah %	14.53	17.44	14.70	84.29
17	Persentase Rumah Layak Huni %	89.26	89.88	98.94	110.08

Sumber data : Bappedalitbang Kab Serang & BPS Kabupaten Serang

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator yang mencapai target 100% sebanyak 5 (lima) indikator
2. Indikator yang melebihi target >100% sebanyak 6 (enam) indikator
3. Indikator yang tidak mencapai target sebanyak 6 (enam) indikator

Misi IV : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan

Didalam misi yang keempat ini, terdapat 21 (duapuluh satu) indikator kinerja pembangunan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5.11
Capaian Indikator Mikro RPJMD Priode Tahun 2021-2026 kinerja Pembangunan (pada Misi IV)

No	Indikator / Satuan		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)	Realisasi Akhir Periode (2022)	Capaian Kinerja RPJMD
1	2		3	4	5	6
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-1.96	2.97	5.04	169.70
2	Inflasi	%	1.23	1.23	7.56	16.27
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	12.22	11.89	10.61	110.77
4	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	%	4.02	2.82	1.44	51.06
5	Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	%	-2.16	1.99	1.28	64.32
6	Proporsi peningkatan SHU koperasi	%	0.29	2.00	2.84	142.00
7	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	9.64	10.00	24.86	248.60
8	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	%	-1.56	1.43	5.62	393.01
9	Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	%	-4.28	3.58	5.05	141.06
	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah :					
10	PMA	%	-0.39	3.00	46.14	1,538.00
11	PMDN	%	46.28	3.00	-22.13	-737.67
12	Kontribusi PAD Pariwisata	Rp.	16,059,553,821	20,000,000,000	34,554,358,874	172.77
13	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	13.38	20.00	22.65	113.25

14	Persentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM	%	15.03	15.95	20.86	130.78
15	Persentase Tingkat Kemiskinan	%	4.94	4.22	4.96	82.46
16	Indeks Gini Rasio	%	0.30	0.281	0.284	101.07
17	Indeks Ketahanan Pangan	%	77.07	77.15	78.63	101.92
18	Persentase PMKS yang mendapatkan program pelayanan sosial	%	17.38	3.00	3.05	101.67
19	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	92.14	92.06	91.98	99.91
20	Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	%	56.17	60.00	39.86	133.57
21	Total Fertility Rate	%	2.10	2.26	2.15	104.87

Sumber data : Bappedalitbang Kab Serang & BPS Kabupaten Serang

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator yang mencapai target 100% sebanyak tidak ada
2. Indikator yang melebihi target >100% sebanyak 15 (lima belas) indikator
3. Indikator yang tidak mencapai target sebanyak 6 (enam) indikator
4. Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan tahun 2022 sebesar 1.28%.
Pertumbuhan sektor perikanan ini didasarkan atas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.
5. Pertumbuhan Nilai Investasi daerah :
PMA sebesar 46,14%, pada tahun 2022 sebesar Rp.4,814,630,397,003,- dan untuk tahun 2021 Rp.3,294,458,833,363.
PMDN sebesar -22,13%. Nilai negatif ini disebabkan realisasi capaian tahun 2022 lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2021. Capaian tahun 2022 sebesar Rp.1,900,984,600,000,- sedangkan tahun 2021 sebesar Rp.2,441,249,600,000,-
6. Kontribusi PAD Pariwisata pada tahun 2022 mencapai Rp.34.554.358.874,- atau 172.77%. Sektor pariwisata pantai di Kecamatan Anyer dan Cinangka menjadi wilayah yang paling besar menyumbang PAD. PAD sektor pariwisata diambil dari pajak dan retribusi hotel dan restoran, serta objek wisata dan aset milik Pemerintah Kabupaten Serang.

7. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (Pendidikan; Kesehatan; Modal Sosial & Permukiman); Indeks Ketahanan Ekonomi (Keragaman Produksi Masyarakat; Akses Pusat Perdagangan dan Pasar; Akses Logistik; Akses Perbankan dan Kredit; Keterbukaan Wilayah) dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan (Kualitas Lingkungan; Bencana Alam ; Tanggap Bencana). Persentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM mencapai 20,86% melebihi target yang ditetapkan 15,95%.
8. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi di Kabupaten Serang mencapai 7,56 %, yang artinya masuk kedalam kategori Inflasi Sedang, yaitu Inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian di Kabupaten Serang.
9. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2022 di Kabupaten Serang terdapat 10,61 persen angkatan kerja yang berstatus sebagai pengangguran. Atau dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 10-11 orang penganggur (pencari kerja).
10. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Serang pada periode tahun 2017-2022 cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021 akibat pandemi Covid-19, tetapi pada tahun 2022, persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 4,96 persen (75,45 ribu orang)
11. Indeks Gini Rasio merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Capaian Nilai Indeks Gini Rasio sebesar 0.284 % melebihi

target yang ditentukan 0,281 %.

12. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Perwujudan ketahanan pangan dicapai melalui 4 pilar yaitu: (1) Ketersediaan pangan (produksi dan import); (2) Cadangan pangan; (3) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan (4) Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan terhadap penyediaan pangan tersebut. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Serang selalu menunjukkan tren positif, pada tahun 2022 mencapai 78,63%, melebihi target yang telah ditentukan (77,15%)
13. PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan(secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Persentase PMKS yang mendapatkan program pelayanan sosial pada tahun 2022 melebihi target yang ditentukan (101.92%).
14. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Serang menunjukkan trend positif yang selalu naik setiap tahunnya. Tahun 2022 mencapai 91.98 poin.
15. Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking pada tahun 2022 sebesar 39,86 %, masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 60%. Hal ini disebabkan masih tertutupnya korban kekerasan, khususnya keluarga korban, menjadi kendala penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu lingkungan korban cenderung menutup akses, sehingga kasus-kasus tersebut rentan terulang kembali.
16. Total Fertility Rate (TFR) adalah indikator demografis standar yang digunakan secara internasional untuk memperkirakan jumlah rata-rata

anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa suburnya (yaitu usia 15-49), berdasarkan tren kelahiran saat ini. Pada tahun 2022. Total Fertility Rate di Kabupaten Serang mencapai 2,15 %. Melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu tidak melebihi 2,26 %.

Misi V : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional

Didalam misi yang kelima ini, terdapat 21 (duapuluh satu) indikator kinerja pembangunan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5.12
Capaian Indikator Mikro RPJMD Priode Tahun 2021-2026 kinerja Pembangunan (pada Misi V)

No	Indikator / Satuan		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)	Realisasi Akhir Periode (2022)	Capaian Kinerja RPJMD
1	2		3	4	5	6
1	Indeks reformasi Birokrasi	LEVEL	CC	BB	CC	60.00
2	Opini BPK	WTP/WDP/TMP	WTP	WTP	WTP	100.00
3	Nilai LPPD	SKOR	3.80	4.10	3.41	83.07
4	Nilai SAKIP	NILAI	BB	BB	BB	100.00
5	Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK	OPD	0.00	1.00	3.00	300.00
6	Tingkat Maturitas SPIP	LEVEL	3.00	3.50	3.26	93.14
7	Tingkat Pertumbuhan PAD	%	1.36	1.12	9.90	883.93
8	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00
9	Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Indek Inovasi Daerah	Kategori	inovatif	inovatif	inovatif	100.00
11	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	%	50.00	60.00	60.00	100.00
12	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik	%	94.00	95.00	99.77	105.02
13	Cakupan standar kompetensi pegawai	%	90.00	94.50	99.81	105.62
14	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	%	60.00	70.00	93.50	133.57
15	Indeks Kematangan Penerapan SPBE	Point	2.98	2.98	2.64	88.59

16	Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)	%	100.00	120.00	184.00	153.33
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	B	B	B (72.49)	100.00
18	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	%	35.71	53.57	100.00	186.67
19	Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	%	79.12	84.80	93.98	110.83
20	Indeks Risiko Bencana	SKOR	203.20	203.05	154.18	124.07
21	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	%	7.40	5.00	6.00	120.00

Sumber data : Bappedalitbang Kab Serang & BPS Kabupaten Serang

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator yang mencapai target 100% sebanyak 7 (tujuh) indikator
2. Indikator yang melebihi target >100% sebanyak 10 (sepuluh) indikator
3. Indikator yang tidak mencapai target sebanyak 4 (empat) indikator
4. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Pada tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Serang pada level CC, yang artinya cukup (memadai) pada nilai $50 < \text{nilai} < 60$. Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
5. Opini BPK di tahun 2022 adalah WTP. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
6. Nilai Dokumen LPPD merupakan dokumen laporan yang menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, yang digambarkan melalui capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Nilai Dokumen LPPD Kabupaten Serang tahun 2022 mencapai skor 3,41.
7. Nilai SAKIP Kabupaten Serang tahun 2022 mencapai nilai BB. Kategori BB dengan nilai absolut 70-80 memiliki intepretasi sangat baik. Yang

mana sudah terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

8. Pada tahun 2022, ada 3 OPD pelayanan yang telah melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK. Meskipun didalam target RPJMD tahun berkenaan, belum ditargetkan.
9. Penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3. Kabupaten Serang pada tahun 2022, Tingkat Maturitas SPIP pada level 3,26 yang artinya sudah dianggap BAIK.
10. Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Serang melonjak cukup drastis sampai dengan 883.93%. Hal ini disebabkan diturunkannya target yang ada di dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, mengingat pada tahun tersebut masih adanya pandemi covid-19.
11. Konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan didalam dokumen RKPD, semuanya sudah tercover didalam DPA tahun berjalan.
12. Capaian kinerja kegiatan perangkat daerah sudah sesuai dengan yang direncanakan, program prioritas pembangunan berjalan dengan baik disertai pemenuhan anggaran yang mencukupi. Sehingga output dari program kegiatan dimaksud berjalan sesuai yang direncanakan dan output nya tercapai.
13. Indek Inovasi Daerah sudah masuk kedalam kategori "INOVATIF". Hal ini merupakan cermin keberhasilan Pemerintah Kabupaten Serang, didalam perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh/himpunan inovasi daerah yang telah dilakukan, sudah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

14. Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan pada tahun 2022 mencapai target (100%). Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Komunikasi Informasi Statistik & Persandian, sudah mempublikasikan data-data sektoral Perangkat Daerah. Data-data tersebut diperoleh dari Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Serang maupun data-data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, yang diupload kedalam situs serangkab.go.id
15. Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik melebihi target yang ditentukan (105.02 %). Hal ini menunjukkan aplikasi SipKerja sebagai tolok ukur kehadiran dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, sudah berjalan dengan baik, sebagai pedoman didalam memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
16. Indikator Cakupan standar kompetensi pegawai juga melebihi target yang ditentukan (105.62 %). Angka tersebut sebagai imbas dari alokasi kegiatan-kegiatan terkait bimbingan teknis yang sudah dijalankan.
17. Pada tahun 2022, Persentase Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID) Kabupaten Serang mencapai 93.50%. Hal ini menunjukkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang sudah paham akan pentingnya Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
18. Indeks Kematangan Penerapan SPBE pada tahun 2022 sebesar 2,64 poin. Nilai ini masuk kedalam angka 2,6 - < 3,5 dan masuk didalam Predikat "BAIK".
19. Indeks KAMI pada tahun 2022 melebihi target yang sudah ditetapkan (153.33 %). Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di Pemerintah Kabupaten Serang sudah berjalan dengan baik.
20. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Serang pada tahun 2022 sebesar 72,49 poin, masuk kedalam kategori mutu pelayanan "B". Hal ini menunjukkan keberhasilan pelayanan kepada masyarakat yang ditunjukkan dari tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
21. Persentase Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Serang yang sudah menerapkan dan mengelola arsip secara digital, sudah mencapai

100%. Hal ini memberikan keuntungan secara signifikan karena arsip-arsip yang masih bersifat penting dapat tersimpan dengan baik dan bisa diakses darimana aja, melalui jaringan internet.

- 22. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk sudah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
- 23. Skor Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Serang pada tahun 2022 mencapai 124,07 % melebihi dari target yang ditetapkan,
- 24. Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda di Kabupaten Serang pada tahun 2022 mencapai 120% melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini merupakan dampak keberhasilan dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan.

Misi VI : Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

Didalam misi yang keenam ini, terdapat 2 (dua) indikator kinerja pembangunan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5.13
Capaian Indikator Mikro RPJMD Priode Tahun 2021-2026 kinerja Pembangunan (pada Misi VI)

No	Indikator / Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2022)	Realisasi Akhir Periode (2022)	Capaian Kinerja RPJMD
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama SKOR	86.45	87.40	81.75	93.54
2	Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat KEJADIAN	0.00	0.00	0.00	100.00

Sumber data : Bappedalitbang Kab Serang & BPS Kabupaten Serang

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Indikator yang mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) indikator
- 2. Indikator yang melebihi target >100% tidak ada
- 3. Indikator yang tidak mencapai target sebanyak 1 (satu) indikator
- 4. Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat pada tahun 2022 adalah nol kejadian. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Serang paham akan keberagaman Suku, Agama, Ras, dan

Antargolongan sehingga dapat saling menerima, menghargai, dan membantu antarsesama.

5. Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Serang Tahun 2022 sebesar 81,75 dalam kategori “SANGAT TINGGI”, yang mengindikasikan bahwa interaksi sosial antarumat beragama di Kabupaten Serang telah berlangsung secara baik dan berada dalam batas-batas jarak sosial yang wajar. Mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan kerukunan antarumat beragama, sebagaimana tercermin juga dalam sikap antarumat beragama yang bersedia menerima secara terbuka keberadaan pemeluk agama yang berbeda dalam ranah pergaulan sosial maupun profesi, meskipun sebatas pada dimensi publik atau formal dari pergaulan sosial.

D. Evaluasi pencapaian RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2016-2026

Periode Perencanaan	:		2016 - 2021
MISI	:	I	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Berakhlak Mulia Dan Berbudaya
Arah Kebijakan		1,1	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan
		1,2	Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
		1,3	Meningkatkan pembinaan pola hidup sehat masyarakat
		1,4	Memperbaiki status gizi masyarakat
		1,5	Mengendalikan penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang serta penyehatan lingkungan
		1,6	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
		1,7	Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan lansia
		1,8	Meningkatkan manajemen dan SDM kesehatan
Uraian Pencapaian			Indeks kesehatan (IK) mencapai 74,4 poin dari target yang diharapkan 64,68 poin
			Angka harapan hidup (AHH) mencapai 64.64 tahun dari target yang diharapkan 68.74 tahun
			Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 204 per 100.000 kelahiran hidup dari target tidak melebihi 215 per 100.000 kelahiran hidup
			Angka Kematian Bayi (AKB) Yang Dilaporkan mencapai 8,29 per 1000 kelahiran hidup dari target tidak melebihi 8,4 per 1000 kelahiran hidup
			Optimalisasi kunjungan rumah sakit (BOR) mencapai 54,8% dari target yang diharapkan 80%
		1,9	Meningkatkan pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB
Uraian Pencapaian			Persentase jumlah peserta KB terhadap pasangan usia subur (Prevalensi peserta KB aktif) mencapai 76,17% dari target yang diharapkan 69,16%

		1,10	Meningkatkan daya dukung, pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar
		1,11	Meningkatkan daya dukung pelayanan pendidikan usia dini, non formal dan informal serta minat baca masyarakat
		1,12	Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan serta kapasitas manajemen pelayanan pendidikan
Uraian Pencapaian			Indeks pendidikan mencapai 59,92% dari target yang diharapkan 66,09%
			Rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 7,50% dari target yang diharapkan 8,36%
			Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,57% dari target yang diharapkan 14,81%
			Angka partisipasi kasar (APK) PAUD mencapai 85,28% dari target yang diharapkan 100%
			Angka partisipasi kasar (APK) SD/Sederajat mencapai 116,78% dari target yang diharapkan 105%
			Angka partisipasi murni (APM) SD/Sederajat mencapai target yang diharapkan 100%
			Angka partisipasi kasar (APK) SLTP/Sederajat mencapai 116.96% dari target yang diharapkan 105%
			Angka partisipasi murni (APM) SLTP/Sederajat mencapai 99,45% dari target yang diharapkan 100%
			Angka kelulusan (AL) SD/Sederajat mencapai target yang diharapkan 100%
			Angka kelulusan (AL) SLTP/Sederajat mencapai target yang diharapkan 100%
			Angka putus sekolah (APS) SD/Sederajat mencapai target yang diharapkan 0%
			Angka putus sekolah (APS) SLTP/Sederajat mencapai target yang diharapkan 0%
			Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs mencapai target yang diharapkan 100%
			Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai target yang diharapkan 100%
			Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Rasio jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah terhadap jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah) mencapai 100% dari target yang diharapkan 68%
			Rasio jumlah pengunjung perpustakaan daerah terhadap target jumlah kunjungan perpustakaan daerah mencapai 83% dari target yang diharapkan 88%
		1,13	Meningkatkan perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
		1,14	Meningkatkan pembinaan PMKS dan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial
Uraian Pencapaian			Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mencapai 93.338 orang dari target yang diharapkan 155.397 orang
			Penanganan PMKS (Rasio jumlah PMKS yang tertangani terhadap jumlah PMKS yang ada) mencapai 98,24% dari target yang diharapkan 96%
		1,15	Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan
		1,16	Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan kapasitas pemerintahan desa

Uraian Pencapaian			Cakupan pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa mencapai target yang diharapkan 100%
			Cakupan pembinaan pemerintahan desa mencapai target yang diharapkan 100%
		1,17	Meningkatkan akses dan peran serta perempuan dalam pembangunan serta perlindungan anak
Uraian Pencapaian			Indeks pembangunan gender (IPG) mencapai 92,14% dari target yang diharapkan 61,94%
		1,18	Meningkatkan pembinaan dan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan
Uraian Pencapaian			Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan mencapai 85,71% dari target yang diharapkan 100%
		1,19	Meningkatkan pembinaan, pemasyarakatan dan kapasitas sarana dan prasarana olahraga
Uraian Pencapaian			Cakupan Atlit berprestasi mencapai 0% dari target yang diharapkan 23%
			Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat (kecamatan) mencapai 0% dari target yang diharapkan 10%
		1,20	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan dan nilai-nilai budaya lokal
Uraian Pencapaian			Rata-rata cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya mencapai 75% dari target yang diharapkan 100%
MISI	:	II	Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman Yang Memadai, Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan.
Arah Kebijakan	2	2,1	Membangun, Memelihara dan Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Jalan dan Jembatan
Uraian Pencapaian			Presentase tingkat kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten) mencapai 92,05% dari target yang diharapkan 100%
			Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten mencapai 95,97% dari target yang diharapkan 100%
			Presentase tingkat kondisi drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Proporsi panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang drainase kabupaten) mencapai 74,50% dari target yang diharapkan 100%
			Presentase tingkat kondisi jembatan kabupaten dalam kondisi baik (Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik terhadap total jumlah jembatan kabupaten) mencapai 93.30% dari target yang diharapkan 100%
		2,2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan serta ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan umum
		2,3	Meningkatkan ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan Laut
Uraian Pencapaian			Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat mencapai 12,73% dari target yang diharapkan 11,50%
			Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan

			kabupaten mencapai 22,50% dari target yang diharapkan 65%
			Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek mencapai 4% dari target yang diharapkan 6%
			Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran mencapai 75% dari target yang diharapkan 100%
		2,4	Memelihara, Merehabilitasi dan Meningkatkan Daya Dukung Jaringan Irigasi, Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir
Uraian Pencapaian			Cakupan fungsi pelayanan jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap total areal irigasi mencapai 99,40% dari target yang diharapkan 72%
			Capaian Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat mencapai 71% dari target yang diharapkan 72%
		2,5	Memelihara, Merehabilitasi dan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Persampahan
		2,6	Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana pos dan jaringan telekomunikasi
Uraian Pencapaian			Cakupan pelayanan persampahan (Proporsi volume sampah yang tertangani (Rasio jumlah sampah yang ditangani terhadap jumlah produksi sampah)) mencapai 11,53% dari target yang diharapkan 10%
		2,7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah
Uraian Pencapaian			Proporsi jumlah SD/Sederajat dalam kondisi baik terhadap total jumlah SD/Sederajat; mencapai 83,26% dari target yang diharapkan 100%
			Proporsi jumlah SLTP/Sederajat dalam kondisi baik terhadap total jumlah SLTP/Sederajat; mencapai 84,82% dari target yang diharapkan 100%
		2,8	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat
Uraian Pencapaian			Rasio jumlah puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik terhadap total jumlah puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya yang ada; mencapai 80% dari target yang diharapkan 100%
			Tingkat daya tampung RSUD mencapai 88,89% dari target yang diharapkan 95%
			Tingkat kualitas sarana prasarana RSUD dalam kondisi baik mencapai 94,74% dari target yang diharapkan 94%
		2,9	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum
		2,10	Meningkatkan ketersediaan areal pemakaman
		2,11	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
Uraian Pencapaian			Tersedianya Akses Air Minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan bukan perpipaan, memenuhi kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari mencapai 87,80% dari target yang diharapkan 90%
			Cakupan pelayanan air limbah rumah tangga mencapai 77,87% dari target yang diharapkan 88,70%
		2,12	Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan
		2,13	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kawasan kumuh

Uraian Pencapaian			Cakupan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai 98.51% dari target yang diharapkan 100%
		2,14	Meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang, mengendalikan pemanfaatan ruang
Uraian Pencapaian			Tingkat Ketersedian rencana tata ruang (RTRW, RDTR dan rencana rinci tata ruang lainnya) mencapai 23,26% dari target yang diharapkan 37,21%
		2,15	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan di perkotaan
		2,16	Mengendalikan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup
		2,17	Meningkatkan perlindungan, konservasi, rehabilitasi dan pemulihan SDA LH
		2,18	Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup
		2,19	Meningkatkan penataan dan kualitas pemeliharaan ruang terbuka hijau
Uraian Pencapaian			Cakupan pelayanan pengelolaan sampah 3R mencapai 27,28% dari target yang diharapkan 27,59%
			Tingkat pengelolaan RTH mencapai 90% dari target yang diharapkan 100%
		2,20	Meningkatkan Kesiapan, Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
Uraian Pencapaian			Cakupan pencegahan bencana, penanggulangan korban bencana dan pelayanan bencana kebakaran mencapai target 100%
		2,21	Meningkatkan daya dukung dan kualitas fasilitas dan infrastruktur penanggulangan bencana
Uraian Pencapaian			Cakupan penanganan daerah rawan bencana mencapai target 100%
		2,22	Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.
Uraian Pencapaian			Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana mencapai 96.12% dari target 50%
MISI	:	III	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Dalam Memperkuat Struktur Perekonomian Daerah.
Arah Kebijakan	3	3,1	Memperbaharui dan mensosialisasikan kebijakan penanaman modal dan perijinan-perijinan serta meningkatkan promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal
Uraian Pencapaian			Nilai investasi PMA mencapai 4,53 Trilyun dari target 2,47 Trilyun
			Nilai investasi PMDN mencapai 3,37 Trilyun dari target 2,97 Trilyun
			Laju pertumbuhan investasi PMA mencapai minus 0,39% dari target 3%
			Laju pertumbuhan investasi PMDN mencapai 46,28% dari target 3%
			Indeks Daya Beli mencapai 72.10 poin dari target 70.97 poin
		3,2	Meningkatkan lapangan dan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja
Uraian Pencapaian			Tingkat kesempatan kerja (TKK) mencapai 87,81% dari target 94,05%

		3,3	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan terhadap sumberdaya produktif
Uraian Pencapaian			Rasio Koperasi Aktif (Proporsi jumlah koperasi aktif terhadap total jumlah koperasi yang ada) mencapai 74,72% dari target 89,22%
			Rasio usaha mikro dan kecil (Rasio jumlah usaha mikro dan kecil terhadap jumlah usaha kecil dan menengah) mencapai 99,28% dari target 90%
		3,4	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian dan perkebunan
Uraian Pencapaian			Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB mencapai 10,01% dari target 7,84%
			Tingkat pembangunan kawasan pertanian mencapai 151% dari target 100%
			Tingkat pembangunan kawasan perkebunan mencapai 70,08%
		3,5	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil peternakan)
Uraian Pencapaian			Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB mencapai 10.01% dari target 2,05%
			Tingkat pembangunan kawasan peternakan mencapai 77,78%
		3,6	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha perikanan (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil perikanan)
Uraian Pencapaian			Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB sebesar 9,50 %. Melebihi target yang ditentukan 1,73%.
			Tingkat Konsumsi Ikan melebihi target yang ditetapkan, realisasi 37,21 kg/kapita/tahun target 26.50 kg/kapita/tahun
			Jumlah Produksi Perikanan mencapai 49.704,77 ton jauh dari target yang ditetapkan sebesar 526.262,26 ton. Disebabkan efek pandemi covid-19
			Nilai Produksi Perikanan mencapai 373,92 Milyard dari target yang ditetapkan 5.109 Milyard
		3,7	Mengembangkan keanekaragaman produk pangan
Uraian Pencapaian			Ketersediaan energi pada tahun 2020 mencapai 2.837 kkal/kap/hari dari target yang ditetapkan 2.150 kkal/kap/hari
			Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan protein pada tahun 2020 mencapai 205,60 gram/kap/hari dari yang ditargetkan 76 gram/kap/hari
			Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Skor PPH pada tahun 2020 mencapai 88,90% dari target yang ditetapkan 90.50%

		3,8	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha IKM (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil IKM)
Uraian Pencapaian			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB mencapai minus 5,83%. disebabkan efek pandemi covid-19
			Tingkat pembangunan kawasan sentra IKM baru mencapai 45% dari target 100%. disebabkan anggaran yang masih difokuskan pada penanganan efek pandemi covid-19
			Tingkat pengembangan kawasan sentra IKM lama mencapai target yang ditetapkan 100%
		3,9	Meningkatkan fasilitasi kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen
Uraian Pencapaian			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2020 mencapai minus 1,56%. disebabkan efek pandemi covid-19
			Rasio jumlah Pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) pada tahun 2020 mencapai 83% dari target 92%
			Jumlah Pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) yang dibangun pada tahun 2020 mencapai 0 pasar dari target 2 pasar, disebabkan anggaran yang masih difokuskan pada penanganan efek pandemi covid-19
			Tingkat pembangunan resi gudang pada tahun 2020 0%. Disebabkan OPD terkait tidak menganggarkan kembali pembangunan resi gudang, karena yang ada sudah cukup.
		3,10	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, produk, pemasaran pariwisata)
Uraian Pencapaian			Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 4.969 orang jauh dari target 15.048 disebabkan efek pandemi covid-19
			Laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara minus 43% dari target 5% yang ditetapkan
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2020 sebanyak 1.369.074 orang jauh dari target 37.428.902 disebabkan efek pandemi covid-19
			Laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2020 mencapai 111 % dari target yang ditetapkan 2%.
			Tingkat pengembangan kawasan strategis pariwisata pada tahun 2020 baru mencapai 66,67% dari target yang ditetapkan.
MISI	:	IV	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional.
Arah Kebijakan	4	4,1	Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah
Uraian Pencapaian			Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2020 mencapai target 100%
			Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2020 mencapai target 100%
			Tingkat penataan kelembagaan pemerintahan daerah pada tahun 2020 mencapai target 100%
		4,2	Meningkatkan pembinaan kualitas SDM dan disiplin kerja aparatur

Uraian Pencapaian			Untuk Diklat PIM II PIM III dan PIM IV tidak dilaksanakan karena anggaran direfocusing.
			Prajabatan ditargetkan sejumlah 422 CPNS, realisasi nya tidak ada, karena tidak ada penerimaan CPNS.
			Tingkat indisipliner PNS pada tahun 2020 ditargetkan tidak melebihi angka 68 kasus, realisasi nya tidak ada kasus indisipliner di Kabupaten Serang
	4,3		Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan anggaran SKPD
Uraian Pencapaian			Tingkat pemenuhan ketersediaan dokumen rencana lima tahunan dan tahunan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan SKPD mencapai 100%
	4,4		Melakukan data /informasi serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah
Uraian Pencapaian			Tingkat ketersediaan data/informasi pembangunan daerah untuk dokumen berikut mencapai 100%. Artinya dokumen tersebut di bawah ini "ADA".
			Kabupaten Serang Dalam Angka
			PDRB Kabupaten Serang
			IPM Kabupaten Serang
			Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk dokumen perencanaan berikut mencapai 100%. Artinya dokumen tersebut di bawah ini "ADA".
			RPJMD
			RKPD
			RKPD Perubahan
			KUA PPAS
			KUA PPAS Perubahan
			Tingkat ketersediaan dokumen evaluasi pembangunan daerah untuk dokumen evaluasi pembangunan daerah berikut mencapai 100%. Artinya dokumen tersebut di bawah ini "ADA".
			LKPj
			LKPj AMJ
			LPPD
			LAKIP
	4,5		Menata dan Memantapkan Sistem, Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan; peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawas; serta penyusunan kebijakan operasional dan teknis pengawasan tahunan
Uraian Pencapaian			Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah aktor yang melakukan pengawasan intern. Tingginya level kapabilitas APIP menunjukkan semakin baik pula APIP dalam menjalankan perannya sebagai pengawas intern. Tingkat Kapabilitas APIP pada tahun 2020 mencapai target yang ditetapkan pada level 3.
			Penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian

			maturitas minimal level 3. Kabupaten Serang pada tahun 2020, Tingkat Maturitas SPIP pada level 4 yang artinya sudah dianggap BAIK.
			Tingkat Kuantitas APIP baru mencapai 85,48%, artinya SDM yang memenuhi kriteria masih belum cukup.
		4,6	Menata dan memantapkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah
Uraian Pencapaian			Nilai kinerja pemerintah daerah pada tahun 2020 mendapat predikat SANGAT BAIK ("A")
		4,7	Menyusun rencana, menyediakan lahan serta membangun prasarana dan sarana Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang
Uraian Pencapaian			Zona Inti (Utama)
			Tingkat ketersediaan dokumen rencana pada tahun 2020 mencapai target sebesar 100%
			Tingkat ketersediaan lahan siap bangun pada tahun 2020 baru mencapai 50% dari target yang ditetapkan 100%, disebabkan pembebasan lahan belum selesai.
			Tingkat Pembangunan Infrastruktur Pendukung pada tahun 2020 melebihi target sebesar 65% dari target yang ditetapkan 30%
			Tingkat Pembangunan Gedung Perkantoran pada tahun 2020 0% disebabkan fokus pekerjaan untuk pembangunan infrastruktur pendukung lebih dahulu
		4,8	Meningkatkan Pendapatan dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
Uraian Pencapaian			Jumlah pendapatan daerah tercapai 2.965,62 Milyard melebihi target yang ditetapkan 2.465,83 Milyard
			Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2020 tercapai 760,92 Milyard melebihi target yang ditetapkan 682,67 Milyard
			Rasio PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2020 melebihi target sebesar 25.66% dari target yang ditetapkan 25.57%
			Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2020 mencapai target yang ditetapkan WTP
		4,9	Meningkatkan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Kearsipan Daerah
Uraian Pencapaian			Rasio jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku terhadap total jumlah SKPD yang ada pada tahun 2020 melebihi target sebesar 100% dari target yang ditetapkan 65%
		4,10	Meningkatkan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
		4,11	Meningkatkan Kerjasama Pengembangan, pengerahan dan fasilitasi penempatan pada wilayah Transmigrasi
Uraian Pencapaian			Cakupan pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2020 mencapai target sebesar 100%
		4,12	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi dan Kerjasama Pelayanan Informasi dengan Media Massa
Uraian Pencapaian			Terbangun dan teraksesnya media pelayanan informasi daerah pada tahun 2020 mencapai target sebesar 100%

			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan pada tahun 2022 melebihi target sebesar 100% dari target yang ditetapkan 50%
		4,13	Menjaga, Memelihara dan Memantapkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Uraian Pencapaian			Rasio jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang ditindaklanjuti terhadap total jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang terjadi pada tahun 2020 mencapai target sebesar 100%
			Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah pada tahun 2020 mencapai target sebesar 100%
		4,14	Meningkatkan Kesadaran Demokrasi dan Hukum yang Bertanggungjawab
Uraian Pencapaian			Cakupan pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan pada tahun 2020 mencapai target sebesar 100%
			Raperda yang disetujui DPRD tahun berkenan (Proporsi jumlah Raperda yang disetujui DPRD menjadi Perda terhadap jumlah Raperda yang diusulkan) pada tahun 2020 mencapai target sebesar 100%
MISI	:	V	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara
Arah Kebijakan	5	5,1	Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan pembinaan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat
Uraian Pencapaian			Tingkat penyelesaian konflik SARA pada tahun 2020 mencapai target sebesar 100%

Periode Perencanaan	:		2021 - 2026
MISI		I	Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
Arah Kebijakan	:	1,1	Pengembangan layanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang merata di seluruh unit Pendidikan
		1,2	Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
		1,3	Pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di tingkat pendidikan
		1,4	Penguatan kapasitas sumberdaya dan manajemen Pendidikan
		1,5	Pemberian beasiswa dan bantuan Pendidikan
		1,6	Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informatika
Uraian Pencapaian			Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2022 mencapai 7.78 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Serang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,78 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII
			Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 mencapai 12.78 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,78 tahun atau setara dengan Diploma I.
			Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan pada tahun 2022 melebihi target sebesar 49.33 poin dari target yang ditetapkan sebesar 48.72 poin
		1,7	Penguatan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan seni budaya, kearifan lokal dan nilai budaya tradisi di masyarakat sebagai potensi daerah
		1,8	Sinergitas seni budaya di kurikulum pendidikan dalam rangka keberlanjutan daya dukung potensi daerah
		1,9	Fasilitasi kegiatan seni budaya dan nilai tradisi masyarakat sampai dengan tingkat desa
		1,10	Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan berbasis seni budaya dan tradisi local
		1,11	Pembangunan sarana event seni budaya di tiap kecamatan
		1,12	Penyelenggaraan event seni budaya berskala nasional dan internasional
		1,13	Promosi potensi seni budaya lokal berbasis masyarakat

Uraian Pencapaian			Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional pada tahun 2022 melebihi target sebesar 50% dari target yang ditetapkan sebesar 48.28%
MISI		II	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional
Arah Kebijakan	:	2,1	Meningkatkan pembinaan pola hidup sehat masyarakat
		2,2	Memperbaiki status gizi masyarakat
		2,3	Mengendalikan penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang serta penyehatan lingkungan
		2,4	Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan
		2,5	Penerapan pola hidup sehat bagi keluarga
		2,6	Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
Uraian Pencapaian			Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2022 mencapai target sebesar 65.18 tahun. Artinya, secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 65 - 66 tahun
			Angka kematian ibu melebihi target sebesar 175 per 1000 kelahiran hidup dari target yang tidak boleh melebihi 200 per 1000 kelahiran hidup
			Angka kematian bayi melebihi target sebesar 6.80 per 1000 kelahiran hidup dari target yang tidak boleh melebihi 8.25 per 1000 kelahiran hidup
			Angka Prevelensi Stunting melebihi target sebesar 18.40% dari target sebesar 8.96%
		2,7	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan
		2,8	Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
		2,9	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
		2,10	Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan lansia
		2,11	Meningkatkan manajemen dan SDM kesehatan
		2,12	Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta terjangkau
		2,13	Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan SDM bidang kesehatan
		2,14	Penataan Manajemen RSUD
		2,15	Peningkatan promosi kesehatan dalam menghadapi kondisi pandemi.
		2,16	Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan sampai dengan desa
		2,17	Penambahan layanan Jamkesda

Uraian Pencapaian			Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi melebihi target sebesar 34% dari target sebesar 30%
			Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit pada tahun 2022 mencapai target 100 %
MISI		III	Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas
Arah Kebijakan	:	3,1	Meningkatkan pembinaan pola hidup sehat masyarakat
		3,2	Pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan daya dukung dan kualitas Jalan dan Jembatan yang menghubungkan kawasan strategis, sentra produksi dan pemasaran
		3,3	Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan dan sarana produksi lainnya di wilayah wilayah sentra produksi pertanian
		3,4	Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air bersih untuk mendukung kebutuhan masyarakat
		3,5	Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah
		3,6	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
		3,7	Penataan kawasan guna mendukung harmonisasi dan keberlanjutan wilayah
		3,8	Pengembangan peta digital ruang wilayah dalam mendukung kebijakan SATU DATA
Uraian Pencapaian			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur melebihi target sebesar 86.04% dari target sebesar 52.50%
			Cakupan aksesibilitas antar wilayah pada tahun 2022 mencapai target 100 %
			Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum pada tahun 2022 mencapai 81.60 %
			Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik melebihi target sebesar 80.06% dari target sebesar 72.09%
		3,8	Penyusunan rencana, menyediakan lahan serta membangun prasarana dan sarana Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang
		3,9	Pembangunan Rumah Layak Huni
		3,10	Penataan kawasan perumahan dan pemukiman
		3,11	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pemukiman
		3,12	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan perumahan dan pemukiman
Uraian Pencapaian			Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik pada tahun 2022 mencapai 58.62%

			Persentase kawasan kumuh melebihi target sebesar 0.14% dari target sebesar 0.18%.
			Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi pada tahun 2022 mencapai target 100 %
			Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik pada tahun 2022 mencapai target 100 %
	3,13		Penataan kawasan kumuh perkotaan
	3,14		Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
	3,15		Penguatan implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ
	3,16		Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ
	3,17		Peningkatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto
	3,18		Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang
	3,19		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	3,20		Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	3,21		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan serta ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan umum
	3,22		Meningkatkan ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan Laut
Uraian Pencapaian			Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2022 mencapai 79.59 % dari target yang ditetapkan 62.50 %
			Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan pada tahun 2022 mencapai 100 %
			Indeks Kinerja Sistem Irigasi pada tahun 2022 mencapai 19,84 poin melebihi target yang ditetapkan 10 poin
			Cakupan ketersediaan air baku pada tahun 2022 mencapai 100 %
	3,23		Pengembangan aplikasi pemantauan kondisi area pembuangan sampah dan limbah (kerjasama dengan kominfo)
	3,24		Pengawasan lingkungan sampai dengan tingkat kecamatan
	3,25		Peningkatan pemanfaatan ruang-ruang hijau di gedung pemerintahan dan sekolah
	3,26		Pengembangan kelompok atau komunitas berbasis desa atau kecamatan
	3,27		Peningkatan hasil olahan limbah bernilai ekonomi kerjasama dengan ekonomi kreatif
	3,28		Memelihara, Merehabilitasi dan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Persampahan

		3,29	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan di perkotaan
		3,30	Meningkatkan perlindungan, konservasi, rehabilitasi dan pemulihan SDA LH
		3,31	Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup
		3,32	Meningkatkan penataan dan kualitas pemeliharaan ruang terbuka hijau
Uraian Pencapaian			Indeks kualitas Air ada tahun 2022 mencapai 47.28 poin
			Indeks Kualitas udara pada tahun 2022 mencapai 80.26 poin
			Indeks tutupan Vegetasi pada tahun 2022 mencapai 70.41 poin melebihi target yang ditetapkan 69.99 poin
			Persentase Penanganan Sampah pada tahun 2022 mencapai 14,70%
			Persentase Rumah Layak Huni pada tahun 2022 mencapai 98,94% melebihi target yang ditetapkan 89.88%
MISI		IV	Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan
Arah Kebijakan	:	4,1	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan
		4,2	Pengembangan kawasan pertanian organik
		4,3	Optimalisasi lahan pertanian marginal dan pekarangan
		4,4	Pengembangan komoditas unggulan pertanian
		4,5	Pengembangan komoditas unggulan peternakan
		4,6	Penguatan gerakan pertanian organik, sertifikasi produk, dan kerjasama pemasaran Organik
		4,7	Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil pertanian)
Uraian Pencapaian			Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian tahun 2022 sebesar 1.44%
		4,8	Peningkatan produksi perikanan tangkap
		4,9	Pengembangan produksi dan nilai tambah perikanan budidaya
		4,10	Pengembangan olahan dan pemasaran produk perikanan
		4,11	Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
		4,12	Peingkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha perikanan (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil perikanan)
Uraian Pencapaian			Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan tahun 2022 sebesar 1.28%. Pertumbuhan sektor perikanan ini didasarkan atas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

		4,13	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi UKM dan Koperasi
		4,14	Pembinaan dan pengembangan usaha bagi wirusahawan baru
		4,15	Peningkatan Akses pasar UMKM dan koperasi ke daerah daerah yang potensial
		4,16	Fasilitasi Penerapan teknologi tepat guna
		4,17	Fasilitasi Kemitraan Usaha dengan perusahaan besar dan stakeholder potensial lainnya
Uraian Pencapaian			Proporsi peningkatan SHU koperasi tahun 2022 sebesar 2.84% melebihi target yang ditetapkan (2%)
			Pertumbuhan Wirausaha Baru di Kabupaten Serang tahun 2022 sebesar 24.86% melebihi dari target yang ditetapkan (10%).
		4,18	Pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas perdagangan yang semakin tersebar dan merata
		4,19	Peningkatan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di di seluruh wilayah
		4,20	Pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar
		4,21	Peningkatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		4,22	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
		4,23	Peningkatan fasilitasi kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen
Uraian Pencapaian			Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB pada tahun 2022 mencapai 5.62%. Melebihi target yang telah ditentukan 1,43%.
			Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB pada tahun 2022 mencapai 5.05%. Melebihi target yang telah ditentukan 3.58%.
		4,24	Roadmap pengembangan potensi sektor Industri
		4,25	Fasiltasi Kemitraan Usaha Industri Kecil dengan berbagai pihak potensial lainnya
		4,26	Pembinaan dan Pelatihan bagi pelaku industri kecil berbasis komoditas masyarakat
		4,27	Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha IKM (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil IKM)
Uraian Pencapaian			Pertumbuhan Nilai Investasi daerah :

			PMA sebesar 46,14%, pada tahun 2022 sebesar Rp.4,814,630,397,003,- dan untuk tahun 2021 Rp.3,294,458,833,363.
			PMDN sebesar -22,13%. Nilai negatif ini disebabkan realisasi capaian tahun 2022 lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2021. Capaian tahun 2022 sebesar Rp.1,900,984,600,000,- sedangkan tahun 2021 sebesar Rp.2,441,249,600,000,-
	4,28		Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Bidang Penanaman Modal
	4,29		Memperbaharui dan mensosialisasikan kebijakan penanaman modal dan perijinan-perijinan serta meningkatkan promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal
	4,30		Pengembangan Peta Digital Potensi Investasi
	4,31		Pengembangan Peta Digital Potensi Investasi
	4,32		Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal
	4,33		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	4,34		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang terintegrasi dengan SATU DATA Provinsi dan Nasional
	4,35		Pengembangan sinergitas BUMD dengan mitra strategis dalam upaya peningkatan PAD
Uraian Pencapaian			Kontribusi PAD Pariwisata pada tahun 2022 mencapai Rp.34.554.358.874,- atau 172.77%. Sektor pariwisata pantai di Kecamatan Anyer dan Cinangka menjadi wilayah yang paling besar menyumbang PAD. PAD sektor pariwisata diambil dari pajak dan retribusi hotel dan restoran, serta objek wisata dan aset milik Pemerintah Kabupaten Serang.
	4,36		Identifikasi obyek wisata di kawasan pariwisata budaya/religi, kawasan pariwisata alam dan kawasan-kawasan lain yang memiliki keunggulan karakter lokal belum dan sedang berkembang
	4,37		Pengembangan Desa Wisata dan Roadmap Pemulihan Destinasi Wisata
	4,38		Perbaikan sarana pendukung aksesibilitas interkoneksi antar obyek wisata yang bisa ditempuh dalam trip sehari
	4,39		Pengembangan Desa Wisata pintar berbasis karakter lokal didukung promosi e-commerce
	4,40		Peningkatan pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, produk, pemasaran pariwisata)
Uraian Pencapaian			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun 2022 mencapai 22,65% melebihi dari target yang ditetapkan 20%.

		Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (Pendidikan; Kesehatan; Modal Sosial & Permukiman); Indeks Ketahanan Ekonomi (Keragaman Produksi Masyarakat; Akses Pusat Perdagangan dan Pasar; Akses Logistik; Akses Perbankan dan Kredit; Keterbukaan Wilayah) dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan (Kualitas Lingkungan; Bencana Alam ; Tanggap Bencana). Persentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM mencapai 20,86% melebihi target yang ditetapkan 15,95%.
	4,41	Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul
	4,42	Fasilitasi pelatihan kerja sesuaidengan kebutuhan pasar dan mendukung ekonomi daerah
	4,43	Fasilitasi pemasaran dan bursa tenaga kerja
	4,44	Perlindungan ketenagakerjaan
	4,45	Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja
	4,46	Penyediaan job training
	4,47	Standarisasi sarana prasarana balai latihan kerja
	4,48	Fasilitasi pendampingan dan konsultasi ketenagakerjaan
	4,49	Peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja
	4,50	Peningkatan Kerjasama Pengembangan, pengerahan dan fasilitasi penempatan pada wilayah Transmigrasi
	4,51	Optimalisasi peran lembaga desa dalam pembangunan
	4,52	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
	4,53	Penguatan kapasitas pemerintahan desa
	4,54	Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa
	4,55	Fasilitasi penyediaan sarana prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa
	4,56	Sinergitas program pemerintah dengan desa
Uraian Pencapaian		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Serang tahun 2022 meningkat sebesar 5,04 persen, dari target 2,97 persen.
		Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi di Kabupaten Serang mencapai 7,56 %, yang artinya masuk kedalam kategori Inflasi Sedang, yaitu Inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian di Kabupaten Serang.

			Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2022 di Kabupaten Serang terdapat 10,61 persen angkatan kerja yang berstatus sebagai pengangguran. Atau dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 10-11 orang penganggur (pencari kerja).
			Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Serang pada periode tahun 2017-2022 cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021 akibat pandemi Covid-19, tetapi pada tahun 2022, persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 4,96 persen (75,45 ribu orang)
			Indeks Gini Rasio merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Capaian Nilai Indeks Gini Rasio sebesar 0.284 % melebihi target yang ditentukan 0,281 %.
	4,57		Pengembangan lumbung pangan desa
	4,58		Peningkatan distribusi pangan
	4,59		Peningkatan ketersediaan pangan
	4,60		Pengembangan olahan pangan berbasis sumberdaya lokal
	4,61		Peningkatan keamanan pangan
	4,62		Mengembangkan keanekaragaman produk pangan
Uraian Pencapaian			Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Perwujudan ketahanan pangan dicapai melalui 4 pilar yaitu: (1) Ketersediaan pangan (produksi dan import); (2) Cadangan pangan; (3) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan (4) Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan terhadap penyediaan pangan tersebut. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Serang selalu menunjukkan tren positif, pada tahun 2022 mencapai 78,63%, melebihi target yang telah ditentukan (77,15%)
	4,63		Pengembangan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan
	4,64		Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil

	4,65	Pemberian bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan serta terdampak krisis (contoh pandemi)
	4,66	Pemberdayaan keluarga miskin melalui pelatihan life skill dan economic skill
	4,67	Pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga
	4,68	Penguatan Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
	4,69	Penguatan Penanganan Korban Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
Uraian Pencapaian		PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan(secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Persentase PMKS yang mendapatkan program pelayanan sosial pada tahun 2022 melebihi target yang ditentukan (101.92%).
	4,70	Pemberdayaan perempuan di setiap kegiatan pembangunan
	4,71	Pelindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan
	4,72	Penyediaan pusat pendampingan dan konsultasi bagi perempuan dan anak
Uraian Pencapaian		Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Serang menunjukkan trend positif yang selalu naik setiap tahunnya. Tahun 2022 mencapai 91.98 poin.
	4,73	Penguatan dan Penyebarluasan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana
	4,74	Fasilitasi pendampingan tenaga penyuluh KB di desa
	4,75	Fasilitasi alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB)
	4,76	Penyediaan layanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan konseling
	4,77	Peningkatan pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB
Uraian Pencapaian		Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking pada tahun 2022 sebesar 39,86 %, masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 60%. Hal ini disebabkan masih tertutupnya korban kekerasan, khususnya keluarga korban, menjadi kendala penanganan kasus-kasus

			kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu lingkungan korban cenderung menutup akses, sehingga kasus-kasus tersebut rentan terulang kembali.
			Total Fertility Rate (TFR) adalah indikator demografis standar yang digunakan secara internasional untuk memperkirakan jumlah rata-rata anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa suburnya (yaitu usia 15-49), berdasarkan tren kelahiran saat ini. Pada tahun 2022. Total Fertility Rate di Kabupaten Serang mencapai 2,15 %. Melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu tidak melebihi 2,26 %.
MISI		V	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
Arah Kebijakan	:	5,1	Evaluasi terhadap peta jalan reformasi birokrasi
		5,2	Perumusan kebijakan percepatan reformasi birokrasi
		5,3	Peningkatan koordinasi kelembagaan antar eksekutif dan legislative
		5,4	Penguatan tugas-tugas kewilayahan
		5,5	Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan
		5,6	Penataan dan penguatan organisasi
		5,7	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah
Uraian Pencapaian			Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Pada tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Serang pada level CC, yang artinya cukup (memadai) pada nilai 50< - <60. Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
		5,8	Penetapan IKU Pemerintah Daerah berdasarkan target-target RPJMD
		5,9	Penetapan IKU OPD berdasarkan target-target Renstra
		5,10	Pelaksanaan program kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan
		5,11	Pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan
		5,12	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan

Uraian Pencapaian		Opini BPK di tahun 2022 adalah WTP. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
		Nilai Dokumen LPPD merupakan dokumen laporan yang menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, yang digambarkan melalui capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Nilai Dokumen LPPD Kabupaten Serang tahun 2022 mencapai skor 3,41.
		Nilai SAKIP Kabupaten Serang tahun 2022 mencapai nilai BB. Kategori BB dengan nilai absolut 70-80 memiliki intepretasi sangat baik. Yang mana sudah terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
		Pada tahun 2022, ada 3 OPD pelayanan yang telah melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK. Meskipun didalam target RPJMD tahun berkenaan, belum ditargetkan.
	5,13	Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja dan keuangan
	5,14	Menata kelembagaan dan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
	5,15	peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawas internal pemerintah
	5,16	Penyusunan kebijakan operasional dan teknis pengawasan tahunan
Uraian Pencapaian		Penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3. Kabupaten Serang pada tahun 2022, Tingkat Maturitas SPIP pada level 3,26 yang artinya sudah dianggap BAIK.

		5,17	Peningkatan Pendapatan dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel
Uraian Pencapaian			Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Serang melonjak cukup drastis sampai dengan 883.93%. Hal ini disebabkan diturunkannya target yang ada di dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, mengingat pada tahun tersebut masih adanya pandemi covid-19.
		5,18	Penguatan system Perencanaan Pembangunan Daerah yang komprehensif dan integratif, didukung oleh kapasitas perencana yang handal serta data dan informasi yang tepat dan terarah
		5,19	Optimalisasi kegiatan koordinasi dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
		5,20	Peningkatan kreasi dan inovasi daerah
Uraian Pencapaian			Konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan didalam dokumen RKPD, semuanya sudah tercover didalam DPA tahun berjalan.
			Capaian kinerja kegiatan perangkat daerah sudah sesuai dengan yang direncanakan, program prioritas pembangunan berjalan dengan baik disertai pemenuhan anggaran yang mencukupi. Sehingga output dari program kegiatan dimaksud berjalan sesuai yang direncanakan dan output nya tercapai.
			Indek Inovasi Daerah sudah masuk kedalam kategori "INOVATIF". Hal ini merupakan cermin keberhasilan Pemerintah Kabupaten Serang, didalam perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh/himpunan inovasi daerah yang telah dilakukan, sudah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
			Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan pada tahun 2022 mencapai target (100%). Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Komunikasi Informasi Statistik & Persandian, sudah mempublikasikan data-data sektoral Perangkat Daerah. Data-data tersebut diperoleh dari Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Serang maupun data-data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, yang diupload kedalam situs serangkab.go.id
		5,21	Pemberian reward and punishment di jajaran birokrasi
		5,22	Peningkatan kualitas SDM, disiplin kerja dan kesejahteraan aparatur
Uraian Pencapaian			Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik melebihi target yang ditentukan (105.02 %). Hal ini menunjukkan aplikasi SipKerja sebagai tolok ukur kehadiran dan kinerja pegawai di

			lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, sudah berjalan dengan baik, sebagai pedoman didalam memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
			Indikator Cakupan standar kompetensi pegawai juga melebihi target yang ditentukan (105.62 %). Angka tersebut sebagai imbas dari alokasi kegiatan-kegiatan terkait bimbingan teknis yang sudah dijalankan.
		5,23	Penyiapan roadmap dan masterplan digitalisasi informasi public
		5,24	Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu big data
		5,25	Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika
		5,26	Penguatan jejaring komunikasi informasi dan persandian daerah
		5,27	Penguatan intensitas komunikasi melalui media komunikasi publik yang efektif
		5,28	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi dan Kerjasama Pelayanan Informasi dengan Media Massa
Uraian Pencapaian			Pada tahun 2022, Persentase Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID) Kabupaten Serang mencapai 93.50%. Hal ini menunjukkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang sudah paham akan pentingnya Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
			Indeks Kematangan Penerapan SPBE pada tahun 2022 sebesar 2,64 poin. Nilai ini masuk kedalam angka 2,6 - < 3,5 dan masuk didalam Predikat "BAIK".
			Indeks KAMI pada tahun 2022 melebihi target yang sudah ditetapkan (153.33 %). Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di Pemerintah Kabupaten Serang sudah berjalan dengan baik.
		5,29	Penyiapan roadmap dan masterplan digitalisasi layanan publik
		5,30	Pengembangan e-government
		5,31	Penetapan Tata Naskah Dinas Elektronik
		5,32	Pengembangan ekonomi digital (e-commerce)
		5,33	Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika
		5,34	Pengembangan aplikasi pendukung layanan publik, informasi, promosi potensi daerah, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya

		5,35	Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan public
		5,36	Inovasi pelayanan publik jemput bola
		5,37	Penguatan jejaring komunikasi informasi dan persandian daerah
		5,38	Peningkatan tertib administrasi arsip dan pelayanan public
		5,39	Peningkatan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		5,40	Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Layanan Perizinan
		5,41	Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Pelayanan Dasar bagi Pemerintah Daerah
		5,42	Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Layanan Pajak dan Retribusi Daerah
		5,43	Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Layanan Ketenagakerjaan
Uraian Pencapaian			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Serang pada tahun 2022 sebesar 72,49 poin, masuk kedalam kategori mutu pelayanan "B". Hal ini menunjukkan keberhasilan pelayanan kepada masyarakat yang ditunjukkan dari tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
			Persentase Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Serang yang sudah menerapkan dan mengelola arsip secara digital, sudah mencapai 100%. Hal ini memberikan keuntungan secara signifikan karena arsip-arsip yang masih bersifat penting dapat tersimpan dengan baik dan bisa diakses darimana aja, melalui jaringan internet.
			Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk sudah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
			Skor Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Serang pada tahun 2022 mencapai 124,07 % melebihi dari target yang ditetapkan,
			Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda di Kabupaten Serang pada tahun 2022 mencapai 120% melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini merupakan dampak keberhasilan dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan.
MISI		VI	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

Arah Kebijakan	:	6,1	Penerapan nilai-nilai agama yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut
Uraian Pencapaian			Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Serang Tahun 2022 sebesar 81,75 dalam kategori “SANGAT TINGGI”, yang mengindikasikan bahwa interaksi sosial antarumat beragama di Kabupaten Serang telah berlangsung secara baik dan berada dalam batas-batas jarak sosial yang wajar. Mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan kerukunan antarumat beragama, sebagaimana tercermin juga dalam sikap antarumat beragama yang bersedia menerima secara terbuka keberadaan pemeluk agama yang berbeda dalam ranah pergaulan sosial maupun profesi, meskipun sebatas pada dimensi publik atau formal dari pergaulan sosial
		6,2	Penguatan peran serta tokoh agama dalam menjalankan kehidupan beragama di masyarakat
Uraian Pencapaian			Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat pada tahun 2022 adalah nol kejadian. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Serang paham akan keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan sehingga dapat saling menerima, menghargai, dan membantu antarsesama.

2.5.2 Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

2.5.2 Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

A. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Kinerja Pemerintah Kabupaten Serang dari Evaluasi hasil RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJMD Tahun 2021-2026, dapat dilihat beberapa sektor faktor pendukung antara lain :

a. Angka Partisipasi Kasar PAUD

- 1) Adanya dorongan pemerintah cukup tinggi untuk melaksanakan program pendidikan yang dimulai dari anak usia dini.

b. Angka Partisipasi Murni Tingkat SMP

- 1) Memadukan program pendidikan di dalam sekolah dan di luar sekolah.
- 2) Program peningkatan manajemen, kualitas, dan keterjangkauan pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan keagamaan.

c. Persentase masyarakat miskin yang terakomodir dalam jaminan pelayanan kesehatan keluarga miskin

- 1) Efektifnya program pengembangan Desa Siaga dalam rangka percepatan Sustainable Development Goals.

d. Jumlah kasus yang terkait konflik keagamaan

- 1) Berhasilnya program pendidikan keagamaan yang ditanamkan sejak usia sekolah untuk menghasilkan masyarakat Kabupaten Serang yang memiliki pemahaman kualitas keagamaan.

e. Jumlah koperasi yang memiliki badan hukum yang aktif

- 1) Program kajian restrukturisasi koperasi di Kabupaten Serang. Kemudahan telah diberikan oleh Pemerintah mulai dari kemudahan pengurusan pendirian sampai dengan pemberian fasilitas.

f. Pertumbuhan Wira Usaha Baru

- 1) Berhasilnya upaya menyebarluaskan rencana dan hasil pembangunan Pemerintah Kabupaten Serang serta mempromosikan produk-produk unggulan pengusaha lokal (UKM) kepada masyarakat salah satunya melalui pameran.

g. Nilai investasi di Kabupaten Serang dari tahun lalu

- 1) Kemudahan perizinan masa transisi dari izin prinsip (SIPIPISE) ke NIB (OSS), dimana NIB wajib dan berlaku bagi semua investor.

h. Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan

- 1) Perwujudan menciptakan kondisi infrastruktur jalan dengan kondisi mantap merupakan prioritas penting Pemerintah Kabupaten Serang.

i. Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani

- 1) Dukungan program rumah layak huni untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh.

j. Persentase cakupan penanganan/pelayanan sampah

- 1) Optimalisasi retribusi sampah untuk meningkatkan PAD
- 2) Melakukan pembinaan dan sosialisasi kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat.

k. Peningkatan realisasi APBD dibandingkan tahun sebelumnya

- 1) Sektor perekonomian bidang perdagangan/jasa yang meningkat
- 2) Masih tingginya permintaan jasa konstruksi

l. Jumlah kasus yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat

- 1) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, TNI dan aparat pemerintah daerah terkait untuk

menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang efektif berjalan.

B. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Adapun Kinerja Pemerintah Kabupaten Serang dari Evaluasi hasil RPJMD Tahun 2016-2021 dan Tahun 2021-2026 dapat dilihat beberapa sektor faktor antara lain:

1. Angka Partisipasi Murni Tingkat SD

- a. Belum terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
- b. Belum meratanya tenaga pendidik dan kependidikan terutama di wilayah yang jauh dari perkotaan

2. Angka Partisipasi Murni Tingkat SMP

- a. Belum memadainya sarana dan prasarana SD di sejumlah sekolah sehingga mempengaruhi pelaksanaan proses belajar mengajar dan minimnya daya tampung.

3. Persentase masyarakat miskin yang terakomodir dalam jaminan pelayanan kesehatan keluarga miskin

- a. Nilai pencapaian Kabupaten Serang untuk pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin belum mengalami pemerataan

4. Jumlah koperasi yang memiliki badan hukum yang aktif

- a. Identifikasi koperasi yang belum terlaksana secara menyeluruh.

5. Jenis produk unggulan daerah

6. Nilai investasi di Kabupaten Serang dari tahun lalu

- a. Belum adanya peta potensi dan peluang investasi di Kabupaten Serang
- b. Kurangnya promosi investasi secara online yang berkesinambungan

7. Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan

8. Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani

- a. Penanganan kawasan kumuh masih bersifat parsial
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepedualian penataan kondisi lingkungannya

9. Persentase cakupan penanganan sampah

- a. Timbulan sampah dan sedimentasi di saluran drainase menambah permasalahan seperti banjir dan genangan air.

10. Jumlah sarana perhubungan yang berada dalam kondisi baik untuk melayani wilayah untuk jaringan jalan kabupaten.

11. Peningkatan realisasi APBD dibandingkan tahun sebelumnya

- a. Prioritas pagu anggaran (PPA) merupakan acuan pelaksanaan sub kegiatan yang akan diaakomodir didalam belanja APBD.

12. Jumlah kasus yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat

- a. Masih adanya celah hukum dan implementasinya yang menyebabkan peningkatan potensi Tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

13. Jumlah rancangan peraturan daerah baru yang diperlukan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

C. Rekomendasi Atas Laporan Evaluasi RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2005-2025

Berdasarkan dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2005-2025, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pembangunan pendidikan Kabupaten Serang dihadapkan pada tantangan untuk pemenuhan sumberdaya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pemerintah Kabupaten Serang harus mampu mengatasi beberapa tantangan diantaranya partisipasi pendidikan usia dini yang masih rendah, kuantitas dan kualitas guru masih terbatas yang ditunjukan kurang dari 50 persen guru memiliki sertifikat pendidik baik jenjang PAUD, SD maupun SMP. Pencapaian pembangunan pendidikan telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu didorong terutama dalam upaya: a) meningkatkan partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mempercepat wajib belajar 13 tahun, b) meningkatkan pengelolaan pendidikan termasuk tenaga pendidik pada jenjang PAUD, SD dan SMP serta pendidikan kesetaraan dan non formal, c) adopsi pembelajaran STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics*), dan d) pengembangan layanan pendidikan berbasis digital.
2. Tantangan pembangunan kesehatan Kabupaten Serang yang perlu diatasi adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta Angka Kesakitan yang masih tinggi. Selain itu, Kabupaten Serang menghadapi kekurangan gizi mikro dan

makro yang tercermin dan stunting masih tinggi 26,4 persen. Pencapaian pembangunan kesehatan telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, namun demikian upaya peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, Jarninan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan untuk penurutan stunting dan Pengembangan pelayanan kesehatan primer sampai tingkat desa dan kelurahan masih perlu mendapat perhatian.

3. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan pembangunan di Kabupaten Serang. Tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Serang pada Tahun 2022 mencapai 4,96 persen yang mencerminkan belum optimalnya pemerataan kesejahteraan ekonomi dan upaya penanganan kemiskinan yang belum terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan struktur permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan penggunaan data masih terfragmentasi dan belum termutakhirkan secara sistematis sehingga tingkat kesalahan sasaran masih cukup tinggi. Selanjutnya, pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia. Kebijakan RPJPD berikutnya diarahkan pada penuntasan kemiskinan, pengembangan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim, serta peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam angkatan kerja.
4. Meskipun terjadi pandemi COVID-19 sempat mempengaruhi sejumlah capaian indikator pembangunan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Serang mampu melakukan percepatan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Dalam menghadapi kondisi tersebut, telah dilakukan optimalisasi peningkatan kinerja, antara lain: 1) Pengendalian inflasi, 2) Pengelolaan dan Pengembangan Perdagangan, 3) Kualitas Produk Industri dan IKM,

- 4) Peran Koperasi Sebagai Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan, 5) Kualitas Produk UMKM, 6) Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 7) Produktivitas Pertanian dan Perikanan, 8) Pengembangan BUMD Kabupaten Serang. Pencapaian bidang ekonomi, telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, namun masih perlu didorong terutama dalam upaya:
- a. Industrialisasi meliputi hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi
 - b. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan.
 - c. Meningkatkan produktivitas UMKM dan Koperasi.
 - d. Pengembangan BUMD berdaya saing.
 - e. Peningkatan tenaga kerja produktif
 - f. Meningkatkan lembaga desa dan kapasitas desa dalam upaya menjadikan Desa Mandiri di wilayah Kabupaten Serang
5. Pelayanan Prasarana dan sarana dasar perkotaan di Kabupaten Serang masih belum optimal. Pelayanan pada transportasi perkotaan dihadapkan pada : ketersediaan kapasitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan sesuai standar belum memadai, ketersediaan, kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan belum memadai, pengembangan permukiman yang layak huni yang belum optimal serta pengelolaan sistem transportasi umum belum terintegrasi secara keseluruhan dan belum memenuhi sepenuhnya standar keselamatan. Namun secara umum pencapaian bidang sarana dan prasarana perkotaan telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, namun masih perlu didorong terutama dalam upaya: 1) Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan sesuai standar, 2) Mengembangkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, 3). Mengembangkan sistem transportasi angkutan umum terintegrasi dan pengembangan transportasi ramah lingkungan.
6. Kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan risiko bencana di Kabupaten Serang dihadapkan beberapa tantangan antara lain: 1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup belum optimal. 2) Perubahan iklim (pemanasan global) dan alih

- fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan yang mengakibatkan turunnya daya dukung lingkungan hidup. 3) Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum memadai. 4) Ketersediaan dokumen rencana tata ruang belum memadai dan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal. 5) Pencegahan dan penanggulangan bencana belum optimal. Pencapaian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat dari yang ditargetkan, namun masih perlu didorong terutama dalam upaya:
- a. Mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan (*sustainable lifestyle*).
 - b. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dimulai dari rumah tangga.
 - c. Meningkatkan luasan kawasan konservasi perairan dan daratan setidaknya 30 persen dari total luas wilayah.
 - d. Pembangunan sistem peringatan dini multi ancaman bencana terpadu melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi.
7. Tata kelola diperlukan dalam rangka mewujudkan kerangka kerja pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Kendala utama yang seringkali dihadapi diantaranya pemerataan pelayanan publik yang prima belum terwujud disertai belum optimalnya upaya pencegahan korupsi. Hal tersebut ditandai dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kabupaten Serang baru mencapai 72,49 persen dan Indeks Reformasi Birokrasi masih berada pada kategori CC. Tata kelola pemerintahan ke depan masih perlu didorong terutama dalam upaya:
- a. Meningkatkan kinerja birokrasi dan menerapkan manajemen talenta aparatur sipil negara di seluruh instansi pemerintah daerah.
 - b. Memperkuat upaya pencegahan korupsi.
 - c. Meningkatkan layanan publik dan digitalisasi layanan Pemerintah Daerah.
8. Hal-hal lainnya yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan ke depan adalah sebagai berikut:
- a. Perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta

- keberlanjutan target indikator capaian melalui cascading sasaran dan indikator terhadap perencanaan pembangunan yang bersifat signifikan pada masing-masing strategi dan arah kebijakan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah;
- b. Perlunya perhatian khusus terhadap ketersediaan dan akuntabilitas data-data sektoral yang akan digunakan dalam analisis proyeksi kinerja. Data-data sektoral yang mutakhir dan relevan akan sangat mempengaruhi kualitas perencanaan jangka panjang daerah;
 - c. Perlunya penguatan pola kolaborasi dan kerjasama dengan akademisi dan praktisi pembangunan untuk mendapatkan masukan inovatif dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan per lima tahun 2025-2045

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara menyeluruh melalui pelayanan pendidikan formal dan informal di dukung oleh pelayanan kesehatan dan perumahan untuk menjadikan manusia yang cerdas, sehat dan peduli lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan rencana pembangunan yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan terserbut. Serangkaian pembangunan menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek yang ada di setiap proses pembangunan. Maka dari itu, pengetahuan akan tren dan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Perkiraan besaran, komposisi dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah.

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi dasar pemerintah dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan. Data kependudukan diantaranya jumlah penduduk, persebaran penduduk dan penduduk menurut kelompok umur dapat dibutuhkan dalam menyusun program pembangunan. Dalam pembangunan kedepannya, perencana dan pengambil kebijakan sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke

tahun, namun dapat disayangkan sumber data kependudukan belum cukup sempurna pencatatannya sehingga datanya belum dapat digunakan secara maksimal.

Rencana pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan susunan menurut kelompok umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut. Data yang diperlukan tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu rencana disusun melainkan juga informasi-informasi sebelumnya dan informasi perkiraan pada waktu yang akan datang. Data penduduk pada waktu yang lalu dapat diperoleh dari hasil survei dan sensus sedangkan untuk mengetahui gambaran data kependudukan di masa yang akan datang diperlukan prediksi.

Perencana dan pengambil kebijakan harus mampu memprediksi suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan. Prediksi dalam perencanaan yang dimaksud salah satunya terkait dengan data kependudukan yaitu proyeksi penduduk dimana proyeksi ini dapat memetakan kebutuhan-kebutuhan mendatang seperti sarana diantaranya perumahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, rekreasi dan kebudayaan, pemerintah dan pelayanan umum serta untuk prasarana diantaranya air bersih, energi listrik, telekomunikasi, drainase dan limbah, dan prasarana diantaranya air bersih, energi listrik, telekomunikasi, drainase dan limbah, dan persampahan yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik dua puluh tahunan, lima tahunan dan satu tahun.

A. Perkembangan Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Manusia sebagai spesies yang paling dominan di bumi memiliki jumlah yang paling banyak, untuk itu jumlah penduduk umumnya meningkat atau cenderung stabil. Namun hal ini bukan berarti jumlah penduduk tidak bisa menurun. Pembangunan di suatu wilayah akan berhasil apabila memiliki penduduk yang menjadi modal dasar pembangunan, kondisinya kondusif dan konstruktif, tentunya tidak hanya dari sisi jumlahnya yang mencukupi struktur dan persebarannya yang menguntungkan, tetapi kualitasnya pun harus memadai. Jumlah penduduk yang besar jika dengan kualitas yang rendah tidak akan mampu memberi dukungan positif pada pembangunan, yang terjadi justru akan menjadi beban

pembangunan. Bahkan dapat memberikan dampak lainnya seperti hasil dari pembangunan sebelumnya yang telah tercapai akan sirna apabila jumlah penduduk yang besar pertumbuhannya dan tidak terkendali. Maka itu, jumlah penduduk harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang kompeten.

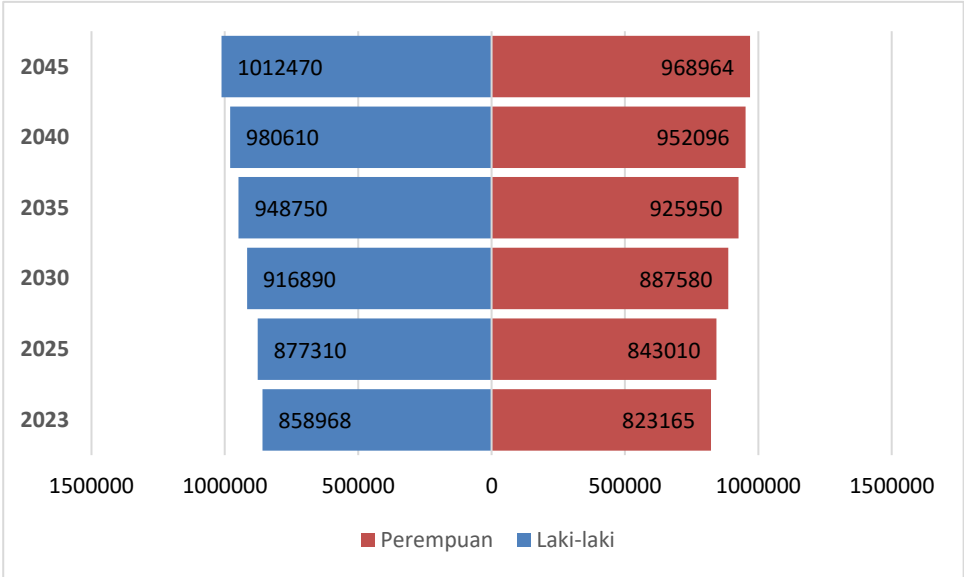
Proyeksi penduduk merupakan jumlah penduduk berdasarkan perhitungan ilmiah menggunakan metode-metode tertentu dengan asumsi-asumsi kelahiran, kematian dan migrasi. Indonesia sendiri telah mengeluarkan Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2020-2050 berdasarkan masing-masing Provinsi. Dari hasil olahan perhitungan yang dilakukan sampai ke tingkat Kabupaten/Kota, Kabupaten Serang mengalami peningkatan jumlah penduduk 15.18% dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045 (Tabel 2.6.1.)

Tabel 2.6.1
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Serang

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	858.968	877.310	916.890	948.750	980.610	1.012.470
Perempuan	823.165	843.010	887.720	925.950	952.096	968.964
Rasio	104,34	104,07	103,3	102,46	102,99	104,49
Jumlah Penduduk	1.682.133	1.720.320	1.804.470	1.874.700	1.932.706	1.981.434

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035, Kabupaten Serang dalam Angka 2024, Hasil Olahan 2024

Grafik. 2.6. 1
Piramida Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Serang



Sumber: Hasil Olahan 2024

Jumlah penduduk laki-laki dari tahun 2025 sampai dengan 2045 lebih banyak dari pada jumlah penduduk Perempuan. Data pada grafik di atas dijelaskan bahwa proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dengan proporsi tertinggi yaitu berjenis kelamin laki-laki, namun angka rasio jenis kelamin cukup fluktuatif dalam kurun waktu 20 tahun kedepan dimana dari tahun 2025 hingga tahun 2035 mengalami penurunan sedangkan tahun 2040 hingga 2045 mengalami kenaikan menjadi 104,49.

B. Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk yang biasa disebut persebaran penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebar merata atau tidak. Distribusi dapat diketahui melalui perbandingan kenaikan jumlah penduduk di masing-masing wilayah merata atau tidak dan distribusi ini dapat melihat kepadatan penduduk yang akan terjadi.

Tabel 2.6.2
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Serang Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cinangka	62.652	65.529	72.643	79.669	86.629	88.813
Padarincang	71.652	72.921	75.496	77.328	78.528	80.508
Ciomas	44.201	44.983	46.568	47.695	48.433	49.654
Pabuaran	44.402	45.187	46.780	47.912	48.652	49.879
Gunungsari	24.675	25.254	26.517	27.546	28.371	29.086
Baros	61.335	62.032	63.225	64.008	64.247	65.867
Petir	65.250	66.509	69.127	70.037	70.366	72.140
Tunjung Teja	49.362	49.680	50.024	50.618	50.775	52.055
Cikeusal	80.223	80.543	80.945	81.862	82.084	84.154
Pamarayan	62.903	63.856	65.608	66.351	66.531	68.208
Bandung	40.721	41.708	43.623	44.117	44.236	45.351
Jawilan	61.520	61.895	62.269	63.182	63.549	65.151
Kopo	54.757	55.151	55.633	56.454	56.789	58.221
Cikande	115.713	118.191	123.474	125.473	126.439	129.627
Kibin	61.348	62.661	65.465	67.664	69.339	71.087
Kragilan	81.814	83.565	87.304	90.236	92.471	94.802
Waringinkurung	50.876	51.705	53.346	54.452	55.107	56.496
Mancak	49.378	50.183	51.775	52.848	53.483	54.831
Anyar	60.626	61.615	63.574	64.895	65.679	67.335
Bojonegara	52.714	53.887	56.414	58.429	60.000	61.513
Pulo Ampel	40.607	41.535	43.548	45.171	46.453	47.624
Kramatwatu	103.300	106.746	114.814	122.174	128.897	132.147
Ciruas	85.547	89.510	99.321	109.031	118.669	121.661
Pontang	49.688	52.203	58.523	64.909	71.378	73.178
Lebak Wangi	40.584	42.268	46.362	50.310	54.128	55.493
Carenang	41.032	42.585	46.302	49.807	53.119	54.458
Binuang	32.860	33.017	33.470	35.130	36.567	37.489
Tirtayasa	48.758	51.513	57.736	60.599	63.079	64.669
Tanara	43.635	43.888	44.583	46.793	48.708	49.936

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035, Kabupaten Serang dalam Angka 2024, Hasil Olahan 2024

Dari Tabel 2.6.2 di atas, pada 3 (tiga) periode pertama Kecamatan Cikande menjadi Kecamatan dengan Jumlah Penduduk terbesar, namun ada perubahan di 2 (dua) periode terakhir dimana Kecamatan Kramatwatu menjadi Kecamatan dengan Jumlah Penduduk terbesar. Untuk kecamatan dengan Jumlah Penduduk terkecil di Kabupaten Serang berada di Kecamatan Gunungsari yang diproyeksikan terjadi selama 20 (dua puluh) tahun kedepan. Kepadatan penduduk dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Selain itu, kepadatan penduduk menjadi indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat pemukiman, pusat kemajuan daerah dan pusat aktivitas sosial ekonomi.

Dalam hal ini, luas wilayah tidak mencukupi kebutuhan penduduk akan ruang di suatu pemukiman dapat menimbulkan kepadatan penduduk yang tidak terkendali dimana dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan seperti semakin terbatasnya sumber daya pokok, tidak tercukupinya fasilitas sosial dan kesehatan, munculnya kawasan-kawasan kumuh, kota dengan rumah-rumah yang tidak layak huni, turunnya kualitas lingkungan, tidak tercukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada dan terganggunya stabilitas keamanan.

Tabel 2.6.3
Perkiraan Kepadatan Penduduk Kabupaten Serang Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Luas (Km2)	Kepadatan Penduduk	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cinangka	111,47	562,05	587,86	651,68	714,71	777,15	796,74
Padarincang	99,12	722,88	735,68	761,66	780,15	792,25	812,23
Ciomas	48,53	910,80	926,91	959,57	982,79	998,00	1023,16
Pabuaran	79,14	561,06	570,98	591,10	605,41	614,76	630,26
Gunungsari	48,6	507,72	519,63	545,62	566,79	583,77	598,48
Baros	44,07	1391,76	1407,58	1434,65	1452,42	1457,84	1494,60
Petir	46,96	1389,48	1416,29	1472,04	1491,42	1498,42	1536,20
Tunjung Teja	39,52	1249,04	1257,09	1265,79	1280,82	1284,79	1317,19
Cikeusal	88,25	909,04	912,67	917,23	927,61	930,13	953,58
Pamarayan	41,92	1500,55	1523,28	1565,08	1582,80	1587,09	1627,11
Bandung	25,18	1617,20	1656,39	1732,46	1752,07	1756,79	1801,08

Jawilan	38,95	1579,46	1589,09	1598,69	1622,13	1631,55	1672,69
Kopo	44,69	1225,26	1234,08	1244,86	1263,24	1270,73	1302,77
Cikande	50,53	2289,99	2339,03	2443,58	2483,14	2502,26	2565,34
Kibin	33,51	1830,74	1869,92	1953,60	2019,22	2069,20	2121,37
Kragilan	36,33	2251,97	2300,17	2403,08	2483,79	2545,31	2609,48
Waringinkurung	51,29	991,93	1008,09	1040,09	1061,65	1074,42	1101,51
Mancak	74,03	667,00	677,87	699,38	713,87	722,45	740,67
Anyar	56,81	1067,17	1084,58	1119,06	1142,32	1156,12	1185,27
Bojonegara	30,3	1739,74	1778,45	1861,85	1928,35	1980,20	2030,12
Pulo Ampel	32,56	1247,14	1275,64	1337,47	1387,32	1426,69	1462,66
Kramatwatu	48,59	2125,95	2196,87	2362,91	2514,39	2652,75	2719,63
Ciruas	34,49	2480,34	2595,24	2879,70	3161,24	3440,68	3527,43
Pontang	58,09	855,36	898,66	1007,45	1117,39	1228,75	1259,73
Lebak Wangi	31,71	1279,85	1332,95	1462,06	1586,57	1706,97	1750,01
Carenang	32,8	1250,98	1298,32	1411,65	1518,51	1619,48	1660,31
Binuang	26,17	1255,64	1261,64	1278,96	1342,38	1397,29	1432,52
Tirtayasa	64,46	756,41	799,15	895,69	940,10	978,58	1003,25
Tanara	49,3	885,09	890,22	904,31	949,15	987,99	1012,90

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035, Kabupaten Serang dalam Angka 2024, Hasil Olahan 2024

Dari hasil olahan pada Tabel 2.6.3. di atas, perkiraan kepadatan penduduk yang akan terjadi selama 20 (dua puluh) tahun kedepan di Kabupaten Serang dimana kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Gunungsari sedangkan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Ciruas yang mencapai 3527,43 Km² per Jiwa di Tahun 2024.

C. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi dari pada penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia produktif jauh melebihi penduduk tidak produktif ini akan berpengaruh pada rasio ketergantungan yang akan menimbulkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk yang produktif terhadap penduduk tidak produktif mencapai titik terendah. Bonus demografi dapat bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merupakan bagian dari instrumen yang sangat baik dalam mengurangi kemiskinan. Karena ketika suatu kondisi tersebut terjadi, beban ketergantungan sangat rendah, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang apabila semuanya terserap dalam kesempatan kerja yang tersedia maka akan meningkatkan total output yang diperoleh.

Dengan semua penduduk usia kerja bekerja, maka akan terjadi akumulasi yang lebih besar karena semua tenaga kerja yang bekerja

mampu mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang artinya penduduk usia produktif yang bekerja memiliki hubungan positif dengan GDP per kapita.

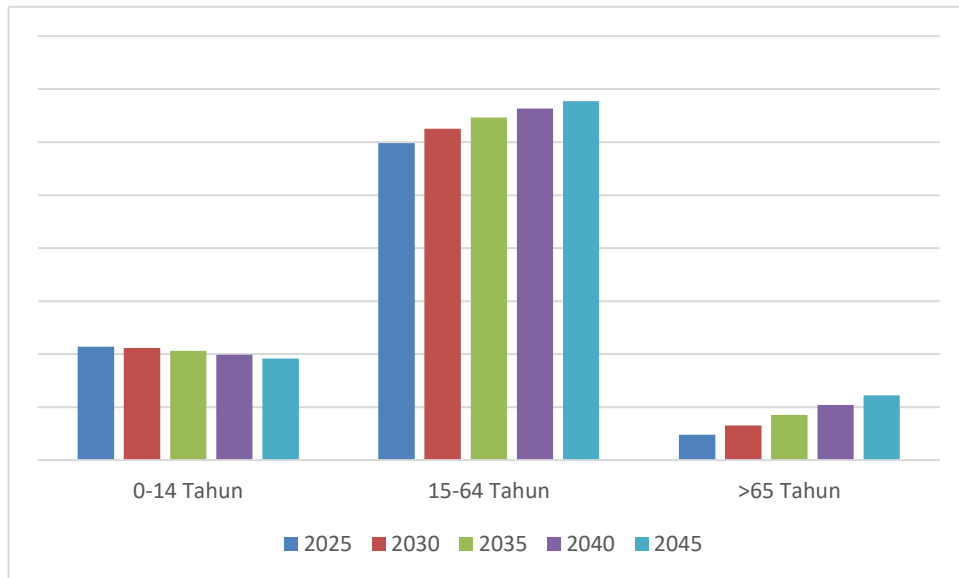
Namun ketika bertambahnya penduduk bisa menciptakan kondisi buruk jika tidak dikelola dengan baik seperti penduduk usia kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan dapat meningkatkan tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas tingkat kemiskinan dan bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi biasanya hanya terjadi satu atau dua dekade saja, karena dengan berjalannya waktu penduduk lansia akan terus bertambah, sehingga rasio ketergantungan akan meningkat kembali. Dalam memanfaatkan bonus demografi dan menghindari dampak negatif dari bonus demografi maka kualitas sumber daya manusia perlu diimbangi dengan kualitas yang memadai seperti bukan hanya terkait dengan kapasitas otak namun juga kapasitas fisik dari sumber daya manusia. Perencanaan dan Kebijakan sosial ekonomi yang tepat akan menjadi hal yang fundamental untuk mengoptimalkan dampak dari bonus demografi yang terjadi.

Tabel 2.6.4
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Serang

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	424.590	427.930	423.200	411.830	398.168	382.766
15-64 Tahun	1.173.218	1.196.080	1.250.700	1.292.440	1.326.540	1.354.841
>65 Tahun	84.325	96.310	130.570	170.430	207.998	243.826
Angka Ketergantungan	43,37	43,82	44,27	45,05	45,69	46,24

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035, Kabupaten Serang dalam Angka 2024, Hasil Olahan 2024

Grafik. 2.6. 2
Diagram Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Serang



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035, Hasil Olahan 2024

Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa Kabupaten Serang mengalami bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif meningkat dari periode awal RPJPD hingga periode akhir RPJPD. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif mencapai 13,27% dari Tahun 2025 sebesar 1.196.080 Orang menjadi 1.354.841 Orang di Tahun 2045. Dilihat dari Tabel 2.6.5 angka ketergantungan di Kabupaten Serang mengalami peningkatan, dimana di Tahun 2045 mencapai 46,24 yang artinya setiap 100 Orang penduduk usia produktif memiliki beban tanggungan sebanyak 46 Orang yang belum memasuki usia produktif dan sudah tidak berproduktif lagi.

D. Penduduk Usia Lanjut (Tua)

Fenomena demografi bukan hanya memberikan manfaat dalam pembangunan melainkan menjadi tantangan. Penduduk usia tua menjadi bagian dari fenomena demografi yang terjadi yang dimana harus menjadi perhatian bersama. Dari Tabel 2.6.4 dijelaskan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk usia lanjut di Kabupaten Serang dengan jumlah mencapai 243.826 Orang di Tahun 2045. Hampir setiap negara di dunia saat ini memasuki masa penuaan penduduk dimana penduduk usia tua mengalami penambahan yang sangat drastis. Penduduk usia tua bertambah merupakan dampak dari keberhasilan pembangunan utamanya ketika pembangunan kesehatan mampu meningkatkan harapan hidup serta menurunkan angka fertilitas. Namun bertambahnya

penduduk usia tua juga memberikan tantangan.

Keberadaan penduduk usia tua dengan segala pengalaman dapat dimanfaatkan menjadi aset dalam menggerakkan pembangunan yang dapat berperan sebagai agen perubahan di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Agar tetap dapat berkontribusi dalam pembangunan, penduduk usia tua harus tetap sehat dan aktif karena jika tidak peningkatan jumlah lansia yang menciptakan beban demografi atas pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk usia tua akan meningkatkan tuntutan ekonomi dan sosial. Proses penuaan menyebabkan beban ketergantungan orang tua meningkat, otomatis tabungan menurun. Angkatan kerja kemudian menyusut sehingga rasio modal menjadi tenaga kerja naik dan investasi turun.

Penduduk usia tua digambarkan sebagai kelompok penduduk yang rentan karena seiring bertambahnya usia yang secara alamiah mengalami penurunan fungsi fisiologis dan kognitif sehingga rentan terhadap masalah kesehatan. Selain itu, tantangan lainnya terhadap penduduk usia tua adalah kemandirian finansial. Dengan meningkatnya persentase penduduk usia tua, maka angka beban ketergantungan penduduk kelompok usia tidak produktif terhadap kelompok usia produktif juga meningkat. Penduduk usia tua umumnya sudah tidak produktif dan tidak memiliki kemandirian secara ekonomi dimana tidak semua memiliki jaminan sosial, dana pensiun atau bahkan pendanaan lainnya yang mampu menopang kebutuhan mereka. Pemerintah memiliki tugas dalam menetapkan langkah untuk memastikan penduduk usia tua agar bisa tetap mandiri, sejahtera dan bermartabat.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Stranas Kelanjutusiaan) memiliki beberapa point yang menjadi target pembangunan daerah terkait kelanjutusiaan antara lain: (1) peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu; (2) peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lanjut usia; (3) pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia; (4) penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan; dan (5) penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak lanjut usia. Dari tabel 2.6.4, Kabupaten Serang mengalami peningkatan jumlah penduduk usia tua pada Tahun 2045. Meningkatnya jumlah penduduk usia tua menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Serang untuk dapat memanfaatkan keahlian dan keterampilan dari penduduk usia tua tersebut yang

kedepannya akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang.

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per lima tahun 2025-2045

Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, khususnya di Kabupaten Serang, menunjukkan peningkatan kebutuhan yang signifikan terhadap pelayanan publik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur pelayanan publik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap individu berhak atas kesejahteraan lahir dan batin, tempat tinggal yang layak, lingkungan hidup yang sehat, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Kabupaten Serang perlu melakukan identifikasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik selama 20 tahun ke depan dalam kerangka RPJPD Tahun 2025-2045, yang akan dirinci setiap lima tahun.

Proyeksi kebutuhan ini akan disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga terkait, dengan salah satu acuan utama adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Dalam subbab ini akan diuraikan analisa kebutuhan sarana pelayanan yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Serang. Proyeksi kebutuhan sarana pelayanan ini akan diuraikan sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu selama 20 tahun.

A. Rumah/Tempat tinggal dan Permukiman

Rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat, rumah atau tempat tinggal merupakan sarana hunian sebagai tempat berlindung yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya. Dalam penentuan kebutuhan rumah digunakan asumsi atau standar perencanaan bahwa 1 rumah digunakan oleh 1 keluarga dengan jumlah 5 anggota keluarga. Proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Serang disajikan dalam Tabel 2.6.5 berikut.

Tabel. 2.6. 5
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Serang

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.682.133	1.720.320	1.804.470	1.874.700	1.932.706	1.981.434
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	336.427	344.064	360.894	374.940	386.541	396.287

Sumber: Hasil olahan, 2024

Dari tabel diatas dapat kita lihat, bahwa kebutuhan rumah di Kabupaten Serang sampai dengan akhir periode RPJPD (tahun 2045) adalah sebesar 396.287 unit rumah. Kebutuhan rumah ini tentu harus di imbangi dengan ketersediaan jumlah lahan untuk perumahan atau permukiman.

Namun, untuk kedepannya perlu dipikirkan kebutuhan rumah susun atau apartemen yang jika dilihat dari sisi kebutuhan lahan tidak sebanyak rumah tapak biasa, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan rumah ini tidak mengganggu fungsi kegiatan lain seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan/permukiman yang akan berdampak pada ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Serang.

B. Air Bersih

Air merupakan kebutuhan utama dari setiap mahluk hidup dalam memenuhi kelangsungan hidupnya. Manusia dalam kehidupan sehari-harinya sangat membutuhkan akan air untuk keperluan hidupnya. Air yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup tentunya harus sesuai dengan standar atau kriteria kesehatan yang telah ditetapkan. Ketersediaan air dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air yang terus menerus diupayakan. Pemenuhan kebutuhan air di Kabupaten Serang dapat dipenuhi dengan memanfaatkan air permukaan maupun air tanah.

Kabupaten Serang mempunyai sumber air permukaan yang cukup memadai seperti sungai Cidanau, sungai Cibanten, sungai Ciujung dan sungai-sungai kecil lainnya. Sama halnya dengan sungai-sungai lainnya di Indonesia potensi ketersediaan air dari sumber sumber air kondisinya

semakin menurun, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada musim hujan cenderung terjadi banjir sedangkan pada musim kemarau debitnya sangat kecil dan bahkan bisa kering sama sekali. Secara teoritis dikatakan bahwa sungai memiliki kehandalan kontinuitas dan kontinuitasnya adalah konstan, namun diperlukan pengolahan air atau water treatment dalam bangunan air dikarenakan secara kualitas masih diragukan. Sumber air yang dimanfaatkan PDAM Kabupaten Serang berasal dari mata air, irigasi, sumur dalam, dan sumber dari mitra kerja. Sumber-sumber tersebut antara lain adalah Mata Air Citaman, Mata Air Baros, Irigasi Pamarayan Barat, Irigasi Pamarayan Timur, Bendung Kroya, Sungai-Bendung Ciwaka, Sungai-Bendung Cidurian, Mata Air Padarincang, Sungai Cisirih, Sungai Cisangkui, Mata Air Cilamojan, Sungai Cikeneng, dan Sumur Dalam Ciomas-Pasuruan.

Pada saat ini PDAM Kabupaten Serang telah menjalin kerja sama dengan swasta sebanyak 8 perusahaan, yang tiga diantaranya adalah perusahaan besar, yaitu: PT. Krakatau Tirta Industri, PT. Sauh Bahtera Samudra dan PT. Sarana Tirta Rejeki. Ketiga perusahaan tersebut memberikan royalti kepada PDAM Serang berupa : prosentasi dari penjualan air (Rp./m³) dan prosentasi dari kapasitas produksi (PDAM menerima royalti berupa air bersih). Sedangkan untuk air tanah, potensi dan ketersediaan air tanah dipengaruhi oleh karakteristik hidrologi dan karakteristik geologi penyusun wilayahnya. Kondisi air tanah dipengaruhi oleh karakteristik hidrologi yang ditentukan oleh kondisi geologi penyusun wilayahnya.

Pada umumnya air tanah bebas di daerah dataran mempunyai kedalaman antara 0,5-3,0 m, sedangkan di daerah perbukitan kedalamannya $\pm$ 15 m. Penyebaran sumber air tanah ini sebagian besar terdapat di bagian selatan dimana air tanah membentuk mata air di lereng Gunung Karang. Air tanah di Kabupaten Serang tersedia dalam jumlah yang relatif cukup dan terdapat dalam beberapa kondisi sebagai berikut. 1. Akifer menerus dalam bentuk yang sarang, termasuk air tanah dalam kondisi tertekan dan setengah tertekan. 2. Akifer tidak menerus dalam batuan berkekar, misalnya kekar dalam lava. 3. Kombinasi akifer menerus dan tidak menerus. CAT yang terdapat di Kabupaten Serang, yaitu cekungan air tanah yang bersifat lintas kabupaten, yaitu CAT Rawa Danau dan lintas provinsi, yaitu CAT Serang-Tangerang.

Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan total air bersih di Kabupaten Serang pada tahun 2045 mencapai 320.992.308 liter perhari

atau 117.162.192.420 liter dalam satu tahun. Untuk lebih lengkapnya kebutuhan air bersih di Kabupaten Serang dapat dilihat dalam Tabel 2.6.6

Tabel. 2.6. 6
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 (dalam liter per hari)

Tahun	Koefisien	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk		1.682.133	1.720.320	1.804.470	1.874.700	1.932.706	1.981.434
Domestik	120	201.855.960	206.438.400	216.536.400	224.964.000	231.924.720	237.772.080
Non domestik	15%	30.278.394	30.965.760	32.480.460	33.744.600	34.788.708	35.665.812
NRW	20%	40.371.192	41.287.680	43.307.280	44.992.800	46.384.944	47.554.416
Kebutuhan Total		272.505.546	278.691.840	292.324.140	303.701.400	313.098.372	320.992.308

Sumber: Hasil Analisis, 2023

C. Energi/Listrik

Sebagian besar jumlah penduduk wilayah Kabupaten Serang terlayani oleh jaringan listrik. Pemakaian daya listrik digunakan untuk rumah tangga, kegiatan sosial, usaha, industri, pemerintahan, dan penerangan jalan umum. Pengelolaan listrik di Kabupaten Serang berada di bawah pengelolaan PLN Cabang Banten. Sedangkan pendistribusiannya dilakukan melalui beberapa gardu transformator dengan kapasitas yang bervariasi. Sejalan dengan perkembangan wilayah perencanaan yang cenderung akan meningkat, maka kebutuhan daya listrikpun akan semakin meningkat pula. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, maka perlu diupayakan penambahan dan peningkatan jangkauan pelayanan dan kapasitas satuan sambungannya.

Untuk melihat kebutuhan pelayanan jaringan listrik di wilayah perencanaan digunakan standar perencanaan kebutuhan listrik adalah sebesar 900 VA per rumah.Berdasarkan standar atau asumsi tersebut maka kebutuhan daya listrik untuk satu wilayah kabupaten adalah sebesar 302.784.300 VA (2025) dan 356.658.120 VA (2045). Untuk lebih lengkapnya kebutuhan daya listrik di Kabupaten Serang dapat dilihat pada Tabel 2.6.7

Tabel. 2.6. 7
Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Di Kabupaten Serang Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.682.133	1.720.320	1.804.470	1.874.700	1.932.706	1.981.434
Proyeksi Jumlah Rumah (unit)	336.427	344.064	360.894	374.940	386.541	396.287
Proyeksi Kebutuhan Listrik (VA)	302.784.300	309.657.600	324.804.600	337.446.000	347.887.080	356.658.120

Sumber: Hasil Analisis, 2023

D. Persampahan

Sistem pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Serang diarahkan untuk dilaksanakan dengan cara individual (konvensional) dan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan secara individu dapat dilakukan dengan cara pembakaran atau penimbunan sampah di halaman rumah. Sistem ini diterapkan pada daerah-daerah perdesaan dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar serta luas pekarangan rumah yang cukup luas. Pengelolaan yang dikelola oleh Pemerintah diterapkan pada daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk dan kegiatannya yang cukup besar, yang mencakup kawasan permukiman, perkantoran, perdagangan dan jalan-jalan protokol.

Pada saat ini, Kabupaten Serang juga sedang mencoba melaksanakan metoda pengolahan sampah dengan menggunakan *incinerator* , yang dilaksanakan di Kecamatan Kibin dengan kapasitas terpasang 20 ton/hari. Metoda ini diharapkan dapat mengoptimalkan metoda pengolahan sampah dan mengurangi sampah yang harus diangkut ke TPA.

Tabel. 2.6. 8
Proyeksi Jumlah Timbunan Sampah Di Kabupaten Serang Tahun 2025 – 2045 (kg)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.682.133	1.720.320	1.804.470	1.874.700	1.932.706	1.981.434
Proyeksi Timbunan Sampah (kg)	429.784.982	439.541.760	461.042.085	478.985.850	493.806.383	506.256.387
Proyeksi Jumlah Kebutuhan TPST (unit)	1	14	15	16	17	17

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Sesuai tabel diatas, terlihat bahwa potensi timbunan sampah di Kabupaten Serang pada tahun 2045 mencapai sebesar 506.256.387 kg dan kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebanyak 17 unit. Dengan membandingkan antara proyeksi kebutuhan TPST dengan jumlah TPST yang dimiliki Kabupaten Serang terlihat adanya *gap*/kesenjangan yang sangat tinggi antara kondisi ideal dengan kondisi faktual. Selain itu, belum tersedianya Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah semakin menambah permasalahan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Serang.

E. Kesehatan

Analisis fasilitas kesehatan ini dilakukan guna melihat kebutuhan fasilitas kesehatan berdasarkan jumlah penduduk pada saat ini dan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan berdasarkan jumlah penduduk 20 tahun ke depan. Dengan mengolah data eksisting yang didapat pada kawasan perencanaan dan hasil analisa beserta proyeksi penduduk, akan terlihat berapa kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Serang. Selain itu, analisis fasilitas kesehatan ini juga memiliki tujuan untuk menilai apakah fasilitas yang sudah tersedia pada saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan akan fasilitas kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Serang. Untuk lebih jelasnya, hasil analisis proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.6. 9
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Serang Tahun 2025 – 2045

No .	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.682.133	1.720.320	1.804.470	1.874.700	1.932.706	1.981.434
Proyeksi Fasilitas Kesehatan (unit)							
1	Rumah Sakit	5	7	7	7	8	8
2	Puskesmas/Balai Pengobatan	32	14	15	16	16	17
3	Klinik Bersalin/BKIA	n.a.	57	60	62	64	66
4	Praktik Dokter	56	344	361	375	387	396
5	Apotik	72	57	60	62	64	66

Sumber: Hasil Analisis, 2024

F. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan nasional dan regional. Pembangunan bidang pendidikan akan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada pada suatu wilayah. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan meningkatkan daya saing dalam memasuki dunia kerja. Dengan pendidikan pula, memudahkan pemerintah dalam mentransfer tujuan pembangunan kepada masyarakat karena tingkat pemahaman masyarakat akan lebih baik kalau pendidikan juga lebih baik. Sarana pendidikan di suatu daerah berpengaruh terhadap tingkat intelektualitas penduduknya. Karena dengan tersedianya sarana pendidikan yang memungkinkan dan dapat

dengan mudah dicapai penduduk, maka semakin rendah pula tingkat kesulitan penduduk untuk meningkatkan pengetahuannya. Sehingga diharapkan dapat meningkat pula kreativitas penduduk tersebut untuk lebih mengembangkan kesejahteraan penduduknya.

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam analisis ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal / umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU). Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:

Taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;

Sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;

Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);

Sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan. Dalam melaksanakan analisis kebutuhan sarana pendidikan dilakukan berdasarkan standar perencanaan yang menggunakan pendekatan jumlah penduduk minimal pendukung sarana pendidikan. Asumsi/standar perencanaan sarana pendidikan adalah:

1 unit Taman Kanak-Kanak (TK) jumlah penduduk pendukungnya sebanyak 1.250 jiwa.

1 unit Sekolah Dasar (SD) jumlah penduduk pendukungnya sebanyak 1.600 jiwa.

1 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) jumlah penduduk pendukungnya 4.800 jiwa.

1 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) jumlah penduduk pendukungnya sebanyak 4.800 jiwa.

Dengan berdasarkan pada standar terebut diatas, maka setelah dilakukan analisis kebutuhan sarana pendidikan didapatkan hasil bahwa kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2045 adalah sebanyak 3.195 unit (tahun 2025), 3,369 unit (tahun 2030), 3.534 unit (tahun 2035), 3.683 unit (tahun 2040) dan 3,782 unit (tahun 2045). Untuk lebih lengkapnya kebutuhan sarana pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.6.10

Tabel 2.6.10
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Serang

No .	Jenis Sarana Pendidikan	Kondisi Tahun 2023	Kebutuhan Sarana Pendidikan (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.682.133	1.720.320	1.804.470	1.874.700	1.932.706	1.981.434
2	Poyeksi Fasilitas Pendidikan (unit)						
	• TK	369	1.376	1.444	1.500	1.546	1.585
	• SD/MI	878	1.075	1.128	1.172	1.208	1.238
	• SMP/MTs	358	376	391	403	413	358
	• SMA/MA/S MK	358	376	391	403	413	358

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Analisis Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional harus dilaksanakan secara kolektif dan kolaboratif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah. Untuk itu, dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah (Kabupaten) perlu mengacu dan berpedoman kepada perencanaan/arrah kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Arahan kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana yang menjadi acuan Kabupaten Serang dalam menyusun kebijakan pembangunan antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 serta dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten dan Kabupaten Serang.

2.7.2 Program / Proyek Strategis RTRW dan Dokumen Sektorial Lainnya

A. Arahan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Nasional

Tujuan pembangunan wilayah dan sarana prasarana yang ingin dicapai secara nasional pada tahun 2045 tercermin dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Nusantara dengan pengurangan kesenjangan/*disparitas* antar wilayah dan kelompok pendapatan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan.

Isu strategis kewilayahan dan sarana prasarana yang berkembang di Indonesia dan menjadi permasalahan utama terjadinya kesenjangan pembangunan/pertumbuhan daerah serta tingkat kesejahteraan antar wilayah antara lain adalah:

- Pusat pertumbuhan belum berkembang di luar Jawa;
- Produktivitas di perkotaan rendah akibat desain dan tata Kelola;
- Pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi belum optimal akibat kebijakan yang belum asimetris dan afirmatif;
- Kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana dasar antar Jawa dan luar Jawa;
- Masih tingginya permasalahan pertanahan dan masih sangat terbatasnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- Tingginya risiko bencana dan masih lemahnya tata Kelola kebencanaan;
- Desentralisasi dan otonomi daerah yang lemah dan ketergantungan kepada dana transfer pusat;
- Belum optimalnya integrasi konektivitas domestik dan global dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.

Arah pembangunan wilayah yang ditetapkan dalam RPJPN Tahun 2025-2045, disusun dengan pendekatan *tematik-holistik-spasial* dengan memperhatikan potensi, kendala, dan karakteristik daerah. Melalui pendekatan tersebut tema pembangunan wilayah yang ditetapkan untuk wilayah Pulau Jawa adalah **“Megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan”**.

Arah Kebijakan Umum Transformasi di wilayah, ditetapkan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah, melalui pendekatan agenda transformasi yaitu transformasi sosial, ekonom, dan tata kelola, yang didukung dengan 2 (dua) landasan transformasi berupa supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi yang dilengkapi dengan 3 (tiga) kerangka implementasi yang terdiri dari pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan.

Kebijakan umum kewilayahan, ditujukan sebagai kerangka atau kaidah pelaksanaan transformasi menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Arah kebijakan wilayah dan sarana prasarana meliputi:

- Tata Ruang dan Pertanahan

Arahan kebijakan umum bidang tata ruang dan pertanahan dilaksanakan melalui : (1). Penyelesaikan isu penataan ruang yang berupa: penyediaan/penyelesaian rencana tata ruang, perwujudan tata ruang yang berkualitas, dan pengendalian pemanfaatan ruang; (2). Pelaksanaan reforma agrarian sebagai arah kebijakan bidang pertanahan diupayakan untuk penyelesaian isu-isu strategis bidang pertanahan, yaitu: pelaksanaan redistribusi dan sertifikasi tanah (penataan aset), perbaikan pengelolaan pertanahan melalui sistem pendaftaran tanah; dan (3). Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat dan bersinergi.

- Pengelolaan Urbanisasi dan Perkotaan

Arah kebijakan pembangunan perkotaan difokuskan untuk mendorong pembangunan perkotaan yang lebih terstruktur untuk mengelola urbanisasi, kota yang layak huni dan berkelanjutan, serta sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi kawasan sekitarnya.

- Pusat Pertumbuhan

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan yang meliputi: (1). sentra pertanian,

perikanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai pusat produksi; (2). Kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumberdaya alam; (3). Kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata; dan (4). Kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan pelayanan, jasa, dan perdagangan.

- **Perdesaan dan Daerah Afirmasi**

Pembangunan dan pemberdayaan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan.

- **Konektivitas**

Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui: (1). pembangunan dan pengembangan jalur dan simpul transportasi; (2). penyediaan dan integrasi antarmoda angkutan; serta (3). penyediaan sarana dan prasarana pendukung Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM).

- **Ketenagalistrikan**

Kebijakan pengembangan ketenagalistrikan diarahkan untuk Integrasi pengembangan ketenagalistrikan dengan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) dan peningkatan produktivitas pengelolaan ketenagalistrikan.

- **Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Arah kebijakan pengembangan TIK ditujukan sebagai pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi digital, perluasan jangkauan dan kepastian keandalan konektivitas digital,

- **Sarana dan Prasarana Dasar**

Kebijakan pemenuhan infrastruktur dasar diarahkan melalui kebijakan: (1). Penyediaan air baku diarahkan untuk peningkatan ketahanan air melalui peningkatan pasokan air baku, peningkatan kinerja layanan irigasi, perlindungan dan pengendalian potensi risiko bencana daya rusak air. (2) Pengembangan sector perumahan diarahkan pada pengembangan perumahan yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi; (3). Pemenuhan layanan air siap minum dan sanitasi aman serta pengelolaan sampah yang terpadu; (4). Memperkuat sarana dan prasarana ketahanan bencana.

- **Desentralisasi**

Kebijakan desentralisasi melalui penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrument kebijakan yang penting untuk

meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintah daerah, penataan desentralisasi administrasi dan penataan keuangan daerah.

Arah Kebijakan Wilayah Pulau Jawa, dalam konsep kawasan strategis, kawasan fungsional perkotaan di Jawa akan tumbuh secara generic menjadi 3 (tiga) jenis yaitu megapolitan, metropolitan, dan pusat agromelasi. Dengan demikian, dalam arahan tematik pembangunan Pulau Jawa adalah “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”, melalui 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia berdaya saing global (talenta global) serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi 3T;
2. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti kawasan strategis perkotaan, kawasan industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian pendukung kemandirian pangan.
3. Percepatan pembangunan berbasis pengembangan multi-infrastruktur dan maritime backbone dan global/major port yang mumpuni guna menurunkan logistic dan biaya produksi dan meningkatkan daya saing industri di Jawa.
4. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas *multi infrastructure backbone* dan *feeder* serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan; pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistic; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.
5. Penuntasan RDTR Kabupaten/Kota; perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaa, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

Arahan kebijakan pengembangan wilayah dan sarana prasarana dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yang terindikasi berlokasi di Kabupaten Serang antara lain adalah:

- a. Pengembangan industri hijau ramah lingkungan yang diarahkan pada lokasi-lokasi pesisir dan Pelabuhan seperti Banten Utara

- b. Pengembangan kawasan strategis industri pada kawasan industri Serang-Tangerang (kluster industri pengolahan material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan industri orientasi ekspor)
- c. Pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya terutama di perairan pesisir utara Jawa (WPP 712)
- d. Pemanfaatan ALKI I di wilayah Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu;
- e. Peningkatan konektivitas Sumatera-Jawa-Bali termasuk sarana dan prasarana transportasi penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan barang antara Pulau Jawa dan Sumatera untuk menurunkan biaya logistik.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Banten

Kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Banten yang menjadi acuan atau pedoman dalam pembangunan/pengembangan wilayah Kabupaten berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023-2043 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045. Tinjauan terhadap RTRW Provinsi Banten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan dan kesesuaian perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan provinsi dari sudut keruangan/spasial, sedangkan tinjauan terhadap RPJPD Provinsi Banten dilakukan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan sektoral prioritas di Kabupaten dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023-2043

Wilayah Kerja Pembangunan (WKP). Kabupaten Serang sistem perwilayahan pembangunan di Provinsi Banten termasuk dalam WKP II yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon yang diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, kelautan, perikanan, jasa, perdagangan dan pertambangan.

Sistem Perkotaan.

- **Pusat Kegiatan Nasional.** Kabupaten Serang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan fungsi pelayanan untuk kegiatan pemerintahan, pendidikan, pertanian, kelautan dan perikanan, industry, pariwisata, jasa, perdagangan, energi, permukiman dan transportasi laut.
- **Pusat Kegiatan Lokal.** Meliputi Kawasan Perkotaan Anyar, Baros, Ciruas dan Pontang

Sistem Jaringan Transportasi

- Sistem Jaringan Jalan.
 - a. Jaringan jalan arteri primer, meliputi: Batas Kota Cilegon-Batas Kota Serang, Batas Kota Serang-Batas Kabupaten Serang/Tangerang, Cikande-Rangkasbitung, dan Serdang-Bojonegara-Merak.
 - b. Jaringan jalan kolektor primer satu (JKP-1), meliputi: Batas Kota Cilegon-Pasauran, Pasauran-Labuan,
 - c. Jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2), meliputi: Ciruas-Petir-Warunggunung, Palima-Pasar Teneng (Palka), Gunungsari-Mancak-Anyar, Kramatwatu-Tonjong, Ciruas-Pontang, Parigi-Sukamanah, Ciomas-Ujung Tebu, Terate-Banten Lama, Pontang-Jenggut, Baros-Petir Tonjong-Banten Lama dan Nyapah-Silebu-Sentul.
 - d. Rencana Jalan kolektor primer dua (JKP-2), meliputi: Cikeusal-Boru, Palima-Baros, Lingkar Baros-Sport Center-Kramatwatu (Jl. Lingkar Selatan), Tonjong-Banten Lama
 - e. Jaringan jalan kolektor primer tiga (JKP-3), meliputi: Warung Selikur-Pemanuk, Cikande-Garut-Kopo, Gunungsari-Tanjung.
 - f. Jalan tol, meliputi: Tangerang-Merak, Serang-Panimbang
 - g. Rencana jalan tol, meliputi: Cilegon-Bojonegara, usulan exit tol simpang susun akses Tol Serang-Panimbang, Serang-Anyar, Cilegon-Anyar-Carita-Labuan-Panimbang, Mauk-Kronjo-Tanara-Tirtayasa-Kasemen-Serang-Cilegon
 - h. Terminal penumpang, meliputi: Rencana Terminal Tipe B di Kecamatan Cikande
 - i. Terminal barang, meliputi: terdiri dari terminal barang, *dry porti* dan Pusat Distribusi Regional (PDR)
 - j. Jembatan timbang

- Sistem Jaringan Kereta Api
 - a. Jalur Kereta Api, meliputi: Serpong-Maja-Rangkasbitung-Merak
 - b. Rencana Jaringan Jalur Kereta Api, meliputi: Perkotaan Anyar Kidul-Labuan-Panimbang, Serang-Cikande-Balaraja, Tonjong Baru-Pelabuhan Bojonegara, Bojonegara-Tanjung Priok, Cilegon-Serang-Pandeglang-Rangkasbitung,
 - c. Reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api, meliputi: Cilegon/Krenceng-Anyar Kidul
 - d. Stasiun Kereta Api
- Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
 - a. Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau
 - b. Pelabuhan sungai dan danau, meliputi: Pelabuhan Pontang, Pelabuhan Carenang, Pelabuhan Kragilan, Pelabuhan Cikande dan Pelabuhan Tirtayasa
 - c. Pelabuhan Penyeberangan, meliputi: Pelabuhan Margagiri
- Sistem Jaringan Transportasi Laut
 - a. Pelabuhan laut, meliputi Pelabuhan Bojonegara (Pelabuhan Pengumpul), dan Pelabuhan Pengumpan yang terdiri dari: Pelabuhan Pasauran, Pelabuhan Terate, Pelabuhan Anyar Lor, Pelabuhan Grenyang-Pulo Ampel, Pulo Tunda-Tirtayasa, Lontar-Pontang dan Pulo Panjang-Pulo Ampel
 - b. Terminal Umum, meliputi: Terminal Bandar Bakau Jaya, Terminal Batu Alam Makmur, Terminal Bojonegara dan Terminal Bahari Pelabuhan Indonesia.
 - c. Terminal Khusus
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), meliputi : PPI Argawana, PPI Pulokali, PPI Lontar, PPI Terate, PPI Wadas, PPI Anyar dan PPI Pasauran
 - e. Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan, meliputi:
 - 1) Alur pelayaran umum dan perlintasan internasional, meliputi: Laut Jawa dan Selat Sunda
 - 2) Alur pelayaran umum dan perlintasan nasional, meliputi: Laut Jawa dan Selat Sunda
 - 3) Alur pelayaran umum dan perlintasan regional, meliputi: Perairan sekitar Bojonegara dan Anyar
 - 4) Alur pelayaran umum dan perlintasan local, meliputi: Tirtayasa, Cinangka dan Anyar

5) Alur pelayaran umum dan perlintasan berupa *Traffic Sparation Scheme* (TTS) di perairan Selat Sunda

- Bandar Udara Khusus berupa Bandara Gorda

Sistem Jaringan Energi

- Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, meliputi: infrastruktur serta jaringan minyak dan gas bumi
- Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan, terdiri dari: infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Jaringan Tetap
- Jaringan Bergerak

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Sistem Jaringan Irigasi, meliputi:
 - a. Kewenangan Pusat, berupa DI Ciujung
 - b. Kewenangan Provinsi, terdiri dari: DI Cisangu Atas, DI Cicinta, DI Kadugenep, DI Cikarang Udik, DI Ciwaka Bawah, DI Cikalumpang, DI Cipari/Ciwuni dan DI Cisaung Bawah.
- Sistem Pengendalian Banjir, meliputi: sistem pengaman pantai, pengembangan tanggul laut dan tanggul pantai, Waduk Sindangheula, Rawa Dano, Rawa Pasar Rawut dan situ/rawa lainnya
- Bangunan Sumber Daya Air, berupa: Bendungan Sindangheula, Bendungan Cidanau, dan Bendung Pamarayan

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - a. Jaringan SPAM berupa SPAM Regional Sindangheula dan SPAM Karian Barat
 - b. Infrastruktur SPAM, berupa Waduk Sindangheula, Rawa Dano, dan Rawa Pasar Rawut
- Sistem Jaringan Persampahan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II di Kabupaten Serang dan Kota Serang

Kawasan Lindung

- Badan Air
- Kawasan Yang Memberikan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa hutan lindung
- Kawasan Perlindungan Setempat berupa kawasan sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung dan waduk
- Kawasan Konservasi berupa Kawasan Cagar Alam, meliputi: Cagar Alam Tukung Gede dan Cagar Alam Rawa Danau
- Kawasan Pencadangan Konservasi Di Laut berupa Kawasan Konservasi Maritim di perairan Teluk Banten dan perairan Pulau Panjang dan Pulau Semut
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Budidaya

- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) berupa DPP Pantai Barat dan Pantai Utara Kabupaten Serang
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) berupa KSPP Anyar-Cinangka dan sekitarnya
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) berupa Pamayaran dan sekitarnya, dan Pontang Tirtayasa dan sekitarnya
- Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Strategis

- Kawasan Strategis Nasional (KSN), berupa KSN Selat Sunda (KSN sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi)
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) berupa KSNT Daerah Cadangan Karbon Biru di Teluk Banten
- Kawasan Strategis Provinsi (KSP), meliputi:
 - a. KSP berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, berupa KSP Kawasan sekitar Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten,

KSP Kawasan Perkotaan Serang-Cilegon (Seragon), KSP Kawasan Serang Utara Terpadu, KSP Koridor Pantai Barat Banten dan KSP Kawasan Perbatasan Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- b. KSP berdasarkan kepentingan sosial dan budaya, berupa KSP Kawasan Banten Lama
- c. KSP berdasarkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa KSP Kawasan Rawa Danau dan sekitarnya

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045

Indikasi program/proyek strategis yang berlokasi di wilayah Kabupaten Serang adalah :

Sistem Perkotaan/Kawasan Strategis	Pusat Pertumbuhan	Prioritas/Kepentingan Pengembangan	Indikasi Program Strategis
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Serang	Kabupaten Serang	Kawasan Perkotaan	Pembangunan Rumah Sakit Tipe A
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Anyar, Baros, Pontang	Kawasan Perkotaan	Pembangunan sarana pendidikan, Kesehatan, pelayanan ekonomi, infrastruktur dan transportasi dasar
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Perkotaan Serang-Cilegon	Kabupaten Serang, Cilegon	Pertumbuhan ekonomi	Pengembangan perkotaan, pengembangan permukiman, pengembangan industry, pengembangan jalan tol
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Serang Utara Terpadu	Pontang, Tirtayasa, Tanara	Pertumbuhan ekonomi	pengembangan industry

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Koridor Pantai Barat	Anyar, Cinangka	Pertumbuhan ekonomi	Pembangunan Jembatan Selat Sunda, Pariwisata
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Sekitar Kawasan KP3B	Pabuaran, Baros	Pertumbuhan ekonomi	Pusat pemerintahan dan permukiman
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Perbatasan antar Provinsi dan Kab/Kota	Kawasan Perbatasan Kabupaten Serang- Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang- Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang- Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang-Kota Serang, Kabupaten Serang-Kota Cilegon	Pertumbuhan ekonomi	pengembangan perkotaan, pengembangan industri
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Banten Lama	Kramatwatu	Sosial Budaya	Pengembangan kehidupan sosial budaya, hukum adat dan kearifan loka, pariwisata, pendidikan
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Rawa Danau	Mancak, Gunungsari, Padarincang	Daya Dukung Lingkungan Hidup	Penghijauan, konservasi, pengelolaan keanekaragaman hayati, pariwisata, perikanan

Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda	Anyar, Cinangka dan perairan Selat Sunda	Pertumbuhan ekonomi	pariwisata, perikanan, industri
Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Teluk Banten	perairan Teluk Banten	Daya dukung lingkungan hidup	konservasi, pengelolaan keanekaragaman hayati, pariwisata, perikanan

C. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Serang

Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Serang.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Serang ditetapkan beberapa arah kebijakan dan strategi penataan ruang, yaitu:

1. Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal yang berdaya saing global, dengan strategi meliputi:
 - a. mendorong dan mengembangkan sentra industri menengah dan kecil yang produktif dengan mengolah produk berbasis bahan baku lokal;
 - b. meningkatkan penggunaan teknologi dalam kegiatan industri besar; dan
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan industri.
2. Pengembangan pertanian pendukung pengembangan perekonomian kabupaten, dengan strategi meliputi:
 - a. mendorong dan mengembangkan sentra industri menengah dan kecil yang produktif dengan mengolah produk berbasis bahan baku lokal;
 - b. meningkatkan penggunaan teknologi dalam kegiatan industri besar; dan
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan industri.
3. Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertumpu pada sumber daya alam dan budaya lokal, dengan strategi meliputi:
 - a. Mengembangkan kegiatan wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan wisata sejarah, dengan mengedepankan kekhasan budaya lokal;

- b. Mengembangkan prasarana wilayah guna menunjang kegiatan pariwisata yang produktif;
 - c. Mengembangkan perdagangan dan jasa yang mendukung sektor pariwisata;
 - d. Mengembangkan potensi obyek dan daya tarik wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan wisata sejarah; dan
 - e. Mengembangkan prasarana dan sarana pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal.
4. Pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki, dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan sistem pusat kegiatan PKL, PPK dan PPL;
 - b. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan melalui pengembangan sarana prasarana penunjang kegiatan;
 - c. mengembangkan aksesibilitas intrawilayah dan antarwilayah;
 - d. meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan; dan
 - e. mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan.
5. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi daerah terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional dan lokal dalam mendukung potensi wilayah, dengan strategi meliputi:
- a. menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya;
 - b. mengembangkan terminal angkutan penumpang beserta sarana penunjang;
 - c. menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;
 - d. mengintegrasikan sistem transportasi kabupaten dengan simpul transportasi regional dan nasional;
 - e. mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan – perkotaan;
 - f. mengembangkan angkutan umum massal baik angkutan barang maupun angkutan penumpang;
 - g. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang; dan
 - h. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi wisata.
6. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan lingkungan, dengan strategi meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan energi listrik dan mengembangkan energi baru terbarukan;
 - b. mengembangkan jaringan telekomunikasi di wilayah kegiatan ekonomi baru dan wilayah terpencil;
 - c. menjaga keseimbangan ketersediaan sumber daya air baku;
 - d. mempertahankan jumlah dan luasan daerah irigasi;
 - e. mengendalikan pencemaran air, tanah dan udara terutama di kawasan-kawasan rawan pencemaran;
 - f. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan;
 - g. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah;
 - h. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sistem pengolahan limbah industri kecil dan rumah tangga;
 - i. mengembangkan sistem drainase yang terpadu; dan
 - j. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi di wilayah perkotaan dan perdesaan.
7. Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana, dengan strategi meliputi:
- a. Mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat;
 - b. Mengurangi risiko akibat pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - c. Mengembangkan struktur fisik dan non fisik yang berdampak langsung dalam pengurangan risiko bencana; dan
 - d. Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana.
8. Pemantapan kawasan peruntukan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten berkelanjutan, dengan strategi meliputi:
- a. Meningkatkan dan mengendalikan fungsi hutan lindung;
 - b. Meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan;
 - c. Mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan peruntukan lindung;
 - d. Mengembangkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat;
 - e. Meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan peruntukan lindung;
 - f. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan peruntukan lindung;

- g. Mengembangkan kawasan konservasi laut daerah;
 - h. Menyediakan dan meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan minimum 30 (tiga puluh) persen untuk setiap kawasan perkotaan yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat; dan
 - i. Menyediakan ruang terbuka hijau privat pada setiap kawasan industri minimum 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan, termasuk didalamnya penyediaan sumur resapan.
9. Pengembangan kawasan budi daya pendukung perkembangan dan pertumbuhan Daerah sesuai daya dukung lingkungan, dengan strategi meliputi:
- a. mempertahankan luas sawah beririgasi teknis melalui pengendalian alih fungsi lahan;
 - b. mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan;
 - c. meningkatkan produktivitas, diversifikasi tanaman dan pengolahan hasil hutan, pertanian dan perkebunan;
 - d. mengembangkan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut;
 - e. meningkatkan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan laut;
 - f. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;
 - g. mengembangkan dan mengarahkan kegiatan industri pada industri pengolahan yang ramah lingkungan;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan pariwisata alam dan buatan secara terintegrasi;
 - i. mengembangkan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. meningkatkan kualitas prasarana dan sarana permukiman.
10. Penetapan dan pengembangan kawasan strategis pendukung perkembangan daerah yang merata dan berkelanjutan, dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi;
 - c. mengembangkan kawasan strategis sosial budaya;

- d. memantapkan dan mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
 - e. mengembangkan kawasan strategis kepentingan pertahanan dan keamanan.
11. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan lindung dan/atau kawasan peruntukan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - c. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

1. Rencana Tata Ruang

a. Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Serang terdiri atas sistem perkotaan dan sistem jaringan perkotaan. Rencana sistem perkotaan merupakan rencana penetapan pusat-pusat kegiatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan pada tingkat kawasan secara berhirarki. Sistem perkotaan terdiri dari beberapa pusat kegiatan yaitu:

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.

1) Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan di Kabupaten Serang meliputi :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah Serang
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada pada Kawasan Perkotaan Anyar, Baros, Ciruas dan Pontang.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berada di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Serang Untuk lebih jelasnya, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Serang dapat dilihat pada **Gambar** dibawah ini:

Gambar 2.7.1
Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Serang



Sumber: DPUPR Kabupaten Serang

2) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana di dalam RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 meliputi:

a) Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara yang meliputi:

- Rencana sistem jaringan transportasi darat terdiri: (1) rencana sistem jaringan jalan yang mencakup jaringan jalan kewenangan nasional, provinsi, kabupaten dan desa serta terminal penumpang, barang dan jembatan timbang; (2) rencana sistem jaringan kereta api yang terdiri atas rencana pengembangan jaringan jalur kereta api untuk melayani perpindahan barang dan/atau orang serta pengembangan stasiun kereta api; (3) Rencana sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa rencana pengembangan pelabuhan sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan.
- Rencana sistem jaringan transportasi laut terdiri atas: (1) pengembangan pelabuhan laut berupa Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Terminal khusus; serta (2) alur pelayaran laut.

- Rencana sistem jaringan sistem transportasi udara berupa pengembangan Bandar Udara Gorda sebagai bandar udara khusus untuk kepentingan pertahanan dan sipil.

b) Sistem Jaringan Energi

Rencana sistem jaringan energi meliputi : (1) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa rencana pengembangan stasiun pipa gas bumi dan rencana jaringan pipa gas; serta (2) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya, rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik, rencana pembangunan gardu induk, pengembangan pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) Hidro dan Biomassa, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga matahari dan tenaga sampah.

c) Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas (1) pengembangan jaringan telekomunikasi tetap meliputi pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi dan pengembangan serat optik serta (2) pengembangan jaringan telekomunikasi bergerak berupa pengembangan jaringan nirkabel dan pembangunan menara telekomunikasi bersama.

d) Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas (1) sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi; (2) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten; dan (3) sistem jaringan sumber daya air kabupaten.

e) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:

- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Pengembangan sistem penyediaan air minum terdiri dari pengembangan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan.
- Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Pengembangan sistem pengelolaan air limbah berupa pengembangan instalasi pengolahan air limbah dan pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga.
- Sistem Jaringan Persampahan wilayah
Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah berupa: pengembangan Tempat Penampungan Sementara, pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan penerapan teknologi dan sistem pemilahan sampah.

- Sistem Jaringan Drainase

Pengembangan sistem pengelolaan drainase berupa perbaikan Kawasan bagian hulu/lindung tangkapan air hujan untuk menekan aliran air permukaan, pembuatan sempadan sungai pada bagian tengah dan hilir sungai, pembuatan saluran pada daerah tergenang luapan air sungai.

- Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana terdiri atas jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana pada Kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, tsunami dan letusan gunung berapi.

b. Pola Ruang

Rencana pola ruang di Kabupaten Serang meliputi Kawasan peruntukan lindung dan Kawasan peruntukan budi daya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

1) Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung di Kabupaten Serang ditetapkan seluas lebih kurang 11.955 (sebelas ribu Sembilan ratus lima puluh lima) hektar yang terdiri dari :

a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya

Kawasan ini ditetapkan seluas 1.374 (seribu tiga ratus tujuh puluh empat) hektar yang terdiri atas (1) Kawasan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Ciomas, Padarincang, Pulo Ampel, dan Bojonegara; serta (2) Kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 657 (enam ratus lima puluh tujuh) hektar yang tersebar di Kecamatan Anyar, Bandung, Baros, Binuang, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Gunungsari, Kibin, Kragilan, Kramatwatu, Lebakwangi, Mancak, Pabuaran dan Tirtayasa.

b) Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, Kawasan sekitar danau/waduk/situ dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan sempadan pantai ditetapkan seluas kurang lebih 1.425

(seribu empat ratus dua puluh lima) hektar dan tersebar pada wilayah kecamatan Anyar, Bojonegara, Cinangka, Kramatwatu, Pontang, Pulo Ampel, Tanara dan Tirtayasa.

Sempadan sungai ditetapkan sebesar kurang lebih 3.066 (tiga ribu enam puluh enam) hektar yang terletak diseluruh kecamatan yang dilewati oleh sungai. Sedangkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan seluas kurang lebih 6.923 (enam ribu Sembilan ratus dua puluh tiga) hektar dan tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Serang.

c) Kawasan konservasi

Kawasan konservasi ditetapkan seluas kurang lebih 6.238 (enam ribu dua ratus tiga puluh delapan) hektar yang terdiri dari kawasan suaka alam, Kawasan pelestarian alam, dan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan suaka alam terdiri atas Cagar Alam Rawa Danau dan Cagar Alam Tukung Gede.

Kawasan pelestarian alam ditetapkan seluas 1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) hektar yang meliputi Taman Wisata Alam Pulau Sangiang dan Taman Wisata Alam Laut di Pulau Sangiang. Sedangkan Kawasan konservasi pesisir terdapat di sekitar perairan Pulau Tunda dan Pulau Pamujan Besar.

d) Kawasan lindung geologi

Kawasan lindung geologi merupakan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yaitu sempadan mata air yang berupa daratan sekeliling air dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter pada air di luar Kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter pada mata air di dalam Kawasan permukiman untuk mempertahankan fungsi mata air. Kawasan ini ditetapkan pada mata air yang tersebar di Kecamatan Baros, Ciomas, Padarincang dan Kramatwatu.

e) Kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Serang berupa Kawasan rawan bencana banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami.

f) Kawasan cagar budaya

Kawasan cagar budaya di Kabupaten Serang terdiri dari Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Carita seluas 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) hektar di Kecamatan Cinangka dan Padarincang, Kawasan wisata religi Syekh Nawawi Al Bantani di Kecamatan Tanara, Kawasan Makam Sultan Ageng Tirtayasa di Kecamatan Tirtayasa, Kawasan Situs Pangindelan Abang dan Kawasan Ziarah Sumur Tujuh

Belas di Kecamatan Kramatwatu, Kawasan Situs Batu Lingga di Kecamatan Baros, Kawasan Ziarah Makam Cikole dan Kawasan Bendung Pamarayan Lama di Kecamatan Cikeusal dan Kawasan Ziarah Gunung Santri di Kecamatan Bojonegara.

g) Kawasan ekosistem mangrove

Kawasan ekosistem mangrove ditetapkan seluas kurang lebih 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) hektar dan tersebar di Kecamatan Bojonegara, Pontang, Tanara dan Tirtayasa.

2) Kawasan Budi Daya

Kawasan peruntukan budi daya di Kabupaten Serang ditetapkan seluas kurang lebih 134.323 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga) hektar dan terdiri dari:

1. Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi ditetapkan seluas kurang lebih 5.684 (lima ribu enam ratus delapan puluh empat) hektar dan terdiri dari (1) Kawasan hutan produksi terbatas yang terletak di wilayah Kecamatan Anyar, Cinangka, Ciomas, Gunungsari, Mancak, Pabuaran dan Padarincang; dan (2) Kawasan hutan produksi tetap yang tersebar di Kecamatan Bojonegara, Ciomas, Gunungsari, Kramatwatu, Padarincang, Pulo Ampel dan Waringin Kurung.

2. Kawasan hutan rakyat

Kawasan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 5.540 (lima ribu lima ratus empat puluh) hektar dan terletak di Kecamatan Bojonegara, Cinangka, Ciomas, Gunungsari, Kramatwatu, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pulo Ampel dan Waringinkurung.

3. Kawasan pertanian

Kawasan pertanian ditetapkan seluas 57.202 (lima puluh tujuh ribu dua ratus dua) hektar, terdiri (1) Kawasan tanaman pangan dengan luas sebesar kurang lebih 32.229,36 (tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua koma tiga puluh enam) hektar dan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan terletak diseluruh wilayah Kabupaten Serang; (2) Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 24.793 (dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar ; dan (3) Kawasan peternakan yang diarahkan untuk pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing/domba, itik dan ayam ras pedaging serta ayam bukan ras yang tersebar diseluruh kecamatan.

4. Kawasan perikanan

Kawasan perikanan ditetapkan seluas kurang lebih 224 (dua ratus dua puluh empat) hektar yang terdiri dari Kawasan perikanan tangkap, Kawasan perikanan budi daya dan Kawasan perikanan tangkap. Kawasan perikanan budidaya tersebar di kecamatan Baros, Pabuaran, Clomas, Padarincang, Tanara, Pontang, Pulo Ampel dan Tirtayasa.

Kawasan perikanan tangkap diarahkan pada Kawasan Laut Selat Sunda dan Laut Jawa yang berada di wilayah Kecamatan Anyar, Cinangka, Pulo Ampel, Bojonegara, Kramatwatu, Pontang, Tirtayasa dan Tanara.

5. Kawasan pertambangan dan energi

Kawasan pertambangan dan energi meliputi Kawasan pertambangan mineral, Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, dan Kawasan pertambangan panas bumi. Kawasan pertambangan mineral berupa mineral logam dan mineral non logam yang tersebar di Kecamatan Mancak, Bojonegara, Pulo Ampel, Jawilan dan Kopo.

Kawasan pertambangan gas dan minyak bumi berada pada perairan Laut Jawa dan perairan Selat Sunda. Sedangkan Kawasan pertambangan panas bumi berada pada Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Kaldera Danau Banten yang terletak di Kecamatan Clomas, Padarincang, Cinangka, Anyar, Waringinkurung, Gunungsari, Pabuaran dan Baros.

6. Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri ditetapkan sebesar 26.309 (dua puluh enam ribu tiga ratus Sembilan) hektar dan terdiri dari Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah. Kawasan industri meliputi:

- Kawasan Industri dengan jenis kegiatan berupa industri logam dasar/huli, kimia dasar dan industri maritim yang tersebar di Kecamatan Bojonegara, Pulo Ampel, Anyar, Mancak, Kramatwatu dan Tanara;
- Kawasan industri dengan jenis kegiatan berupa Aneka Industri yang ditetapkan di wilayah Kecamatan Ciruas, Jawilan, Cikande, Kibin, Kopo, Kragilan, Bandung, Binuang, Lebakwangi, Pamarayan, Carenang dan Tunjungteja;
- Kawasan industri dengan jenis kegiatan berupa industri minapolitan meliputi wilayah Kecamatan Pontang dan Tirtayasa.

- Rencana pembangunan Kawasan industri prioritas di Kawasan Industri Wilmar Serang di Kecamatan Kramatwatu.

Sedangkan sentra industri kecil dan menengah tersebar diseluruh kecamatan terutama pada sentra-sentra UMKM meliputi:

- Sentra industri sepatu di Kecamatan Baros
- Sentra kerajinan anyaman bambu di Kecamatan Bandung
- Sentra industri tas dan pandai besi di Kecamatan Petir
- Sentra industri kecil dan pandai besi di Kecamatan Ciruas
- Sentra industri kecil dan pandai besi di Kecamatan Ciomas

7. Kawasan pariwisata

Kawasan pariwisata ditetapkan seluas kurang lebih 3.279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar yang terdiri dari Kawasan pariwisata alam dan Kawasan pariwisata budaya.

8. Kawasan permukiman

Kawasan permukiman ditetapkan seluas 36.084 (tiga puluh enam ribu delapan puluh empat) hektar yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Serang yang terdiri dari Kawasan permukiman perkotaan dan Kawasan permukiman perdesaan.

9. Kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada di wilayah Kabupaten Serang meliputi:

- Kantor Koramil di setiap wilayah kecamatan
- Rahlat Paskhas Gorda di Kecamatan Binuang
- Pos TNI AL di Pulau Sangiang Kecamatan Anyar
- Pos TNI AL di Pulau Panjang Kecamatan Pulo Ampel
- Posmat Anyar di Kecamatan Anyar

Tabel 2.7.1
Rencana Pola Ruang Kabupaten Serang Tahun 2011-2031

NO	RENCANA POLA RUANG	LUAS (HA)	%
A	Kawasan Peruntukan Lindung	11.956	8,12
A.1	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	748	0,51
A.2	Kawasan Ekosistem Mangrove	378	0,26
A.3	Kawasan Hutan Lindung	717	0,49
A.4	Kawasan Pelestarian Alam	558,64	0,38
A.5	Kawasan Suaka Alam	5.063,44	3,43
A.6	Sempadan Pantai	1.425	0,97
A.7	Sempadan Sungai	3.065	2,08
B	Kawasan Peruntukan Budidaya	134.324	91,24

B.1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	4.396	2,99
B.2	Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.288	0,88
B.3	Kawasan Hutan Rakyat	5.540	3,76
B.4	Kawasan Industri	26.309	17,87
B.5	Kawasan Pariwisata	3.287	2,23
B.6	Kawasan Perikanan Budidaya	224	0,15
B.7	Kawasan Perkebunan	24.965	16,96
B.8	Kawasan Permukiman Perdesaan	3.957	2,69
B.9	Kawasan Permukiman Perkotaan	32.128	21,82
B.10	Kawasan Tanaman Pangan	32.229,36	21,89
C	Badan Sungai (Area)	935	0,64
TOTAL		147.213,42	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031
(Perda No. 5 Tahun 2020)

2. Kawasan-Kawasan Strategis Daerah

Perkembangan Kawasan Strategis Daerah (Pertumbuhan dan Pembangunan Pusat Ekonomi dan Wilayah Strategis)

1. Pengembangan pusat pertumbuhan Serang Timur (Kec. Ciruas, Kec. Kragilan, Kec. Kibin, Kec. Lebak Wangi, Kec. Carenang, Kec. Binuang dan Kec. Cikande);
2. Jalan baru lingkaran Serang Timur (Peningkatan status jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi);
3. Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang dan Smart City Kec. Ciruas;
4. Pengembangan pusat riset teknologi industri (Kec. Cikande, Kec. Kibin, Kec. Kragilan, Kec. Bojonegara dan Kec. Pulo Ampel);
5. Pengembangan Kawasan Industri Tunjungteja;
6. Pengembangan kawasan pertumbuhan Serang Barat (Kec. Kramatwatu, Kec. Waringinkurung, Kec. Bojonegara, Kec. Baros, Kec. Pabuaran dan Kec. Ciomas);
7. Pengembangan wilayah Pendidikan dan fasilitas SDM Kesehatan serta Riset dan teknologi Kesehatan Serang Barat (Kec. Baros, Kec. Pabuaran dan Kec. Kramatwatu);
8. Jalan baru lingkaran Serang Barat (Peningkatan status jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi); (Peningkatan status jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi);
9. Pengembangan kawasan pariwisata (Kec. Anyar, Kec. Cinangka, Kec. Padarincang, Kec. Gunungsari, Kec. Mancak, Kec. Tanara dan Kec. Tirtayasa);

10. Koperasi dan UMKM orientasi ekspor (Kec. Petir, Kec. Cikeusal, Kec. Tunjungteja, Kec. Bandung dan Kec. Pamarayan);
11. Pengembangan kawasan pertanian dan peternakan (Kec. Kopo, Kec. Jawilan, Kec. Pamarayan, Kec. Bandung, Kec. Cikeusal, Kec. Pontang, Kec. Tirtayasa, Kec. Tanara, Kec. Cinangka, Kec. Padarincang, Kec. Ciomas, Kec. Gunungsari, Kec. Mancak dan Kec. Waringinkurung);
12. Pengembangan kawasan minapolitan dan kota Pelabuhan Lontar (Kecamatan Pontang, Kec. Tirtayasa dan Kec. Tanara);
13. Optimalisasi pengembangan TPS dan Industri pengolahan sampah (Kec. Mancak).

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses penentuan tindakan tersebut didasarkan pada hasil analisis berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan. Permasalahan pembangunan daerah adalah permasalahan utama yang muncul dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 dirumuskan atas hasil analisa gambaran umum kondisi daerah yang tertuang dalam BAB sebelumnya. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi gambaran akar masalah yang kemudian dirumuskan menjadi permasalahan yang bersifat dominan/permasalahan pokok yang menjadi permasalahan pembangunan daerah, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1. 1 di bawah ini.

Tabel 3.1. 1
Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Dalam Gambaran Umum Kondisi Daerah	Rumusan Permasalahan Daerah
Peningkatan laju IPM yang belum optimal	Belum optimalnya sumber daya manusia dan inovasi
Belum meratanya akses pendidikan serta ketersediaan sarana prasarana dan SDM pendidikan yang sesuai standar	
Belum optimalnya partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun	
Tingginya intensitas migrasi penduduk akibat wilayah Kabupaten Serang sebagai lintasan antara Pulau Jawa dan Sumatera serta letak wilayah yang berdekatan dengan Jakarta	
Belum optimalnya sarana dan prasarana kependudukan	

Derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah	
Belum meratanya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas	
Belum optimalnya pengembangan olahraga, pemuda, dan keluarga	
Belum optimalnya peran riset, inovasi dan teknologi dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah	
Belum optimalnya pengembangan potensi unggulan dan daya tarik daerah	
Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat	
Belum optimalnya tata kelola yang akuntabel, transparan dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis digital	
Belum optimalnya percepatan penuntasan kemiskinan dan perluasan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya pembangunan sosial
Daya saing SDM vokasi yang masih rendah	
Adanya ketimpangan ekonomi daerah	
Belum optimalnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat	
Belum terwujudnya ekosistem lingkungan ramah dan berkelanjutan	Lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana belum optimal
Belum optimalnya pengelolaan persampahan yang terpadu dan ramah lingkungan	
Tingginya alih fungsi lahan dan perubahan iklim	

Pencegahan dan penanggulangan bencana belum optimal	
Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) belum memadai	
Belum optimalnya akses rumah tangga terhadap layanan sumber air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur belum merata
Belum optimalnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	
Belum optimalnya kapasitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan sesuai standar	
Belum optimalnya penataan ruang yang terintegrasi, berkeadilan dan berkelanjutan	
Rendahnya pengguna moda transportasi umum	
Penguatan ketersediaan dan kecukupan pangan yang belum optimal	
Laju pertumbuhan ekonomi yang lesu	Pembangunan ekonomi belum optimal
belum optimalnya pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai potensi unggulan daerah	
Belum optimalnya pengembangan sektor industri dan perdagangan	

Berdasarkan Tabel 3.1. 1, terdapat 5 (lima) rumusan permasalahan daerah yaitu (1) belum optimalnya sumber daya manusia dan inovasi, (2) belum optimalnya pembangunan sosial, (3) lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana belum optimal, (4) pembangunan infrastruktur belum merata, dan (5) pembangunan ekonomi belum optimal, dengan uraian sebagai berikut:

3.1.1 Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia dan Inovasi

Masalah pokok dari permasalahan daerah ini adalah:

A. Pendidikan

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik. Untuk mengukur kualitas sumber daya manusia digunakan Indikator Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang pada tahun 2023 merupakan yang tertinggi selama periode 2013-2022 dengan nilai IPM mencapai 72,63. Namun dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Serang menempati peringkat 3 (tiga) IPM terendah diatas Kabupaten Lebak (67,68) dan Kabupaten Pandeglang (70,28), jika dilihat pertumbuhan IPM pada tahun 2023 Kabupaten Serang mencapai 0,89 % tertinggi dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Salah satu konsep pembangunan manusia adalah pengembangan pengetahuan penduduk melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah serta peningkatan kualitas layanan khususnya kemampuan literasi dan numerasi. Pada tahun 2023 RLS 7,79 tahun, hal ini menggambarkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Serang menjalani jenjang pendidikan sampai tingkat SD atau maksimal SMP (kelas VII). Sementara Harapan Lama Sekolah HLS di Kabupaten Serang pada 2023 mencapai 12,86 (tahun), artinya bahwa anak-anak Kabupaten Serang yang telah berumur 7 (tujuh) pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah hampir menamatkan Diploma I. Sedangkan capaian kemampuan literasi pada jenjang pendidikan SD dan SMP mencapai level sedang dan untuk kemampuan numerasi pada jenjang pendidikan SD dan SMP mencapai level kurang. Permasalahan yang dihadapi dengan belum optimalnya capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Serang dikarenakan :

- Masih adanya kesenjangan dalam mengakses kesempatan belajar terutama untuk masyarakat miskin, yang mana biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin mahal
- Belum meratanya akses pendidikan di setiap wilayah terutama untuk akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi
- Ketersediaan sarana/prasarana dan SDM pendidikan yang sesuai standar masih belum mencukupi secara kualitas maupun kuantitas
- Belum optimalnya layanan pendidikan khususnya untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi untuk mengembangkan kapasitas peserta didik agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat
- Belum optimalnya partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mempercepat wajib belajar 13 tahun.

Dalam laporan evaluasi RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 atas evaluasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi Banten, dijelaskan bahwa partisipasi pendidikan usia dini yang masih rendah, kuantitas dan kualitas guru masih terbatas yang ditunjukkan kurang dari 50 persen guru memiliki sertifikat pendidik baik jenjang PAUD, SD maupun SMP. Pencapaian pembangunan pendidikan telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu didorong terutama dalam upaya: a) meningkatkan partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mempercepat wajib belajar 13 tahun, b) meningkatkan pengelolaan pendidikan termasuk tenaga pendidik pada jenjang PAUD, SD dan SMP serta pendidikan kesetaraan dan non formal, c) adopsi pembelajaran STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics*), dan d) pengembangan layanan pendidikan berbasis digital.

B. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Serang pada tahun 2023 semester I sebesar 1;718.502 jiwa dengan didominasi kelompok umur usia produktif (69,16 %) dan kelompok usia tidak produktif sebesar (30,84%) dengan rasio kejis kelamin sebesar 104 dan angka 0-14 tahun. Proyeksi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Serang sampai dengan 2045 diperkirakan sebanyak 2.053.69 Jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 0,84 %, sedangkan proyek penduduk berdasarkan kelompok umur ada peningkatan di usia produktif dan lanjut usia . Permasalahan pertumbuhan penduduk yang ada di kabupaten Serang sebagai berikut :

- Masih tingginya angka TFR pada tahun 2022 hasil SP2020-LF sebesar 2,15;
- Tingginya angka migrasi penduduk di Kabupaten Serang hal ini disebabkan posisi geografi kabupaten serang sebagai lintasan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra dan letaknya yang dekat dengan Pusat Pemerintahan dan Ibu Kota Negara.

Dalam hal pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil era pelayanan sekarang lebih kearah pelayanan diginatalisasi, yang menjadi permasalahan pelayanan kependudukn menuju arah digitalisasi, sebagai berikut :

- Belum mencukupinya sarana dan prasarana versi terbaru sesuai dengan kebutuhan standar aplikasi digitalisasi;
- Belum optimalnya akses internet bagi masyarakat dalam mengakses aplikasi pelayanan administrasi penduduk.

C. Kesehatan

Permasalahan kesehatan di Kabupaten Serang terkait dengan derajat kesehatan masyarakat di antaranya yaitu kematian bayi. Meskipun angka kematian bayi di Kabupaten Serang menunjukkan penurunan, jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Serang dalam rentang tahun 2018 hingga tahun 2023 masih cukup tinggi. Pada tahun 2023, angka kematian bayi sebesar 6,7/1.000 kelahiran hidup. Salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi risiko kematian bayi adalah mengoptimalkan kunjungan ke puskesmas maupun puskesmas pembantu. Kunjungan bayi sesuai standar diharapkan dapat mendeteksi secara dini adanya penyakit atau tanda bahaya yang dapat berujung pada kematian bayi.

Akses masyarakat ke puskesmas di Kabupaten Serang sudah menunjukkan tren yang baik namun tidak sama halnya dengan akses ke puskesmas pembantu yang masih terbatas. Hal ini disebabkan jumlah pembantu puskesmas yang ada di Kabupaten Serang masih sangat sedikit dibandingkan jumlah desa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Serang. Akibatnya, deteksi dini risiko adanya penyakit atau tanda bahaya yang dapat berujung pada kematian bayi tidak dapat terantisipasi dengan cepat. Masalah mortalitas di Kabupaten Serang tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi, tetapi juga masih tingginya jumlah kematian ibu. Tingginya jumlah kematian ibu terkait dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan maupun deteksi dini kondisi Kesehatan pada ibu hamil. Pada rentan waktu 2018 hingga tahun 2023, kematian ibu di Kabupaten Serang paling banyak terjadi di masa kehamilan yang disebabkan oleh minimnya deteksi dini permasalahan preeklamsia pada ibu hamil sampai dengan melahirkan.

Kematian ibu di Kabupaten Serang paling banyak terjadi pada masa nifas yang disebabkan oleh perdarahan maupun hipertensi dalam kehamilan, serat infeksi. Selain itu, penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari ketepatan waktu dalam mengakses ke pelayanan kesehatan ibu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan. Kematian ibu tertinggi kedua berada di Kabupaten Serang. Di tahun 2023, angka kematian ibu masih sebesar 101/100.000 kelahiran hidup yang menjelaskan bahwa sebanyak 101 ibu meninggal pada tahun tersebut per 100.000 kelahiran yang terjadi di waktu yang sama. Sumber daya dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Serang juga masih menghadapi masalah, seperti jumlah dokter dan tenaga para medis yang masih sedikit. Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Serang juga masih sedikit sehingga pelayanan Kesehatan tidak berjalan maksimal.

Jumlah posyandu, poliklinik, dan pustu masih minim dalam melayani

jumlah penduduk di Kabupaten Serang. Hal tersebut juga terjadi pada pelayanan Kesehatan di rumah sakit. Prevalensi stunting di Kabupaten Serang menempati posisi keempat tertinggi dari kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten dan lebih rendah daripada rata-rata Provinsi pada tahun 2023 yakni sebesar 23,9. Stunting merupakan permasalahan yang multidimensi. Kasus stunting di Kabupaten Serang disebabkan hal antara lain minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat, dan aman, ditunjukkan dengan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi. Selain pemberian asupan gizi yang seimbang pada usia balita, perlu diperhatikan pula pemenuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan yaitu terhadap ASI Eksklusif dan pola asuh orang tua terhadap balita kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko akibat pernikahan anak, serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi. Kabupaten Serang masih menghadapi beberapa masalah penyakit menular, di antaranya angka notifikasi semua kasus tuberkulosis cenderung mengalami peningkatan. pada tahun 2022 insiden mencapai 250 per 100.000 penduduk. Angka insiden Tuberkulosis di Kabupaten Serang masih tinggi untuk mencapai target eliminasi tuberkulosis tahun 2030 yaitu menurunkan insiden tuberkulosis 65 per 100.000 penduduk.

Selain itu pentingnya tentang pemahaman Kesehatan di Masyarakat terkait penyakit tidak menular yang menduduki angka kematian yang cukup tinggi seperti obesitas, penyakit turunan (Diabetes Militus), Jantung dan hipertensi dan juga penyakit tidak menular lainnya. Selain dari pada itu permasalahan kesiapan siagaan terhadap bencana / pandemic penyakit baru perlu ditingkatkan salah satunya dengan terus meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Masyarakat. Pencapaian pembangunan kesehatan telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, namun demikian upaya peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, Jaminan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan untuk penurunan stunting dan Pengembangan pelayanan kesehatan primer sampai tingkat rujukan masih perlu mendapat perhatian.

Dalam laporan evaluasi RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 atas evaluasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi Banten, dijelaskan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta Angka Kesakitan yang masih tinggi. Selain itu, Kabupaten Serang menghadapi kekurangan gizi mikro dan makro yang tercermin dan stunting masih tinggi 23,9 persen. Pencapaian pembangunan kesehatan telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, namun demikian upaya peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan

pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, Jarninan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan untuk penurunan stunting dan Pengembangan pelayanan kesehatan primer sampai tingkat desa dan kelurahan masih perlu mendapat perhatian.

D. Kepemudaan dan Olahraga

Keberhasilan pembangunan pemuda menjadi penting untuk disorot. Peran aktif kepemudaan mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Di Kabupaten Serang, peran aktif organisasi kepemudaan mencapai 97,50 persen pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 100 persen. Hal ini menjadi catatan bagi Kabupaten Serang untuk lebih meningkatkan kualitas dan peran aktif generasi muda melalui beberapa aspek seperti kesehatan, Pendidikan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, dan kepemimpinan.

Pelaksanaan pembangunan urusan keolahragaan diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembinaan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah. Pada tahun 2022, pembinaan olahraga mengalami peningkatan yang mencapai 92,45 persen. Permasalahan muncul pada kualitas sumber daya manusia yang belum optimal. Keterlibatan pelatih yang bersertifikat belum cukup mengoptimalkan atlet muda yang dimiliki oleh Kabupaten Serang. Hal tersebut dijelaskan hanya sebesar 15,36 persen atau hanya 90 atlet yang berprestasi pada tahun 2022. pada cabang olahraga juga hanya terdapat 15 cabang olahraga yang menorah prestasi.

E. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah

Dalam rangka melaksanakan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Serang, sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah perlu disusun dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah (RSIDa) yang merupakan salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan lebih inovatif dan progresif.

Permasalahan penelitian dan pengembangan inovasi juga menjadi isu strategis global dan nasional, agar kedepan daerah memiliki daya saing dan inovasi untuk meningkatkan kapasitas SDM Pemerintahan, tata Kelola pemerintahan dan basis peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui inovasi dan penelitian diberbagai bidang. Saat ini kurangnya tenaga ahli dan tenaga terampil yang berfokus kepada penelitian dan pengembangan inovasi menjadi salah satu permasalahan dan juga daya dukung anggaran yang berfokus kepada riset dan teknologi inovasi daerah masih menjadi salah satu permasalahan.

F. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Serang ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Serang sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah Jaseng dalam kurikulum muatan lokal ditingkat pendidikan namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Serang seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai budaya di Kabupaten Serang tidak terlepas dari norma-norma religiusitas, mengingat Sejarah Kabupaten Serang sebagai wilayah penyebaran Agama Islam sampai dengan puncak jaya nya samapai saat ini. Permasalahan pengamalan penghayatan nilai-nilai budaya dan Agama ini yang harus terus di pelihara dan di jaga agar tidak memudar sebagai warisan sekaligus pondasi kekuatan masyarakat yang tidak ternilai.

Pemerintah Kabupaten Serang melakukan upaya dalam merevitalisasi dan inventarisasi karya budaya dengan tujuan untuk melestarikan kebudayaan dan mampu memunculkan potensi-potensi karya budaya yang belum diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Kebudayaan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga akan menjadi haluan Pembangunan kedepannya. Kabupaten Serang memiliki banyak benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang sudah terinventarisasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Pada tahun 2023, Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan hanya mencapai 39 persen dari total Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Serang. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pembinaan terhadap benda, situs, maupun kawasan cagar budaya.

G. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,

informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dalam meningkatkan peran literasi di masyarakat, peran perpustakaan sangatlah penting. Perpustakaan berperan penting sebagai sarana membaca dan memperoleh pengetahuan bagi masyarakat di luar lembaga formal.

Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Serang pada tahun 2022 mencapai 47,13 persen, ini menjadi angka terendah diantara kabupaten/kota se Provinsi Banten. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Serang dalam pembangunan literasi masyarakat diantaranya masih belum meratanya layanan perpustakaan, belum mencukupinya koleksi dan tenaga perpustakaan, masih rendahnya tingkat kunjungan masyarakat, masih rendahnya jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi serta masih rendahnya jumlah kepesertaan anggota perpustakaan.

H. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator Indeks Kematangan dan Penerapan SPBE dengan target sebesar 2,98 poin. Capaian kinerja indikator penerapan SPBE adalah 88,59 persen dengan realisasi indeks SPBE sebesar 2,64 poin. Permasalahan aksesibilitas teknologi informasi bukan hanya dari ketersediaan jaringan internet pada suatu wilayah, pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan pemerintahan dan kinerja pemerintahan juga menjadi tolak ukur atas permasalahan aksesibilitas dan bagian dari tata Kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

I. Persandian

Permasalahan utama persandian adalah belum optimalnya sarana dan prasarana persandian, belum optimalnya pengelolaan aset persandian, belum kuatnya tata Kelola keamanan informasi, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia pemerintah. Maka dari itu, pemerintah sebagai penjamin keamanan data dan keterbukaan informasi publik perlu mencermati hal tersebut.

J. Statistika

Peran strategis dalam proses pembangunan di suatu daerah atau wilayah ditentukan juga oleh statistika yang menjadi data dasar dalam proses perencanaan Pembangunan. Statistik bersifat konkrit dan kaku karena karakteristik daerah secara jelas dapat digambarkan melalui data-data angka. Pada era modern ini, statistika mulai mendapat tuntutan untuk bersifat terbuka dan transparan sehingga masyarakat publik dapat menilai kinerja pemerintah secara langsung.

Dalam hal ini, permasalahan ditemukan dalam hal keterbukaan dan akses data di Kabupaten Serang. Meskipun capaian keterbukaan data statistik sektoral mengalami peningkatan, namun capaian baru mencapai 60 persen di tahun 2022. Program satu data pada e-walidata yang di gagas pemerintah pusat menjadi tolak ukur keberhasilan tata Kelola pemerintahan atas hasil pengolahan statistika yang baik.

K. Tata Kelola Pemerintah

Tata kelola pemerintah merupakan isu yang penting dalam harmonisasi hubungan antar pemerintah dan kelembagaan. Tata kelola pemerintah diukur dengan skor indeks capaian reformasi birokrasi di mana nilai indeks Kabupaten Serang terkategori “BB” pada tahun 2023. Upaya untuk meningkatkan reformasi birokrasi bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik berkualitas Good and Clean Governance serta layanan berbasis *e-Government*.

Tata kelola pemerintahan diperlukan dalam rangka mewujudkan kerangka kerja pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Hal tersebut ditandai dengan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Serang tahun 2023 pada katagori A dan Indeks Reformasi Birokrasi masih pada kategori BB. Tata kelola pemerintahan ke depan masih perlu didorong terutama dalam upaya: a) Meningkatkan kinerja birokrasi dan menerapkan manajemen talent aparatur sipil publik di seluruh instansi pemerintah daerah. B) Memperkuat upaya pencegahan korupsi. C) Meningkatkan layanan public dan digitalisasi layanan Pemerintah Daerah.

L. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

Salah satu komponen dalam pertumbuhan penduduk adalah kelahiran. Dalam rangka mencapai angka kelahiran total sebesar 2,15 dalam menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045 dibutuhkan pertumbuhan penduduk yang stabil dengan upaya menekan kelahiran, salah satunya melalui penggunaan kontrasepsi. Namun, rasio akseptor KB di Kabupaten Serang pada tahun 2022 mencapai 72,35 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2020 mencapai 76,17 persen. Dalam penggunaan MKJP pun hanya mencapai 16,32 persen pada tahun 2022. Selain itu masih adanya *unmet need* KB (ingin ber-KB tidak terpenuhi) di Kabuapten Serang serta tingkat putus pakai kontrasepsi (drop out) yang masih perlu perhatian bersama.

Penyebab tingkat putus pakai kontrasepsi adalah penggunaan alat

kontrasepsi MKJP masih rendah. Hal tersebut senada dengan temuan jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan di Kabupaten Serang adalah kontrasepsi jenis non-MKJP, yaitu suntikan sebesar 75,09 persen, lalu diikuti oleh pil KB sebesar 22,03 persen.

3.1.2 Belum Optimalnya Pembangunan Sosial

Masalah pokok dari permasalahan daerah ini adalah:

A. Kesejahteraan Masyarakat (Kemiskinan, Ketimpangan, dan Ketenagakerjaan)

Perekonomian suatu negara sejatinya selalu mengalami perubahan di setiap tahunnya karena adanya kegiatan perekonomian yang berlangsung serta diupayakan semakin meningkat dari periode sebelumnya. Keberhasilan suatu negara dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dilihat dari besar kecilnya pendapatan yang diperoleh yang digambarkan dari laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Semakin besar pendapatan yang diperoleh juga akan menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat pendapatan suatu negara juga akan menunjukkan bagaimana kondisi serta tingkat pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang cenderung fluktuatif hingga dapat dikatakan melambat. Selama periode 2011-2022 pada tahun 2011-2013, ekonomi Kabupaten Serang mampu tumbuh rata-rata 5,85 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,32 persen selama tahun 2013-2022. Hal tersebut disebabkan produktivitas yang rendah dan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi potensial dibawah 5 persen yaitu sebesar -2,73 persen. Sehingga kondisi-kondisi tersebut menyebabkan ekonomi Kabupaten Serang sulit tumbuh lebih cepat.

Ketimpangan merupakan permasalahan yang lebih kompleks dibanding dengan kemiskinan. Ketimpangan yang tinggi lambat laun akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan suatu daerah tidak mampu keluar atau terjebak dalam kelompok pendapatan kelas menengah. Masih terdapat ketimpangan di Kabupaten Serang meskipun bila dilihat tren nya lebih rendah daripada ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten dan sempat turun pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,264 akan tetapi pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0.284 yang berarti tingkat

ketimpangan penduduk Kabupaten Serang kembali meningkat.

Ketimpangan yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya berbagai konflik sosial, rapuhnya ikatan kebersamaan, pemogokan buruh, tingginya angka kriminalitas, bahkan sampai pada hilangnya kepercayaan terhadap berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah karena masyarakat telah menjadi apatis. Kondisi ini akan berdampak buruk pada proses pembangunan. Jika tidak ada upaya perbaikan kebijakan, akan menjadi suatu “lingkaran setan”. Pertumbuhan yang tidak berkualitas akan menyebabkan meningkatnya ketimpangan; dan ketimpangan yang tinggi akan mengganggu proses pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu garis kemiskinan Kabupaten Serang dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Banten terlihat bahwa selama periode 2010-2022 garis kemiskinan Kabupaten Serang berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Banten.

Tren garis kemiskinan di Kabupaten Serang terus meningkat, walaupun lebih landai jika dibanding dengan peningkatan garis kemiskinan Provinsi Banten. Bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Banten, persentase penduduk miskin di Kabupaten Serang tidak berbeda jauh, rata-rata perbedaannya 0,85 persen selama periode 2010-2022 sedangkan bila dilihat dari tren-nya selisih garis kemiskinan antara Kabupaten Serang dengan Provinsi Banten terus meningkat. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang cenderung lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di Provinsi Banten karena ketika garis kemiskinan naik dan jumlah penduduk miskin turun maka tingkat kemiskinan akan menurun.

Pada permasalahan ketenagakerjaan, masih menjadi salah satu faktor terkait link and match ketersediaan SDM dengan kesesuaian kebutuhan industri, baik industri skala besar maupun sedang, daya saing SDM dan kapasitas Pendidikan vokasi menjadi salah satu permasalahan yang masih memerlukan perhatian khusus agar serapan tenaga kerja mampu berdaya saing dan dapat mengurangi angka pengangguran, ketimpangan serta kemiskinan.

Dalam laporan evaluasi RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 atas evaluasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi Banten, dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Serang pada Tahun 2022 mencapai 4,96 persen yang mencerminkan belum optimalnya

pemerataan kesejahteraan ekonomi dan upaya penanganan kemiskinan yang belum terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan struktur permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan penggunaan data masih terfragmentasi dan belum termutakhirkan secara sistematis sehingga tingkat kesalahan sasaran masih cukup tinggi. Selanjutnya, pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

B. Sosial

Dalam rentang waktu tahun 2016 hingga tahun 2022, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Serang masih menunjukkan angka yang tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan penanganan sosial yang belum terselesaikan dengan maksimal. Pada tahun 2020 saja PMKS di Kabupaten Serang diantaranya anak terlantar sebanyak 2.903 jiwa, balita terlantar sebanyak 964 jiwa, lansia terlantar sebanyak 1.542 jiwa, serta fakir miskin yang mencapai 331.734 jiwa. Sementara itu, penanganan PMKS di Kabupaten Serang masih di angka 73,33 persen pada tahun 2022.

Tingginya lansia telantar berpengaruh terhadap capaian kemiskinan ekstrem di Kabupaten Serang. Menurut BPS Provinsi Banten (2023) adanya kelompok penduduk yang tinggal sendiri dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja berdampak pada sulitnya dalam mencapai nol kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Hal tersebut disebabkan kehidupan mereka cenderung bergantung pada bantuan dari pemerintah. Sementara itu ketika bantuan dari pemerintah tidak lagi ada, kelompok tersebut akan kembali masuk ke dalam kemiskinan ekstrem.

C. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan dan kemandirian desa di Kabupaten Serang masih menghadapi masalah. Hal tersebut terlihat dari capaian indeks desa membangun tahun 2023 sebesar 0,6804 atau kategori berkembang. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Serang berada di urutan kedua

dibandingkan dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, akan tetapi tidak lebih tinggi dari Kabupaten Tangerang yang sudah berstatus desa maju. Berdasarkan capaian indeks desa membangun tahun 2023, dari 326 desa di Kabupaten Serang baru memiliki 12 desa yang sudah berstatus desa mandiri, 68 desa status maju, 245 desa status berkembang dan masih ada satu desa status tertinggal.

Untuk mendorong desa meningkatkan status desa, desa harus banyak berinovasi dari segi pelayanan, berinovasi memanfaatkan teknologi guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat dengan memiliki web desa berbasis digital serta mendorong desa untuk memenuhi indikator-indikator yang terdapat dalam indikator tiga dimensi pembentuk IDM yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Kabupaten Serang masih memiliki tantangan dalam meningkatkan lembaga desa dan kapasitas desa dalam upaya menjadikan Desa Mandiri di wilayah Kabupaten Serang. Permasalahan lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sarana dan prasarana perkantoran pemerintah sebagai penunjang pelaksanaan tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan salah satu daya dukung di dalam memberdayakan Masyarakat.

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik (menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa). Sebanyak 326 desa di Kabupaten Serang, sarana dan prasarana dalam kondisi baik hanya mencapai 55,21 persen atau sekitar 180 desa pada tahun 2023.

D. Ketentraman dan Ketertiban

Angka kriminalitas dapat bermanfaat dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Angka kriminalitas juga dapat menjadi acuan untuk melakukan perencanaan dalam upaya dan partisipasi pemerintah daerah, penegak hukum dan masyarakat untuk menjaga keamanan di lingkungan baik tingkat desa hingga tingkat daerah. Saat ini penegakan ketertiban masyarakat baik dari sisi keamanan dan terhadap peraturan masih menjadi potensi permasalahan yang harus dipantau secara rutin agar tidak berdampak dan menimbulkan gejolak dimasyarakat, terutama terkait dengan penertiban penyakit masyarakat

serta peredaran minuman beralkohol tak berijin usaha.

Selain dari pada angka kriminalitas dan penegakan aturan, kegiatan demonstrasi dimuka umum yang dilindungi undang -undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Juga masih memiliki potensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tahun 2023, IKUB Kabupaten Serang mencapai 80,68. Kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Serang berada pada kondisi yang baik.

Namun demikian, potensi permasalahan bukan hanya terjadi dari kerukunan antar umat beragama dapat juga terjadi permasalahan kerukunan dalam umat agama itu sendiri. Islam sebagai agama mayoritas penduduk Kabupaten Serang, dan banyaknya pemahaman dan pengamalan yang mungkin terdapat sedikit perbedaan pada pelaksanaannya dapat juga berpotensi menjadi permasalahan.

3.1.3 Lingkungan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana Belum Optimal

Masalah pokok dari permasalahan daerah ini adalah:

A. Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Kebencanaan

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Serang menunjukkan penurunan di tahun 2022 mencapai 65,70 dengan predikat cukup baik. Kualitas lingkungan yang perlu menjadi perhatian adalah aspek kualitas air di mana aspek tersebut memiliki nilai yang kecil. Indeks kualitas air di Kabupaten Serang terus mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2022 indeks kualitas air di Kabupaten Serang memiliki nilai sebesar 47,28 dengan predikat kurang baik. Rendahnya kualitas air di Kabupaten Serang tidak terlepas dari adanya pencemaran air yang bersumber dari berbagai aktivitas ekonomi dan rumah tangga. Pencemaran air berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan seperti permukiman, industri, tambak, dan transportasi laut di Wilayah Pesisir serta kegiatan pertambangan yang berasal dari bagian hulu.

Berkembangnya kawasan industri di wilayah timur Kabupaten Serang memberikan dampak secara langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan khususnya sumber daya air. Kasus pencemaran lingkungan di Kabupaten Serang yang berasal dari aktivitas industri diantaranya seperti tumpahan HCL, tumpahan *xylene* dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain-lain. Persoalan sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang masih terjadi di Kabupaten Serang. Capaian kinerja terkait penanganan sampah hingga tahun 2022 mencapai 84,29 persen. Jumlah timbulan sampah pada tahun 2023 mencapai 1.179,73 ton/hari dan tertinggi di 3 (tiga) wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Cikande mencapai 80,17 ton/hari, Kecamatan Kramatwatu mencapai 71,52 ton/hari, dan Kecamatan Ciruas mencapai 60 ton/hari. Jumlah timbulan sampah tersebut diprediksi akan semakin bertambah seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Serang.

Selain dari hal-hal tersebut diatas permasalahan lingkungan hidup pada Gas Rumah Kaca (GRK) dan permasalahan perubahan iklim menjadi prioritas yang harus diperhatikan akibat dari industrialisasi, transportasi dan pemanfaatan energi. Permasalahan utama sektor kehutanan di Kabupaten Serang adalah masih luasnya lahan kritis. Pada tahun 2019, kawasan hutan yang dimiliki oleh Kabupaten Serang terdapat luas lahan sebesar 24.194,59 hektar yang berstatus luas lahan kritis. Luas lahan sebesar 18.313,21 hektar lahan berstatus agak kritis. Adapun lahan kritis adalah seluas 4.031,83 hektar. Lahan yang berstatus sangat kritis di Kabupaten Serang pada tahun tersebut seluas 1.849,55 hektar.

Di luar dari kawasan hutan lindung, permasalahan lahan juga menjadi perhatian yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, Kabupaten Serang memiliki lahan kritis di luar kawasan hutang lindung seluas 23.819,95 hektar. Kabupaten Serang merupakan wilayah yang rentan dan memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Pada tahun 2022, nilai indeks risiko bencana (IRB) Kabupaten Serang mencapai 154,18, di mana angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun demikian nilai indeks risiko bencana di Kabupaten Serang masih masuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan potensi ancaman yang terjadi di Kabupaten Serang, bencana yang berpotensi terjadi dengan kategori tinggi dan sedang antara lain adalah banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Sementara itu, potensi terjadinya bencana tanah longsor masih cukup rendah dengan indeks risiko bencana tanah longsor 6,08. Dalam laporan evaluasi RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 atas evaluasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi Banten, dijelaskan bahwa Kabupaten Serang masih memiliki tantangan yakni kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan risiko bencana di Kabupaten Serang dihadapkan beberapa tantangan antara lain: 1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup belum optimal. 2) Perubahan iklim (pemanasan global) dan alih fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan yang mengakibatkan turunnya daya dukung lingkungan hidup. 3) Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum memadai. 4) Ketersediaan dokumen rencana tata ruang belum memadai dan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal. 5) Pencegahan dan penanggulangan bencana belum optimal. Pencapaian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat dari yang ditargetkan, namun masih perlu didorong terutama dalam upaya:

- a. Mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan (*sustainable lifestyle*);
- b. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dimulai dari rumah tangga;
- c. Meningkatkan luasan kawasan konservasi perairan dan daratan setidaknya 30 persen dari total luas wilayah;

Pembangunan sistem peringatan dini multiancaman bencana terpadu melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi.

3.1.4 Pembangunan Infrastruktur Belum Merata

Masalah pokok dari permasalahan daerah ini adalah:

A. Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan dengan pemenuhan layanan infrastruktur masyarakat dan kondisi infrastruktur wilayah di Kabupaten Serang. Layanan tersebut di antaranya adalah infrastruktur jalan dan jembatan, drainase, jaringan sumber daya air/irigasi, serta penyelenggaraan penataan ruang yang

meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Berkaitan dengan capaian indikator urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam RPJMD tahun 2021-2026, dari 10 (sepuluh) indikator yang ditetapkan hanya 2 (dua) indikator saja yang tidak mencapai target yaitu indikator persentase desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum sebesar 93,01 persen dan indikator persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik dengan tingkat capaian sebesar 97,70 persen.

Aksesibilitas kebutuhan air minum layak di Kabupaten Serang masih menunjukkan pencapaian yang belum maksimal. Sumber air minum tersebut diukur dari jenis sumber air minum utama dan sumber air untuk kegiatan domestik lain seperti untuk memasak dan Mandi Cuci Kakus (MCK). Hal tersebut diakibatkan bertambahnya jumlah keluarga namun tidak diikuti dengan penambahan sarana dan prasarana air bersih di tahun 2022 dimana hanya mencapai 73,59 persen. Selain terpenuhinya kebutuhan air bersih, pada tahun 2022 jumlah keluarga yang mempunyai akses jamban hanya 80,19 persen meskipun terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. indikator akses terhadap air bersih sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga menjadi salah satu indikator terhadap kondisi rumah layak huni di Kabupaten Serang yang masih menjadi perhatian bersama pemerintah Kabupaten Serang. Pada tahun 2022, rumah layak tidak huni di Kabupaten Serang masih mencapai 9,07 persen dari luas wilayah permukiman di Kabupaten Serang, meskipun jumlahnya semakin menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu juga, permasalahan lainnya yakni masih tingginya kawasan kumuh di Kabupaten Serang dimana capaian kinerja untuk penanganan kawasan ini mencapai 77,78 persen hingga tahun 2022. Selain air minum akses terhadap air bersih merupakan hal penting yang menjadi kebutuhan dasar dalam pembangunan berkelanjutan jumlah kk yang memiliki akses terhadap air bersih menunjukkan data tren positif pada tahun 2018-2021 namun menurun pada tahun 2022. Pada tahun 2018, jumlah kk yang memiliki akses terhadap air bersih mencapai 85,76 persen atau setara 380.851 kk dan terus meningkat hingga tahun 2021 mencapai 89,26 persen atau setara dengan 353.851 kk. Pada tahun 2022, jumlah kk yang memiliki akses terhadap air bersih mengalami penurunan mencapai 73,59 persen atau hanya 355.955 kk pada tahun

tersebut. jumlah air yang disalurkan mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2014 disalurkan sebanyak 5.416.546 m³ air bersih dan pada tahun 2020 jumlah air bersih yang disalurkan hanya berkisar 426.053 m³ artinya terjadi penurunan jumlah air yang disalurkan hampir mencapai 5 juta m³.

Permasalahan yang timbul adalah ketersediaan air bersih yang layak pakai dan sumber air bersih yang semakin berkurang, pertumbuhan penduduk dan daya dukung air bersih menjadi permasalahan yang cukup serius kedepan. Selain dari pada hal-hal tersebut ketersediaan energi juga menjadi permasalahan mendasar bagi masyarakat, sumber daya energi dari fosil yang semakin menipis menjadi permasalahan yang harus dipecahkan secara Bersama-sama dengan mendukung energi baru terbarukan dan pemanfaatan inovasi energi bersih dengan biaya yang terjangkau.

Berkaitan dengan kondisi ketimpangan, permasalahan infrastruktur juga diperlihatkan dari aksesibilitas jalan maupun jembatan yang menjadi penghubung antara wilayah di Kabupaten Serang. Penilaian kondisi infrastruktur jalan pada tahun 2022 tercatat sepanjang 114,04 kilometer jalan di Kabupaten Serang masih jalan kerikil. Selain itu, sepanjang 120,64 kilometer jalan di Kabupaten Serang mengalami kondisi rusak berat dan 75,92 kilometer mengalami kondisi rusak. Kondisi jalan yang rusak diperlihatkan dari jalan yang sudah berlubang, tergenang air saat hujan, dan sangat sulit untuk dilewati. Sementara itu, kondisi infrastruktur jembatan pada tahun 2022 mencatat sebanyak 15 unit jembatan dalam kondisi rusak berat dan 85 unit jembatan dalam kondisi rusak.

Kondisi jalan dan jembatan yang seperti ini mempengaruhi keselamatan dan keamanan pengguna kendaraan serta terhambatnya mobilitas masyarakat dalam berkegiatan. Infrastruktur jalan dan jembatan juga merupakan salah satu aset penting dalam meningkatkan laju perekonomian masyarakat. Misalnya apabila masyarakat dari Serang Timur akan mengirimkan hasil produksi ke arah barat, maka diperlukan infrastruktur jalan yang baik bagi kendaraan angkutan sehingga produk dapat sampai di tujuan dengan aman. Selanjutnya, kondisi Kabupaten Serang yang memiliki potensi untuk terdampak oleh beberapa ancaman bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan tsunami menuntut

kualitas sarana dan prasarana yang baik dan tangguh supaya dapat bertahan dari guncangan bencana yang menimpa.

Ketersediaan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman kedepan menjadi salah satu permasalahan yang akan keterbatasan jumlah lahan berbanding jumlah pertumbuhan penduduk, permasalahan ketersediaan perumahan dan Kawasan permukiman harus dicarikan solusi terbaik dengan mengkaji rumah bertumbuh / rumah susun dan atau penyedia Kawasan permukiman yang tetap memperhatikan Kawasan kumuh dan rumah layak huni dari berbagai indikator yang harus dipenuhi agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan.

Terdapat beberapa sarana publik dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap antisipasi pertumbuhan penduduk 2045, selain dari pada hal-hal diatas diantaranya ketersediaan sarana Pendidikan, sarana Kesehatan dan prasarana publik terkait permasalahan persampahan. Dalam laporan evaluasi RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 atas evaluasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi Banten, dijelaskan bahwa Kabupaetn Serang masih memiliki tantangan dalam pelayanan prasarana dan sarana dasar perkotaan di Kabupaten Serang masih belum optimal.

Pelayanan pada transportasi perkotaan dihadapkan pada: ketersediaan kapasitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan sesuai standar belum memadai, ketersediaan, kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan belum memadai, pengembangan permukiman yang layak huni yang belum optimal. Namun secara umum pencapaian bidang sarana dan prasarana perkotaan telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, namun masih perlu didorong terutama dalam upaya: 1) Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan sesuai standar, 2) Mengembangkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

B. Tata Ruang Wilayah

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan dokumen acuan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam dokumen RTRW tersebut telah ditetapkan rencana pola ruang yang merupakan acuan dalam pemanfaatan ruang yang mekanismenya dilakukan melalui proses perijinan pemanfaatan ruang. Selain rencana polar uang, dalam RTRW juga telah ditetapkan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) yang merupakan instrument

pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Melalui perhitungan atau pengukuran perbandingan antara rencana pola ruang dalam RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011 – 2031 dengan data penggunaan lahan pada tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa tingkat realisasi pemanfaatan ruang terhadap RTRW mencapai nilai 45,90 persen atau baru seluas 67.355 ha. Sedangkan sisanya seluas 79.392,58 ha belum dimanfaatkan atau masih sesuai dengan kondisi eksistingnya. Sementara itu, untuk tingkat kesesuaian dalam pemanfaatan ruang sekitar 95,04 persen atau seluas 64.013,06 ha merupakan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana polar uang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Serang.

Wilayah strategis di Kabupaten Serang berkaitan dengan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi ada pada Kawasan Strategis Nasional di Selat Sunda. Sedangkan yang masuk dalam kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi adalah: a) Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah; b) Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri; dan c) Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah.

Kawasan Strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi kabupaten meliputi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan Ciruas dan Kragilan, Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros dan Kecamatan Waringin Kurung, Kawasan Industri Minapolitan di Kecamatan Pontang dan Kecamatan Tirtayasa, serta Kawasan Wisata Pantai Barat di Kecamatan Anyar dan Cinangka. Permasalahan perizinan atas kesesuaian Ruang terhadap RTRW masih menjadi permasalahan utama, pertumbuhan dan alih fungsi ruang diluar RTRW masih didominasi permukiman dan usaha kecil, yang lebih dikarenakan status kepemilikan lahan.

Kedepan dokumen RTRW harus dapat juga menggambarkan kebutuhan pusat perkotaan pada wilayah ibu kota Kabupaten Serang di Kecamatan Ciruas dan Kragilan, mengingat saat ini wilayah tersebut masih menjadi wilayah industri dan pertanian serta wilayah pemukiman penduduk. Serta sebaran Pembangunan pusat kota wilayah serang barat serta kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana didalamnya. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Serang tahun 2011-2031 tercantum arahan

dan kebijakan penataan ruang Kawasan Kabupaten Serang dengan Kawasan perbatasan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan arahan antara lain:

- 1) Tujuan mewujudkan dan sinkronisasi pemanfaatan ruang melalui integrasi wilayah perbatasan antar kabupaten/kota;
- 2) Perwujudan struktur ruang yang mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- 3) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
- 4) Membentuk kawasan sesuai karakteristik dan potensi melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.

C. Perhubungan

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor baik itu roda dua maupun roda empat melanda hampir diseluruh wilayah di Indonesia khususnya Kabupaten Serang. Pada tahun 2010-2023, jumlah kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh mobilisasi barang, jasa, dan manusia. Jumlah kendaraan pada tahun 2023 mengalami peningkatan mencapai 28 persen atau setara 2.880.706 unit dibandingkan tahun 2010 yang hanya berjumlah 2.036.841 unit. Peningkatan ini didorong oleh adanya kenaikan pada jumlah kendaraan bermotor mobil penumpang mencapai 88 persen atau setara 96.856 unit di tahun 2023 dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 11.234 unit dan jumlah kendaraan bermotor sepeda motor yang mengalami peningkatan mencapai 27 persen atau setara dengan 2.712.875 unit pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2010 yang berjumlah 1.971.761 unit. Untuk moda transportasi umum, jumlah angkutan umum mengalami peningkatan pada tahun 2010-2023. Jumlah angkutan umum meningkat 24 persen atau setara dengan 10.066 pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya berjumlah 7.607 unit. Hal tersebut didorong adanya peningkatan jumlah angkutan umum mobil dan jumlah angkutan umum kereta tempelan yang meningkat lebih dari 50 persen pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2010.

Permasalahan atas jasa angkutan barang dan penumpang masih disekitaran sarana prasarana penerangan jalan umum yang masih perlu di tingkatkan, dukungan keamanan dan kenyamanan pada transportasi

umum, kepatuhan tarif dan trayek angkutan umum serta antisipasi moda transportasi umum untuk 20 tahun yang akan datang mengingat tingginya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan sarana transportasi angkutan barang dan penumpang.

Dalam laporan evaluasi RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 atas evaluasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi Banten, dijelaskan bahwa Kabupaten Serang masih memiliki tantangan dalam pengelolaan sistem transportasi umum yang belum terintegrasi secara keseluruhan dan belum memenuhi sepenuhnya standar keselamatan. Maka dari itu perlu untuk mengembangkan sistem transportasi angkutan umum terintegrasi dan pengembangan transportasi ramah lingkungan.

D. Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selama periode tahun 2018-2022 Kabupaten Serang memiliki ketahanan pangan yang baik di tiap tahunnya. Pada tahun 2018, nilai IKP sebesar 75,58 dengan kategori baik dan cenderung meningkat hingga tahun 2022 mencapai 78,63 dengan kategori sangat baik atau sangat tahan akan ketahanan pangannya. Akan tetapi potensi permasalahan ketahanan pangan tetap menjadi fokus Pembangunan dengan berkurangnya lahan pertanian dan atau alih fungsi lahan produktif pangan dan juga sumber-sumber pangan lainnya. Selain dari pada hal tersebut ketahanan pangan menjadi faktor kunci jaminan pertumbuhan penduduk agar tetap aman bagi ketersediaan pangan, tentunya dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi pengembangan ketahanan pangan.

3.1.5 Pembangunan Ekonomi Belum Optimal

Masalah pokok dari permasalahan daerah ini adalah:

A. Pertanian dan Perikanan

Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting di Kabupaten Serang, terutama dalam proses pembangunan perekonomian, pemenuhan penyediaan bahan pangan penduduk dan penyedia lapangan pekerjaan. Selain itu kontribusi lainnya adalah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Produksi sektor padi sebagai makanan pokok cenderung fluktuatif diikuti ketersediaan pangan berupa beras yang juga mengalami naik-turun selama periode 2011-2022. Hal tersebut menandakan belum optimalnya produktivitas sektor pertanian dikarenakan masih sangat tergantung pada cuaca seperti kemarau dan hujan dan juga produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal karena belum diterapkannya sistem pertanian yang modern.

Permasalahan lainnya yaitu tingginya alih lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri dan permukiman penduduk. Luas lahan pertanian yang mengalami penurunan setiap tahunnya berpotensi membuat produktivitas padi dan ketahanan pangan di Kabupaten Serang menurun. Selain itu, permasalahan lainnya adalah masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi yang dikarenakan kegiatan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh sangat terbatas serta terjadinya krisis regenerasi petani dimana lebih banyak petani tua daripada petani muda.

Potensi perikanan budidaya menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Serang untuk mengembangkan sub sektor perikananannya. Kondisi makro perekonomian yang dapat dilihat dari sub sektor perikanan tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan saja, namun juga perlu melihat tingkat konsumsi ikan dan nilai produksi perikanan yang ada di Kabupaten Serang. Total produksi perikanan budidaya di Kabupaten Serang mengalami penurunan pada kurun waktu tahun 2019-2020. Angka yang dicapai di tahun 2017 adalah 70.481,04 ton dan turun menjadi 41.245,76 ton pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa produktivitas sector perikanan masih rendah yang disebabkan diantaranya masih terbatasnya SDM, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industry perikanan, masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk

mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat, dan ketersediaan penyuluh perikanan yang belum memadai.

B. Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB yang diambil dari sektor makanan dan minuman mengalami naik turun pada periode 2015-2019. Hal tersebut sebanding dengan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang mengalami kondisi fluktuatif dan cenderung menurun pada tiga tahun terakhir pada periode tersebut yaitu pada tahun 2017-2019 yang menurun rata-rata 30,43 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa daya saing sektor pariwisata di Kabupaten Serang masih rendah atau kurang berkembang. Hal tersebut dapat berdampak pada PAD yang bersumber dari sektor pariwisata menjadi tidak optimal karena lemahnya angka kunjungan wisatawan.

Permasalahan pariwisata masih sekitar pertumbuhan sektor wisata baru dan unggulan, pagelaran event nasional dan daya Tarik wisatawan yang berakibat kepada menurunnya angka kunjungan atau jumlah kunjungan yang tidak stabil, selain dari pada hal-hal tersebut diatas faktor bencana alam juga menjadi perhatian wisatawan. Dalam laporan evaluasi RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 atas evaluasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi Banten, dijelaskan bahwa Kabupaetn Serang masih memiliki tantangan dalam meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan.

C. Industri dan Perdagangan

Lapangan usaha sektor perindustrian merupakan lapangan usaha yang memiliki kontribusi tertinggi dalam PDRB Kabupaten Serang. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB digunakan untuk melihat performa kinerja dan nilai tambah lapangan usaha perindustrian dalam ekonomi wilayah Kabupaten Serang. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB di Kabupaten Serang semakin menurun pada rentang waktu 2011-2022. , ini sangat berbanding terbalik dengan wilayah Kabupaten Serang yang mempunyai banyak industri, dimana terdapat industri di wilayah serang timur dan industri serang barat. Kontribusi terbesar pada tahun 2011 yaitu 54,89%, namun sayangnya, angka tersebut mengalami penurunan terus menerus pada tahun 2012-2020 menjadi

47,84%. Kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 48,09, kemudian berhasil pulih kembali pada tahun 2022 dengan kontribusi sektor perindustrian menjadi 48,10%. Permasalahan utama di sektor industri adalah peranan sektor industri yang didominasi oleh satu industri besar dan pengembangan industri kecil berbasis potensi daerah masih belum optimal. Selain dari pada hal-hal tersebut permasalahan sektor industri masih minimnya klaster industri hijau dan permasalahan industri pada dampak lingkungan.

Lapangan usaha perdagangan merupakan salah satu lapangan usaha yang menopang perekonomian. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB digunakan untuk melihat performa kinerja dan nilai tambah lapangan usaha perdagangan dalam ekonomi wilayah. kontribusi perdagangan dalam PDRB Kabupaten Serang tahun 2015-2022. Berdasarkan grafik diatas kontribusi perdagangan terhadap PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 yang semula 9,07% lalu bergerak naik menjadi 9,26%. Kemudian di tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar 9,12% dan 9,13%, sejalan dengan penurunan LPE di Kabupaten Serang dampak adanya pandemi Covid-19. Walaupun demikian dapat pulih kembali di tahun 2020 dengan kontribusi mencapai 9,42%.

Sektor perdagangan sesungguhnya telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian akan tetapi belum mampu mendorong peningkatan kelas usaha pelaku di bidang perdagangan. Kegiatan perdagangan selain terjadi dipasar yang bersifat lokal, terdapat pula kegiatan perdagangan internasional atau antar negara. Ekspor bersih perdagangan merupakan nilai total ekspor dikurangi nilai total impor dari wilayah tertentu. Nilai ekspor bersih positif mengindikasikan surplus perdagangan, jika sebaliknya nilai ekspor bersih negatif mengindikasikan defisit perdagangan. Kabupaten Serang yang memiliki posisi strategis pada pembangunan dan Arah Kebijakan wilayah Jawa dalam RPJPN 2025-2045 menjadi wilayah “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan” harus mampu menjawab tantangan atas permasalahan yang ada dengan Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan seperti Kawasan strategis perkotaan, Kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, Kawasan strategis pariwisata dan Kawasan strategis pertanian mendukung

kemandirian pangan, hal ini dapat menjadi jawaban atas kesejahteraan rakyat dan menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada di Kabupaten Serang.

Dalam laporan evaluasi RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 atas evaluasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi Banten, dijelaskan bahwa Kabupaten Serang masih menemukan tantangan pada industrialisasi meliputi hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, produktivitas UMKM dan Koperasi masih perlu ditingkatkan, pengembangan BUMD berdaya saing, peningkatan tenaga kerja produktif.

3.1.6 Permasalahan dalam KLHS RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025–2045

Pengkajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam rangka persiapan penyusunan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025–2045 ini merupakan upaya untuk memberikan rambu-rambu dalam proses penyusunan arah kebijakan dalam RPJPD. Dalam KLHS dijelaskan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Serang antara lain:

1. Masih rendahnya presentase pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas yang miskin dan rentan;
2. Tingginya presentase penduduk miskin di daerah tertinggal;
3. Masih rendahnya indeks pendidikan
4. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar SD/MI sederajat dan SMP/MTS sederajat
5. Rendahnya rata-rata lama sekolah;
6. Rendahnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan;
7. Menurunnya daya dukung pertanian lahan basah dan kering akibat dampak perubahan iklim dan rusaknya jaringan irigasi;
8. Rendahnya laju pertumbuhan PDRB pertengahan kerja pertahun;
9. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB;
10. Jumlah kunjungan wisatawan lokal yang rendah;
11. Rendahnya proporsi kredit UMKM terhadap total Kredit;
12. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di desa-desa terpencil yang masih rendah;
13. Proporsi peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan yang masih rendah;

14. Rendahnya presentasi tenaga kerja formal;
15. Rendahnya presentase tenaga kerja informal sektor pertanian;
16. Tingginya tingkat pengangguran terbuka;
17. Rendahnya proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur;
18. Penyedia jasa ecosystem penyedia pangan yang semakin menurun di beberapa kecamatan;
19. Penyedia jasa ekosistem penyedia air bersih yang masih rendah di beberapa kecamatan;
20. Belum tersedianya TPA;
21. Belum terdatanya limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri);
22. Belum terdatanya perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001;
23. Masih rendahnya Angka Harapan Hidup;
24. Proporsi peserta jaminan kesehatan yang masih rendah;
25. Belum meratanya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
26. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun yang masih tinggi;
27. Masih kecilnya persentase bayi usia 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif;
28. Tingginya angka kematian bayi;
29. Tingginya prevalensi HIV;
30. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang;
31. Tingginya Insiden Tuberkulosis;
32. Banyaknya kejadian malaria;
33. Tingginya prevalensi tekanan darah tinggi;
34. Tingginya angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun;
35. Rendahnya persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas;
36. Belum meratanya penyediaan infrastruktur dasar yang inklusif, aman, berkelanjutan, dan terjangkau oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan difabilitas;
37. Belum efisiennya pemerataan akses dan konsumsi air bersih dan minum serta sanitasi dasar yang berkelanjutan;
38. Belum meratanya pembangunan infrastruktur pendukung permukiman dan urbanisasi yang layak dan inklusif;

39. Belum meratanya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta internet yang universal;
40. Belum optimalnya praktik pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pembangunan, termasuk dalam pelayanan administrasi publik dan integrasi dalam e-government;
41. Belum terukurnya pemerataan akses internet serta lingkungan yang aman untuk perempuan, manula, dan kaum disabilitas;
42. Lingkungan inklusif bebas kekerasan dan diskriminasi yang belum tercapai sepenuhnya;
43. Belum terukurnya capaian tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas KKN;
44. Urgensi skema kerja sama berkelanjutan dalam pentahelix pembangunan, terutama pemerintah swasta;
45. Rendahnya penjaminan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan;
46. Belum teraturnya penjaminan pemberian identitas sah bagi semua masyarakat dan akses publik terhadap informasi dan perlindungan yang telah teratur;
47. Belum adanya skema manajemen kebencanaan dan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) serta rendahnya kesadaran mitigasi bencana;
48. Akses terhadap permukiman layak yang terjangkau belum dirasakan semua kelompok masyarakat;
49. Pembangunan infrastruktur drainase, limbah, dan persampahan yang belum merata dan terintegrasi dalam skema pengelolaan berkelanjutan.

3.2 Isu Strategis Daerah

Identifikasi isu strategis daerah untuk RPJPD tahun 2025-2045 Kabupaten Serang dilakukan melalui identifikasi permasalahan pembangunan daerah, isu global, isu nasional, isu regional Provinsi Banten, dan isu berdasarkan KLHS RPJD Kabupaten Serang tahun 2025-2045 serta potensi dan modal daerah. Identifikasi tersebut kemudian dirumuskan menjadi isu strategis daerah Kabupaten Serang.

3.2.1 Isu Global Dalam RPJPN 2025-2045

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi social ekonomoi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Berikut megatren global yang akan dihadapi menuju 2045.

A. Perkembangan Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Di sisi lain, terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran

ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal.

B. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di Kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan Kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sector industry, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (*compact*) melalui efisiensi layanan.

C. Perubahan Konstelasi Perdagangan Global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong

kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan.

D. Pergeseran Tata Kelola Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju aging society pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Ke depannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

E. Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam

termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui virtual–metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

F. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

G. Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor dan penerapan ekonomi sirkuler.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target *net zero emission* pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2025, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang

lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

H. Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things (IoT)*, *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Distributed Ledger Technology (DLT)*, *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automation (RPA)*, *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, *3D*, dan *Future Technologies*. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Pandemi Covid-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri seperti: *nanotechnology*; *blockchain*; robotika cerdas, IoT, AI, dan teknologi imersif; digitalisasi yang mendukung konektivitas; material maju; rekayasa genetik dan bioteknologi; teknologi lanjutan dan *additive manufacturing (3D printing, rapid prototyping, powder bed system, dan lainnya)*; inovasi mesin multifungsi yang

mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan.

Perkembangan teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *artificial intelligence* (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah gempuran disrupsi. Bahkan, pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang juga berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan. Selain itu, perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (*remote working*) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola *work from anywhere* (WFA). Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan real estate. Pola kerja jarak jauh mengasumsikan terbangunnya kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara. Teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

I. Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektro kehidupan dan tatan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional. Nilai *output* dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai *output* dunia, meningkat 34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai *output* negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai *output* dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama – mencapai 54 persen dari total nilai *output* global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai *output* yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015

menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

3.2.2 Isu Nasional Dalam RPJPN 2025-2045

A. Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas

Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Rata-rata produktivitas yang tercermin dari *Total Factor Productivity* (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan mencapai 5,3 persen pada tahun 2022. Selain itu, produktivitas yang rendah telah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial, dan bahkan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mempercepat penurunan pertumbuhan ekonomi potensial di bawah 5 persen. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat.

Deindustrialiasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah. Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun diantaranya akibatnya terjadinya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.

Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang rendah

disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatanya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, potensi ekonomi laut, serta kontribusi UMK dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi masih menjadi tantangan bagi Indonesia.

B. Kualitas Sumber Daya Manusia, IPTEKIN dan Riset

Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN). Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan (4,81), Thailand (1,31), dan Malaysia (1,04) pada tahun 2020.

Selanjutnya, kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai, tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388. Berikutnya, ekosistem riset dan inovasi masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, serta masih terbatasnya kerja lembaga riset domestik dan internasional. Kondisi ini juga terlihat dari jumlah paten yang diajukan Indonesia hanya sebanyak 1.445. selain itu, beberapa persoalan lain juga masih harus diatasi Indonesia seperti belum berkembangnya kesadaran ilmiah (*scientific temper*).

Kualitas pendidikan yang masih rendah sebagaimana terlihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) 382,00 yang jauh tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara OECD 488,33. Kualitas pendidikan yang masih rendah antara lain disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi ke seluruh daerah dan satuan pendidikan.

Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju

nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Akses pangan yang tidak terjangkau dan pola konsumsi yang tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan gizi makro, serta kelebihan gizi. Sistem kesehatan harus mampu merespons berbagai perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan dan risiko terjadinya pandemi, dan serta mampu menjawab ketimpangan akses terhadap pangan, lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan dengan mobilisasi dan inovasi pembiayaan kesehatan.

Kualifikasi pendidikan penduduk masih rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja. Dalam hal komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan kualifikasi pendidikan, mayoritas hanya lulusan SMP/MTs sederajat ke bawah (59,88 persen), sedangkan penduduk berpendidikan menengah sebesar 29,97 persen dan berpendidikan tinggi 10,15 persen. Kualifikasi pendidikan penduduk yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 40,49 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah. Sementara itu, tantangan penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegritas dengan pemberdayaan ekonomi.

C. Tata Kelola Pemerintahan

Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan banyaknya pengujian materiil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para

pelaku usaha dan masyarakat umum. Kondisi tersebut disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral, masih tersebarnya kewenangan pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM di bidang regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi.

Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta melanggengkan ego sektoral. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D. hal ini menjadikan suksesi pengisian jabatan strategis di instansi pemerintah menjadi terhambat, tidak terpetakannya talenta terbaik, rendahnya kinerja dan kompetensi ASN, kuatnya mentalitas silo, serta rendahnya budaya dan etos kerja. Sistem penghargaan ASN berbasis kinerja belum terwujud, yang ditandai dengan disparitas atau kesenjangan penghasilan ASN antar instansi yang menyebabkan sulitnya mempertahankan talenta ASN terbaik.

Belum meratanya kualitas pelayanan publik. Standar pelayanan belum diterapkan secara merata sehingga masih ditemukan kerumitan prosedur pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta masih adanya praktik pungutan liar. Selain itu terhambatnya proses digitalisasi pelayanan publik disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastruktur digital, keterbatasan SDM, serta belum terbangunnya interoperabilitas data dan layanan. Transformasi digital di tingkat pemerintah masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar, antara lain disparitas dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi antardaerah, terutama kesenjangan antar kota-desa yang cukup tinggi dan rendahnya literasi digital. Tingkat kematangan sistem pemerintah berbasis elektronik antara instansi pusat dan pemerintah daerah masih belum merata. Digitalisasi pemerintahan juga menghadapi tantangan terkait dengan tata kelola, keamanan siber, keterpaduan data dan informasi, serta rendahnya literasi digital.

D. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya. Masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antarlembaga, kurangnya pendanaan untuk

pembangunan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

E. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, pemulihan aset tindak pidana yang belum optimal, potensi pelanggaran HAM masih tinggi, dan pengawasan institusi pengak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah, budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah. Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa dalam menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebaga modal dasar pembangunan masyarakat.

Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Kurang efektifnya mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan penanganan pasca bencana pada tahun 2022. Di sisi lain, pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air juga terjadi di berbagai wilayah.

3.2.3 Isu Regional Provinsi Banten

A. Sumber Daya Manusia yang Belum Berkualitas

Kualitas sumber daya manusia dibentuk dari berbagai aspek, beberapa diantaranya adalah aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek perlindungan sosial. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2050 dari BPS Nasional, piramida penduduk banten mengalami pergeseran dari piramida penduduk muda menjadi piramida penduduk stasioner. Pada tahun 2025-2035 menjadi momentum bonus demografi Banten dengan dependency ratio sebesar 43,31%. Kemudian pada tahun 2040-2055 terjadi pergeseran dimana penduduk usia 65+ mengalami peningkatan signifikan dengan angka dependency ratio diproyeksikan sebesar 49,10% pada tahun 2045.

Maka dari itu diperlukan strategi dalam memanfaatkan momentum bonus demografi angkatan tenaga kerja produktif dalam

mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sumber daya manusia yang ada di Provinsi Banten, aspek pendidikan memiliki kualitas yang belum merata, aspek kesehatan masih belum menyentuh derajat kesehatan yang tinggi, dan aspek perlindungan sosial masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

Sumber daya manusia yang belum berkualitas yang diindikasikan dengan:

1. Pendidikan Berkualitas yang Belum Merata;
2. Derajat Kesehatan yang Masih Rendah;
3. Perlindungan Sosial yang Belum Optimal;
4. Keaktifan Kehidupan Sosial Belum Optimal.

B. Pembangunan Ekonomi yang Belum Optimal

Perekonomian yang baik dapat dilihat dari meratanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang merata terbentuk dari optimalnya pengelolaan sektor-sektor unggulan serta inovasi dan investasi yang kuat. Di Provinsi Banten, hal-hal tersebut dinilai belum optimal karena pertumbuhan ekonomi daerah utara dan selatan masih belum sama, sektor-sektor unggulan belum dikelola secara maksimal, dan inovasi yang mendorong investasi masih perlu ditingkatkan.

Pembangunan ekonomi yang belum optimal diindikasikan dengan:

1. Belum Meratanya Pertumbuhan Ekonomi;
2. Pengembangan Sektor Potensial dan Unggulan yang Belum Optimal;
3. Belum Optimalnya Inovasi yang Mendorong Produktivitas dan Investasi.

C. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Tata kelola pemerintah merupakan isu yang penting dalam harmonisasi hubungan antar pemerintah dan kelembagaan. Tata kelola pemerintah yang belum optimal dapat menjadi kendala utama dalam penyediaan layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan tata kelola pemerintah Banten antara lain indeks persepsi anti korupsi yang rendah yang menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik. Selain itu, tantangan tata kelola pemerintah Banten adalah pengelolaan keuangan daerah dan kapasitas fiskal daerah yang masih perlu perbaikan. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) merupakan ukuran kemandirian

keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah yang dihitung dengan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. DDF Provinsi Banten berada dalam kategori “baik”, tetapi dalam 10 tahun terakhir DDF Banten fluktuatif dan cenderung menurun.

D. Manajemen Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Belum Optimal

Kondisi Lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa aspek, beberapa diantaranya adalah aspek daya dukung, kualitas, dan ancaman bencana. Kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten dilihat dari aspek aspek daya dukungnya dinilai belum dikelola dengan optimal, dari aspek kualitasnya juga dinilai belum optimal, dan dari aspek kebencanaannya memiliki risiko bencana yang masih tinggi.

3.2.4 Isu Dalam KLHS RPJDP Kabupaten Serang Tahun 2025-2045

Isu strategis yang diidentifikasi dalam KLHS RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 adalah:

1. Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan meliputi:
 - a. Pengentasan penduduk miskin dalam semua dimensi serta penerapan sistem dan upaya perlindungan sosial untuk kelompok miskin dan rentan;
 - b. Penguatan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil secara efektif berbasis skema dan strategi kerja sama;
 - c. Peningkatan penyediaan data berkualitas yang tepat waktu dan valid serta relevan dengan konteks nasional;
 - d. Pengentasan praktik korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk;
 - e. Penetapan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di setiap tingkatan;
 - f. Penjaminan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan;
 - g. Peningkatan pencatatan dan pemberian identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran;
 - h. Penjaminan akses publik terhadap informasi dan perlindungan

terhadap kebebasan mendasar sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional;

- i. Penegakan kebijakan yang inklusif dan tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.
- j. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta bebas KKN disertai dengan pelayanan yang ramah publik.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tingkat Pendidikan meliputi:

- a. Penjaminan pendidikan dasar kepada semua anak perempuan dan laki-laki yang terjangkau, setara, dan berkualitas;
- b. Peningkatan pasokan dan kualitas guru yang berkualitas;
- c. Penguatan riset ilmiah dan peningkatan kapabilitas dan kapasitas teknologi melalui operasionalisasi bank teknologi dan sains;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan;
- e. Masih banyak sekolah yang belum mempunyai ruang penunjang lainnya (laboratorium, perpustakaan, dll).

3. Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a. Penjaminan akses terhadap sumber pangan dan pengentasan kasus kekurangan gizi;
- b. Pengurangan signifikan terhadap rasio kematian ibu, bayi baru lahir, dan balita;
- c. Peningkatan upaya dalam menekan dampak akibat epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan serta hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya melalui pencegahan, pengobatan, dan peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan;
- d. Pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk narkoba dan alkohol;
- e. Peningkatan akses kesehatan yang universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, pelayanan kesehatan yang baik, obat-obatan, dan vaksin dasar yang aman yang terjangkau serta

penjaminan akses untuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi;

- f. Pengurangan angka kematian akibat keracunan;
- g. Pelaksanaan *Framework Convention on Tobacco Control* WHO;
- h. Peningkatan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan;
- i. Peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- j. Keterbatasan anggaran pembangunan kesehatan, terutama dalam hal penanganan penduduk miskin, promosi kesehatan, penanggulangan gizi buruk, pelayanan kesehatan daerah terpencil dan perbatasan serta pendayagunaan tenaga kesehatan.

4. Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Peningkatan jumlah tenaga terampil, termasuk teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan;
- b. Peningkatan ketercapaian akses untuk pekerjaan layak bagi masyarakat, termasuk penyandang difabilitas;
- c. Pengurangan signifikan terhadap angka pengangguran dan usia muda yang tidak menempuh pendidikan atau pelatihan;
- d. Efisiensi promosi pariwisata yang berkelanjutan dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mempromosikan budaya dan produk lokal;
- e. Rendahnya penyerapan tenaga kerja pada Perusahaan Penanaman Modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri;
- f. Masih tingginya tingkat pengangguran.

5. Kemiskinan meliputi:

- a. Pengentasan penduduk miskin dalam semua dimensi serta penerapan sistem dan upaya perlindungan sosial untuk kelompok miskin dan rentan;
- b. Penjaminan hak bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan, terhadap akses sumberdaya ekonomi,

pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan kepemilikan lain, warisan, sumberdaya alam, teknologi, dan jasa keuangan yang tepat;

- c. Peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan rentan, terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana;
- d. Penurunan persentase penduduk miskin disertai peningkatan penjaminan hak-hak penduduk miskin;
- e. Masih tingginya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang berisiko terhadap kerentanan sosial dalam menjalani kelangsungan hidup;
- f. Masih terbatasnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

6. Penjaminan HAM dan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. Pengentasan diskriminasi, kekerasan, dan praktik berbahaya terhadap perempuan serta penjaminan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan;
- b. Peningkatan akses terhadap teknologi yang dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- c. Penjaminan hak dan pengurangan kesenjangan hasil dengan penghapusan kebijakan dan praktik yang diskriminatif;
- d. Penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan terjangkau oleh anak, perempuan, manula, dan penyandang difabilitas;
- e. Pengentasan segala bentuk kekerasan dan angka kematian;
- f. Pengentasan kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.
- g. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

7. Kualitas Lingkungan Hidup meliputi:

- a. Konservasi warisan alam dan budaya;
 - b. Pengurangan dampak lingkungan perkotaan yang merugikan, terutama terhadap kualitas udara dan sampah kota;
 - c. Pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan serta pengurangan produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali;
 - d. Praktik berbasis pembangunan berkelanjutan oleh perusahaan disertai integrasi informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan.
 - e. Penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam;
 - f. Pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya;
 - g. Pemulihan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan kekeringan dan banjir;
 - h. Penetapan integrasi nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati dalam dokumen perencanaan;
 - i. Penyediaan jasa ekosistem penyedia pangan;
 - j. Penyediaan jasa ekosistem penyediaan air bersih;
 - k. Pengelolaan Persampahan;
 - l. Pengelolaan air bersih berkelanjutan;
 - m. Pengembangan infrastruktur Kabupaten yang berbasis lingkungan masih minim;
 - n. Pencemaran Air, udara dan Tanah yang diakibatkan oleh Pelaku Jasa/Usaha industri dan Masyarakat.
 - o. Revitalisasi sumberdaya air di Kabupaten Serang belum optimal.
8. Risiko dan Mitigasi Bencana meliputi:
- a. Manajemen bencana termasuk pemetaan dan pendataan daerah rawan bencana serta kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana masih rendah;
 - b. Belum adanya masterplan kebencanaan dan dokumen Rencana

Penanggulangan Bencana (RPB).

9. Infrastruktur Dasar meliputi:

- a. Peningkatan pembangunan fasilitas ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, dan penyediaan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan efektif;
- b. Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dengan berfokus pada pemerataan dan keterjangkauan;
- c. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan akses untuk air minum dan sanitasi yang bersih dan aman;
- d. Peningkatan kualitas air dengan pengurangan polusi, pembuangan, dan minimalisasi pelepasan material dan bahan kimia berbahaya;
- e. Peningkatan efisiensi konsumsi air di semua sektor dan penjaminan penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan disertai pengelolaan sumberdaya air yang terpadu;
- f. Penjaminan akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar;
- g. Peningkatan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dengan perencanaan yang berkelanjutan dan terintegrasi antar sektor;
- h. Peningkatan pemerataan pembangunan antar wilayah;
- i. Semakin bertambahnya Volume kendaraan bermotor di jalan yang berdampak pada bertambahnya titik kepadatan dan kemacetan lalu lintas;
- j. Sarana dan Prasarana Kesenian belum memadai;
- k. Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi ASDP dengan rencana pengembangan wilayah;
- l. Belum optimalnya pelayanan jasa pelabuhan dan penyebrangan antar Pulau;
- m. Kondisi jalan di wilayah Kabupaten Serang masih banyak yang rusak berat;
- n. Ketersediaan dan Kualitas Sanitasi Dasar Lingkungan

Permukiman masih rendah;

- o. Banyaknya pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan ANDAL-Lalin.

10. Teknologi, Informasi, dan Komunikasi meliputi:

- a. Banyaknya Peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta penyediaan akses internet yang universal;
- b. Belum melaksanakan sistem Smart Card dan stiker RFID;
- c. Mengoptimalkan penggunaan teknologi sistem informasi dalam mendukung pengembangan Kabupaten Serang yang unggul, nyaman dan sejahtera;
- d. Belum berfungsinya sistem informasi manajemen pengujian sehingga belum optimalnya pelayanan administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan terintegrasi;
- e. Peningkatan implementasi e-Government Pemerintah Daerah.

11. Rumah Layak Huni meliputi:

- a. Peningkatan infrastruktur permukiman yang berkualitas melalui pengelolaan sampah, limbah dan drainase;
- b. Akses Masyarakat terhadap Perumahan yang Layak dan Terjangkau.

12. Pertanian dan Ketahanan Pangan meliputi:

- a. Peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil serta akses terhadap lahan, sumberdaya produktif, pengetahuan, hingga sumberdaya nonpertanian;
- b. Daya dukung pertanian lahan basah dan kering menurun akibat dampak perubahan iklim dan rusaknya jaringan irigasi.

13. Ekonomi Lokal meliputi:

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi per kapita dan produktivitas ekonomi melalui diversifikasi, kewirausahaan, peningkatan dan inovasi teknologi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro;
- b. Penguatan kapasitas lembaga keuangan domestik dalam rangka perluasan akses perbankan, asuransi, dan jasa keuangan bagi

semua;

- c. Peningkatan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi signifikan pada produk domestik bruto;
- d. Peningkatan akses industri kecil dan UMKM terhadap jasa keuangan;
- e. Penstabilan pertumbuhan pendapatan penduduk di atas rata-rata nasional;
- f. Pelaksanaan kebijakan fiskal yang secara progresif meningkatkan kesetaraan dan perlindungan sosial dan upah;
- g. Pengembangan pengukuran kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi PDB dan mendukung pengembangan kapasitas statistik;
- h. Peningkatan jumlah dan nilai produksi perikanan sebagai salah satu potensi wilayah;
- i. Pengembangan potensi pariwisata yang ada;
- j. Peningkatan ekonomi daerah pada sektor pertanian dan perikanan;
- k. Kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dalam rangka menumbuhkan koperasi-koperasi baru dan menghidupkan koperasi yang tidak aktif agar diperbanyak.

3.2.5 Potensi dan Modal Daerah Mendukung Percepatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan

A. Modal Kewilayahan

Kabupaten Serang merupakan salah satu dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten dengan luas wilayah kurang lebih 1.467,35 km². Luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Cinangka dengan luas sebesar 111,47 km² dan luas wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bandung yang memiliki luas wilayah sebesar 25,18 km². Kabupaten Serang merupakan pintu gerbang atau transit perhubungan darat antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang dilalui Jalan Tol Tangerang-Merak yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa serta dilalui oleh jalur kereta api. Selain itu dengan posisinya yang

hanya berjarak $\pm$ 70 km dari Kota Jakarta.

Secara topografi wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian antara 0 - 1.778 m dari permukaan laut (mdpl) dan pada umumnya tergolong pada kelas topografi lahan dataran dan bergelombang, sehingga secara topografi tidak akan sulit untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Ketinggian tertinggi di wilayah Kabupaten Serang terletak di Puncak Gunung Karang yang terletak di sebelah selatan perbatasan dengan Kabupaten Pandeglang. Satuan dataran rendah tersebar di seluruh wilayah dengan penyebaran paling besar di pantai utara dan sebaran terbatas di pantai barat serta sepanjang aliran sungai besar seperti Sungai Ciujung dan Cidurian. Secara administrasi penyebaran dataran rendah ini meliputi wilayah kecamatan Tirtayasa, Pontang, Carenang, Ciruas, Kasemen, dan Kramatwatu. Sedangkan Kecamatan Cikeusal, Pamarayan, Kragilan, Anyar, Cinangka, Serang hanya sebagian wilayahnya yang termasuk dalam satuan dataran rendah.

Penyebaran wilayah perbukitan berada di wilayah bagian barat yang menyebar dari utara ke selatan dengan ketinggian sekitar 100 m. Sedangkan satuan pegunungan menempati bagian selatan dan ujung utara sebelah barat. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Serang didominasi oleh ketinggian kurang dari 500 mdpl yang meliputi kurang lebih 97,5% dari luas wilayah dan tersebar pada semua wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Ciomas. Dengan demikian dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Serang memiliki ketinggian yang bervariasi, namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Serang berada pada area dataran rendah.

Kabupaten Serang ditandai dengan terdapatnya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari DAS Cidurian, DAS Ciujung, DAS Cidanau dan DAS Cibanten. Pengelolaan sungai mengatur adanya Satuan Wilayah Sungai (SWS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara umum, baik SWS maupun DAS yang ada di Kabupaten Serang relatif tidak luas. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Serang memiliki lebar yang relatif kecil (lebar kurang dari 50 m) dan pendek (panjang kurang dari 100 km). Sebagian besar (sekitar 35%) bagian utara Kabupaten Serang merupakan hilir tata air permukaan yang mengarah ke Laut Jawa bagian barat daya, khususnya ke Teluk Banten. Dari 35% tersebut, sekitar 25% merupakan daerah perbukitan sangat rendah atau mengalami pendataran sangat aktif

(penneplainisasi) dan 10% berupa dataran pesisir. Aliran air permukaan yang besar terutama berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidurian dan DAS Ciujung. Sekitar 50% merupakan perbukitan daerah hulu terutama di bagian selatan dan sedikit di utara-barat laut, yaitu Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel. Sisanya sekitar 14% merupakan wilayah perbukitan yang mengarahkan aliran air permukaannya ke arah barat di Selat Sunda terutama dari DAS Ciliman dengan dataran pesisir hilirnya di sebelah barat yang sangat sempit (1%).

Kabupaten Serang memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. Kabupaten Serang dapat berperan dalam pengembangan ekonomi regional dengan mempromosikan investasi, mengembangkan infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja. Kabupaten Serang memiliki wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Peran strategisnya adalah dalam melindungi dan melestarikan lingkungan alam, termasuk hutan, lahan basah, dan ekosistem lainnya, untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Serang memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan di tingkat lokal dan regional.

Potensi lahan produktif di Kabupaten Serang adalah seluas 120.658,69 ha atau sebesar 82,23% dari luas Kabupaten Serang. Dari keseluruhan jumlah luas lahan produktif tersebut sekitar 90,50% atau seluas 109.195,69 ha adalah lahan produktif yang telah diusahakan/digarap. Lahan produktif yang telah diusahakan tersebut berupa perkebunan, kebun campuran, lading/tegalan, sawah dan tambak. Komposisi terbesar dari lahan produktif yang telah diusahakan tersebut berupa sawah dengan luas mencapai 60.628,31 ha yang terdiri dari sawah irigasi seluas 59.308,16 ha dan sawah tadah hujan sebesar 1.320,15 ha. Sementara itu potensi lahan produktif lainnya yang belum diusahakan adalah sebesar 11.463 ha yang berupa rawa, padang rumput, semak belukar dan tanah kosong.

Potensi sumber daya yang ada dan telah berkembang di kawasan pesisir meliputi sumber daya kelautan dan perikanan, daya tarik/obyek wisata, jasa kepelabuhan dan sektor industri. Kegiatan budidaya perikanan/tambak banyak dikembangkan di wilayah Pontang, Tirtayasa dan Tanara. Pengembangan industri dan jasa kepelabuhan berkembang di

kawasan pesisir Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara dan Pulo Ampel, sedangkan kegiatan wisata banyak berkembang dikawasan Pantai Barat Kabupaten Serang yang meliputi kawasan Anyar dan Cinangka. Wilayah Kabupaten Serang memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar ke arah barat dan utara yang terdapat pada enam kecamatan di pesisir yaitu Kecamatan Anyer, Cinangka, Pulo Ampel, Bojonegara, Pontang dan Tirtayasa. Pulau-pulau kecil tersebut memiliki karakteristik dan luasan yang berbeda, yang umumnya pembentukannya berasal dari pulau-pulau karang yang kemudian ditumbuhi oleh vegetasi pantai dan perairan.

B. Modal Kependudukan

Proyeksi Jumlah penduduk Kabupaten Serang menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang positif atau meningkat. Pada tahun 2013 jumlah penduduk kabupaten Serang sebesar 1.450.894 Jiwa meningkat sebanyak 14,51% sehingga jumlah penduduk Kabupaten Serang di tahun 2022 sebanyak 1.661.374 Jiwa, Pada periode tahun 2013 hingga tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Serang mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2020 sebanyak 7,29% dan persentase kenaikan terkecil terjadi di tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yaitu 0,46%.

Berdasarkan data BPS ini menunjukkan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Cikande dan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Gunungsari. proyeksi penduduk Kabupaten serang menggunakan metode eksponensial dimana di dalam perhitungan menggunakan rata-rata laju pertumbuhan di setiap kecamatan selama periode 2013-2022 dengan asumsi kelahiran dengan data dasar jumlah penduduk pada tahun 2022. Prediksi jumlah penduduk Kabupaten Serang dari tahun 2025 hingga tahun 2045 meningkat sebesar 42,84% dengan perkiraan jumlah penduduk tahun 2045 sebesar 2.495.789 jiwa. dengan menggunakan metode eksponensial, kecamatan teratas dengan proyeksi jumlah penduduk tertinggi di tahun 2045 berada di kecamatan Cikande disusul Kecamatan Cikeusal dan juga Kecamatan Tirtayasa. Kecamatan Cikande sendiri masih menjadi kecamatan dengan proyeksi jumlah penduduk tertinggi setiap tahunnya.

Proyeksi jumlah penduduk terendah dalam perhitungan di Tahun 2045 berada di Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Kibin dan Kecamatan Pulo Ampel. Kecamatan Gunungsari masih menjadi Kecamatan terendah

dalam proyeksi jumlah penduduk. Sebagaimana analisa global dan nasional terkait bonus demografi berdasarkan jenis kelaminnya, penduduk perempuan lebih mendominasi pada 2050. Menurut usianya, proporsi penduduk kelompok usia 15-64 tahun diproyeksi mendominasi hingga 64,88% dari total populasi pada 2050. Sebanyak 19,09% populasi berusia 0-14 tahun. Sementara, 16,03% penduduk berusia 65 tahun ke atas.

Jumlah penduduk yang besar dapat memberikan peluang sekaligus ancaman bagi kesejahteraan Masyarakat. Indonesia mengalami dinamika penduduk yang berdampak luas terhadap Pembangunan. Indonesia akan mempunyai kesempatan yang terbuka untuk menjadikan jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi sebagai pendorong utama Pembangunan. Belajar dari beberapa negara yang berpenduduk besar, kita harus menerapkan strategi Pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Dari sumber daya manusia yang produktif dan inovatif diharapkan menjadi bonus demografi yang cukup signifikan. Perubahan struktur penduduk menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (*consuming class*) di dunia.

C. Modal Dasar Ekonomi

1. Potensi Kekayaan Alam (Pertanian Ketahanan Pangan, Ekonomi Biru Minapolitan dan Pertambangan)

Kekayaan alam merupakan modal dan potensi dasar Pembangunan untuk kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kawasan lahan pertanian di Kabupaten Serang memiliki fungsi dan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan untuk mandiri beserta daerah lainya. Pertanian di Kabupaten Serang juga terdiri dari tanaman pangan, hortikultura (hasil bercocok tanam) dan Biofarmaka (tanaman obat). Berdasarkan data statistik, penggunaan lahan berupa sawah merupakan penggunaan lahan terluas di Kabupaten Serang dengan luasan sawah terbesar berada di Kecamatan Padarincang.

Dalam kurun waktu 4 tahun produktivitas Ubi Kayu adalah komoditi yang paling mengalami penurunan yang tadinya pada tahun 2015 sebesar 178,46 Kw/Ha menjadi 153,87 Kw/Ha ditahun 2021, kemudian diikuti oleh Ubi Jalar dan Kacang Kedelai. Namun untuk komoditi Padi, di Kabupaten Serang mengalami penurunan, yang tadinya pada tahun 2015 sebesar 57,64 Kw/Ha menjadi 52,93 Kw/Ha ditahun 2021 sama juga

dengan Kacang Tanah dan Jagung yang mengalami penurunan. Selain pertanian ada aspek perkebunan, kelapa merupakan komoditi perkebunan unggulan Kabupaten Serang selama periode 2018 - 2022. Komoditi tersebut berhasil menyumbang sekitar 42.089,78 ton dari total seluruh produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Serang, kemudian diikuti oleh kakao dengan total produksinya mencapai 10.932,5 ton. Peternakan dan perikanan adalah salah satu modal dan potensi yang mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menopang ekonomi daerah dan membuka banyak lapangan kerja serta ketahanan pangan daerah yang lebih baik. Perkembangan hasil Peternakan di Kabupaten Serang sangat baik, bahkan hasil Peternakan Kabupaten Serang sudah bisa mencukupi daerah sekitar di luar kabupaten serang.

Sedangkan untuk perikanan Jenis Perikanan yang ada di Daerah Kabupaten Serang dibagi menjadi Perikanan Budidaya Laut, Perikanan Budidaya Air Payau, Perikanan Budidaya Air Tawar dan Perikanan Tangkap. Kemudian potensi perikanan cenderung naik turun, produksi terbesar dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2018 yaitu dimana jumlah total produksinya mencapai 81.829,99 Ton kemudian turun pada tahun 2020 dan naik kembali di tahun 2021. Sektor ekonomi biru diharapkan dapat menjadi salah satu potensi ekonomi baru dari wilayah kelautan, adapun beberapa contoh ekonomi biru adalah pelabuhan lokal, pelabuhan internasional, hasil tangkapan laut, kegiatan ekonomi laut dan hasil olahan pangan laut (minapolitan).

Selain kekayaan alam dari sektor pertanian dan perikanan, Kabupaten Serang juga memiliki potensi tambang pasir dan batu serta tambang pasir laut. Demikian juga di Kabupaten Serang terdapat Geothermal yang menjadi Energi terbarukan yang memiliki potensi pemanfaatan yang besar dengan adanya kemajuan teknologi. Energi terbarukan akan menyeimbangkan persaingan usaha dengan energi fosil, sehingga dapat menurunkan harga produksi listrik.

Kekayaan keanekaragaman hayati yang menjadi modal dasar Pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu negara megabiodiversitas, di Kabupaten Serang juga terdapat wilayah Geopark Rawadanu didalamnya terdapat banyak keanekaragaman hayati yang masih terjaga dengan baik.

2. Modal Kawasan Industri Strategis

Kabupaten Serang merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang masuk kedalam rencana strategis dan berada di wilayah strategis Industri serang-tangrang dan sebagai koridor terintegrasi dan seamless masa depan yaitu kawasan yang dilalui integrasi ekonomi jawa dan sumatra dan masuk kedalam megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan dalam peta stragtegis pembangunan Indoneisa Jawa-Sumatra.

Saat ini industrialisasi di Kabupaten Serang menjadi salah satu PDRB unggulan dengan komposisi mencapai 43% dari total PDRB Kabupaten Serang. Luasnya lahan area industri di dalam Rencana Tata Ruang Tata Wilayah menjadikan Kabupaten Serang sebagai wilayah investasi dengan potensi yang unggul baik secara ketertiban dan keamanan maupun dukungan infrastruktur jalan terbetonisasi mantap yang menunjang mobilisasi investasi dengan baik. Selaras dengan rencana tataruang dan wilayah Kabupaten Serang yang menjadikan Industri sebagai salah satu penggerak ekonomi dan penggungkit kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Serang kedepan bukan hanya sebagai pemerintah penggerak industri, tetapi juga sebagai wilayah riset teknologi industri yang menjadikan Kabupaten Serang menjadi wilayah yg maju dan kompetitif untuk seluruh jenis industri 20 tahun yg akan datang tentunya dengan tetap memperhatikan industri hijau ramah lingkungan maju dan berkelanjutan.

3. Potensi Pariwisata, UMKM, Perdagangan dan Jasa

Kawasan pariwisata Kabupaten Serang ditetapkan seluas kurang lebih 3.279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar yang terdiri dari Kawasan pariwisata alam dan Kawasan pariwisata budaya, di luar wisata buatan dan desa wisata. Pada dokumen rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Serang di tetapkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Serang adalah mewujudkan pemerataan perkembangan wilayah kabupaten berbasis sektor industri, pertanian dan pariwisata yang berkelanjutan. Maksud yang terkandung dari penetapan tujuan tersebut adalah keinginan terwujudnya pemerataan perkembangan wilayah diseluruh wilayah Kabupaten Serang yang didorong dengan pengembangan sektor-sektor produktif unggulan daerah yang meliputi sektor industri, sektor pertanian dan sektor pariwisata dengan tetap

memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan (berwawasan lingkungan) agar dapat berjalan secara berkelanjutan (menerus).

Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertumpu pada sumber daya alam dan budaya lokal, dengan strategi meliputi:

1. Mengembangkan kegiatan wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan wisata sejarah, dengan mengedepankan kekhasan budaya lokal;
2. Mengembangkan prasarana wilayah guna menunjang kegiatan pariwisata yang produktif;
3. Mengembangkan perdagangan dan jasa yang mendukung sektor pariwisata;
4. Mengembangkan potensi obyek dan daya tarik wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan wisata sejarah; dan
5. Mengembangkan prasarana dan sarana pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal.
6. mengembangkan dan meningkatkan pariwisata alam dan buatan secara terintegrasi;

Semangat pengembangan pariwisata harus di integrasikan dengan pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor UMKM serta potensi – potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat, terdapat beberapa sentra industry kecil dan menengah tersebar diseluruh kecamatan terutama pada sentra-sentra UMKM meliputi:

- Sentra industri sepatu di Kecamatan Baros;
- Sentra kerajinan anyaman bambu di Kecamatan Bandung;
- Sentra industri tas dan pandai besi di Kecamatan Petir;
- Sentra industri kecil dan pandai besi di Kecamatan Ciruas;
- Sentra industri kecil dan pandai besi di Kecamatan Ciomas.

Selain sentra-sentra industri tersebut, ada juga mengembangkan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut yang dapat di integrasikan dengan pariwisata, dan memiliki potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan

daya dukung wisata dan UMKM yang dijadikan salah satu basis potensi daerah, maka sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Serang turut serta mendukung sektor wisata dan UMKM. Selain dari pada itu, sektor perdagangan dan jasa juga dapat berjalan dari industrialisasi yang ada di Kabupaten Serang. Hal ini menjadikan wilayah pertumbuhan baru di Kabupaten Serang memiliki daya dukung yang tinggi dari sektor perdagangan dan jasa yang diakibatkan oleh kemudahan akses dan ketersediaan pendukung perdagangan dan jasa.

4. Infrastruktur Jalan dan Kawasan Pusat Pemerintahan

Ketersediaan jalan sebagai salah satu upaya peningkatan infrastruktur di suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah tersebut. Hal ini dikarenakan jalan dapat mempermudah akses dan konektivitas antarwilayah maupun antardaerah. Infrastruktur jalan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih maju. Selain mendorong kemajuan ekonomi, jalan sebagai salah satu indikator infrastruktur dapat pula mendorong kemajuan sosial suatu daerah. Panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Serang sampai dengan Tahun 2021 sepanjang 610,33 km, kemudian terdapat peningkatan status jalan desa sepanjang 418,01 km yang menjadi jalan Kabupaten Serang sehingga pada Tahun 2022 total jalan Kabupaten sepanjang 1.019,34 km. Saat ini jalan di Kabupaten Serang sudah terbetonisasi sepanjang 793,34 km pada Tahun 2022 dan ditargetkan selesai 1.019,34 km pada Tahun 2025. Saat ini Kabupaten Serang sudah memiliki kawasan pusat pemerintahan yang terletak di pusat kota Kabupaten Serang yaitu di Kecamatan Ciruas. Pusat Pemerintahan menjadi salah satu potensi modal ekonomi dari tersentralisasinya birokrasi dan pelayan publik, hal ini diharapkan dapat mendorong kinerja dan memangkas waktu birokrasi. Luas lahan pusat pemerintahan Kabupaten Serang dapat menjadi salah satu kawasan pertumbuhan dengan konsep *Smart City*, hal ini diharapkan menjadi salah satu kawasan pertumbuhan perdagangan dan jasa.

D. Modal Sosial Budaya dan Agamis

Modal sosial budaya dan agamis merupakan modal yang tidak terlihat akan tetapi berdampak besar yang dapat menjadi kekuatan penting dan berperan dalam menggerakkan aksi kolektif, serta mendorong

proses transformasi Masyarakat melalui kebijakan-kebijakan strategis dalam Pembangunan di berbagai bidang dan sektor. Di tataran makro, kekhasan keluarga Indonesia tercermin dari keteguhan dalam menanamkan nilai-nilai agama dan sosial, serta memberikan penghargaan terhadap adat istiadat dan tradisi. Modal budaya merupakan asset yang melekat pada individu. Bangsa Indonesia yang reiligus dan berbudaya memiliki nilai agama dan budaya yang ditransformasikan untuk mewujudkan manusia dan Masyarakat yang berakhlak, berbudaya maju dan berdaya saing. Modal adat dan budaya merupakan perwujudan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan Masyarakat Indonesia, guyub, gotong royong dan musyawarah merupakan ciri khas adat istiadat budaya dan nilai-nilai agama di masyarakat Kabupaten Serang khususnya dan Indonesia umumnya.

Tradisi budaya masyarakat Kabupaten Serang cenderung homogenitas, hal ini mempermudah dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta dalam melestarikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Serang terutama yang mengandung budaya dengan nilai-nilai agamis.

Dengan homogenitas budaya dan agama di Kabupaten Serang, mempermudah dalam menjaga kondusifitas atas akulturasi kebudayaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain daripada itu pengamalan dan penghayatan nilai-nilai agama di Kabupaten Serang dapat terjaga dengan baik sehingga ini menjadi modal atas sosiasl budaya dan agama di Kabupaten Serang.

3.2.6 Isu Strategis Daerah Kabupaten Serang

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang ada pada Sub Bab Permasalahan Pembangunan setidaknya terdapat 7 kelompok isu yang perlu dianalisa lebih dalam untuk mengetahui isu strategis daerah Kabupaten Serang. Isu strategis daerah diperoleh dengan melakukan analisa keterkaitan atas identifikasi isu global, isu nasional, isu regional Provinsi Banten, dan isu berdasarkan KLHS RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045, serta potensi dan modal daerah Kabupaten Serang.

Tabel 3.2.1
Analisa Keterkaitan Isu Strategis Daerah

Isu Berdasarkan Permasalahan Pembangunan	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu KLHS RPJPD Tahun 2025-2045	Potensi dan Modal Daerah	Rumusan Isu Strategis Daerah
Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia dan Inovasi	Perkembangan Teknologi	Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal	Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintah	Modal Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan
		Kualitas Sumber Daya Manusia, IPTEKIN dan Riset	Sumber Daya Manusia yang Belum Berkualitas	Teknologi, Informasi, dan Komunikasi		Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	Perkembangan Demografi Global	Peningkatan Urbanisasi Dunia	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tingkat Pendidikan			
			Perkembangan Demografi Global	Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
				Kemiskinan		
Belum Optimalnya Pembangunan Sosial	Pertumbuhan Kelas Menengah		Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi		Ketenagakerjaan	Modal Sosial Budaya dan Agamis
	Perkembangan Demografi Global	Penjaminan HAM dan Perlindungan Perempuan dan Anak				
Lingkungan Berkelanjutan dan	Peningkatan Persaingan Pemanfaat			Manajemen Tata Ruang dan Pengelola	Kualitas Lingkungan Hidup	Modal Kewilayahan

Mitigasi Bencana Belum Optimal	an Sumber Daya Alam Perubahan Iklim		n Lingkunga n Hidup yang Belum Optimal	Risiko dan Mitigasi Bencana		Mitigasi Becana
Pembangu nan Infrastrukt ur Belum Merata	Perkemban gan Teknologi	Pembangu ngan Infrastrukt ur		Infrastrukt ur dasar Rumah Layak Huni	Modal Ekonomi	Infrastrukt ur
Pembangu nan Ekonomi Belum Optimal	Perubahan Konstelasi Perdagang an Global Pergeseran Tata Kelola Keuangan Global Perkemban gan Teknologi Dinamika Geopolitik dan Geoecono mi Global	Pertumbuh an Ekonomi dan Produktivit as	Pembangu nan Ekonomi yang Belum Optimal	Pertanian dan Ketahanan Pangan Ekonomi Lokal	Modal Ekonomi Modal Ekonomi	Pembangu nan Ekonomi

Atas analisa tersebut, isu strategis daerah Kabupaten Serang berdasarkan penafisan sebagaimana tertuang dalam tabel di atas dijabarkan sebagaimana berikut:

A. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Isu utama dalam isu strategis daerah Kabupaten Serang ini adalah sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 diproyeksikan akan mengalami perubahan demografi yang cepat. Hal ini karena jumlah penduduk usia produktif berusia 15-64 tahun di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan mencapai puncaknya pada 2050. Dalam rentan waktu tahun 2013 hingga 2022, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Serang sebesar 1,78%. Pada tahun 2025, diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Serang meningkat sebesar 1.747.249 jiwa dan akan terus meningkat hingga tahun 2045 yang mencapai 2.495.789 jiwa atau meningkat sebesar 42,84%. Piramida penduduk Kabupaten Serang juga

mengalami pergeseran dari piramida penduduk muda menjadi piramida penduduk stasioner sama seperti halnya keseluruhan komposisi penduduk di Provinsi Banten.

Pada tahun 2023 saja dependency ratio mencapai 44,60% dan diproyeksikan akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk hingga tahun 2024. Secara spasial, beberapa wilayah di Kabupaten Serang diproyeksikan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di tahun 2025-2045 antara lain Kecamatan Cikande, Kecamatan Kramatwatu, Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Petir, Kecamatan Kragilan, dan Kecamatan Pamarayan.

Oleh karena, itu diperlukan strategi dalam memanfaatkan momentum bonus demografi angkatan tenaga kerja produktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dapat memberikan peluang sekaligus ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Serang mengalami dinamika penduduk yang berdampak luas terhadap pembangunan daerah. Kabupaten Serang memiliki kesempatan yang terbuka untuk menjadikan jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi sebagai pendorong utama pembangunan daerah.

Kabupaten Serang harus menerapkan strategi pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan inovatif serta cepat merespon perubahan yang semakin dinamis. Untuk menuju sumber daya manusia yang berkualitas tersebut tentu perlu strategi yang kuat dalam hal Pendidikan yang masih belum merata, Kesehatan yang masih belum optimal, serta aspek lainnya yang menunjang peningkatan sumber daya manusia.

2. Pendidikan

Undang-undang Dasar 1945 telah mengamantkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan pada tahap manapun dalam perjalanan hidupnya yang dapat diperoleh baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan diartikan sebagai sesuatu yang memiliki peran yang sangat penting sebagai pondasi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan

berorientasi kepada masa depan. Pendidikan sendiri memiliki tujuan utama untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.

Pendidikan dalam sebuah negara dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Alasannya adalah peningkatan sistem pendidikan yang berjalan dengan baik, secara langsung merupakan keberhasilan dari sebuah negara dalam melakukan pembangunan sumber daya manusia yang kelak akan memegang tanggung jawab suatu negara. Daerah menjadi tangan panjang dari negara untuk melaksanakan Undang-undang terkait hak warga negara atas pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki hasil penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas pendidikan yang dilakukan.

Pemerataan pendidikan di setiap Kecamatan harus menjadi perhatian bersama agar tidak adanya ketimpangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang dihasilkan dan sebagai bentuk penyediaan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan ini bukan hanya jumlah sekolah yang tersedia, namun sarana prasarana pendidikan yang berkualitas serta pemerataan Guru di masing-masing sekolah. Selain itu, keterlibatan semua elemen menjadi tanggung jawab bersama dalam pembangunan pendidikan. Menurunnya akhlak dan moral peserta didik juga harus menjadi perhatian bersama yang salah satu bentuk nyata banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dan dialami oleh peserta didik baik verbal maupun nonverbal

3. Kesehatan

a. Stunting

Stunting masih menjadi masalah yang penting yang masih menjadi perhatian bersama dan dapat berpotensi mengganggu kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, yaitu praktik pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan bergizi, serta kurangnya akses ke air bersih dan

sanitasi. Intervensi yang dilakukan untuk menurunkan bahkan mencegah terjadinya stunting harus menjadi tugas bersama baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat. Pemerintah Daerah sendiri harus mampu melaksanakan intervensi melalui program-program di setiap perangkat Daerah.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi permasalahan utama di bidang Kesehatan, dimana kematian ini terjadi saat kehamilan atau selama 42 (empat puluh dua) hari sejak terminasi kehamilan tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Penurunan angka kematian ibu dapat berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Peran yang dilakukan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dilakukan oleh pemerintah dan juga tenaga kesehatan dengan memastikan setiap ibu memiliki akses dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat dimulai dengan melakukan penguatan puskesmas pada setiap Kecamatan dan jaringannya dengan menyediakan paket pelayanan kesehatan reproduksi esensial yang dapat menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk melakukan berbagai inovasi demi menurunkan angka kematian ibu.

Peran keluarga juga sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dengan melaksanakan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga yang dilakukan berupa instrumen yang digunakan di tingkat keluarga, forum komunikasi yang dikembangkan untuk kontak dengan keluarga dan keterlibatan tenaga masyarakat sebagai mitra dari pusat pelayanan kesehatan.

c. Angka Kematian Bayi (AKB)

Pembangunan yang tepat sasaran pada sektor kesehatan dapat menekan jumlah kasus kematian bayi. Penurunan Angka Kematian Bayi beriringan dengan penurunan Angka Kematian Ibu diawali dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Serang. Peran keluarga juga sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dengan meningkatkan taraf hidup anak. Salah satu cara puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran sekaligus

meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Pendekatan keluarga ini dapat mampu mengedukasi keluarga dengan meningkatkan persalinan melalui tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan serta meningkatkan pelayanan kesehatan pemeriksaan bayi oleh tenaga kesehatan. Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan inovasi-inovasi terkait penurunan angka kematian ibu.

d. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu hal penting untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena hanya dengan demikian, tubuh akan bisa terhindar dari berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan saat harian kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Meningkatnya kasus Penyakit Menular (PM) dan Penyakit Tidak Menular (PTM) diperkirakan akan menambah beban masyarakat dan pemerintah karena penanganannya membutuhkan biaya yang besar dan memerlukan teknologi tinggi.

Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama dalam menurunkan morbiditas, mortalitas dan disabilitas Penyakit Menular dan Tidak Menular melalui intensifikasi pencegahan dan pengendalian agar masyarakat sehat, sehingga perlu adanya pemahaman yang optimal serta menyeluruh tentang besarnya permasalahan yang terjadi melalui peningkatan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Serang. Selain itu, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi pendukung untuk menekan angka penyakit menular dan tidak menular sebagai bentuk rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat.

e. Pandemi

Berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau yang akrab disebut Covid 19, hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan yang semakin kompleks. Kegiatan perekonomian semakin lemah, hubungan sosial semakin menurun yang menyebabkan kurangnya interaksi dan kepedulian terhadap sesama. Semuanya telah merasakan dampak dari virus covid 19 ini, terutama pada dunia pendidikan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya meliburkan aktivitas (tatap muka) seluruh lembaga-lembaga

pendidikan, hal ini dilakukan sebagai upaya-upaya pencegahan penularan virus corona atau covid 19 ini. Hal ini tentunya berdampak besar pada perkembangan pendidikan anak, yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri, belajar secara daring (dalam jaringan).\

Peran serta orang tua sangat dibutuhkan pada kondisi ini. Orang tua lah yang dituntut untuk mendampingi siswa dalam proses belajar online tersebut, realita yang ada juga tidak sedikit orang tua yang tidak paham mengenai penggunaan teknologi, jelas hal ini akan menghambat keaktifan siswa atau anak dalam proses belajar daring ini. Jaringan internet Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah sudah terkoneksi ke internet sehingga guru-gurunya pun dalam keseharian belum terbiasa dalam memanfaatkannya. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Selain itu, biaya Jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi masalah tersendiri bagi guru dan siswa. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak diantara guru juga orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet.

Pada bidang Kesehatan, peningkatan jumlah dokter maupun tenaga medis menjadi penting sehingga masyarakat mampu memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal dan prima. Apalagi adanya pandemi memberikan gambaran bahwa ketersediaan jumlah dokter dan tenaga medis yang cukup menjadi kunci keberhasilan dalam menekan adanya virus covid-19. Pandemi ini juga menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan, dirumahkan, berpindah pekerjaan, jam kerja dibatasi, dan upah yang diturunkan, tingkat kemiskinan semakin meningkat, namun di sisi lain juga menimbulkan peluang kerja baru, misalnya penjual masker kain, penjahit APD, penjual handsanitizer, penjual sabun cuci tangan serta pengadaan alat-alat kesehatan.

Produk-produk herbal seperti jamu juga mengalami peningkatan permintaan di masa pandemic karena diyakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Pandemi COVID-19 ini dapat memunculkan peluang kerja baru yang mengandalkan kreatifitas contohnya ada bisnis Frozen Food (Makanan Beku) yaitu makanan setengah jadi yang tinggal digoreng. Selain itu penggunaan media sosial serta aplikasi turut berkembang pesat di

masa pandemic karena banyak transaksi penjualan yang dilakukan secara daring.

f. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Penyakit yang muncul dan menyerang masyarakat luas dipengaruhi oleh tingkat pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada dasarnya merupakan upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Adapun berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat.

Tujuan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. PHBS dilakukan melalui 5 (lima) tatanan yaitu di Rumah Tangga, di Sekolah, di Tempat Kerja, di Sarana Kesehatan dan di Tempat Umum. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui program-program yang di dalamnya berkaitan langsung dalam pelaksanaan 5 (lima) tatanan PHBS.

4. Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Menurut UU 11 tahun 2009, disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Selama periode 2010-2023 garis kemiskinan di Kabupaten Serang terus meningkat, walaupun lebih landai jika dibanding dengan

peningkatan garis kemiskinan Provinsi Banten. Secara spasial, sebaran kemiskinan berdasarkan desil 1 sampai dengan 4 terdapat kecamatan dengan jumlah sebaran tertinggi di wilayah Kabupaten Serang yaitu berada di Kecamatan Petir dengan jumlah 47.152 jiwa. Sedangkan untuk desil 1 sebaran terbanyak terdapat di Kecamatan Baros yaitu dengan jumlah 10.677 jiwa. Dalam pengentasan kemiskinan yang tinggi, Kabupaten Serang perlu melakukan beberapa langkah agar tercapai masyarakat sejahtera dan memiliki taraf hidup yang berkelanjutan.

Hal ini sebagai repon tujuan penanggulangan kemiskinan antara lain (a) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin; (b) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar; (c) mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan (d) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

5. Pengangguran

Persoalan pengangguran di Kabupaten Serang masih menjadi isu yang hangat di Masyarakat. Tahun 2022 tercatat 10,61% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai 10,58%. Banyaknya industri yang berada di wilayah Kabupaten Serang belum menjadi opsi yang termaksimalkan dalam mengatasi pengangguran yang tinggi. Idealnya, banyaknya industri yang ada akan meningkatkan *demand* industri dalam hal penyerapan tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal. Ada beberapa poin yang bisa disimpulkan dari isu tersebut antara lain: (1) sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Serang masih jauh dari kualifikasi yang diperlukan oleh industri atau swasta; (2) industri atau swasta yang bergerak pada kegiatan produksi padat modal bukan padat karya; dan (3) UMR dan UMK yang tidak tepat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Peningkatan kualitas SDM masih menjadi salah satu parameter dalam menanggulangi pengangguran yang ada, sehingga perlu ada peningkatan program-program pendidikan khususnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan. Pemerintah perlu

mempersiapkan kualitas Pendidikan yang baik bagi masyarakat agar mampu memenuhi *demand* dari industri atau swasta dalam hal penyerapan tenaga kerja bahkan mampu bersaing dengan masyarakat di wilayah lain maupun luar negeri.

B. Pembangunan Ekonomi

Isu utama dalam isu strategis daerah Kabupaten Serang ini adalah sebagai berikut.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang cenderung melambat. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,32% selama tahun 2013-2022. Hal tersebut disebabkan produktivitas yang rendah dan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi potensial dibawah 5% yaitu sebesar - 2,73%. Sehingga kondisi-kondisi tersebut menyebabkan ekonomi Kabupaten Serang sulit tumbuh lebih cepat. Kabupaten Serang memiliki tantangan antara lain deindustrialisasi. Kondisi deindustrialisasi terjadi karena penurunan produktivitas sektor industri sehingga sektor industri manufaktur tidak lagi menjadi pangsa kontribusi terhadap perekonomian. Hal ini terjadi karena lemahnya daya saing komoditi dan sumber daya manusia serta ekosistem industri yang belum optimal.

Sementara itu, beberapa wilayah di Kabupaten Serang dengan kegiatan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan, pariwisata, dan industri kecil-menengah belum dioptimalkan sehingga hasil produksi komoditas memiliki produktivitas nilai tambah yang rendah. Hal ini dipicu oleh lambatnya regenerasi petani, daya dukung lahan yang semakin menurun, serta akses terhadap infrastruktur penunjang dan kelembagaan yang belum optimal.

b. Laju Inflasi

Inflasi Kabupaten Serang masih merujuk pada inflasi kota Serang yang mencapai 7,72% pada tahun 2022. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan inflasi Provinsi Banten yang mencapai 5,08% dan nasional mencapai 5,51% pada tahun 2023. Perekonomian dan stabilitas perdagangan belum kembali normal pasca pandemik covid-19, diperparah terjadi ketegangan global antara dua negara besar yakni Rusia dengan Ukraina yang sampai saat ini masih berperang. Kedua negara yang

merupakan produsen komoditas penting di dunia, seperti migas, gandum, kedelai, pupuk dan lainnya. Pasokan komoditas tersebut menjadi terhambat ke beberapa negara di Eropa sehingga menimbulkan krisis energi dan pangan.

Akibatnya, harga-harga komoditas tersebut meningkat tajam. Inflasi pun tak terhindari akibat menurunnya pasokan migas dan pangan. Selain itu, perubahan iklim yang tidak menentu menjadi salah satu penyebab lainnya yang menyebabkan pasokan pangan menjadi tidak stabil. Ketahanan pangan masih menjadi isu yang saat ini digencarkan di berbagai daerah maupun negara di seluruh dunia dalam menekan inflasi yang tinggi. Kabupaten Serang perlu untuk terus melakukan koordinasi antar daerah guna mengatur keseimbangan suplai bahan makanan antar daerah, ketersediaan, harga pangan, serta jalur distribusi yang merupakan suatu hal yang harus terus diperhatikan dalam pengendalian harga pangan.

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu gencar dalam menggenjot geliat ekonomi melalui berbagai sektor yang menjadi sektor utama dalam meningkatkan nilai PDRB.

1) Sektor Pertanian dan Perikanan

Isu strategis sektor pertanian berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dalam meningkatkan daya saing daerah. Pertanian dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan terutama dalam pengembangan wilayah bagian Utara dan Selatan Kabupaten Serang. Berdasarkan distribusi PDRB ADHB, Kabuapten Serang memiliki kontribusi sektor pertanian dan perikanan mencapai 9,72% pada tahun 2022. Sektor pertanian dan perikanan sangat diharapkan menjadi sektor yang dapat mendorong pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Secara geografis, Kabupaten Serang menyimpan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar termasuk di dalamnya perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan produk perikanan dan bioteknologi, pariwisata bahari dan pantai, dan lain sebagainya.

Rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan masih menjadi isu yang muncul dari sektor ini. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian untuk peruntukan lainnya, rendahnya nilai tambah dan sumber

daya manusia pertanian dan perikanan, serta kelembagaan dan mekanisasi agribisnis belum terhubung secara baik. Hal tersebut sama seperti halnya yang menjadi isu di Provinsi Banten. Perbaikan dari sisi produktivitas perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan sektor pertanian dan perikanan ke depan. Tidak hanya pada peningkatan mutu dan kualitas hasil pertanian dan perikanan, namun strategi dan kebijakan dalam memasarkan produk unggulan Kabupaten Serang perlu ditingkatkan juga dengan menggandeng pelaku UMKM serta melalui platform digital. Sinergi antar lembaga harus tercipta dengan baik, sarana dan prasarana penunjang di sektor pertanian dan perikanan perlu ditingkatkan.

2) Sektor Industri

Lapangan usaha industri pengolahan menjadi leading sector perekonomian di Kabupaten Serang yang menyumbang 45 - 48% dari PDRB Kabupaten Serang dengan rata-rata laju pertumbuhan 4,59% per tahun dalam rentan waktu tahun 2010 hingga tahun 2023 meskipun terjadi shock yang cukup signifikan pada tahun 2023 akibat pandemic covid-19. Rata-rata pertumbuhan industri sedang-besar yaitu 7,51% per tahun rentan waktu tahun 2010 hingga tahun 2021. Peningkatan ini tentunya memiliki tantangan tersendiri yakni akselerasi daya saing industri, penguatan hilirisasi di berbagai sektor industri, dan menekan eksternalitas dari industri menuju ekonomi hijau di Kabupaten Serang. Menjamin kegiatan industri dengan prinsip berkelanjutan, daya dukung lingkungan, dan adaptasi-mitigasi krisis iklim menjadi salah satu isu yang saat ini sedang berkembang dikarenakan adanya ketidakpastian iklim yang saat ini terjadi.

3) Sektor Pariwisata

Adanya potensi wisata yang besar, Kabupaten Serang berpeluang untuk memajukan perekonomian melalui pengembangan pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, melihat jumlah kunjungan wisatawannya, pengembangan pariwisata dapat dinilai belum optimal karena jumlah wisatawan mengalami kondisi fluktuatif dan cenderung menurun pada tiga tahun terakhir pada periode tersebut yaitu pada tahun 2017-2019 yang menurun rata-rata 30,43%.

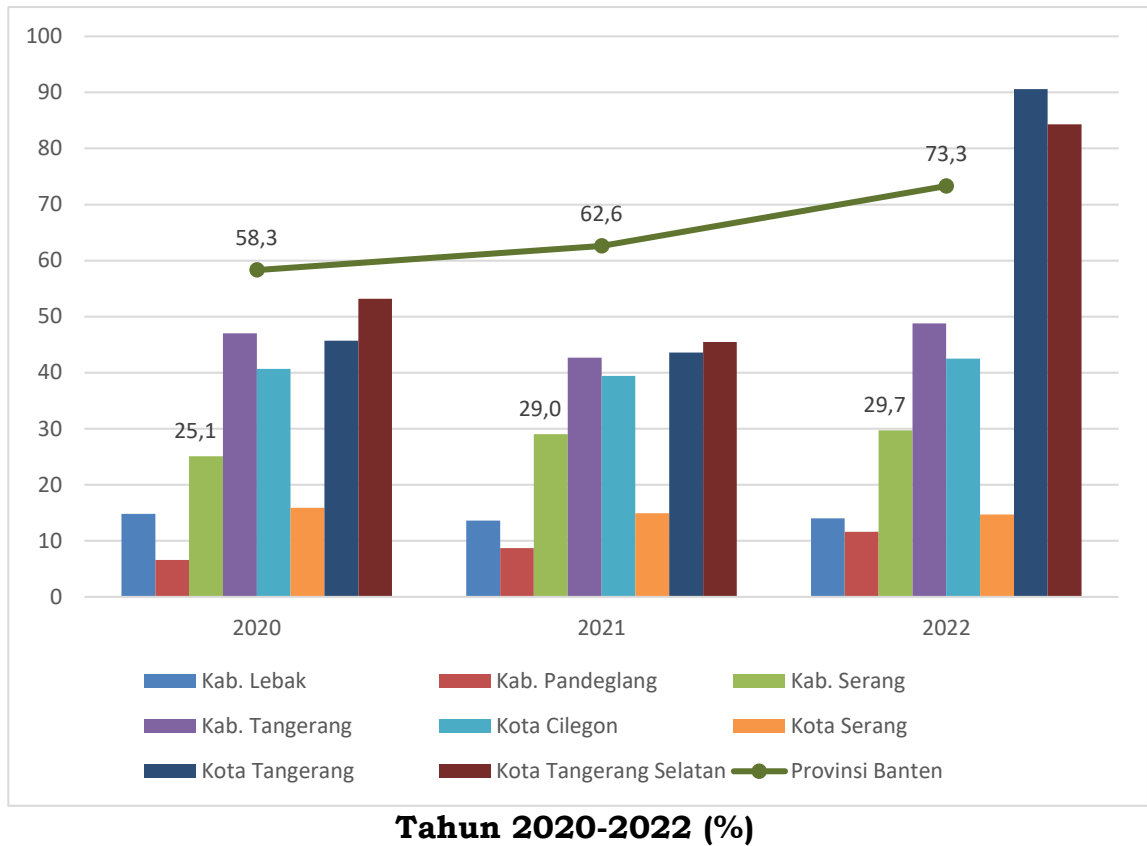
Pada bagian barat Kabupaten Serang, potensi wisata laut yang ada masih belum teroptimalkan dengan baik. Pengelolaan yang belum baik, tingginya tarif retribusi parkir, geliat umkm yang masih belum maksimal, serta sarana dan prasarana yang belum menunjang masih menjadi isu yang terjadi saat ini. Pada bagian utara Kabupaten Serang, potensi agrowisata dan wisata laut yang belum termaksimalkan dengan baik dari segi pengelolaan serta pembinaan masyarakat akan kesadaran berwisata dalam meningkatkan kesejahteraan. Pada bagian Selatan Kabupaten Serang, agrowisata dan geowisata juga belum termaksimalkan dengan baik dari pengelolaan, sarana dan prasarana, serta SDM nya.

Potensi wilayah yang cukup strategis bagi pengembangan wisata, Kabupaten Serang juga memiliki potensi pengembangan wisata berbasis geopark. Setidaknya ada 10 fokus area yang menjadi fokus pengembangan wisata geopark menurut standarisasi UNESCO antara lain sumber daya alam, bahaya geologi, perubahan iklim, edukasi, ilmu pengetahuan, budaya, Perempuan, Pembangunan berkelanjutan, pengetahuan lokal dan pengetahuan asli, dan geokonservasi.

d. Kemandirian Fiskal

Salah satu faktor penunjang keberhasilan otonomi daerah adalah kemandirian fiskal daerah. Dengan kemandirian fiskal, maka daerah akan mampu membiayai Pembangunan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat tanpa tergantung dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan revidi kemandirian fiskal daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020, Kabupaten Serang masuk dalam kategori “Belum Mandiri” dengan nilai indeks 0,2404. Dengan status tersebut, Kabupaten Serang belum mampu membiayai belanja daerah tanpa tergantung pada dana transfer dari pusat dibandingkan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan yang masuk dalam kategori “Menuju Kemandirian”. Kemandirian fiskal juga tercerminkan pada derajat desentralisasi fiskal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Grafik 3.2.1
Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota



Sumber: Bank Indonesia; Laporan Perekonomian Provinsi Banten
Tahun 2021-2023

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) merupakan ukuran kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah yang dihitung dengan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. DDF Kabupaten Serang berada dalam kategori “kurang”, tetapi dalam 3 tahun terakhir DDF Kabupaten Serang cenderung mengalami peningkatan. Maka dari itu diperlukan strategi untuk melakukan diversifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Serang perlu mengambil langkah kebijakan dalam menentukan objek, potensi, dan target PAD sehingga pembiayaan akan lebih maksimal menuju kemandirian fiskal.

Berdasarkan data Badan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Serang, ada beberapa objek pajak yang memiliki potensi dalam meningkatkan PAD. Pada tahun 2022, objek pajak tersebut tumbuh signifikan dibandingkan tahun 2021. Objek pajak tersebut antara lain: (1) pajak hiburan; (2) pajak mineral bukan logam dan batuan; dan (3) pajak parkir. Pada objek retribusi, objek retribusi jasa umum dan retribusi

perizinan tertentu memiliki pertumbuhan yang baik pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Serang, perlu untuk mengambil langkah kebijakan yang tepat dalam memanfaatkan momentum ini. Penguatan pada peraturan daerah serta inovasi terkait dengan keuangan daerah juga perlu dimaksimalkan sehingga penerimaan daerah dapat optimal dan potensi-potensi penerimaan daerah yang ada maupun yang belum termanfaatkan dapat termaksimalkan.

C. Tata Kelola Pemerintahan

Isu utama dalam isu strategis daerah Kabupaten Serang ini adalah sebagai berikut.

a. Kualitas SDM

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam hal penunjang pembangunan. Menciptakan SDM yang unggul, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan aset pembangunan. Dalam peningkatan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM di Kabupaten Serang diantaranya adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu.

Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah Daerah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan IPTEK dan inovasi yang diciptakan serta merata di setiap wilayah di Kabupaten Serang. Penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa juga harus dilaksanakan demi menghasilkan kualitas SDM terbaik. Kemudian upaya peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai Diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan

pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.

Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

b. Daya Saing Inovasi

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan tujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pada tahun 2022, Kabupaten Serang memiliki nilai atau skor IDSD sebesar 2,93 masih lebih rendah dibawah nilai indeks Provinsi Banten dan Nasional. Ada 2 pilar yang memiliki nilai yang cukup rendah antara lain pasar tenaga kerja dan kapabilitas inovasi. Pilar Pasar Tenaga Kerja menggambarkan fleksibilitas dan pemanfaatan tenaga kerja di daerah, dengan indikator kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah pekerja, dan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki. Pada pilar tersebut, Kabupaten Serang hanya memperoleh nilai 0,93.

Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang. Pada tahun 2022, Kabupaten Serang hanya memiliki nilai 1,95 pada pilar tersebut. Maka dari itu, Kabupaten Serang perlu melakukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan produktivitas. Kabupaten Serang perlu melakukan penguatan sistem inovasi daerah, pengembangan kluster industri, pengembangan jaringan inovasi, pengembangan teknopreneur, dan pengembangan pilar-pilar kebijakan tematik.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

TIK memiliki peran penting dalam pemerintahan modern. Penggunaan TIK dapat membawa berbagai manfaat positif, seperti efisiensi administrasi, pelayanan publik yang lebih mudah, transparansi, murah, akuntabel dan publik dapat ikut berpartisipasi aktif. Dalam menuju hal tersebut, perkembangan teknologi yang cepat membutuhkan peningkatan kapasitas SDM. SDM TIK harus mengikuti tren terbaru, menciptakan inovasi, menjaga keamanan informasi, mengembangkan aplikasi dan sistem, serta mendukung transformasi digital. Persiapan SDM menuju SDM yang berkualitas dalam menerima kemajuan teknologi perlu digencarkan hingga mencapai wilayah desa.

TIK merupakan salah satu kekuatan pendorong dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. TIK mampu memberikan solusi dan layanan baru untuk kegiatan pendidikan. TIK dapat menawarkan alat baru untuk meningkatkan pengetahuan. Penggunaan TIK dalam pendidikan telah meningkatkan minat peserta didik. Meskipun alat TIK semakin populer, banyak guru masih memiliki tantangan untuk mengintegrasikan alat TIK dalam kegiatan pembelajaran.

D. Pembangunan Lingkungan dan Mitigasi Bencana

Isu utama dalam isu strategis daerah Kabupaten Serang ini adalah sebagai berikut.

a. Persampahan

Sejalan dengan adanya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Kabupaten Serang memiliki potensi rata-rata tingkat pertumbuhan volume sampah sekitar 0,95% per tahun. Pada tahun 2022 saja timbunan sampah mencapai 1.179,73 ton per hari. Tingginya timbunan sampah, memunculkan isu sampah dengan menyediakan pengelolaan sampah modern dengan sistem insinerasi. Insinerasi merupakan proses pengolahan sampah dengan cara dibakar pada suhu tinggi di dalam hanggar atau tabung. Metode ini direncanakan mampu membakar sampah hingga 20 ton/hari.

b. Pencemaran

Berkembangnya kawasan industri di wilayah timur Kabupaten Serang memberikan dampak secara langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan khususnya sumber daya air. Kasus pencemaran lingkungan di Kabupaten Serang yang berasal dari aktivitas industri diantaranya seperti tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain-lain. Kabupaten Serang melakukan pengawasan intensif terhadap Industri yang ada di wilayah itu guna menurunkan pencemaran lingkungan, emisi dan mengendalikan polusi udara. Dengan pengawasan terhadap industri, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat Kabupaten Serang.

c. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang semakin esktrm memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Emisi Gas Rumah Kaca masih menjadi salah satu perubahan iklim yang ditekan oleh Kabupaten Serang. Masyarakatnya perlu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menekan perubahan iklim yang semakin massif. Setiap rumah di pekarangannya diubah menjadi lokasi budidaya tanaman holtikultura, budidaya perikanan juga pertanian serta kelembagaan yang dibentuk didalamnya.

d. Kebencanaan

Berdasarkan potensi ancaman yang terjadi di Kabupaten Serang, bencana yang berpotensi terjadi dengan kategori tinggi dan sedang antara lain adalah banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Sementara itu, potensi terjadinya bencana tanah longsor masih cukup rendah. Dalam memitigasi hal tersebut, pemerintah perlu melakukan peningkatan dalam berbagai aspek seperti infrastruktur kebencanaan, kualitas SDM aparatur, kesadaran masyarakat terkait mitigasi bencana, dan melakukan pemeliharaan lingkungan alam. Selain itu potensi ancaman juga terdapat dari sektor bencana non-alam seperti bencana gagal teknologi, pandemi penyakit dan bencana industri.

E. Infrastruktur

a. Jalan dan Jembatan

Peningkatan infrastruktur masih menjadi prioritas utama dalam pembangunan di wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Serang. Adanya peningkatan infrastruktur diharapkan mampu memberikan ruang dan aksesibilitas antar wilayah dalam menggerakkan kegiatan ekonomi. Di Kabupaten Serang, selain perbaikan kondisi jalan menjadi jalan beton (betonisasi) yang dilakukan pemerintah, jalan di wilayah Kabupaten Serang yang saat ini masih berstatus jalan desa perlu dikaji dan diperhitungkan kedepannya. Pemindahan kewenangan jalan masih menjadi opsi yang cukup baik dalam memanfaatkan infrastruktur jalan sebagai pendukung kegiatan ekonomi. Adanya pemindahan kewenangan jalan desa menjadi jalan Kabupaten akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi peningkatan Pembangunan wilayah di Kabupaten Serang.

Dampak yang dirasa dari peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan antara lain kegiatan ekonomi pada sektor pertanian akan meningkat sering dengan hasil-hasil produksi pertanian yang dapat tersalurkan dengan optimal di wilayah Kabupaten Serang bahkan mencapai wilayah di luar Kabupaten Serang. pada sektor pariwisata akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang akan berkunjung ke daerah wisata di Kabupaten Serang.

b. Ketahanan Pangan

Masalah ketahanan pangan harus terus mendapat perhatian serius. Tidak hanya Pemerintah, tetapi juga perhatian dari seluruh komponen masyarakat. Pasalnya, alih fungsi lahan beririgasi teknis terus meningkat pada sektor pertanian. Alih fungsi tersebut berpotensi membuat produktivitas padi dan ketahanan pangan di Kabupaten Serang menurun. Pada kondisi yang sama, banyak anak muda yang enggan untuk menjadi petani. Padahal, untuk meningkatkan produktivitas pertanian perlu memiliki SDM yang berkualitas agar menciptakan inovasi-inovasi dalam mendongkrak produktivitas dan mencapai ketahanan pangan di Kabupaten Serang.

Perubahan iklim yang semakin ekstrem juga menjadi pemicu dari kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama disektor pertanian. Musim

kemarau yang berkepanjangan menyebabkan produksi pertanian menjadi tidak maksimal.

Maka dari itu, pemerintah bersama dengan stakeholder lainnya perlu hadir dalam memberikan pembinaan kepada petani dan juga penyediaan sarana dan prasarana sehingga sektor pertanian dapat termaksimalkan dengan baik pada kondisi ini. Opsi lainnya adalah Pembangunan waduk sebagai alternatif dari kekeringan yang berkepanjangan dalam memasok air sebagai salah satu unsur yang dibutuhkan oleh sektor pertanian.

c. Ketersediaan Air Baku

Air baku adalah air sebagai bahan untuk diolah, yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan antara lain air minum, peternakan, industri, dan lain-lain. Kebutuhan air baku di Kabupaten Serang terus meningkat akibat dari adanya peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas industri. Kabupaten Serang memiliki beberapa mata air dengan debit yang cukup besar (>100 liter/detik). Mata air ini jika diolah dengan baik cukup potensial untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Serang. Penggunaan mata air dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sumber air baku. Mata air tersebut, yaitu mata air Sukacai dan Citaman sebesar 140 liter/detik, mata air Cisindang 10 liter/detik, mata air Cirahab 10 liter/detik, dan mata air Pelabuhan Bulan 35 liter/detik. Selain itu, Kabupaten Serang memiliki bendungan sindangheula yang mungkin belum teroptimalkan dengan baik dalam mengatasi ketersediaan air baku di Kabupaten Serang terutama di wilayah bagian Selatan Kabupaten Serang.

d. Sarana dan Prasarana

Bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2045 tentunya berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Serang. Pemerintah Kabupaten Serang perlu hadir dalam menyambut hal tersebut dengan melakukan persiapan dan perencanaan atas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang peningkatan penduduk tersebut. Kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah akan menjadi salah satu parameter yang perlu dipersiapkan oleh Kabupaten Serang. Kebutuhan rumah ini tentu harus diimbangi dengan ketersediaan jumlah lahan untuk perumahan atau permukiman. Namun, untuk kedepannya perlu dipikirkan kebutuhan rumah susun atau apartemen yang jika dilihat

dari sisi kebutuhan lahan tidak sebanyak rumah tapak biasa, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan rumah ini tidak mengganggu fungsi kegiatan lain seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan/permukiman yang akan berdampak pada ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Serang. Peningkatan Kawasan perumahan atau permukiman tentunya juga perlu dipersiapkan akan prasarana seperti kebutuhan pasokan air bersih dan air baku, listrik, drainase, persampahan dan telekomunikasi.

Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh juga pada kebutuhan sarana sekolah dan Kesehatan. Dengan kondisi saat ini, sarana sekolah dan Kesehatan belum mampu untuk menampung peningkatan jumlah penduduk yang akan terjadi hingga tahun 2024. Maka dari itu perlu ada peningkatan pada jumlah sekolah pendidikan formal dan fasilitas kesehatan yang ada. Dalam meningkatkan geliat ekonomi, sarana perdagangan dan jasa untuk ditingkatkan. Masyarakat yang semakin konsumtif serta menghindari pemusatan kegiatan ekonomi (perdagangan) pada suatu lokasi tertentu yang akan memicu kemacetan atau permasalahan lainnya menjadi isu utama dalam meningkatkan sarana perdagangan dan jasa di Kabupaten Serang.

Masyarakat yang semakin mengedepankan akan pentingnya *work life balance*, menyebabkan adanya peningkatan akan kebutuhan berwisata atau saat ini masyarakat menyebutkan sebagai *healing*. Sehingga, sarana rekreasi dan kebudayaan perlu untuk ditingkatkan sebagai respon akan isu tersebut dan adanya dampak peningkatan jumlah penduduk yang diproyeksikan meningkat hingga tahun 2045. Selain itu, peningkatan pada sarana ruang terbuka hijau, taman serta lapangan olahraga juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam merespon pola hidup masyarakat yang semakin memiliki mindset bahwa harus memiliki pola hidup sehat.

F. Budaya dan Keagamaan.

Isu utama dalam isu strategis daerah Kabupaten Serang ini adalah sebagai berikut.

a. Ketentraman dan Ketertiban

Dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas di Kabupaten Serang diperlukan berbagai Upaya peningkatan kemanan dari kriminalitas, kekerasan dan kejahatan siber. Pada lapisan Masyarakat

harus ada upaya pencegahan radikalisme yang mengarah kepada terorisme. Penyebab konflik sosial antar kelompok dan agama di Masyarakat, dan penanganannya secara damai dan adil. Hal-hal terkait ketidaksetaraan dan keadilan dalam mendistribusikan sumber daya dan peluang, tidak mentolerir diskriminasi. Pemerintah harap dapat berlaku transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya atas upaya-upaya pemberontakan dan kekerasan akibat politik. Isu-isu ini memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai ketentraman dan ketertiban yang berkelanjutan di masyarakat.

b. Budaya dan Kerukunan

Isu budaya dan agama adalah hal-hal kompleks yang melibatkan identitas, kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakat. Perlu ditindaklanjuti dalam menjaga dan memelihara kelestarian budaya dalam hal Upaya untuk mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan kerukunan umat beragama dalam hal membangun pemahaman dan toleransi ditengah Masyarakat yang beragam, meningkatkan toleransi dan memastikan kebebasan beragama serta melindungi hak asasi agama setiap individu. Mencegah proses radikalisme yang dapat mengarah pada ekstrimisme, menanggulangi ancaman terorisme yang dilakukan atas dasar keyakinan agama. Memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok minoritas budaya dan agama. Mengelola pengaruh globalisasi terhadap identitas budaya local, mempertahankan identitas budaya unik ditengah arus globalisasi.

Menghadapi perubahan nilai-nilai budaya dengan cepat sebagai hasil modernisasi, mengatasi kesenjangan antar generasi yang mungkin memiliki pandangan berbeda terhadap nilai dan norma budaya serta agama, Menemukan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan sensitivitas terhadap nilai-nilai budaya dan agama, Memastikan penghargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan agama dalam konteks ekspresi seni, media, dan komunikasi. Mengintegrasikan pemahaman budaya dan agama dalam sistem Pendidikan, Mendorong dialog dan saling pengertian antarbudaya melalui pendidikan dan pertukaran budaya. Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam konteks budaya dan agama. pendekatan

yang bijaksana dan inklusif untuk menjaga keseimbangan antara keberagaman budaya dan keharmonisan dalam masyarakat. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai budaya dan agama serta dialog terbuka dapat membantu mengatasi konflik dan membangun masyarakat yang lebih inklusif.

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045

4.1.1 Visi Daerah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Serang

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun ke depan. Visi adalah suatu mimpi dan serangkaian harapan yang dijadikan dasar komitmen pemerintah daerah serta dasar dalam merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan. Visi harus didasarkan pada realita dan harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Tabel 4.1.1
Perumusan Visi RPJPD

NO	ISU STRATEGIS	POKOK-POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
1	Kualitas dan Daya Saing SDM	Maju dan Agamis	Kabupaten Serang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dan Agamis
2	Pembangunan Ekonomi	Ekonomi dan Sejahtera	
3	Tatakelola Pemerintahan	Maju dan Agamis	
4	Pembangunan Lingkungan dan Mitigasi Bencana	Berkelanjutan dan Agamis	
5	Infrastruktur	Maju dan Berkelanjutan	
6	Budaya dan Keagamaan	Berkelanjutan dan Agamis	

Sumber : Hasil Olahan, 2024

Visi Kabupaten Serang dirumuskan, dibahas, dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para stakeholders dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah serta mendukung visi Indonesia guna pencapaian Indonesia Emas di Tahun 2045 maka hasil perumusan visi pembangunan Kabupaten Serang tahun 2025-2045 adalah:

**“KABUPATEN SERANG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, DAN AGAMIS”**

PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Secara historis Kabupaten Serang tidak terlepas dari sejarah kesultanan Banten yang menjadi bagian dari kawasan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat pada masa itu. Modal dasar infrastruktur yang baik saat ini dapat dijadikan faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi dari perkotaan sampai ke ekonomi lokal pedesaan selain dari pada itu infrastruktur yang baik dapat meningkatkan daya jual dan investasi sehingga Kabupaten Serang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi salah satu hal yang harus menjadikan fokus utama, mengingat Kabupaten Serang secara kewilayahan masuk dalam garis utama akses pulau sumatera dan pulau jawa, secara kependudukan akan memasuki bonus demografi pada tahun 2035, secara ekonomi menjadi salah satu kawasan industri strategis, kawasan pertanian dan ketahanan pangan, kawasan pariwisata UMKM ekonomi lokal dan ekonomi kreatif serta secara sosial budaya dan agama Kabupaten Serang menjadi wilayah dengan masyarakat yang memiliki nilai – nilai landasan moral dan spiritual dalam aspek kehidupan sehingga terjaganya kondusifitas keamanan, ketertiban secara umum.

MAJU

Pada tahun 2045 pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Serang senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antarwilayah, pembangunan pedesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan

pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah.

SEJAHTERA

Dalam arti umum menunjuk kepada keadaan yang baik, kondisi manusia dalam kondisi makmur, sehat, aman dan tenteram. Dalam arti ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda, terpenuhinya kebutuhan, tersedianya lapangan pekerjaan dan diperolehnya penghasilan yang layak. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk pada jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat sejahtera merupakan cita-cita yang diinginkan dalam proses pembangunan di Kabupaten Serang, dalam hal ini sejahtera yang berkelanjutan.

Pembangunan di kabupaten Serang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik secara memadai, sedangkan sejahtera batin ditandai dengan perilaku yang menjunjung norma agama, moral dan etika yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari segi pemerataan kesejahteraan, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi berkeadilan, yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Serang ditujukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi, pendapatan perkapita tinggi dan terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat. Untuk itu, pendekatan yang diambil untuk terwujudnya pertumbuhan berkeadilan adalah memberdayakan masyarakat agar masyarakat mampu berperan aktif dalam pembangunan dan pengembangan agribisnis serta usaha ekonomi produktif.

BERKELANJUTAN

Sebagai Kabupaten yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Dalam konteks visi Kabupaten Serang keberlanjutan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam secara bertanggung jawab. Selain itu sebagai daerah yang memiliki banyak industri, dalam

penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Serang perlu menyertakan aspek pengelolaan lingkungan sebagai dampak dari industri itu sendiri, mulai dari perencanaan sampai pemanfaatannya. Sehingga industri yang ada selain harus berwawasan lingkungan, juga mampu mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, jasa dan pariwisata yang mengarah kepada pemerataan ekonomi masyarakat.

Faktor pendukung utama dari pembangunan berkelanjutan adalah tersedianya sistem infrastruktur yang handal, terpadu dan efisien dalam pemahaman infrastruktur yang handal artinya tepat guna dan berdaya guna, terintegrasi dengan faktor pendukung lainnya dan efisien yang bermakna sesuai kebutuhan; membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terpeliharanya kekayaan keseragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

AGAMIS

Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya. Selain itu masyarakat di Kabupaten Serang dapat menuju masyarakat yang multikultural dan tumbuh menjadi masyarakat yang matang dalam pemikiran dan terbuka, sekaligus menjunjung tinggi perbedaan dan dinamika yang dimiliki secara inklusif dengan senantiasa menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Tabel 4.1.2
Penyelarasan Visi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045

Visi RPJPN 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Banten 2025-2045	Visi RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045
NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	BANTEN MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA	KABUPATEN SERANG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, DAN AGAMIS

Sumber : Hasil Olahan, 2024

4.1.2 Sasaran Visi Daerah

Visi Indonesia Emas 2045 merupakan Visi abadi Indonesia yang kemudian diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai **Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**.

Hal tersebut disikapi dengan visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 yaitu Banten Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Iman dan Taqwa.

Untuk dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 serta visi Daerah Provinsi Banten 2045 dan Terwujudnya **Kabupaten Serang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dan Agamis**, telah dirumuskan lima sasaran visi, yaitu: 1.) Peningkatan Pendapatan per Kapita, 2.) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan, 3.) Peningkatan Daya Saing Daerah 4.) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, 5.) Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission.

Tabel 4.1. 3
Pemetaan Pokok Visi Terhadap 5 (Lima) Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Serang

NO	ISU STRATEGIS	POKOK-POKOK VISI	PERNYATAAN VISI	SASARAN VISI
1	Kualitas dan Daya Saing SDM	Maju dan Agamis	Kabupaten Serang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	Pembangunan Ekonomi	Ekonomi dan Sejahtera	Maju, Sejahtera, Berkelanjutan	Peningkatan Pendapatan per Kapita, Pengentasan

			dan Agamis	Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Daya Saing Daerah
3	Tatakelola Pemerintahan	Maju dan Agamis		Peningkatan Pendapatan per Kapita, Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Daya Saing Daerah
4	Pembangunan Lingkungan dan Mitigasi Bencana	Berkelanjutan dan Agamis		Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission
5	Infrastruktur	Maju dan Berkelanjutan		Peningkatan Pendapatan per Kapita, Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Daya Saing Daerah
6	Budaya dan Keagamaan	Berkelanjutan dan Agamis		Peningkatan Pendapatan per Kapita, Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Daya Saing Daerah

Tabel 4.1. 4
Penyelarasan 5 (lima) Sasaran Visi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045				RPJPD Kab/kota Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju	a. GNI Perkapita (USD)	5,500	23.000-30.300	Peningkatan Pendapatan per Kapita	a. PDRB per Kapita (Rp. Juta)	72,21-72,42	384,94-415,51	Peningkatan Pendapatan per Kapita	a. PDRB per Kapita (Rp. Juta)	58,00-60,00	320-380
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20.8	28		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	30,48-31,20	34,99-36,13		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	45.75	58.10
2	Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,50	0,04-0,54	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	4.08	0.5-0.98
		b. Rasio Gini (Indeks)	0,379-0,382	0,377-0,320		b. Rasio Gini (Indeks)	0,344-0,365	0,300-0,351		b. Rasio Gini (Indeks)	0.266	0.261
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2021)	28.5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,94	3,43		d.Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,08-5,04	5,47-6,32
						d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28-5,33	5,89-6,89				
3	Kepemimpinan dan Pengaruh Di Dunia Internasional Meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 Besar	Kepemimpinan Daerah sebagai Hub Integrasi Ekonomi Pulau Sumatera-Jawa serta Penyangga Industri Nasional	Indeks Daya Saing Daerah (%)	3,70-3,90	4,50-4,80	Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (%)	2,93	4,50-4,80

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045				RPJPD Kab/kota Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,54 (2022)	0.73	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	0,54	0.71	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72.87	81.14
5	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38.6	93.5	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	43,56	93,42	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission	a.Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	40.41	68.41
						b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,92	74,92		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	65.31	72.39

Sumber : Hasil Olahan, 2024

Metadata dan Definisi Operasional Indikator Sasaran Visi

1. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu wilayah dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan Rupiah. PDRB Perkapita menunjukkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Metadata PDRB per kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

$$\text{PDRB Per Kapita} = \frac{\text{Nilai tambah PDRB ADHB (rupiah)}}{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}$$

2. Kontribusi PDB Industri Pengolahan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan

3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk Kabupaten Serang yang berada di bawah garis kemiskinan. Rumus perhitungannya adalah:

$$P_{\alpha} = 1n \sum qi = 1 [z - yic]\alpha$$

Semakin tinggi nilai persentase yang diperoleh menunjukkan semakin banyaknya penduduk di Kabupaten Serang yang berada di bawah garis kemiskinan.

4. Rasio Gini (Indeks)

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai rasio gini berada dalam rentang antara 0 hingga 1. Nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna, atau

setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, nilai 1 pada rasio gini menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Rasio gini dihitung melalui rumus berikut:

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro dengan melihat Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan. Berdasarkan perhitungan tersebut apabila nilai menunjukan pertumbuhan yang positif maka berarti Kabupaten Serang mengalami kenaikan produksi barang dan jasa.

$$r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100\%$$

6. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). IDSD sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Data perhitungan IDSD bersumber dari data sekunder kementerian / lembaga. Skor pilar daya saing merupakan agregasi skor indikator pembentuknya yang dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik. Setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga diberikan bobot yang sama dalam perhitungan skor indeks. Skor akhir IDSD dihitung melalui agregasi skor pilar daya saing dengan menggunakan metode yang sama. Indeks daya saing daerah dihitung melalui rumus berikut:

$$Skor_{i,d} = \left(N_{i,d} - \frac{NR_i}{NT_i} - NR_i \right) \times 5$$

Skor Indeks daya saing daerah adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; $N_{i,d}$ adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d NR_i adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; dan NT_i adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95).

7. Indeks Modal Manusia

Indeks modal manusia (IKM) merupakan metrik internasional yang digunakan untuk mengukur modal manusia yang diharapkan dimiliki oleh anak yang lahir di suatu negara saat ini. Nilai IKM berkisar antara 0 dan 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan modal manusia yang diharapkan lebih tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk menghitung IKM, di antaranya:

- a) Survival (S), yaitu kemampuan bertahan hidup masyarakat sampai umur lima tahun atau indeks keterampilan
- b) Education (E) Indeks Pendidikan, diukur dari harapan pencapaian lama bersekolah
- c) Work (W) adalah indeks pengalaman bekerja
- d) Health (H) Kesehatan, diukur dari kelangsungan hidup usia 15-60 tahun dan persentase balita tidak tengkes/stunting

$$IKM = \frac{(H \times E \times S \times W)}{100}$$

8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama. Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

a. Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Kumulatif

$$\%PEK = \frac{\sum_{i=base\ layer}^t PE_t}{\sum_{i=base\ layer}^t EB_t}$$

$\%PEK$: persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatifGRK

$\sum_{i=base\ layer}^t PE_t$: akumulasi penurunan emisi GRL total daerah selama periode base year

hingga tahun t

$\sum_{i=base\ layer}^t EB_t$: akumulasi emisi GRK total baseline daerah selama periode base year hingga

tahun t

t : titik tahun perhitungan

i : base year

Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Sistem AKSARA Bappenas.

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu yang lebih representatif dan komprehensif terhadap dinamika kualitas lingkungan dan problem pencemaran yang terjadi. Instrumen ini terdiri dari tiga indikator utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Selain itu juga memiliki target capaian yang dicantumkan dalam perencanaan pembangunan. IKLH berperan sebagai indikator meningkatnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat dalam berbagai perencanaan. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

4.2 Misi Daerah Tahun 2025-2045

4.2.1 Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang

Misi merupakan rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu menyediakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan bagi seluruh stakeholder. Misi merupakan hal yang penting untuk dirumuskan dalam membantu menggambarkan visi secara lebih jelas yang ingin dicapai dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi dalam RPJPD harus mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam 4 tahap selama 20 tahun ke depan.

Tabel 4.2.1
Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi Daerah
1.	Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia dan Inovasi	Kabupaten Serang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dan Agamis	Pendidikan Berkualitas Belum Merata dan rendahnya angka partisipasi sekolah	Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas SDM
			Kesetaraan Gender dan Perlindungan anak	
			Penurunan Peran Aktif Pemuda	
			Pelestarian Kebudayaan yang Memudar	Menjadikan Peran Sentral Agama dan Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi
			Minimnya Riset dan Inovasi	Transformasi Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Serta Pelayanan Publik yang Berkualitas
			Sarana Prasarana Literasi dan Digitalisasi	
			Minimnya SDM Berkualitas dan Pemanfaatan TIK dalam Tatakelola Pemerintahan	
2.	Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		Minimnya Pemahaman Drajat Kesehatan Menyeluruh	Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas SDM
			Pengendalian Penyakit Menular	

			Pengendalian Keluarga Berencana	
3.	Belum Optimalnya Pembangunan Sosial		Kemiskinan, Ketimpangan dan Tingginya Angka Pengangguran	
			Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	
			Pembangunan dan Kemandirian Desa	
			Ketentraman dan Ketertiban	Menjadikan Peran Sentral Agama dan Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi
			Pengamalan dan Penghayatan Agama	
			Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan	
			Perubahan Iklim dan Pencemaran	
4.	Lingkungan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana Belum Optimal		Optimalisasi Mitigasi Bencana	Meningkatkan Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur yang handal dan Berkelanjutan
5.	Pembangunan Infrastruktur Belum Merata		Pemerataan Infrastruktur dan Sarana Prasarana	
			Ketaatan Pemanfaatan Ruang Wilayah	
			Minimnya Transportasi Publik dan Jasa Angkutan Barang	
			Ketahanan Pangan, Energi	

			dan Air Bersih	
6.	Pembangunan Ekonomi Belum Optimal		Menurunnya Hasil Pertanian dan Perikanan	Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat
			Pertumbuhan Sektor Wisata	
			Industri, Perdagangan dan Jasa Menjadi Sektor Utama PDRB	
			Penguatan Potensi Ekonomi Lokal	
			Kondusifitas Iklim Investasi	

Hasil perumusan misi pembangunan Kabupaten Serang tahun 2025-2045 adalah:

1) Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas SDM;

Misi ini dapat dilihat dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan, makin mantapnya kearifan budaya lokal; dan meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang serta mempunyai daya saing global. Tingkat pengetahuan penduduk perlu ditingkatkan dengan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dapat ditempuh dengan peningkatan cakupan layanan pendidikan, pemerataan, peningkatan relevansi pendidikan dan meningkatkan keterkaitan yang baik dengan aspek kehidupan masyarakat. Tingkat kesehatan penduduk perlu ditingkatkan dengan layanan kesehatan yang lebih tinggi. Hal ini dapat ditempuh dengan peningkatan cakupan layanan kesehatan, pemerataan dan peningkatan kesehatan umum serta akses pada kualitas kesehatan yang lebih tinggi. Tingkat pendapatan penduduk perlu ditingkatkan dengan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat, perlindungan dan kepastian usaha bagi UMKM. Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan taraf aspek-aspek kesejahteraan penduduk agar dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

2) Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat;

Perekonomian yang tangguh dapat dicapai melalui peningkatan iklim investasi yang sehat dan iklim berusaha yang kondusif dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Menggali potensi ekonomi daerah, mengembangkan perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing serta sehat melalui pengembangan potensi ekonomi daerah yang menjadi sektor unggulan seperti industri, pertanian dan pariwisata dalam konteks lokal, nasional, regional maupun internasional nantinya. Menciptakan kerjasama penguatan ekonomi dalam upaya membentuk sinergitas ekonomi dan kebijakan usaha dengan wilayah lainnya. Mewujudkan kepastian hukum untuk kepentingan investasi domestik dan investasi asing melalui penyusunan peraturan baik peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang lebih menjamin kepastian hukum bagi pekerja dan bagi pelaku usaha dan penegakan hukum untuk kepentingan pengembangan investasi.

Investasi dan kegiatan ekonomi hanya dapat berjalan bila ada situasi dan kondisi yang aman, upaya menciptakan lingkungan yang aman, dan kondusif untuk investasi perlu terus dijaga dan ditingkatkan. Untuk itu perlu menjaga sinergi antara sektor publik dan privat untuk mengakselerasikan perekonomian daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan daya dukung lingkungan, dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Serang.

Potensi dan keunggulan daerah direncanakan dan dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk pengembangan potensi daerah. Dengan semakin berkembangnya dan pesatnya pertumbuhan ekonomi daerah, dalam jangka panjang diharapkan terjadi peningkatan PDRB Kabupaten Serang dari sektor industri, pertanian dan pariwisata yang cukup signifikan. Sehingga diharapkan dengan modalitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan menurunkan kesenjangan dan angka kemiskinan serta membuka peluang dan lapangan kerja bagi Masyarakat.

3) Transformasi Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Serta Pelayanan Publik yang Berkualitas;

Seluruh pembangunan yang akan dilaksanakan akan memberikan hasil yang efektif dan efisien apabila didukung oleh kelembagaan yang mendukung. Kelembagaan tersebut pada pokoknya meliputi kelembagaan pemerintah, masyarakat dan swasta yang madani. Untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang handal, maka perlu diterapkan *clean goverment and good governance*, yang didalamnya ditegakkan atas azas akuntabilitas dan transparansi, didukung tata kelola organisasi yang handal serta pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mewujudkan kelembagaan swasta yang handal, maka perlu diterapkan *good corporate governance*, yaitu lembaga bisnis yang kreatif dan mendasarkan pada kepatuhan bisnis serta kepedulian. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah yang efisien bagi pengusaha dan akuntabel bagi penegak hukum dan transparan di dalam proses pengambilan keputusan bagi para politisi.

Pemerintah yang efisien dan bersih adalah aparatur pemerintah yang tidak menjadi beban bagi usaha masyarakat, tidak korupsi dan melakukan kolusi. Pemerintah yang bersih juga sangat tergantung pada tegaknya hukum yang berkeadilan. Aparatur pemerintah dimasa yang akan datang diharapkan, benar benar dirasakan oleh rakyat sebagai pengayom, pelayan dan pelindung yang adil, bukan sebaliknya dirasakan sebagai penguasa yang menambah beban rakyat. Tapi satu hal yang harus diperhatikan bahwa kebebasan setiap individu harus memperhatikan kebebasan individu lainnya. Disinilah peran penting pemerintah untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bahwa pelanggaran atas kebebasan orang lain adalah perbuatan melanggar hukum. Pembentukan sistem pemerintahan yang baik erat kaitannya dengan penegakan supremasi hukum, aparatur pemerintah yang efisien, bersih dan professional.

4) Menjadikan Peran Sentral Agama dan Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi;

Dalam upaya melahirkan masyarakat Kabupaten Serang yang “Agamis” sesuai dengan Visi Kabupaten Serang Tahun 2025-2045, maka kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Serang perlu ditingkatkan

melalui institusi keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan, pesantren, yayasan sosial serta mengoptimalkan keberadaan tempat peribadatan seperti masjid, mushola, langgar, gereja, pura dan wihara di Kabupaten Serang, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama yang dianut serta memupuk kesadaran masyarakat.

Kondisi tersebut dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama. Kualitas kehidupan bernegara di Kabupaten Serang juga ditingkatkan melalui pemahaman serta penanaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1944, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Peran serta institusi keagamaan dan kenegaraan lebih dititikberatkan pada pembentukan karakter masyarakat Kabupaten Serang agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan serta menjunjung tinggi empat pilar negara kebangsaan Indonesia sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian peran institusi keagamaan dan kenegaraan dalam mencetak masyarakat yang “Agamis” sangat besar. Pembangunan Kabupaten Serang sangat ditentukan oleh subjek pembangunannya yaitu masyarakat Kabupaten Serang. Oleh karena itu jika masyarakat Kabupaten Serang memiliki nilai-nilai keagamaan yang tinggi dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Serang sebagai warga negara yang baik, maka pembangunan di segala bidang dapat tercapai. Serta terjaganya prinsip berkesinambungan antara kehidupan bermasyarakat alam dan lingkungan hidup agar dapat bertahan dan menjaga keseimbangan kehidupan.

5) Meningkatkan Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur yang handal dan Berkelanjutan;

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, Kabupaten Serang perlu menyertakan aspek pengelolaan lingkungan, mulai dari perencanaan sampai pemanfaatannya. Faktor pendukung utama dari pembangunan adalah tersedianya sistem infrastruktur yang handal, terpadu dan efisien dalam pemahaman infrastruktur yang handal artinya tepat guna dan berdaya guna, terintegrasi dengan faktor pendukung lainnya dan efisien yang bermakna sesuai kebutuhan. Selain itu diperlukan perwujudan pembangunan melalui pemerataan dan penyediaan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan peningkatan pemahaman dan kesadaran

terhadap lingkungan bagi seluruh pelaku pembangunan termasuk mengurangi jumlah lahan kritis, serta penurunan emisi gas rumah kaca, dan upaya ini dilakukan secara terus- menerus.

Menjaga sinergi antara sektor publik dan privat untuk mengakselerasikan perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Serang dan wilayah eksternal sekitarnya melalui upaya menjaga dan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan antar daerah dan antar sektor (publik dan privat). Mewujudkan pemerataan pembangunan diseluruh Kabupaten Serang melalui upaya meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan sarana dan prasarana serta kualitas lingkungan hidup antar kecamatan dan seluruh desa.

4.2.2 Penyelarasan Misi Daerah

Penyelarasan antara Misi Indonesia Emas dalam RPJPN, Misi Provinsi Banten dalam RPJPD Provinsi Banten 2025-2045 dan Misi Kabupaten Serang dalam RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 4.2.2
Penyelarasan Misi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi 2025- 2045	RPJPD Kabupaten/ Kota 2025- 2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
1.	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing	Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas SDM
2.		Transformasi ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif	Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat

3.		Transformasi tata Kelola	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional	Transformasi Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Serta Pelayanan Publik yang Berkualitas
4.	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Kemananan yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial, dan Perekonomian Daerah yang Stabil	Menjadikan Peran Sentral Agama dan Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi
5.		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Sosial Budaya yang Beradab dan Ekologi Lestari	
6.	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, Perkuatan Pemerataan, dan Interkoneksi Pembangunan	Meningkatkan Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur yang handal dan Berkelanjutan
7.		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Memadai, Berkualitas, dan Berkelanjutan	
8.		Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan yang Inovatif dan Berdaya Saing Global	

Sumber : Hasil Olahan, 2024

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045

Pada tahun 2045, sebagian besar wilayah Jawa akan menjadi kawasan perkotaan yang diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 70 persen penduduk di Wilayah Jawa. Kawasan strategis aglomerasi penduduk tersebut menjadi suatu kekuatan market yang sangat potensial dan menjadi demand generator bagi kawasan lainnya. Signifikansi peran kawasan perkotaan dan pesatnya aktivitas perekonomian wilayah Jawa tersebut perlu diperkuat dan didukung oleh Kabupaten Serang dengan tetap menjaga kualitas lingkungan dengan menguatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan berbasis *green energy*.

Dalam mencapai visi misi dan sasaran pokok jangka panjang daerah, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan yang merupakan pedoman agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Penetapan tahapan menggambarkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, namun tidak mengabaikan permasalahan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan pembangunan akan berbeda-beda, tetapi semuanya harus berkesinambungan dalam setiap periode tahap pembangunan dalam rangka pencapaian pembangunan jangka panjang. Setiap misi pembangunan jangka panjang dan kemudian dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Serang dirumuskan berdasarkan permasalahan daerah, isu strategis daerah, rekomendasi hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026, rekomendasi KLHS RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Banten Tahun 2025-2045.

Berdasarkan hal tersebut, maka berikut ini diuraikan arah kebijakan utama dengan memperhatikan tahapan skala prioritas pembangunan jangka panjang Kabupaten Serang tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam Gambar 5.1 .1.

Gambar 5.1. 1
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045



5.1.1 Arah Kebijakan Periode 1 (Tahun 2025-2029)

Untuk mencapai Visi Kabupaten Serang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dan Agamis, Kabupaten Serang harus mengubah pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lalu dengan langkah reformasi yang diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Pada 5 (lima) tahun pertama, arah kebijakan pembangunan diarahkan untuk melaksanakan penguatan modal dasar pembangunan. Perwujudan penguatan modal dasar pembangunan melalui peningkatan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan serta layanan dasar, peningkatan peran UMKM, pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana permukiman, transportasi dan ekonomi, perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh fasilitas yang sudah ada saat ini, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah, rehabilitasi ruang-ruang terbuka publik, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggungjawab, konservasi lingkungan, dan risiko bencana, serta penguatan fungsi dan peran kelembagaan dan koordinasi pemerintahan.

5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2 (Tahun 2030-2034)

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan periode pertama, maka arah pembangunan 5 (lima) tahun kedua diarahkan untuk melaksanakan peningkatan proses pembangunan. Perwujudan peningkatan pembangunan ini melalui Peningkatan pemerataan mutu pendidikan, kesehatan dan layanan dasar, peningkatan kapabilitas dalam penyediaan jaminan sosial, pendampingan anak dan perempuan, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, pengembangan kawasan industri ramah lingkungan berbasis inovasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah bagi produk-produk hasil pertanian, kelautan, kehutanan dan UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan peranan komunikasi dan informasi, peningkatan jangkauan infrastruktur pendukung pusat-pusat pertumbuhan; peningkatan efisiensi lahan untuk peruntukan lahan dan tata ruang; dan penguatan implementasi layanan kebijakan publik.

5.1.3 Arah Kebijakan Periode 3 (Tahun 2035-2039)

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya, maka arah pembangunan 5 (lima) tahun kedua diarahkan untuk melaksanakan ekspansi global. Perwujudan ekspansi ini melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi bagi seluruh sektor pembangunan, pengoptimalan pemenuhan kebutuhan ruang layak huni, penguatan sector perindustrian, penguatan produk pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan dan UMKM, pengintegrasian seluruh kawasan melalui pengembangan transportasi, pengembangan efisiensi energi melalui pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan, pengoptimalan kapasitas daerah dalam menghadapi isu iklim dan bencana, dan pengembangan sistem manajemen kebijakan dan pelayanan publik.

5.1.4 Arah Kebijakan Priode 4 (Tahun 2040-2045)

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya, maka arah pembangunan 5 (lima) tahun kedua diarahkan untuk perwujudan capaian pembangunan. Perwujudan capaian pembangunan ini melalui pemantapan kondisi sarana dan prasarana pembangunan, pengoptimalan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, perlindungan sosial yang adaptif, pertumbuhan ekonomi yang stabil, produktivitas yang kuat, dan nilai daya saing tinggi; pengendalian ruang terbuka hijau publik yang berkelanjutan, pengendalian

pertumbuhan kawasan permukiman; pemantapan ketahanan energi, air, dan pangan; pemberdayaan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan, dan pemantapan tata laksana pemerintahan daerah.

5.2 Arah Kebijakan Pada Misi RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045

Dalam mewujudkan tercapainya arah kebijakan utama selama 4 periode dari tahun 2025 hingga tahun 2045, perlu dijabarkan juga arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan misi sebagai daya ungkit untuk mencapai visi Kabupaten Serang. Arah Kebijakan dalam rangka pelaksanaan misi ke-1 “Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas SDM” , yaitu:

I. Periode 1 (Tahun 2025-2029)

Penguatan daya saing sumber daya manusia aspek kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas guna menunjang pembangunan daerah.

II. Periode 2 (Tahun 2030-2034)

Peningkatan akses masyarakat terhadap Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

III. Periode 3 (Tahun 2035-2039)

Optimalisasi kapasitas dan produktivitas serta daya saing SDM.

IV. Periode 4 (Tahun 2040-2035)

SDM Unggul dan Berdaya Saing.

Arah Kebijakan dalam rangka pelaksanaan misi ke-2 “Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat” , yaitu:

I. Periode 1 (Tahun 2025-2029)

Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor basis / sektor unggulan dengan memanfaatkan teknologi industri dan digital.

II. Periode 2 (Tahun 2030-2034)

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan.

III. Periode 3 (Tahun 2035-2039)

Pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat dan desa.

IV. Periode 4 (Tahun 2040-2035)

Ekonomi Tumbuh dan Merata.

Arah Kebijakan dalam rangka pelaksanaan misi ke-3 “Transformasi Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Serta Pelayanan Publik yang Berkualitas” , yaitu:

I. Periode 1 (Tahun 2025-2029)

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja SDM dan pelayanan Publik.

II. Periode 2 (Tahun 2030-2034)

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif.

III. Periode 3 (Tahun 2035-2039)

Digitalisasi inovasi SDM ASN 5.0 serta akselerasi peningkatan integritas ASN.

IV. Periode 4 (Tahun 2040-2035)

Tatakelola Pemerintah berintegritas dan Inovatif.

Arah Kebijakan dalam rangka pelaksanaan misi ke-4 “Menjadikan Peran Sentral Agama dan Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi” , yaitu:

I. Periode 1 (Tahun 2025-2029)

Pemenuhan sarana prasarana ibadah dan menjaga ketentraman ketertiban umum serta waspada kebencanaan.

II. Periode 2 (Tahun 2030-2034)

Meningkatkan kesadaran lingkungan, perubahan iklim, kebencanaan melalui nilai nilai kehidupan yang agamis.

III. Periode 3 (Tahun 2035-2039)

Pengamalan dan penghayatan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara serta kepedulian lingkungan.

IV. Periode 4 (Tahun 2040-2035)

Masyarakat Harmonis Tertib dan Agamis serta Lingkungan Bersih dan Sehat.

Arah Kebijakan dalam rangka pelaksanaan misi ke-5 “Meningkatkan Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur yang handal dan Berkelanjutan”, yaitu:

I. Periode 1 (Tahun 2025-2029)

Pemerataan pembangunan Infrastruktur berbasis pusat pertumbuhan wilayah dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan.

II. Periode 2 (Tahun 2030-2034)

Peningkatan penataan ruang dan pemanfaatan ruang yang berlandaskan pada prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan.

III. Periode 3 (Tahun 2035-2039)

Optimalisasi pemerataan pembangunan infrastruktur pada wilayah yang mendukung sektor - sektor pertumbuhan dan eco label produk.

IV. Periode 4 (Tahun 2040-2035)

Infrastruktur mantap dan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tercapainya arah kebijakan pelaksanaan misi sebagaimana disajikan arah kebijakan per periode, perlu untuk dijabarkan juga arah kebijakan pelaksanaan misi guna mencapai indikator utama pembangunan pada sub selanjutnya. Berikut arah cascading arah kebijakan tersebut disajikan pada Tabel 5.2.1.

Tabel 5.2 .1.
ARAH KEBIJAKAN MISI – INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI – INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN			
		PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4
		(TAHUN 2025-2029)	(TAHUN 2030-2034)	(TAHUN 2035-2039)	(TAHUN 2040-2045)
Kabupaten Serang Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dan Agamis	Misi Ke-1 "Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas SDM"	Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat serta layanan dasar kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana kesehatan serta tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif dalam menuju masyarakat sehat dan berkualitas	Peningkatan sistem kesehatan primer dan rujukan sebagai upaya kesehatan dalam meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas, responsif dan berkeadilan	Pengoptimalan upaya kesehatan dan akses layanan kesehatan melalui optimalisasi sistem kesehatan berbasis digital dan teknologi mutakhir	Perwujudan kualitas hidup keluarga guna mendukung manusia yang unggul dan berdaya saing
		Penguatan kerjasama dan kolaborasi multisektoral dalam pengelolaan data dan layanan kesehatan ibu dan anak	Peningkatan kualitas SDM serta pemenuhan sarana prasarana dalam pengelolaan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Pengoptimalan layanan kesehatan bagi ibu dan anak dengan pemanfaatan teknologi berbasis digital	Perwujudan kualitas pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak
		Penguatan upaya promotif-preventif dalam percepatan penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya serta peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Akselarasi kerjasama dan kolaborasi dalam upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> dengan swasta, organisasi masyarakat, komunitas, maupun lembaga non pemerintahan lainnya.	Pengoptimalan program kesehatan dan ketahanan pangan dan gizi dalam mengakselerasi penuntasan dan pencegahan <i>stunting</i>	Perwujudan ketahanan pangan yang terjaga dan ketercukupan gizi keluarga untuk menuju <i>zero stunting</i>
		Penguatan sistem kesehatan dan kelembagaan sebagai upaya dalam mengendalikan dan mencegah terjadinya penyakit TBC	Peningkatan upaya penemuan kasus dan pengelolaan data serta pengobatan kasus TBC melalui pemenuhan sarana prasarana termutakhir dan SDM berkualitas	Pengoptimalan keberlanjutan penemuan dan pengobatan kasus TBC di masyarakat	Perwujudan keberlanjutan sistem kesehatan dan kelembagaan dalam penemuan kasus penyakit menular serta pengobatan bagi pasien TBC sesuai standar

Penguatan pengendalian dan pencegahan penyakit menular seperti TBC melalui kerjasama lintas sektor dalam pendampingan keluarga dan masyarakat	Peningkatan upaya pengobatan kasus TBC melalui pemenuhan sarana prasarana berbasis teknologi mutakhir dan SDM yang responsif, kompeten, dan tanggap	Pengoptimalan kerjasama dengan berbagai sektor dalam pengobatan kasus TBC di masyarakat	Perwujudan keberlanjutan pengobatan bagi pasien TBC sesuai standar
Penguatan upaya pemenuhan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat	Akselerasi keterjangkauan layanan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional aktif	Pengoptimalan layanan kesehatan melalui penyediaan kesehatan nasional yang cukup dan berkelanjutan	Perwujudan ketercukupan jaminan kesehatan nasional yang adil dan merata
Pemerataan kualitas pendidikan formal dan non formal melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berstandar nasional;	Peningkatan kualitas kurikulum adaptif dan interaktif berbasis digital dan tenaga pendidik yang modern dan adaptif	Penguatan pelibatan tri pusat pendidikan (orang tua, masyarakat, dan sekolah) dalam mengembangkan kekuatan spiritual, akhlak, dan kecerdasan sosial	Perwujudan kebiasaan berpikir kritis dan inovatif serta kebiasaan belajar yang aktif, reflektif dan kolaboratif pada guru dan siswa
Pemenuhan layanan dasar pendidikan secara merata dan berkualitas pada seluruh satuan pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan;	Peningkatan kualitas sistem penjaminan mutu pendidikan berbasis manajemen talenta untuk menghasilkan siswa yang berprestasi di tingkat nasional dan global	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah	Perwujudan keberlanjutan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dalam mewujudkan siswa yang berprestasi
Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan daerah, penguatan kurikulum serta kemitraan pendidikan	Pengembangan kurikulum daerah berbasis kompetensi, keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, dan literasi digital untuk mempersiapkan siswa adaptif terhadap tantangan masa depan	Peningkatan kemitraan dan pelibatan tri-pusat pendidikan (orang tua, masyarakat, dan sekolah) dalam integrasi <i>soft skills</i> , <i>social skills</i> , <i>life skills</i> dalam pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter siswa	Perwujudan perluasan penggunaan dan pengembangan teknologi pendidikan secara efektif untuk mempercepat pencapaian tujuan pendidikan
Penguatan kurikulum daerah yang adaptif melalui adopsi pembelajaran STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>)	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah umum dan kejuruan sesuai dengan potensi ekonomi khususnya industri ekonomi kreatif dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI berbasis pembelajaran STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>)	Pengembangan kurikulum berbasis pembelajaran STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja	Perwujudan penyelenggaraan pendidikan menengah umum dan kejuruan serta pelatihan vokasi yang pada program STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>)

Peningkatan rata-rata lama dan harapan lama sekolah wajib pendidikan 13 tahun (Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun) termasuk untuk siswa berkebutuhan khusus (disabilitas), melalui peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan tinggi dan program bantuan finansial yang inklusif hingga pendidikan tinggi	Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan yang berkelanjutan	Pengoptimalan sistem pendidikan melalui inovasi pembelajaran berbasis digital yang memanfaatkan TIK dalam rangka mewujudkan ekosistem pendidikan yang unggul, inovatif dan adaptif	Perwujudan daya saing daerah melalui ekosistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan
Penguatan upaya dalam peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta stimulus pemberian beasiswa pendidikan tinggi	Kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah dengan perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan lulusan pendidikan tinggi yang berkualitas terutama pada program STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>)	Penguatan kolaborasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Universitas, Institusi Riset, Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis	Perwujudan perluasan penggunaan dan pengembangan teknologi pendidikan secara efektif untuk mempercepat pencapaian tujuan pendidikan
Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar	Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin melalui program ekonomi produktif dan pendampingan yang intensif	Pengoptimalan program perlindungan dan keamanan ekonomi serta program ekonomi produktif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin yang berkualitas	Perwujudan program ekonomi yang merata dan berkeadilan guna menstimulus kualitas hidup dan pendapatan masyarakat miskin yang lebih baik
Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain transformasi akurasi data, perencanaan dan penganggaran, penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja	Akselerasi keterjangkauan layanan ketenagakerjaan melalui peningkatan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan	Pengoptimalan layanan ketenagakerjaan melalui penyediaan jaminan ketenagakerjaan nasional yang cukup dan berkelanjutan	Perwujudan ketercukupan jaminan ketenagakerjaan nasional yang adil dan merata

Misi Ke-2 "Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat"	Penguatan struktur ekonomi khususnya pada sektor-sektor strategis dan Industri potensial (seperti industri logam dan kimia dasar, industri makanan-minuman, industri tekstil dan produk tekstil, industri karet, industri elektronik, industri perikanan dan produk perikanan modern, dsb) berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi fokus pada peningkatan produktivitas melalui hilirisasi, <i>link and match system</i> , serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar, ekonomi, dan perkotaan	Peningkatan daya saing produk dengan meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk- produk berkualitas dan berteknologi tinggi yang berorientasi ekspor pada sektor-sektor strategis dan Industri potensial pada koridor industri Cilegon-Serang-Tangerang	Penguatan kemitraan dan kerjasama strategis pemerintah, BUMD, DUDI, lembaga pendidikan dan riset dalam peningkatan produktivitas industri dan hilirisasi melalui adopsi teknologi termutakhir	Perwujudan sektor industri yang berdaya saing nasional dan global
	Penguatan pengembangan pariwisata dengan meningkatkan produktivitas sektor-sektor jasa dan UMKM berbasis produk lokal unggulan	Percepatan pembangunan ekosistem sektor jasa dan UMKM yang didukung talenta, infrastruktur, pelatihan dan pendampingan, kelembagaan ekonomi, dan pembiayaan dalam meningkatkan sektor pariwisata	Peningkatan akses pasar dan akses layanan keuangan seperti perbankan, dan kredit mikro untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan memperluas akses terhadap modal	Perwujudan sektor jasa dan UMKM yang unggul dan berdaya saing berbasis produk unggulan pada tingkat nasional dan global
	Penguatan ekosistem pariwisata fokus pada peningkatan <i>multiplier effect economy</i> pada sektor-sektor strategis dan potensial dengan mengadopsi pendekatan 6A (atraksi, aktivitas, aksesibilitas, amneitas, <i>ancillary</i> , dan <i>available package</i>)	Akselerasi pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengintegrasikan <i>cultural & heritage tourism</i> , pariwisata sains kreatif, dan industri/ekonomi kreatif	Pemantapan pengembangan kawasan pariwisata yang terintegrasi (<i>cultural & heritage tourism, ecotourism</i> , dan industri ekonomi kreatif)	Perwujudan kawasan strategis pariwisata sebagai destinasi wisata berstandar global, inklusif, dan berkelanjutan
	Penguatan upaya peningkatan kualitas data dan sistem informasi klasifikasi usaha kecil dan menengah non pertanian	Peningkatan kualitas usaha kecil dan menengah yang berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi	Perluasan kesempatan berusaha melalui penyediaan akses pasar dan pemanfaatan riset dan teknologi untuk mencapai hilirisasi produk	Perwujudan UMKM yang berdaya saing dalam menghasilkan produk menuju ekspansi global
	Penguatan pemberdayaan usaha mikro dengan meningkatkan kualitas pendataan dan klasifikasi usaha mikro daerah	Pengembangan kualitas usaha mikro yang berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi	Perluasan kesempatan berusaha, akses modal dan pemasaran yang berdaya saing dan berkeadilan serata merata	perwujudan usaha mikro yang berdaya saing melalui produk yang unggul di pasar nasional dan global

Penguatan upaya pembinaan koperasi serta kualitas data dan sistem informasi bagi koperasi di daerah	Peningkatan akses permodalan, pemasaran, dan pembinaan bagi koperasi	Industrialisasi koperasi melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Perwujudan koperasi yang adaptif dan modern
Pemanfaatan <i>idle asset</i> daerah untuk dikelola oleh BUMD dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah dengan tetap menerapkan asas-asas <i>good governance</i> terutama pada aset yang berpotensi terhadap peningkatan produktivitas <i>blue economy</i> dan <i>green economy</i>	Peningkatan produktivitas, profitabilitas dan diversifikasi BUMD terhadap <i>blue economy</i> dan <i>green economy</i> yang berkelanjutan	Penguatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset daerah yang dikelola oleh BUMD	Perwujudan kinerja BUMD berkualitas dalam mengelola aset daerah yang bernilai ekonomis terutama pada <i>idle asset</i> daerah
Penguatan ekosistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan, <i>dula system</i> , dan kewirausahaan dalam meningkatkan keahlian angkatan kerja	Peningkatan up-skilling dan re-skilling angkatan kerja guna memperluas kesempatan kerja	Penguatan kolaborasi dan kerjasama multi helix dalam meningkatkan keahlian angkatan kerja agar berdaya saing di berbagai sektor-sektor produktif di daerah	Perwujudan pekerja yang berdaya saing pada sektor-sektor strategis dan produktif termasuk pada lapangan kerja hijau, biru dan digital
Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal guna memperluas kesempatan kerja termasuk pekerja perempuan	Peningkatan up-skilling dan re-skilling angkatan kerja perempuan dengan memanfaatkan keterampilan digital dan teknologi	Perluasan dukungan jaringan pasar kerja domestik dan global bagi angkatan kerja perempuan	Perwujudan angkatan kerja perempuan yang berdaya saing di pasar kerja domestik dan global
Penguatan kapasitas dan kelembagaan riset dan inovasi daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah fokus pada i) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung penelitian, ii) peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM riset, iii) pengembangan platform diseminasi produk penelitian dan inovasi, iv) inisiasi <i>innovation valley</i> Kabupaten Serang, dan v) penguatan linkages dan kolaborasi lembaga-lembaga penelitian, lembaga pendidikan tinggi, komunitas sains kreatif beserta seluruh elemen pendukung sains kreatif di daerah	Peningkatan ekosistem riset dan inovasi fokus pada i) peningkatan linkage berbagai hasil penelitian dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI), ii) mendorong tumbuhnya startup, iii) pengembangan <i>teaching industry</i> , iii) penyelenggaraan event-event (<i>industry matching</i> dan <i>industry sains summit</i>) berskala nasional dan internasional, dan iv) penguatan <i>Innovation valley</i> daerah	Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah yang unggul dan berdaya saing dalam memperkuat <i>innovation valley</i> daerah	Perwujudan ekosistem riset dan inovasi daerah yang berdaya saing melalui <i>innovation valley</i> daerah berdaya saing global

Mendorong pemanfaatan kebijakan keberlanjutan dengan fokus pada efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan secara luas dan merata di daerah	Akselerasi percepatan transisi energi dengan penyediaan energi baru terbarukan untuk kebutuhan daerah salah satunya melalui skema PLTP dengan memanfaatkan Rawadano sebagai sumber energi baru	Penguatan ekosistem energi baru terbarukan dalam penyediaan energi di daerah	Perwujudan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam transisi energi di daerah
Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan keamanan digital	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan komunitas meingkatkan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas	Perwujudan transformasi digital dalam meningkatkan keamanan informasi digital
Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan kepastian usaha melalui skema regulasi ramah investasi, penyederhanaan peraturan dan mengurangi hambatan birokrasi yang dapat menghambat investasi modal dan pertumbuhan produktivitas	Peningkatan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan realisasi investasi terutama pada sektor-sektor yang mempunyai potensi untuk mendorong peningkatan realisasi investasi dan pertumbuhan produktivitas	Penguatan keberlanjutan iklim usaha yang kondusif dalam berinvestasi	Perwujudan Kabupaten Serang sebagai tujuan wilayah investasi yang kondusif dalam ekosistem usaha di daerah
Pembangunan infrastruktur, kualitas SDM, serta kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi jaringan produksi dan distribusi dalam ekosistem logistik	Peningkatan infrastruktur distribusi rantai pasok serta menjadikan wilayah perkotaan sebagai hub ekonomi barang dan jasa melalui integrasi konektivitas dan kemantapan infrastruktur akses jalan provinsi, nasional, tol, maupun jaringan rel perkeretapiian	Penguatan infrastruktur distribusi rantai pasok serta wilayah perkotaan sebagai hub ekonomi barang dan jasa melalui integrasi konektivitas dan kemantapan infrastruktur akses jalan provinsi, nasional, tol, maupun jaringan rel perkeretapiian	Perwujudan integrasi konektivitas dengan intra dan antarkawasan pertumbuhan ekonomi
Akselerasi pemenuhan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman serta penanganan sistem pertanahan yang mengedepankan kepastian hukum bagi pengelolaan tanah melalui skema <i>land consolidation</i> , <i>land sharing</i> , dan <i>guided land development</i>	Peningkatan penyediaan dan akses rumah layak huni yang berkelanjutan dengan mendorong penataan kawasan melalui pendekatan <i>city with original characteristic and city without slum</i> , dan <i>resilience</i>	Penguatan rumah layak huni yang terintegrasi antar fungsi tempat tinggal, kantor, fasilitas kesehatan, transportasi publik, ruang terbuka hijau, rekreasi, dan sebagainya (<i>walkable city</i>)	Perwujudan kota layak huni yang inklusif dan berkelanjutan

Misi Ke-3 "Transformasi Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Serta Pelayanan Publik yang Berkualitas"	Penguatan kapasitas desa, kerjasama antar desa lintas Kabupaten, penyediaan sarana dan prasarana, kelembagaan, dan regulasi desa	Pengembangan pedesaan yang cerdas, lestari, dan berkelanjutan difokuskan pada penyediaan akses layanan publik yang inklusif, penggunaan <i>Internet of Things</i> (IoT), penerapan smart city dan ekonomi sirkuler	Penguatan pembangunan desa yang melibatkan kolaborasi dan kerjasama multi helix dan partisipasi seluruh unsur desa	Perwujudan pembangunan dan kemandirian deas
	Pembenahan administrasi perpajakan dan perbaikan regulasi perpajakan sesuai kewenangan	intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan pajak daerah terutama pada objek strategis sesuai kewenangan	Pemantapan intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan pajak daerah	Perwujudan stabilitas ekonomi yang bersih dan akuntabel
	Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui penguatan rumusan kebijakan dan kolaborasi stakeholder terkait	Peningkatan kebijakan dan kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam menjaga inflasi daerah	Penguatan kebijakan dan kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam menjaga inflasi daerah	Perwujudan stabilitas harga dalam menjaga inflasi daerah
	Penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.) serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) serta peningkatan kualitas belanja daerah	Pengoptimalan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)	Perwujudan kapasitas fiskal yang kuat dan berkualitas
	Inisiasi kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swastsa, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan	Peningkatan kerjasama dan kolaborasi program pembangunan multi helix	Penguatan kerjasama multi helix dengan jaringan regional, nasional dan global	Perwujudan Pembangunan Daerah yang kolaboratif
	Penguatan kelembagaan yang profesional, tepat fungsi dan berbasis meritokrasi serta penerapan kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif	Peningkatan penciptaan kelembagaan yang kolaboratif melalui kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan serta pemantapan penerapan kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif	Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, berkualitas, dan inovatif

	Penguatan koordinasi, perencanaan rumusan kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan sistem pemerintahan yang kolaboratif dengan berbagai stakeholder dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang lebih komprehensif	Perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Reformulasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju <i>smart government</i>	Pemantapan implementasi <i>smart government</i> dalam pelayanan publik	Perwujudan pelayanan publik yang berkualitas
	Penyempurnaan fondasi penataan regulasi yang adaptif terhadap pengendalian pelanggaran Trantibumlinmas serta pelaksanaan peraturan daerah	Peningkatan kolaborasi antar stakeholder dalam pelaksanaan peraturan daerah serta kapasitas aparatur dan sarana prasarana pendukung Trantibumlinmas	Pemantapan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan peraturan daerah serta kebijakan Trantibumlinmas	Perwujudan kepatuhan peraturan daerah serta Trantibumlinmas yang adil dan merata
Misi Ke-4 "Menjadikan Peran Sentral Agama dan Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi"	Penguatan regulasi perlindungan, pengembangan, dan pelestarian warisan kebudayaan dan cagar budaya sesuai nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat	Pengembangan dan pelestarian sarana dan prasarana kebudayaan dan cagar budaya serta permuseuman	Pemanfaatan warisan budaya sebagai landasan moral budipekerti dan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan ruang edukasi budaya seperti festival budaya, permuseuman, dan sebagainya.	Perwujudan kelesatarian budaya yang melembaga di masyarakat
	Penguatan kerukunan umat beragama melalui rumusan kebijakan yang implementatif	Peningkatan kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder dalam menjaga kerukunan umat beragama	Penguatan kolaborasi dan sinergitas dalam implementasi kebijakan kerukunan umat beragama	Perwujudan harmonisasi dan kerukunan umat beragama di daerah
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga harmonis	Pengoptimalan pemberdayaan keluarga sebagai motor penggerak pembangunan	Perwujudan keluarga harmonis dan berkualitas
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dalam partisipasi pembangunan	Pengoptimalan upaya pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Perwujudan kesetaraan dan keadilan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan

Misi Ke-5 "Meningkatkan Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur yang handal dan Berkelanjutan"	Penguatan ekosistem pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman sumber daya alam hayati berbasis konservasi dan preservasi serta penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat terhadap lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui ekosistem terintegrasi dalam pengendalian kualitas air, tanah, dan udara serta mitigasi terjadinya pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pemanfaatan sarana riset dan teknologi sebagai daya ungkit dalam pengendalian dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Perwujudan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
	Pengelolaan air limbah rumah tangga yang aman dan berkelanjutan, pemenuhan akses sanitasi melalui pemenuhan fasilitas infrastruktur akses sanitasi yang layak, aman, dan berkelanjutan serta edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar ikut aktif dalam penyehatan lingkungan di masyarakat	Peningkatan pengelolaan air limbah rumah tangga dan pemerataan percepatan layanan akses sanitasi yang layak dan aman	Pengoptimalan ekosistem pengelolaan air limbah rumah tangga dan sanitasi yang terintegrasi dan rehabilitasi infrastruktur air limbah rumah tangga dan sanitasi	Perwujudan integrasi pengelolaan air limbah rumah tangga dan akses sanitasi secara merata yang layak, aman, dan berkelanjutan
	Penguatan ekosistem persampahan melalui inovasi pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir berbasis keterlibatan seluruh unsur masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	Perluasan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu dengan pemanfaatan teknologi berkelanjutan dalam meningkatkan <i>mutliplier effect economy</i> berorientasi ekonomi sirkuler	Peningkatan kolaborasi antar stakeholder, peningkatan inovasi dan pengembangan teknologi mutakhir dan berkelanjutan dalam pengurangan dan pengangan sampah	Perwujudan masyarakat yang berkualitas dalam pemanfaatan sampah sebagai nilai tambah ekonomis dalam meningkatkan taraf hidup dan pendapatan
	Pengembangan sistem jaringan listrik dalam mengakselerasi kapasitas penyediaan energi listrik dan pelayanan listrik yang terjangkau bagi seluruh wilayah, pengembangan energi baru terbarukan sebagai alternatif sumber daya energi listrik yang berkelanjutan bagi rumah tangga	Peningkatan ekosistem jaringan listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui kolaborasi riset, inovasi dan teknologi dalam penyediaan energi listrik yang merata dan berkeadilan	Penguatan penyediaan energi listrik dengan pemanfaatan energi baru terbarukan yang adil dan merata	Perwujudan transisi energi berkelanjutan dalam ekosistem penyediaan energi listrik di seluruh wilayah
	Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan sarana dan prasaran produksi, keanekaragaman dan kualitas pangan melalui intensifikasi, penggunaan teknologi dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (<i>Food, Energy, Water</i>) dan diversifikasi produk	Peningkatan kejasama dan kolaborasi multi helix dalam pengembangan produk pangan memanfaatkan teknologi baru serta jaringan distribusi untuk mencukupi ketersediaan pangan daerah	Pengoptimalan kerjasama dalam pengembangan ekosistem ketersediaan produk pangan dalam rangka menjamin kemandirian pangan	Perwujudan kemandirian pangan yang berkelanjutan

Penyediaan infrastruktur air baku dan air siap minum serta peningkatan akses layanan air baku dan air siap minum perpipaan dengan penguatan kerjasama antar daerah dan kemitraan	Akselerasi penyediaan infrastruktur air baku dan air siap minum yang berkualitas, merata, terjangkau, dan kontinu	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air baku dan air siap minum perpipaan yang terjangkau	Perwujudan akses layanan air baku dan air siap minum yang mudah dan merata di daerah
Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Peningkatan pengendalian tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana melalui mitigasi struktural dan non struktural, peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat terhadap risiko bencana dalam menciptakan SDM kebencanaan yang tangguh serta pemanfaatan teknologi mutakhir dalam penguatan layanan peringatan dini multi ancaman bencana	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan bencana secara inklusif dan partisipatif serta pembiayaan penanggulangan bencana inovatif berbasis potensi daerah rawan bencana tinggi dan bencana prioritas	Perwujudan tata ruang daerah yang mempertimbangkan kebencanaan dan resiliensi terhadap bencana
Penguatan ekosistem penanggulangan bencana di daerah yang melibatkan banyak pihak secara bersama-sama	Peningkatan ekosistem ketahanan daerah dalam menanggulangi terjadinya bencana melalui pemanfaatan teknologi	Pengoptimalan ekosistem ketahanan daerah dalam menanggulangi bencana	Perwujudan daerah yang tangguh, tanggap, dan siap terhadap terjadinya bencana
Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim	Peningkatan kapasitas masyarakat, kawasan strategis dan daerah dalam menghadapi risiko bencana dan krisis iklim melalui mitigasi dan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim	Peningkatan sarana dan prasarana serta penerapan dan pengembangan teknologi sistem peringatan dini bencana dan krisis iklim yang andal dan terintegrasi	Perwujudan kolaborasi multipihak yang berkelanjutan dalam menghadapi bencana dan krisis iklim

5.3 Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Serang tahun 2025-2045 adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Kabupaten Serang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dan Agamis sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Serang menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dan Agamis, pembangunan daerah dalam dua puluh tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	VISI
1	Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas SDM	Kesehatan untuk Semua	Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKELANJUTAN , DAN AGAMIS
		Pendidikan Berkualitas yang Merata		
		Perlindungan sosial yang adaptif		
2	Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Terwujudnya Ekonomi Tumbuh dan Merata	
		Penerapan Ekonomi Hijau		
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
		Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
		Stabilitas Ekonomi Daerah		
		Kolaborasi dan Kerjasama Antar Daerah		
3	Transformasi Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Serta Pelayanan Publik yang Berkualitas	Transformasi Digital Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang berintegritas dan inovatif	
		Hukum Berkeadilan dan		

4	Menjadikan Peran Sentral Agama dan Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi	Keamanan Daerah Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Terwujudnya Masyarakat Harmonis, tertib dan Agamis Serta Lingkungan yang bersih dan sehat
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	
		Lingkungan Hidup Berkualitas	
5	Meningkatkan Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur yang handal dan Berkelanjutan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Terwujudnya Infrastruktur Mantap dan berkelanjutan
		Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	

5.3.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah pembangunan daerah RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 dan penyelarasannya dengan RPJP Nasional Tahun 2025- 2045 terdapat dalam tabel di bawah berikut:

Tabel 5.3.2
Penyelarasan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
Serta RPJPN Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi 2025-2045		RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing	IE1. Kesehatan untuk semua	Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas SDM	IE1. Kesehatan untuk semua
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		IE2. Pendidikan berkualitas yang merata		IE2. Pendidikan berkualitas yang merata
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		IE3. Perlindungan Sosial yang adaptif		IE3. Perlindungan Sosial yang adaptif
2.	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		IE5. Penerapan Ekonomi Hijau		IE5. Penerapan Ekonomi Hijau
		IE 6. Transformasi Digital		IE6. Transformasi Digital		IE6. Transformasi Digital
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi 2025-2045		RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3.	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Serta Pelayanan Publik yang Berkualitas	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4.	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Mewujudkan Kemananan yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial, dan Perekonomian Daerah yang Stabil	IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial		IE10. Hukum Berkeadilan, dan Keamanan Daerah
		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro		IE11. Stabilitas Ekonomi Makro	Transformasi Ekonomi	IE11. Stabilitas Ekonomi Daerah
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Keamanan Daerah yang Berdaya Gentar Kawasan	untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat	IE12. Kolaborasi dan Kerjasama Antar Daerah

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi 2025-2045		RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
5.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Mewujudkan Sosial Budaya yang Beradab dan Ekologi Lestari	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Menjadikan Peran Sentral Agama dan Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas		IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Meningkatkan Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur yang handal dan Berkelanjutan	IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

5.3.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN 2025- 2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. arah kebijakan transformasi RPJPD Kabupaten Serang dirumuskan mengacu transformasi arah kebijakan Nasional dan Provinsi Banten dan hasil rumusan permasalahan pembangunan serta isu strategis daerah dan rekomendasi evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025. Adapun Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 sebagai Berikut:

Tabel 5.3.3
Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Serang Tahun 2025-2045

RPJPD KABUPATEN SERANG 2025-2045	
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)
Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas SDM	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
	2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
	3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
	4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
	5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
	6. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
	7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
	8. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan
	9. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas
	10. Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .
	11. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
	12. Percepatan eliminasi penyakit menular Tuberculosis dan penyakit tropis terabaikan.

13. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang inklusif).
14. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
15. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
16. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, ramah disabilitas, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
17. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
18. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
19. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan Dasar dan Menengah pertama serta vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
20. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
22. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
23. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
24. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan
25. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas
26. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>)
27. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global dengan dukungan Pemerintah Pusat.
28. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.

29. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
30. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
31. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion
32. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique and high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah
33. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .
34. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah
35. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat
36. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal, rentan.
37. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah.
38. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah.
39. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
40. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
41. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.

	42. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, melalui penataan kawasan kumuh
Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Kabupaten serang
	2. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
	3. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
	4. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
	5. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui <i>digital marketplace/platform</i> .
	6. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
	7. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
	8. Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian.
	9. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
	10. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.

	11. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i> .
	12. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
	13. Pengembangan <i>closed loop</i> model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi perikanan.
	14. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
	15. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
	16. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
	17. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
	18. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Kabupaten Serang
	19. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (antara lain jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi).
	20. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi

	pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
	21. Penguatan infrastruktur pertumbuhan dan pengelolaan kawasan pusat ekonomi untuk mewujudkan kawasan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan.
	22. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan pusat pertumbuhan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)
	23. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan pusat pertumbuhan.
	24. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green and grey infrastructure)</i> pada kawasan pusat pertumbuhan.
	25. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan pusat pertumbuhan.
	26. Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan pusat pertumbuhan.
	27. Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan pusat pertumbuhan.
	28. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan pusat pertumbuhan.
	29. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan pusat pertumbuhan.
	30. <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> pusat pertumbuhan, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata pusat pertumbuhan (<i>urban tourism</i>).
	31. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata pusat pertumbuhan secara kolaboratif dan partisipatif.

32. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
33. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
34. Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis.
35. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa
36. Pembangunan pintu Tol Trans Jawa pada wilayah Kabupaten Serang untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik
37. Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan pusat pertumbuhan.
38. Peningkatan status jalan desa menjadi jalan Kabupaten
39. Peningkatan prasarana jalan Kabupaten
40. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan di wilayah kabupaten Serang
41. Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan terminal angkutan orang dan barang
42. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing di tataran nasional dan global
43. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis lainnya.
44. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.
45. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
46. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
47. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.
48. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
49. Peningkatan produktivitas BUMD.

	50. Mendorong masyarakat untuk peran serta memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT)
	51. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital)
	52. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
Transformasi Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Serta Pelayanan Publik yang Berkualitas	1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah
	2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
	3. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
	4. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
	5. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kabupaten Serang, menuju penyelenggaraan

Menjadikan Peran Sentral Agama dan Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi	pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi
	6. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	7. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
	8. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
	9. Penguatan integritas partai politik sesuai kewenangan Kabupaten Serang
	1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas sesuai kewenangan Kabupaten Serang
	2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
	3. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut sesuai kewenangan Kabupaten Serang serta dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pusat
	4. Penguatan pengendalian inflasi daerah
	5. Dukungan terhadap pengembangan sarana & prasarana pertahanan di wilayah Kabupaten Serang
	6. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berdasarkan kepada Pancasila
	7. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
	8. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis
	9. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami

	10. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan sesuai kewenangannya, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi dengan dukungan program dan anggaran dari Pemerintah Provinsi Banten
	11. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
	12. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
	13. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
	14. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
	15. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
	16. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
Meningkatkan Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur yang handal dan Berkelanjutan	1. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah
	2. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)
	3. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir
	4. Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas

5. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan
6. Percepatan pelaksanaan reforma agraria
7. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri
8. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
9. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance
10. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
11. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi
12. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional
13. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan
14. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko

5.3.3 Indikator Utama Pembangunan Daerah

Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, terdapat 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai indikator pengukur keberhasilan dan pencapaian Pembangunan. Rumusan Indikator Utama Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Serang Tahun 2025-2045, terdapat dalam tabel berikut:

Tabel. 5.3.4
Indikator Utama Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kabupaten Serang Tahun 2025-2045

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TRANSFORMASI SOSIAL				Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing			Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas SDM		
IE1	Kesehatan untuk Semua			Kesehatan untuk Semua			Kesehatan untuk Semua		
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	80	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,20	80,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,80	80,45
2	Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:		
a.	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	16	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	101	10	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	100	10
b.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,8	5	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,3	6,5	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,8	5
3	Insidensi Tuberkolisis (per 100.000 penduduk)	272	76	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			Penanganan Tuberkulosis:		
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	95	95	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	100
				b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	92,8	98	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	100
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	99,5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,77	99,5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	90	98,5

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata		
5	Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran		
a.	Rata-rata nilai PISA			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	Membaca	396	485	i) Literasi Membaca	12,50-25,00	62,50-75,00	i) Literasi SD (%)	54,59	64,09
	Matematika	404	490	ii) Numerasi	0,00-12,50	62,50-62,50	ii) Numerasi SD (%)	45,67	60,50
	Sains	416	487	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	i) Literasi Membaca	62,89	75,73	i) Literasi Membaca	34,43-36,43	65,23-67,23	i) Literasi SMP (%)	65,05	74,73
	ii) Numerasi	54,36	68,72	ii) Numerasi	26,81-28,81	61,02-63,02	ii) Numerasi SMP (%)	60,70	71,87
b.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,33	12	a) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,86-9,86	12,49-12,52	a) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,89	12,05
c.	Harapan lama sekolah	13,32	14,81	b) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,31-13,32	14,72-14,77	b) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,97	14,41

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	9,84	9,84-10,26	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Terdidik dan Terlatih (%)	28,32	40,63
7	Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	61,87	75	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	64,42	75			
IE3	Perlindungan sosial yang adaptif			Perlindungan sosial yang adaptif			Perlindungan sosial yang adaptif		
8	Tingkat kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,50	0,04-0,54	Tingkat Kemiskinan (%)	4,08	0,5-0,98
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	46,80	92,52	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,10	99,50
TRANSFORMASI EKONOMI				Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif			Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat		
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		
10	Rasio PDB industri pengolahan (%)	20,8	28	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	30,48-31,20	34,99-36,13	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	45,75	58,10
11	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata		
a.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,45	4,17	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,35	4,27

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
b.	Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	18	100	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	496,89	1.242,23	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	19,87	150,01
12	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
a.	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3 (2019)	5	i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	11,71	13,76	i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	2,26	20
				ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	5,29	9,36	ii) Pertumbuhan Usaha Mikro (%)	5	20
b.	Rasio kewirausahaan (%)	2,9 (Aug 2022)	8	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,11	3,95	Persentase Koperasi Aktif (%)	75	89,08
c.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)	10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,87	4,99			
d.	Return of Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,89	5,69	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	2,29	5,66
13	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,87-7,24	6,17-7,14	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,94	5,77
14	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	55,4	70	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	50,00	61,60	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	44,15	50,25
15	Tingkat penguasaan IPTEK			Indeks Inovasi Daerah	58,00-65,00	85,00	Indeks Inovasi Daerah	43,00-45,00	75,00
a.	Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	2,2-2,3						

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
b.	Peringkat Index Inovasi Global (peringkat)	75 (2022)	30 besar						
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau		
16	Tingkat penerapan ekonomi hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,50	72,21	b) Pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi Primer di wilayah Kabupaten Serang (%)	5	45
IE6	Transformasi Digital			Transformasi Digital			Transformasi Digital		
17	Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat)	51	20 besar	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	6,3	7,8	Indeks Keamanan Informasi (poin)	273	636
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
18	Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	29,8	27,2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	34,55	29,72	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	40,00	38,68
19	Ekspor barang dan jasa (% PDB)	26	40	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	31,21	56,21	Nilai ekspor barang dan jasa (\$ Juta)	512,21	800
IE8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
20	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
b.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	100	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	67,08	100	Persentase rumah tangga layak huni (%)	97,30	100

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
b.	Persentase Desa Mandiri (%)			Persentase Desa Mandiri (%)	2,26	15,11	Presentase Desa Mandiri (%)	3,68	96,32
TRANSFORMASI TATA KELOLA				Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional			Transformasi Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Serta Pelayanan Publik yang Berkualitas		
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif			Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif			Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif		
21	Indeks materi hukum	0,25	0,49	Indeks Reformasi Hukum*	88,8	100	Indeks Reformasi Birokrasi	72	83
22	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,34	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,50	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,23	5
23	Indeks pelayanan publik	3,87	5	Indeks Pelayanan Publik	3,80	5	Indeks Pelayanan Publik	3,8	5
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				Mewujudkan Kemananan yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial, dan Perekonomian Daerah yang Stabil			Menjadikan Peran Sentral Agama dan Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi		
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah		
24	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	62,8	80	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	55,29	72,67	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Trantibum dan Perda (%)	5	5
							Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat		
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro			Stabilitas Ekonomi Makro			Stabilitas Ekonomi Daerah		

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
25	Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,55	5	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	1,5	3
26	Tingkat inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	Tingkat Inflasi (%)	3,2-3,6	1,10-3,00	Tingkat Inflasi (%)	2,11	2-1
27	Inklusi keuangan (%)	91	98	Inklusi Keuangan (%)	91,83	99,02	Rasio derajat desentralisasi fiskal (%)	27,05	37-50
							Menjadikan Peran Sentral Agama dan Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi		
IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan			Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan			Kolaborasi dan Kerjasama Antar Daerah		
28	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influencer</i>)	60,4 (2023)	75,0-80,0	Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi/ <i>sister province</i> (Jumlah)	2	8	Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah (Jumlah)	17	23
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				Mewujudkan Sosial Budaya yang Beradab dan Ekologi Lestari			Menjadikan Peran Sentral Agama dan Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi		
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		
29	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57*	68,15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,63-53,67	62,37-62,77	Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	63,64	100
30	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19*	84,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,68-70,77	76,92-77,91	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81	85
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
31	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)	80	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,76-69,76	74,75-74,78	Indeks Pembangunan Keluarga	64,66	70,20
32	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 (2025)	0,15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,442-0,441	0,220-0,206	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,533	0,320
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas			Lingkungan Hidup Berkualitas			Lingkungan Hidup Berkualitas		
33	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup		
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	72,42 (2022)	76,12	Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	66,92	74,92	Indeks kualitas lingkungan hidup (%)	65,31	72,39
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	15,39	70,00	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	79,21	100
c.	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%)	15	90	Pengelolaan Sampah	5	90	Persentase penanganan sampah		
		(13% terdaur ulang)	(35% terdaur ulang)	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)			- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	27,85	73,98
							Meningkatkan Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur Yang Handal dan Berkelanjutan		
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		
34	Ketahanan energi, air, dan pangan			Ketahanan energi, air, dan pangan			Ketahanan energi, air, dan pangan		
a.	Ketahanan Energi			Ketahanan Energi			Ketahanan Energi		
	- Indeks ketahanan energi	6,61	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	2.386,00	3.270,00	- Rasio Rumah Tangga Menggunakan Listrik*	96,66	100

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
b.	Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)	6,2	2,1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	2,65	0,67	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	2,58	1,18
c.	Ketahanan air			Ketahanan Air			Ketahanan Air		
	- Kapasitas tampungan air per kapita (m3/kapita)	63,45	200	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,99	15,73	- Kapasitas Air Baku (%)	100	100
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30,46	100	- Akses Rumah Tangga terhadap Akses aman Air Perpipaan (%)	12,87	49,65
IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		
35	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	105,17	89,56-76,17	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	136,82	109,05
							Indeks Ketahanan Daerah	0,68	0,81
36	Presentasi penurunan emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
b.	Tahunan	32,65	80,89	b. Tahunan	8,93	70,7	b. Tahunan	40.41	68.41

Tabel 5.3. 5
Kebijakan Pelaksanaan Misi (Cascading)

Arah Pembangunan/Indikat or Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Serang Tahun 2025-2045		Arah Kebijakan (rincian sasaran pokok)			
	Baseline 2025	Target 2045	Periode I (Tahun 2025-2029)	Periode II (Tahun 2030-2034)	Periode III (Tahun 2035-2039)	Periode IV (Tahun 2040-2045)
<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>				
Kesehatan untuk Semua						
1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,80	80,54	Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat serta layanan dasar kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana kesehatan serta tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif dalam menuju masyarakat sehat dan berkualitas	Peningkatan sistem kesehatan primer dan rujukan sebagai upaya kesehatan dalam meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas, responsif dan berkeadilan	Pengoptimalan upaya kesehatan dan akses layanan kesehatan melalui optimalisasi sistem kesehatan berbasis digital dan teknologi mutakhir	Perwujudan kualitas hidup keluarga guna mendukung manusia yang unggul dan berdaya saing
2. Kesehatan Ibu dan Anak:						
a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	100,00	10,00	Penguatan kerjasama dan kolaborasi multisektoral dalam pengelolaan data dan layanan kesehatan ibu dan anak	Peningkatan kualitas SDM serta pemenuhan sarana prasarana dalam pengelolaan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Pengoptimalan layanan kesehatan bagi ibu dan anak dengan pemanfaatan teknologi berbasis digital	Perwujudan kualitas pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak

a) Persentase kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							
i)	Nilai Literasi SD (%)	54,59	64,09	Pemerataan kualitas pendidikan formal dan non formal melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berstandar nasional;	Peningkatan kualitas kurikulum adaptif dan interaktif berbasis digital dan tenaga pendidik yang modern dan adaptif	Penguatan pelibatan tri pusat pendidikan (orang tua, masyarakat, dan sekolah) dalam mengembangkan kekuatan spiritual, akhlak, dan kecerdasan sosial	Perwujudan kebiasaan berpikir kritis dan inovatif serta kebiasaan belajar yang aktif, reflektif dan kolaboratif pada guru dan siswa
ii)	Numerasi SD (%)	45,67	60,5	Pemenuhan layanan dasar pendidikan secara merata dan berkualitas pada seluruh satuan pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan;	Peningkatan kualitas sistem penjaminan mutu pendidikan berbasis manajemen talenta untuk menghasilkan siswa yang berprestasi di tingkat nasional dan global	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah	Perwujudan keberlanjutan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dalam mewujudkan siswa yang berprestasi
b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							
i)	Literasi SMP (%)	65,05	74,73	Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan daerah, penguatan kurikulum serta kemitraan pendidikan	Pengembangan kurikulum daerah berbasis kompetensi, keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, dan literasi digital untuk mempersiapkan siswa adaptif terhadap tantangan masa depan	Peningkatan kemitraan dan pelibatan tri-pusat pendidikan (orang tua, masyarakat, dan sekolah) dalam integrasi <i>soft skills</i> , <i>social skills</i> , <i>life skills</i> dalam pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter siswa	Perwujudan perluasan penggunaan dan pengembangan teknologi pendidikan secara efektif untuk mempercepat pencapaian tujuan pendidikan

ii) Numerasi SMP (%)	60,70	71,87	Penguatan kurikulum daerah yang adaptif melalui adopsi pembelajaran STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>)	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah umum dan kejuruan sesuai dengan potensi ekonomi khususnya industri ekonomi kreatif dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI berbasis pembelajaran STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>)	Pengembangan kurikulum berbasis pembelajaran STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja	Perwujudan penyelenggaraan pendidikan menengah umum dan kejuruan serta pelatihan vokasi yang pada program STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>)
a) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,89	12,05	Peningkatan rata-rata lama dan harapan lama sekolah wajib pendidikan 13 tahun (Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun) termasuk untuk siswa berkebutuhan khusus (disabilitas), melalui peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan tinggi dan program bantuan finansial yang inklusif hingga pendidikan tinggi	Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan yang berkelanjutan	Pengoptimalan sistem pendidikan melalui inovasi pembelajaran berbasis digital yang memanfaatkan TIK dalam rangka mewujudkan ekosistem pendidikan yang unggul, inovatif dan adaptif	Perwujudan daya saing daerah melalui ekosistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan
b) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,97	14,41				
6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*						
7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Terdidik dan Terlatih (%)	28,32	40,63	Penguatan upaya dalam peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta stimulus pemberian beasiswa pendidikan tinggi	Kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah dengan perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan lulusan pendidikan tinggi yang berkualitas terutama pada program STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>)	Penguatan kolaborasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Universitas, Institusi Riset, Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis	Perwujudan perluasan penggunaan dan pengembangan teknologi pendidikan secara efektif untuk mempercepat pencapaian tujuan pendidikan

Perlindungan sosial yang adaptif						
8. Tingkat kemiskinan (%)	4,08	0.5-0.98	Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar	Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin melalui program ekonomi produktif dan pendampingan yang intensif	Pengoptimalan program perlindungan dan keamanan ekonomi serta program ekonomi produktif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin yang berkualitas	Perwujudan program ekonomi yang merata dan berkeadilan guna menstimulus kualitas hidup dan pendapatan masyarakat miskin yang lebih baik
9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain transformasi akurasi data, perencanaan dan penganggaran, penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja	Akselerasi keterjangkauan layanan ketenagakerjaan melalui peningkatan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan	Pengoptimalan layanan ketenagakerjaan melalui penyediaan jaminan ketenagakerjaan nasional yang cukup dan berkelanjutan	Perwujudan ketercukupan jaminan ketenagakerjaan nasional yang adil dan merata
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi						
11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	45,75	58,10	Penguatan struktur ekonomi khususnya pada sektor-sektor strategis dan Industri potensial (seperti industri logam dan kimia dasar, industri makanan-minuman, industri tekstil dan produk tekstil, industri karet, industri elektronik, industri perikanan dan produk perikanan modern, dsb) berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi fokus pada peningkatan produktivitas melalui hilirisasi, <i>link and match system</i> , serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar, ekonomi, dan perkotaan	Peningkatan daya saing produk dengan meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi yang berorientasi ekspor pada sektor-sektor strategis dan Industri potensial pada koridor industri Cilegon-Serang-Tangerang	Penguatan kemitraan dan kerjasama strategis pemerintah, BUMD, DUDI, lembaga pendidikan dan riset dalam peningkatan produktivitas industri dan hilirisasi melalui adopsi teknologi termutakhir	Perwujudan sektor industri yang berdaya saing nasional dan global

12. Pengembangan Pariwisata						
a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,35	4,27	Penguatan pengembangan pariwisata dengan meningkatkan produktivitas sektor-sektor jasa dan UMKM berbasis produk lokal unggulan	Percepatan pembangunan ekosistem sektor jasa dan UMKM yang didukung talenta, infrastruktur, pelatihan dan pendampingan, kelembagaan ekonomi, dan pembiayaan dalam meningkatkan sektor pariwisata	Peningkatan akses pasar dan akses layanan keuangan seperti perbankan, dan kredit mikro untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan memperluas akses terhadap modal	Perwujudan sektor jasa dan UMKM yang unggul dan berdaya saing berbasis produk unggulan pada tingkat nasional dan global
b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	19,87	150,01	Penguatan ekosistem pariwisata fokus pada peningkatan <i>multiplier effect economy</i> pada sektor-sektor strategis dan potensial dengan mengadopsi pendekatan 6A (atraksi, aktivitas, aksesibilitas, amneitas, <i>ancillary</i> , dan <i>available package</i>)	Akselerasi pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengintegrasikan <i>cultural & heritage tourism</i> , pariwisata sains kreatif, dan industri/ekonomi kreatif	Pemantapan pengembangan kawasan pariwisata yang terintegrasi (<i>cultural & heritage tourism, ecotourism</i> , dan industri ekonomi kreatif)	Perwujudan kawasan strategis pariwisata sebagai destinasi wisata berstandar global, inklusif, dan berkelanjutan
14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						
a-i) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level kabupaten (%)	2,26	20	Penguatan upaya peningkatan kualitas data dan sistem informasi klasifikasi usaha kecil dan menengah non pertanian	Peningkatan kualitas usaha kecil dan menengah yang berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi	Perluasan kesempatan berusaha melalui penyediaan akses pasar dan pemanfaatan riset dan teknologi untuk mencapai hilirisasi produk	Perwujudan UMKM yang berdaya saing dalam menghasilkan produk menuju ekspansi global
Pertumbuhan Usaha Mikro (%)	5	20	Penguatan pemberdayaan usaha mikro dengan meningkatkan kualitas pendataan dan klasifikasi usaha mikro daerah	Pengembangan kualitas usaha mikro yang berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi	Perluasan kesempatan berusaha, akses modal dan pemasaran yang berdaya saing dan berkeadilan setara merata	perwujudan usaha mikro yang berdaya saing melalui produk yang unggul di pasar nasional dan global
b. Persentase Koperasi Aktif (%)	75	89,08	Penguatan upaya pembinaan koperasi serta kualitas data dan sistem informasi bagi koperasi di daerah	Peningkatan akses permodalan, pemasaran, dan pembinaan bagi koperasi	Industrialisasi koperasi melalui penguatan prosesbisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Perwujudan koperasi yang adaptif dan modern

c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)						
d Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	2,29	5,66	Pemanfaatan <i>idle asset</i> daerah untuk dikelola oleh BUMD dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah dengan tetap menerapkan asas-asas <i>good governance</i> terutama pada aset yang berpotensi terhadap peningkatan produktivitas <i>blue economy</i> dan <i>green economy</i>	Peningkatan produktivitas, profitabilitas dan diversifikasi BUMD terhadap <i>blue economy</i> dan <i>gereen economy</i> yang berkelanjutan	Penguatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset daerah yang dikelola oleh BUMD	Perwujudan kinerja BUMD berkualitas dalam mengelola aset daerah yang bernilai ekonomis terutama pada <i>idle asset</i> daerah
a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,94	5,77	Penguatan ekosistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan, dula system, dan kewirausahaan dalam meningkatkan keahlian angkatan kerja	Peningkatan up-skilling dan re-skilling angkatan kerja guna memperluas kesempatan kerja	Penguatan kolaborasi dan kerjasama multi helix dalam meninangkatkan keahlian angkatan kerja agar berdaya saing di berbagai sektor-sektor produktif di daerah	Perwujudan pekerja yang berdaya saing pada sektor-sektor strategis dan produktif termasuk pada lapangan kerja hijau, biru dan digital
16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	44,15	50,25	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal guna memperluas kesempatan kerja termasuk pekerja perempuan	Peningkatan up-skilling dan re-skilling angkatan kerja perempuan dengan memanfaatkan keterampilan digital dan teknologi	Perluasan dukungan jaringan pasar kerja domestik dan global bagi angkatan kerja perempuan	Perwujudan angkatan kerja perempuan yang berdaya saing di pasar kerja domestik dan global

a) Indeks Inovasi Daerah (indeks)	43,00-45,00	75,00	Penguatan kapasitas dan kelembagaan riset dan inovasi daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah fokus pada i) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung penelitian, ii) peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM riset, iii) pengembangan platform diseminasi produk penelitian dan inovasi, iv) inisiasi innovation valley Kabupaten Serang, dan v) penguatan linkages dan kolaborasi lembaga-lembaga penelitian, lembaga pendidikan tinggi, komunitas sains kreatif beserta seluruh elemen pendukung sains kreatif di daerah	Peningkatan ekosistem riset dan inovasi fokus pada i) peningkatan linkage berbagai hasil penelitian dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI), ii) mendorong tumbuhnya startup, ii) pengembangan teaching industry, iii) penyelenggaraan event-event (industry matching dan industry sains summit) berskala nasional dan internasional, dan iv) penguatan Innovation valley daerah	Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah yang unggul dan berdaya saing dalam memperkuat innovation valley daerah	Perwujudan ekosistem riset dan inovasi daerah yang berdaya saing melalui innovation valley daerah berdaya saing global
Penerapan Ekonomi Hijau						
b) Pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi Primer di wilayah Kabupaten Serang (%)	5	45	Mendorong pemanfaatan kebijakan keberlanjutan dengan fokus pada efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan secara luas dan merata di daerah	Akselerasi percepatan transisi energi dengan penyediaan energi baru terbarukan untuk kebutuhan daerah salah satunya melalui skema PLTP dengan memanfaatkan Rawadano sebagai sumber energi baru	Penguatan ekosistem energi baru terbarukan dalam penyediaan energi di daerah	Perwujudan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam transisi energi di daerah

Transformasi Digital						
19. Indeks Keamanan Informasi (poin)	273	636	Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan keamanan digital	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan komunitas meningkatkan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas	Perwujudan transformasi digital dalam meningkatkan keamanan informasi digital
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global						
21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	40,00	38,68	Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan kepastian usaha melalui skema regulasi ramah investasi, penyederhanaan peraturan dan mengurangi hambatan birokrasi yang dapat menghambat investasi modal dan pertumbuhan produktivitas	Peningkatan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan realisasi investasi terutama pada sektor-sektor yang mempunyai potensi untuk mendorong peningkatan realisasi investasi dan pertumbuhan produktivitas	Penguatan keberlanjutan iklim usaha yang kondusif dalam berinvestasi	Perwujudan Kabupaten Serang sebagai tujuan wilayah investasi yang kondusif dalam ekosistem usaha di daerah
22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	512,21	800,00	Pembangunan infrastruktur, kualitas SDM, serta kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi jaringan produksi dan distribusi dalam ekosistem logistik	Peningkatan infrastruktur distribusi rantai pasok serta menjadikan wilayah perkotaan sebagai hub ekonomi barang dan jasa melalui integrasi konektivitas dan kemantapan infrastruktur akses jalan provinsi, nasional, tol, maupun jaringan rel perkeretapi	Penguatan infrastruktur distribusi rantai pasok serta wilayah perkotaan sebagai hub ekonomi barang dan jasa melalui integrasi konektivitas dan kemantapan infrastruktur akses jalan provinsi, nasional, tol, maupun jaringan rel perkeretapi	Perwujudan integrasi konektivitas dengan intra dan antarkawasan pertumbuhan ekonomi
Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						
23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan						

Persentase Rumah Layak Huni (%)	97,30	100	Akselerasi pemenuhan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman serta penanganan sistem pertanahan yang mengedepankan kepastian hukum bagi pengelolaan tanah melalui skema <i>land consolidation, land sharing, dan guided land development</i>	Peningkatan penyediaan dan akses rumah layak huni yang berkelanjutan dengan mendorong penataan kawasan melalui pendekatan <i>city with original characteristic and city without slum</i> , dan <i>resilience</i>	Penguatan rumah layak huni yang terintegrasi antar fungsi tempat tinggal, kantor, fasilitas kesehatan, transportasi publik, ruang terbuka hijau, rekreasi, dan sebagainya (<i>walkable city</i>)	Perwujudan kota layak huni yang inklusif dan berkelanjutan
Presentase Desa Mandiri (%)	3,68	96,32	Penguatan kapasitas desa, kerjasama antar desa lintas Kabupaten, penyediaan sarana dan prasarana, kelembagaan, dan regulasi desa	Pengembangan pedesaan yang cerdas, lestari, dan berkelanjutan difokuskan pada penyediaan akses layanan publik yang inklusif, penggunaan <i>Internet of Things (IoT)</i> , penerapan smart city dan ekonomi sirkuler	Penguatan pembangunan desa yang melibatkan kolaborasi dan kerjasama multi helix dan partisipasi seluruh unsur desa	Perwujudan pembangunan dan kemandirian deas
Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif						
24. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	A	Penguatan kelembagaan yang profesional, tepat fungsi dan berbasis meritokrasi serta penerapan kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif	Peningkatan penciptaan kelembagaan yang kolaboratif melalui kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan serta pemantapan penerapan kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif	Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, berkualitas, dan inovatif

25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,23	5,00	Penguatan koordinasi, perencanaan rumusan kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan sistem pemerintahan yang kolaboratif dengan berbagai stakeholder dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang lebih komprehensif	Perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
26. Indeks Pelayanan Publik	3,80	5,00	Reformulasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju <i>smart government</i>	Pemantapan implementasi <i>smart government</i> dalam pelayanan publik	Perwujudan pelayanan publik yang berkualitas
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial						
Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Trantibum dan Perda (%)	5	5	Penyempurnaan fondasi penataan regulasi yang adaptif terhadap pengendalian pelanggaran Trantibumlinmas serta pelaksanaan peraturan daerah	Peningkatan kolaborasi antar stakeholder dalam pelaksanaan peraturan daerah serta kapasitas aparatur dan sarana prasarana pendukung Trantibumlinmas	Pemantapan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan peraturan daerah serta kebijakan Trantibumlinmas	Perwujudan kepatuhan peraturan daerah serta Trantibumlinmas yang adil dan merata
Stabilitas Ekonomi Makro						
31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,5	3	Pembenahan administrasi perpajakan dan perbaikan regulasi perpajakan sesuai kewenangan	intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah terutama pada objek strategis sesuai kewenangan	Pemantapan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah	Perwujudan stabilitas ekonomi yang bersih dan akuntabel
32. Tingkat Inflasi (%)	2,11	2-10	Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui penguatan rumusan kebijakan dan kolaborasi stakeholder terkait	Peningkatan kebijakan dan kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam menjaga inflasi daerah	Penguatan kebijakan dan kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam menjaga inflasi daerah	Perwujudan stabilitas harga dalam menjaga inflasi daerah

Rasio derajat desentralisasi fiskal	27,05	37-50	Penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.) serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) serta peningkatan kualitas belanja daerah	Pengoptimalan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)	Perwujudan kapasitas fiskal yang kuat dan berkualitas
Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan						
Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten (Jumlah)	17	23	Inisiasi kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan	Peningkatan kerjasama dan kolaborasi program pembangunan multi helix	Penguatan kerjasama multi helix dengan jaringan regional, nasional dan global	Perwujudan Pembangunan Daerah yang kolaboratif
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju						
Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	63,64	100,00	Penguatan regulasi perlindungan, pengembangan, dan pelestarian warisan kebudayaan dan cagar budaya sesuai nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat	Pengembangan dan pelestarian sarana dan prasarana kebudayaan dan cagar budaya serta permuseuman	Pemanfaatan warisan budaya sebagai landasan moral budi pekerti dan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan ruang edukasi budaya seperti festival budaya, permuseuman, dan sebagainya.	Perwujudan kelestarian budaya yang melembaga di masyarakat
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81	85	Penguatan kerukunan umat beragama melalui rumusan kebijakan yang implementatif	Peningkatan kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder dalam menjaga kerukunan umat beragama	Penguatan kolaborasi dan sinergitas dalam implementasi kebijakan kerukunan umat beragama	Perwujudan harmonisasi dan kerukunan umat beragama di daerah
Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif						

Indeks Pembangunan Keluarga (indeks)	64,66	70,2	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga harmonis	Pengoptimalan pemberdayaan keluarga sebagai motor penggerak pembangunan	Perwujudan keluarga harmonis dan berkualitas
Indeks Ketimpangan Gender (indeks)	0,533	0,32	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dalam partisipasi pembangunan	Pengoptimalan upaya pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Perwujudan kesetaraan dan keadilan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan
Lingkungan Hidup Berkualitas						
42. Kualitas Lingkungan Hidup						
a) Indeks kualitas lingkungan hidup (indeks)	65,31	72,39	Penguatan ekosistem pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman sumber daya alam hayati berbasis konservasi dan preservasi serta penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat terhadap lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui ekosistem terintegrasi dalam pengendalian kualitas air, tanah, dan udara serta mitigasi terjadinya pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pemanfaatan sarana riset dan teknologi sebagai daya ungkit dalam pengendalian dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Perwujudan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	79,21	100,00	Pengelolaan air limbah rumah tangga yang aman dan berkelanjutan, pemenuhan akses sanitasi melalui pemenuhan fasilitas infrastruktur akses sanitasi yang layak, aman, dan berkelanjutan serta edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar ikut aktif dalam penyehatan lingkungan di masyarakat	Peningkatan pengelolaan air limbah rumah tangga dan pemerataan percepatan layanan akses sanitasi yang layak dan aman	Pengoptimalan ekosistem pengelolaan air limbah rumah tangga dan sanitasi yang terintegrasi dan rehabilitasi infrastruktur air limbah rumah tangga dan sanitasi	Perwujudan integrasi pengelolaan air limbah rumah tangga dan akses sanitasi secara merata yang layak, aman, dan berkelanjutan

Persentase penanganan sampah	27,85	73,98	Penguatan ekosistem persampahan melalui inovasi pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir berbasis keterlibatan seluruh unsur masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	Perluasan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu dengan pemanfaatan teknologi berkelanjutan dalam meningkatkan <i>mutlplier effect economy</i> berorientasi ekonomi sirkuler	Peningkatan kolaborasi antar stakeholder, peningkatan inovasi dan pengembangan teknologi mutakhir dan berkelanjutan dalam pengurangan dan pengangan sampah	Perwujudan masyarakat yang berkualitas dalam pemanfaatan sampah sebagai nilai tambah ekonomis dalam meningkatkan taraf hidup dan pendapatan
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)						
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan						
43. Ketahanan energi, air, dan pangan						
a) Ketahanan Energi						
Rasio Rumah Tangga menggunakan listrik	96,66	100	Pengembangan sistem jaringan listrik dalam mengakselerasi kapasistas penyediaan energi listrik dan pelayanan listrik yang terjangkau bagi seluruh wilayah, pengembangan energi baru terbarukan sebagai alternatif sumber daya energi listrik yang berkelanjutan bagi rumah tangga	Peningkatan ekosistem jaringan listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui kolaborasi riset, inovasi dan teknologi dalam penyediaan energi listrik yang merata dan berkeadilan	Penguatan penyediaan energi listrik dengan pemanfaatan energi baru terbarukan yang adil dan merata	Perwujudan transisi energi berkelanjutan dalam ekosistem penyediaan energi listrik di seluruh wilayah

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	2,58	1,18	Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan sarana dan prasaran produksi, keanekaragaman dan kualitas pangan melalui intensifikasi, penggunaan tekonologi dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (<i>Food, Energy, Water</i>) dan diversifikasi produk	Peningkatan kerjasama dan kolaborasi multi helix dalam pengembangan produk pangan memanfaatkan teknologi baru serta jaringan distribusi untuk mencukupi ketersediaan pangan daerah	Pengoptimalan kerjasama dalam pengembangan ekosistem ketersediaan produk pangan dalam rangka menjamin kemandirian pangan	Perwujudan kemandirian pangan yang berkelanjutan
c) Ketahanan Air						
Kapasitas air baku (%)	100	100	Penyediaan infrastruktur ari baku dan air siap minum serta peningkatan akses layanan air baku dan air siap minum perpipaan dengan penguatan kerjasama antar daerah dan kemitraan	Akselerasi penyediaan infrastruktur air baku dan air siap minum yang berkualitas, merata, terjangkau, dan kontinu	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air baku dan air siap minum perpipaan yang terjangkau	Perwujudan akses layanan air baku dn air siap minum yang mudah dan merata di daerah
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	12,87	49,65				
Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim						
44. Indeks Risiko Bencana (IRB)*	136,82	109,05	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Peningkatan pengendalian tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana melalui mitigasi struktural dan non struktural, peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat terhadap risiko bencana dalam menciptakan SDM kebencanaan yang tangguh serta pemanfaatan teknologi mutakhir dalam penguatan layanan peringatan dini multi ancaman bencana	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan bencana secara inklusif dan partisipatif serta pembiayaan penanggulangan bencana inovatif berbasis potensi daerah rawan bencana tinggi dan bencana prioritas	Perwujudan tata ruang daerah yang mempertimbangkan kebencanaan dan resiliensi terhadap bencana

Indeks Ketahanan Daerah	0,68	0,81	Penguatan ekosistem penanggulangan bencana di daerah yang melibatkan banyak pihak secara bersama-sama	Peningkatan ekosistem ketahanan daerah dalam menanggulangi terjadinya bencana melalui pemanfaatan teknologi	Pengoptimalan ekosistem ketahanan daerah dalam menanggulangi bencana	Perwujudan daerah yang tangguh, tanggap, dan siap terhadap terjadinya bencana
45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim	Peningkatan kapasitas masyarakat, kawasan strategis dan daerah dalam menghadapi risiko bencana dan krisis iklim melalui mitigasi dan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim	Peningkatan sarana dan prasarana serta penerapan dan pengembangan teknologi sistem peringatan dini bencana dan krisis iklim yang andal dan terintegrasi	Perwujudan kolaborasi multipihak yang berkelanjutan dalam menghadapi bencana dan krisis iklim
b. Tahunan	40,41	68,41				

Tabel 5.3.6
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASE LINE 2025	TARGET 2045		
1	Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas SDM	IE 1. Kesehatan untuk Semua	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,80	80,45	Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	
				Kesehatan Ibu dan Anak:				
			Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	100	10		
			Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,8	5		
				Penanganan Tuberkulosis:				
			Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	100		
			Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	100		
			Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	90,0	98,5		
				Hasil pembelajaran				

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASE LINE 2025	TARGET 2045		
		IE 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
			Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	i) Literasi SD (%)	54,59	64,09		
			Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	ii) Numerasi SD (%)	45,67	60,50		
				b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
			Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	i) Literasi SMP (%)	65,05	74,73		
			Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	ii) Numerasi SMP (%)	60,70	71,87		
			Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	a) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,89	12,05		
			Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun	b) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,97	14,41		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASE LINE 2025	TARGET 2045		
			pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang inklusif)					
			Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Terdidik dan Terlatih (%)	28,32	40,63		
		IE 3. Perlindungan sosial yang adaptif	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,08	0,5-0,98		
			Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal, rentan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,10	99,50		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASE LINE 2025	TARGET 2045		
2	Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Serang-Tangerang (klaster industri logam dasar, industri petrokimia, industri makanan dan minuman, industri mesin, industri tekstil, industri consumer goods & general manufactures).	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	45,75	58,10	Terwujudnya Ekonomi Tumbuh dan Merata	
				Pengembangan Pariwisata				
			Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,35	4,27		
			Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	19,87	150,01		
				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD				
			Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	2,26	20		
			Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	ii) Pertumbuhan Usaha Mikro (%)	5	20		
			Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Persentase Koperasi Aktif (%)	75	89,08		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASE LINE 2025	TARGET 2045		
			Peningkatan produktivitas BUMD	<i>Return on Aset (ROA) BUMD (%)</i> *	2,29	5,66		
			Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan Dasar dan Menengah pertama serta vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,94	5,77		
			Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	44,15	50,25		
			Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Indeks Inovasi Daerah	43,00-45,00	75,00		
				Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan	b) Pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi Primer di Lingkungan Puspemkab Serang (%)	5	45		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASE LINE 2025	TARGET 2045		
3	Transformasi Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Serta Pelayanan Publik yang Berkualitas	IE 6. Transformasi Digital	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	Indeks Keamanan Informasi (poin)	273	636	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang berintegritas dan inovatif	
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	40,00	38,68		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASE LINE 2025	TARGET 2045		
			Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)	Nilai ekspor barang dan jasa (\$ Juta)	512,21	800		
		IE 8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	Persentase rumah tangga layak huni (%)	97,30	100		
			Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	Presentase Desa Mandiri (%)	3,68	96,32		
4	Transformasi Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Serta Pelayanan Publik yang Berkualitas	IE 9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	72	83	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang berintegritas dan inovatif	
			Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,23	5		
			Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	3,8	5		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASE LINE 2025	TARGET 2045		
5	Menjadikan Peran Sentral Agama dan Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi	IE 10. Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Trantibum dan Perda (%)	5	5	Terwujudnya Masyarakat Harmonis, tertib dan Agamis Serta Lingkungan yang bersih dan sehat	
6	Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat	IE 11. Stabilitas Ekonomi Daerah	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique and high-value economy)	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	1,5	3	Terwujudnya Ekonomi Tumbuh dan Merata	
			Penguatan pengendalian inflasi daerah	Tingkat Inflasi (%)	2,11	2-1		
				Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan				
			Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance	Rasio derajat desentralisasi fiskal (%)	27,05	37-50		
		IE 12. Kolaborasi dan Kerjasama Antar Daerah	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah	Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah (Jumlah)	17	23		
7	Menjadikan Peran Sentral Agama dan	IE 13. Beragama Maslahat dan	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berdasarkan kepada Pancasila	Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	63,64	100	Terwujudnya Masyarakat Harmonis, tertib	

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASE LINE 2025	TARGET 2045		
	Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi	Berkebudayaan Maju	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81	85	dan Agamis Serta Lingkungan yang bersih dan sehat	
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Indeks Pembangunan Keluarga	64,66	70,20		
			Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,533	0,320		
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas						
				Kualitas Lingkungan Hidup				
			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir	Indeks kualitas lingkungan hidup (%)	65,31	72,39		
			Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	79,21	100		
				Persentase penanganan sampah				

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASE LINE 2025	TARGET 2045		
			Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	27,85	73,98		
8	Meningkatkan Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur yang handal dan Berkelanjutan	IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan					Terwujudnya Infrastruktur Mantap dan berkelanjutan	
				Ketahanan energi, air, dan pangan				
				Ketahanan Energi				
			Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion	- Rasio Rumah Tangga Menggunakan Listrik*	96,66	100		
			Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Kabupaten Serang (Cidanau-Ciujung-Cidurian)	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	2,58	1,18		
				Ketahanan Air				
			Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion	- Kapasitas Air Baku (%)	100	100		
			Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	- Akses Rumah Tangga terhadap Akses aman Air Perpipaan (%)	12,87	49,65		
		IE 17. Resiliensi Terhadap Bencana	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green and grey infrastructure)	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	136,82	109,05		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASE LINE 2025	TARGET 2045		
		dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Indeks Ketahanan Daerah	0,68	0,81		
			Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	40.41	68.41		

Tabel 5.3.7
Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing					
		IE 1. Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,80	80,45	
			Kesehatan Ibu dan Anak:			
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	100	10	
			Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,8	5	
			Penanganan Tuberkulosis:			
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	100	
			b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	100	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	90	98,5	
			Hasil pembelajaran			

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
		IE 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
			i) Literasi SD (%)	54,59	64,09	
			ii) Numerasi SD (%)	45,67	60,50	
			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
			i) Literasi SMP (%)	65,05	74,73	
			ii) Numerasi SMP (%)	60,70	71,87	
			a) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,89	12,05	
			b) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,97	14,41	
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Terdidik dan Terlatih (%)	28,32	40,63	
		IE 3. Perlindungan sosial yang adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	4,08	0,5-0,98	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,10	99,50	
2	Terwujudnya Ekonomi Tumbuh dan Merata	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	45,75	58,10	
			Pengembangan Pariwisata			
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,35	4,27	
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan Orang)*	19,87	150,01	

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
			i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	2,26	20	
			ii) Pertumbuhan Usaha Mikro (%)	5	20	
			Persentase Koperasi Aktif (%)	75	89,08	
			Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	2,29	5,66	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,94	5,77	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	44,15	50,25	
			Indeks Inovasi Daerah	43,00-45,00	75,00	
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
			b) Pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi Primer di wilayah Kabupaten Serang (%)	5	45	
3	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang berintegritas dan inovatif	IE 6. Transformasi Digital	Indeks Keamanan Informasi (poin)	273	636	
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	40,00	38,68	
			Nilai ekspor barang dan jasa (\$ Juta)	512,21	800	
			Persentase rumah tangga layak huni (%)	97,30	100	

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
		IE 8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Presentase Desa Mandiri (%)	3,68	96,32	
4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang berintegritas dan inovatif	IE 9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	72	83	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,23	5	
			Indeks Pelayanan Publik	3,8	5	
5	Terwujudnya Masyarakat Harmonis, tertib dan Agamis Serta Lingkungan yang bersih dan sehat	IE 10. Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Trantibum dan Perda (%)	5	5	
6	Terwujudnya Ekonomi Tumbuh dan Merata	IE 11. Stabilitas Ekonomi Daerah	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	1,5	3	
			Tingkat Inflasi (%)	2,11	2-1	
			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
			Rasio derajat desentralisasi fiskal	27,05	37-50	
		IE 12. Kolaborasi dan Kerjasama Antar Daerah	Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah (Jumlah)	17	23	
7	Terwujudnya Masyarakat Harmonis, tertib dan Agamis Serta Lingkungan yang bersih dan sehat					
		IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	63,64	100	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81	85	
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	64,66	70,20	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,533	0,320	

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Kualitas Lingkungan Hidup			
			Indeks kualitas lingkungan hidup (%)	65,31	72,39	
			Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	79,21	100	
			Persentase penanganan sampah			
			- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	27,85	73,98	
8	Terwujudnya Infrastruktur Mantap dan berkelanjutan	IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan energi, air, dan pangan			
			Ketahanan Energi			
			- Rasio Rumah Tangga Menggunakan Listrik*	96,66	100	
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	2,58	1,18	
			Ketahanan Air			
			- Kapasitas Air Baku (%)	100	100	
			- Akses Rumah Tangga terhadap Akses aman Air Perpipaan (%)	12,87	49,65	
		IE 17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	136,82	109,05	
			Indeks Ketahanan Daerah	0,68	0,81	
			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	40.41	68.41	

Metadata dan Definisi Operasional Indikator Utama Pembangunan

1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

Usia Harapan Hidup adalah Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Usia Harapan Hidup Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack. Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Metadata usia harapan hidup didapatkan dari Badan Pusat Statistik melalui Sensus Penduduk (SP) 10 tahunan dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 10 tahunan.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan.
2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat.

3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu
5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
6. Rumus perhitungan AKI adalah Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.

$$AKI = (JKI/JLH) \times 100.000$$

Keterangan:

AKI : Angka kematian ibu

JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu

JLH : Jumlah kelahiran hidup

Metadata Angka Kematian Ibu didapatkan dari:

- a. Dinas Kesehatan
- b. Badan Pusat Statistik melalui Sensus Penduduk (SP) 10 tahunan dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 10 tahunan.

3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010.

- a. Sangat pendek: Zscore < -3,0
- b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0.

Cara perhitungan (1)

Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$\text{JAB(5)P stunting(\%)} = \frac{\text{JAB (5) P Stunting}}{\text{JAB (5)}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAB(5) P : Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting)
JAB(5)

P stunting : Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu

JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama

Cara perhitungan (2)

Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%)

$$\text{JAB(5)SP stunting} = \frac{\text{JAB (5) SP Stunting}}{\text{JAB (5)}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAB (5) : Prevalensi anak balita yang SP stunting menderita sangat pendek (stunting)

JAB(5) SP stunting : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu

JAB(5): Jumlah anak balita pada waktu yang sama

Cara perhitungan (3)

$$\text{Prevelansi Stunting} = \text{PAB (5) P} + \text{PAB (5) SP}$$

Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:

1. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama.
2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.
3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi

untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting.

4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.

Metadata didapatkan dari Dinas Kesehatan melalui SGI tahunan dan Survei Kesehatan Indonesia 5 tahunan.

4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis merupakan Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting:

1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.
2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.

Metadata didapatkan dari Dinas Kesehatan secara tahunan.

5. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) adalah Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap, yang dihitung dengan rumus Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.

Indikator ini digunakan dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. Metadata didapatkan dari Dinas Kesehatan secara tahunan.

6. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan

Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.
2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.
4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Metadata didapatkan dari Dinas Kesehatan dan BPJS secara tahunan. Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten dikali 100%.

$$\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN (\%)} = \frac{\text{Jumlah Peserta JKN}}{\text{Jumlah Penduduk Kota}} \times 100\%$$

7. Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat Nasional (literasi membaca/ numerasi)

Indikator yang merupakan bagian dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk penilaian asesmen kompetensi literasi dan numerasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami,

menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat.

Sedangkan Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Semakin tinggi nilai Ketercapaian AKM di suatu daerah, maka semakin tinggi peserta didik yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi/numerasi pada daerah tersebut. Rumus perhitungan indikator ini adalah jumlah peserta didik di kabupaten/kota X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah peserta didik di kabupaten/kota X. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit peserta didik memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. Peserta didik yang menjadi subjek perhitungan adalah peserta didik dari seluruh

Metadata didapatkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI secara tahunan.

8. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (literasi membaca/numerasi)

Indikator ini merupakan bagian dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk penilaian asesmen kompetensi literasi/numerasi pada satuan pendidikan. Rumus perhitungan indikator ini adalah Jumlah satuan pendidikan di kabupaten/kota X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di kabupaten/kota X. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. Peserta didik yang menjadi subjek perhitungan adalah peserta didik dari seluruh jenjang pendidikan di bawah Kemendikbudristek dan Kemenag, kecuali sekolah terbuka

Metadata didapatkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI secara tahunan.

9. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun adalah Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:

1. Tidak punya ijazah = 0 tahun;
2. SD = 6 tahun;
3. SMP = 9 tahun;
4. SMA = 12 tahun;
5. D1/D2 = 14 tahun;
6. D3 = 15 tahun;
7. D4 = 16 tahun;
8. S1 = 17 tahun;
9. S2 = 19 tahun;
10. S3 = 22 tahun.

Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:

1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;
2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;
3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;
4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1

Rumus Perhitungan

$$\text{Rata – Rata Lama Sekolah 15 + (tahun)} = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} X_i$$

Keterangan:

P_{15+} = Jumlah Penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas

X_i = Lama sekolah penduduk ke-i

Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata- rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX. Metadata didapatkan dari Badan Pusat Statistik secara Tahunan berdasarkan hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya.

10. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah adalah Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I. Metadata didapatkan dari Badan Pusat Statistik secara Tahunan berdasarkan hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$\text{Harapan Lama Sekolah (tahun)} = \text{FK} \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

FK = Faktor koreksi pesantren

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun

P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i = Usia (7, 8, ..., n)

11. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.

Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi
• Tidak/belum tamat SD • SD/MI/SDLB/Paket A • SMP/MTs/SMPLB/Paket B	• SMA/MA/SMLB/Paket C • SMK • MAK	• Diploma I/II/III • Diploma IV • S1 • S2 • S2 Terapan • S3

Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja. Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja menggambarkan peningkatan link and match tenaga kerja antara dunia pendidikan (supply) dan lapangan kerja (demand). Metadata didapatkan dari Badan Pusat Statistik dalam dua kali per tahun (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus. Adapun rumus perhitungannya adalah:

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau tinggi dan sedang bekerja pada tahun T di Kab/Kota X

Jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun T di Kab/Kota X

12. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk Kabupaten Serang yang berada di bawah garis kemiskinan. Rumus perhitungannya adalah:

$$P_{\alpha} = 1n \sum qi = 1 [z - yic] \alpha$$

Semakin tinggi nilai persentase yang diperoleh menunjukkan semakin banyaknya penduduk di Kabupaten Serang yang berada di bawah garis kemiskinan.

13. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Rumus perhitungannya adalah:

$$Cakupan Jamsos Naker = \frac{\text{Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah semesta penduduk bekerja}} \times 100\%$$

Keterangan:

Peserta = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah

Semesta penduduk bekerja = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun

Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Metadata didapatkan dari:

- a. Dinas Ketenagakerjaan,
- b. BPJS Ketenagakerjaan, dan
- c. BPS

Frekuensi ketersediaan data adalah setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya.

14. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bersumber dari komposit sektor Industri Pengolahan yang terdiri dari 16 sub-sektor lapangan usaha. Meta data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Daerah secara tahunan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (\%)} \\ &= \frac{\text{Nilai tambah Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\% \end{aligned}$$

15. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi:

1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan
2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum

Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata. Metadata didapatkan dari Dinas Pariwisata, Badan Pusat Statistik Daerah secara tahunan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PDRB Penyediaan Akomamin (\%)} = \frac{\text{Nilai tambah penyediaan Akomamin}}{\text{Nilai PDRB Kota}} \times 100\%$$

16. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Hotel Berbintang)

Definisi indikator ini adalah Jumlah tamu wisatawan mancanegara dan domestik yang menginap di hotel berbintang di daerah tertentu. Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara dan domestik yang menginap di hotel berbintang di daerah tertentu maka akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Metadata didapatkan dari Dinas Pariwisata, Badan Pusat Statistik Daerah secara tahunan.

17. Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kabupaten

Proporsi jumlah usaha Mikro non pertanian pada level Kabupaten merupakan perbandingan jumlah unit usaha Mikro non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama di level Kabupaten. Usaha mikro merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Metadata didapatkan dari:

1. Badan Pusat Statistik : Sensus Ekonomi (10 tahun sekali).
2. Kementerian Koperasi dan UKM : Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM
3. Dinas Koperasi dan UMKM : Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah

Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$\text{Proporsi Usaha Mikro} = \frac{\text{Jumlah Unit Usaha Mikro Non Pertanian}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha Non Pertanian}} \times 100\%$$

18. Pertumbuhan Usaha Mikro (%)

Pertumbuhan usaha mikro pada level kabupaten merupakan perbandingan jumlah unit industri mikro terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama di level kabupaten, dengan rumus perhitungan:

$$\text{Pertumbuhan Usaha Mikro (\%)} = \frac{\text{Jumlah Unit Industri Mikro dan Kecil}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}} \times 100\%$$

Industri kecil merepresentasikan bagian dari industri mikro dan kecil yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi industri kecil yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Metadata didapatkan secara tahunan dari :

1. Badan Pusat Statistik : Survei Industri Kecil dan Menengah
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

19. Persentase Koperasi Aktif

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi bahwa Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

$$\text{Persentase Koperasi Aktif} = \text{Jumlah Seluruh Unit Koperasi Aktif} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, semakin tinggi persentasi koperasi aktif maka semakin banyak koperasi sehat yang ada di Kabupaten Serang.

20. Return on Asset (ROA) BUMD

Return On Aset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset (ROA)* dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

$$\text{Return of Asset (ROA) (\%)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat

dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. Metadata didapatkan secara tahunan dari BUMD (Laporan keuangan BUMD), BKAD, dan SETDA.

21. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut. Metadata didapatkan dari Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan dua kali per tahun (Februari dan Agustus). Adapun rumus perhitungannya adalah:

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan:

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

PP = Jumlah Pengangguran (orang)

PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)

22. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah

penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial. Metadata didapatkan dari Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan dua kali per tahun (Februari dan Agustus). Adapun rumus perhitungannya adalah:

$$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \times 100\%$$

Keterangan:

TPAK_p = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)

P_(15+,p) = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)

23. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan salah satu pilar dalam Indeks Daya Saing Daerah, yaitu pilar ke-12, yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Inovasi Daerah menggambarkan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Indikator ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikator ini dihitung dengan menggunakan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Keanekaragaman tenaga kerja
2. Publikasi ilmiah
3. Aplikasi kekayaan intelektual
4. Belanja riset
5. Indeks keunggulan lembaga riset
6. Aplikasi merk dagang

Metadata indikator ini didapatkan secara tahunan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

24. Pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi Primer di Wilayah Kabupaten Serang (%)

Bauran energi adalah berbagai sumber energi primer yang digunakan di wilayah geografis tertentu. Energi terbarukan (EBT) adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan, seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, air, dan terjunan air. Sebagai upaya percepatan peningkatan EBT di Indonesia, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Perpres Nomor 22 Tahun 2027 tentang Rencana Umum Energi Nasional yang menetapkan target porsi EBT pada bauran energi. Perhitungan bauran EBT tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi pemanfaatan EBT pada energi primer dengan rumus perhitungan sebagai berikut

$$\begin{aligned} & \text{Persentase energi terbarukan dalam bauran energi} \\ &= \frac{\text{Konsumsi energi terbarukan primer}}{\text{Total konsumsi energi domestik bruto}} \end{aligned}$$

25. Indeks Keamanan Informasi (poin)

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di instansi pemerintah. Alat evaluasi ini ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001. Indeks KAMI membagi menjadi 2 proses, yang pertama mengetahui Tingkat Kepentingan TIK pada instansi untuk mengukur seberapa tinggi tingkat ketergantungan menggunakan TIK instansi untuk mendukung kegiatan proses bisnis yang dilakukan instansi dan yang ke dua adalah mengukur 5 area Kematangan Keamanan Informasi yakni tata kelola, pengelolaan risiko, aspek teknologi, pengelolaan aset, dan kerangka kerja.

26. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara,

serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Kabupaten. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$Pembentukan\ PMTB\ (\%PDRB) = \frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} \times 100\%$$

Keterangan:

Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah)

PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Metadata didapatkan secara tahunan dari Badan Pusat Statistik.

27. Nilai Ekspor Barang dan Jasa (Juta)

Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis aktual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan.

28. Presentase Rumah Tangga Layak Huni (%)

Rumah tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:

- a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
- b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$.
3. Memiliki akses air minum layak.
4. Memiliki akses sanitasi layak.

Rumus perhitungan indikator ini adalah:

1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PHLB = \frac{JRTHLB}{JRT \times 100}$$

Keterangan:

PHLB = Persentase rumah tangga hunian layak, berkelanjutan;

JRTHLB = jumlah rumah tangga hunian layak, berkelanjutan;

JRT = Jumlah rumah tangga

2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).

$$PHLTB (proksi) = \frac{JRTHLTB (proksi)}{JRT \times 100}$$

Keterangan:

PHLB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, berkelanjutan;

JRTHLB (proksi) = jumlah rumah tangga hunian layak, berkelanjutan;

JRT = Jumlah rumah tangga

Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

29. Presentase Desa Mandiri (%)

Desa mandiri adalah desa yang memiliki akses dan ketersediaan pelayanan dasar yang memadai, infrastruktur yang baik, pelayanan umum yang bagus, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Rumus untuk menghitung persentase desa mandiri adalah

$$Presentase\ Desa\ Mandiri = \frac{\sum Dfn}{\sum D}$$

Dalam rumus tersebut, $\sum Dfn$ adalah jumlah desa yang memanfaatkan sarana prasarana dan teknologi tepat guna pada tahun berjalan, sedangkan $\sum D$ adalah jumlah desa.

30. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah Suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Berdasarkan Permen PANRB No. 26/2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada dua komponen utama, yakni pengungkit (60 persen), dengan rincian aspek pemenuhan (20 persen), aspek hasil antara (10 persen), aspek reform (30 persen), dan hasil (40 persen), yang terdiri aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan (10 persen), aspek kualitas pelayanan publik (10 persen), pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10 persen), dan aspek kinerja organisasi (10 persen).

Perhitungan Indeks dilakukan melalui tahapan a. penjumlahan nilai pada setiap sub komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu, b. penyimpulan indikator melalui nilai rata-rata, dan c. penjumlahan seluruh nilai sub komponen sehingga ditemukan angka tertentu. Indeks reformasi birokrasi diklasifikasikan ke dalam 7 kategori, yakni:

- a. 0 - 30 : Kategori D/Sangat Buruk
- b. >30 - 50 : Kategori C/Buruk
- c. >50 - 60 : Kategori CC/Cukup
- d. >60 - 70 : Kategori B/Cukup Baik
- e. >70 - 80 : Kategori BB/Baik
- f. >80 - 90 : Kategori A/Sangat Baik
- g. >90 - 100 : Kategori AA/Istimewa

Metadata didapatkan secara tahunan dari SETDA dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

31. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:

$$Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$$

Keterangan:

NDj adalah nilai indeks domain ke-j;

BDj adalah nilai bobot domain ke-j

Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan. Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Komunikasi dan Informasi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

32. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.

1. Menentukan nilai untuk setiap indikator

Nilai per indikator

$$= \left(\frac{\text{Nilai FO1} + \text{Nilai FO2} + \text{Nilai FO3}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$$

2. Menentukan nilai setiap aspek

Nilai per Aspek : $\sum$ nilai per indikator

3. Menentukan indeks

Nilai indeks : $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$

Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Keadilan (Fairness);
2. Partisipasi (Participation);
3. Akuntabilitas (Accountability);
4. Transparansi (transparency);
5. Berdayaguna (useful);
6. Aksesibilitas (accessibility)

Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar

penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:

Range nilai	Kategori	Makna
0-1,00	F	Gagal
1,01-1,50	E	Sangat Buruk
1,51-2,00	D	Buruk
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51-3,00	C	Cukup
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51-4,00	B	Baik
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima

Metadata didapatkan secara tahunan dari SETDA dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

33. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Trantibum dan Perda (%)

Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda mencerminkan Penurunan Pelanggaran Perda dengan di tindaklanjutinya pelanggaran perda yang terjadi. Pelanggaran Perda akan menurun Dengan di tindaklanjutinya kasus pelanggaran Perda yang terjadi dengan memberi efek jera dan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap perda.

Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda

$$= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda}} \times 100\%$$

Persentase penurunan jumlah pelanggaran tantribum mencerminkan Penurunan jumlah gangguan kentetraman dan ketertiban umum di Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum akan menurun dengan menurunnya jumlah kasus pelanggaran gangguan ketenteraman dan ketertiban.

Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Tantribum

$$= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Tantribum}(n - 1) - \text{Jumlah Pelanggaran } (n)}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran}} \times 100\%$$

34. Rasio pajak daerah terhadap PDRB

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.

Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$RPDRB_t = \frac{Penerimaan Pajak Daerah_t}{PDRB_t} \times 100\%$$

Keterangan:

RPDRB_t: Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan semakin tinggi penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka Pemerintah Daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Metadata didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik, secara triwulanan dan tahunan.

35. Tingkat Inflasi (%)

Inflasi atau laju inflasi adalah persentase perubahan IHK. Inflasi Bulan ke Bulan (month to month) adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Inflasi Tahun Kalender (year to date) adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan Desember tahun sebelumnya. Inflasi Tahun ke Tahun (year on year) adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan

bulan yang sama di tahun sebelumnya. Persentase perubahan IHK yang bernilai negatif disebut juga dengan deflasi.

$$Inflasi_n = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100$$

36. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Rasio Ketergantungan Keuangan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

37. Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah

Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Kab/Kota atau Sister City" adalah sebuah bentuk kolaborasi antara dua Kab/Kota yang berbeda negara atau daerah, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Hubungan ini biasanya melibatkan pertukaran informasi, program pendidikan, promosi pariwisata, serta kerjasama dalam bidang pembangunan dan kebijakan publik. Metadata indikator ini didapatkan dari SETDA Bagian Kerjasama secara tahunan.

38. Tingkat Warisan Budaya yang dilestarikan (%)

Definisi Warisan Budaya menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan

$$= \frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Potensi Cagar Budaya yang ada}} \times 100\%$$

Semakin tinggi persentase warisan budaya yang dilestarikan menunjukkan semakin tingginya kepedulian Kabupaten Serang terhadap warisan budaya yang ada di Kabupaten Serang.

39. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$KUB = \frac{\sum_{j=1}^3 Indeks D_j}{3}$$

Keterangan:

IKUB = Indeks Kerukunan Umat Beragama

D_j = Dimensi ke-*j*

Rumus menghitung indeks dimensi (*D_j*):

$$Indeks D_j = \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

D_j = Dimensi ke - *j*

SX_{ij} = Nilai indikator *i* pada dimensi ke - *j*

n_j = Jumlah indikator dimensi ke - *j*

Angka IKUB menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu:

- a. 0,00 – 20,00 sangat rendah;
- b. 20,01 – 40,00 rendah;
- c. 40,01 – 60,00 sedang;
- d. 60,01 – 80,00 tinggi;
- e. 80,01 – 100,00 sangat tinggi.

Metadata didapatkan secara tahunan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kementerian Agama.

40. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi

keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi. Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya. Metadata didapatkan secara tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan KB, Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA.

4.1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.

Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki

$$G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$$
$$G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$$

2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic

$$HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$$

3. Menghitung indeks masing-masing dimensi

$$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$$

$$IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$$

4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik

$$G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$$

5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender

$$\text{Indeks Kesetaraan Gender} = \frac{\text{HARM}(G_p, G_L)}{G_{P,L}}$$

6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender

$$IKG = \frac{\text{HARM}(G_p, G_L)}{G_{P,L}}$$

Keterangan:

$TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja

$TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja

$HARM G_p G_L$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik

IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi

IP = Indeks dimensi pemberdayaan

IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja

$G_{P,L}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik

IPK = Indeks Ketimpangan Gender

IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. Metadata didapatkan secara tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan KB dan Badan Pusat Statistik.

42. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Rumus perhitungan indikator ini adalah

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Perhitungan IKA menggunakan perubahan rumusan IKA-Indeks Pencemar (Ika-Ip) menjadi IKA-modifikasi NSF WQI (IKA-INA)

Parameter untuk perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya parameter baru yaitu Particulate Matter 2,5 Mikron (PM 2,5)

Rumus perhitungan IKL mengalami perubahan yaitu semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL.

Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

43. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Rumus Perhitungan:

$$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$$

Keterangan:

PSA : Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman

JRTSPAL : Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T

JRTIPLT : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam

5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)

JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat. Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang dan Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

44. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan :

- a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb.
- b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses

pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.

Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas.

Rumus Perhitungan yaitu:

Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah

Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah:

Cara (1)

$$SO = ST - MFPA + RDP$$

Keterangan:

SO : Sampah terolah (ton/hari)

ST : Sampah terkumpul (ton/hari)

MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari)

RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)

Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah

$$TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$$

Keterangan:

TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang)

TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari)

TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)

Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di daerah. Metadata didapatkan secara tahunan dari:

1. Dinas Lingkungan Hidup
2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR Badan Pusat Statistik dan Podes (masih dalam proses uji coba)
3. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Sistem Informasi INSAN Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

45. Rasio Rumah Tangga Menggunakan Listrik

Rasio elektrifikasi atau rasio rumah tangga menggunakan listrik merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dibandingkan dengan total rumah tangga. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus berupaya meningkatkan akses jaringan listrik setiap rumah tangga di Indonesia.

Rasio Rumah Tangga Menggunakan Listrik

$$= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berlistrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan}} \times 100\%$$

46. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$PoU = \int_{x < MDER}^{\square} f(x) dx$$

Keterangan:

PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan

minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal.

MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal

(Minimum Dietary Energy Requirement).

$f(x)$: Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu.

Indikator ini mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. Metadara didapatkan secara tahunan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Badan Pusat Statistik.

47. Kapasitas Air Baku ($m^3/detik$)

Kapasitas Air Baku adalah Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya. Kapasitas air baku dihitung dengan cara menjumlahkan kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya. Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi.

48. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$PASMPP = \frac{JRT \text{ ASMPP}}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan:

PASMPP : Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan

JRTASMPP : Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap

air siap minum perpipaan

JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan

Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Metadata didapatkan secara tahunan dari :

1. Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
2. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga
oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan
3. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR Badan Pusat Statistik

49. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Keterangan

Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.

Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa

tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut:

- a. Indeks <13 adalah Rendah
- b. Indeks 13 - 144 adalah Sedang
- c. Indeks >144 adalah Tinggi

Metadata didapatkan secara tahunan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

50. Indeks Ketahanan Daerah

Ketahanan daerah adalah kemampuan suatu wilayah atau daerah untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai ancaman dan tekanan, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan. Konsep ini mencakup sejumlah aspek yang berperan dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu wilayah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan selanjutnya dapat digunakan dalam pemutakhiran peta risiko bencana.

IKD = Nilai Input Indeks Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan (variabel 1) + Nilai Input Indeks Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu (variabel 2) + Nilai Input Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik (variabel 3) + Nilai Input Indeks Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana (variabel 4) + Nilai Input Indeks Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana (variabel 5) + Nilai Input Indeks Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (variabel 6) + Nilai Input Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (variabel 7)

51. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama. Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan

akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

b. Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Kumulatif

$$\%PEK = \frac{\sum_{i=base\ layer}^t PE_t}{\sum_{i=base\ layer}^t EB_t}$$

- $\%PEK$: persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatifGRK
- $\sum_{i=base\ layer}^t PE_t$: akumulasi penurunan emisi GRL total daerah selama periode base year hingga tahun t
- $\sum_{i=base\ layer}^t EB_t$: akumulasi emisi GRK total baseline daerah selama periode base year hingga tahun t
- t : titik tahun perhitungan
- i : base year

Metadata didapatkan secara tahunan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Sistem AKSARA Bappenas.

5.2.4 Game Changer (Superprioritas)

Dalam rangka kesesuaian dalam perencanaan superprioritas antara pelaksanaan kewenangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Serang berikut tertuang penjabaran mengenai rencana Superprioritas pada level Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Serang:

1. Super Prioritas / Game Changer Nasional

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat 20 upaya transformatif Super Prioritas (Game Changer) yaitu:

- Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) untuk Transformasi Indonesia terdiri dari:
 - a) Transformasi Sosial
 - 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
 - 2) Peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi Pendidikan.
 - 3) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga Pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan

tenaga kesehatan.

- 4) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis dan kusta).
- 5) Penuntasan kemiskinan dengan satu system Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

b) Transformasi Ekonomi

- 6) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industry.
- 7) Industrialisasi: hilirisasi industry berbasis SDA unggulan, industry padat karta terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
- 8) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
- 9) Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
- 10) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan pertumbuhan ekonomi.
- 11) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

c) Transformasi Tata Kelola

- 12) Pembentukan Lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama system penggajian tunggal dan pension), serta pemberantasan korupsi.
- 13) Penguatan integritas partai politik.

- Tujuh (7) Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) untuk Landasan Transformasi terdiri dari:

a) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- 14) Transformasi system penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi Lembaga kejaksaan sebagai *advocaat general*.
- 15) Transformasi Industri pertanahan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan pengiatan *value chain* industry nasional.
- 16) Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan

aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.

17) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

b) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

18) Penguatan karakter dan jati diri bangsa.

19) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.

20) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan FEW nexus (*food, energy, water*).

2. Super Prioritas / Game Changer Provinsi Banten

a) Highlight Indikasi Intervensi Super Prioritas Misi ke-1 (Sosial)

i. Kesehatan adalah salah satu faktor penting dan krusial sebagai investasi jangka panjang untuk mencapai produktivitas dan kualitas hidup dengan kondisi spiritual, mental dan fisik yang baik. Terdapat beberapa indikasi pemajuan pelayanan dan fasilitas kesehatan meliputi:

- Penataan tata kelola rumah sakit menuju pelayanan kesehatan berkelas dunia (efektivitas proses bisnis dan perencanaan strategis, optimalisasi pengelolaan sumber daya, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, dan hal lainnya);
- Pengembangan pelayanan kesehatan untuk menangani kasus gigi dan mulut;
- Pengembangan pelayanan kesehatan untuk menangani kasus kesehatan mental;
- Pengembangan pelayanan kesehatan untuk menangani kasus multi-penyakit pada lanjut usia;
- Pengembangan pelayanan kesehatan untuk menangani kasus ketergantungan obat;
- Pengembangan konsep hospital tourism, yaitu pelayanan kesehatan yang diselaraskan dengan kegiatan wisata sebagai upaya menghasilkan sumber pertumbuhan ekonomi baru (khususnya pada sektor ekonomi kreatif dan wisata);
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan (promotif, preventif, rehabilitatif dan kuratif), penyediaan

sarana- prasarana kesehatan primer dan rujukan, pemerataan pelayanan kesehatan serta penuntasan eliminasi penyakit prioritas, menular dan tropis terabaikan.

- ii. Pendidikan merupakan kunci peradaban masyarakat Provinsi Banten untuk dapat berkontribusi dan berperan aktif dalam pemajuan pembangunan daerah, beberapa indikasi pemajuan kunci pengembangan pendidikan di Provinsi Banten yang memiliki pengaruh diantaranya:
 - Percepatan wajib belajar 13 (tiga belas) tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar hingga pendidikan menengah);
 - Pengembangan Center of Excellence (CoE) sebagai ruang untuk pengembangan keahlian khusus pada suatu bidang spesifik serta peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan pendidikan guru;
 - Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta penguatan link and match sebagai bentuk kolaborasi dengan multipihak dalam pengelolaan pendidikan;
 - Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK;
 - Pengembangan pendidikan tinggi sebagai pusat unggulan riset inovasi kemajuan dan keberlanjutan dan pusat pembudayaan iman dan taqwa;
 - Pengembangan kawasan sebagai hub pendidikan tinggi kelas dunia, digitalisasi, dan kesehatan;
 - Peningkatan partisipasi dan akses pendidikan tinggi pada program studi Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics (STEAM).
- iii. Perlindungan sosial merupakan suatu hak yang wajib diberikan secara menyeluruh kepada setiap individu di Provinsi Banten sepanjang siklus kehidupan, adapun indikasi kunci mencakup:
 - Perlindungan sosial masyarakat secara adaptif dengan menjunjung tinggi prinsip berkeadilan dan inklusif terhadap kelompok rentan dan marginal di wilayah Provinsi Banten;

- Penuntasan permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan dengan mengupayakan pengoptimalan pemanfaatan satu sistem Regsosek;
- Percepatan pembangunan dan penuntasan ketimpangan sosial.

b) Highlight Indikasi Intervensi Super Prioritas Misi ke-2 (Ekonomi)

- i. Pembangunan dan pengembangan hilirisasi mother industry, industry halal, industri hijau, industri biru maupun Eco-Industrial Parks (EIPs);
- ii. Pembangunan dan pengembangan hilirisasi industri unggulan, potensial, dan berorientasi ekspor;
- iii. Pembangunan dan pengembangan hilirisasi industri padat karya terampil, padat modal, maupun padat teknologi;
- iv. Pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur penunjang di selat sunda, sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan mengurangi inefisiensi waktu dan energi mobilitas barang dan jasa antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera;
- v. Dukungan pembangunan dan optimalisasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun Proyek Strategis Nasional (PSN);
- vi. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi KP3B dan infrastruktur penunjang lainnya;
- vii. Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis lainnya yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- viii. Pengembangan kawasan olahraga dan infrastruktur penunjang lainnya;
- ix. Pengembangan jalan tol dan non tol baru yang terintegrasi dengan Kawasan pertumbuhan ekonomi;
- x. Pengembangan transportasi publik massal yang ramah lingkungan, nyaman, mudah diakses, aman, efisien, dan murah beserta fasilitas penunjangnya yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- xi. Pengembangan dan optimalisasi kawasan infrastruktur permukiman yang inklusif, berkelanjutan dan berketahanan yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;

- xii. Percepatan transisi energi dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi;
 - xiii. Percepatan dan pembangunan transformasi digital dan produksi talenta digital;
 - xiv. Penguatan pemerintah daerah pada intervensi ekonomi dan pengembangan lainnya yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi daerah.
- c) Highlight Indikasi Intervensi Super Prioritas Misi ke-3 (Tata Kelola)
- i. Percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait akses layanan pemerintahan yang didasari oleh berbagai aspirasi masyarakat terkait pemekaran wilayah yang telah memenuhi persyaratan dan telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan DPRD kabupaten induk tentang persetujuan pembentukan daerah otonom baru kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan telah menjadi usulan program legislasi nasional yang disampaikan Presiden kepada DPR RI;
 - ii. Penataan/pengembangan/pembentukan lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan sumber daya daerah yang memiliki pola pengelolaan keuangan yang fleksibel;
 - iii. Adanya Special Purpose Vehicle sebagai akselerator pembangunan di Provinsi Banten dalam mengelola sumber pembiayaan pembangunan inovatif yang sah secara peraturan perundang-undangan;
 - iv. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan birokrasi dan pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan adaptif sesuai kebutuhan daerah memanfaatkan kemajuan teknologi digital;
 - v. Digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mendukung birokrasi yang agile dan peningkatan kualitas ASN yang memiliki etika kerja, bebas korupsi dan profesional menuju pelayanan prima.
- d) Highlight Indikasi Intervensi Super Prioritas Misi ke-4 (Keamanan,

Demokrasi, dan Perekonomian daerah yang stabil)

- i. Penguatan ketenteraman, ketertiban dan keamanan melalui penegakan sanksi hukum guna menjadikan provinsi yang aman;
- ii. Penguatan demokrasi yang substansial melalui pendekatan terhadap partisipasi, keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat;
- iii. Penguatan pajak daerah dan retribusi daerah guna peningkatan kapasitas fiskal daerah;
- iv. Penguatan inovasi pengelolaan keuangan daerah melalui pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan inovatif;
- v. Penguatan keterlibatan dan kolaborasi dengan mitra, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (multi-pihak).

e) Highlight Indikasi Intervensi Super Prioritas Misi ke-5 (Sosial Budaya dan Ekologi)

- i. Penguatan nilai dan karakter budaya untuk menjaga jati diri masyarakat Banten yang religius melalui optimalisasi pengembangan pusat-pusat kebudayaan;
- ii. Menciptakan keluarga yang berkualitas, gender yang setara dan masyarakat yang inklusif;
- iii. Pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu-hilir yang berkelanjutan;
- iv. Penguatan kawasan agrikultur pangan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan daerah;
- v. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman sesuai karakteristik dan potensi daerah guna mendukung kemandirian pangan;
- vi. Pengembangan energi terbarukan (renewable energy) guna mendukung ketahanan energi;
- vii. Pengembangan dan optimalisasi sumber daya air beserta pemanfaatan potensi ekonomi dan ekologinya guna mendukung ketahanan air;
- viii. Optimalisasi dan pengembangan wisata alam;
- ix. Resiliensi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- x. Pemanfaatan skema carbon trade untuk pengelolaan hutan berkelanjutan.

3. Super Prioritas / Game Changer Kabupaten Serang

1. Wajib belajar 13 tahun, guna mendukung superprioritas Nasional dan Provinsi;
2. Pengembangan digitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Pengembangan wilayah Pendidikan dan fasilitas SDM Kesehatan serta Riset dan teknologi Kesehatan Serang Bara(Kec. Baros, Kec.Pabuaran dan Kec. Kramatwatu);
4. Penuntasan kemiskinan, penurunan pengangguran dan kesejahteraan masyarakat;
5. Pengembangan pusat pertumbuhan Serang Timur (Kec. Ciruas, Kec. Kragilan, Kec. Kibin, Kec. Lebak Wangi, Kec. Carenang, Kec. Binuang dan Kec. Cikande);
6. Pengembangan pusat riset teknologi industri (Kec. Cikande, Kec. Kibin, Kec. Kragilan, Kec. Bojonegara dan Kec. Pulo Ampel) dan Kawasan Industri Tunjungteja;
7. Pengembangan kawasan pertumbuhan Serang Barat (Kec. Kramatwatu, Kec. Waringinkurung, Kec. Bojonegara, Kec. Baros, Kec. Pabuaran dan Kec. Ciomas);;
8. Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang dan Smart City;
9. Pengembangan kawasan pertanian dan peternakan (Kec. Kopo, Kec. Jawilan, Kec. Pamarayan, Kec. Bandung, Kec. Cikeusal, Kec. Pontang, Kec. Tirtayasa, Kec. Tanara, Kec.Cinangka, Kec. Padarincang, Kec. Ciomas, Kec. Gunungsari, Kec. Mancak dan Kec. Waringinkurung);
10. Pengembangan kawasan minapolitan dan kota Pelabuhan Lontar (Kecamatan Pontang, Kec. Tirtayasa dan Kec. Tanara);
11. Koperasi dan UMKM orientasi ekspor (Kec. Petir, Kec. Cikeusal, Kec. Tunjungteja, Kec. Bandung dan Kec. Pamarayan);
12. Jalan baru lingkaran Serang Timur;
13. Jalan baru lingkaran Serang Barat;
14. Pengembangan kawasan pariwisata (Kec. Anyar, Kec. Cinangka, Kec.Padarincang, Kec. Gunungsari, Kec. Mancak, Kec. Tanara dan Kec. Tirtayasa) dan kawasan khusus wisata religi;
15. Optimalisasi pengembangan TPS dan Industri pengolahan sampah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang tahun 2025-2045 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang baru. RPJPD ini juga menjadi pedoman bagi Bupati Serang dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang yang berdimensi tahunan. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara lebih merata dan adil oleh segenap warga masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan lahir dan batin dalam suasana yang demokratis, aman, tentram, dan damai serta lingkungan hidup yang terjaga secara berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 dalam mewujudkan visi **"KABUPATEN SERANG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKELANJUTAN DAN AGAMIS"** perlu didukung oleh (1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (2) Menerapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta pelayanan publik yang berkualitas; (3) Meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah melalui pengembangan sektor industri yang unggulan, sektor pariwisata yang berkualitas, dan sektor pertanian yang berdikari dengan tetap memperhatikan unsur keberlanjutan lingkungan; (4) Meningkatkan pemerataan dan penyediaan infrastruktur serta lingkungan hidup yang andal dan berkelanjutan; serta (5) Menjadikan peran sentral agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Pembangunan Kabupaten Serang terwujud dalam Visi dan Misi Kabupaten Serang di dalam RPJPD Kabupaten Serang tahun 2025-2045 melalui partisipasi semua pelaku pembangunan. RPJPD Kabupaten Serang harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-

masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan mencakup manajemen risiko pembangunan daerah, pembiayaan pembangunan daerah, mekanisme insentif, serta mekanisme perubahan dan komunikasi publik.

6.2.1 Manajemen Risiko Pembangunan Daerah

Manajemen risiko pembangunan daerah adalah proses yang kompleks dan melibatkan banyak aspek yang berbeda. Dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, daerah dapat mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan pembangunan dan meningkatkan peluang untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, beberapa hal yang dapat dilaksanakan untuk melakukan manajemen risiko Pembangunan sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko: mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pembangunan daerah. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang berbagai faktor yang dapat memengaruhi pembangunan, seperti kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik.
2. Analisis Risiko: menganalisis potensi dampak dan probabilitas terjadinya masing-masing risiko. untuk memahami tingkat risiko yang terkait dengan setiap potensi masalah dan menentukan prioritas dalam pengelolaan risiko.
3. Evaluasi Risiko: risiko yang diidentifikasi dapat diterima atau tidak. Hal ini melibatkan perbandingan antara tingkat risiko dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Risiko yang tidak dapat diterima perlu ditangani lebih lanjut.
4. Monitoring dan Evaluasi: Manajemen risiko pembangunan daerah harus bersifat dinamis dan terus-menerus dipantau dan dievaluasi.

Untuk menjamin ketercapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian berkelanjutan dan partisipatif yang dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko. Pengendalian dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan melalui jangka menengah dan jangka pendek daerah kepada Bupati/Kepala Daerah.

Gambar 6.2.1
Kerangka Pengendalian RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045



Sumber: Hasil Olahan, 2024/Adopsi RPJPN Tahun 2025-2045

a. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, sinkronisasi regulasi serta perwujudan cita-cita dalam RPJPD kepada dokumen perencanaan turunannya serta meningkatkan kualitas desain proyek prioritas daerah. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah, meliputi: 1) RPJMD Kabupaten Serang dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Serang; 2) Kesiapan program/proyek prioritas pembangunan daerah; 3) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan 4) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya). Pengendalian jangka pendek meliputi: 1) RKPD Kabupaten Serang dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Serang; 2) kesiapan program/proyek prioritas pembangunan daerah; 3) konsistensi perencanaan dan penganggaran; 4) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

b. Pengendalian pelaksanaan

Pengendalian pelaksanaan pada tahap ini bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan jangka menengah dan jangka pendek, meliputi: 1) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah; 2) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; 3) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah dan 4) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama perangkat daerah yang mendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Serang.

Adapun beberapa aspek yang mungkin dapat menghambat Pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya Bencana Alam dalam skala Nasional;
2. Terjadinya Bencana Non Alam yang dapat mempengaruhi aktivitas Pembangunan Daerah (Pandemi, Bencana Teknologi dan bencana Non Alam lainnya);
3. Risiko Fiskal Daerah;
4. Kondusifitas Politik, Ketertiban dan Ketentraman;
5. Perencanaan Pembangunan yang tidak selaras dengan kebijakan pelaksanaan.

6.2.2 Pembiayaan Pembangunan Daerah

Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD) maupun non pemerintah secara kolaboratif melalui skema kerjasama yang inovatif, integratif dan tepat sasaran salah satunya melalui model kerjasama *Penta-Helix*. Kolaborasi dalam konsep *Penta-Helix* merupakan kegiatan kerjasama antar pemerintah dan berbagai unsur dari *Academic, Business, Community, Government*, dan Media atau dikenal sebagai ABCGM. Peningkatan kualitas belanja daerah dan pembiayaan prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan tahapan pembangunan daerah menjadi salah satu kebijakan dalam mencapai sasaran pembangunan daerah. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Serang juga dapat memanfaatkan skema pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pinjaman, hibah dan penerbitan Surat Berharga Daerah, serta memanfaatkan sumber dan skema pembiayaan inovatif.

6.2.3 Mekanisme Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah maupun non pemerintah melalui model kerjasama *Penta-Helix* meliputi unsur *Academic, Business, Community, Government*, dan Media. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, pemerintah perlu melakukan intervensi atau kebijakan yang mendorong

mekanisme insentif yang baik untuk mengakselerasi percepatan pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk unsur pemerintah, mekanisme insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja Perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pembiayaan, pencapaian indikator-indikator kinerja utama, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, mekanisme pemberian insentif dapat berupa penghargaan, dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6.2.4 Mekanisme Perubahan dan Komunikasi Publik

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang daerah, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan termasuk data statistik pemerintah dan swasta pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah daerah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan daerah. Prinsip dasar komunikasi

publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam. Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan non pemerintah. Komunikasi kepada Perangkat Daerah dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar Perangkat Daerah dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan daerah. Sedangkan komunikasi kepada non pemerintah seperti swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

BUPATI SERANG,

RANIPATU CHASANAH